



**WALIKOTA BIMA**

**PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA BIMA TAHUN 2018**



**WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2018;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun, yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode tahunan, dalam rangka mengimplementasikan target kinerja Tahun 2018 sebagai bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Pemerintah Daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
18. Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);

✓ 2 ✓

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Walikota adalah Walikota Bima.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

### Pasal 2

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bima dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- 2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I   Pendahuluan

BAB II   Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB III  Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV  Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V   Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

BAB VI  Penutup

- 3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Pasal 3

- 1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun dukungan dari Pemerintah serta program prioritas yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 2) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima dalam penyusunan program dan kegiatan Tahun 2018.

### Pasal 4

- 1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja semesteran dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda Litbang) dan Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya semester yang berkenaan.
- 3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

### Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima Tahun 2018.

### Pasal 6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dapat dilakukan perubahan

apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

**Pasal 7**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 23 MEI 2017

WALIKOTA BIMA, *N*  
  
M. QURAIH H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 23 MEI 2017

PI. SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BIMA,  
  
*Mukhtar*  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2017 NOMOR 350

*2*



**DAFTAR ISI**

**Daftar Isi**

**Daftar Gambar**

**Daftar Grafik**

**Daftar Tabel**

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.4. Hubungan Antar Dokumen .....	6
1.5. Metodologi .....	7
1.6. Sistematika Dokumen RKPD .....	12

**BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU  
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	13
2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis .....	13
2.1.1.1. Kondisi Administrasi dan Geografis.....	13
2.1.1.2. Topografi	15
2.1.1.3. Klimatologi.....	16
2.1.1.4. Geologi....	18
2.1.1.5. Hidrologi	19
2.1.1.6. Kondisi Demografis.....	20
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	25
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	25
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	29
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	33
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib .....	33
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan.....	63
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	69
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	69
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	70
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi.....	75
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	77
2.1.5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah .....	79

2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD .....	80
2.2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD .....	80
2.2.2.	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD .....	293
2.3.	Permasalahan Pembangunan.....	350
<b>BAB III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	355
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Makro Kota Bima .....	355
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	359
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	360
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	362
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima .....	375
4.2.	Strategi dan Kebijakan RKPD 2018 .....	393
4.2.1.	Strategi dan Kebijakan Pengurangan Pengangguran.....	393
4.2.2.	Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang .....	393
4.2.3.	Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan.....	394
4.2.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi.....	394
4.2.5.	Adaptasi Pilar Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs).....	395
4.2.6.	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan	396
4.3.	Pendekatan RKPD Kota Bima Tahun 2018.....	396
4.3.1.	Pendekatan Tematik-Holistik.....	396
4.3.2.	Pendekatan Integratif .....	400
4.4.	Prioritas Pembangunan Daerah .....	401
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH .....</b>	<b>410</b>
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>588</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD	7
Gambar 1.2.	Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	11
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kota Bima	15
Gambar 2.2.	Geomorfologi Kota Bima	19
Gambar 2.3.	Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	27
Grafik 2	Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2012-2016	28
Grafik 3	Pertumbuhan (%) PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016	29
Grafik 4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2012-2016	304
Grafik 5	Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2013-2016	307
Grafik 6	Persentase Balita Gizi Buruk	308
Grafik 7	PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016	318

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kota Bima	13
Tabel 2.2.	Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	15
Tabel 2.3.	Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima	16
Tabel 2.4.	Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2015	17
Tabel 2.5.	Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per Bulan di Kota Bima Tahun 2015	17
Tabel 2.6.	Sungai di Kota Bima	19
Tabel 2.7	Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015	20
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2015	20
Tabel 2.9.	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015	22
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2016	23
Tabel 2.11.	Jumlah Penduduk Usia 51 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2015	24
Tabel 2.12.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2015	24
Tabel 2.13.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010	25
Tabel 2.14.	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012-2016	26
Tabel 2.15.	Nilai Inflasi Rata-rata Kota Bima Tahun 2012-2016	28
Tabel 2.16.	PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2012-2016	28
Tabel 2.17.	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 2011-2015	29
Tabel 2.18.	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2012-2016	30
Tabel 2.19.	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2012 - 2016	30
Tabel 2.20.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2012 - 2016 Kota Bima	31

Tabel 2.21.	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tahun 2013 – 2016	31
Tabel 2.22.	Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2012-2016	32
Tabel 2.23.	Angka Harapan Hidup Kota Bima	32
Tabel 2.23.	Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2016	32
Tabel 2.24.	Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2011 – 2015	33
Tabel 2.25.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2012-2016	34
Tabel 2.26.	Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2012 -2016	34
Tabel 2.27.	Rasio Guru/Murid di Kota Bima 2012-2016	35
Tabel 2.28.	Rasio Guru per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2013-2016	35
Tabel 2.29.	Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	36
Tabel 2.30.	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Bima Tahun 2012-2016	37
Tabel 2.31.	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016	37
Tabel 2.32.	Jumlah Dokter di Kota Bima Tahun 2012–2016	38
Tabel 2.33.	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	38
Tabel 2.34.	Jumlah Tenaga Medis di Kota Bima Tahun 2011-2015	38
Tabel 2.35.	Jumlah Tenaga Medis (Perawat, Bidan) Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	39
Tabel 2.36.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2012-2016	39
Tabel 2.37.	Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	39
Tabel 2.38.	Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2014-201	40
Tabel 2.39.	Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	40
Tabel 2.40.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2012-2016	40
Tabel 2.41.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	40

Tabel 2.42.	Panjang Jalan Berdasarkan Kelas di Kota Bima tahun 2016	41
Tabel 2.43.	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Bima Tahun 2012-2016	41
Tabel 2.44.	Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	41
Tabel 2.45.	Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016	42
Tabel 2.46.	Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2016 Kota Bima	42
Tabel 2.47.	Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2016	42
Tabel 2.48.	Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2016	43
Tabel 2.49.	Rasio Tempat Ibadah Tahun 2016	43
Tabel 2.50.	Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2016	43
Tabel 2.51.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2015-2016	43
Tabel 2.52.	Tempat Pemakaman Umum Tahun 2016	44
Tabel 2.53.	Jumlah Rumah Layak Huni Kota Bima Tahun 2014-2016	44
Tabel 2.54.	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016	45
Tabel 2.55.	Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016	45
Tabel 2.56.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2015-2016	46
Tabel 2.57.	Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Menurut Kecamatan Tahun 2016	46
Tabel 2.58.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2012-2016	46
Tabel 2.59.	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2016	47
Tabel 2.60.	Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012-2016	48
Tabel 2.61.	Rasio Ijin Trayek Tahun 2012-2016	48
Tabel 2.62.	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Bima Tahun 2012-2016	48
Tabel 2.63.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Bima Tahun 2012-2016	49
Tabel 2.64.	Luas Lahan Bersertifikat (Ha) Kota Bima Tahun 2016	49

Tabel 2.65.	Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2016	50
Tabel 2.66.	Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Bima Tahun 2012-2016	50
Tabel 2.67.	Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur di Kota Bima Tahun 2012-2016	51
Tabel 2.68.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016	51
Tabel 2.69.	Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Bima Menurut Luas wilayah Tahun 2016	51
Tabel 2.70.	Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2016	52
Tabel 2.71.	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2016	52
Tabel 2.72.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2016	52
Tabel 2.73.	Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2016	53
Tabel 2.74.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013-2016	54
Tabel 2.75.	Rasio KDRT di Kota Bima Tahun 2014-2016	54
Tabel 2.76.	Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2015	54
Tabel 2.77.	Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Bima Tahun 2011-2015	55
Tabel 2.78.	Rasio Akseptor KB di Kota Bima Tahun 2011- 2015	55
Tabel 2.79.	Pelayanan Umum Urusan Sosial di Kota Bima Tahun 2013 - 2015	55
Tabel 2.80.	Persentase Koperasi Aktif di Kota Bima Tahun 2012-2016	57
Tabel 2.81.	Jumlah UKM non BPR/LKM di Kota Bima Tahun 2012 - 2016	57
Tabel 2.82.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Prajati Kota Bima Tahun 2012-2016	58
Tabel 2.83.	Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Bima Tahun 2011-2015	59
Tabel 2.84.	Rasio Pos Siskamling di Kota Bima Tahun 2012-2016	59
Tabel 2.85.	Jaringan Komunikasi Tahun 2013-2016	61
Tabel 2.86.	Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2015-2016	62
Tabel 2.87.	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Bima Tahun 2013-2016	62
Tabel 2.88.	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2013-2016	62



Tabel 2.89.	Jumlah Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2012-2016	63
Tabel 2.90.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2012-2016	63
Tabel 2.91.	Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Irigasi di Kota Bima Tahun 2015	64
Tabel 2.92.	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima Tahun 2015	64
Tabel 2.93.	Produksi Ikan Menurut Sub Sektor dan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015	65
Tabel 2.94.	Jumlah Perusahaan Industri dan Kerajinan Menurut Jenis Perusahaan dan Nilai Produksi di Kota Bima Tahun 2015	67
Tabel 2.95.	Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kelompok Industri Formal dan Non Formal di Kota Bima Tahun 2015	68
Tabel 2.96.	Angka Konsumsi RT per Kapita di Kota Bima Tahun 2011-2015	69
Tabel 2.97.	Persentase Konsumsi RT non-Pangan di Kota Bima Tahun 2011-2015	70
Tabel 2.98.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2011-2015	70
Tabel 2.99.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2016	70
Tabel 2.100.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2016	71
Tabel 2.101.	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW di Kota Bima Tahun 2012-2016	71
Tabel 2.102.	Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d 2014 Kota Bima	71
Tabel 2.103.	Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2010 s.d 2014 Kota Bima	130
Tabel 2.104	Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kota Bima Tahun 2011- 2015	72
Tabel 2.105.	Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Bima Tahun 2010-2014	72
Tabel 2.106.	Jenis dan Jumlah Bank di Daerah Kota Bima Tahun 2012-2016	73
Tabel 2.107.	Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Daerah Kota Bima	73
Tabel 2.108.	Sumber Air Bersih bagi Rumah Tangga	73
Tabel 2.109.	Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Bima	74

Tabel 2.110.	Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima	74
Tabel 2.111.	Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Bima	75
Tabel 2.112.	Angka Kriminalitas Kota Bima	75
Tabel 2.113.	Lama Proses Perijinan Kota Bima	76
Tabel 2.114.	Jumlah & Macam Insentif Pajak/ Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2015-2016	77
Tabel 2.115.	Jumlah Kelurahan Swasembada Kota Bima	77
Tabel 2.116.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2016 (Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	77
Tabel 2.117.	Rasio Ketergantungan Tahun 2012-2016 Kota Bima	78
Tabel 2.118.	Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah	79
Tabel 2.119.	Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2017	81
Tabel 2.120.	Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima Tahun Anggaran 2017	91
Tabel 2.121.	Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2017	108
Tabel 2.122.	Output Kegiatan pada Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	111
Tabel 2.123.	Output Kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	112
Tabel 2.124.	Output Kegiatan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	112
Tabel 2.125.	Output Kegiatan pada Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjon	113
Tabel 2.126.	Output Kegiatan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	115
Tabel 2.127.	Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	116
Tabel 2.128.	Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	117
Tabel 2.129.	Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	118
Tabel 2.130.	Output Kegiatan pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	119

Tabel 2.131.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017	121
Tabel 2.132.	Program/Kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 201	124
Tabel 2.133.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan yang Dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017	126
Tabel 2.134.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bima Tahun 2017	128
Tabel 2.135.	Capaian Kinerja Satpol PP Kota Bima Tahun 2017	131
Tabel 2.136.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2017	131
Tabel 2.137.	Capaian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2017	135
Tabel 2.138.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Tahun 2017	137
Tabel 2.139.	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2017	138
Tabel 2.140.	Program dan Kegiatan yang didukung oleh pendanaan Non APBD	141
Tabel 2.141.	Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan TA 2017	142
Tabel 2.142.	Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017	145
Tabel 2.143.	Capaian Kinerja Badan PP dan KB Tahun 2017	150
Tabel 2.144.	Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2017	153
Tabel 2.145.	Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2017	157
Tabel 2.146.	Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2017	159
Tabel 2.147.	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2017	160
Tabel 2.148.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup pada Kantor Kecamatan Tahun 2017	165

Tabel 2.149.	Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017	168
Tabel 2.150.	Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017	172
Tabel 2.151.	Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017	174
Tabel 2.152.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana	180
Tabel 2.153.	Program/ Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Bima Tahun Anggaran 2017	182
Tabel 2.154.	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017	186
Tabel 2.155.	Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2017	187
Tabel 2.156.	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017	190
Tabel 2.157.	Persentase Koperasi Aktif di Kota Bima 2013-2017	191
Tabel 2.158.	Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM	192
Tabel 2.159.	Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM	194
Tabel 2.160.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima Tahun 2017	196
Tabel 2.161.	Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2017	200
Tabel 2.162.	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017	201
Tabel 2.163.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desapada Kantor Kecamatan Tahun 2017	205
Tabel 2.164.	Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2017	207
Tabel 2.165.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2017	209

Tabel 2.166.	Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima	211
Tabel 2.167.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kearsipan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Tahun 2017	211
Tabel 2.168.	Capaian Kinerja Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima	213
Tabel 2.169.	Program/ Kegiatan Urusan Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2017	213
Tabel 2.170.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017	218
Tabel 2.171.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017	219
Tabel 2.172.	Penyerapan anggaran per program dan kegiatan tahun 2017	223
Tabel 2.173.	Pencapaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2017	228
Tabel 2.174.	Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017	231
Tabel 2.174.	Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2017	232
Tabel 2.175.	Capaian kinerja Urusan Pilihan Perdagangan Tahun Anggaran 2017	233
Tabel 2.176.	Program/ Kegiatan Urusan Industri Kota Bima Tahun Anggaran 2017	234
Tabel 2.177.	Capaian kinerja Urusan Pilihan Perindustrian Tahun Anggaran 2017	236
Tabel 2.178.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2017	238
Tabel 2.179.	Daftar Penerimaan ZIS di Kota Bima Tahun 2014-2017	247
Tabel 2.180.	Daftar Perolehan nilai MTQ Kota Bima selama Tahun 2014-2017	248
Tabel 2.181.	Daftar Nilai SAKIP Kota Bima selama Tahun 2013-2016	248
Tabel 2.182.	Daftar Nilai LPPD Kota Bima selama Tahun 2013-2015	249
Tabel 2.183.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2017	252
Tabel 2.184.	Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan RasanaE Barat Tahun 2017	256
Tabel 2.185.	Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi	260

	Pemerintahan pada Kantor Kecamatan RasanaE Timur Tahun 2017	
Tabel 2.186.	Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Asakota Tahun 2017	263
Tabel 2.187.	Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Mpunda Tahun 2017	265
Tabel 2.188.	Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Raba Tahun 2017	268
Tabel 2.189.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima Tahun 2017	270
Tabel 2.189.	Program/ Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017	276
Tabel 2.190.	Output Program/Kegiatan Perencanaan Sektor Strategis	278
Tabel 2.191.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD Kota Bima Tahun 2017	280
Tabel 2.192.	Capaian Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017	287
Tabel 2.193.	Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima Tahun 2017	289
Tabel 2.194.	Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017	293
Tabel 2.195.	Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian	294
Tabel 2.196.	Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2017	294
Tabel 2.197.	Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2017	294
Tabel 2.198.	Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017	295
Tabel 2.199.	Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017	295
Tabel 2.200.	Capaian Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2014-2017	297
Tabel 2.201.	Capaian Kinerja Rasio Rumah Ibadah Tahun 2014-2017	298
Tabel 2.202.	Capaian Kinerja Jumlah Konflik SARA yang terjadi di Kota Bima	299
Tabel 2.203.	Capaian Kinerja Persentase Nilai Budaya yang ditinggalkan	300
Tabel 2.204.	Daftar tradisi yang masih lestari di Kota Bima	300
Tabel 2.205.	Capaian Kinerja Rata-rata Lama Sekolah	302

Tabel 2.206.	Capaian Kinerja Rata-Rata Nilai UN Tahun 2017	303
Tabel 2.207.	Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2017	304
Tabel 2.208.	Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2012-2015	305
Tabel 2.209.	Capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2014-2015	306
Tabel 2.210.	Capaian Kinerja Angka Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2016	309
Tabel 2.211.	Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan	309
Tabel 2.212.	Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	311
Tabel 2.213.	Rumah Layak Huni yang Dibangun Tahun 2017	311
Tabel 2.214.	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Bersanitasi	312
Tabel 2.215.	Realisasi Kinerja Indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi	313
Tabel 2.216.	Capaian Kinerja Lama Proses Perijinan di Kota Bima	316
Tabel 2.217.	PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2012- 2015	320
Tabel 2.218.	Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2017	320
Tabel 2.219.	Capaian Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2013-2017	321
Tabel 2.220.	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	323
Tabel 2.221.	Persentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	324
Tabel 2.222.	Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Tepian Air yang Tertata	326
Tabel 2.223.	Capaian Kinerja Indeks Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015-2017	327
Tabel 2.224.	Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2013-2018	329
Tabel 2.226.	Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	350
Tabel 3.1.	Proyeksi Nilai PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan ekonomi Tahun 2014-2018	356
Tabel 1.2.	Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012-2015 Kota Bima	357
Tabel 3.3.	ICOR Kota Bima dan Nasional tahun 2011-2015	358
Tabel 3.4.	Proyeksi ICOR tahun 2017-2018	358
Tabel 3.5.	Angkatan kerja Kota Bima tahun 2013-2015	359
Tabel 3.6.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2011- 2015	359
Tabel 3.7.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2016- 2019	361

Tabel 3.8.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2016 – 2019	372
Tabel 3.9.	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bima Tahun 2016 – 2019	373
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bima 2013 – 2018	376
Tabel 4.2.	Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016 dan Target Indikator Kinerja Tahun 2017-2018	378
Tabel 4.3.	Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018	381
Tabel 4.4.	Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018	384
Tabel 4.5.	Strategi dan Kebijakan Pengurangan Pengangguran	393
Tabel 4.6.	Kebijakan dan Startegi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah	394
Tabel 4.7.	Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan	394
Tabel 4.8.	Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	395
Tabel 4.9.	Pilar dan Tujuan SDGs	395
Tabel 4.10.	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan	396
Tabel 4.11.	Program Prioritas RKPd Kota Bima Tahun 2018	403
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Kota Bima	411



# BAB I

## PENDAHULUAN

---

---

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi lima pendekatan yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom-up*).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 merupakan akhir perencanaan jangka menengah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 yang telah direviu berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2016, dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya. Dalam proses penyusunannya, RKPD memperhatikan isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD, serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkauan aspirasi secara bertahap melalui musrenbang yang secara partisipatif dilakukan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan Kota yang selanjutnya diformulasikan melalui musrenbang Provinsi.

Penyusunan dokumen RKPD harus terintegrasi dengan prioritas pembangunan pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat. Mengingat Peraturan Walikota tentang review RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan, tetapi belum menyesuaikan dengan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah, maka penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2018 berpedoman pada RPJMD berkenaan, RKP, Program Strategis Nasional dan Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017.

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu

proses penyusunan RKPD dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah. Dalam sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan sebagai berikut:

1. RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.
3. Dari segi kerangka waktu, penyusunan dokumen RKPD harus diselesaikan setiap bulan Mei, sedangkan dokumen APBD harus sudah disyahkan paling lambat 1 Desember.
4. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2018 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah tahun 2018 dalam rangka untuk mensinergikan arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan-kebutuhan tahunan dari berbagai stakeholders pembangunan.

Adapun tujuan penyusunan RKPD secara spesifik adalah sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian Walikota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Pagu Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan APBD harus mengacu pada dokumen RKPD. Sedangkan fungsi RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

- 2) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- 3) Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;
- 4) Menjadi dasar pedoman dalam penyusunan KUA, PPAS, RAPBD dan APBD;
- 5) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;
- 6) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
- 7) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimum dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;
- 8) Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan dalam penyusunan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat;
- 9) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan**

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2018, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun (RKP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 18) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
- 19) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 88);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
- 21) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 103);
- 22) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
- 23) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
- 24) Peraturan Walikota Bima Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 257);

- 25) Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 269);

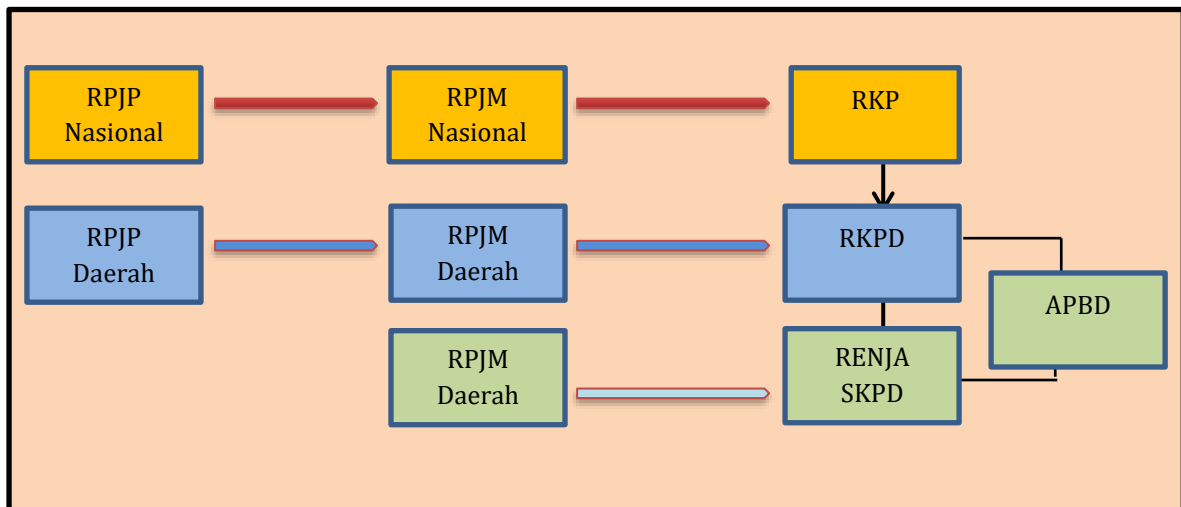
#### **1.4. Hubungan Antar Dokumen**

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2018 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disebut RAPBD.

Substansi RKPD memuat program dan kegiatan SKPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi SKPD dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD).

Proses perencanaan dilakukan menurut wilayah yang berbeda, menurut kurun waktu yang berbeda dan menurut pendekatan yang berbeda, namun tetap dalam kerangka tujuan perencanaan nasional. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah memiliki hubungan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan RKPD Kota Bima Tahun 2018 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, serta mengacu pada Peraturan Walikota Bima Nomor 11 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018. Hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan dapat dijelaskan dalam gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan OPD

## 1.5. Metodologi

### 1.5.1. Pendekatan Penyusunan RKPD

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, top down dan bottom up.

#### a. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan berbasis kinerja)

Dokumen RKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RKPD sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan RKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disepakati dalam Musrenbang RKPD. Penyusunan RKPD sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan.

Pendekatan teknokratis bermakna jika RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Review menyeluruh tentang kinerja pembangunan tahun lalu.
2. Rumusan status, kedudukan kinerja penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah masa kini.
3. Rumusan peluang dan tantangan kedepan yang mempengaruhi penyusunan RKPD.
4. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan.

5. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fisik daerah).
6. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja.
7. Tolak ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal.
8. Tolak ukur dan target kinerja keluaran.
9. Tolak ukur dan target kinerja hasil.
10. Pagu indikatif program dan kegiatan.
11. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya.
12. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.

**b. Pendekatan Demokratis dan Partisipatif**

Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna jika RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan RKPD.
2. Kesetaraan antara pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan.
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
4. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal.
5. Rasa memiliki masyarakat terhadap RKPD
6. Pelibatan media.
7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD yang berkualitas dari segi penerapan perencanaan partisipatif.
8. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan dan prioritas program.

**c. Pendekatan politis**

Pendekatan politis bermakna jika RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:



1. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi, misi dan program kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah.
2. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RKPD
3. Jaring aspirasi masyarakat (reses) oleh DPRD merupakan bagian integral dari proses penyusunan RKPD.
4. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RKPD.
5. Pembahasan terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD yang telah ditetapkan akan mengikat semua pihak sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD.

#### **d. Pendekatan Bottom-up**

Pendekatan bottom-up bermakna jika RKPD memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.
2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah.
3. Mempertimbangkan hasil forum SKPD.

#### **e. Pendekatan Top-Down**

Pendekatan Top-down bermakna jika RKPD memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Sinergi dengan RKP dan Renja K/L.
2. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD dan RPJPD.
3. Sinergi dan konsistensi dengan RTRW.
4. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem.
5. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals (MDGs), sustainable development, pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan sebagainya.

#### **1.5.2. Tahapan dalam Proses Penyusunan RKPD**

Secara garis besar tahapan dalam proses penyusunan RKPD dapat dibagi dalam delapan tahapan utama, yaitu:

Tahap 1	Persiapan dan pengorganisasian para pemangku kepentingan	Pada tahap ini dilakukan orientasi mengenai RKPD, identifikasi para pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses penyusunan RKPD, pembentukan Tim penyusun RKPD, penyusunan Rencana Kerja penyiapan dokumen, pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan daftar isi RKPD.
Tahap 2	Penyusunan rancangan awal RKPD	Tahapan ini mencakup kegiatan review RPJMD, review usulan program dan kegiatan SKPD tahun lalu dan prioritas untuk tahun rencana, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan terkait, menyusun dokumen rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.
Tahap 3	Penyusunan rancangan Renja SKPD	Tahapan ini meliputi kegiatan persiapan penyusunan, kegiatan analisis dan pengkajian dokumen terkait, dan kegiatan penyusunan Rancangan Renja SKPD.
Tahap 4	Penyusunan rancangan RKPD	Pada tahap ini dilakukan penilaian dan penambahan atas rancangan Renja SKPD yang disampaikan Kepala SKPD kepada Bappeda, pengintegrasian rancangan Renja SKPD ke dalam Rancangan Awal RKPD untuk menjadi Rancangan RKPD, pembahasan dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan dan pertimbangan bagi rancangan RKPD, penyiapan ringkasan Rancangan RKPD untuk sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tahunan daerah, dan penyampaian tembusan Rancangan RKPD kepada Bappenas dan Bappeda Provinsi sebagai masukan dalam penyusunan RKP nasional dan RKPD provinsi.
Tahap 5	Musrenbang	Tahapan ini merupakan pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan, melalui pelaksanaan Musrenbang tingkat

		kelurahan, tingkat kecamatan. Forum SKPD/gabungan SKPD Kota, Musrenbang Kota, Forum SKPD dan Musrenbang Provinsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
Tahap 6	Penyusunan Rancangan Akhir RKP/ Renja SKPD	Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan atas rancangan RKP/ Renja SKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang tahunan daerah dengan tetap memperhatikan rancangan RKP untuk RKP/ Renja Provinsi, dan rancangan RKP/ Renja Provinsi untuk RKP/ Renja Kota.
Tahap 7	Penyiapan dan penetapan peraturan RKP/ Renja SKPD	Pada tahap ini dilakukan penyiapan dan penetapan peraturan Kepala Daerah tentang RKP/ Renja SKPD dan penyiapan serta penetapan peraturan Kepala SKPD untuk RKP/ Renja SKPD.
Tahap 8	Pengintegrasian RKP/ Renja SKPD ke dalam Proses Penganggaran Daerah	Pada tahap ini perlu diterjemahkan ke dalam proses penganggaran melalui penyusunan KUA, PPAS, dan RKA SKPD.



Gambar 1.2. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKP/ Renja

## **1.6. Sistematika Dokumen RKPD**

Dokumen RKPD Kota Bima tahun 2018 ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.4. Hubungan Antar Dokumen
- 1.5. Metodologi
- 1.6. Sistematika Dokumen RKPD

### **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)
- 4.3. Tema Pembangunan

### **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

### **BAB VI PENUTUP**

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

---

**2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah**

**2.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis**

**2.1.1.1. Kondisi Administrasi dan Geografis**

Secara geografis Kota Bima terletak antara 118<sup>o</sup>41'00" - 118<sup>o</sup>48'00" Bujur Timur dan 8<sup>o</sup>30'00" - 8<sup>o</sup>20'00" Lintang Selatan dengan orientasi wilayah berada pada sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kota Bima adalah sebesar 222,25 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

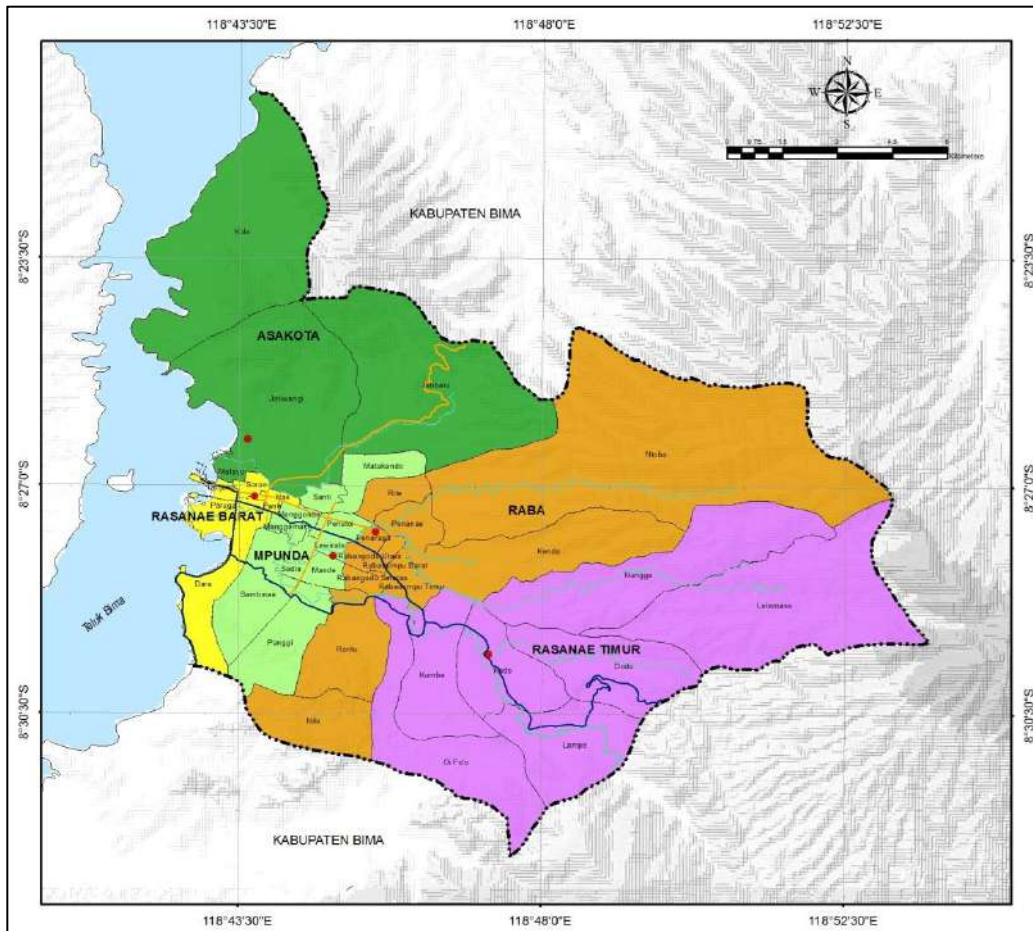
Asakota merupakan kecamatan terluas dengan luas area mencapai 31 persen dari luas Kota Bima. Diurutan kedua ada Kecamatan Rasanae Timur dengan luas area mencapai 28,83 persen, selanjutnya Kecamatan Raba dengan luas sebesar 28,67 persen, Kecamatan Mpunda sebesar 6,88 persen. Sementara itu, Rasanae Barat adalah kecamatan dengan luas area paling kecil yaitu 4,56 persen dari luas Kota Bima.

**Tabel 2.1.  
Luas Wilayah Kota Bima**

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung	0,79
		2. Kel. Paruga	0,91
		3. Kel. SaraE	0,48
		4. Kel. NaE	0,31
		5. Kel. Pane	0,31
		6. Kel. Dara	7,34
Jumlah I			10.14
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae	5,43
		2. Kel. Panggi	3,51
		3. Kel. Monggonao	0,63
		4. Kel. Manggemaci	0,52
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (dalam km <sup>2</sup> )
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
Jumlah II			15,28
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
Jumlah III			63,73
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	22,18
		3. Kel. Jatibaru	19,60
		4. Kel. Kolo	26,49
Jumlah IV			69,03
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	1,52
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. Oi Fo'o	9,20
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel. Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
Jumlah V			64,07
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2016



**Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bima**

### 2.1.1.2. Topografi

#### a. Ketinggian

Wilayah Kota Bima umumnya didominasi oleh dataran rendah dimana daerah yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 9.259 ha atau mencapai 42,62 persen dari luas Kota Bima. Sementara itu luas tanah dengan ketinggian 25-50 m seluas 5.161 ha (23,75%) dan di atas 50 m seluas 7.307 ha (33,63%).

**Tabel 2.2.**  
**Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut**

Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	Luas Tanah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kota Bima (%)
0 - 25	9.259	42,62
25 - 50	5.161	23,75
> 50	7.307	33,63

Jumlah	21.727	100,00
--------	--------	--------

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2017

#### b. Kelerengan

Untuk tahun 2015, Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan datar dengan kelerengan 0-40 persen, yaitu seluas 9.242 ha, kemudian lahan bergelombang seluas 4.994 ha, lahan dengan kemiringan curam seluas 4.534 ha, dan lahan dengan kondisi sangat curam dengan luas 2.957 ha.

**Tabel 2.3.**  
**Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima**

No	Kecamatan	Datar ( 0 - 2 % )	Bergelombang ( 2 - 15 % )	Curam ( 15 - 40 % )	Sangat Curam ( > 40 % )
1	Rasanae Barat	854	35	75	50
2	Mpunda	658	132	563	175
3	Rasanae Timur	2.555	1.793	935	1.024
4	Raba	2.950	1.850	848	627
5	Asakota	2.225	1.184	2.113	1.081
Jumlah		<b>9.242</b>	<b>4.994</b>	<b>4.534</b>	<b>2.957</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

Wilayah Kecamatan Rasanae Timur memiliki kelerengan > 40% mencapai 39,07%. Luas Kecamatan Raba dengan kemiringan diatas 40% mencapai 44,36%. Sebaliknya, Kecamatan Rasanae Barat dan Kecamatan Mpunda didominasi wilayah yang relatif datar dan bergelombang. Sementara itu, 29,91% dari wilayah Kecamatan Asakota memiliki karakteristik kelerengan bergelombang.

#### 2.1.1.3. Klimatologi

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2015 sebesar 117,78 mm/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Desember yaitu 379,4 mm dan terendah pada bulan Agustus dan September, yaitu 0,0 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2015 tercatat 164 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Januari yaitu 30 hari dan terendah pada bulan Agustus dimana tidak terdapat hari hujan.

Kelembaban udara rata-rata pada tahun 2015 sebesar 80%, tertinggi 87% pada Bulan Januari dan terendah 69% pada Bulan Oktober. Temperatur berkisar pada interval antara suhu minimal 20,8°C pada Bulan Agustus dan suhu maksimum 35,2°C pada Bulan Oktober, dengan rata-rata suhu 27,13°C.



**Tabel 2.4**  
**Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Tahun 2017**

Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	337,7	30	35
Pebruari	123,0	19	54
Maret	72,0	15	80
April	79,9	13	74
Mei	158,2	15	61
Juni	103,1	13	53
Juli	20,6	6	73
Agustus	0,0	0	92
September	0,0	1	97
Oktober	19,3	4	92
Nopember	119,7	21	65
Desember	379,4	27	43
Rata-Rata	117,78	14	68,25

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2016

**Tabel 2.5**  
**Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2017**

Bulan	Suhu Udara (°C)			Lembab Nisbi (%)	Tekanan Udara(mb)
	Rata-rata	Max	Min		
1. Januari	27,00	32,50	25,00	87,00	1008,40
2. Pebruari	27,10	33,60	24,70	86,00	1008,40
3. Maret	27,50	33,60	24,20	82,00	1010,20
4. April	27,40	33,10	23,90	82,00	1009,80
5. Mei	27,40	33,00	24,30	83,00	1010,10
6. Juni	26,80	32,10	23,70	85,00	1010,00
7. Juli	25,70	30,50	22,20	79,00	1011,20
8. Agustus	25,40	31,80	20,80	74,00	1012,90
9. September	26,90	32,70	22,90	71,00	1012,60
10. Oktober	28,80	35,20	24,20	69,00	1012,10
11. Nopember	28,30	34,50	24,70	77,00	1000,30
12. Desember	27,30	32,30	24,50	85,00	1008,50
<b>Rata-Rata</b>	<b>27,13</b>	<b>32,91</b>	<b>23,76</b>	<b>80</b>	<b>1009,54</b>

Sumber : Stasiun Meteorologi Muhammad Salahudin Bima, 2017

#### 2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesis dapat dikelompokkan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu:

1. Satuan geomorfologi dataran fluvial.

Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm$  20% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompou, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata - rata 3 meter dan kemiringan lereng rata - rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai

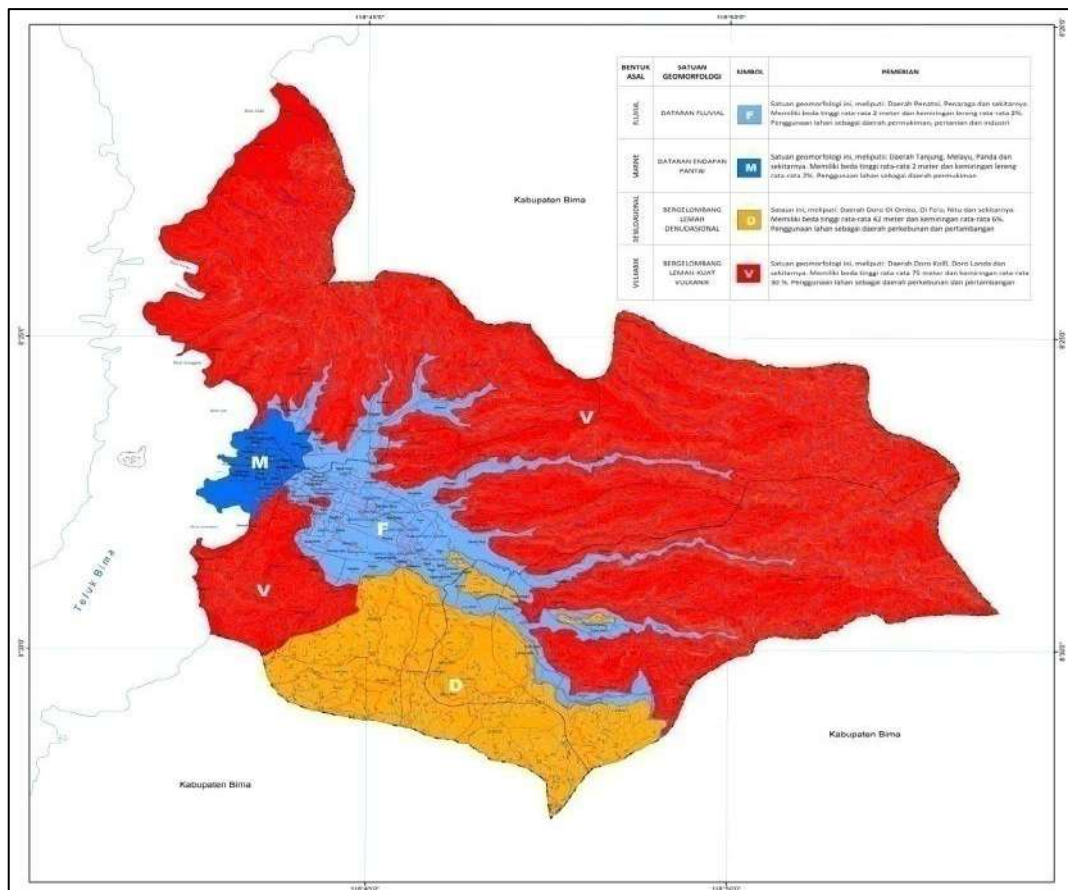
Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm$  10% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayudan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata - rata 2 meter dan kemiringan lereng rata - rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

3. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batugamping koral. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm$  30% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi'ombo, Doro Oi'si,i, Doro Jati Oi'ifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata - rata 42 meter dan kemiringan lereng rata - rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir.

4. Satuan geomorfologibergelombang lemah-kuat vulkanik.

Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati  $\pm$  40% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan geomorfologi bergelombang lemah-kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata - rata 75 meter dan kemiringan lereng rata - rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.



Gambar 2.2. Geomorfologi Kota Bima

#### 2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

Tabel 2.6.  
Sungai di Kota Bima

	Nama Sungai	Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
1	Sungai Lampe	25	30	Rasanae Timur	Rasanae Barat
2	Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur
3	Sungai Nungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
4	Sungai Kendo	15	15	Raba	Rasanae Barat
5	Sungai Ntobo	12	20	Raba	Rasanae Barat
6	Sungai Jatiwangi	16	15	Asakota	Asakota
7	Sungai Romo	2	12	Asakota	Asakota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Bima, 2016

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota.

### 2.1.1.6. Kondisi Demografis

#### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2016 mencapai 163.101 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 80.103 jiwa dan perempuan sebanyak 82.998 jiwa.

**Tabel 2.7.**  
**Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Rasanae Barat	18.233	19.034	37.267
2.	Mpunda	18.827	19.471	38.298
3.	Raba	19.766	20.540	40.306
4.	Rasanae Timur	8.456	8.622	17.078
5.	Asakota	14.821	15.331	30.152
Jumlah Total		80.103	82.998	163.101

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

#### b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Umur

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 46.168 jiwa atau 28,30 %. Sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 109.062 jiwa atau 66,87 % dan kelompok usia non produktif (65 tahun keatas) berjumlah 7.871 jiwa (4,82%).

**Tabel 2.8.**  
**Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2016**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8.124	7.728	15.852
5-9	7.909	7.660	15.569
10-14	7.486	7.261	14.747
15-19	8.331	8.459	16.790
20-24	9.003	9.023	18.026
25-29	6.761	6.744	13.505
30-34	6.084	6.723	12.807
35-39	5.401	5.779	11.180
40-44	5.068	5.795	10.863
45-49	4.309	4.645	8.954

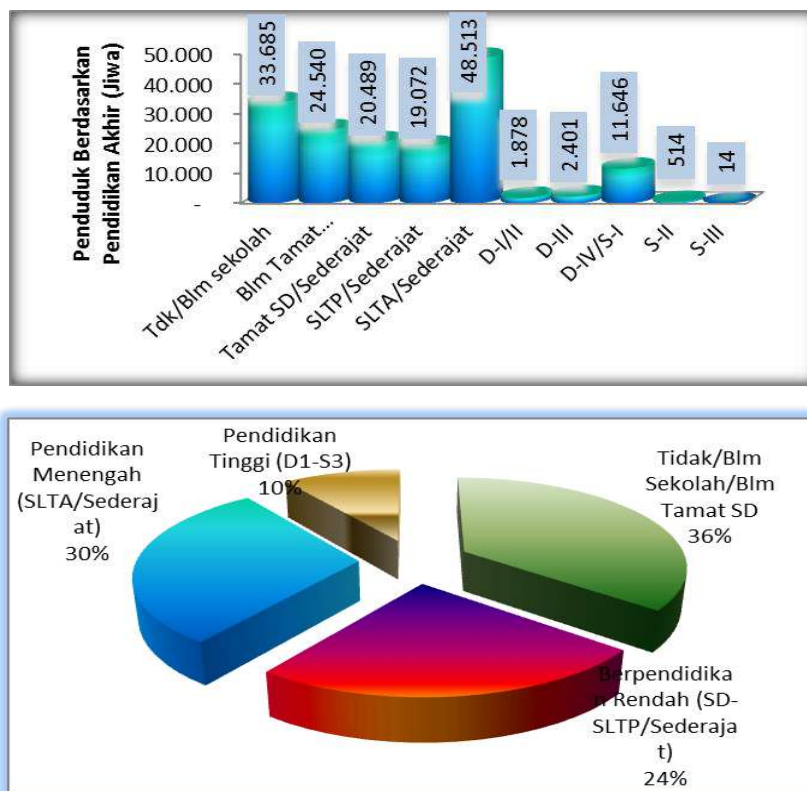
Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
50-54	3.472	3.710	7.182
55-59	2.774	3.125	5.899
60-64	1.789	2.067	3.856
65-69	1.434	1.558	2.992
70-74	944	1.107	2.051
75+	1.214	1.614	2.828
Jumlah	80.103	82.998	163.101

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahui rasio ketergantungan total adalah sebesar 49,54 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 49,54 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 42,33 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 7,21 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2016, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

#### c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, jumlah penduduk Kota Bima tahun 2016 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan SLTA/ sederajat yang mencapai 48.513 jiwa atau sebesar 30 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 24 persen. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya sebesar 10 persen.



**Gambar 2.3. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2017

d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (*density ratio*), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah.

Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.675 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 267 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.9.**  
**Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (jiwa/ km <sup>2</sup> )
1	Rasanae Barat	37.267	10,14	3.675
2	Mpunda	38.297	15,28	2.506
3	Raba	40.307	63,73	632
4	Rasanae Timur	17.078	64,07	267
5	Asakota	30.152	69,03	437
Jumlah		163.101	222,25	734

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

#### e. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah penduduk Kota Bima yang memiliki KTP-Elektronik dan telah melakukan penyerapan/perekaman KTP-Elektronik adalah 92.852 jiwa atau 95.62%. Kepala keluarga di Kota Bima, yang sudah memiliki Kartu Keluarga Nasional sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 38.237 atau 97.38 %. Jumlah pencatatan kelahiran tahun 2016 yaitu sebanyak 52.359 jiwa.

**Tabel 2.10.**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2016**

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk Wajib KTP	97.107
Jumlah Penduduk sudah cetak KTP	92.852
Rasio Penduduk ber-KTP	95,62 %
Jumlah Penduduk ber-akte lahir	52.359
Jumlah KK	39.304
Sudah Cetak KK	38.273
Rasio Kepemilikan KK	97,38 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

#### f. Ketenagakerjaan

Berdasarkan undang - undang ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2016 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 76,867 Jiwa. Angkatan kerja laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah angkatan kerja perempuan. Dari jumlah tersebut, 89,85 persen angkatan kerja dalam kondisi sudah bekerja sedangkan 10,15 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 37,821 Jiwa. Penduduk bukan angkatan kerja didominasi oleh penduduk yang memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga yang besarnya mencapai 59,57 persen,

selebihnya merupakan penduduk yang masih bersekolah sebesar 30,69 persen dan kegiatan lainnya 3,64 persen.

**Tabel 2.11.**  
**Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2016**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA)	55,441	59.247	114,688
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	43.735	33.132	76,867
	Bekerja (%)	87,48	92,97	89,85
	Pengangguran/TPT (%)	12,52	7,03	10,15
3	BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)	11,706	26,115	37,821
	Sekolah (%)	45,22	24,06	30,69
	Mengurus RT (%)	33,91	71,21	59,67
	Lainnya (%)	20,87	4,61	3,64

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2017

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2016 didominasi oleh 4 (empat) sektor lapangan pekerjaan. Penduduk yang bekerja di sektor jasa adalah yang paling dominan yaitu mencapai 31,65 persen. Lapangan pekerjaan selanjutnya pada sektor perdagangan yaitu sebesar 27,41 persen, sektor lain sebesar 16,26 persen, sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan 13,37 persen. Sementara penduduk yang bekerja di sektor Perindustrian tercatat dengan persentasenya hanya 11,32 persen.

**Tabel 2.12.**  
**Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

Lapangan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,61	10,58	13,37
2. Industri Pengolahan	6,12	17,77	11,32
3. Perdagangan Besar, Hotel dan Rumah Makan	17,86	39,27	27,41
4. Jasa Kemasyarakatan, sosial dan Perorangan	32,33	30,80	31,65
5. Lainnya	28,07	1,58	16,26
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

Data di atas menunjukkan bahwa sektor jasa dan perdagangan memang merupakan lapangan pekerjaan dominan bagi penduduk Kota Bima. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika Kota Bima memiliki pandangan ke depan untuk bisa berkembang menjadi Kota Perdagangan dan Jasa sebagaimana Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2013-2018.



Kota Perdagangan dan Jasa memiliki makna sebuah Kota yang bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada aspek perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya. Pengembangan kota perdagangan diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Adapun sebagai Kota Jasa, Kota Bima akan lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik di berbagai bidang yang menunjang sebagai pusat transaksi dan distribusi.

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan seni budaya.

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dilihat dari pertumbuhan PDRB, kinerja ekonomi Kota Bima menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, karena terjadi pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Kota Bima tercatat sebesar 5,60 terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya dan hingga tahun 2016 menjadi 5,78.

Tabel 2.13. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Kategori	2012		2013*		2014**		2015****		2016****	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	329.910,43	16,00	336.300,89	15,44	348.300,89	15,11	362.720,26	14,87	369.683,03	14,33
B Pertambangan dan Penggalian	9.435,46	0,46	8.954,16	0,41	9.541,55	0,41	10.247,07	0,42	10.883,88	0,42
C Industri Pengolahan	76.078,28	3,69	80.022,40	3,67	83.091,96	3,60	86.266,01	3,54	91.305,57	3,54

Kategori	2012		2013*		2014**		2015****		2016****	
	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
D Pengadaan Listrik dan Gas	3.219,54	0,16	4.023,22	0,18	5.624,75	0,24	5.329,26	0,22	6.253,89	0,24
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	797,75	0,04	812,44	0,04	839,68	0,04	860,19	0,04	899,57	0,03
F Konstruksi	193.122,28	9,36	206.177,73	9,47	219.580,18	9,52	234.125,70	9,60	253.666,65	9,83
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	442.759,90	21,47	483.862,68	22,22	519.25259,27	22,52	556.890,99	22,84	601.525,03	23,32
H Transportasi dan Pergudangan	222.056,88	10,77	233.209,92	10,71	246.169,98	10,68	260.664,79	10,69	274.842,66	10,65
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50.255,68	2,44	53.703,74	2,47	57.118,64	2,48	60.993,37	2,50	65.947,50	2,56
J Informasi dan Komunikasi	36.788,75	1,78	38.284,13	1,76	40.903,95	1,77	43.826,09	1,80	47.570,24	1,84
K Jasa Keuangan dan Asuransi	46.608,37	2,26	50.203,07	2,31	53.276,78	2,31	56.748,34	2,33	60.363,84	2,34
L Real Estate	102.889,31	4,99	109.062,67	5,01	115.390,71	5,01	122.808,55	5,04	129.988,46	5,04
M,N Jasa Peahaan	7.231,60	0,35	7.585,39	0,35	8.106,89	0,35	8.524,27	0,35	8.979,99	0,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	233.356,63	11,31	241.203,93	11,08	253.082,08	10,98	262.778,38	10,78	269.722,21	10,46
P Jasa Pendidikan	159.813,13	7,75	167.086,93	7,67	177.858,43	7,71	189.031,70	7,75	200.136,14	7,76
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	72.551,71	3,52	75.729,13	3,48	79.558,07	3,45	83.773,40	3,44	88.707,45	3,44
R,S,T,U Jasa lainnya	75.621,65	3,67	81.321,41	3,73	87.701,70	3,80	92.992,43	3,81	99.127,45	3,84
<b>PDRB</b>	<b>2.062497,35</b>	<b>100</b>	<b>2.177.543,21</b>	<b>100</b>	<b>2.305.405,52</b>	<b>100</b>	<b>2.438.560,80</b>	<b>100</b>	<b>2.579.603,45</b>	<b>100</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

\*) Angka Sememtara ; \*\*\*\*) Angka Sangat Sangat Sementara

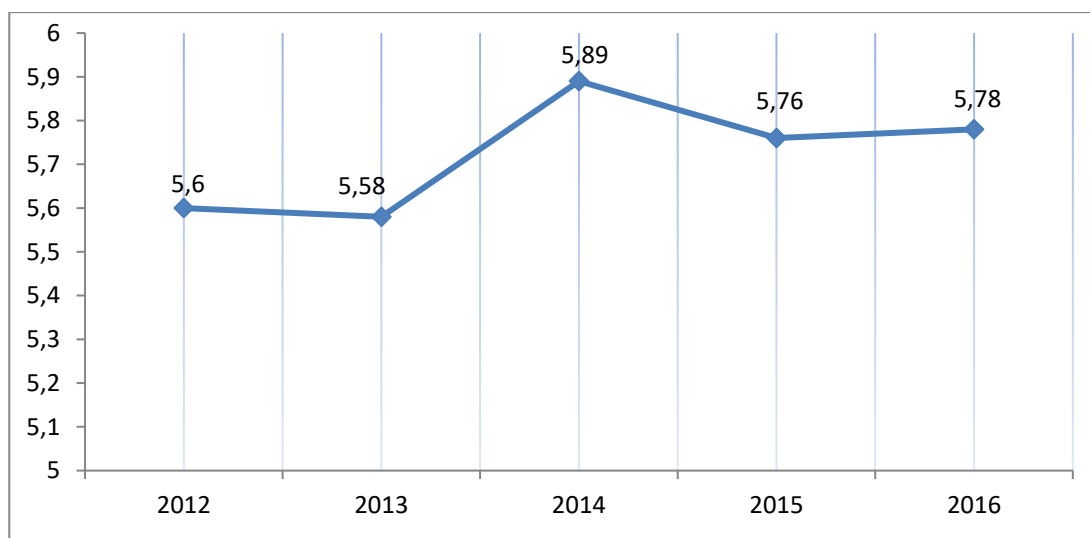
Tabel 1.14. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2012-2016

Kategori	2012	2013	2014	2015****	2016****
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,01	1,94	3,57	4,14	1,92
B Pertambangan dan Penggalian	6,44	(5,10)	6,56	7,39	6,21
C Industri Pengolahan	4,78	5,18	3,84	3,82	5,84
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,43	24,96	39,81	(5,25)	17,35
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,20	1,84	3,35	2,44	4,58

Kategori	2012	2013	2014	2015****	2016****
F Konstruksi	6,03	6,76	6,50	6,62	8,35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,55	9,28	7,32	7,25	8,01
H Transportasi dan Pergudangan	4,52	5,02	5,56	5,88	5,45
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,63	6,86	6,36	6,78	8,12
J Informasi dan Komunikasi	7,65	4,06	6,84	7,14	8,54
K Jasa Keuangan dan Asuransi	8,70	7,71	6,12	6,52	6,37
L Real Estate	5,32	6,00	5,80	6,43	5,85
M,N Jasa Perusahaan	7,37	4,89	6,88	5,15	5,35
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,48	3,36	4,92	3,83	2,64
P Jasa Pendidikan	3,23	4,55	6,45	6,28	5,87
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,87	4,38	5,06	5,30	5,89
R,S,T U Jasa lainnya	7,50	7,54	7,85	6,03	6,60
<b>PDRB</b>	<b>5,60</b>	<b>5,58</b>	<b>5,89</b>	<b>5,76</b>	<b>5,78</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

\*) Angka Sementara ; \*\*\*\*) Angka Sangat Sangat Sementara



Sumber : BPS Kota Bima, 2017

Grafik 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

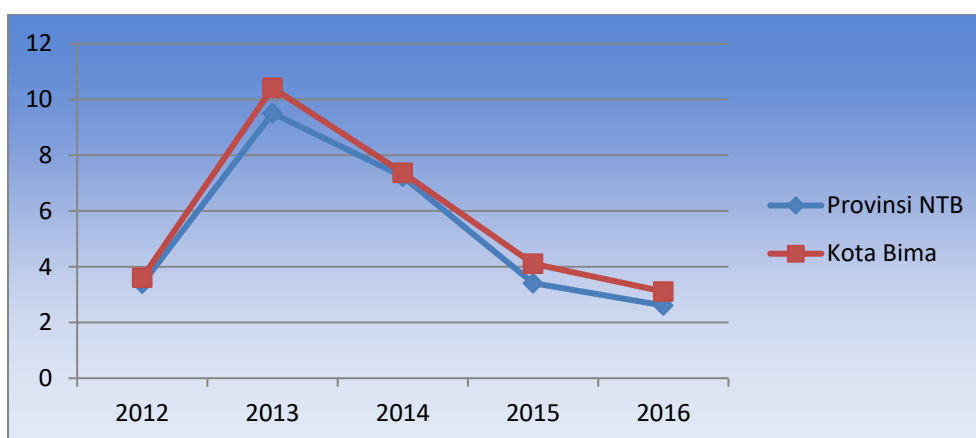
## b. Laju Inflasi

Angka inflasi Kota Bima periode 5 tahun terakhir trennya cenderung menurun. Hingga tahun 2016 inflasi Kota Bima mencapai 3,11 persen. Angka ini masih sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Provinsi NTB yang sebesar 2,61 persen.

Tabel 2.15. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012-2016 Kota Bima

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Provinsi NTB	3,99	9,51	7,23	3,41	2,61
Kota Bima	3,61	10,42	7,37	4,11	3,11

Sumber : BPS Kota Bima, 2017



Grafik 2 Tingkat Inflasi Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2012-2016

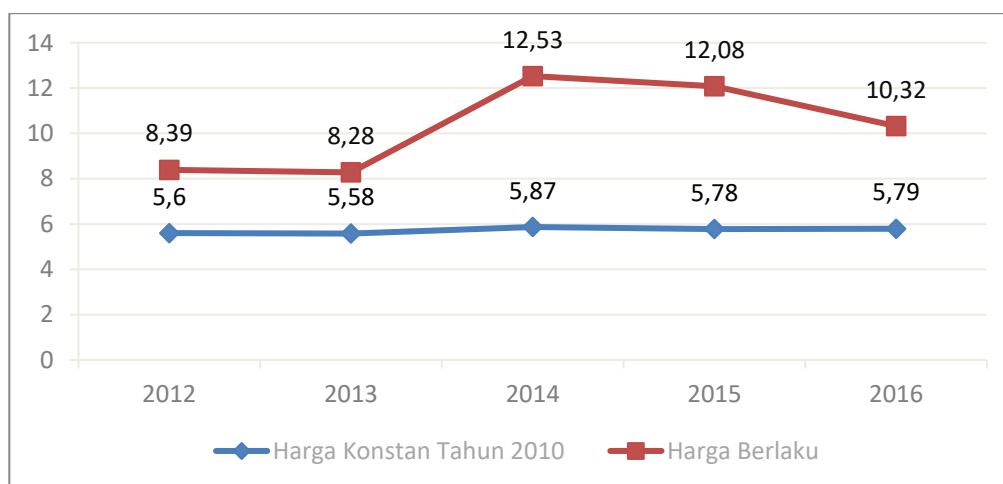
## c. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2012-2016 tumbuh pada kisaran angka 6-10 persen, sementara pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 dalam periode yang sama tumbuh sebesar 3-6 persen.

Tabel 2.16. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015****	2016****
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp)	2.062.497,35	2.177.543,21	2.305.405,52	2.438.560,78	2.579.603,57
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	2.192.206,83	2.373.685,91	2.671.111,92	2.993.901,62	3.302.931,48
Jumlah Penduduk (jiwa)	149.800	153.101	156.400	159.736	163.101
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp/jiwa/Tahun)	13,77	14,22	14,74	15,27	15,82
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa/Tahun)	14,63	15,50	17,08	18,74	20,25

Sumber : BPS Kota Bima, 2017



Grafik 3. Pertumbuhan (%) PDRB Per Kapita Tahun 2012-2016

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

#### a. Pendidikan

##### 1. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kota Bima mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Pada tahun 2015, AMH penduduk Kota Bima sudah mencapai 96,40 persen, artinya masih terdapat kurang dari 3,60 persen penduduk yang buta huruf. Pencapaian AMH Kota Bima ternyata merupakan pencapaian angka melek huruf penduduk tertinggi di tingkat Provinsi NTB. Angka Melek Huruf NTB mencapai 86,96 persen pada tahun 2015.

**Tabel 2.17.**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Bima Tahun 2011 - 2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	102.121	103.745	105.407	111.538	114.794
2	Angka melek huruf (%)	83,77	93,80	95,91	96,42	96,40
3	Angka buta huruf (%)	6,23	6,20	4,09	3,58	3,60

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

##### 2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani, rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Bima selalu meningkat selama beberapa periode terakhir. Pada tahun 2012 rata-rata lama sekolah Kota Bima tercatat sebesar 9,3 tahun, meningkat menjadi 10,13 tahun pada tahun 2016. Data juga menunjukkan

bahwa rata-rata lama sekolah Kota Bima masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka Provinsi NTB yang tercatat sebesar 9,25 tahun pada periode 2016.

Tabel 2.18. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2012-2016

Rata-Rata Lama Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016
Kota Bima	9,3	9,46	9,58	9,96	10,13
Provinsi NTB	8,61	9,04	9,04	9,05	9,25

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

### 3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.19. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	15.461	18.075	19.259	18.702	17.379
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	APM SD/MI (%)	92,49	94,37	100,56	96,66	97,88
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.134	9.209	9.240	9.368	9.609
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	APM SMP/MTs (%)	87,40	116,69	117,08	117,52	105,12
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	8.375	11.220	10.790	10.154	11.688
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.302	9.572	11.433	9.572	9.960
3.3.	APM SMA/MA/SMK (%)	90,03	117,22	94,38	105,02	116,18

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

### 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.20. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2012-2016 Kota Bima

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	18.140	19.945	20.827	18.702	17.379
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	APK SD/MI (%)	108,52	104,13	108,75	97,64	98,87
2	SMP/MTs					
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	9.333	13.133	12.527	9.368	9.609
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	APK SMP/MTs (%)	114,34	166,41	158,73	118,70	106,18
3	SMA/MA/SMK					
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	11.623	13.621	13.616	10.154	11.688
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	9.302	9.572	11.433	9.572	9.960
3.3.	APK SMA/MA/SMK (%)	124,95	142,31	119,09	106,08	117,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

## 5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Tabel 2.21. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tahun 2013-2016

No	Tingkat Pendidikan	Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)				APT (%)			
		2013	2014	2015 <sup>*)</sup>	2016 <sup>*)</sup>	2013	2014	2015	2016
1.	SD/MI	2.730	2.710	2.813	2.949	1,74	1,66	2,04	2,12
2.	SMP/MTs	2.901	2.878	2.990	2.831	1,85	1,76	2,17	2,03
3.	SMA/MA/SMK	7.749	1.946	3.190	3.364	4,94	1,19	2,31	2,41
Jumlah Penduduk		156.820	163.337	137.851	139.366				

Ket : <sup>\*)</sup> Jumlah Penduduk versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2017 (diolah)

## b. Kesehatan

### 1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2012-2016 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2012, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 9,27 per 1.000 KH. Pada tahun 2014 AKB di Kota Bima turun menjadi 5,75 per 1.000 KH, dan terus turun menjadi 5,14 per 1.000 KH pada tahun 2015, akan tetapi pada tahun 2016 naik menjadi 7,42

per 1000 KH. Artinya, terjadi peningkatan angka kematian bayi di Kota Bima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Tabel 2.22. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kematian Bayi (Berumur <1 Tahun)			19 KSS	17 KSS	25 KSS
Jumlah Kelahiran Hidup			3.306	3.306	3.370
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	9,27	9,3	5,75	5,14	7,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2017 (diolah)

## 2. Angka Usia Harapan Hidup

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, AHH penduduk Kota Bima senantiasa mengalami peningkatan. AHH penduduk Kota Bima pada periode waktu 2012–2016 selalu berada di atas angka Provinsi, yang berarti rata-rata harapan hidup penduduk Kota Bima lebih tinggi dibandingkan penduduk NTB, Namun jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional masih berada dibawah angka Nasional. Pada tahun 2016, AHH penduduk Provinsi NTB meningkat menjadi 65,38 tahun dan AHH penduduk Kota Bima juga meningkat menjadi 69,35 tahun.

Tabel 2.23. Angka Harapan Hidup Kota Bima

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
68,58	68,88	69,03	69,12	69,35

Sumber : BPS Kota Bima, 2017

## 3. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk di Kota Bima mengalami perbaikan yang cukup signifikan selama periode 5 tahun terakhir. Hingga tahun 2016 prevalensi balita gizi buruk tercatat sebesar 0,077 persen.

Tabel 2.23. Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2016

Jenis Data	Tahun 2016
Jumlah Balita (Jiwa)	19.329
Jumlah Balita Gizi Buruk (Kasus)	15
Prevelensi Gizi Buruk (%)	0,077

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2017



### c. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Bima selama kurun waktu 2011- 2015 menunjukan trend yang terus menurun sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.24.**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima**  
**Tahun 2011- 2015**

Kota Bima	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	18.146	18.069	17.362	16.412	15.312
Tingkat Kemiskinan (%)	12,60	12,35	9,91	9,74	9,85

Sumber : TKPKD Kota Bima, 2016

#### 2.1.3. Aspek Pelayanan umum

Aspek pelayanan umum adalah semua produk pelayanan umum yang berupa bentuk barang publik sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan, yang terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan

##### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

###### a. Urusan Pendidikan

Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima akan mencakup keadaan yang meliputi tinjauan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Disamping itu juga akan mencakup tinjauan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk, rasio guru dengan murid, rasio guru dengan murid per kelas rata-rata serta sebaran bangunan sekolah berdasarkan kecamatan.

###### 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah

seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS di Kota Bima adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.25.**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	15.461	18.075	19.259	18.702	17.379
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	APS SD/MI	92,50%	94,37%	100,56%	97,64%	98,87%
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	7.134	9.209	9.240	9.368	9.609
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	APS SMP/MTs	87,41%	116,89%	117,08%	118,70%	106,18%

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2016

## 2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Hal yang penting dalam rangka pembangunan dan pelayanan umum urusan wajib bidang pendidikan adalah mengetahui apakah bangunan sekolah yang ada sekarang telah memenuhi standar dan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah tingkat pendidikan (dasar dan menengah). Untuk itu perlu diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

**Tabel 2.26.**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2012-2016**

No.	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	88	85	90	94	94
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.715	19.154	19.151	19.154	17.577
1.3.	Rasio	180,94	225,34	212,79	203,77	186,99
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	31	31	32	38	38
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.162	7.892	7.892	7.892	9.050
2.3.	Rasio	263,29	254,63	246,63	207,68	238,16

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2016

Dari tabel tersebut diatas bahwa penduduk usia sekolah pendidikan 7-12 tahun (SD/MI) pada 2015 perbandingan satu gedung sekolah menampung 203 orang, kemudian pada penduduk usia sekolah 13-15 tahun (SMP/MTs) perbandingan satu sekolah menampung 207 orang.

### 3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 2.27.**  
**Rasio Guru/Murid di Kota Bima 2012-2016**

No	Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	2.233	2.359	2.870	2.466	2.366
1.2.	Jumlah Murid	18.140	19.945	20.827	18.702	17.379
1.3.	Rasio	123,09	118,27	137,80	131,86	131,86
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	1.186	1.707	1.950	1.340	1.374
2.2.	Jumlah Murid	9.243	13.133	12.527	9.368	8.609
2.3.	Rasio	128,31	129,97	155,66	143,04	143,04

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 2016

### 4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

**Tabel 28. Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2013-2016**

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Jumlah ruang kelas jenjang SD/MI	774 ruang kelas	852 ruang kelas	768 ruang kelas	832 ruang kelas
Jumlah ruang kelas jenjang SMP/MTs	334 ruang kelas	371 ruang kelas	370 ruang kelas	408 ruang kelas
Total Jumlah ruang kelas pendidikan dasar	1.108 ruang kelas	1.223 ruang kelas	1.138 ruang kelas	1.240 ruang kelas
Jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar	4.066 orang	4.820 orang	3.806 orang	3.740 orang
Rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	3,67 guru/kelas	3,94 guru/kelas	3,34 guru/kelas	3,02 guru/kelas

Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
Jumlah murid jenjang pendidikan dasar	33.078 orang	33.354 orang	28.070 orang	26.988 orang
Rata-rata jumlah murid pendidikan dasar per kelas	29,85 murid/kelas	27,27 murid/kelas	24,67 murid/kelas	21,76 murid/kelas
Rasio guru per kelas rata-rata per 1.000 jumlah murid	0,111	0,118	0,119	0,112

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan , 2017

## b. Urusan Kesehatan

### 1. Rasio Posyandu per satuan balita

Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus khusus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita perlu dilakukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pada kondisi ideal, satu Posyandu melayani 100 balita. Artinya, minimal terdapat 10 posyandu per 1000 balita.

Untuk kondisi di Kota Bima, rasio ketersediaan posyandu terhadap balita terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2014, satu posyandu telah mampu melayani 114 balita, sedangkan pada tahun 2015 peningkatan jumlah pelayanan posyandu meningkat terus, sehingga perbandingan satu posyandu hanya melayani 91 balita, artinya perbandingan rasio posyandu dengan jumlah balita telah terpenuhi.

Tabel 2.3. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah posyandu	Jumlah Balita (Jiwa)
1	Kecamatan Rasanae Barat	32	4.219
2	Kecamatan Rasanae Timur	26	2.196
3	Kecamatan Mpunda	35	4.406
4	Kecamatan Raba	40	4.723
5	Kecamatan Asakota	30	3.784
Jumlah		163	19.329

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

### 2. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Puskesmas adalah sarana pelayanan dasar dan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan

terdepan dalam system pelayanan kesehatan harus mampu dijangkau dan diakses oleh masyarakat secara luas dan mudah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah dengan mengetahui rasio puskesmas per 100.000 penduduk.

Sampai dengan tahun 2015, puskesmas di Kota Bima adalah sejumlah 5 (lima) unit yang tersebar secara merata di 5 kecamatan dan didukung oleh 19 puskesmas pembantu.

Tabel 2.4. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Puskesmas	5	5	5	5	5
2.	Jumlah Poliklinik	n/a	n/a	3	3	3
3.	Jumlah Pustu	19	18	19	19	19
4.	Jumlah Penduduk	146.308	158.820	163.337	137.851	139.366
5.	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	3,42	3,19	3,06	3,63	3,59
6.	Rasio Poliklinik per 100.000 penduduk	n/a	n/a	1,84	2,18	2,15
7.	Rasio Pustu per 100.000 penduduk	12,99	11,48	11,63	13,78	13,63

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

### 3. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk.

Tabel 2.51. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Jumlah Penduduk Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah <sup>*)</sup>	0	0	0	0	0
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	0	0	0	0	0
6.	Jumlah Penduduk	146.308	156.820	163.337	137.851	139.366
7.	Rasio per 10.000 penduduk	-	-	-	-	-

\*) Kota Bima belum memiliki Rumah Sakit Umum Daerah. Rumah Sakit Umum Daerah yang ada dalam wilayah Kota Bima sekarang, masih dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bima.

Sampai dengan tahun 2016, rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah daerah berupa RSUD Bima pengelolaannya masih dibawah Pemerintah Kabupaten Bima meskipun lokasinya

berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bima. Sedangkan yang dikelola oleh swasta masih dalam bentuk klinik yaitu PKU Muhammadiyah dan Klinik Sari Farma.

#### 4. Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.32. Jumlah Dokter di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012*)	2013**)	2014**)	2015**)	2016**)
1	Jumlah Dokter	55	60	24	26	26
2	Jumlah Penduduk	146.308	156.820	163.337	137.851	139.366
	Rasio	1 : 2.660	1 : 2.614	1 : 6.806	1: 5.302	1: 5.360

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017; Data BPS\*) Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil\*\*), (diolah)

Tabel 2.33. Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Kecamatan Rasanae Barat	28.743	6	1 : 4.791
2	Kecamatan Rasanae Timur	16.956	5	1 : 3.391
3	Kecamatan Mpunda	28.932	5	1 : 5.786
4	Kecamatan Raba	35.826	4	1 : 8.957
5	Kecamatan Asakota	29.909	6	1 : 4.818
	Jumlah	139.366	26	1 : 5.360

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017; Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (diolah)

#### 5. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Tabel 2.34. Jumlah Tenaga Medis di Kota Bima Tahun 2016

No.	Uraian	2016
1	Jumlah Tenaga Medis	286
2	Jumlah Penduduk	139.366
3	Rasio per 1.000 penduduk	2,05

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

Tabel 2.35. Jumlah Tenaga Medis (Perawat, Bidan) Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis*)	Rasio per 1.000 penduduk
1	Kecamatan Rasanae Barat	28.743	59	2,05
2	Kecamatan Rasanae Timur	16.956	43	2,54
3	Kecamatan Mpunda	28.932	62	2,14
4	Kecamatan Raba	35.826	55	1,54
5	Kecamatan Asakota	29.909	67	2,32
		139.366	286	2,05

\*) dikecualikan yang bertugas pada Dinas Kesehatan  
 Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

### c. Urusan Lingkungan Hidup

#### 1. Persentase penanganan sampah

Dalam urusan penanganan sampah, sampai dengan akhir tahun 2016 cakupan penanganan persampahan mencapai 65,89 persen dari 38 kelurahan.

Tabel 2.36. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah sampah yang ditangani (M3)	33,21	206	64.774	47.616	268,56
2.	Jumlah volume produksi sampah (M3)	162	365,77	71.970,70	50.082,87	407,73
3.	Persentase	20,5%	56,32%	90 %	95,07%	65,87%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

Tabel 2.37. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah sampah yang ditangani (M3)	Jumlah volume produksi sampah (M3)	Persentase (%)
1	Kecamatan Rasanae Barat	56,64	89,03	65,87
2	Kecamatan Mpunda	61,23	92,96	65,87
3	Kecamatan Raba	65,65	99,67	65,87
4	Kecamatan Rasanae Timur	30,53	46,35	65,87
5	Kecamatan Asakota	52,51	79,72	65,87
	Jumlah	268,56	407,73	65,87

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

#### 2. Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal.

Dalam bidang pelayanan air minum, penduduk Kota Bima yang memiliki akses air minum pada tahun 2016 mencapai 92,07 %.

Tabel 2.38. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Jumlah penduduk yang berakses air Minum (Jiwa)	137.912	141.577	150.173
Jumlah penduduk (Jiwa)	156.400	155.281	163.101
Persentase penduduk berakses air minum (%)	88,18	91,17	92,07

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017 (diolah)

Tabel 2.39. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	
1	Kecamatan Rasanae Barat	91,18
2	Kecamatan Rasanae Timur	90,35
3	Kecamatan Mpunda	92,91
4	Kecamatan Raba	90,74
5	Kecamatan Asakota	94,76

Sumber : Dinas Kesehatan, 2017

### 3. Persentase luas permukiman yang tertata

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.39. Persentase Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	luas area permukiman tertata (Ha)	1.411	1.736	1.715,52	1.694,94	1.656,61
2.	luas area permukiman keseluruhan (Ha)	1.659	1.775	1.775	1.755,13	1.804
3.	Persentase Luas Permukiman yang Tertata (%)	85,05	97,80	96,65	96,57	91,83

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

Tabel 2.40. Persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Area Permukiman Keseluruhan	Luas Area Permukiman Tertata	Persentase
1	Kecamatan Rasanae Barat	511	438,6	85,83
2	Kecamatan Rasanae Timur	190	190	100,00
3	Kecamatan Mpunda	382	365,61	95,71
4	Kecamatan Raba	494	474,75	96,10
5	Kecamatan Asakota	227	187,65	82,67
Jumlah		1.775,13	1.656,61	91,83

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017



d. Urusan Pekerjaan Umum

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Total panjang jalan (meliputi jalan nasional, jalan propinsi dan jalan kabupaten/kota) di Kota Bima hingga tahun 2016 adalah sepanjang 311,425 km. Dari total panjang jalan tersebut, jalan yang status pengelolaannya berada di Pemerintah Kota Bima adalah sepanjang 258,105 km.

Tabel 2.41. Panjang Jalan Berdasarkan Kelas di Kota Bima tahun 2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					Total
		Rasanae Barat	Asakota	Mpunda	Raba	Rasanae Timur	
1.	Jalan Nasional						33,13
2.	Jalan Propinsi						20,19
3.	Jalan Kabupaten/Kota	15,24	55,225	37,490	76,585	73,565	258,105
Jumlah							311,425

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, 2017

Berdasarkan kondisi jalan yang ada, jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik sepanjang 109,055 km, kondisi sedang 60,10 km, rusak 40,69 km dan rusak berat 48,26 km. Artinya, jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik dan sedang mencapai 65,54 persen, sedangkan sisanya sebesar 34,46 persen kondisi jalan masih kategori rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel 2.42. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Kondisi Baik	108,03	123,34	125,925	137,225	109,055
2.	Kondisi Sedang	34,51	27,94	24,150	23,880	60,10
3.	Kondisi Rusak	19,63	30,84	32,235	21,205	40,69
4.	Kondisi Rusak Berat	33,96	20,86	22,030	22,030	48,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, 2017

Tabel 2.43. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

Kondisi Jalan (Km)	Kecamatan					Jumlah
	Rasanae Barat	Asakota	Mpunda	Raba	Rasanae Timur	
Aspal	15,24	29,37	25,105	31,955	52,62	154,29
Kerikil	-	7,48	2,375	22,16	7,39	39,405
Tanah	-	18,375	10,01	22,47	13,555	64,41
Lainnya	-	-	-	-	-	-
Baik	7,76	21,020	17,685	34,18	28,41	109,055
Sedang	3,39	11,125	9,96	14,555	21,07	60,10
Rusak Sedang	2,3	8,5	5,77	12,61	11,51	40,69
Rusak Berat	1,79	14,58	4,075	15,24	12,575	48,26

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, 2017

## 2. Rasio Jaringan Irigasi

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Pada tahun 2015, rasio pelayanan jaringan irigasi di Kota Bima baru mencapai angka 24,78.

Tabel 2.44. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2016

No	Uraian	Jaringan Irigasi (M)
1.	Jaringan primer	9.631
2.	Jaringan Sekunder	36,841
3.	Jaringan Tersier	-
4.	Luas lahan budidaya (Ha)	2.420
Rasio		19,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang, Bidang SDA, 2017

Tabel 2.45. Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2016 Kota Bima

No.	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi (M)			Total Panjang Jaringan Irigasi (M)	Luas lahan budidaya (Ha)	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Rasanae Barat	-	-	-	-	-	-
2	Mpunda	320	3.380	-	3.700	100	37
3	Raba	3.337	7.340	-	10.685	775	13,78
4	Rasanae Timur	4.513	19.394	-	23.907	1.240	19,28
5	Asakota	1.461	6.719	-	8.180	305	26,82
Kota Bima		9.631	36.841	-	46.472	2.420	19,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2017

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektifitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

Tabel 2.46. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Tahun 2016

No	Pasokan Irigasi	Tahun 2016
1.	Pasok Irigasi per Area	0,59
2.	Pasok Irigasi Relatif	0,18
3.	Pasok Air Relatif	1,36
4.	Indek Luas Areal	97,91
5.	Rancangan Luas Areal	2.420

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2017

Tabel 2.47. Efisiensi dan Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (lt/ dtk)	Pasok Air Irigasi Total (lt/ dtk)	Total Pasok Air (lt/ dtk)	PIA (lt/ dtk/ha)	PIR (lt/ dtk/ha)	PAR (lt/ dtk/ha)	IA (%)
1	Rasanae Barat	Tidak terdapat daerah irigasi									
2	Mpunda	100	95	1,66	184,64	75,34	0,75	0,18	1,65	1,65	95,00
3	Raba	775	759	1,53	1.114,35	463,55	0,56	0,15	1,36	1,36	97,94
4	Rasanae Timur	1.240	1.240	2,14	1.546,44	352,72	0,48	0,05	0,72	0,72	100
5	Asakota	305	301	1,32	432,14	243,33	0,55	0,24	1,70	1,70	98,69
Kota Bima		2.420	2.359	6,65	3.277,57	1.134,94	0,59	0,18	0,36	1,36	97,91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2017

### 3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tabel 2.48. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2016

No	Bangunan tempat Ibadah	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Masjid (Tampa Langgar/Mushola)	142	137.284	1,03
2.	Gereja	5	1.811	2,76
3.	Pura	3	236	12,71
4.	Vihara	0	35	0
Jumlah		152	139.366	1,09

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Bima, 2017

Tabel 2.49. Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Masjid			Gereja			Pura			Vihara		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1	Rasanae Barat	24	27.683		2	988		1	41		0	31	
2	Rasanae Timur	25	16.946		-	8		1	2		0	0	
3	Mpunda	31	28.462		-	344		0	100		0	3	
4	Raba	31	35.495		2	269		0	62		0	0	
5	Asakota	31	28.698		1	202		1	31		0	1	
Jumlah		142	137.284		5	1.811		3	236			35	

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Bima, 2017

### 4. Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah.

Tabel 2.50. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	30.695	31.868
2.	Jumlah rumah tinggal	39.020	39.854
3.	Persentase (%)	78,66	79,96

Sumber : Dinas Perumahan dan kawasan permukiman, 2017

5. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

Tabel 2.51. Tempat Pemakaman Umum Tahun 2016

No	Kecamatan	Tempat pemakaman umum (TPU)		Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)		Tempat pemakaman khusus (TPK)		Lain-Lain		Jumlah Total	
		Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Jmlh	Daya tampung	Tmpt Pemakaman	Daya tampung
1.	Rasanae Barat	15	9.342	-	-	2	525	-	-	17	9.867
2.	Rasanae Timur	25	20.564	-	-	-	-	-	-	25	20.564
3.	Mpunda	19	15.203	-	-	-	-	-	-	19	15.203
4.	Raba	11	9.985	-	-	1	250	-	-	12	10.235
5.	Asakota	17	9.550	-	-	-	-	-	-	17	9.550
	Jumlah	87	64.644	-	-	3	775	-	-	90	65.419

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017

**c. Urusan Perumahan**

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

1. Rasio rumah layak huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.52. Jumlah Rumah Layak Huni Kota Bima Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1.	Jumlah rumah	33.984	34.444	34.564
	- Layak huni	31.829	31.521	30.720
	- Tidak layak huni	2.955	2.923	3.844

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017

## 2. Rasio permukiman layak huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukiman. Adapun luas areal permukiman tertata tahun 2016 adalah seluas 1.656,64 Ha dan luas areal permukiman tahun 2016 adalah 1.804 Ha.

$$\text{Rasio permukiman layak huni Kota Bima 2016} = \frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} = \frac{1.656,64 \text{ Ha}}{1.804 \text{ Ha}} = 0,92\%$$

## 3. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Daya tampung TPS dihitung dengan satuan Ton. Dengan menggunakan konversi maka 1 ton setara dengan 3 M3.

Tabel 2.53. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016

No	Uraian	Tahun 2016
1.	Jumlah TPS	58 unit
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (Ton)	135,33 Ton
3.	Jumlah Penduduk	139.366
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,97

Ket : Data TPS yaitu Tempat Pembuangan Sementara yang berupa Kontainer yang ditempatkan di masing-masing lokasi.  
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017 (diolah)

Tabel 2.54. Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio (Per 1000 Penduduk)
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
1.	Rasanae Barat	28.743	13	30,33	1,06
2.	Mpunda	28.909	13	30,33	1,05
3.	Raba	35.826	14	32,67	0,91
4.	Rasanae Timur	16.956	7	16,33	0,96
5.	Asakota	28.932	11	25,67	0,89
Jumlah		139.366	58	135,33	0,97

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2017 (diolah)

f. Urusan Penataan Ruang

Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara danKetahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan.

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Tabel 2.55. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Tahun 2015-2016

No.	Uraian	2015	2016
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	21.868,07	21.868,07
2.	Luas Wilayah ber HPL/HGB (Ha)	20.449,95	20.449,95
3.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (%)	1,069	1,069

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

Tabel 2.56. Rasio RTH per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Luas Wilayah ber HPL/HGB (Ha)	Luas RTH (Ha)	Rasio RTH
1.	Kecamatan Rasanae Barat	928,21	13.564	14,613
2.	Kecamatan Mpunda	1.371,66	173,76	0,126
3.	Kecamatan Raba	5.506,58	61,27	0,011
4.	Kecamatan Rasanae Timur	5.807,48	4.035,6	0,694
5.	Kecamatan Asakota	6.836,02	4.033,4	0,590
Jumlah		20.449,95	21.868,07	1,069

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

2. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan adalah perbandingan jumlah bangunan ber-IMB terhadap jumlah seluruh bangunan yang ada.

Tabel 2.57. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Bangunan ber-IMB	1.007	1.119	1.331	1.605	274
2.	Jumlah Bangunan	33.668	33.342	33.788	34.444	34.474
Rasio bangunan ber-IMB (1/2)		0,030	0,034	0,039	0,047	0,058

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

Tabel 2.58. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Bangunan	Jumlah Bangunan ber-IMB	Rasio bangunan ber-IMB
1.	Kecamatan Rasanae Barat	6.354	483	0,076
2.	Kecamatan Mpunda	7.453	603	0,081
3.	Kecamatan Raba	9.084	429	0,0047
4.	Kecamatan Rasanae Timur	4.569	144	0,0032
5.	Kecamatan Asakota	7.014	349	0,0050
Jumlah		34.474	2.008	0,0058

Sumber : Dinas PU dan Penataan Ruang, 2017

#### g, Urusan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi bagian dari system perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Rencana pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana kerja (Renja) SKPD. Oleh karena itu ketersediaan dokumen maupun konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut menjadi ukuran penting dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perencanaan pembangunan ini.

#### h. Urusan Perhubungan

Prasarana perhubungan yang terdapat di Kota Bima sampai dengan tahun 2015 terdiri dari 1 pelabuhan laut dan 3 terminal.

##### 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum.

Jumlah penumpang angkutan umum di Kota Bima selama periode tahun 2011 – 2015 terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan di mana pada tahun 2011 jumlah penumpang sebanyak 911.352 jiwa naik menjadi 1.038.560 jiwa pada tahun 2015 yang

terdiri dari 991.265 jiwa penumpang Bus AKAP dan 47.295 jiwa jumlah penumpang kapal laut.

Tabel 2.59. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah penumpang Bis	899.352	Na	991.265	2.896.350	2.820.000
2.	Jumlah penumpang Kapal laut	12.000	39.413	47.295	60.795	540.000
Total Jumlah Penumpang		911.352	39.413	1.038.560	2.957.145	3.360.000

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

## 2. Rasio ijin trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.

Tabel 2.60. Rasio Ijin Trayek Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Izin Trayek perkotaan	85	126	126	247	247
2.	Izin Trayek perdesaan	-	49	49	63	223
3.	Jumlah Izin Trayek	85	175	175	310	470
4.	Jumlah penduduk	146.308	156.820	163.337	137.851	139.366
5.	Rasio Izin Trayek	0,000581	0,001116	0,001071	0,002249	0,003372

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017 (diolah)

## 3. Jumlah uji kir angkutan umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.61. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Angkutan Umum	Jumlah KIR				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Mobil penumpang umum	70	357	80	91	360
2.	Mobil bus	68	136	86	107	138
3.	Mobil barang	593	1.242	818	895	920
Jumlah		731	1.735	984	1.093	1.418

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017



#### 4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Tabel 2.62. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Bima Tahun 2012-2016

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan laut	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	3	3	3	3	2
Jumlah		4	4	4	4	3

Sumber : Dinas Perhubungan,, 2017

##### i. Urusan Pertanahan

Prosentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Tabel 2.63. Luas Lahan Bersertifikat (Ha) Kota Bima Tahun 2016

No	Uraian	2016
1.	Luas wilayah daratan	437.465
2.	Luas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)	1.232
3.	Luas tanah bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU)	-
4.	Luas tanah bersertifikat Hak Milik	31.415
5.	Luas tanah bersertifikat Hak Pakai	0,685
<b>Total luas tanah bersertifikat</b>		<b>437.498,33</b>
6.	Persentase HGB dibanding luas daratan	0,000000028
7.	Persentase HGU dibanding luas daratan	-
8.	Persentase Hak Milik dibanding luas daratan	0,000000718
9.	Persentase Hak Pakai dibanding luas daratan	0,000000016
<b>Persentase total luas tanah bersertifikat</b>		<b>0,000000762</b>

Sumber : Kantor BPN Kota Bima, 2017

Prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan tingkat ketertiban administrasi kepemilikan tanah di daerah. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah.

##### j. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

###### 1. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan. Tingkat Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menjadi peluang bagi daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah karena berkaitan dengan daya tarik investor

untuk berinvestasi. Sebaliknya, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah apabila tidak bisa diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.

**Tabel 2.64.**  
**Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan Tahun 2016**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah(km <sup>2</sup> )	Kepadatan
1	Rasanae Barat	32.421	10,14	3.197
2	Mpunda	32.141	15,28	2.103
3	Raba	40.145	63,73	630
4	Rasanae Timur	18.839	64,07	294
5	Asakota	31.735	69,03	460
Jumlah se-Kota Bima		162.752	155.281	222,25

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, 2015

## 2. Pengelompokan Penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan (penduduk laki-laki dibagi penduduk perempuan dikali 100 persen). Dari rumusan tersebut dapat diketahui distribusi penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

**Tabel 2.65. Jumlah Penduduk Perempuan Berdasarkan Umur di Kota Bima Tahun 2012-2016**

Kelompok Umur	2012 <sup>*)</sup>	2013 <sup>*)</sup>	2014 <sup>**)</sup>	2015 <sup>**)</sup>	2016 <sup>**)</sup>
0-4	7.106	7.233	5.689	5.178	5.237
5-9	6.886	7.009	7.296	6.584	6.223
10-14	6.703	6.823	7.504	6.821	6.637
15-19	7.608	7.744	6.915	6.611	5.242
20-24	8.750	8.907	7.276	6.894	5.886
25-29	6.981	7.106	8.422	7.659	6.072
30-34	6.001	6.109	8.086	7.630	6.727
35-39	5.236	5.330	6.810	6.362	5.837
40-44	4.526	4.607	5.468	5.346	5.367
45-49	3.937	4.008	4.871	4.761	4.497
50-54	3.119	3.175	3.776	3.734	3.771
55-59	2.261	2.302	2.977	3.230	2.989
60-64	1.642	1.671	2.258	2.112	2.148
65-69	1.316	1.340	1.613	1.720	1.534
70-74	932	949	1.078	1.177	1.084
75+	1.392	1.417	1.230	1.426	1.039
Jumlah	74.397	75.730	81.269	77.723	70.209

Sumber : <sup>\*)</sup> BPS Kota Bima, 2014

<sup>\*\*)</sup> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

Tabel 2.66. Jumlah Penduduk Laki-Laki Berdasarkan Umur di Kota Bima Tahun 2012-2016

Kelompok Umur	2012*)	2013*)	2014**)	2015**)	2016**)
0-4	7.591	7.679	6.077	5.662	5.559
5-9	7.254	7.355	7.945	7.087	6.798
10-14	7.023	7.121	7.683	7.151	7.031
15-19	7.448	7.552	7.325	6.780	5.125
20-24	7.298	7.400	7.379	7.135	5.799
25-29	6.695	6.789	8.209	7.493	5.946
30-34	5.674	5.753	7.888	7.347	6.396
35-39	5.179	5.251	6.549	6.135	5.426
40-44	4.283	4.343	5.387	5.222	5.030
45-49	3.666	3.717	4.603	4.455	4.253
50-54	3.030	3.072	3.745	3.508	3.436
55-59	2.184	2.215	2.873	3.135	2.782
60-64	1.515	1.536	2.247	2.066	2.102
65-69	1.191	1.208	1.449	1.576	1.404
70-74	795	806	1.027	1.074	978
75+	1.085	1.100	1.097	1.259	1.011
Jumlah	71.911	72.915	81.483	77.588	69.076

Sumber : \*) BPS Kota Bima, 2014 \*\*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

Tabel 2.67. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2016

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Rasanae Barat	14.226	14.517	28.743	98,00
Mpunda	14.258	14.674	28.932	97,17
Raba	17.667	18.159	35.826	97,29
Rasanae Timur	8.364	8.592	16.956	97,35
Asakota	14.561	14.348	28.909	101,48
Jumlah Total	69.076	70.290	139.366	98,27

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

### 3. Pengelompokan Penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis

Tabel 2.68. Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kota Bima Menurut Luas wilayah Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah(km <sup>2</sup> )	Kepadatan
1	Rasanae Barat	28.743	10,14	2.835
2	Mpunda	28.932	15,28	1.893
3	Raba	35.826	63,73	562
4	Rasanae Timur	16.956	64,07	265
5	Asakota	28.909	69,03	419
Jumlah se-Kota Bima		139.366	222,25	627

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

4. Pengelompokan Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

**Tabel 2.69.**  
**Penduduk 5 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2016**

No	Pendidikan yang Ditamatkan	Jumlah	Persentase(%)
1	Tidak punya ijazah SD	51.516	36,97
2	SD/MI sederajat	16.780	12,04
3	SMP	15.965	11,46
4	SMA	40.595	29,13
5	Perguruan tinggi	14.510	10,41
Jumlah		139.366	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2016

5. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, dan Akte lahir.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

**Tabel 2.70. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2016**

Uraian	Jumlah
Jumlah Penduduk keseluruhan	139.366
Jumlah Penduduk Wajib KTP	97.107
Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP	92.852
Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP)	-
Total Penduduk ber-KTP	92.852
Kepemilikan KTP (%)	66,62
Jumlah Penduduk ber-akte lahir	52.359
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk (%)	375,69

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2017

k, Ketenagakerjaan

1. Angkatan Kerja (*labor force*)

**Tabel 2.71. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2016**

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA			
	Bekerja	38.912	30.802	69.063
	Pengangguran	5.474	2.330	7.804
	Jumlah penduduk angkatan kerja (i)	43.735	33.132	76.867

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2	BUKAN ANGGKATAN KERJA			
	Sekolah	5.293	6.316	11.609
	Mengurus RT	3.970	18.596	22.566
	Lainnya	2.443	1.203	3.646
	Jumlah penduduk bukan angkatan kerja (ii)	11.706	26.115	37.821
	Jumlah penduduk usia kerja (i) + (ii)	55.441	59.247	114.688
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	69,01	51,99	60,22
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	12,52	7,03	10,15

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2017 (diolah)

Tabel 2.72. Penduduk Angkatan Kerja Kota Bima Tahun 2016

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
15-19	2.882	574	3.456
20-24	9.471	950	10.421
25-29	9.582	747	10.329
30-34	9.697	1.076	10.773
35-39	8.986	881	9.867
40-44	8.105	917	9.022
45-49	5.738	996	6.734
50-54	5.180	704	5.884
55-59	4.130	625	4.755
60-64	5.292	334	5.626
Total	69.063	7.804	76.867

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, 2017

## 2. Pengangguran

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Untuk mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari Persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima Tahun 2016 :

$$= \frac{\text{Jumlah yang menganggur}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 = \frac{7.804}{76.867} \times 100 = \mathbf{10,15\%}$$

## 1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan akan mencakup tentang partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta dan kekerasan dalam rumah tangga. Disamping itu juga yang terkait dengan perlindungan anak akan berkaitan dengan jumlah pekerja anak.

### 1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah dan Swasta

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kota Bima pada tahun 2013 adalah sebesar 2.353 jiwa dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 2.331 jiwa dan meningkat kembali menjadi 2.523 pada tahun 2015. Namun jika dilihat dari persentasenya terjadi penurunan selama tahun 2013 - 2015.

Tabel 2.73. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2.353	2.331	2.523	2.294
2	Jumlah pekerja perempuan	4.506	4.628	5.027	5.108
3	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	52,22	50,37	50,19	44,91

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

### 2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga.

Tabel 2.74. Rasio KDRT di Kota Bima Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	2016
1	Jumlah KDRT	8	18	28
2	Jumlah Rumah Tangga	32.536	34.974	32.668
3	Rasio KDRT	0,25	0,51	0,86

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017

### 3. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Tabel 2.75.

**Persentase Tenaga Kerja di Bawah Umur Tahun 2015**

NO	Kecamatan	Pekerja Anak Usia 5-14 Tahun	Jumlah Pekerja Usia 5 Tahun Keatas	Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
1	Rasanae Barat	16	4.247	0,38
2	Mpunda	40	4.616	0,87
3	Raba	367	3.981	9,22
4	Rasanae Timur	217	2.019	10,75
5	Asakota	17	3.617	0,47
	Jumlah	657	18.480	3,56

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2016

### m. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera tidak akan terlepas dari penyelenggaraan program keluarga berencana (KB) dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang terkenal dengan jargon 2 (dua) anak cukup. Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka mengetahui rata-rata jumlah anak per keluarga menjadi informasi yang bermanfaat untuk mengukur keberhasilan program KB.

#### 1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Tabel 2.76.  
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga di Kota Bima Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah anak	45.161	56.812	57.664	35.879	82.471
2	Jumlah keluarga	31.399	31.870	33.464	34.457	34.980
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,43	1,78	1,72	1,01	2,4

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2016

#### 2. Rasio akseptor KB

Tabel 2.77.  
Rasio Akseptor KB di Kota Bima Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah akseptor KB	20.369	21.974	20.026	18.629	21.336
2	Jumlah pasangan usia subur	24.290	26.023	26.013	24.812	26.309
3	Rasio akseptor KB	83,86	84,44	76,98	75,08	81,20

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, 2015

### n. Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial akan berkaitan erat dengan penanganan masalah sosial seperti pemberian perlindungan kepada PMKS (Penyandang masalah kesejahteraan sosial) dan penyandang disabilitas. Pembangunan Sosial yang dilaksanakan di Kota Bima tampaknya sudah semakin meningkat. Secara umum derajat kesejahteraan masyarakat sudah mengalami peningkatan kearah yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Tabel 2.78.  
Pelayanan Umum Urusan Sosial di Kota Bima Tahun 2013 - 2015

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2013	2014	2015
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:				

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2013	2014	2015
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Kabupaten/ Kota	1 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	42	44	70
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Kabupaten/Kota	2 Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya.	3	6	3
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
	a. Penyediaan sarana prasarana pantai sosial skala kabupaten/kota	3 Presentase (%) pantai sosial skala kabupaten/ kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	46	38	100
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Kabupaten/Kota	4 Presentase (%) wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	0	0	0
3	Penanggulangan korban Bencana:				
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Kabupaten/Kota	5 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
	b. Evaluasi korban bencana skala Kabupaten/kota	6 Presentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	0
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:				
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota	7 Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	32	40

Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2015

#### **o. Urusan Koperasi dan UKM**

Koperasi dan UKM di Kota Bima merupakan pilar pembangunan ekonomi lokal karena memiliki daya tahan yang baik menghadapi berbagai krisis ekonomi. Oleh karena itu pembangunan koperasi dan UKM menjadi salah satu prioritas dalam RPJMD Kota Bima Tahun



2013 – 2018. Berikut disajikan beberapa aspek terkait pembangunan urusan koperasi dan UKM di Kota Bima.

#### 1. Presentase Koperasi Aktif

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Jumlah koperasi aktif di Kota Bima selama periode 2012-2016 belum mengalami perkembangan yang berarti. Meskipun jumlah koperasi mengalami penambahan jumlah setiap tahun, namun data menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang aktif mengalami perkembangannya fluktuas dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.79.

**Persentase Koperasi Aktif di Kota Bima Tahun 2012-2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	97	78	72	73	93
2	Jumlah koperasi	142	144	144	163	173
3	Persentase koperasi aktif	68,31	55,71	50,00	44,79	53,76

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

#### 2. Jumlah UKM non BPR/LKM

Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) 2016 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015, dimana pada 2016 jumlahnya mencapai 6.303 unit. Adapun jumlah UKM non BPR/LKM pada tahun 2016 sejumlah 6.227 unit.

Tabel 2.80.

**Jumlah UKM non BPR/LKM di Kota Bima Tahun 2012 - 2016**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah seluruh UKM	1874	897	3.535	4.599	6.303
2	Jumlah UKM non BPR/LKM	760	760	3.215	4.070	6.227

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, 2016

#### p. Urusan Penanaman Modal

Pelayanan umum bidang penanaman modal pada dasarnya mencakup keadaan jumlah investasi di daerah baik yang berupa penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Hingga saat ini Pemerintah Kota Bima terus mengupayakan peningkatan pelayanan bidang penanaman modal.

#### q. Urusan Kebudayaan

Salah satu indikator pencapaian pembangunan kebudayaan di Kota Bima dapat dilihat berdasarkan jumlah grup kesenian yang ada. Jumlah grup kesenian/sanggar seni di Kota Bima pada tahun 2015 adalah sebanyak 40 unit, mengalami peningkatan yang signifikan

dibanding dengan jumlah grup kesenian pada tahun 2010 yang hanya berjumlah 25 unit. Sedangkan organisasi Dewan Kesenian yang mewadahi kreatifitas seni dan budaya di Kota Bima telah dibentuk dan memiliki sekretariat yang baik. Hanya saja sampai tahun 2015 di Kota Bima belum ada Gedung Kesenian atau Gedung Budaya. Selama ini kegiatan seni dan budaya lebih banyak memanfaatkan Museum ASI Mbojo yang merupakan Istana Kesultanan Bima.

#### r. Urusan Kepemudaaan dan Olahraga

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda maupun organisasi olahraga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Jumlah lapangan olah raga di Kota Bima tahun 2015 sebanyak 72 (tujuh puluh dua) dan 2 (dua) gelanggan olah raga. Sedangkan organisasi pemuda berjumlah 9 (Sembilan) dan organisasi olah raga sejumlah 17 (tujuh belas).

#### s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

##### 1. Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparaturn Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparaturn pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Tabel 2.81.** Rasio Jumlah Polisi Pamong Prajadi Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah polisi pamong praja	58	58	68	68	117
2.	Jumlah penduduk	146.308	158.820	163.337	137.851	139.366
3.	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	3,96	3,70	4,16	4,93	8,40

Sumber : Sat. Pol. PP, 2017

##### 2. Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.

**Tabel 2.82.**  
**Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Bima Tahun 2011-2015**

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Jumlah Linnmas	70	70	70	70	70
2.	Jumlah penduduk	144.018	146.308	148.645	155.281	162.752
3.	Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk	0,00049	0,00048	0,00047	0,00045	0,00043

*Sumber : Badan Kesbanglinmas Kota Bima, 2015*

### 3. Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan

Rasio pos siskamling per jumlah kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah kelurahan. Pada tahun 2016, di Kota Bima terdapat 237 poskamling yang tersebar di 38 kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.

**Tabel 2.83.** Rasio Pos Siskamling di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Poskamling	165	161	183	185	237
2	Jumlah Kelurahan	38	38	38	38	38
	Rasio Poskamling Per Kelurahan	4,34	4,24	4,82	4,87	6,24

*Sumber : Sat. Pol. PP, 2017*

### **t. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Kota Bima adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dan pada tahun 2014 dan 2015 Kota Bima telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) selaku eksternal auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap penyajian laporan keuangan Kota Bima. Opini WTP Tahun 2016 dan 2015 sekaligus mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh sejak tahun 2014.

u. Urusan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

v. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada upaya pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas lembaga masyarakat dan peningkatan partisipasi dalam perencanaan maupun pembangunan, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat dan pengembangan usaha ekonomi produktif

Di Kota Bima sudah terbentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di 38 kelurahan. Sementara LSM yang aktif yang mendaftar/melaporkan masih sangat sedikit yaitu 5 LSM pada tahun 2015 sesuai dengan data yang terdapat di Bakesbangpol Kota Bima.

w. Urusan Statistik

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka perumusan kebijakan dan perencanaan harus didukung dan berdasarkan data dan informasi statistik yang akurat. Data dan informasi statistik yang akurat akan dapat diperoleh bila system statistik dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional maupun daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, bahwa statistik memiliki arti penting bagi upaya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan disegenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

dalam pembangunan nasional, untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Urusan statistik di Kota Bima dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan data/informasi/statistik daerah. Pelaksanaan urusan statistik ini mencakup pengembangan data statistik daerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, pengembangan profil daerah dan pengembangan data-data bagi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

#### x. Urusan Kearsipan

Pembangunan kearsipan daerah berfungsi untuk menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, terpercaya dan mengidentifikasi keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi sebagai satu keutuhan informasi semua organisasi kehidupan. Penetapan sistem kearsipan ini meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam sistem kearsipan daerah meliputi pengelolaan arsip dinamis dan pengelolaan arsip statis. Pelaksanaan urusan kearsipan di Kota Bima dilakukan oleh Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

#### y. Urusan Komunikasi dan Informatika

##### 1. Jumlah jaringan komunikasi

Pada tahun 2016 jumlah jaringan telepon genggam sebanyak 51 unit, mengalami kenaikan dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2015 yang hanya 46 unit.

**Tabel 2.84.** Jaringan Komunikasi Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jaringan telepon genggam	31	46	46	51
2	Jumlah jaringan telepon stasioner	n/a	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2017 (diolah)

##### 2. Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Rasio wartel/warnet atau rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000 penduduk. Wartel atau warung telekomunikasi adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan telekomunikasi kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan.

Selama periode lima tahun terakhir, jumlah wartel di Kota Bima cenderung menurun. Hal sebaliknya justru tampak pada perkembangan jumlah warnet yang mengalami peningkatan jumlah.

**Tabel 2.85.** Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2015-2016

No	Kecamatan	Tahun 2015					Tahun 2016				
		Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio warnet	Jmlh Pddk	Jumlah wartel	Jumlah warnet	Rasio wartel	Rasio Warnet
1.	Rasanae Barat	28.849	2	3	0,07	0,10	28.743	-	4	-	0,14
2.	Mpunda	27.358	2	4	0,07	0,15	28.932	-	5	-	0,17
3.	Raba	36.067	3	5	0,08	0,14	35.826	-	5	-	0,14
4.	Rasanae Timur	16.979	-	-	-	-	16.956	-	3	-	18
5.	Asakota	28.598	-	-	-	-	28.909	-	2	-	0,07
	Jumlah	137.851	7	12	0,05	0,09	139.366	-	19	-	0,14

Sumber : Dinas Komunkasi dan Informatika, 2017 (diolah)

### 3. Jumlah surat kabar nasional/lokal

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Secara umum jumlah surat kabar terbitan nasional maupun terbitan lokal yang masuk di Kota Bima mengalami penambahan dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2016 jumlah surat kabar di Kota Bima sebanyak 47 jenis.

**Tabel 2.86.** Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Bima Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun 2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	1	1	1	2
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	10	10	24	45
3	Total jenis surat kabar (1+2)	11	11	25	47

Sumber : Dinas Komunkasi dan Informatika, 2017

### 4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah.

**Tabel 2.87.** Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penyiaran radio lokal	5	4	4	4
2	Jumlah penyiaran radio nasional	-	1	1	1
3	Jumlah penyiaran TV lokal	1	1	1	1
4	Jumlah penyiaran TV nasional	-	1	1	1
5	Total penyiaran radio/TV lokal	6	7	7	7

Sumber : Dinas Komunkasi dan Informatika, 2017

Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa

berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

## z. Perpustakaan

### 1. Jumlah perpustakaan

**Tabel 2.88.** Jumlah Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah Perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	651
3.	Jumlah Perpustakaan milik SKPD pemerintah	-	-	-	-	206
4.	Total Perpustakaan (1+2+3)	1	1	1	1	858

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

### 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

**Tabel 2.89.** Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)	2.304	1.656	2.075	2.404	3.874
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda	-	-	-	-	-
3.	Total pengunjung Perpustakaan (1+2)	2.304	1.656	2.075	2.404	3.874

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2017

## 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

### a. Pertanian

#### 1. Luas lahan pertanian

Sektor pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk di Kota Bima. Namun, seiring dengan makin berkembangnya Kota Bima sebagai pusat pelayanan wilayah, alih fungsi lahan-lahan pertanian produktif terutama di kawasan pusat kota menjadi kawasan permukiman baru pun tidak terhindarkan. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

Sebagai lahan untuk bercocok tanam komoditas pertanian, lahan sawah terbagi menjadi sawah dengan irigasi teknis, dengan luas 2.030 ha dan sawah tadah hujan dengan luas 241 ha. Lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Rasanae Timur dan di Kecamatan Raba.

**Tabel 2.90.**  
**Luas Tanah Sawah Menurut Jenis Irigasi di Kota Bima Tahun 2015**

Jenis Pengairan	Luas Sawah (Ha)					
	Rasanae Barat	Mpunda	Rasanae Timur	Raba	Asakota	Kota Bima
1. Irigasi Teknis	3	320	814	647	246	2.030
2. Tadah Hujan	-	-	153	58	30	241
3. Rawa Pasang Surut	-	-	-	-	-	-
4. Rawa Lebak	-	-	-	-	-	-
Total Tahun 2015	3	320	967	705	276	2.271
Total Tahun 2014	3	321	968	706	246	2.244

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Peternakan Kota Bima, 2015

Pada umumnya luasan sawah di Kota Bima terus mengalami tren penurunan pada setiap tahunnya. Seiring dengan berkurangnya luas sawah, terjadi pula pergeseran dalam pola tanam padi oleh petani di Kota Bima. Luas sawah dengan frekuensi penanaman padi 3 kali setahun cenderung berkurang, sementara luas sawah dengan penanaman 2 kali dan sekali setahun mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan berkurangnya luas sawah yang terjadi hamper pada semua kecamatan baik lahan sawah dengan irigasi teknis maupun sawah tadah hujan, sehingga berdampak pula dengan menurunnya frekuensi jumlah penanaman padi pada lahan sawah tersebut.

## 2. Pertanian Tanaman Pangan

Komoditas pertanian yang utama di Kota Bima meliputi padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah, ubi-ubian. Wilayah pertanian di Kota Bima terkonsentrasi di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Raba dan Rasanae Timur. Lahan pertanian di dua kecamatan ini masih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Lahan pertanian yang kian menyempit dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi perumahan, juga berdampak pada kontribusi hasil pertanian di Kota Bima.

**Tabel 2.91.**  
**Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Kota Bima Tahun 2015**

Jenis Data	Komoditas							
	Padi Sawah	Padi Ladang	Jagung	Kacang Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi kayu	Ubi Jalar
1. Luas Panen (Ha)	4.907	2.504	724	1.483	9	245	120	8
2. Produksi (Ton)	32.130	9.837	3.747	2.049	10	319	3.372	95
3. Produktivitas (Kw/Ha)	65,54	39,29	51,88	13,82	11,25	13,02	281	118,75

Sumber : SIPD Kota Bima, 2015



Luas panen padi sawah di Kota Bima tahun 2015 seluas 4.907 Ha dengan produksi gabah sebesar 32.130 ton. Total luas panen tanaman jagung pada tahun 2015 adalah seluas 724 Ha. Hasil produksi komoditas jagung cukup tinggi di banding komoditas lain yang besarnya mencapai 3.747 ton. Komoditas tanaman pangan lain yang cukup besar kontribusinya adalah kacang kedelai. Total luas panen kacang kedelai adalah 1.483 Ha dengan total produksi sebesar 2.049 ton.

#### b. Kehutanan

Sub sektor kehutanan mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam penyediaan pangan (*food production*), juga sebagai penjagaan terhadap keseimbangan tata guna air, iklim mikro dan menjaga keanekaragaman hayati. Menurut fungsinya, kawasan hutan yang ada di Kota Bima terbagi menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi terbatas dan enclave. Hingga tahun 2015, hutan produksi terbatas merupakan kawasan hutan yang paling luas yaitu mencapai 1.926,89 Ha (41%), kemudian diikuti oleh hutan produksi seluas 1.787,61 Ha (38%), hutan lindung dengan luas 1.006,75 Ha (21%) dan enclave seluas 13,51 Ha. Dari luasan hutan tersebut, 44 persen merupakan kawasan hutan Maria, kemudian 37 persen adalah kawasan hutan Nanganæ, dan sisanya sebesar 19 persen merupakan kawasan hutan Donggomasa.

#### c. Kelautan dan Perikanan

Posisi geografis Kota Bima yang berada di Teluk Bima menjadikan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu sumber mata pencaharian penduduk terutama di wilayah pesisir. Produksi perikanan dibagi menjadi perikanan tangkap dan budidaya, di mana pada tahun 2015 produksi ikan mencapai 2.160,30 ton. Produksi perikanan tangkap yang bersumber dari laut mencapai 1.630,50 ton atau mencapai 78 persen, sedangkan produksi perikanan budidaya sebagian besar dihasilkan dari tambak yang mencapai 274 ton. Selengkapny produksi ikan di Kota Bima pada tahun 2015 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2.92.**  
**Produksi Ikan Menurut Sub Sektor dan Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015**

Kecamatan	Perikanan Budi Daya (Ton)			Perikanan Tangkap (Ton)			Jumlah Seluruh
	Tambak	Kolam/ Karamba	Jumlah	Laut	Perairan Umum	Jumlah	
1. Rasanae Barat	226,3	49,40	275,4	682,20	7,0	654,20	837,80
2. Mpunda	-	88,00	88,00	-	8,5	3,50	51,50
3. Rasanae Timur	-	146,00	146,00	-	9,6	4,60	100,60
4. Raba	-	92,80	92,80	-	9,6	3,60	56,40
5. Asakota	271	64,00	64,00	998,30	13,1	980,40	1.114,00
Jumlah	498,2	478,5	976,7	1.680,50	32,8	1.712,6	2.689,3

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, 2015

#### **d. Energi dan Sumber daya mineral**

Kota Bima memiliki potensi bahan galian berupa batu marmer, andesit dan lain-lain yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Pengolahan bahan galian tersebut di Kota Bima saat ini masih tradisional dengan menggunakan peralatan tradisional seperti linggis dan martil sebagai bahan pemecah batu. Sedangkan dari segi pemanfaatan hanya digunakan sebagai bahan batu belah dan bahan bangunan/konstruksi lainnya seperti dalam pembangunan jalan dan pondasi gedung/rumah. Dengan pertimbangan kelayakan usaha dan prospek bisnis di bidang pertambangan ini, maka Pemerintah Kota Bima saat ini terus berupaya turut serta dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertambangan khususnya pengolahan dan pemanfaatan bahan galian.

Ketersediaan energi yang memadai berperan penting dalam pembangunan kota, karena berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian dan penduduknya. Ketersediaan akses energi yang memadai menjadikan daerah Kota Bima cukup potensi sebagai daerah tujuan investasi sehingga akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebutuhan ketenagalistrikan di Kota Bima dipasok oleh Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yaitu PLTD Raba dan PLTD Ni'u. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat, saat ini sedang dibangun PLTU di Bonto, Kelurahan Kolo yang akan memasok kebutuhan listrik Kota Bima dan kabupaten/kota sekitarnya.

#### **e. Perdagangan**

Sektor perdagangan memiliki posisi penting dalam perekonomian Kota Bima. Kegiatan perdagangan di Kota Bima tidak hanya melayani kebutuhan penduduk lokal, tapi juga bagi penduduk wilayah sekitarnya. Ketersediaan infrastruktur yang menunjang sektor perdagangan, seperti pelabuhan dan pusat perdagangan menjadikan Kota Bima menjadi pusat arus distribusi barang dan jasa. Jenis sarana perdagangan di Kota Bima pada tahun 2015 meliputi: 6 unit pasar umum, 457 unit toko, 481 unit kios/warung, 51 unit rumah makan.

Adapun perkembangan perusahaan perdagangan di Kota Bima menunjukkan tren yang cukup mengembirakan. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, pada tahun 2015 tercatat 2.409 perusahaan perdagangan yang ada di Kota Bima, dengan rincian 57 perusahaan perdagangan besar, 171 perusahaan perdagangan menengah, dan 2.181 perusahaan perdagangan kecil. Kawasan perdagangan di Kota Bima terdapat di Kecamatan Rasanae Barat, di mana di kawasan ini terdapat Pasar Raya, dan kawasan pertokoan. Skala pelayanan kawasan perdagangan di Kecamatan Rasanae Barat adalah skala regional. Selain itu kawasan perdagangan juga terdapat di Kecamatan Raba, yaitu dengan adanya Pasar Raba, Pasar Penaraga dan Pasar Kumbe. Kemudian di Kecamatan Asakota

terdapat Pasar Jatibaru, namun skala pelayanannya masih lokal dan terbatas pada wilayah sekitar pasar tersebut.

#### f. Industri

Pembangunan industri di Kota Bima bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang dan kuat guna menciptakan landasan perekonomian yang kokoh. Sektor industri terbagi atas industri besar, sedang, kecil, dan rumah tangga. Pengelompokan didasarkan atas banyaknya pekerja di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih dikategorikan sebagai industri besar, antara 20-99 orang sebagai industri sedang, 5-19 orang sebagai industri kecil, dan kurang dari 5 orang sebagai industri rumahtangga. Kegiatan industri yang dominan di Kota Bima adalah industri kecil dan menengah. Kegiatan industri dijalankan oleh sejumlah UKM dengan kegiatan usaha industri antara lain meliputi industri tenun ikat tradisional, industri kerajinan, industri meubel dan furniture, industri pengolahan makanan, industri genteng press, dan usaha yang lainnya. Dilihat dari jenis industrinya, terlihat adanya pola persebaran industri kecil yang berbeda di masing-masing kecamatan. Sebagai contoh Kecamatan Rasanae Timur dan Raba merupakan sentra industri tenun, sementara Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda sentra industri makanan.

Dilihat dari kelompok industri, jumlah perusahaan dan tenaga kerja terus meningkat dalam 2 (dua) tahun terakhir, demikian juga dengan nilai investasi dan nilai produksinya. Kelompok Industri bidang IKAHH pada tahun 2015 berjumlah 823 dengan nilai produksi Rp.86.556.998,-. Sedangkan kelompok Industri ILMEA pada tahun 2015 berjumlah 582 dan nilai produksi Rp. 198.064.171,-. Adapun jumlah tenaga kerja yang terserap dari pengembangan industri ini adalah 10.773 orang.

**Tabel 2.93.**  
**Jumlah Perusahaan Industri dan Kerajinan Menurut Jenis Perusahaan dan Nilai Produksi di Kota Bima Tahun 2015**

Kelompok Industri/Jenis Perusahaan	Banyak Perusahaan		Nilai Produksi (Rp.000)	
	2014	2015	2014	2015
<b>I. BIDANG IKAHH (Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan)</b>	<b>756</b>	<b>823</b>	<b>85.236.098</b>	<b>86.556.998</b>
<b>II. BIDANG ILMEA (Industri Logam, Mesin, Perekayasaan)</b>	<b>565</b>	<b>582</b>	<b>33.378.483</b>	<b>198.064.171</b>
<b>A. INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN PEREKAYASAAN</b>	<b>91</b>	<b>103</b>	<b>11.270.618</b>	<b>175.679.473</b>
1 Pandai Besi/Alat Pertanian	36	36	767.233	767.233
2 Pertukangan Mas/PerakPerhiasan	7	7	1.397.385	167.686.200
3 Perkalengan	12	21	297.000	302.940
4 Reparasi Mesin Tik	3	3	2.410.000	24.100
5. Pengelasan	32	34	6.255.000	6.755.000
5. Penggilingan Batu	1	2	144.000	144.000
<b>B. INDUSTRI TEKSTIL</b>	<b>318</b>	<b>321</b>	<b>10.282.215</b>	<b>10.446.465</b>
1 Penjahitan/konveksi	115	118	6.333.335	6.497.585
1 Pertenunan	200	200	3.932.500	3.932.500

Kelompok Industri/Jenis Perusahaan	Banyak Perusahaan		Nilai Produksi (Rp.000)	
	2014	2015	2014	2015
3 Bordir	3	3	16.380	16.380
<b>C. INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN ANEKA</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>1.284.620</b>	<b>1.344.703</b>
1 Reparasi Radio, Tape, dan Amplifier	10	10	19.500	19.500
2 Arloji	4	4	20.700	20.700
3 Komputer	16	16	1.202.850	1.262.933
4 Dinamo dan Transformator	2	2	34.070	34.070
5 Kulkas	2	2	7.500	7.500
<b>D. INDUSTRI ALAT ANGKUT</b>	<b>122</b>	<b>124</b>	<b>10.541.030</b>	<b>10.593.530</b>
1 Reparasi Kendaraan Roda 2 dan 4	120	122	10.534.530	10.587.030
2 Reparasi Diesel dan Radiator	2	2	6.500	6.500

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2015

**Tabel 2.94.**  
**Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga Menurut Kelompok Industri Formal dan Non Formal di Kota Bima Tahun 2015**

No.	Kelompok Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (Rp.000)	Nilai Produksi (Rp. 000)
<b>1.</b>	<b>Industri Logam, Mesin dan Perekayasaan</b>	<b>582</b>	<b>6.426</b>	<b>34.905.126</b>	<b>198.064.171</b>
	- Formal	82	219	3.984.500	7.543.670
	- Non Formal	500	6.207	30.920.626	190.520.501
<b>2.</b>	<b>Industri Kimia Agro Industri dan Hasil Hutan</b>	<b>823</b>	<b>4.347</b>	<b>17.357.000</b>	<b>85.556.998</b>
	- Formal	124	431	3.984.500	23.817.595
	- Non Formal	699	3.916	13.372.500	62.739.403
	Jumlah	<b>1.405</b>	<b>10.773</b>	<b>51.036.550</b>	<b>118.614.581</b>
	2 0 15	1.321	10.715	47.247.400	76.496.627

Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2015

#### g. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkaitan dengan sektor-sektor lainnya. Pembangunan sektor pariwisata tidak bisa berjalan sendiri dan parsial dari sektor lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan sektor pariwisata di Kota Bima, pada tahun 2014 telah disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Bima. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

#### h. Transmigrasi

Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke

bawah. Dengan demikian, program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan.

Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi.

## 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1. Angka Konsumsi Per Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

**Tabel 2.95.** Angka Konsumsi RT per Kapita di Kota Bima Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total Pengeluaran RT (Rp)	513.138	558.009	625.693	784.094	916.405	803.976
2.	Jumlah RT	35.606	35.930	37.374	38.197	39.020	39.854
3.	Rasio (1/2)	14,41	15,53	16,74	20,53	23,49	20,17

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

#### 2. Konsumsi non pangan

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari

dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

**Tabel 2.96.**  
Persentase Konsumsi RT non-Pangan di Kota Bima Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Total Pengeluaran RT non Pangan (Rp)	283.354	303.550	390.174	469.931	587.289
2.	Total Pengeluaran (Rp)	558.009	625.693	784.094	916.405	758.875
3.	Rasio (%)	50,78	48,51	49,76	51,28	77,29

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

#### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 1. Aksesibilitas daerah

- Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Bima pada tahun 2010-2014 umumnya mengalami penurunan disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) setiap tahunnya.

**Tabel 2.97.**  
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2011-2015

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2016
1.	Panjang Jalan (Km)	369,49	369,49	258,60	258,60	258,5
2.	Jumlah Kendaraan (roda 2 + roda 4)	29.973	37.265	34.089	32.530	32.287
3.	Rasio	1,23	0,99	0,76	0,79	0,80

Sumber : BPS Kota Bima, 2015

- Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum dalam periode 1 (satu) tahun sebagaimana tertera pada tabel dibawah.

**Tabel 2.98.** Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2011-2016

No.	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah orang (Jiwa)	973.000	1.081.800	1.412.362	1.054.096	2.947.434	2.871.809
2.	Jumlah Barang (Ton)	251.446	505.673	554.556	585.127	334.328	545.376

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017 dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, 2017

- Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun  
Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/terminal selama kurun waktu tahun 2015–2016 terus mengalami peningkatan.

**Tabel 2.99.** Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015				2016			
		Orang		Barang (ton)		Orang		Barang (ton)	
		Turun	Naik	Bongkar	Muat	Turun	Naik	Bongkar	Muat
1.	Dermaga	51.084	38.918	220.429	113.899	51.809	31.923	460.850	84.526
2.	Terminal	2.896.350	NA	NA	NA	2.820.000	NA	NA	NA
	Jumlah	2.947.434	38.918	220.429	113.899	2.871.809	31.923	460.850	84.526

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017 dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bima, 2017

## 2. Penataan wilayah

- Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tataruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

**Tabel 2.100.** Rasio Ketaatan Terhadap RTRW di Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Realisasi RTRW	15.557,7	15.557,7	Na	Na	17.025
2.	Rencana Peruntukan RTRW	22.225	22.225	22.225	Na	19.917,2
3.	Rasio (1/2)	70,001	70,001	Na	Na	85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

- Luas wilayah produktif  
Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

**Tabel 2.101.** Rasio Luas Wilayah Produktif Tahun 2010 s.d 2014 Kota Bima

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Wilayah produktif	10.909	10.909	10.909	10.909	na
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	11.669	11.669	11.669	11.669	na
3.	Rasio (1/2)	93,48	93,48	93,48	93,48	na

Sumber : Bappeda Kota Bima

- Luas Wilayah Industri

Tabel 2.102. Rasio Luas Wilayah Industri Tahun 2010 s.d 2014 Kota Bima

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Wilayah Industri (Ha)	18,72	18,63	60,94	Na	na
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	11.669	11.669	11.669	Na	na
3.	Rasio (1/2)	0,16	0,16	0,52	Na	na

Sumber : Bappeda Kota Bima

- Luas Wilayah Kekeringan

Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW.

Tabel 2.103. Rasio Luas Wilayah Kekeringan di Kota Bima Tahun 2011- 2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Luas Wilayah Kekeringan/ Kritis (Ha)	4.811	4.511	4.488	437	517
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Ha)	11.669	11.669	11.669	11.669	11.669
3.	Persentase (%)	41,23	38,65	38,46	3,74	4,43

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2015

- Luas Wilayah Perkotaan

Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budidaya sesuai dengan RTRW. Adapun luas wilayah perkotaan di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2010-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rasio luas wilayah perkotaan sebesar 13,07 kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi 16,40.

Tabel 2.104. Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kota Bima Tahun 2010-2014

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Luas Wilayah Perkotaan	1.757	1.914	1.914	na	na
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	11.669	11.669	11.669	na	na
3.	Rasio (1/2)	15,06	16,40	16,40	na	na

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan

### 3. Fasilitas bank dan non bank

Fasilitas bank dan non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya, dan jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya.

- Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

Jumlah bank di Kota Bima adalah sebanyak 16 unit. Adapun secara rinci fasilitas bank dan non bank dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.105. Jenis dan Jumlah Bank di Daerah Kota Bima Tahun 2012-2016

No	Sektor	Jumlah				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	Bank Umum	7	7	7	8	8
2.	Bank Syariah	1	1	1	4	4
3.	BPR	5	4	4	4	4
Jumlah		13	12	12	16	16

Sumber : Bagian Perekonomidan Usaha Daerah Setda, 2017

- Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Adapun di Kota Bima hingga tahun 2015 belum memiliki perusahaan asuransi syariah.

Tabel 2.106.

#### Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi di Daerah Kota Bima

No	Sektor	Jumlah				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2	Konvensional	4	4	4	4	4
3	Syariah	-	-	-	-	-
Jumlah		4	4	4	4	4

Sumber : BPS Kota Bima

#### 4. Ketersediaan air bersih

- Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Air Bersih (*clean Water*) adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak. Air Minum (*drinking water*) Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002). Pada tahun 2015, Persentase penduduk yang menggunakan air bersih adalah sebanyak 88,81 persen.

Tabel 2.107. Sumber Air Bersih bagi Rumah Tangga

No	Sumber Air Bersih	2012 <sup>*)</sup>	2013 <sup>*)</sup>	2014 <sup>*)</sup>	2015 <sup>**)</sup>	2016 <sup>**)</sup>
1.	Leding (Perpipaan)	9.373	9.920	20.449	109.080	29.622
2.	Sumur Lindung	1.470	1.470	1.375	17.429	16.203
3.	Sumur Tidak Terlindung	13	13	-	-	-
4.	Mata Air Terlindung	39	20	29	-	2.357
5.	Mata Air Tidak Terlindung	-	-	-	-	-

No	Sumber Air Bersih	2012 <sup>*)</sup>	2013 <sup>*)</sup>	2014 <sup>*)</sup>	2015 <sup>**)</sup>	2016 <sup>**)</sup>
6.	Sungai	-	-	-	-	-
7.	Danau/Waduk	-	-	-	-	-
8.	Air Hujan	14	14	-	459	-
9.	Air Kemasan	19	-	-	-	-
10.	Lainnya	-	-	-	10.944	232
11.	Total Jumlah Rumah Tangga/Penduduk yang menggunakan air bersih	23.152	23.233	23.037	137.912	150.173
12.	Persentase Rumah Tangga/Penduduk yang menggunakan air bersih	78,51	78,35	70,80	88,81	92,07

Ket : <sup>\*)</sup> Menggunakan Data Jumlah Rumah Tangga      <sup>\*\*)</sup> Menggunakan Data Jumlah Penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2017

## 5. Fasilitas listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

Rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan.

Tabel 2.108. Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Bima

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Rumah Tangga dengan daya 450 watt	8.972	9.700	9.991	9.873
2.	Rumah Tangga dengan daya 900 watt	8.690	10.558	12.305	13.200
3.	Rumah Tangga dengan daya 1.300 watt	6.949	6.749	6.680	7.428
4.	Rumah Tangga dengan daya 2.200 watt	550	588	635	675
5.	Rumah Tangga dengan daya > 2.200 watt	195	206	212	237
Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik		25.356	27.801	31.838	33.429

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2017

Tabel 2.109. Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1.	Daya Listrik Terpasang (VA)	35.395.975	38.660.820	41.453.170	44.896.620
2.	Jumlah Kebutuhan Listrik (Kwh)	5.340.488	5.024.202	5.801.215	5.606.851

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2017

## 6. Ketersediaan restoran

Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukkan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya.

## 7. Ketersediaan penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Di Kota Bima sendiri, hingga tahun 2016 jumlah hotel sudah mencapai 17 unit dengan jumlah kamar sebanyak 383 kamar.

Tabel 2.110. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel Kota Bima

No	Jenis Penginapan/Hotel	2015			2016		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur	Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	0	0	0	0	0	0
2.	Hotel Bintang 4	0	0	0	0	0	0
3.	Hotel Bintang 3	0	0	0	0	0	0
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0	0	0	0
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	16	369	NA	17	383	NA
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	16	369	NA	17	383	NA

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bima, 2017

### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Angka Kriminalitas

Indikator kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 2.111. Angka Kriminalitas Kota Bima

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Laporan Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	938	524	967	1.081	1.020
2.	Jumlah Penduduk	146.308	148.645	162.752	159.736	159.736
	Angka Kriminalitas	0,0064	0,0035	0,0059	0,0078	0,0081

Sumber : Kepolisian Resor Bima Kota, 2017 (diolah)

## 2. Kemudahan perijinan

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Tabel 2.112. Lama Proses Perijinan Kota Bima

No	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1.	SIUP	3 hari kerja	5	Gratis
2.	TDP	3 hari kerja	5	Gratis
3.	TDG	3 hari kerja	5	Gratis
4.	TDI	3 hari kerja	5	Gratis
5.	IMB	7 hari kerja	7	Disesuaikan dengan kelas jalan serta fungsi dan luas bangunan
6.	HO	4 hari kerja	10	Biaya dihitung berdasarkan luas tempat usaha, indeks lokasi, indeks gangguan, dan nilai per m <sup>2</sup> .
7.	SIUJK	3 hari kerja	6	Gratis
8.	BBMT	3 hari kerja	8	Biaya dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha dikalikan indeks lokasi dan dikalikan indeks gangguan serta dikalikan luas tempat usaha

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2017

## 3. Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah)

Jumlah dan macam pajak daerah dan retribusi daerah diukur dengan jumlah dan macam insentif pajak dan retribusi daerah yang mendukung iklim investasi. Jumlah dan macam serta retribusi daerah selama kurun waktu tahun 2015-2016 sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.113. Jumlah & Macam Insentif Pajak/ Retribusi Daerah yang Mendukung Iklim Investasi Tahun 2015-2016

No	Uraian	2015	2016
1.	Jumlah Pajak yang dikeluarkan	11.229.060.740	12.341.769.989
2.	Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi	-	-
3.	Jumlah Retribusi yang dikeluarkan	5.268.437.826	5.132.141.660
4.	Jumlah Pajak yang mendukung iklim investasi	11.229.060.740	12.341.769.989

Sumber : BPPKAD Kota Bima, 2017

#### 4. Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Adapun jumlah perda terkait perijinan sebanyak 4 perda. Sedangkan perda terkait lalu lintas barang sebanyak 2 perda.

#### 5. Persentase kelurahan berstatus swasembada

Berdasarkan kriteria status, kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni kelurahan swadaya (tradisional); kelurahan swakarya (transisional); dan kelurahan swasembada (berkembang). Dalam kurun lima tahun terakhir, kelurahan swasembada di Kota Bima tercatat berjumlah 24 kelurahan.

Tabel 2.114. Jumlah Kelurahan Swasembada Kota Bima

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah Kelurahan Swadaya	0	0	0	0	0
2.	Jumlah Kelurahan Swakarya	14	14	14	14	14
3.	Jumlah Kelurahan Swasembada	24	24	24	24	24
4.	Jumlah Kelurahan (1) + (2) + (3)	38	38	38	38	38
Persentase Desa berstatus swasembada dibagi jumlah kelurahan (3)/(4)		63,16%	63,16%	63,16%	63,16	63,16

Sumber : BPS Kota Bima, 2016

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### 1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima pada 2012 tercatat sebesar 712 per 10.000 penduduk dan pada tahun 2016 tercatat sebesar 842 per 10.000 penduduk.

Tabel 2.115. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2012-2016  
(Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah lulusan S1	11.073	11.962	11.689	11.257	11.257
2.	Jumlah lulusan S2	480	532	515	486	471
3.	Jumlah lulusan S3	13	14	14	12	12
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	11.566	12.508	12.218	11.755	11.108
5.	Jumlah penduduk	162.511	156.820	163.337	137.851	139.366
Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk		712	798	748	853	842

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2017

## 2. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.116. Rasio Ketergantungan Tahun 2012-2016 Kota Bima

No	Uraian	2012*)	2013**)	2014**)	2015**)	2016**)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	41.897	31.973	39.382	36.500	37.485
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	6.607	7.303	8.697	6.932	7.050
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	48.504	39.276	48.079	43.432	44.535
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	95.514	117.544	115.258	94.419	94.831
Rasio ketergantungan (3) / (4)		50,78	33,41	41,71	46,00	46,96

Sumber : \*) BPS Kota Bima, 2016 (diolah)

\*\*)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017 (diolah)

## 2.1.5. Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

Tabel 2.117.  
Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
			Tahun (n-3)	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)	Tahun n
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PDRB (Harga Berlaku)	Juta	2.993.332,48	3.053.199		3.129.529,11	3.214.026
2.	PDRB (Harga Konstan)	Juta	2.437.609,58	2.578.990,9		2,629,861.9	2,790,377.81
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan tahun tertentu	%	5,74	5.80-6	0,21	5,85-6	5,88-6
4.	Tingkat Inflasi	%	4,07				
5.	Struktur PDRB Pendekatan Produksi atau Sektoral						
6.	Produktivitas Sektoral, yang merupakan rasio antara Nilai Tambah Bruto (NTB) setiap sektor terhadap jumlah tenaga kerja di sektor yang bersangkutan						
7.	Struktur PDRB Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)						
8.	Besaran ICOR (Incremental Capital Output Ratio)						
9.	Jumlah Penduduk Miskin						
10.	Tingkat Pengangguran						
11.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan: - Pendapatan Perkapita - Kemampuan Investasi - Besaran Indeks Gini ( <i>Gini Ratio Index</i> ) - Besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) - dan sebagainya						
12.	Berbagai macam besaran						

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
			Tahun (n-3)	Tahun (n-2)		Tahun (n-1)	Tahun n
1	2	3	4	5	6	7	8
	rasio dan perbandingan-perbandingan						
	- Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,48	0,48		0,53	
	- Biaya pendidikan Terhadap PDRB	%	-	-	-	-	0,55
	- Biaya kesehatan terhadap PDRB	%		23,01		27,85	-
	- Perbandingan Penerimaan Pemerintah Daerah (PAD dan Dana Perimbangan terhadap PDRB)	%	24,49				29,65
	- Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRBD	%	1,45	1,35		1,22	1,32

## 1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada sub bab ini akan diuraikan realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan maupun yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pencapaian target kinerja.

### 1.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

##### 1. Urusan Pendidikan

Urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. **39.016.529.900,00** dan dapat direalisasikan sebesar Rp. **37.069.6190,27** (95,01%).

Anggaran urusan Pendidikan ini terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.



**a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Urusan wajib pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Tabel 2.118. Program/ Kegiatan Urusan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.712.520.950,00</b>	<b>1.608.796.432,00</b>	<b>93,94</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	90.300.000,00	80.800.000,00	89,48
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81.100.000,00	51.853.483,00	63,94
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	84.790.000,00	67.500.000,00	79,61
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	52.000.000,00	48.691.447,00	93,64
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.760.000,00	152.100.000,00	94,03
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	25.370.000,00	25.370.000,00	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	244.148.500,00	239.400.000,00	98,06
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	101.650.000,00	84.250.000,00	82,88
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	282.190.000,00	280.825.000,00	99,52
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	28.240.000,00	17.080.000,00	60,48
11	Penyediaan makanan dan minuman	11.200.000,00	11.175.000,00	99,78
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	449.772.450,00	449.761.502,00	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.000.000,00	99.990.000,00	99,99
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.007.074.000,00</b>	<b>986.607.250,00</b>	<b>97,97</b>
1	Pembangunan gedung kantor	705.620.000,00	694.825.000,00	98,47
2	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	39.954.000,00	39.954.000,00	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55.500.000,00	55.349.500	99,73
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60.200.000,00	56.218.750,00	93,39
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	20.800.000,00	15.460.000,00	74,33
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	125.000.000,00	124.800.000,00	99,84
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	45.000.000,00	45.000.000,00	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>118.131.000,00</b>	<b>117.731.000,00</b>	<b>99,66</b>
1	Pelaksanaan penilaian AKJG	118.131.000,00	117.731.000,00	99,66
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>141.500.000,00</b>	<b>141.250.000,00</b>	<b>99,82</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.600.000,00	21.600.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	0,00	0,00	0
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	69.900.000,00	69.650.000,00	99,64
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	50.000.000,00	50.000.000,00	100
<b>VI</b>	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	<b>2.165.806.250,00</b>	<b>2.107.033.750,00</b>	<b>97,29</b>
1	Penambahan ruang kelas sekolah	445.080.000,00	441.650.000,00	99,23

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
2	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	40.000.000,00	40.000.000,00	100
3	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	338.400.000,00	336.825.000,00	99,53
4	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	1.193.620.000,00	1.193.620.000,00	100
5	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	111.866.250,00	58.098.750,00	51,94
6	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini	25.380.000,00	25.380.000,00	100
7	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	11.460.000,00	11.460.000,00	100
<b>VII</b>	<b>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	<b>27.048.337.700,00</b>	<b>25.437.260.414,00</b>	<b>94,04</b>
1	Penambahan ruang kelas sekolah	363.000.000,00	363.000.000,00	100
2	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	108.660.000,00	107.000.000,00	98,47
3	Pembanguna sarana air bersih dan sanitary	169.617.000,00	169.616.000,00	100
4	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	1.736.314.000,00	1.727.193.400,00	99,47
5	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	1.605.067.200,00	1.522.603.614,00	94,86
6	Pengadaan mebeluer sekolah	261.020.000,00	260.950.000,00	99,97
7	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	4.228.935.000,00	4.228.927.000,00	100
8	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	17.457.132.000,00	16.041.969.150,00	91,89
9	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar	442.800.000,00	391.800.000,00	88,48
10	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	379.516.500,00	349.053.250,00	91,97
11	Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Siswa	296.276.000,00	275.148.000,00	92,87
<b>VIII</b>	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	<b>101.687.500,00</b>	<b>76.772.400,00</b>	<b>75,50</b>
1	Pengembangan Pendidikan Non Formal	101.687.500,00	76.772.400,00	75,50
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>1.220.051.000,00</b>	<b>1.139.347.281</b>	<b>93,39</b>
1	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	104.704.000,00	104.604.000,00	100
2	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1.115.347.000,00	1.034.743.281,00	92,77
<b>X</b>	<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	<b>450.013.500,00</b>	<b>404.267.500,00</b>	<b>89,83</b>
1	Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan	55.910.000,00	44.510.000,00	79,61
2	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	159.467.500,00	130.912.500,00	82,09
3	Koordinasi hari-hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olah raga	94.310.000,00	94.310.000,00	100
4	Pendataan Pendidikan	77.572.000,00	77.072.000,00	99,36
5	Unit Pelaksana Akreditasi	62.754.000,00	57.463.000,00	91,57
<b>X</b>	<b>Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya</b>	<b>5.006.408.000,00</b>	<b>5.005.553.000,00</b>	<b>99,98</b>
1	Pengembangan Taman Budaya	5.006.408.000,00	5.005.553.000,00	99,98
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>39.016.529.900,00</b>	<b>37.069.619.027,00</b>	<b>95,01</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan pendidikan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

## 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan anak usia dini sebesar Rp. 2.165.806.250,00 yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penambahan Ruang Kelas dengan alokasi anggaran Rp. 445.080.000,00 dan teralisasi sebesar Rp. 441.650.000,00 atau sebesar 99,23%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya Penambahan Ruang Kelas Sekolah TKN 13 Monggonao Kota Bima, TKN 09 Monggonao Kota Bima, TKN 07 Pane Kota Bima.
- 2) Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 100%. Hasil pelaksanaan Kegiatan tersebut yaitu terlaksananya Pembangunan / Rehabilitasi Berat Sanitasi, Jamban Siswa / Guru TK Pembina Raba Kota Bima.
- 3) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 336.825.000,00 atau sebesar 99,53%. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu terlaksananya Rehabilitasi Sedang / Berat (Aula) TKN Pembina Kolo Kota Bima, Rehabilitasi Sedang / Berat (Rabat) TKN 25 Kota Bima, Rehabilitasi Sedang / Berat TKN 19 Santi Kota Bima.
- 4) Kegiatan Pengembangan Pendidikan anak usia dini yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.193.620.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.193.620.000,00 atau sebesar 100%.
- 5) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 111.866.250,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 58.098.750,00 atau sebesar 51,94%.
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.380.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 25.380.000,00 atau sebesar 100%.
- 7) Kegiatan Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.460.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 11.460.000,00 atau sebesar 100%. Capaian hasil kegiatan ini pemantauan proses pelaksanaan program berjalan dengan baik sebagaimana yang telah direncanakan.

## 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program wajib belajar pendidikan 9 tahun sebesar Rp. 27.048.337.700,00 yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penambahan ruang kelas sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 363.000.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 363.000.000,00 atau sebesar 100%. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu berupa penambahan ruang kelas sekolah SMPN 4 Kota Bima;
- 2) Kegiatan Pembangunan Taman, Lapangan upacara dan Fasilitas Parkir dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.660.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 107.000.000,00 atau sebesar 98,47%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah terpasangnya Paving Block SDN 49 Kota Bima dan Penimbunan / Urukun SDN 40 Kota Bima;
- 3) Kegiatan Pembangunan sarana air bersih dan sanitari dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 169.617.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 169.616.000,00 atau sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah rehabilitasi / pembangunan sanitasi, jamban siswa / guru SD di SDN 18 Kota Bima dan SDN 20 Kota Bima;
- 4) Kegiatan Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa dengan anggaran sebesar Rp. 1.736.314.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.727.193.400,00 atau sebesar 99,47%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya buku-buku perpustakaan dan buku muatan lokal di 29 Sekolah Dasar di Kota Bima;
- 5) Kegiatan pengadaan alat praktik dan peraga siswa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.605.067.200,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.522.603.614,00 atau sebesar 94,86%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya media pendidikan, alat praktek/peraga matematika di 10 SMPN dan SMP, Peralatan media pembelajaran SMP di 20 SMPN dan SMP, Peralatan TIK Laboraturium Komputer di 5 SMPN, Peralatan media pendidikan di 6 SDN, Pengadaan peralatan Laboraturium IPA di 5 SMPN, Peralatan pendidikan IPS SMP;
- 6) Kegiatan pengadaan meubelair sekolah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.020.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 260.950.000,00 atau sebesar 99,97%. Output dari pelaksanaan kegiatan adalah tersedianya Meubelair meja dan kursi guru dan siswa di 5 SDN di Kota Bima;

- 7) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 4.228.935.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 4.228.927.000,00 atau sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu perbaikan fasilitas sarana belajar SDN dan SMPN yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan;
- 8) Kegiatan penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.457.132,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 17.457.132,00 atau sebesar 100 %. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan TIM Manajemen BOS di 72 SDN dan 15 SMPN di Kota Bima;
- 9) Kegiatan pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar dengan anggaran sebesar Rp. 442.800.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 391.800.000,00 atau sebesar 88,48%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu peningkatan pemahaman kelembagaan sekolah berbasis MBS pada SDN dan SMPN di Kota Bima;
- 10) Kegiatan pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa dengan anggaran sebesar Rp. 379.516.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 349.053.250,00 atau sebesar 91,97%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya 11 jenis lomba peningkatan minat bakat dan prestasi siswa Tk. Nasional dan Internasional;
- 11) Kegiatan penyelenggaraan ujian nasional dan ujian kompetensi siswa dengan anggaran sebesar Rp. 296.276.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 275.148.000,00 atau sebesar 92,87%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terselenggaranya Ujian Nasional Tingkat Pendidikan Dasar Kota Bima.

### **3. Program Pendidikan Non Formal**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan non formal sebesar Rp. 101.687.500,00 dengan capaian sebesar Rp 76.772.400,00 atau sebesar 75,50%. Output dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya kegiatan pengembangan pendidikan non formal antara lain : Pelaksanaan kegiatan jambore PTK PNFI, Gebyar Hari Anak Nasional, kegiatan seleksi lembaga PAUD dan PKBM berperstasi.

#### **4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan non formal sebesar Rp. 1.220.051.000,00 yang dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan pelaksanaan sertifikasi pendidik dengan anggaran sebesar Rp. 104.704.000,00 dengan capaian realisasi Rp. 104.604.000,00 atau sebesar Rp. 100%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sertifikasi tenaga pengajar;
- 2) Kegiatan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan anggaran sebesar Rp. 1.115.347.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 1.034.743.281,00 atau sebesar 92,77%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa peningkatan mutu dan kualitas tenaga kependidikan kepada tenaga pengajar sebanyak 7 kali diklat.

#### **5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pendidikan non formal sebesar Rp. 450.013.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 404.267.500,00 atau sebesar 89,83%. Dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 55.910.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 44.510.000,00 atau sebesar 79,61%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi terkait kebijakan pendidikan sebanyak 4 kali;
- 2) Kegiatan Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan dengan anggaran sebesar Rp. 159.467.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 130.912.500,00 atau sebesar 82,09%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu dokumen informasi manajemen pendidikan;
- 3) Kegiatan koordinasi hari-hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 94.310.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 94.310.000,00 atau sebesar 100%. Output dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terdatanya jumlah peringatan hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- 4) Kegiatan pendataan pendidikan yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 77.572.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 77.072.000,00 atau sebesar 99,36%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu

terlaksananya pendataan dan tersusunnya Data Pokok dan Profil Pendidikan Kota Bima;

- 5) Kegiatan Unit Pelaksana Akreditasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.754.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian sebesar Rp. 57.463.000,00 atau sebesar 91,57%. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu terlaksananya kegiatan unit pelaksana akreditasi sebanyak 2 kali.

#### **6. Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program pembangunan sarana prasarana seni dan budaya sebesar sebesar Rp 5.006.408.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.005.553.000,00 atau sebesar 99,98% dalam kegiatan Pengembangan Taman Budaya. Hasil dari pelaksanaan dari kegiatan ini yaitu tercapinya pembangunan Gedung Seni dan Budaya serta penataan luar dalam gedung.

#### ***b. Capaian Kinerja***

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan pendidikan pada Dinas Dikpora Kota Bima Tahun 2017 dideskripsikan sebagai berikut.

##### ***1. Layanan PAUD (formal dan non formal) yang bermutu***

###### **a. Angka Partisipasi Kasar PAUD**

APK anak usia dini Kota Bima pada tahun 2017 hanya sebesar 48,23% lebih rendah dari target tahun 2017 sebesar 58,56% dengan tingkat capaiannya sebesar 82,36%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 56,01% maka terjadi penurunan yang sangat signifikan. Penurunan ini terjadi sebagai akibat adanya koreksi atau perbaikan data partisipasi anak usia dini.

###### **b. Angka Partisipasi Murni PAUD**

APM anak usia dini Kota Bima pada tahun 2017 hanya sebesar 48,22% lebih rendah dari target tahun 2017 sebesar 58,54% dengan tingkat capaiannya sebesar 82,37%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 56% maka terjadi penurunan yang sangat signifikan. Penurunan ini terjadi sebagai akibat adanya koreksi atau perbaikan data partisipasi anak usia dini.

##### ***2. Kepastian memperoleh Layanan Pendidikan Dasar yang bermutu***

###### **a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) per 1000 penduduk jenjang pendidikan:**

Angka Partisipasi Sekolah Kota Bima tahun 2017 pada berbagai jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 94,71 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 93,76.

- b. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan:  
Angka Partisipasi Kasar Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 94,71 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 93,76.
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan:  
Angka Partisipasi Murni Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sama dengan angka APK yaitu sebesar 94,71 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 93,76.
- d. Rata-rata Lama Sekolah  
Rata-rata lama sekolah di Kota Bima pada tahun 2017 adalah 10,13 tahun dari target tahun 2017 sebanyak 10,00 tahun dengan tingkat capaiannya sebesar 101,30%.

### *3. Tata kelola manajemen pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan*

pencapaian sasaran Meningkatkan Mutu Pendidikan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan perbandingan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya:

- a. Angka Melek Huruf  
Angka Melek Huruf Kota Bima pada tahun 2017 sebesar 96,45 % lebih Rendah dari target tahun 2017 sebesar 95,45% dengan tingkat capaiannya sebesar 120,00%. Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 sebesar 96,26% maka terjadi Kenaikan sebesar 2%.
- b. Rata-rata Nilai Ujian Nasional  
Rata-rata Nilai Ujian Nasional Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 7,25 dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket A sebesar 4,7.
- c. Persentase Angka Kelulusan  
Persentase Angka Kelulusan Kota Bima tahun 2017 pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebesar 99,61% dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sebesar 100%.

### ***c. Permasalahan dan Solusi***

Permasalahan yang masih dihadapi sekaligus menjadi tantangan kedepan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan
  - Kondisi sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan yang masih perlu ditingkatkan;



- Tidak adanya data yang cukup akurat untuk memantau lulusan dari sekolah dan kursus yang telah bekerja atau telah terserap di bursa tenaga kerja, sehingga tidak dapat diketahui tingkat relevansi antara pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat industri dan dunia usaha;
  - Masih kurangnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
2. Solusi
- Menyiapkan sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan yang memadai;
  - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik sehingga dapat memenuhi standar kualifikasi, pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

## 2. **Urusan Kesehatan**

Urusan Kesehatan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 33.534.311.341,00,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 31.096.247.311,00,- atau sebesar 92,73%.

Pelaksanaan Urusan Kesehatan ini tersebar pada beberapa SKPD yaitu Dinas Kesehatan Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 33.236.311.341,00,-. Bagian Umum dan Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 48.000.000,00,-. Kecamatan Asakota Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 40.000.000,00,-. Kecamatan Mpunda Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 100.000.000,00,-. Kecamatan Raba Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 110.000.000,00,-.

### 1. Dinas Kesehatan

Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 33.236.311.341,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 30.804.073.311,00 atau sebesar 92,68%.

### 2. Bagian Umum Setda Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Bagian Umum Setda Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 48.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 42.300.000,00 atau sebesar 88,13%.

### 3. Kecamatan Asakota Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Kecamatan Asakota Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 40.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau sebesar 100%.

### 4. Kecamatan Mpunda Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Kecamatan Mpunda Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 99.874.000,00 atau sebesar 99,87%.

5. Kecamatan Raba Kota Bima

Urusan Kesehatan pada Kecamatan Raba Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 110.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 110.000.000,00,00 atau sebesar 100%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dan dapat diuraikan sebagai berikut.

***a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan***

Urusan wajib kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel Tabel 2.119. Program/ Kegiatan Urusan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bima  
Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.824.629.650,00</b>	<b>1.712.056.548,00</b>	<b>93,83</b>
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	1.200.000,00	1.200.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	321.600.000,00	248.780.733,00	77,35
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	34.916.000,00	27.030.000,00	77,41
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	86.700.000,00	73.688.800,00	84,99
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	123.600.000,00	123.566.000,00	99,97
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	422.400.000,00	405.600.000,00	96,02
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.500.000,00	5.875.000,00	90,38
8	Penyediaan alat tulis kantor	178.961.400,00	178.960.663,00	99,99
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.286.500,00	24.956.250,00	94,93
10	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.690.000,00	2.650.000,00	98,51
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.800.000,00	11.800.000,00	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	14.520.000,00	14.520.000,00	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	554.855.750,00	554.829.102,00	99,99
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	38.600.000,00	38.600.000,00	100
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>617.116.750,00</b>	<b>612.522.600,00</b>	<b>99,25</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	130.258.000,00	129.393.000,00	99,33
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	114.566.750,00	114.079.000,00	99,57
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	368.992.000,00	365.750.600,00	99,12
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	100
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>144.289.000,00</b>	<b>135.255.500,00</b>	<b>93,73</b>
1	Pelaksanaan Penilaian AKJG	144.289.000,00	135.255.500,00	93,73
IV	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>170.485.250,00</b>	<b>169.585.250,00</b>	<b>99,47</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	19.580.000,00	19.580.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	30.210.000,00	29.850.000,00	98,80
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.330.250,00	49.790.250,00	98,92
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.690.000,00	40.690.000,00	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	29.675.000,00	29.675.000,00	100
V	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	<b>1.572.565.250,00</b>	<b>1.501.365.203,00</b>	<b>95,47</b>
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.454.776.000,00	1.399.186.453,00	96,17
2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	64.085.000,00	63.635.000,00	99,29
3	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	16.500.000,00	15.800.000,00	95,75
4	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	27.003.750,00	19.533.750,00	72,33
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	10.200.500,00	3.210.000,00	31,46
VI	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>6.448.142.843,00</b>	<b>6.024.998.634,00</b>	<b>93,43</b>

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya	94.482.500,00	80.494.369,00	85,19
2	Peningkatan kesehatan masyarakat	124.427.000,00	66.211.000,00	53,21
3	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	752.335.000,00	590.632.000,00	78,50
4	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	3.057.679.000,00	2.969.937.785,00	97,13
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	16.738.000,00	15.468.000,00	92,41
6	Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK)	9.125.000,00	3.780.000,00	41,42
7	Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta	16.217.500,00	16.197.500,00	99,87
8	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan	751.138.843,00	749.242.000,00	99,74
9	Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya	1.626.000.000,00	1.533.035.980,00	94,28
VII	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>60.597.100,00</b>	<b>59.897.100,00</b>	<b>98,84</b>
1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	19.025.000,00	19.025.000,00	100
2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	29.652.500,00	28.952.500,00	97,63
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.919.600,00	11.919.600,00	100
VIII	<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>	<b>23.989.500,00</b>	<b>23.839.500,00</b>	<b>99,37</b>
1	Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri	23.989.500,00	23.839.500,00	99,37
IX	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>910.832.000,00</b>	<b>872.157.500,00</b>	<b>95,75</b>
1	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	68.020.000,00	66.970.000,00	98,45
2	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	45.886.000,00	45.386.000,00	98,91
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	5.940.000,00	5.590.000,00	94,10
4	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70.443.000,00	70.043.000,00	99,43
5	Peningkatan Kesehatan Institusi	21.720.000,00	14.185.000,00	65,30
6	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	568.395.000,00	549.495.000,00	96,67
7	Komunikasi Informasi dan Edukasi	64.888.000,00	64.538.000,00	99,46
8	Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah	29.335.000,00	27.885.000,00	95,05
9	Pengembangan Sekolah Sehat	36.205.000,00	28.065.500,00	77,51
X	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	<b>176.762.500,00</b>	<b>166.997.150,00</b>	<b>94,47</b>
1	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	64.005.000,00	61.091.000,00	95,44
2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	71.838.750,00	65.337.500,00	90,95
3	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	28.676.250,00	28.326.250,00	98,77
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12.242.500,00	12.242.400,00	99,99
XI	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	<b>141.397.500,00</b>	<b>137.517.500</b>	<b>97,25</b>
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	30.867.500,00	29.807.500,00	96,56
2	Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum	5.440.000,00	5.440.000,00	100
3	Pembinaan Kebersihan Lingkungan	29.075.000,00	28.725.000,00	98,79
4	Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga	64.495.000,00	62.745.000,00	97,28

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
5	Pengawasan dan Pengendalian Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	11.520.000,00	10.800.000,00	93,75
XII	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>546.886.500,00</b>	<b>507.559.000,00</b>	<b>92,80</b>
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	43.390.000,00	42.000.000,00	96,79
2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	83.920.000,00	82.567.500,00	98,38
3	Peningkatan imunisasi	57.665.000,00	55.885.000,00	96,91
4	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	83.805.000,00	68.515.000,00	81,75
5	Peningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit	46.151.500,00	44.005.500,00	95,35
6	Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ( DBD, Malaria )	64.682.500,00	60.038.500,00	92,82
7	Pencegahan dan Pemberantasan Diare	49.950.000,00	47.492.500,00	95,08
8	Pencegahan dan Pemberantasan Ispa	22.265.000,00	21.565.000,00	96,85
9	Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru	60.132.500,00	51.265.000,00	85,25
10	Pencegahan dan Pemberantasan Kusta	34.925.000,00	34.225.000,00	97,99
XIII	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	<b>817.807.000,00</b>	<b>684.675.100,00</b>	<b>83,72</b>
1	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	672.207.000,00	559.911.600,00	83,29
2	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	63.620.000,00	62.420.000,00	98,11
3	Penyusunan naskah akademis standar pelayanan kesehatan	81.980.000,00	62.343.500,00	76,04
XIV	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>	<b>9.610.224.000,00</b>	<b>9.569.320.783,00</b>	<b>99,57</b>
1	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	678.429.192,00	677.140.000,00	99,80
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	5.050.838.000,00	5.020.738.000,00	99,40
3	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	3.880.956.808,00	3.871.442.783,00	99,75
XV	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>	<b>9.889.601.198,00</b>	<b>8.362.669.193,00</b>	<b>84,56</b>
1	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	9.889.601.198,00	8.362.669.193,00	84,56
XVI	<b>Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</b>	<b>133.135.800,00</b>	<b>118.314.800,00</b>	<b>88,86</b>
1	Pengadaan Sarana Prasarana Laboratorium	56.520.000,00	56.488.000,00	99,94
2	Penyediaan Biaya Operasional Laboratorium	76.615.800,00	61.826.800,00	80,69
XVII	<b>Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB</b>	<b>147.849.500,00</b>	<b>145.341.950,00</b>	<b>98,30</b>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	119.799.500,00	118.381.950,00	98,81
2	Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Remaja	18.800.000,00	18.060.000,00	96,06
3	Pelayanan Kesehatan Usia	7.000.000,00	6.650.000,00	95
4	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	2.250.000,00	2.250.000,00	100
<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>				
<b>BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN</b>		<b>48.000.000,00</b>	<b>42.300.000,00</b>	<b>88,13</b>
1	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>42.300.000,00</b>	<b>88,13</b>
	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	48.000.000,00	42.300.000,00	88,13
<b>KECAMATAN ASAKOTA</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>100</b>

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>100</b>
	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	100
<b>KECAMATAN MPUNDA</b>		<b>100.000.000,00</b>	<b>99.874.000,00</b>	<b>99,87</b>
1	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.874.000,00</b>	<b>99,87</b>
	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	100.000.000,00	99.874.000,00	99,87
<b>KECAMATAN RABA</b>		<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>100</b>
1	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>100</b>
	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	110.000.000,00	110.000.000,00	100
Jumlah Anggaran		<b>33.534.311.341,00</b>	<b>31.096.247.311,00</b>	<b>92,73</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2016 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan kesehatan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program Obat dan Perbekalan Kesehatan sebesar Rp. 1.572.565.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.501.365.203,00 atau 95,47% yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.454.776.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.399.186.453,00 atau sebesar 96,17%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar sebanyak 1 paket dan terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Obat Terpadu (POT)

- 2). Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 64.085.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 63.635.000,00 atau sebesar 99,29%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : dilaksanakannya Pemusnahan Obat Rusak/Kadaluwarsa dan pendistribusian obat

- 3). Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 15.800.000,00 atau sebesar 95,75%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis pengelolaan obat puskesmas dan jaringannya sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 60 orang
  - b. Terselenggaranya kegiatan sosialisasi penggunaan obat sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 20 orang
- 4). Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.003.750,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp 19.533.750,00 atau sebesar 72,33%.
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : Terselenggaranya pertemuan peningkatan penggunaan obat yang rasional sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 75 orang.
- 5). Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.210.000,00 atau sebesar 31,46%.
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : Terselenggaranya pertemuan evaluasi pengelolaan obat puskesmas sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 18 orang dan terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring pelayanan kefarmasian di puskesmas.

## **2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat sebesar Rp. 6.448.142.843,00 dan telah terrealisasi sebesar Rp. 6.024.998.634,00 atau sebesar 93,43% yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya dengan anggaran sebesar Rp. 94.482.500,00, yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 80.494.369,00,- atau sebesar 85,19%.
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
- a. Terselenggaranya sosialisasi program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 62 orang
  - b. Terselenggaranya rapat koordinasi pelaksanaan program Jamkesmas tingkat Kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 37 orang
  - c. Terselenggaranya rapat evaluasi tim pengelola BPJS tingkat Kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 32 orang
- 2). Peningkatan Kesehatan masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 124.427.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 66.211.000,00 atau sebesar 53,21%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya pertemuan koordinasi Program Kesehatan Jiwa Tingkat kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
  - b. Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Puskesmas sebanyak 1 kali selama 3 hari dengan jumlah peserta 20 orang
  - c. Terselenggaranya pertemuan Kesehatan Indera sebanyak 1 kali selama 1 hari dengan jumlah peserta 18 orang
  - d. Terselenggaranya pertemuan Kesehatan Khusus Gigi dan Rekam Medik sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 25 orang
- 3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 752.335.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 590.632.000,00 atau sebesar 78,50%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Koordinasi Evaluasi Manajemen Puskesmas sebanyak 1 kali dengan peserta 25 orang
  - b. tersedianya dokter PTT daerah sebanyak 10 orang selama 12 bulan dan dokter spesialis 4 orang selama 3 bulan
- 4). Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan dengan anggaran sebesar Rp. 3.057.679.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.969.937.785,00 atau sebesar 97,13%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. terselenggaranya Pertemuan Sosialisasi Kegiatan BOK sebanyak 2 kali
  - b. diterimanya Bantuan Operasional Kesehatan di 6 puskesmas
- 5). Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 16.738.000,00 yang telah dilaksanakan dengan tingkat realisasi sebesar 15.468.000,00 atau sebesar 92,41%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : Terselenggaranya pertemuan SP2TP sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 66 orang yang terdiri dari perwakilan 6 puskesmas .

- 6). Peningkatan usaha kesehatan kerja (UKK) dengan anggaran sebesar Rp. 9.125.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 3.780.000,00 atau sebesar 41,42%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya pelatihan kesehatan kerja bagi kader UKK sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang.



- b. Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan kader UKK dan monev program kesehatan kerja
- 7). Sertifikasi dan perizinan pelayanan kesehatan swasta dengan anggaran sebesar Rp. 16.217.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 16.197.500,00 atau sebesar 99,87%
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
- a. Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi dan perijinan praktek pelayanan kesehatan swasta sebanyak 1 kali kegiatan dengan jumlah peserta 3 orang.
  - b. Terselenggaranya rapat persiapan monev tim pengendali perijinan praktek pelayanan swasta
  - c. Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pendataan dan pemetaan perijinan praktek pelayanan kesehatan swasta
- 8). Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 751.138.843,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 749.242.000,00 atau sebesar 99,74%.
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
- a. Tersedianya Bahan2 Laboratorium Dalam rangka penanganan penyakit akibat rokok sebanyak 1 paket
  - b. Tersedianya alat untuk penanganan penyakit akibat rokok sebanyak 1 paket
- 9) Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya dengan anggaran sebesar Rp. 1.626.000.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.533.035.980,00 atau sebesar 94,28%.
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
- a. Terselenggaranya pertemuan evaluasi pelaksanaan kartu sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang.
  - b. Tersusunnya Administrasi kartu jujur dikes.
  - c. Terlaksananya Operasional pelayanan kartu jujur, pembelian barang habis pakai di puskesmas

### **3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program promosi kesehatan masyarakat sebesar Rp. 910.832.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 872.157.500,00 atau 95,75%, yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat dengan anggaran sebesar Rp. 68.020.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 66.970.000,00 atau 98,45%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya penyuluhan gaya hidup sehat di kelompok potensial kelurahan sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 40 orang.
- b. Terselenggaranya Penyuluhan indikator PHBS dalam rangka peningkatan indikator KIA dan giz

- 2). Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 45.886.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 45.386.000,00 atau 98,91%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Lomba Penyuluhan/Promosi Kesehatan bagi Kader tk.Kota.
- b. Terselenggaranya Lomba Cerdas Terampil Kader Promkes tk.kota
- c. Terselenggaranya Lomba Cerdas tangkas Kader Posketren tk.kota

- 3). Monitoring evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 5.940.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 5.590.000,00 atau sebesar 94,10%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah : terselenggaranya pertemuan monitoring dan evaluasi terpadu program promkes sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 48 orang.

- 4). Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan anggaran sebesar Rp. 70.443.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 70.043.000,00 atau sebesar 99,43%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya pembekalan survey PHBS sebanyak 1 kali kegiatan.
- b. Terselenggaranya Rakor Capaian survey PHBS tk. Kot dengan jumlah peserta 35 orang.

- 5). Peningkatan kesehatan institusi dengan anggaran sebesar Rp. 21.720.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 14.185.000,00 atau sebesar 65,30%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Sosialisasi Perwali ttg UKS.
- b. Terselenggaranya pertemuan koordinasi dengan petugas koordinator UKS Tk. Puskesmas.

- c. Terselenggaranya Pelatihan Kader Inspektur Cilik (Pajak RokoK).
  - c. Terselenggaranya Kampanye Bahaya Narkoba (Pajak RokoK)
  - c. Terselenggaranya Aksi gosok gigi masal (Pajak RokoK)
- 6). Unit kegiatan bersumber daya masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 568.395.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi Rp. 549.495.000,00 atau sebesar 96,67%

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Pertemuan kelompok kerja dalam rangka revitalisasi posyandu sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 35 orang .
  - b. Terselenggaranya Pertemuan advokasi upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang.
  - c. Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi dan advokasi Tim Pembina Kelurahan Siaga Tk. kota sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang.
  - d. Terselenggaranya Pelatihan tenaga surveilans kelurahan siaga tk kota sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang.
  - e. Terselenggaranya Pelatihan Kader Poskestren dalam rangka penguatan poskestren sebagai UKBM 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang.
- 7). Komunikasi informasi dan edukasi dengan anggaran sebesar Rp. 64.888.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 64.538.000,00 atau sebesar 99,46%

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Kampanye CTPS DI Kelurahan Siaga
  - b. Terselenggaranya Pertemuan Rutin Kelompok Media Potensial.
  - c. Terselenggaranya Pemutaran Film Kesehatan di lingkup organisasi kemitraan/swasta.
  - d. Terselenggaranya Kampanye dan Deklarasi anti narkoba.
- 8). Penjaringan kesehatan anak pra sekolah dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 29.335.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 27.885.000,00 atau sebesar 95,05%

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Penjaringan anak sekolah sebanyak 20 kali dengan jumlah peserta 5 orang

- b. Terselenggaranya Penyuluhan Narkoba dan HIV/AIDS Tk. SMP dan SMA sebanyak 5 kali dengan jumlah peserta 41 orang.
  - c. Terselenggaranya Pertemuan Monitoring & Evaluasi Hasil penjangkaran sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 10 orang
- 9). Pengembangan sekolah sehat dengan anggaran sebesar Rp. 36.205.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 28.065.500,00 atau sebesar 77,51%

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Sosialisasi pemanfaatan tanaman obat tradisional di sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang.
- b. Terselenggaranya Rapat koordinasi tim penilai penentuan pemenang LSS Tk Kota sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 20 orang.
- c. Terselenggaranya Pertemuan evaluasi Pelaksanaan sekolah model promkes sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 15 orang

#### **4. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 9.889.601.198,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.569.320.783,00 atau 99,57% yang telah dilaksanakan dengan kegiatan kemitraan asuransi kesehatan masyarakat.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Kapitasi BPJS Kesehatan di 6 puskesmas
- b. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Klaim BPJS Kesehatan
- c. Tersedianya alat perkantoran berupa fiulling cabinet, lemari dan meubelair di 6 puskesmas

#### **5. Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan Reproduksi dan KB**

Pada tahun anggaran 2017, jumlah dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan program Kesehatan Keluarga , Kesehatan Reproduksi dan KB sebesar Rp. 147.849.500,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 145.341.950,00 atau 98,30 % yang telah dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan anggaran sebesar Rp. 119.799.500,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 118.381.950,00 atau sebesar 98,81 %

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya Koordinasi, validasi dan sinkronisasi data ANC Terpadu sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
  - b. Terselenggaranya Pertemuan Kemitraan Bidan dengan Kader dan Dukun. selama 1 hari dengan jumlah peserta 30 orang
  - c. Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan dalam penanganan komplikasi Maternal dan Neonatal dengan Narasumber Ahli (SpOG/SpA) sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang
  - d. Terselenggaranya DRK (Diskusi Reflek Kasus) Tingkat Kota Bima sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
  - e. Terselenggaranya Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk peningkatan Cakupan Kunjungan bayi/balita sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 50 orang
- 2). Peningkatan keluarga berencana dan kesehatan remaja dengan anggaran sebesar Rp. 18.800.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 180.60.000,00 atau sebesar 96,06%
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
- a. Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Program Remaja, KtA, KtP sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 25 orang
  - b. Terselenggaranya Pertemuan Pengelola Kelas Remaja untuk peningkatan Kesehatan Remaja sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 25 orang
  - c. Terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Pelayanan KB Pasca Salin dan MKJP dengan Lintas Sektor sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang
- 3). Pelayanan kesehatan Usila dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 6.650.000,00 atau sebesar 95%.
- Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :
- a. terselenggaranya Pertemuan Evaluasi pelaksanaan Puskesmas santun Lansia sebanyak 1 kali dengan peserta sejumlah 38 peserta.
  - b. terselenggaranya Pertemuan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Puskesmas Santun Lansia sebanyak 1 kali dengan peserta sejumlah 38 peserta.

- c. terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program Usila dengan Lintas Program dan Lintas Sektoral 1 KL sebanyak 1 kali dengan peserta sejumlah 30 peserta.
- 4). Monitoring, Evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 2.250.000,00 yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.250.000,00 atau sebesar 100%.  
Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya laporan tahunan Dinas Kesehatan tahun 2017 sebanyak 1 dokumen.

## **b. Capaian Kinerja**

Hasil capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bima tahun 2017 dapat diuraikan sebagai berikut:

### **a. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**

#### **1. Angka balita gizi buruk**

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Angka balita gizi diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang terjadi pada periode tertentu dengan Jumlah balita yang ada pada periode yang sama.

Angka balita gizi buruk di Kota Bima tahun 2017 adalah sebesar 0,078% dari target 0,09%, sama dengan capaian pada tahun 2017 yaitu sebesar 86%%. Angka balita gizi buruk di Kota Bima sama dengan target, hal ini menunjukan keberhasilan program dalam rangka menekan kejadian kasus gizi buruk yang ada di Kota Bima. Adapun keberhasilan capaian indikator tersebut karena adanya kegiatan penjangkaran kasus secara bekal, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas.

Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

## 2. Menurunnya kasus kematian ibu (Maternal)

Kasus kematian ibu adalah Kematian perempuan pada saat hamil, melahirkan sampai dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh.

Indikator tersebut menggambarkan kasus kematian ibu selama tahun 2017. Indikator ini diberikan dalam rangka upaya menurunkan jumlah kasus kematian pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas di Kota Bima.

Jumlah kasus kematian ibu (maternal) di Kota Bima pada tahun 2017 sebanyak 188/100.000 kasus. Cakupan ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun target 2017 sebesar 58/100.000 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bima mengalami peningkatan jumlah kasus kematian ibu. Sesuai dengan target Kota Bima Tahun 2017 untuk indikator penurunan jumlah kasus kematian ibu, maka target tersebut belum mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 sebanyak 1 kasus, maka Dinas Kesehatan Kota Bima memiliki kewajiban untuk upaya penurunan jumlah kasus kematian ibu tersebut.

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan Audit Maternal Perinatal yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

Hasil kajian audit didapatkan kematian ibu dengan adanya penyakit penyerta seperti penyakit jantung, asma dan kanker. Penyebab kematian ibu sebesar 50% karena penyebab langsung yaitu perdarahan dan eclampsia, hal ini dapat menjadi petunjuk bagi perencanaan program di tahun yang akan datang agar lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal teamwork yang solid serta response time yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari

keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program kesehatan reproduksi dan KB dengan kegiatan antara lain: Pertemuan Koordinasi, Validasi dan Sinkronisasi Data ANC Terpadu - Pertemuan Refresing APN - Pertemuan Kemitraan Bidan dengan Kader dan Dukun - DRK (Diskusi Refleksi Kasus) Tk. Kota Bima - Pengadaan Buku-buku Register KIA - Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Puskesmas - Pertemuan Peningkatan Pelayanan KB pasca Salin dan MKJP dengan Lintas Sektor - Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Puskesmas PKPR.

3. Menurunnya kasus kematian bayi, balita (0-59 bln)

Kematian yang terjadi pada bayi/anak balita usia 0 - 59 bulan (bayi + anak balita). Jumlah kasus kematian bayi, balita (0-5tahun) di Kota Bima pada tahun 2017 sebanyak 6/1000 kasus. Sesuai dengan target Kota Bima Tahun 2017 untuk indikator penurunan jumlah kasus kematian bayi, balita (0-5tahun) sebanyak 6/1000 kasus, maka tersebut mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Hal ini menunjukan adanya progress yang maju dari program dalam rangka menekan kejadian kasus kematian bayi, balita di Kota Bima. Namun bila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2018 sebanyak 16 kasus, maka Dinas Kesehatan Kota Bima masih memiliki kewajiban untuk upaya penurunan jumlah kasus kematian bayi, balita (0-5tahun) tersebut.

Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program kesehatan reproduksi dan KB dengan kegiatan antara lain: Pertemuan Peningkatan Kapasitas Bidan Dalam Penanganan Komplikasi Maternal dan Neonatal dengan Narasumber Ahli (SpOG/SpA) - Pertemuan Koordinasi Pemantauan Tumbang Bayi/Balita dengan Menggunakan Buku KIA pada Kelompok Potensial - Pertemuan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor untuk Peningkatan Cakupan Kunjungan Bayi/Balita - Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Polindes - Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Remaja, KtA, KtP - Pertemuan Pengelola Kelas Remaja untuk Peningkatan Kesehatan Remaja.

b. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS

Rumah tangga ber PHBS adalah rumah tangga yang seluruh anggotanya berperilaku hidup bersih dan sehat yang meliputi 10 indikator, yaitu pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, balita diberi ASI eksklusif, mempunyai jaminan



pemeliharaan kesehatan, tersedia air bersih, tersedianya jamban, kesesuaian luas lantai dengan jumlah penghuni, lantai rumah bukan dari tanah (indikator terpilih); tidak merokok, melakukan aktivitas fisik setiap hari, makan sayur dan buah setiap hari.

Cakupan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara jumlah rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di suatu wilayah pada periode waktu tertentu dengan jumlah rumah tangga yang dipantau/disurvei di wilayah dan pada kurun waktu yang sama.

Cakupan Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS tahun 2016 adalah sebesar 10%, masih dibawah dari target 36%, masih sama bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 10%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 50%, masih sekitar 40% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima, sehingga untuk tahun berikutnya perlu ditingkatkan capaiannya. Adapun kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya target tersebut adalah kurangnya dukungan masyarakat dan anggaran, sehingga kesadaran masyarakat ber PHBS perlu ditingkatkan lagi dan penambahan anggaran. Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS diukur dari 10 (sepuluh) indikator, dimana apabila terdapat satu saja indikator yang belum terpenuhi dari sepuluh indikator tersebut, maka rumah tangga tersebut belum dikategorikan rimahtangga ber PHBS. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan khususnya Bidang Promosi Kesehatan dalam menjalankan program PHBS tersebut. Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan antara lain survey PHBS RT dan evaluasi hasil capaian survey PHBS RT.

## 2. Meningkatnya akses sanitasi dasar yang layak

Sanitasi dasar yang dimaksud adalah meliputi rumah sakit, air minum berkualitas, dan jamban sehat. Sanitasi dasar yang layak adalah sarana sanitasi yang memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Cakupan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara jumlah sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat dengan jumlah sarana sanitasi dasar yang ada.

Cakupan akses sanitasi dasar yang layak di Kota Bima tahun 2016 target sebesar 86,3%, realisasinya sebesar 90,23% dan mampu melebihi yang ditargetkan. Cakupan ini mengalami peningkatan 4,23% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 86%. Untuk target jangka menengah sebesar 96,6%, Dinas

Kesehatan Kota Bima masih sekitar 5,37% yang harus dipenuhi. Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program pengembangan lingkungan sehat, dengan kegiatan antara lain: pengawasan sarana air bersih (SGL,SPT,SPT-DK, SPT-DL), pengawasan mata air, pengawasan sarana air perpipaan(PDAM), pengawasan DAM&AMDK.

3. Meningkatnya cakupan TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik Hygiene Sanitasi Tempat-tempat umum (TTU) adalah Tempat atau sarana yang diselenggarakan pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat yang meliputi: sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas), sarana sekolah (SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA), dan hotel (bintang dan non bintang). Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) adalah Usaha pengelolaan makanan yang meliputi jasa boga atau katering, rumah makan dan restoran, depot air minum, kantin, dan makanan jajanan. TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik hiegiene sanitasi adalah TTU yang memenuhi standar berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan memenuhi persyaratan higiene sanitasi dengan bukti dikeluarkannya sertifikasi laik higiene sanitasi.

Cakupan indikator ini diperoleh dari membandingkan antara jumlah TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik hiegiene sanitasi dengan jumlah TTU dan TPM yang ada. Cakupan TTU dan TPM yang memenuhi syarat laik Hygiene Sanitasi tahun 2016 target sebesar 92%, realisasinya sebesar 77,38% dan belum mencapai dari target. Cakupan ini mengalami penurunan 14,62% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 91%. Untuk target jangka menengah sebesar 99%, Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 21,62% yang harus dipenuhi. Program yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan, dengan kegiatan antara lain: pengawasan & pembinaan tempat-tempat umum, pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga, pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant, pertemuan koordinasi dan konsolidasi STBM dengan Toga, Toma, Pertemuan advokasi pilar I STBM pada kelompok tidak memiliki jamban, pembinaan kelompok pemakai mck dan pokmair, pertemuan lintas sektor evaluasi STBM tingkat kelurahan.

### ***c. Permasalahan dan Solusi***

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kesehatan adalah sebagai berikut.

## 1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang menyebabkan capaian kinerja masih dibawah target yaitu :

- Cakupan penggunaan injeksi pada kasus terpilih tahun 2017 adalah sebesar 0,01%, masih dibawah dari target 1%, hal ini menunjukkan bahwa penggunaan injeksi pada kasus terpilih di Kota Bima lebih baik karna penggunaannya tidak lebih dari 1%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 0%, maka masih ada yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima untuk mencapai target tersebut. Adapun penyebab tercapainya target tersebut adalah adanya kesadaran dari pihak medis maupun paramedis dalam menggunakan obat secara rasional dan penyediaan obat injeksi yang sering digunakan pada kasus myalgia sudah dikurangi.
- Cakupan rawat inap tahun 2017 adalah sebesar 0,01%, dibawah dari target 1,5%, mengalami penurunan 1% jika dibanding dengan capaian tahun 2013 sebesar 1,35%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 5%, masih sekitar 5% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Belum terpenuhinya target indikator ini disebabkan keterbatasan ruang rawat Inap dikarenakan puskesmas perawatan hanya ada 2 di Kota Bima, sehingga masyarakat lebih banyak yang langsung ke RSUD Kab. Bima yang letaknya di Kota Bima.
- Cakupan pelayanan kesehatan indera tahun 2017 adalah sebesar 2,6%, masih dibawah dari target 100%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, masih sekitar 92% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima. Adapun kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya target tersebut adalah sulit dibedakan antara masyarakat miskin dengan yang lainnya karena semua tercover dalam kartu BPJS.
- Persentase ketersediaan sarana & prasarana rumah sakit tahun 2017 adalah sebesar 0%, masih dibawah dari target 30%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, maka 100% yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun berikutnya. Adapun kendala yang dihadapi sehingga belum tercapainya target tersebut adalah tidak adanya lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit.

## 2. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

- Melakukan pertemuan peningkatan penggunaan obat yang rasional dan monitoring penggunaan obat rasional di puskesmas.

- Melakukan kegiatan pelayanan kartu jujur sehati dan kegiatan pelayanan BPJS
- Melakukan kegiatan pelayanan kesehatan BPJS dan kegiatan pelayanan rujukan yang ditanggung APBD pemerintah Kota Bima
- Mengajukan usulan anggaran yang bersumber dari dana DAK maupun Dana TP serta mengajukan pengadaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit tersebut pada pemerintah Kota Bima.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 177.203.015.550,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 175.736.683.068,00 atau sebesar 99,17%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib pekerjaan umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.120. Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.533.423.250,00	2.468.180.559,00	97,42
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	85.452.000,00	63.209.043,00	73,97
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	61.220.000,00	45.171.100,00	73,78
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	130.200.000,00	130.200.000,00	100,00
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	93.284.250,00	92.788.050,00	99,47
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	126.140.000,00	125.322.125,00	99,35
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	457.292.000,00	456.050.000,00	99,73
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	138.280.000,00	130.585.000,00	94,44
9	Penyediaan makanan dan minuman	51.640.000,00	50.990.000,00	98,74
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.242.115.000,00	1.233.575.241,00	99,31
11	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	142.800.000,00	135.290.000,00	94,74
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan</b>	430.940.000,00	390.044.032,00	90,51

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>Prasarana Aparatur</b>			
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	190.000.000,00	189.300.000,00	99,63
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	209.040.000,00	170.337.032,00	81,49
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	31.900.000,00	30.407.000,00	95,32
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	130.800.000,00	129.890.000,00	99,30
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	130.800.000,00	129.890.000,00	99,30
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0,00	0,00	0,00
1	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	218.300.000,00	215.150.000,00	98,56
1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	24.650.000,00	24.650.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	24.650.000,00	24.650.000,00	100,00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	12.350.000,00	12.350.000,00	100,00
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	24.650.000,00	24.000.000,00	97,36
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	98.500.000,00	96.000.000,00	97,46
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	33.500.000,00	33.500.000,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Program peningkatan jalan dan jembatan</b>	72.765.688.000,00	72.604.171.800,00	99,78
1	Peningkatan jalan	72.765.688.000,00	72.604.171.800,00	99,78
<b>VII</b>	<b>Program pembangunan jalan dan jembatan</b>	7.429.736.000,00	7.359.519.000,00	99,05
1	Pembangunan jalan	7.429.736.000,00	7.359.519.000,00	99,05
<b>VIII</b>	<b>Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong</b>	3.551.018.000,00	3.490.783.158,00	98,30
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.671.597.000,00	2.667.356.000,00	99,84
2	Rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	879.421.000,00	823.427.158,00	93,63
<b>IX</b>	<b>Program pembangunan turap/talud/bronjong</b>	8.942.796.000,00	8.924.919.000,00	99,80
1	Pembangunan turap/talud/bronjong	8.942.796.000,00	8.924.919.000,00	99,80
<b>X</b>	<b>Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>	16.009.856.000,00	15.999.981.000,00	99,94
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	15.910.156.000,00	15.900.281.000,00	99,94
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	99.700.000,00	99.700.000,00	100,00
<b>XI</b>	<b>Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan</b>	241.000.000,00	239.760.000,00	99,49
1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	241.000.000,00	239.760.000,00	99,49
<b>XII</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan</b>	522.330.000,00	510.234.000,00	97,68

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	319.150.000,00	308.794.000,00	96,76
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	203.180.000,00	201.440.000,00	99,14
<b>XIII</b>	<b>Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya</b>	7.096.617.000,00	6.753.885.700,00	95,17
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.	2.080.400.000,00	2.049.978.000,00	98,54
2	Pembangunan Jaringan Irigasi.	5.016.217.000,00	4.703.907.700,00	93,77
<b>XIV</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>	8.729.003.000,00	8.602.010.000,00	98,55
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	5.506.453.000,00	5.380.419.000,00	97,71
2	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah.	3.178.360.000,00	3.177.491.000,00	99,97
3	Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah.	44.190.000,00	44.100.000,00	99,80
<b>XV</b>	<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>	27.465.894.800,00	27.430.512.000,00	99,87
1	Pembangunan/peningkatan infrastruktur.	26.716.173.000,00	26.699.940.000,00	99,94
2	Pendampingan NUSP-phase 2.	557.763.200,00	555.902.000,00	99,67
3	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).	191.958.600,00	174.670.000,00	90,99
<b>XVI</b>	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	14.975.773.000,00	14.912.123.500,00	99,57
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan.	87.300.000,00	87.262.000,00	99,96
2	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan.	14.888.473.000,00	14.824.861.500,00	99,57
<b>XVII</b>	<b>Program peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Umum</b>	4.617.827.000,00	4.427.714.319,00	95,88
1	Peningkatan dan pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan umum.	4.617.827.000,00	4.427.714.319,00	95,88
<b>XVIII</b>	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	958.598.500,00	705.911.700,00	73,64
1	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL.	388.490.000,00	147.240.000,00	37,90
2	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.	401.505.900,00	399.892.900,00	99,60
3	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.	93.516.000,00	86.154.200,00	92,13
4	Survey dan pemetaan.	75.086.600,00	72.624.600,00	96,72
<b>XIX</b>	<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	419.147.000,00	417.339.650,00	99,57
1	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang.	365.958.000,00	365.223.750,00	99,80
2	Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan.	53.189.000,00	52.115.900,00	97,98
<b>XX</b>	<b>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</b>	164.268.000,00	154.553.650,00	94,09
1	Penerbitan Sertifikat IMB.	65.668.000,00	58.096.900,00	88,47
2	Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi).	49.300.000,00	48.120.000,00	97,61
3	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).	49.300.000,00	48.336.750,00	98,05

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Program ini diwujudkan melalui kegiatan peningkatan jalan. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya peningkatan jalan dan jembatan di Kota Bima, yang meliputi :

Tabel 2.121. Output Kegiatan pada Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Peningkatan jalan lingkar Doro Kumbe	1,6 km
2	Peningkatan jalan Toloweri - Kabanta	7,1 km
3	Peningkatan jalan Kodo - Dodu	4,67 km
4	Peningkatan jalan Kendo - Kabanta	5,5 km
5	Peningkatan jalan Rite - Ntobo	6,1 km
6	Peningkatan jalan Kodo - Lelamase	5,3 km
7	Peningkatan jalan Doro Kumbe - Nungga	1,8 km
8	Peningkatan jalan Abubakar Husein,Cs	1,85 km
9	Peningkatan jalan So Tolo Lalu Kel. Oi Fo'o	0,35 km
10	Peningkatan jalan Nggaro Te	0,3 km
11	Peningkatan jalan Lingkungan Matakando	0,3 km
12	Peningkatan jalan Rabantala Matakando	0,15 km
13	Peningkatan jalan Kel. Matakando	0,3 km
14	Peningkatan jalan Sambinae - Sadia	0,2 km
15	Peningkatan jalan depan peskesmas Jatiwangi	0,35 km
16	Peningkatan jalan belakang kantor perhubungan kab.	0,2 km
17	Peningkatan jalan Bonto Kel. Kolo 1	0,2 km
18	Peningkatan jalan Oi Mbo Lampe	0,2 km
19	Peningkatan jalan perempatan sebelah selatan Masjid Uswatun Hasanah	0,2 km
20	Peningkatan jalan RT Kel. Kolo	0,2 km
21	Peningkatan jalan Bonto Kel. Kolo 2	0,3 km
22	Peningkatan jalan Penanae-Wenggo	0,15 km
23	Peningkatan jalan Jatiwangi	0,2 km
24	Peningkatan jalan Ntobo - Busu	0,2 km
25	Peningkatan jalan Melayu - Kolo	0,2 km
26	Peningkatan Jalan Oi Fo'o - Wangge	0,25 km
27	Peningkatan jalan Penanae - Kendo	0,2 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

### 2. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini diwujudkan melalui kegiatan pembangunan jalan. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pembangunan jalan dan jembatan di Kota Bima, yang meliputi :

Tabel 2.122. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Pembukaan jalan So Naru Kel. Oi Fo'o	0,20 km
2	Pembangunan jalan Nggaro Bae 1	0,25 km
3	Pembangunan jalan Rontu	0,25 km
4	Pembangunan jalan Nggaro Bae 2	0,35 km
5	Pembukaan jalan Baru Jl. Oi Si'i-Nggaro Dunga	0,35 km
6	Lanjutan Pembangunan jalan lingkungan Kel. Rabadompu Timur	0,20 km
7	Pembukaan jalan ekonomi so Risa Kel. Lelamase	0,40 km
8	Lanjutan pembukaan jalan ekonomi so Oi Lubu Kel. Dodu	0,40 km
9	Pembukaan jalan ekonomi so Sipi Kel. Dodu	0,40 km
10	Pembukaan jalan ekonomi so Manta	0,20 km
11	Lanjutan Pembukaan jalan Lingkungan Bonto	0,40 km
12	Lanjutan Pembukaan jalan ekonomi Kel. Kodo	0,20 km
13	Lanjutan Pembukaan jalan Barudi Torotompa	0,40 km
14	Pembukaan jalan So Lembo	0,20 km
15	Pembukaan jalan Baru Rontu – Oi Si'i Rontu	2,50 km
16	Pembukaan jalan ekonomi Kel. Matakando	0,30 km
17	Pembukaan jalan lingkungan Ni'u	0,30 km
18	Pembukaan jalan so Sanumbe	2,00 km
19	Pembangunan jalan Ncai Kapenta - Ndano Nae	2,50 km
20	Pembukaan jalan so Gantu Nitu	2,50 km
21	Pembukaan jalan so Sori Nonto Nitu	2,50 km
22	Pembukaan jalan so Laju Nitu	2,50 km
23	Pembukaan jalan so Mangge Pajo Nitu	2,50 km
24	Peningkatan Jalan Nggaro Nenggu - Rontu	2,50 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

### 3. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan serta rehabilitasi dan pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. Adapun keluaran (output) dari program ini adalah terlaksananya pembangunan saluran drainase yang meliputi :

Tabel 2.123. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Cor Plat Penutup Saluran Drainase Link. Gindi depan SDN 58 Jatiwangi	200 m
2	Pembangunan Drainase Lingkungan Era Baru Kel. Mande	150 m
3	Pembangunan Drainase Lingkungan Mande	300 m
4	Pembangunan Drainase Lingkungan Monggonao	200 m
5	Pembangunan Drainase Depan Kantor POLRES (Gunung dua)	300 m
6	Cor Plat Penutup Saluran Drainase RT 07 Kel. Kodo	200 m



NO	Item Pekerjaan	Panjang
7	Pembangunan Drainase RT.05 Kel. Penanae	300 m
8	Pembangunan Drainase Perumahan Rontu	200 m
9	Pembangunan Drainase Rabantala Kel. Matakando	200 m
10	Pembangunan Drainase Rabantala Kel. Santi	200 m
11	Pembangunan Drainase Link. Belakang kantor pengadilan Raba	200 m
12	Lanjutan Drainase Mande III	200 m
13	Pembangunan Drainase Rabangodu Utara	200 m
14	Talud RT 05 RW 03 Kel. Panggi	1 pkt
15	Pembangunan Drainase Lingkungan Mekar Baru	200 m
16	Peningkatan Drainase RT 03 Kel. Penaraga	200 m
17	Peningkatan Drainase Lingkungan Penatoi sebelah barat masjid	400 m
18	Pembangunan Drainase di BTN Gudang Pupuk	100 m
19	Peningkatan Drainase RW 04 Kel. Rabadompu Barat	200 m
20	Normalisasi Drainase dan cor plat penutup saluran drainase Rontu	100 m
21	Pembangunan Drainase BTN Sadia	200 m
22	Pasangan saluran Kel. Rabangodu Selatan	300 m
23	Pembangunan Drainase BTN Gindi Kel. Jatiwangi	275 m
24	Pembangunan Drainase Lingkungan Sadia	350 m
25	Lanjutan Pembangunan Drainase Kel. Matakando	100 m
26	Pembangunan Drainase Lingkungan Bonto Kel. Kolo	200 m
27	Pembangunan Drainase Wenggo Kel. Penanae	300 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

#### 4. Program Pembangunan Turap/Talud/bronjong

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan turap/talud/bronjong. Adapun keluaran (output) dari program ini adalah terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong yang meliputi :

Tabel 2.124. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Perkuatan tebing sungai Kodo	200 m
2	Bronjong sungai Melayu 2	400 m
3	Perkuatan tebing saluran pembuang Gindi	160 m
4	Perkuatan tebing sungai Mada Oi Fo'o	200 m
5	Perkuatan tebing sungai Jatiwnagi 1	200 m
6	Perkuatan tebing sungai Kendo	200 m
7	Perkuatan tebing saluran pembuang Penaraga	200 m
8	Perkuatan tebing sungai Penanae	200 m
9	Perkuatan tebing saluran Pembuang Rontu-Rabangodu	170 m
10	Perkuatan tebing sungai Penanae 2	200 m
11	Talud di Link. Rabantala samping kantor lurah	320 m
12	Perkuatan tebing saluran pembuang BTN Sambinae	200 m

<b>NO</b>	<b>Item Pekerjaan</b>	<b>Panjang</b>
13	Perkuatan tebing saluran Pembuang Nggaronangga	200 m
14	Perkuatan tebing Pantai Kolo	200 m
15	Perkuatan tebing sungai Lingk. Na'e	200 m
16	Perkuatan tebing sungai Lingk. Monggonao	200 m
17	Perkuatan tebing sungai Ntobo (Tolokolo)	200 m
18	Perkuatan tebing sungai Jatiwangi 2	200 m
19	Perkuatan tebing sungai Salewi	200 m
20	Perkuatan tebing sungai Matakando	200 m
21	Bronjong sungai Santi	286 m
22	Lanjutan Talud sungai Santi RT 06 Kel. Santi	114 m
23	Perkuatan Bronjong sungai lingk. Wenggo	143 m
24	Perkuatan tebing sungai Mande	143 m
25	Bronjong sungai Rt 01 Kel. Rontu	286 m
26	Perkuatan tebing saluran Pembuang Rt 4 dan RT 6 Kel. Rontu	286 m
27	Perkuatan tebing saluran Pembuang Rontu - Panggi	286 m
28	Perkuatan tebing saluran Pembuang samping kantor lurah Rontu	200 m
29	Perkuatan tebing / bronjong sungai Ntobo	286 m
30	Perkuatan tebing saluran pembuang Naggaro Bae	143 m
31	Perkuatan tebing sungai Kendo Depan Lurah Kendo	214 m
32	Perkuatan tebing saluran pembuang Kel. Jatibaru	143 m
33	Bronjong sungai So Sipi Kel. Dodu	214 m
34	Perkuatan tebing sungai Dodu (lanjutan)	286 m
35	Perkuatan tebing Sungai Dodu I	286 m
36	Bronjong sungai lingk. Toloweri Nungga	143 m
37	Bronjong perkuatan tebing sungai Kodo (lanjutan)	143 m
38	Perkuatan tebing lingk. Salama Kel. Na'e	105 m
39	Talud sungai Santi	100 m
40	Lanjutan Bronjongnisasi sungai santi	286 m
41	Perkuatan tebing sungai lampe	286 m
42	Bronjongnisasi sungai BTN Santi	143 m
43	Bronjong sungai RT 2 Kel. Rontu	143 m
44	Pemasangan bronjong/talud sungai santi	286 m
45	Pemasangan talud sungai Santi	100 m
46	Perkuatan tebing saluran pembuang kel. Pane	100 m
47	Perkuatan tebing sungai lingkungan Lela Kel. Jatibaru	143 m
48	Perkuatan tebing sungai Kolo Kel. Kolo	286 m
49	Perkuatan tebing sungai Nggarolo	143 m
50	Talud RT 08 sebelah kuburan Penatoi	300 m
51	Bronjongnisasi RT 10. Kel. Penatoi	300 m
52	Perkuatan tebing saluran pembuang Nungga	50 m
53	Perkuatan tebing RT 13 Salama	109 m
54	Perkuatan tebing sungai Sapaga	143 m
55	Perkuatan tebing sungai So Ati Kel. Kolo	143 m

NO	Item Pekerjaan	Panjang
56	Perkuatan tebing sungai Lampe	75 m
57	Bronjongnisasi sungai Ntobo Kel. Ntobo	300 m
58	Pemasangan jaringan irigasi perpipaan so Ra'u ke so Rea Kel. Ntobo	200 m
59	Bronjongnisasi sungai Santi Kel. Santi	100 m
60	Perkuatan tebing sungai Salama Kel. Na'e	200 m
61	Pemeliharaan Tebing DAM Tolokodo	1 pkt
62	Perkuatan tebing DAM Risa	1 pkt
63	Perkuatan tebing DAM Dadi Rabadompu	1 pkt
64	Perkuatan tebing DAM Lara	1 pkt
65	Rehabilitasi DAM Mango	1 pkt

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

## 5. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.900.281.000,00 atau 99,94%.
- Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 99.700.000,00 atau 100%.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan, yang meliputi :

Tabel 2.125. Output Kegiatan pada Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

NO	Item Pekerjaan	Panjang
1	Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Jalan (Ruas tersebar)	0,30 km
2	Pemeliharaan Jalan Lingkar Nggarolo	0,30 km
3	Pemeliharaan Jalan Oi Sii - Nitu	0,30 km
4	Pemeliharaan Jalan Nitu - Radendeu	0,20 km
5	Pemeliharaan Jalan Kamboja	0,32 km
6	Pemeliharaan Jalan Kumbe - Oi Fo'o	0,20 km
7	Pemeliharaan Jalan Mawar	0,25 km
8	Pemeliharaan Jalan Rontu - Nitu	0,26 km
9	Pemeliharaan Jalan Mongisid, Cs	1,80 km
10	Pemeliharaan Jalan Kompi Karantina	4,16 km

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

## 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.049.978.000,- atau 98,54%.

- b. Pembangunan jaringan irigasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.703.907.700,- atau 93,77%.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.126. Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

NO	Item Pekerjaan	Volume
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi		
1	Pemeliharaan rutin jaringan irigasi (ruas tersebar)	1 kgt
2	Rehabilitasi daerah irigasi Keci Ntobo	1,60 km
3	Rehabilitasi daerah irigasi Risa	1,80 km
4	Rehabilitasi daerah irigasi Sari	1,80 km
Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi		
1	Peningkatan Saluran Irigasi Rangga	300 m
2	Peningkatan Saluran Irigasi Rontu	250 m
3	Peningkatan Saluran Irigasi Nungga	200 m
4	Peningkatan Saluran Irigasi Dodu	300 m
5	Peningkatan Saluran Irigasi Sangga	300 m
6	Peningkatan Saluran Irigasi Prambanan	300 m
7	Pembangunan Saluran Irigasi Dadimboda	200 m
8	Pembangunan Saluran Irigasi Tolo Kodo	200 m
9	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Mango	70 m
10	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Nae	70 m
11	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Dadi Bou	70 m
12	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Tolotike	70 m
13	Pembangunan Saluran Irigasi Dam Busu	70 m
14	Pembangunan Saluran Irigasi Nggaro Nangga	70 m
15	Pembangunan Saluran Irigasi dadi Bou Jatibaru	70 m
16	Pembangunan Saluran Irigasi Soncolela	70 m
17	Pembangunan Saluran Irigasi Rabangodu Selatan	100 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

Adapun hasil (*outcomes*) nya meliputi:

- Meningkatnya fungsi Jaringan Irigasi Pengairan.
- Normalnya Kelancaran Saluran D.I.

## 7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi MBR dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.380.419.000,- atau 97,71%.
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.177.491.000,- atau 99,97%.
- Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 44.100.000,- atau 99,80%.

Tabel 2.127. Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

NO	Item Pekerjaan	Volume
Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBR		
1	Optimalisasi SPAM Perdesaan Lingk. Tolotando Kel. Matakando	500 jiwa
2	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Monggonao	500 jiwa
3	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Rontu	500 jiwa
4	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Penatoi	625 jiwa
5	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Rite	625 jiwa
6	Optimalisasi SPAM Perdesaan Kel. Jatibaru	300 jiwa
7	Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Rumah Kel. Dodu	1500 jw
8	Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Rumah Kel. Tanjung	625 jiwa
9	Pemasangan Pipa Tersier dan Sambungan Rumah Oi Niu Kel. Dara	625 jiwa
10	Pembangunan Reservoir SPAM Pedesaan Kel. Lelamase	1000 jwa
11	Pembangunan SPAM Kel. Kendo	1300 jwa
12	Pembangunan SPAM Lingk. Wenggo Kel. Penanae	1300 jwa
13	Pembangunan SPAM Kel. Jatibaru	650 jiwa
14	Pembangunan SPAM RW 01 Kel. Rontu	650 jiwa
15	Pembangunan SPAM Lingk. Penanae Kel. Penanae	1300 jwa
16	Pembangunan SPAM Kel. Matakando	650 jiwa
17	Optimalisasi SPAM Sori Baru Kel. Lelamase	1000 jwa
18	Pembangunan SPAM So Ati Kel. Kolo	1 pkt
19	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kel. Sambinae	1 pkt
20	Optimalisasi SPAM Ndanonae	400 jiwa
21	Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kota Bima	1 pkt
22	Peningkatan Jaringan Distribusi Air Bersih SPAM Kadole	1 pkt

NO	Item Pekerjaan	Volume
23	Pengadaan Sarana Air Bersih	1 pkt
24	Pemeliharaan Sumur Temba Bedi Kel. Manggemaci	1 pkt
25	Pengadaan Bak HU untuk lokasi Berdampak Banjir	300 jiwa
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah		
1	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Ntobo	500 jiwa
2	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Dodu	500 jiwa
3	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Oi Fo'o	500 jiwa
4	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Jatibaru	500 jiwa
5	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Kendo	500 jiwa
6	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Rabadompu Barat	500 jiwa
7	Pembangunan IPAL Komunal dan SR Kel. Lelamase	500 jiwa
8	Pembangunan IPAL Pasar Amahami	1000 jiwa

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

Adapun hasil (*outcomes*) nya adalah Meningkatnya cakupan layanan air minum dan air limbah perkotaan.

#### 8. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh.

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- Pembangunan/peningkatan infrastruktur dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.699.940.000,- atau 99,94%.
- Pendampingan NUSP- phase 2 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 555.902.000,- atau 99,67%.
- Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 174.670.000,- atau 90,99%.

Tabel 2.128. Output Kegiatan pada Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

No.	Item Pekerjaan	Volume
1	Penataan Tipikal bangunan Komersil Lawata	1 pkt
2	Penataan Parkir Lawata	1 pkt
3	Penataan Taman Lawata	1 pkt
4	Penataan lahan Lawata	25 m
5	Pagar lingkungan markas Brimob	40 m
6	Penataan Kawasan Ni'u (lanjutan)	1 pkt

No.	Item Pekerjaan	Volume
7	Penataan Kawasan Amahami	1 pkt
8	Pembuatan talud lingk. RT 11 dan 12 Kel. pane	30 m
9	Pembangunan talud lingkungan Kel. Ntobo	400 m
10	Talud permukiman RT 01/RW.02 Kendo	200 m
11	Talud di lingkungan Lela Kel. Jatibaru	400 m
12	Penataan lapangan Lelamase	200 m
13	Penataan lapangan Dodu	200 m
14	Penataan lapangan Bedi Kel. Manggemaci	1 pkt
15	Penataan lingkungan permukiman Rabadompu Barat	1 pkt
16	Penataan lingkungan Kel. Ntobo	200 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

## 9. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan. Adapun keluaran (output) dari program ini adalah dibangunnya Akses Jalan lingkungan yang meliputi :

Tabel 2.129. Output Kegiatan pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

NO	Item Pekerjaan	Volume
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Bima Tersebar	10 km
2	Rabat Gang RT 05 Kel. Kodo	200 m
3	Rabat Gang lokasi Kuburan Kel. Paruga	1 pkt
4	Pembukaan jalan lingkungan Sabali	150 m
5	Pembangunan drainase jalan lingk. Nggaro Lo	100 m
6	Peningkatan jalan lingk. So Nggela	100 m
7	Talud jalan lingk. Ntobo	200 m
8	Rabat Gang saluran di Bedi RW 03 Kel. Manggemaci	200 m
9	Pembukaan jalan lingkungan Kel. Dodu	100 m
10	Talud dan rabat gang Kel. Dodu	100 m
11	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Bonto Kel. Kolo (lanjutan)	380 m
12	Rabatnisasi Jalan Lingk. Pelita	180 m
13	Peningkatan jalan lingkungan Ke kuburan Tolotongga	180 m
14	Pelebaran jalan Ekonomi dari lingkungan Lela ke Spada II	380 m
15	Pembukaan jalan baru Kel. Rabangodu Utara	350 m
16	Peningkatan jalan Dusun Bonto	400 m
17	Pembukaan jalan baru Lingk. Ni'u	280 m

NO	Item Pekerjaan	Volume
18	Pembangunan jalan Torotompa Kel. Jatiwangi	400 m
19	Jembatan Gantung Melayu Rasa Pali Kel. Melayu	1 pkt
20	Pembukaan jalan Kel. Rontu	400 m
21	Pembukaan jalan Lingkungan Matakando	400 m
22	Rabat Gang Kel. penaraga	400 m
23	Pembukaan Jalan Lingkungan	300 m
24	Drainase/rabat gang Santi	500 m
25	Pembukaan Jalan Lingkungan Rabadompu	200 m
26	Pembangunan drainase/rabat gang Lewirato	400 m
27	Pemasangan drainase/rabat gang Matakando	500 m
28	Peningkatan jalan lingk. Kolo	400 m
29	Pembangunan jembatan gantung Kel. Rontu	1 pkt
30	Pembangunan jembatan Lingkungan Salama Kel. Na'e	1 pkt
31	Pembangunan jalan lingkungan Penaraga	1 pkt
32	Talud jalan lingkungan Sabali Kel. Kumbe	200 m
33	Pembukaan jalan lingkungan Nggarobae Kel. Rabadompu Barat	300 m
34	Peningkatan jalan lingkungan So Nggela (lanjutan)	300 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

## 10. Program Perencanaan Tata Ruang

Program perencanaan tata ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 958.598.500,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 705.911.700,00,- atau sebesar 73,64%.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- Penetapan kebijakan tentang RDTR Perkotaan.
- Penyusunan RTBL Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bima.
- Survei dan Pemetaan (Wilayah Sempadan Sungai)

Adapun keluaran (*output*) penting dari program ini adalah:

- Terlaksananya pembahasan dokumen RDTRK Kecamatan Rasana'e Barat di BKPRN.
- Tersedianya dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Bima.
- Tersedianya dokumen hasil Survei dan Pemetaan (Wilayah Sempadan Sungai Padolo dan Melayu).



## 11. Program Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 419.147.000,00,- dan terealisasi sebesar Rp. 417.339.650,00,- atau sebesar 99,57%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan Ruang. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terlaksananya monev pemanfaatan ruang di Kecamatan Rasana'e Barat yang telah terdokumentasi dalam 1 (satu) laporan.

## 12. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penerbitan Sertifikat IMB dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 58.096.000,- atau 88,47%. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah telah dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan sebanyak 432 IMB pada tahun 2017.
- b. Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.120.000,- atau 97,61%. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah belum ada dikeluarkannya Sertifikat Layak Fungsi pada tahun 2017.
- c. Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 48.336.750,- atau 98,05%. Adapun keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terbentuknya tim ahli dalam menganalisis kelayakan bangunan gedung.

Adapun hasil (*outcomes*) nya adalah terlaksananya tertib tata ruang kota oleh berbagai pihak yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga dapat mewujudkan Kota Bima yang Bersih, Tertib dan Aman.

### b. Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi beberapa indikator kinerja penting sebagaimana dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.130. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Penduduk terlayani IPAL, SPAM dan SR	3.470 KK	2.504 KK	72,17
-	Jumlah Penduduk yang terlayani IPAL dan SR	3.853 KK	2.685 KK	69,69
-	Jumlah Penduduk Terlayani Kebutuhan Air Minum	3.086 KK	2.323 KK	75,28
2	Panjang jaringan Jalan yang dibangun	7,10 Km	9,60 Km	135,25

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
3	Panjang jaringan irigasi yang berfungsi baik	3.717,68 m	799,80 m	21,51
-	Panjang jaringan irigasi terpelihara	1.089,85 m	204,46 m	18,76
-	Panjang jaringan irigasi terbangun	2.627,82 m	594,60 m	22,62
4	Panjang jaringan jalan yang berfungsi baik	8,33 Km	8,19 Km	98,36
-	Panjang jalan yang dipelihara	8,33 Km	8,19 Km	98,36
-	Jumlah jembatan yang dipelihara	1 bh	1 bh	100
9	Peningkatan jalan dan jembatan	38,13 Km	41,31 Km	108,36
10	Dokumen data dasar jalan dan jembatan yang disusun	5 kali	5 kali	100
-	Jumlah dokumen yang disusun	5 dok	5 dok	100
11	Penerangan jalan umum yang berfungsi baik	334 T.Lp	334 T.Lp	100
12	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	5.312 m	7.792,43 m	146,69
-	Panjang Saluran Drainase Terbangun	4.262 m	7.259,57 m	170,33
-	Panjang Saluran Drainase Terpelihara	1050 m	532,85 m	50,75
13	Panjang sungai yang berfungsi baik	2.080 m	3.759 m	180,72
-	Panjang turap/talud/bronjong terbangun	2.080 m	3.759 m	180,72
14	Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	17,34 Km	26,25 Km	151,38
-	Panjang jalan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan	17,34 Km	26,25 Km	151,38
15	Luas Penanganan wilayah kumuh	6,50 Ha	5,86 Ha	90,15
-	Luas wilayah strategis yang terbangun	3,5 Ha	5,7 Ha	162,89
-	Luas wilayah penanganan program NUSP	1,75 Ha	0,12 Ha	6,74
-	Luas wilayah penanganan program Tanpa Kumuh (KOTAKU)	1,25 Ha	0,04 Ha	3,25
16	Jumlah Dokumen Tata Ruang Kota Bima	3 Dok	2 Dok	73,06
-	Jumlah Dokumen Penetapan kebijakan RDTRK, RTRK, dan RTBL	1 Dok	0 Dok	0
-	Jumlah dokumen rencana tata bangunan dan lingkungan	1 Dok	1 Dok	100
-	Jumlah Dokumen data dasar dan pemetaan	1 Dok	1 Dok	100
17	Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	5 Dok	4 Dok	80
18	Kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	250 IMB	250 IMB	100
-	Jumlah dokumen pengajuan IMB yang direkomendasikan	250 IMB	250 IMB	100
-	Jumlah SLF yang direkomendasikan	150 SLF	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bima, 2017

### **c. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum tidak ditemui masalah yang berarti. Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan ruang adalah sebagai berikut.

- Target fisik pembahasan RDTRK Kecamatan Rasana'e Barat dan Mpunda hingga menjadi Peraturan daerah pada tahun 2017 belum tercapai karena permasalahan belum selesainya penyusunan Peta RDTRK yang sedang dikonsultasikan ke BIG. Untuk itu, perlu dipersiapkan kembali anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian Perda RDTRK Kecamatan Rasana'e Barat untuk penyelesaian Peta RDTRK Rasana'e Barat.
- Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia baik untuk perencanaan maupun melaksanakan teknis kegiatan, sehingga perlu dilakukan penambahan personil dan penguatan kapasitas SDM.
- Kurang optimalnya pengawasan terhadap pemanfaatan tata ruang dan bangunan serta lemahnya penerapan sanksi atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tata ruang. Untuk itu perlu dibuat peraturan turunan Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima berupa Peraturan Walikota Bima untuk implementasi Perda tersebut.
- Kurangnya koordinasi dan sosialisasi lintas sektor baik pada tingkat kelurahan, kecamatan dan SKPD terkait lainnya serta dengan badan pertanahan nasional dalam upaya pemanfaatan ruang serta penguasaan lahan secara tidak terkendali.
- Belum tersedianya Penyidik PNS Tata Ruang dan Bangunan Gedung untuk dapat melakukan tahapan penegakan hukum tata ruang dan bangunan gedung. Untuk itu perlu dipersiapkan pada tahun 2018 personil yang akan mengikuti pelatihan sebagai penyidik PNS tata ruang dan Bangunan Gedung.

### **4. Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman**

Urusan wajib perumahan dan kawasan permukiman pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.304.944.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.198.850.231,00 atau sebesar 98,32%. Urusan wajib perumahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Tabel 2.131. Program/Kegiatan Urusan Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	793.926.100,00	780.962.925,00	98,37
1	Penyediaan jasa surat menyurat	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47.580.000,00	43.073.550,00	90,53
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92.400.000,00	92.300.000,00	99,89
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	48.282.300,00	48.270.350,00	99,98
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30.150.000,00	30.150.000,00	100,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	107.941.000,00	101.336.000,00	93,88
8	Penyediaan makanan dan minuman	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	351.668.600,00	351.668.025,00	100,00
10	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	19.904.200,00	18.165.000,00	91,26
II.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	87.920.000,00	81.481.400,00	92,68
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	64.920.000,00	58.601.400,00	90,27
2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.000.000,00	22.880.000,00	99,48
III	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	14.250.000,00	14.250.000,00	100,00
IV	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	177.675.000,00	177.263.000,00	99,77
1	Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.985.000,00	33.985.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	23.112.000,00	22.700.000,00	98,22
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	20.773.000,00	20.773.000,00	100,00
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	20.572.000,00	20.572.000,00	100,00
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	45.772.000,00	45.772.000,00	100,00
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	33.461.000,00	33.461.000,00	100,00
V	<b>Program pengembangan Perumahan</b>	3.880.410.000,00	3.830.885.606,00	98,72
1	Pendampingan Bantuan rumah swadaya	120.995.500,00	120.630.000,00	99,70
2	Pendataan perumahan	55.879.000,00	55.379.500,00	99,11
3	Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni (DAK)	2.789.000.000,00	2.785.768.850,00	99,88
4	Peningkatan Sarana dan prasarana Rusunawa	914.535.000,00	869.107.256,00	95,03
VI	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	69.275.800,00	69.225.800,00	99,93
1	Penyerahan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) Rumah Sederhana Sehat	69.275.800,00	69.225.800,00	99,93
VII	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	91.719.400,00	85.039.000,00	92,72

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan (Pokja)	91.719.400,00	85.039.000,00	92,72
VIII	<b>Program Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial</b>	664.900.000,00	655.179.000,00	98,54
1	Inventarisasi perumahan akibat bencana alam/sosial	150.250.000,00	147.910.000,00	98,44
2	Fasilitasi dan stimulasi pembanguna perumahan swadaya.	514.650.000,00	507.269.000,00	98,57
IX	<b>Program Perencanaan Permukiman kumuh</b>	274.002.700,00	257.129.500,00	93,84
1	Rencana teknis kawasan permukiman kumuh	274.002.700,00	257.129.500,00	93,84
X	<b>Program Pengembangan Kawasan</b>	250.865.000,00	247.434.000,00	98,63
1	Perencanaan pengembangan kawasan permukiman baru.	250.865.000,00	247.434.000,00	98,63
	<b>Total</b>	<b>6.304.944.000,00</b>	<b>6.198.850.231,00</b>	<b>98,32</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan perumahan dan kawasan permukiman ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dijabarkan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Pendampingan Bantuan Rumah Swadaya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 120.630.000,- dan terealisasi sebesar 99,70%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kota Bima.
- b. Pendataan perumahan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.379.500,- dan terealisasi sebesar 99,11%. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya data Rumah Tidak Layak Huni Kota Bima sebagai data dasar untuk kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada tahun berikutnya baik yang bersumber dari pendanaan APBD Kota Bima, APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun APBN.
- c. Pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.785.768.850,- dan terealisasi sebesar 99,88%. Output dari kegiatan ini adalah pembangunan baru (sebanyak 51 unit @ Rp. 30.000.000,-) dan peningkatan kualitas perumahan (sebanyak 60 unit @ Rp. 15.000.000,-).
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Rusunawa dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 869.107.256,- dan terealisasi sebesar 95,03%. Output dari kegiatan ini adalah pembangunan pagar rusunawa agar tercipta lingkungan di rusunawa yang aman dan nyaman.

## 2. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Program ini dijabarkan melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Inventarisasi perumahan akibat bencana alam/sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 150.250.000,- dan terealisasi sebesar 98,44%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya database mengenai jumlah perumahan yang terdampak bencana alam/banjir bandang.
- b. Fasilitasi dan stimulasi pembangua perumahan swadaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 514.650.000,- dan terealisasi sebesar 98,57%. Output dari kegiatan ini adalah membantu penyediaan bahan bangunan untuk pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat yang kurang mampu.

## 3. Program Pengembangan Permukiman Baru

Program Perencanaan pengembangan kawasan permukiman baru dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.865.000,- dan terealisasi sebesar 98,63%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen kajian rencana pengembangan kawasan permukiman baru di Kota Bima tahun 2017.

### b. Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja urusan perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017 dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 2.132. Capaian Kinerja Urusan Perumahan yang Dilaksanakan  
Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUNAN			
			2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	% Rumah Layak Huni.	%	92,00	92,82	95,03	95,64
2	% Rumah Tidak Layak Huni yg tertangani.	%	35,00	35,01	55,45	55,73
3.	% Rumah Rusak terdampak bencana yang ditangani.	%	0,00	0,00	62,99	5,00
4.	% Rumah di sempadan yang direlokasi.	%	0,00	0,00	25,48	0,00
5.	% Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).	%	94,74	35,01%	97,37	35,01%

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bima, 2017

### **c. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut.

- 1) Tidak terlaksananya dengan maksimal urusan wajib bidang perumahan berdasarkan PP No. 38/2007. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 terdapat banyak sekali urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang perumahan, tapi dalam implementasinya sangat minimal yang dapat dituangkan dalam APBD Kota Bima, walaupun hal tersebut sudah diusulkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman lewat Renja maupun RKA.
- 2) Belum tercapainya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang harus ditangani oleh SKPD yang menangani bidang perumahan, yaitu :
  - a. Rumah layak huni dan terjangkau
  - b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU)Di dalam Permen tersebut sudah secara jelas dinyatakan bahwa jenis pelayanan tersebut secara operasional dikoordinasikan oleh dinas perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. (pasal 4 (2), tapi pada implementasinya selama ini, kegiatan yang berkaitan dengan jenis pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh SKPD lain.
- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perumahan, baik dalam kuantitas maupun kualitas.
- 4) Sulitnya pembebasan lahan dikarenakan harga tanah yang tinggi.

#### **4.1.5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 7.500.368.010 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sepuluh Sen) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.421.371.689,00 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 98,12%. Program dan kegiatan pada urusan wajib pelayanan umum Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Bima bersama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima dan Kecamatan Asakota dan Raba Kota Bima.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

## 1. Satuan Polisi Pamong Praja

Pada tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.277.873.810,00 (*lima milyar dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) dan terealisasi sebesar Rp. 5.237.912.735,00 (*lima milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat sembilan ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah*) atau 99,24%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP dalam rangka melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.133. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.601.265.100,00</b>	<b>2.597.414.095,00</b>	<b>99,85</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	7.200.000,00	6.345.819,00	88,14
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	7.320.000,00	7.036.800,00	96,13
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	42.992.000,00	42.986.000,00	99,99
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000,00	11.966.000,00	99,72
5	Penyediaan alat tulis kantor	34.500.000,00	34.439.000,00	99,82
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	33.852.600,00	33.784.000,00	99,80
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36.000.000,00	34.220.000,00	95,06
8	Penyediaan bahan logistik kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	1.669.600.000,00	1.669.315.000,00	99,98
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	233.880.500,00	233.701.476,00	99,92
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	511.920.000,00	511.620.000,00	99,94
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>575.871.000,00</b>	<b>573.697.370,00</b>	<b>99,62</b>
1	Pembangunan Gedung Kantor	152.261.000,00	152.261.000,00	100,00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	177.510.000,00	176.535.000,00	99,45
3	Pengadaan mebeleur	33.400.000,00	32.400.000,00	97,01
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	39.850.000,00	39.847.000,00	99,99
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	165.850.000,00	165.817.370,00	99,98



No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00	6.837.000,00	97,67
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>57.013.000,00</b>	<b>56.950.000,00</b>	<b>99,89</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	30.392.000,00	30.334.000,00	99,81
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	26.621.000,00	26.616.000,00	99,98
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>63.100.710,00</b>	<b>59.569.500,00</b>	<b>94,40</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.637.000,00	5.637.000,00	100,00
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	26.216.000,00	26.184.000,00	99,88
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	20.347.710,00	20.335.500,00	99,94
<b>V</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>977.277.000,00</b>	<b>963.846.500,00</b>	<b>98,63</b>
1	Pengendalian keamanan lingkungan	965.554.000,00	952.194.000,00	98,62
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	11.723.000,00	11.652.500,00	99,40
<b>VI</b>	<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>347.642.000,00</b>	<b>347.120.614,00</b>	<b>99,85</b>
1	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan	192.545.000,00	192.444.500,00	99,95
2	Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Krantibum dan Hari-hari Besar	155.097.000,00	154.676.114,00	99,73
<b>VII</b>	<b>Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)</b>	<b>25.125.000,00</b>	<b>25.065.000,00</b>	<b>99,76</b>
1	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	25.125.000,00	25.065.000,00	99,76
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>630.580.000,00</b>	<b>610.762.656,00</b>	<b>96,86</b>
1	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	630.580.000,00	610.762.656,00	96,86
<b>Jumlah</b>		<b>5.277.873.810,00</b>	<b>5.237.912.735,00</b>	<b>99,18</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

#### 1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 977.277.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp. 963.846.500,00(98,63%), dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bima melalui kegiatan :

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 965.554.000,00yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 952.194.000,00atau sebesar 98,62%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya operasi pemantauan wilayah sebanyak 2 kali
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan anggaran sebesar Rp. 11.723.000,00yang telah dilaksanakan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 11.652.500,00atau sebesar 99,40%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi serta pendataan daerah rawan gangguan trantib
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 347.642.000,00dengan realisasi sebesar Rp. 347.120.614,00. (99,85%), dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bima melalui kegiatan :

1. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja Dengan TNI/Polri Dan Kejaksaan. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 192.545.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 192.444.500,00 (99,95%)

Adapun output dari kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya operasi pengawasan dan penertiban tempat umum sebanyak 2 kali
2. Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Krantibum dan Hari-hari Besar. Pagu anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 155.097.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 154.676.114,00 (99,73%)

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibum dan hari hari besar sebanyak 4 kali.

3. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 25.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 25.065.000,00(99.76%), dilaksanakan oleh Kantor Satpol PP Kota Bima melalui kegiatan penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 1 kali

Tabel 2.134. Capaian Kinerja Satpol PP Kota Bima Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	≤ 15 menit	≤ 15 menit	100%
Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	98,63%	98,63%
Meningkatnya peran satuan linmas	Persentase anggota satuan linmas yang kompeten dalam bencana dan pengamanan	80%	99,76%	124,70%
Meningkatnya penegakan peraturan perundang - undangan	Persentase penegakan PERDA	90%	99,85%	110,94%

Sumber : Satpol PP Kota Bima, 2017

## 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2017 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.970.124.200,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 1.932.090.454 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau 98,07%. Adapun jumlah anggaran dan realisasi anggaran per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.135. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesbangpol Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>684,505,900.00</b>	<b>674,516,200.00</b>	<b>98.54</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	24,800,000.00	23,100,000.00	93.15
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22,200,000.00	22.014.500	99.16
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27,300,000.00	25,370,100.00	92.93
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45,960,000.00	45,960,000.00	100.00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9,890,000.00	8,690,000.00	87.87
6	Penyediaan alat tulis kantor	22,114,500.00	22,114,500.00	100.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24,750,000.00	24,750,000.00	100.00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,225,000.00	3,225,000.00	100.00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	114,650,000.00	113,650,000.00	99.13

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	22,000,000.00	21,465,000.00	97.57
11	Penyediaan makanan dan minuman	11,543,000.00	9,125,000.00	79.05
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	315,648,400.00	314,852,100.00	99.75
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40,425,000.00	40,200,000.00	99.44
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>83,703,600.00</b>	<b>81,319,754.00</b>	<b>97.15</b>
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	42,250,000.00	40,018,154.00	94.72
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	36,453,600.00	36,401,600.00	99.86
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5,000,000.00	4,900,000.00	98.00
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>30,900,000.00</b>	<b>30,900,000.00</b>	<b>100.00</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17,000,000.00	17,000,000.00	100.00
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	13,900,000.00	13,900,000.00	100.00
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>144,100,000.00</b>	<b>142,600,000.00</b>	<b>98.96</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	24,570,000.00	24,570,000.00	100.00
2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15,570,000.00	14,070,000.00	90.37
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18,070,000.00	18,070,000.00	100.00
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	61,320,000.00	61,320,000.00	100.00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	24,570,000.00	24,570,000.00	100.00
<b>V</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>274,213,700.00</b>	<b>260.445.500.00</b>	<b>94,98</b>
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	65,801,000.00	58,376,000.00	88.72
2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	156,932,700.00	154,879,500.00	98.69
3	Koordinasi Forum antar Etnis	51,480,000.00	47,190,000.00	91.67
<b>VI</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>471,112,000.00</b>	<b>466,299,300.00</b>	<b>98.98</b>
1	Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis	340,710,000.00	336,164,500.00	98.67
2	Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	55,790,000.00	55,735,000.00	99.90
3	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	74,612,000.00	74,399,800.00	99.72

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
VII	Program pendidikan politik masyarakat	281,589,000.00	276,009,700.00	98.02
1	Penyuluhan kepada masyarakat	137,464,000.00	136,791,500.00	99.51
2	Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	144,125,000.00	139,218,200.00	96.60
<b>Jumlah</b>		<b>1,970,124,200.00</b>	<b>1,932,090,454.00</b>	<b>98,07</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima dalam rangka melaksanakan urusan wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

### 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 274,213,700.00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.445.500.00 atau 94,98% dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, mendapat alokasi anggaran Rp. 65,801,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 58,376,000.00 (88,72%)

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terselenggaranya rapat koordinasi forum toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 150 Orang
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, mendapat alokasi anggaran Rp. 156,932,700.00 dengan realisasi sebesar Rp. 154,879,500.00 (98.69%)

Keluaran (*output*) dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya kegiatan orientasi bela negara, pendidikan karakter bangsa dan wawasan kebangsaan bagi siswa siswi SMA/MA/SMK se Kota Bima sebanyak 2 kali selama 2 hari dengan jumlah peserta 50 Orang

- 3) Koordinasi Forum antar Etnis, mendapat alokasi anggaran Rp. 51,480,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 47,190,000.00 (91,67%)

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a. Terselenggaranya rapat koordinasi forum antar Etnis sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta 50 Orang
- b. Terlaksananya Pembinaan terhadap Forum antar Etnis selama 6 bulan

## 2) **Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan**

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 471,112,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 466,299,300.00 (98,98%), dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis dengan pagu anggaran sebesar Rp. 340,710,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 336,164,500.00 (98,67%).

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a. Terselenggaranya rapat koordinasi timpengendali kamtribmas sebanyak 2 kali
- b. Penanganan gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kota Bima

- 2) Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pagu anggaran sebesar Rp. 55,790,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 55,735,000.00 (99.90%).

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Kegiatan rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebanyak 2 kali jumlah peserta 50 orang.

- 3) Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, pagu anggaran sebesar Rp. 74,612,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 74,399,800.00 (99,72%)

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya rapat koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebanyak 4 kali dengan jumlah peserta 50 orang
- b) Terlaksananya Monev penanganan konflik sosial.

## 3) **Program Pendidikan Politik Masyarakat**

Program pendidikan politik masyarakat pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 281,589,000.00 dengan realisasi sebesar Rp. 276,009,700.00 (98.02%), dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Bima melalui kegiatan :

- 1) Penyuluhan kepada masyarakat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 137,464,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 136,791,500.00 (99.51%)

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan partai politik kepada masyarakat sebanyak 1 kali.
- b. Terlaksananya verifikasi Penetapan Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) LSM/Ormas dan Yayasan yang bersumber dari dana APBD Kota Bima
- c. Terlaksananya Pengawasan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik, LSM, Ormas dan Yayasan

- 1) Penyelesaian Perselisihan Partai Politik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 144,125,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 139,218,200.00 (96.60%).

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

- a. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 85 orang.

Capaian Kinerja kinerja wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.136. Capaian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2017

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Persentase
		Target	Realisasi	
a.	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	30%	20%	66,67%
b.	Persentase gejala konflik yang diatasi	30%	30%	100%
c.	Persentase cakupan wilayahpotensi konflik	15%	15%	100%
d.	Jumlah konflik sosial	0%	0%	100%
e.	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	60%	40%	66,67%
f.	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat	20%	20%	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima TA 2017

## a. Permasalahan dan Solusi

### 1) Permasalahan

- Kurangnya nilai moral dikalangan pemuda terhadap bangsa dan negara, sehingga memberi kesan seakan-akan semangat kebangsaan telah menjadi dangkal atau terobsesi terutama dikalangan generasi muda, sehingga dapat mengubah idealisme yang merupakan jiwa kebangsaan.
- Menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga ada kekuatiran ancaman disintegrasi bangsa, dengan melihat gejala yang terjadi di berbagai wilayah Kota Bima, seperti yang terjadi konflik antar masyarakat kelurahan Tanjung dan kelurahan Dara, dimana terdapat kecenderungan paham kebangsaan merosot sehingga menjadi paham kesukuan atau kelompok
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bima

- Masih Kurangnya pemahaman bagi dan wawasan kader Parpol tentang Sistematisa penyusunan dan kelengkapan Dokumen Pengajuan Dana Bantuan Keuangan parpol.
- Masih Kurangnya pemahaman bagi kelompok agama, masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Ormas dan LSM.

## **2) Solusi**

- Kegiatan Pendidikan wawasan Kebangsaan (PWK) sebagai upaya mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan penguatan kesadaranberbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR) perlu ditingkatkan
- Perlu dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang-Undangan bagi pengurus dan anggota ormas dan LSM



### 3. Kantor Kecamatan

Selain Badan Kesbangpol dan Kantor Satpol PP, Urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat juga dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Asakota dan Kecamatan Raba

Tabel 2.137. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1	Kecamatan Asakota	82.750.000,00	81.748.500,00	98,79
2	Kecamatan Raba	169.620.000,00	169.620.000,00	100
<b>JUMLAH</b>		<b>252.370.000,00</b>	<b>251.368.500,00</b>	<b>99,60</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

#### b. Program dan Kegiatan

Seperti yang tergambar pada tabel bahwa pada tahun 2017 Urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Asakota Kecamatan Raba mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 252.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 251.368.500,00 atau sebesar 99,60%.

Program yang dilaksanakan yang dilaksanakan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan melalui kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalaam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan.Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat.

Indikator Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dari target mencapai kategori baik, dapat terealisasi sesuai target. Tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang menonjol selama tahun 2017 di wilayah Kota Bima (kondusif).

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian target adalah :

- Adanya komitmen yang kuat dari masyarakat, tokoh masyarakat, ormas, dan pemerintah untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban di Kota Bima.
- Adanya sinergi yang baik antara unsur penegakkan keamanan dan ketertiban (Polisi, TNI, dan Satpol PP).
- Peran Serta dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

#### c. Permasalahan dan Solusi

##### 1) Permasalahan

- Masih kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang peraturan daerah dan peraturan walikota yang berlaku di Kota Bima.
- Masih lemahnya perlindungan hukum bagi aparatur dalam menegakkan Perda/Perwali.
- Belum Optimalnya koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.

## 2) Solusi

- Melakukan sosialisasi dan informasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang Perda dan Perwali yang berlaku di Kota Bima melalui tatap muka, papan informasi, serta media cetak dan elektronik.
- Melindungi aparatur penegak sesuai ketentuan hukum yang berlaku
- Meningkatkan komitmen bersama dengan pihak-pihak terkait (TNI, Polri, Kejaksaan) dan masyarakat dalam penanganan ketentraman dan ketertiban.

## 5. Urusan Sosial

Urusan Wajib Sosial pada tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bima mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.136.545.800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.994.180.161,00 atau sebesar 93,34% melalui beberapa program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

### a. Program kegiatan yang dilaksanakan

Tabel 2.138. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>510.438.450,00</b>	<b>497.938.250,00</b>	<b>97,55</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	19.416.000,00	19.416.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25.800.000,00	16.369.000,00	63,44
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.300.000,00	22.020.500,00	90,61
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	52.900.000,00	52.900.000,00	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.430.000,00	7.430.000,00	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	42.265.000,00	42.265.000,00	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.201.250,00	16.173.250,00	99,82
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.488.300,00	4.487.500,00	99,98
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	32.250.000,00	32.250.000,00	100
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.972.000,00	3.970.000,00	99,94
11	Penyediaan makanan dan minuman	20.640.000,00	20.640.000,00	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	197.350.800,00	196.652.000,00	99,64

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	63.425.100,00	63.365.000,00	99,90
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>34.265.000,00</b>	<b>33.684.427,00</b>	<b>98,31</b>
1	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	18.000.000,00	17.421.427,00	96,79
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1.765.000,00	1.765.000,00	100
3	Pengadaan Meubelair	0,00	0,00	0
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00	4.498.000,00	99,96
III	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>80.485.850,00</b>	<b>79.953.650,00</b>	<b>99,34</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.420.800,00	8.405.800,00	99,82
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.168.100,00	6.168.100,00	100
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	11.378.000,00	11.378.000,00	100
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.269.000,00	17.752.000,00	97,17
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	22.500.000,00	22.500.000,00	100
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	13.749.950,00	13.749.950,00	100
IV	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</b>	<b>761.090.000,00</b>	<b>648.766.000,00</b>	<b>85,24</b>
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	28.944.000,00	28.944.000,00	100
2	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	183.799.000,00	183.576.000,00	99,88
3	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	56.740.000,00	56.675.000,00	99,89
4	Monitoring dan Evaluasi	10.000.000,00	9.990.000,00	99,90
5	Pendataan penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	43.722.000,00	43.722.000,00	100
6	Penyuluhan Sosial	19.885.000,00	19.885.000,00	100
7	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	418.000.000,00	305.974.000,00	73,20
V	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>525.805.000,00</b>	<b>509.646.334,00</b>	<b>96,93</b>
1	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	21.990.000,00	21.990.000,00	100
2	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	0,00	0,00	0
3	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	168.934.000,00	160.554.000,00	95,04
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10.000.000,00	9.895.000,00	98,95
5	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	300.000.000,00	292.426.334,00	97,48
6	Pemdampingan Kegiatan Kesorasian Sosial	24.881.000,00	24.781.000,00	99,60
VI	<b>Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma</b>	<b>37.165.000,00</b>	<b>37.126.000,00</b>	<b>99,90</b>
1	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	27.165.000,00	27.126.000,00	99,86
2	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
VII	<b>Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)</b>	<b>27.996.500,00</b>	<b>27.931.500</b>	<b>99,77</b>

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	27.996.500,00	27.931.500	99,77
VII I	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>159.299.000,00</b>	<b>159.134.000,00</b>	<b>99,90</b>
1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	21.779.000,00	21.779.000,00	100
2	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	59.111.000,00	59.006.000,00	99,82
3	Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	7.882.000,00	7.882.000,00	100
4	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	55.527.000,00	55.527.000,00	100
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	15.000.000,00	14.940.000,00	99,60
<b>Jumlah</b>		<b>2.136.544.800,00</b>	<b>1.994.180.161,00</b>	<b>93,34</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Kelompok sasaran pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang antara lain meliputi :

- a. Anak Balita Terlantar
- b. Anak Terlantar dan anak akal
- c. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
- d. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)
- e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
- f. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah
- g. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
- h. Korban Tindak Kekerasan
- i. Lanjut Usia Terlantar
- j. Penyandang Disabilitas (Cacat)
- k. Tuna Susila
- l. Pengemis dan Gelandangan
- m. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
- n. Korban Penyalagunaan Napza
- o. Keluarga Fakir Miskin
- p. Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni
- q. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
- r. Korban Bencana Alam
- s. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi
- t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
- u. Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)
- v. Keluarga Rentan

- w. Eks. Pengidap Penyakit Kusta, dan
- x. Penduduk di Daerah Rawan Bencana.

## b. Capaian Kinerja

Pada tahun 2017 terdapat 7.481 orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dari jumlah 9.334 orang PMKS yang ada di Kota Bima. Bahwa jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial tersebut sebesar 80,14 % .

Percapaian target kinerja urusan sosial tahun 2017 dapat dikatakan berhasil. Persentase realisasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial mencapai 80,14%.

Pencapaian indikator sasaran urusan sosial pada Dinas Sosial Kota Bima, dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Sosial Kota Bima dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan terkait.

Selain itu, terdapat beberapa program yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain:

Tabel 2.139. Program dan Kegiatan yang didukung oleh pendanaan Non APBD

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	2	3		4	5
1.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20	Kelompok	400.000.000	DEKON
2.	Bantuan Pengembangan Usaha melalui E-Warong dan KUBE Jasa	12	Kelompok	360.000.000	APBN
3.	Asistensi sosial kesejahteraan sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat)	198	Orang	594.000.000	APBN
4.	Asistensi lanjut usia terlantar ( aslut )	40	Orang	80.000.000	APBN
5.	Program pemenuhan kebutuhan dasar orang dengan kecacatan	-	-	-	-
6.	Program lembaga kesejahteraan sosial anak (asistensi) sosial	75	Orang	75.000.000	DEKON
7.	Program lembaga kesejahteraan sosial anak (asistensi) sosial	15	orang	15.000.000	APBN
8.	Program lembaga kesejahteraan sosial dan lanjut usia (asistensi) sosial	-	-	-	-
9.	Kebutuhan dasar melalui home care	-	-	-	-
10.	Program lembaga kebutuhan dasar bagi korban napza	10	Orang	50.000.000	APBN
11.	Kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat	1	Kelurahan	109.000.000	APBN
12.	Forum harmonisasi sosial meci angi kearifan lokal, sanggar melayu	1	Forum	50.000.000	APBN

13.	Program keluarga harapan (pkh)	3.745	Orang	7.146.380.000	APBN
14.	Kegiatan Tanggap darurat terhadap korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	381	KK	1.379.700.000	APBN
<b>T O T A L</b>				<b>10.259.080.000</b>	

## B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

### 1. Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.061.395.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.048.995.656,00 atau sebesar 98,83% yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Program kegiatan

Tabel 2.140. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan TA 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>348.570.000,00</b>	<b>339.139.413,00</b>	<b>97,29</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	20.250.000,00	19.800.000,00	97,77
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	20.700.000,00	14.013.513,00	67,69
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	100
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	11.750.000,00	11.750.000,00	100
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45.700.000,00	45.700.000,00	100
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	18.690.000,00	18.675.000,00	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.490.000,00	8.429.000,00	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	44.705.000,00	44.705.000,00	100
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.160.000,00	5.160.000,00	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	6.125.000,00	4.000.000,00	65,30
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	159.000.000,00	158.906.900,00	99,94
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	0,00	0,00	0
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>21.440.000,00</b>	<b>21.430.243,00</b>	<b>99,95</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16.440.000,00	16.430.243,00	99,94

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
III	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>79.080.000,00</b>	<b>79.080.000,00</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan prognosis laporan keuangan	10.080.000,00	10.080.000,00	100
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	10.500.000,00	10.500.000,00	100
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	50.500.000,00	50.500.000,00	100
IV	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>151.000.000,00</b>	<b>148.680.000,00</b>	<b>98,46</b>
1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta	10.000.000,00	10.000.000,00	100
2	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	141.000.000,00	138.680.000,00	98,35
V	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>	<b>194.150.000,00</b>	<b>194.040.000,00</b>	<b>99,94</b>
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	13.200.000,00	13.200.000,00	100
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	10.600.000,00	10.490.000,00	98,96
3	Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	25.000.000,00	25.000.000,00	100
4	Padat Karya Infrastruktur	117.350.000,00	117.350.000,00	100
5	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100
6	Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta ( PPTKIS )	7.000.000,00	7.000.000,00	100
VI	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>	<b>267.155.000,00</b>	<b>266.626.000,00</b>	<b>99,80</b>
1	Pemeriksaan Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 )	113.514.500,00	113.255.500,00	99,77
2	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	47.164.000,00	47.164.000,00	100
3	Fasilitasi Operasional Dewan Pengupahan Daerah	38.011.000,00	37.741.000,00	99,28
4	Survey Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak ( KHL )	37.927.000,00	37.927.000,00	100
5	Sosialisasi Undang - Undang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	30.538.500,00	30.538.500,00	100
Jumlah		1.061.395.000,00	1.048.995.656,00	98,83

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2016 (data sebelum audit BPK)

## b. Capaian Kinerja

Adapun rincian pencapaian target kinerja urusan ketenagakerjaan di Kota Bima pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- **Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**

Sasaran meningkatnya kualitas dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah lembaga pelatihan tenaga kerja swasta yang dibina target 12 Lembaga terealisasi 12 Lembaga

2. Jumlah Tenaga kerja yang dilatih berdasarkan jenis pelatihan, pendidikan dan ketrampilan di target sebanyak 60 Orang terealisasi 60 Orang.

- ***Sasaran Peningkatan dan perluasan lapangan kerja***

Sasaran peningkatan dan perluasan kesempatan kerja dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

1. Pendaftar Pencari Kerja/ Lowongan, target 269 Orang pencari kerja terealisasi 269 Orang.
2. iklan /Brosur/ Pamflet , papan informasi target 594 brosur/ pamflet terealisasi 594 brosur/ pamphlet.
3. Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja target 100 Orang terealisasi 100 Orang.
4. Jumlah PPTKIS yang dibina target 7 Lembaga terealisasi 7 lembaga
5. Jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam padat karya infrastruktur target 68 Orang terealisasi 68 Orang.
6. Ketersediaan Data base tenaga kerja daerah target 1 Dokumen terealisasi 1 Dokumen.

- ***Sasaran Meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja***

Sasaran meningkatkan perlindungan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :

1. jumlah perusahaan yang diperiksa K3, target 30 perusahaan terealisasi 30 perusahaan.
2. Jumlah Perusahaan yang menerapkan UMK, target 231 perusahaan terealisasi 231 Perusahaan

- ***Sasaran Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial ketenagakerjaan***

Sasaran meningkatkan harmonisasi hubungan industrial ketenagakerjaan, dari target penetapan kinerja sebanyak 100%, dapat terealisasi 100%, maka capaian kinerja rata-rata 100 %.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategik tersebut didukung oleh keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut :



1. Jumlah Perusahaan yang di Survei yang menerapkan satandar KHL, target 30 Perusahaan terealisasi 30 perusahaan.
2. Jumlah Peerusahaan Peserta BPJS, target 80 Perusahaan terealisasi 80 Perusahaan.
3. Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dimediasi, target 10 Kasus terealisasi 10 Kasus.

### c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang masih dihadapi terkait dengan urusan ketenagakerjaan adalah masih terbatasnya lapangan kerja yang tersedia di Kota Bima. Adapun solusi berkenaan dengan permasalahan tersebut diantaranya Pemerintah Kota Bima perlu membangun lembaga pelatihan kerja pememrintah, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), dan mendorong Lembaga Pelatihan Swasta untuk melaksanakan pelatihan terhadap pencari kerja di Kota Bima. Keberadaan Lembaga Pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketrampilan (skill) bagi masyarakat sebagai pencari kerja. Berkenaan dengan pelatihan melalui lembaga pelatihan kerja tersebut diharapkan mampu menciptakan kesempatan kerja sehingga menurunkan angka pengangguran di Kota Bima.

## 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 1.186.076.500,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.089.245.721,00 (91,84%). Program dan kegiatan pada urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bima, yang capaian realisasinya sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.141. Program/ Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>389.433.750,00</b>	<b>382.867.771,00</b>	98,31
1	Penyediaan jasa surat menyurat	26.430.000,00	26.430.000,00	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6.279.000,00	5.302.500,00	84,45
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.800.000,00	12.293.500,00	83,06
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.040.000,00	41.040.000,00	100,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	21.962.000,00	21.962.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
6	Penyediaan alat tulis kantor	27.988.500,00	27.987.750,00	100,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	38.170.000,00	38.161.750,00	99,98
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.400.000,00	3.590.000,00	66,48
11	Penyediaan makanan dan minuman	14.350.000,00	13.845.000,00	96,48
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	175.410.500,00	174.655.271,00	99,57
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.303.750,00	15.300.000,00	99,98
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>123.561.000,00</b>	<b>95.376.000,00</b>	
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	47.298.000,00	47.298.000,00	100
3	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67.913.000,00	39.728.000,00	58,50
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	0,00	0,00	
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	8.350.000,00	8.350.000,00	100,00
III	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	100
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	10.500.000,00	10.500.000,00	100
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0,00	0,00	0
1	Pelaksanaan Penilaian AKJG	0,00	0,00	0
V	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>94.376.750,00</b>	<b>94.033.750,00</b>	99,64
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.613.500,00	20.579.500,00	99,84
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.600.000,00	9.600.000,00	100
	Penyusunan pelaporan realisasi anggaran triwulan	17.589.000,00	17.280.000,00	98,24
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.916.000,00	9.916.000,00	100
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	36.658.250,00	36.658.250,00	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	0,00	0,00	0
VI	<b>Program keserasian Kebijakan</b>	<b>158.082.000,00</b>	<b>130.965.000,0</b>	82,85

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	<b>Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>			
1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	5.851.000,00	5.851.000,00	100
2	Penyusunan dan Penertiban Produk Hukum Daerah Dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak	152.231.000,00	125.114.000,00	82,19
VII	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>257.374.500,00</b>	<b>252.816.200,0</b>	98,23
1	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	5.730.000,00	5.730.000,00	100
2	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	24.107.500,00	23.159.500,00	96,07
3	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	108.628.000,00	108.328.000,00	99,72
4	Evaluasi pelaksanaan PUG	18.030.500,00	17.360.500,00	96,28
5	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	26.966.000,00	26.766.000,00	99,26
6	Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak (KLA)	73.912.500,00	71.472.200,00	96,70
VIII	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>109.965.500,00</b>	<b>79.904.000,00</b>	72,66
1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	20.353.000,00	18.554.000,00	91,16
2	Penyusunan perlindungan bagi perempuan	17.607.500,00	17.595.000,00	99,93
3	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	31.470.000,00	31.470.000,00	100
4	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	10.110.000,00	9.835.000,00	97,28
5	Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI)	30.425.000,00	2.450.000,00	8,05
IX	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>42.783.000,00</b>	<b>42.783.000,00</b>	100
1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	42.783.000,00	42.783.000,00	100
<b>Jumlah Anggaran</b>		<b>1.186.076.500,00</b>	<b>1.089.245.721,0</b>	91,41

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pokok bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (selain program dan kegiatan yang bersifat rutinitas), capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Program dan Kegiatan

##### 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 158.082.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.965.000,00 (82,85%), dilaksanakan oleh BPP-KB Kota Bima melalui kegiatan :

- a) Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.851.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 5.851.000,00 (100,00%).
- b) Penyusunan dan Penertiban Produk Hukum Daerah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.231.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 125.114.000,00 (100,00%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- 1) Terlaksananya Rapat tehnik Kegiatan sosialisasi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
- 2) Terbitnya Produk Hukum Daerah di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

## **2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak**

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 257.374.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 252.816.200,00 (98,23%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.730.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.730.000,00 (100%).
- 2) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.073.500,00 direalisasikan sebesar 100%.
- 3) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 108.628.000,00 direalisasikan sebesar Rp 108.328.000,00 (99,72%).
- 4) Evaluasi pelaksanaan PUG, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.030.500,00 direalisasikan sebesar Rp 17.360.500,00 (96,28%).
- 5) Pengembangan sistem informasi gender dan anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 26.966.000,00 direalisasikan sebesar Rp 26.766.000,00 (99,26%)
- 6) Pengembangan Kota Sebagai Kota Layak Anak, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.912.500,00 direalisasikan sebesar Rp 71.472.200,00 (96,70%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya Rapat teknis Kegiatan Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Organisasi Perempuan.
- b) Terlaksananya Rapat teknis Kegiatan Pembinaan kelompok P2TP2A dan Data organisasi/Lembaga masyarakat.
- c) Terlaksananya Rapat teknis Kegiatan Pertemuan Adfokasi peningkatan dan memperluas jaringan kelembagaan Perempuan dan belanja bantuan untuk diberikan kepada masyarakat.
- d) Terlaksananya rapat teknis Kelompok Fokal Point PUG dan Kegiatan Pendataan Kekerasan Perempuan.
- e) Terlaksananya rapat teknis Kegiatan pendataan Kekerasan Anak, Rapat teknis Kegiatan Sosialisasi pencegahan dan pemulihan korban Kekerasan dan rapat teknis Kegiatan pengumpulan data korban Kekerasan perempuan dan Anak.
- f) Terlaksananya Rapat teknis penyusunan kegiatan pengembangan KLA.

### **3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 109.965.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 79.904.000,00 (72,66%) melalui kegiatan :

- 1) Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 20.353.000,00 direalisasikan sebesar Rp 18.554.000,00 (91,16%).
- 2) Penyusunan perlindungan bagi perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 17.607.500,00 direalisasikan sebesar Rp 17.595.000,00 (99,93%).
- 3) Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.470.000,00 direalisasikan sebesar Rp 31.470.000,00 (100%).
- 4) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 10.110.000,00 direalisasikan sebesar Rp 9.835.000,00 (97,28%).
- 5) Pembinaan dan Lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 30.425.000,00 direalisasikan sebesar Rp 2.450.000,00 (8,05%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya rapat teknis dan sosialisasi Hak Tumbuh Kembang Anak (TKA).

- b) Terlaksananya Rapat teknis kegiatan sosialisasi sistim perlindungan Perempuan.
- c) Rapat Tehnis Kegiatan Pendataan dan Pencatatan Kekerasan Perempuan (KDRT).
- d) Terlaksananya Peserta Rapat teknis Pertemuan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan.
- e) Terlaksananya Kegiatan Lomba KSI dan RS Sayang Ibu serta pemantapan Lomba KSI dan RSSI.

**4. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan**

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 42.783.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.783.000,00 (100%), dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Kegiatan pembinaan organisasi perempuan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.783.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 42.783.000,00 (100%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya kegiatan perayaan Hari Ibu.

**b. Capaian Kinerja**

Adapun capaian kinerja Badan PP dan KB Kota Bima Tahun 2017 dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.142. Capaian Kinerja Badan PP dan KB Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	2017		
		Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	52,74%	37,31%	70,74%
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	49,63%	57,94%	116,74%
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	12,00%	12,00%	100%
4	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terselesaikan oleh unit pelayanan terpadu	67,74%	100,00%	147,62%
5	% Kelompok Forum anak yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%
	<b>Rata-rata</b>			<b>107,02%</b>

### c. Permasalahan dan Solusi

1. Masih terbatasnya data dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, Data dan informasi merupakan salah satu elemen vital guna mendukung kegiatan PP dan PA. Kekurangan dan keterbatasan data dan informasi tersebut diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan penting demi penyediaan dan penyempurnaan data-data pendukung yang diperlukan dalam perencanaan Dinas PP dan PA.
2. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama *stakeholders* dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima.
3. Belum optimalnya pelayanan prima dalam Dinas PP dan PA.
4. Sebagai lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai pelayanan publik dalam bidang PP dan PA, maka sudah tentu Dinas PP dan PA. Kota Bima harus berorientasi pada pelayanan prima dan ini dilakukan terlebih dahulu dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal dalam melayani publik. Pelayanan prima ini diharapkan bisa menimbulkan kepuasan (*satisfaction*) bagi pihak-pihak yang terkait dengan Dinas PP dan PA. Kota Bima, terutama masyarakat Kota Bima.
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur Dinas PP dan PA Kota Bima.
6. Keberadaan aparatur PP dan PA merupakan unsur penting dalam setiap pengambilan keputusan perencanaan, oleh karenanya peningkatan kapasitas aparatur merupakan sebuah komitmen untuk meningkatkan kualitas dalam bidang PP dan PA.

### d. Solusi

1. Dinas PP dan PA. Kota Bima. harus terus meningkatkan partisipasi dan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* yang ada di Kota Bima seperti masyarakat, DPRD, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya. Peningkatan partisipasi dan kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan efektifitas perencanaan di Dinas PP dan PA. Kota Bima
2. Penempatan aparatur berdasarkan analisa beban kerja yang sudah dilakukan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing sumber daya aparatur yang ada (*right man on the right place*).
3. Peningkatan sosialisasi dan motivasi melalui jaring aspirasi dan tutor sebaya (lembaga peduli yang ada di masyarakat).

### **3. Urusan Pangan**

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragamandan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.

Selaras dengan hal tersebut diatas pembangunan ketahanan pangan di Kota Bima pada hakikatnya mempunyai beban tugas dan tanggung jawab untuk mampu menyelenggarakan pengaturan dalam penyediaan pangan yang cukup bagi kebutuhan masyarakat Kota Bima. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Kota Bima yang memiliki tipologi geografi dan kondisi sosiologis yang beragam harus memperhatikan aspek kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan, dan keamanan serta halal sampai di tingkat rumah tangga.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Kota Bima menyelenggarakan sejumlah operasionalisasi kebijakan urusan ketahanan pangan, melalui 2 program dan 16 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.930.012.000,00,-

#### ***a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan***

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Kota Bima disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.143. Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>697.006.600,00</b>	<b>600.651.902,00</b>	<b>86,2</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	74.932.200,00	73.485.000,00	<b>98,1</b>
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	58.400.000,00	39.071.784,00	<b>66,9</b>
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.767.800,00	2.804.800,00	<b>20,4</b>
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.388.000,00	42.930.000,00	<b>96,7</b>
5.	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000,00	39.775.000,00	<b>99,4</b>
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.000.000,00	43.927.000,00	<b>67,6</b>
7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	62.580.000,00	62.460.000,00	<b>99,8</b>
8.	Penyediaan makanan dan minuman	34.000.000,00	23.700.000,00	<b>69,7</b>
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	278.938.600,00	247.538.318,00	<b>88,7</b>
10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	25.000.000,00	24.960.000,00	<b>99,8</b>
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>136.490.000,00</b>	<b>82.331.731,00</b>	<b>60,3</b>
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor	46.490.000,00	45.331.500,00	<b>97,5</b>
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	30.000.000,00	25.076.231,00	<b>83,6</b>
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	30.000.000,00	5.424.000,00	<b>18,1</b>
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000,00	6.500.000,00	<b>21,7</b>
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.786.000,00</b>	<b>99,1</b>
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	25.000.000,00	24.786.000,00	<b>99,1</b>
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>12.950.000,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	12.950.000,00	12.950.000,00	<b>100,0</b>
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>133.500.000,00</b>	<b>133.500.000,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.000.000,00	8.000.000,00	<b>100,0</b>
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.750.000,00	15.750.000,00	<b>100,0</b>
3.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.750.000,00	15.750.000,00	<b>100,0</b>
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	<b>100,0</b>
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	54.000.000,00	54.000.000,00	<b>100,0</b>
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan</b>	<b>832.415.400,00</b>	<b>811.577.000</b>	<b>97,5</b>

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi
1.	Penanganan daerah rawan pangan	76.565.000,00	76.350.000	99,7
2.	Penyusunan data base potensi produk pangan	26.175.000,00	26.175.000,00	100,0
3.	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	25.410.400,00	25.410.000	100,0
4.	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	26.750.000,00	26.750.000	100,0
5.	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	77.695.000,00	77.382.000	99,6
6.	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	37.600.000,00	37.600.000	100,0
7.	Pengembangan cadangan pangan daerah	55.790.000,00	53.060.000	95,1
8.	Pengembangan desa mandiri pangan	64.540.000,00	64.435.000	99,8
9.	Pengembangan diversifikasi pangan	89.240.000,00	88.790.000,00	99,5
10.	Pengembangan lumbung pangan desa	26.800.000,00	26.800.000,00	100,0
11.	Pengembangan model distribusi pangan yang efisien	40.950.000,00	40.850.000	99,8
12.	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	51.275.000,00	42.985.000	83,8
13.	Penyuluhan sumber pangan alternatif	23.675.000,00	23.665.000,00	100,0
14.	Lomba cipta menuberagam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	165.000.000,00	156.815.000	95,0
15.	Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)	44.950.000,00	44.510.000	99,0
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>92.650.000,00</b>	<b>91.020.400</b>	<b>98,2</b>
1.	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	92.650.000,00	91.020.400	98,2
<b>Total</b>		<b>1.930.012.000,00</b>	<b>1.756.817.033</b>	<b>91,0</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Target dan Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpan) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.930.012.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.756.817.033,- atau mencapai 91,00%. Dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Ketahanan Pangan** didukung oleh 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 832.415.400,00 dan terealisasi sebesar Rp. 811.577.000,00 atau 97,5% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:
  - a) Kegiatan penanganan daerah rawan pangan dengan alokasi anggaran Rp. 76.565.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 76.350.000,00 atau 99,7% dengan Output jumlah kepala keluarga yang dapat ditingkatkan kualitas dan kapasitas pangan (Target 150 KK, realisasi 120 KK).

Outcomes : meningkatnya kualitas dan kapasitas pangan dan terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.

- b) kegiatan penyusunan data base potensi produk pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.175.000,00 dengan realisasi 100%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah produk pangan yang tersedia di masyarakat (target 1 Dokumen, realisasi 1 dokumen).

Outcomes : tersedianya data base jumlah produk pangan yang tersedia di masyarakat.

- c) Kegiatan analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan dengan anggaran Rp. 25.410.400,00 dan terealisasi 100%, dan output dari kegiatan ini adalah jumlah masyarakat yang memahami pola konsumsi dan suplai pangan (target 92 %)

Outcomes : meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pola konsumsi dan suplai pangan.

- d) Terselenggaranya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah dengan anggaran Rp. 26.750.000,00 dan terealisasi sebesar 100%, adapun output dari kegiatan ini adalah terdatanya kondisi ketahanan pangan pada tingkat kelurahan (1 Dokumen)

Outcomes : tersedianya data base kondisi ketahanan pangan.

- e) Kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dengan alokasi anggaran Rp. 77.695.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 77.382.000,00 atau 99,6%, output kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan rumah (target 7 kelompok)

Outcomes : termanfaatkannya pekarangan rumah untuk pengembangan pangan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

- f) Kegiatan pemantauan dan analisis harga pangan pokok dengan alokasi anggaran Rp. 37.600.000,00, terealisasi 100%. Output yang diharapkan adalah jumlah bahan pangan yang terpantau harganya di tingkat pedagang.

Outcomes : terpantaunya ketersediaan kebutuhan dan harga pangan.

- g) Kegiatan pengembangan cadangan pangan daerah, alokasi anggran Rp. 55.790.000,00 terealisasi Rp. 53.060.000,00 atau 95,1%. Ouput dari kegiatan ini adalah ketersediaan jumlah cadangan pangan di daerah (dengan target 15 ton).

Outcomes : Tersedianya dan berkembangnya cadangan pangan secara berkelanjutan.

- h) Kegiatan pengembangan desa mandiri pangan, alokasi anggaran 64.540.000,00 terealisasi 64.435.000 atau 99,8%. Dengan output terbentuknya kelurahan mandiri pangan yang dikembangkan. (Dengan target 5 Kelurahan)

Outcomes : Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya setempat secara optimal dan berkelanjutan.

- i) Kegiatan pengembangan diversifikasi pangan, alokasi anggaran Rp. 89.240.000,00 terealisasi Rp. 88.790.000,00 atau 99,5%. Dengan output jumlah jenis tanaman yang dapat dikembangkan di masyarakat. (dengan target 1 kelompok)  
Outcomes : keragaman jenis tanaman yang dikembangkan sebagai alternatif pemenuhan pangan masyarakat.
- j) Kegiatan pengembangan lumbung pangan desa, alokasi anggaran Rp. 26.800.000,00 terealisasi 100%, output kegiatan ini adalah ketersediaan lumbung pangan pada tingkat desa.  
Outcomes : tersedianya cadangan pangan serta fisik lumbung pangan.
- k) Kegiatan pengembangan model distribusi pangan yang efisien, alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.950.000,00 terealisasi Rp. 40.850.000,00 atau 99,8%. Output kegiatan ini adalah penanganan/pengembangan kelompok LDPM (dengan target 4 kelompok).  
Outcomes : Meningkatnya kemampuan kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dalam pemenuhan pangan serta terselenggaranya ketahanan pangan masyarakat.
- l) Kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan, dengan alokasi anggaran Rp. 51.275.000,00 terealisasi Rp. 42.985.000,00 atau 83,8%. Output kegiatan ini adalah jumlah pangan yang memiliki mutu dan keamanan untuk dikonsumsi.  
Outcomes : Meningkatnya mutu pangan dan terpenuhinya pangan yang aman, merata, halal dan terjangkau berdasarkan daya beli masyarakat.
- m) Kegiatan penyuluhan sumber pangan alternatif, dengan alokasi anggaran Rp. 23.675.000 terealisasi Rp. 23.665.000,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah masyarakat mengenal sumber pangan lokal sebagai alternatif pangan selain beras.  
Outcomes : meningkatnya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang sumber pangan Lokal sebagai alternatif pangan selain beras.
- n) Kegiatan lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), dengan alokasi anggaran Rp. 165.000.000,00 terealisasi Rp. 156.815.000,00 atau 95%. Output kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah Kelurahan peserta lomba cipta menu serta terciptanya menu makanan alternatif yang berasal dari komoditi lokal.  
Outcomes : meningkatnya minat masyarakat terhadap sumber komoditi lokal sebagai menu makanan alternatif yang aman dan sehat.
- o) Kegiatan pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), dengan alokasi anggaran Rp. 44.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.510.000,00 atau 99%. Output kegiatan ini adalah jumlah balita kurang gizi yang ditangani di Kelurahan.

2. **Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan** didukung oleh 1 kegiatan yaitu kegiatan promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan unggul daerah dengan anggaran Rp. 92.650.000,00 terealisasi Rp. 91.020.400,00 atau 98,2 %. Dengan output jumlah produk pangan yang dapat dipromosikan.

Outcomes : Dikenalnya produk pangan unggulan daerah di tingkat regional dan nasional.

#### b. Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.144. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan pangan</b>				
1	Penanganan Daerah Rawan Pangan	kk	150	120	80
2	Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	Dokumen	1	1	100
3	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	%	92	92	100
4	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Dokumen	1	1	100
5	Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan	Kelompok	7	7	100
6	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Komoditi	9	9	100
7	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Ton	15	2,6	17
8	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	kelurahan	5	5	100
9	Pengembangan Deservikasi Tanaman	Kelompok	1	1	100
10	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	%	1	0	0
11	Pengembang Model Distribusi Pangan Yang Efisien	Kelompok	4	4	100
12	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	%	9	9	100
13	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Kelompok	5	5	100
14	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Kelurahan	38	38	100
15	Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Kel	12	12	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan</b>				
1	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah	Jenis	34	34	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.

### **c. Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

- Masih rendahnya pendapatan masyarakat mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat apabila terjadi kenaikan harga pangan.
- Konsumsi beras per kapita cenderung turun, tetapi konsumsi gandum (terigu) cenderung meningkat.
- Teknologi pengolahan pangan lokal masih rendah.
- Belum maksimalnya kampanye dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan.
- Beras sebagai komoditas superior ketersediaannya masih terjamin dengan harga yang murah.
- Kualitas konsumsi pangan masih rendah, kurang beragam dan masih didominasi pangan sumber karbohidrat, serta masih rendahnya konsumsi protein hewani, umbi-umbian, aneka kacang, serta sayur dan buah
- Terdapatnya konsep makan yang salah dalam masyarakat yaitu “belum makan kalau belum makan nasi”.
- Pemanfaatan dan produksi sumber-sumber pangan lokal seperti aneka umbi dan jagung masih rendah.
- Bencana alam dan perubahan iklim yang sangat ekstrim.

#### **Solusi**

- Adanya Dukungan dari pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Hal ini berkaitan dengan dukungan anggaran, program, dan SDM, sehingga dapat menguatkan berbagai instrument yang ada di dalam SKPG dan PDRP.
- Memberikan informasi dan sosialisasi tentang perubahan nomenklatur dan penghematan kepada daerah.
- Fasilitasi kepada kelompok penerima manfaat untuk pengembangan bisnis pangan lokal dan makanan tradisional.
- Mendorong peran aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
- Peningkatan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan institusi yang menangani Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.
- Sinkronisasi kebijakan baik antar kementerian maupun dengan pihak swasta yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung.

- Mengembangkan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
- Melaksanakan kegiatan Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).
- Perlu upaya kampanye, promosi, sosialisasi, gerakan secara terstruktur dan komprehensif guna mendorong percepatan diversifikasi pangan.
- Meningkatkan peran swasta dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal.
- Mengembangkan bisnis dan industri pangan lokal, melalui: fasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan bisnis pangan lokal, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumberdaya lokal dan advokasi, sosialisasi dan penerapan standar keamanan dan mutu pangan bagi pelaku usaha pangan terutama usaha rumah tangga dan UMKM.
- Meningkatkan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal dilakukan melalui pengembangan bisnis pangan lokal bagi Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan kemitraan dengan dunia usaha (bekerja sama dengan Ditjen PPHP), pengembangan gerai atau outlet pangan lokal, pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal (bekerja sama dengan Balitbang dan Perguruan Tinggi) dan memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah.

#### 4. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan urusan wajib pertanahan pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima dengan alokasi anggaran Rp. 12.397.745.220,00 dan dapat direalisasikan Rp. 9.895.305.109,00 (79,82 %).

Tabel 2.145. Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	12.282.105.220,00	9.796.114.800,00	79,76
1.	Pembebasan/Pengadaan Tanah	12.282.105.220,00	9.796.114.800,00	79,76
II	<b>Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>	115.640.000,00	99.190.309,00	85,78
1.	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	115.640.000,00	99.190.309,00	85,78
	Jumlah	12.397.745.220,00	9.895.305.109,00	79,82

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan pertanahan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting antara lain untuk pengadaan dan pembebasan tanah seperti :

1. Pengadaan tanah untuk relokasi perumahan di So Ndano Wau Kel. Sambinae 4,3 Ha.
2. Pengadaan tanah untuk relokasi perumahan di So Ndano Wawo Kel. Jatibaru 1,02 Ha.
3. Pengadaan jasa penilai tanah (appraisal).

## 5. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan wajib lingkungan hidup di Kota Bima dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Ekonomi Setda Kota Bima dan Kantor Kelurahan. Secara keseluruhan anggaran yang dialokasikan pada urusan lingkungan hidup pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 9.883.576.200 (Sembilan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.820.935.856,00 (Sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau 99,37%.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.394.235.200,- (sembilan milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah). Realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 9.350.644.620,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) atau 99,50%. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi atas pelaksanaan belanja langsung tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Program dan Kegiatan

Tabel 2.146. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
<i>1</i>	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	<i>768,088,000.00</i>	<i>758,607,701.00</i>	<i>98.8</i>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	28,711,000.00	28,711,000.00	100.0
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	31,200,000.00	25,240,722.00	80.9
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	38,350,000.00	36,850,000.00	96.1
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	65,160,000.00	64,800,000.00	99.4
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5,275,000.00	5,275,000.00	100.0
6.	Penyediaan alat tulis kantor	51,240,000.00	51,240,000.00	100.0



No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	25,400,000.00	25,400,000.00	100.0
8.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9,240,000.00	9,240,000.00	100.0
9.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28,000,000.00	27,960,000.00	99.9
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	25,040,000.00	24,895,000.00	99.4
11.	Penyediaan makanan dan minuman	44,308,000.00	44,308,000.00	100.0
12.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	362,648,000.00	361,442,979.00	99.7
13.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	53,516,000.00	53,245,000.00	99.5
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>73,873,500.00</b>	<b>73,671,900.00</b>	<b>99.7</b>
1.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000.00	14,976,000.00	99.8
2.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona	52,773,500.00	52,595,900.00	99.7
3.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6,100,000.00	6,100,000.00	100.0
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu</b>	<b>776,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>64.4</b>
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	776,000.00	500,000.00	64.4
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>166,500,000.00</b>	<b>166,500,000.00</b>	<b>100.0</b>
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	20,000,000.00	20,000,000.00	100.0
3.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0
4.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12,500,000.00	12,500,000.00	100.0
5.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	66,500,000.00	66,500,000.00	100.0
6.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	37,500,000.00	37,500,000.00	100.0
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>3,446,174,700.00</b>	<b>3,443,203,600.00</b>	<b>99.9</b>
1.	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	90,250,000.00	90,250,000.00	100.0
2.	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3,181,974,700.00	3,179,354,600.00	99.9
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	173,950,000.00	173,599,000.00	99.8
<b>VI</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>594,483,000.00</b>	<b>589,342,146.00</b>	<b>99.1</b>
1.	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	68,375,000.00	68,365,000.00	100.0

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi
2.	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	85,305,000.00	83,130,000.00	97.5
3.	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	48,045,000.00	48,020,000.00	99.9
4.	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	50,000,000.00	50,000,000.00	100.0
5.	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	292,249,000.00	289,318,146.00	99.0
6.	Koordinasi penyusunan AMDAL	50,509,000.00	50,509,000.00	100.0
<b>VII</b>	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	<b>82,900,000.00</b>	<b>82,405,000.00</b>	<b>99.4</b>
1.	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	33,885,000.00	33,515,000.00	98.9
2.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	49,015,000.00	48,890,000.00	99.7
<b>VIII</b>	<b>Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam</b>	<b>131,525,000.00</b>	<b>131,525,000.00</b>	<b>100.0</b>
1.	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	131,525,000.00	131,525,000.00	100.0
<b>IX</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>	<b>84,200,000.00</b>	<b>83,745,000.00</b>	<b>99.5</b>
1.	Pengembangan data dan informasi lingkungan	84,200,000.00	83,745,000.00	99.5
<b>X</b>	<b>Program Pengelolaan Areal Pemakaman</b>	<b>1,825,266,000.00</b>	<b>1,803,108,665.00</b>	<b>98.8</b>
1.	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	1,716,891,000.00	1,695,117,250.00	98.7
2.	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	108,375,000.00	107,991,415.00	99.6
<b>XI</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan</b>	<b>2,220,449,000.00</b>	<b>2,218,035,608.00</b>	<b>99.9</b>
1.	Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan	1,085,004,000.00	1,083,518,608.00	99.9
2.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertamanan	1,135,445,000.00	1,134,517,000.00	99.9
<b>TOTAL</b>		<b>9,394,235,200.00</b>	<b>9,350,644,620.00</b>	<b>99.5</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Beberapa output penting dari pelaksanaan program dan kegiatan utama urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- a. Terselenggaranya kebersihan kota menuju kota sehat.

- b. Terlaksananya pelaksanaan kebijakan khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup.
- c. Tertatanya kali bersih sehingga terlihat indah.
- d. Tersusunya panduan tentang pelaksanaan amdal.

Adapun hasil (outcomes) nya meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup sehat.
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya masalah lingkungan.
- c. Meningkatnya jumlah sungai yang bersih dan teduh.
- d. Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang peduli dengan kajian lingkungan.

## 2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Telah dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan memiliki beberapa keluaran (output), yaitu:

- a. Terselenggaranya perlindungan sumber-sumber air.
- b. Terselenggaranya perlindungan pantai dan laut.
- c. Terlaksananya upaya-upaya pengurangan dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim.
- d. Terciptanya partisipasi masyarakat dalam perlindungan SDA.

Adapun hasil (outcomes) nya meliputi:

- a. Kawasan sumber-sumber mata air dan sumber daya alam terlindungi melalui partisipasi aktif masyarakat.
- b. Meningkatnya pemanfaatan kawasan pantai dan laut sebagai kawasan perdagangan, jasa dan pariwisata maupun sebagai kawasan lindung.

## 3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup yang diwujudkan dalam kegiatan pengembangan data dan informasi lingkungan dengan keluaran (output) adalah tersusunya data dan informasi lingkungan.

### a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

#### 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.446.174.700,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.443.203.600,- atau 99,90%. Program ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Adapun keluaran (output) dari kegiatan ini adalah:

- 1) terlaksananya kegiatan kebersihan rutin pada ruas jalan utama dan ruang publik kota.
- 2) terlaksananya kegiatan kebersihan rutin pada pemukiman warga
- 3) Tersedianya peralatan kebersihan
- 4) Terselenggaranya pengelolaan sampah di TPA

Sedangkan hasil (*outcomes*) terwujudnya kebersihan kota dan lingkungan masyarakat.

## 2. Program Pengelolaan Area Pemakaman

Program Pengelolaan Area Pemakaman mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.825.266.000,- dan direalisasikan Rp. 1.803.108.655,- atau sebesar 98,80%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemakaman serta kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman.

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terlaksananya penataan pemakaman serta pemeliharaan pagar kuburan.

Hasil (*outcomes*) dari kegiatan ini adalah tertatanya pemakaman sehingga terlihat indah dan rapi.

## 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan

Keluaran (*output*) dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pemeliharaan taman-taman Kota selama 12 bulan. Sedangkan hasil (*outcomes*) terwujudnya taman kota bima yang lebih asri, hijau dan tertata.

### **b. Capaian Kinerja**

Adapun capaian kinerja urusan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Cakupan presentase penanganan sampah mencapai 62,5% dari target penanganan persampahan yang juga 62,5 % di tahun 2017 atau dengan kata lain mampu memenuhi 100 % target penanganan persampahan.
2. Meningkatnya cakupan penghijauan dan perlindungan sumber mata air
3. Meningkatnya rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk
4. Tertatanya RTH di Kota Bima
5. Terus meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertamanan dan pemakaman sehingga tercipta keindahan kota.
6. Cakupan pelayanan kebersihan kota sebesar 70%.

### **c. Permasalahan dan Solusi**

1. Kurangnya alokasi anggaran APBD Kota Bima untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima. Permasalahan ini diatasi melalui pelaksanaan koordinasi dengan tim TAPD

Kota Bima sehingga alokasi anggaran untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima sesuai dengan kebutuhan.

2. Belum adanya regulasi berupa Perda lingkungan hidup yang mengatur retribusi lingkungan hidup. Permasalahan dapat diatasi dengan menyusun Perda Lingkungan Hidup untuk menarik retribusi Lingkungan Hidup untuk tahun berikutnya.
3. Laboran (tenaga teknis laboratorium) belum ada sehingga alat-alat laboratorium belum dioperasikan secara optimal. Upaya mengatasi masalah ini adalah dengan menyampaikan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk menempatkan tenaga analis kimia sebagai pejabat pengelola laboratorium Lingkungan Hidup.
4. Pemerintah Kota Bima masih mengambil peran yang sangat dominan dalam pengelolaan persampahan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah pada tingkat lingkungan. Hal ini juga berdampak pada cakupan pelayanan kebersihan kota hanya terbatas pada angka 70%. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan tersebut perlu dilakukan pembenahan kinerja pelayanan persampahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta lebih melibatkan partisipasi masyarakat agar memperoleh hasil yang maksimal.
5. Tingkat realisasi retribusi sampah masih rendah dari yang ditargetkan. hal ini disebabkan karena masih tumpang tindihnya pelayanan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dengan motor sampah tiga roda sehingga sebagian besar masyarakat langsung membayar pada operator. tidak melalui penagih retribusi yang seharusnya. untuk itu perlu dilakukan perbaikan pengelolaan retribusi sampah sejalan dengan upaya peningkatan kinerja pelayanan persampahan.

## 2. Kantor Kecamatan

Selain Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup juga dilaksanakan oleh Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba

Tabel 2.148. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup pada Kantor Kecamatan Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
	KECAMATAN ASAKOTA	82.504.000,00	69.817.800,00	84,62
I	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	82.504.000,00	69.817.800,00	84,62

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	82.504.000,00	69.817.800,00	84,62
	<b>KECAMATAN MPUNDA</b>	<b>106.534.000,00</b>	<b>103.128.800,00</b>	<b>96,80</b>
<b>II</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>106.534.000,00</b>	<b>103.128.800,00</b>	<b>96,80</b>
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	106.534.000,00	103.128.800,00	96,80
	<b>KECAMATAN RABA</b>	<b>154.803.000,00</b>	<b>154.803.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>154.803.000,00</b>	<b>154.803.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	154.803.000,00	154.803.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>343.841.000,00</b>	<b>327.749.600,00</b>	<b>95,32</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

### Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh Kecamatan Asakota, Mpunda dan Raba dengan alokasi anggaran sebesar Rp. **343.841.000,00** dan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. **327.749.600,00** atau 95,32%; dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terpenuhinya biaya operasional motor sampah yang ada di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan asakota sebanyak 4 kelurahan, mpunda 10 kelurahan dan raba 11 kelurahan;
- b) Tersedianya sarana dan prasarana serta peralatan kebersihan di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan asakota sebanyak 4 kelurahan, mpunda 10 kelurahan dan raba 11 kelurahan.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan bebas gundukan (tumpukan) sampah di tingkat kelurahan.

### b. Capaian Kinerja

Adanya peningkatan prosentase penanganan sampah di tiap-tiap kelurahan pada akhir tahun 2017.

### c. Permasalahan dan Solusi

#### 1. Permasalahan

- Masih kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya di sungai.
- Tidak terkoordinir dengan baiknya penarikan retribusi sampah pada tingkat kelurahan karena pada tahun 2017 kelurahan bukan lagi sebagai OPD

## **2. Solusi**

- Pengalihan operasional pengelolaan sampah dan penarikan retribusi sampah dari tingkat kelurahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima
- Meningkatkan kinerja pelayanan persampahan dengan memperbaiki sistem pengelolaan persampahan pada tingkat lokal yang berbasis pada partisipasi masyarakat
- Menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan pada tingkat lokal baik melalui APBD maupun swadaya.
- Perlu dilakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan sungai.
- Pengenaan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik berupa denda, sanksi administratif maupun sanksi moral

### **c. Permasalahan dan Solusi**

#### **1. Permasalahan**

- Masih kurangnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan lingkungan sehingga masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah rumah tangganya di sungai .

#### **2. Solusi**

- Meningkatkan kinerja pelayanan persampahan dengan memperbaiki sistem pengelolaan persampahan pada tingkat lokal yang berbasis pada partisipasi masyarakat
- Menyediakan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan pada tingkat lokal baik melalui APBD maupun swadaya.
- Perlu dilakukan sosialisasi tentang kebersihan lingkungan dan sungai.
- Pengenaan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan baik berupa denda, sanksi administratif maupun sanksi moral.

### **6. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil**

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan sipil pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 2.976.306.500,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.891.928.195,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau 97,16%. Program dan kegiatan pada urusan wajib kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Untuk lebih jelasnya capaian realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.149. Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>875.450.250,00</b>	<b>844.485.574,00</b>	<b>96,46</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.572.000,00	3.294.000,00	72,05
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000,00	58.518.924,00	81,28
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18.400.000,00	17.101.400,00	92,94
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48.831.000,00	48.829.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	79.621.750,00	79.466.750,00	99,81
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.830.000,00	18.830.000,00	100,00
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	236.520.000,00	222.895.000,00	94,24
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.120.000,00	1.995.000,00	63,94
9	Penyediaan bahan logistik kantor	11.721.750,00	11.721.750,00	100,00
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	337.283.750,00	337.283.750,00	100,00
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	44.550.000,00	44.550.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>169.978.000,00</b>	<b>166.326.350,00</b>	<b>97,85</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	111.560.000,00	110.980.000,00	99,48
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.918.000,00	31.846.350,00	91,20
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>33.982.000,00</b>	<b>98,50</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	34.500.000,00	33.982.000,00	98,50
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>104.765.000,00</b>	<b>104.765.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	42.193.000,00	42.193.000,00	100,00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	7.968.000,00	7.968.000,00	100,00
3	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.968.000,00	7.968.000,00	100,00



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp	%
1	2	3	4	5
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA SKPD	30.968.000,00	30.968.000,00	100,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	15.668.000,00	15.668.000,00	100,00
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>1.791.613.250,00</b>	<b>1.742.369.271,00</b>	<b>97,25</b>
1	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	25.746.000,00	21.729.750,00	84,40
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	37.576.000,00	37.036.000,00	98,56
3	Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	64.747.000,00	56.502.000,00	87,27
4	Profil Kependudukan	23.113.000,00	22.723.000,00	98,31
5	Pemutahiran Data Kependudukan	51.756.000,00	51.756.000,00	100,00
6	Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	20.899.000,00	20.899.000,00	100,00
7	Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK	57.069.000,00	56.513.971,00	99,03
8	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	275.144.000,00	266.244.000,00	96,77
9	Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran	120.378.000,00	120.375.000,00	100,00
10	Pelayanan Penerbitan Mutasi/Pindah	27.514.000,00	27.514.000,00	100,00
11	Penyusunan Buku Agregat	42.667.000,00	42.645.000,00	99,95
12	Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian	68.818.000,00	65.073.500,00	94,56
13	Pelayanan Penerbitan KTP-el	31.429.000,00	30.349.000,00	96,56
14	Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan	61.634.000,00	60.717.000,00	98,51
15	Pelayanan Pengaduan	32.510.500,00	32.510.000,00	100,00
16	Peningkatan Penerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan Anak	61.351.000,00	61.201.000,00	99,76
17	Pelayanan Perekaman KTP el	82.699.500,00	82.699.500,00	100,00
18	Pelayanan Dokumen Kependudukan	317.372.250,00	317.354.250,00	99,99
19	Penerbitan Dokumen Kependudukan	293.547.000,00	273.532.000,00	93,18
20	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	24.975.000,00	24.975.000,00	100,00
21	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	70.668.000,00	70.020.300,00	99,08
<b>Jumlah</b>		<b>2.976.306.500,00</b>	<b>2.891.928.195,00</b>	<b>97,16</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan utama, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Program dan Kegiatan

Program utama urusan wajib bukan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan. Untuk melaksanakan program penataan administrasi kependudukan, pada tahun 2017 Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.791.613.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.742.369.271,00 (97,25%) yang dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- a) Pelatihan tenaga pengelola SIAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.746.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 21.729.750,00 (84,40%).  
Out put Kegiatan ini Terlatihnya tenaga pengelola SIAK sebanyak 30 orang
- b) Monitoring, evaluasi dan pelaporandengan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.576.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 37.036.000,00 (98,56%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sebanyak 9 kali.
- c) Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.747.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 56.502.000,00 (94,49%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya sosialisasi pelayanan publik bidang pencatatan sipil sebanyak 3 kali dengan jumlah peserta 100 orang
- d) Profil Kependudukan sebesar Rp. 23.113.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 22.723.000,00 (98,31%).  
Out put Kegiatan ini adalah Tersusunnya profil kependudukan sebanyak 1 dokumen
- e) Pemutahiran Data Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.756.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 51.756.000,00 (100,00%).  
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya data Kependudukan sebanyak 1 dokumen
- f) Penyediaan Informasi yang dapat di Akses Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.899.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 20.899.000,00 (100,00%).  
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya informasi yg dpt diakses masyarakat
- g) Pemutahiran Data Pencatatan Sipil Non SIAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.069.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 56.513.971,00 (99,03%).  
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya data Pencatatan Sipil Non SIAK sebanyak 1 dokumen
- h) Pelayanan Penerbitan Kartu Keluargadengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.144.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 266.244.000,00 (96,77%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlayaninya penerbitan Kartu Keluarga bagi masyarakat.
- i) Pelayanan Penerbitan Akta Kelahirandengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.144.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 266.244.000,00 (96,77%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlayaninya penerbitan Akta Kelahiran bagi masyarakat
- j) Pelayanan Penerbitan Mutasi/Pindah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.514.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 27.514.000,00 (100%).  
Out put Kegiatan ini adalah terlayaninya penerbitan Mutasi/pindah bagi masyarakat

- k) Penyusunan Buku Agregat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.667.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 42.645.000,00(99,95%).  
Out put Kegiatan ini adalah Tersusunnya buku agregat sebanyak 50 buah
- l) Pelayanan Penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 68.818.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 65.073.500,00 (94,56%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlayaninya penerbitan akta perkawinan dan perceraian bagi masyarakat
- m) Pelayanan Penerbitan KTP-eldengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.429.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 30.349.000,00 (96,56%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlayaninya penerbitan KTP-el bagi masyarakat
- n) Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.634.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 60.717.000,00 (98,51%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya kerjasama dan inovasi pelayanan dengan adanya aplikasi system online akta pencatatan sipil
- o) Pelayanan Pengaduan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.429.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 30.349.000,00 (96,56%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlayaninya Pengaduan dari masyarakat
- p) Peningkatan Penerbitan Akta Kematian dan Pengangkatan Anak dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.351.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 61.201.000,00 (99,76%).  
Out put Kegiatan ini Terlaksananya penerbitan akta kematian dan pengangkatan anak masyarakat
- q) Pelayanan Perekaman KTP el dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 82.699.500,00 direalisasikan sebesar Rp. 82.699.500,00 (100%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlayaninya perekaman KTP-el bagi masyarakat
- r) Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 317.372.250,00 direalisasikan sebesar Rp. 317.354.250,00(99,99%).  
Out put Kegiatan ini adalah Terlayaninya dokumen kependudukan dengan pelayanan keliling kepada masyarakat
- s) Penerbitan Dokumen Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 293.547.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 273.532.000,00 (93,18%).  
Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya blangko-blangko untuk penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- t) Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.975.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 24.975.000,00(100%).

Out put Kegiatan ini adalah Tersedianya sistem informasi administrasi kependudukan bagi masyarakat.

- u) Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.668.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 70.020.300,00 (99,08%).

Out put Kegiatan ini adalah Terlaksananya koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan administrasi bagi masyarakat.

## b) Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang administrasi kependudukan dan sipil pada tahun 2017 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.150. Capaian Kinerja Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk yang telah memiliki KTP-el	85%	83%	97%
		Presentase jumlah pelayanan di bidang pendaftaran penduduk yang telah sesuai dengan standar pelayanan di tetapkan	19 Jenis Pelayanan/85 %	17 Jenis Pelayanan/75 %	93,75 %
		Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang akuntabel	Ada	Ada	Ada
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil	Rasio kepemilikan Akte Kelahiran	80%	70,%	87%
		Rasio pasangan ber Akte Nikah	70%	53%	75%
		Peresentase penerbitan Akte Kematian	80%	60%	75%

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima, 2017

## c) Permasalahan dan Solusi

### 1) Permasalahan

- Banyaknya pengajuan/permohonan pelayanan dokumen administrasi kependudukan baik pindah datang, pindah keluar, data penduduk yang masih blank, perekaman KTP-el, permohonan Akta-akta Catatan sipil maupun peristiwa penting lainnya, serta keterbatasan Blangko KTP-el.
- Belum tersimpannya arsip dokumen kependudukan dengan baik yang sesuai dengan standar kearsipan nasional.

- Belum maksimalnya pemanfaatan Akta Kematian sebagai persyaratan Pengalihan Hak Waris dan Pencatatan Perkawinan (status cerai mati).
- Belum ada pengembangan jaringan aplikasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh di tingkat desa/kelurahan, serta stabilnya kondisi jaringan tidak menentu (kadang baik/kadang buruk)menjadikan salah satu penyebab utama terhambatnya pelayanan, sehingga terkadang melampoi SOP standar pelayanan minimal.
- Keterbatasan tersedianya sarana dan prasarana dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan ;
  - ✓ Sarana berupa bangunan gedung kantor yang belum sesuai dengan standar bangunan/gedung pelayanan yang memadai.
  - ✓ Prasarana berupa Mobil keliling sebagai fasilitas pendukung dalam pelayanan keliling kepada masyarakat yang belum ada.
  - ✓ Sarana prangkat keras berupa Server masih mengandalkan pengadaan pusat yang telah berusia lebih 5 tahun.
- Keterbatasan tersedianya aparatur PNS untuk mendukung kelancaran kinerja perkantoran ;
- Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bima mempunyai 2 (dua ) bidang sebagai pelayanan yaitu Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk dan Bidang pelayanan pencatatan sipil pada kedua bidang tersebut belum memiliki staf sebagai operator dan staf administrasi(staf PNS), pada bidang pelayanan pendafrana penduduk dibutuhkan sebanyak 15 (lima belas) orang operator PNS, dan dibidang pelayanan pencatatan sipil sebanyak 10 (sepuluh) orang operator PNS, sedangkan dibidang pengolahan informasi administrasi dan pemanfaatan data dibutuhkan sebanak 3 (tiga) orang PNS, serta ditambah 2 (dua) staf administrasi.
- ASN yang memiliki motivasi kerja tinggi sebagai pelayan masyarakat rata-rata masih kurang/tidak sesuai harapan.

## 2) Solusi

- Meningkatkan kualitas petugas operator/entry data, verifikator ditingkat desa/kelurahan, puskesmas dengan memberikan pelatihan dalam pelayanan permohonan Administrasi Kependudukan dan peristiwa penting lainnya pendaftaran penduduk, permohonan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang baru.
- Menambah pengadaan Server, software dan hardware untuk meningkatkan kualitas koneksifitas jaringan semakin lancar.
- Melakukan sosialisasi undang-undang No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Administrasi Kependudukan berikut aturan pelaksanaannya secara luas kepada

penduduk, melalui talk show di Radio-radio, media cetak maupun dalam forum rapat-rapat koordinasi Kecamatan.

- Dilakukan rehab berat / pembangunan gedung sebagai tempat ruang pelayanan yang representatif, nyaman, aman dan tertib.
- Pengembangan jaringan aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara menyeluruh di tingkat desa / kelurahan.

## 7. Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.931.266.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.801.147.629,00 (95,56%). Program dan kegiatan pada urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima dimana capaian realisasinya digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.151. Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>524.544.500,00</b>	<b>497.468.766,00</b>	<b>94,84</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	27.318.000,00	27.317.000,00	<b>100,00</b>
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	66.060.000,00	57.200.826,00	<b>86,59</b>
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.050.000,00	21.890.700,00	<b>80,93</b>
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.780.000,00	51.780.000,00	<b>100,00</b>
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13.810.000,00	13.803.000,00	<b>99,95</b>
6	Penyediaan alat tulis kantor	31.902.500,00	31.901.900,00	<b>100,00</b>
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.840.000,00	25.515.000,00	<b>95,06</b>
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.105.000,00	2.102.000,00	<b>99,86</b>
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	18.500.000,00	18.500.000,00	<b>100,00</b>
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	3.490.000,00	<b>96,94</b>
11	Penyediaan makanan dan minuman	18.660.000,00	14.884.000,00	<b>79,76</b>
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.334.000,00	219.574.340,00	<b>96,59</b>
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.585.000,00	9.510.000,00	<b>99,22</b>
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>825.262.000,00</b>	<b>797.066.950,00</b>	<b>96,58</b>
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	663.970.000,00	639.082.000,00	<b>96,25</b>
2	Pengadaan mebeleur	3.600.000,00	3.600.000,00	<b>100,00</b>

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12.349.000,00	12.349.000,00	<b>100,00</b>
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97.628.000,00	94.320.950,00	<b>96,61</b>
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	23.265.000,00	23.265.000,00	<b>100,00</b>
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.450.000,00	24.450.000,00	<b>100,00</b>
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	33.000.000,00	33.000.000,00	<b>100,00</b>
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>17.780.000,00</b>	<b>17.780.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pelaksanaan Penilaian AKJG	17.780.000,00	17.780.000,00	<b>100,00</b>
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>99.960.000,00</b>	<b>99.960.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21.760.000,00	21.760.000,00	<b>100,00</b>
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.520.000,00	9.520.000,00	<b>100,00</b>
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.520.000,00	9.520.000,00	<b>100,00</b>
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.120.000,00	40.120.000,00	<b>100,00</b>
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	19.040.000,00	19.040.000,00	<b>100,00</b>
<b>VI</b>	<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>288.880.000,00</b>	<b>286.675.520,00</b>	<b>99,24</b>
1	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	91.970.000,00	90.220.000,00	<b>98,10</b>
2	Pelayanan KIE	119.425.000,00	119.425.000,00	<b>100,00</b>
3	Pembinaan Keluarga Berencana	51.270.000,00	51.270.000,00	<b>100,00</b>
4	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana	26.215.000,00	25.760.520,00	<b>98,27</b>
<b>VII</b>	<b>Program Kesehatan Reproduksi Remaja</b>	<b>115.724.600,00</b>	<b>115.012.500,00</b>	<b>99,38</b>
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	23.850.000,00	23.850.000,00	<b>100,00</b>
2	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	91.874.600,00	91.162.500,00	<b>99,22</b>
<b>VIII</b>	<b>Program pelayanan kontrasepsi</b>	<b>747.428.000,00</b>	<b>695.406.393,00</b>	<b>93,04</b>
1	Pelayanan konseling KB	546.375.000,00	495.317.393,00	<b>90,66</b>
2	Pengadaan alat kontrasepsi KB	201.053.000,00	200.089.000,00	<b>99,52</b>
<b>IX</b>	<b>Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri</b>	<b>194.215.000,00</b>	<b>174.305.000,00</b>	<b>89,75</b>
1	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	54.819.500,00	51.331.000,00	<b>93,64</b>
2	Orientasi Kader Pendataan Keluarga	43.858.000,00	41.127.000,00	<b>93,77</b>
3	Operasional Kader pendataan keluarga	45.960.000,00	44.880.000,00	<b>97,65</b>
4	Monitoring kegiatan pendataan keluarga	15.060.000,00	10.260.000,00	<b>68,13</b>
5	Koordinasi Pengelolaan Program	34.517.500,00	26.707.000,00	<b>77,37</b>

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>X</b>	<b>Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR</b>	<b>23.112.500,00</b>	<b>23.112.500,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	15.872.500,00	15.872.500,00	<b>100,00</b>
2	Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah	7.240.000,00	7.240.000,00	<b>100,00</b>
<b>XI</b>	<b>Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS</b>	<b>11.010.000,00</b>	<b>11.010.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	11.010.000,00	11.010.000,00	<b>100,00</b>
<b>XII</b>	<b>Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak</b>	<b>29.280.000,00</b>	<b>29.280.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	29.280.000,00	29.280.000,00	<b>100,00</b>
<b>XIII</b>	<b>Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>21.070.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan	21.070.000,00	21.070.000,00	<b>100,00</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.931.266.600,</b>	<b>2.801.147.629,</b>	<b>95,56</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Program dan Kegiatan

##### 1. Program Keluarga Berencana

Program keluarga berencana yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 288.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 286.675.520,00 (99,24%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.970.000,00 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.220.000,00 (98,10%).
- 2) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.425.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 119.425.000,00 (100,00%)
- 3) Pembinaan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.270.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 51.270.000,00 (100%)



- 4) Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.215.000,00 dan jumlah yang direalisasikan sebesar Rp. 25.760.520,00 (98,27%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya kegiatan Lomba Pengelola PPKS/UPPKS/Kader BKB tingkat Kota.
- b) Terlaksananya Kegiatan Pertemuan Fafsedu, Toga/Toma Tk. Kota, Penilaian Lomba PKB dan IMP Teladan di Tingkat Kota Bima, dan Kegiatan Pembinaan Program Kampung KB, jambore PLKB dan kader serta pembentukan Kampung KB 4 Kec.
- c) Terlaksananya kegiatan Lomba Bidan Praktek Mandiri(BPM)/MKJP/promosi Kes.R ep. Rumaah sakit Type C dan D, Kelompok KB Pria dan Lomba Motivator KB Tingkat. Kota.
- d) Terlaksananya rapat kerja daerah program Keluarga Berencana di Ibukota Propinsi.

## **2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja**

Program kesehatan reproduksi remaja yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 115.724.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 115.012.500,00 (99,38%), dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.850.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 23.850.000,00 (100%).
- b) Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.874.600,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 90.220.000,00 (99,22%)

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

1. Terlaksananya Advokasi & KIE Program Kesehatan Reproduksi Remaja serta terlaksananya lomba Generasi Berencana sebanyak 2 kali kegiatan.
2. Terlaksananya Kegiatan Hari Besar (Hari Keluarga Nasional) Tahun 2017.

## **3. Program Pelayanan Kontrasepsi**

Program Pelayanan Kontrasepsi yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 747.428.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 695.406.393,00 (93,04%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a) Pelayanan Konseling KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 546.375.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 495.317.393,00 (90,66%).
- b) Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 201.053.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 200.089.000,00 (99,52%)

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah

- 1. Terlaksananya Kegiatan Penyuluhan Program KKBPK.
- 2. Terlaksananya Belanja Tempat Penyimpanan KIT /alat dan obat Kontrasepsi dan Termometer (termohygmometer) pengukur suhu ruangan gudag alakon DAK 2017.

#### **4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri**

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 194.215.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 174.305.000,00 (89,75%), dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.819.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 51.331.000,00 (93,64%).
- 2) Orientasi Kader Pendataan Keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.960.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 41.127.000,00 (93,77%).
- 3) Operasional Kader pendataan keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.960.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 44.880.000,00 (97,65%)
- 4) Monitoring kegiatan pendataan keluarga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.060.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 10.260.000,00 (68,13%).
- 5) Koordinasi pengelolaan program, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 34.517.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 26.707.000,00 (77,37%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- a) Terlaksananya rapat evaluasi program kependudukan KB dan terfasilitasinya biaya operasional anggota PPKBD sebanyak 50 orang dan biaya operasional Sub PPKBD sebanyak 263 orang.
- b) Terlaksananya orientasi pemutahiran data keluarga terhadap 220 orang kader pendataan keluarga yang dilaksanakan dalam 4 angkatan dan rapat tehnis kegiatan pencatatan pelaporan F/II/KB sebanyak 40 orang serta F/I/DAK sebanyak 27 orang.

- c) Tersedianya biaya operasional petugas SIDUGA (Sistim Informasi Kependudukan dan Keluarga), Operasional pemutahiran data keluarga dan Operasional petugas pemutar film KB layar lebar.
- d) Terlaksananya Monitoring Kegiatan pengelolaan data dan informasi program KB dan monitoring kegiatan pencatatan dan pelaporan (F/I/DAL) bagi PLKB.
- e) Terlaksananya rapat tehnik kegiatan lomba pidato kependudukan dan kegiatan kuliah umum bagi mahasiswa tingkat Kota Bima

#### **5. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR**

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.23.112.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.112.500,00 (100%), dilaksanakan oleh BPP-KB Kota Bima melalui kegiatan Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR.

- a) Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.872.500,00 dan direalisasikan sebesar Rp 15.872.500,00 (100%).
- b) Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7.240.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 7.240.000,00 (100%).

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya rapat pembinaan Pusat Informasi Konseling (PIK) KRR.
- b) Terlaksananya rapat persiapan lomba kelompok Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) Tk. Kota Bima

#### **6. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak**

Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.29.280.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.280.000,00 (100%), dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a. Terlaksananya Pembinaan kelompok kegiatan (POKTAN) Tk. Kota
- b. Terselenggaranya kegiatan lomba BKB Tk. Provinsi di Kota Bima

#### **7. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga**

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 21.070.000,00 dengan realisasi sebesar 21.070.000,00 (100%) dilaksanakan melalui Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terlaksananya pelatihan bagi tenaga pendamping kader BKB, BKR, BKL dan UPPKS sebanyak 1 kali kegiatan

#### 8. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPP&KB) Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 11.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 11.010.000,00 (100%). Keluaran (output) program ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS.

### b. Capaian Kinerja

Tabel 2.152. Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana

NO	URAIAN	2017		
		TARGET	REALISASI	%
1	Angka Kelahiran Total (TFR) Per WUS (15 - 49 Tahun)	2,61	2,36	90,42
2	Porsentase Pemakaian kontrasepsi (CPR)	61,27	50,31	82,11
3	Porsentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian kontrasepsi	25,30	13,28	190,51
4	Porsentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet need)	6,27	8,86	70,767
5	Cakupan Pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif	85,00	86,63	101,92
6	Peserntase Peserta KB aaktif MKJP	51,15	50,31	98,36
7	Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,74	11,12	405,84
8	Porsentase keluarga prasejahtera dan Keluarga sejahtera I	45	32	71,11

### c. Permasalahan dan Solusi

#### 1) Permasalahan

- a. Tingkat unmeet need yang masih tinggi, dimana target 6,26% realisasi 8,86%, hal ini dikarenakan :

1. Ingin ber KB tapi tidak bias ber KB
  2. BerKB tapi masih ingin mempunyai anak
- b. Masih tingginya PUS (Pasangan Usia Subur) yang menggunakan KB cara tradisional seperti (sistem kalender, senggama terputus) cara ini tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Hal ini masih digunakan karena masih adanya paradigma yang tidak benar terhadap alat KB modern MKJP (Menggunakan Kontrasepsi Jangka Panjang)
  - c. Kurangnya SDM yang terlatih yaitu tenaga medis (bidan) dalam pemasangan alat KB model MKJP
  - d. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung (alkes) seperti sterilisator uap dan lampu sorot pada sebagian fasilitas kesehatan pelayanan KB
  - e. Rasio perbandingan jumlah penyuluh terhadap wilayah penyuluhan yang tidak sebanding (1:2) dimana jumlah penyuluh yang ada sebanyak 23 orang sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 38 kelurahan
  - f. Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam mendukung program nasional KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga) dan pengembangan Kampung KB.

## 2) Solusi

- a. Meningkatkan dukungan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dengan penyuluhan melibatkan lintas sektoral seperti Toga, Toma, Towa
- b. Promosi Alkon KB modern seperti MKJP (IUD, Implan, MOW, MOP) Non MKJP (suntik, Pil KB dan kondom).
- c. Melakukan diklat terhadap sejumlah tenaga medis (bidan) yang ada di 66 fasilitas kesehatan yang ada.
- d. Pengadaan Alkes yang dibutuhkan.
- e. Penambahan personil penyuluh.
- f. Melaksanakan Rakor KB lintas sektoral untuk sinkronisasi program pusat dan daerah

### 4.2.8. Perhubungan

Urusan wajib perhubungan di Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.070.385.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.971.199.233,- atau 96,77%.

Urusan wajib perhubungan dilaksanakan oleh Dinas perhubungan Kota Bima. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi dapat diuraikan sebagai berikut.

**a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan di Kota Bima tahun 2017 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.153. Program/ Kegiatan Urusan Perhubungan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	666.060.000,00	618.462.477,00	92,85
1	Penyediaan jasa surat menyurat	68.700.000,00	63.500.000,00	92,43
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.610.000,00	26.684.526,00	64,13
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33.990.000,00	25.917.500,00	76,25
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	37.800.000,00	37.800.000,00	100,0
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	18.000.000,00	12.465.000,00	69,25
6	Penyediaan alat tulis kantor	50.760.000,00	50.715.100,00	99,91
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	110.500.000,00	98.034.500,00	88,72
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000,00	2.930.000,00	97,67
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.200.000,00	19.196.500,00	99,98
10	Penyediaan makanan dan minuman	51.900.000,00	50.724.000,00	97,73
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.000.000,00	189.935.351,00	99,97
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	40.600.000,00	40.560.000,00	99,90
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	188.428.000,00	188.156.756,00	99,86
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	27.000.000,00	26.900.000,00	99,63
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	161.428.000,00	161.256.756,00	99,89
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	67.500.000,00	66.825.000,00	99,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	67.500.000,00	66.825.000,00	99,00
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	0	0	0
1	Pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0
V	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	123.850.000,00	123.415.400,00	99,65
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14.750.000,00	14.750.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.750.000,00	15.747.000,00	99,98
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15.500.000,00	15.490.000,00	99,94
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.750.000,00	15.677.000,00	99,54
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	35.750.000,00	35.441.600,00	99,14

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	26.350.000,00	26.309.800,00	99,85
VI	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	93.072.000,00	93.005.700,00	99,93
1	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan	15.422.000,00	15.416.000,00	99,96
2	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	32.300.000,00	32.289.200,00	99,97
3	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	19.850.000,00	19.800.500,00	99,75
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	25.500.000,00	25.500.000,00	100,0
VII	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	215.400.000,00	212.673.000,00	98,73
1	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	215.400.000,00	212.673.000,00	98,73
VIII	<b>Program peningkatan pelayanan angkutan</b>	494.150.000,00	493.063.400,00	99,78
1	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang	13.600.000,00	13.600.000,00	100,0
2	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan peralatan	15.750.000,00	15.639.900,00	99,30
3	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	17.750.000,00	17.710.000,00	99,77
4	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	179.100.000,00	179.100.000,00	100,0
5	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan	20.050.000,00	19.997.500,00	99,74
6	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,0
7	Survei Sarana dan Prasarana Angkutan Laut	57.000.000,00	57.000.000,00	100,0
8	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir	163.900.000,00	163.016.000,00	99,46
IX	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	910.875.000,00	905.322.500,00	99,39
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	183.400.000,00	181.916.000,00	99,19
2	Pengawasan rutin dan operasi lalu lintas	256.800.000,00	256.800.000,00	100,0
3	Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas	25.125.000,00	25.092.500,00	99,87
4	Revitalisasi Traffic Light	445.550.000,00	441.514.000,00	99,09
X	<b>Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor</b>	104.650.000,00	104.275.000,00	99,64
1	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	104.650.000,00	104.275.000,00	99,64
XI	<b>Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal</b>	206.400.000,00	166.000.000,00	80,43
1	Pengaturan dan Penarikan Retribusi terminal	206.400.000,00	166.000.000,00	80,43
<b>Total Urusan Perhubungan</b>		<b>3.070.385.000,00</b>	<b>2.971.199.233,00</b>	<b>96,77</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Bima Tahun 2017

Penjelasan terkait output/outcome dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

### 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Program ini diwujudkan melalui kegiatan:

- 1) Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur bidang Perhubungan.
- 2) Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

- 3) Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
- 4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- 1) Tersusunnya kebijakan, norma, standar dan prosedur di bidang perhubungan.
- 2) Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan.
- 3) Meningkatnya pembangunan sarana dan fasilitas perhubungan.
- 4) Monitoring rutin pengelolaan terminal dan fasilitas perhubungan yang ada di Kota Bima

## **2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

Program ini diwujudkan melalui kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan.

Adapun keluaran (output) dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan gedung sayap terminal Kumbe.

## **3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.**

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Penyuluhan para sopir/juru mudi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.600.000,00,-, atau 100%.
- b. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan peralatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.639.900,00,-, atau 99,30%.
- c. Uji kelayakan sarana transportasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.710.000,00,-, atau 99,77%.
- d. Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 179.100.000,- atau 100%.
- e. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.997.500.000,- atau 99,74%.
- f. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- atau 100%.
- g. Survei Sarana dan Prasarana Angkutan Laut dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.000.000,- atau 100%.
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 163.016.000,-, atau 99,46%.

Keluaran (*output*) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

- 1) Terlaksananya penyuluhan kepada sopir/juru mudi tentang disiplin angkutan umum.



- 2) Terlaksananya operasi dan pengawasan disiplin angkutan umum di jalan raya secara rutin.
- 3) Terlaksananya sosialisasi mengenai ketertiban lalu lintas dan angkutan.
- 4) Tersedianya mobil penumpang pedesaan.
- 5) Tersedianya data mengenai sarana dan prasarana angkutan laut.
- 6) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di seluruh titik di Kota Bima .

#### **4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.**

Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- a. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 181.916.000,00,- atau 99,19 %.
- b. Pengawasan rutin dan operasi lalu lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 256.800.000,00 atau 100%.
- c. Penertiban dan Pemeriksaan Lalu Lintas dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.092.500,00 atau 99,87%.
- d. Revitalisasi Traffic Light dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 441.514.000,00 atau 99,09%.

Keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- 1) Tersedianya rambu-rambu lalu lintas jalur 1 (satu) arah dalam wilayah Kota Bima.
- 2) Terlaksananya pengawasan dan operasi lalu lintas.
- 3) Terlaksananya revitalisasi traffic light di Cabang Ranggo dan Cabang Masjid Raya Kota Bima.

#### **5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 104.275.000,00,- atau 99,64 %. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah terlaksananya kegiatan pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor di Kota Bima.

#### **6. Program Peningkatan Pelayanan Jasa Terminal**

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pengaturan dan penarikan retribusi terminal dengan fokus kegiatan pada belanja jasa non pegawai retribusi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 166.000.000,00,- atau 80,43%. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah meningkatnya retribusi terminal yang ada di Kota Bima.

## b. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja urusan perhubungan tahun 2017 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.154. Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi capaian	%
1	Program pelayanan administrasi perkantoran .	12 bulan	12 bulan	100
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	12 bulan	12 bulan	100
3	Program peningkatan disiplin aparatur.	1 paket	1 paket	100
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	0	0	0
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	12 bulan	12 bulan	100
6	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.	1 paket	1 paket	100
7	Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	4 kegiatan	4 kegiatan	100
8	Program peningkatan pelayanan angkutan.	12 bulan	12 bulan	100
9	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.	12 bulan	12 bulan	100
10	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.	12 bulan	12 bulan	100
11	Program peningkatan pelayanan jasa terminal	12 bulan	12 bulan	100

Sumber : Dinas Perhubungan, 2017

## c. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Masih minimnya pengetahuan penggunaan jalan terhadap rambu-rambu lalu lintas.
2. Masih dijumpai adanya pelanggaran Jalur Trayek Angkutan Umum;
3. Masih dijumpai pelanggaran oleh para sopir karena rendahnya pendidikan dan kesadaran berlalu lintas;
4. Kurang tertibnya kendaraan tradisional roda 2 yaitu Benhur dan Gerobak;
5. Lebar jalan dan kemampuan tonase jalan dan jembatan tidak sesuai dengan besar dan beratnya kendaraan pemakai jalan sehingga cepat rusaknya jalan/ jembatan dan sering terjadi kecelakaan;
6. Belum tertibnya pengaturan jalur Ojek sehingga jalur trayek maupun pemungutan biaya operasinya masih kurang tertib.

Beberapa strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Mengubah jalur dua arah menjadi jalur satu arah di jalan utama yaitu Jalan Soekarno-Hatta dan jalan Gajah Mada yang dilengkapi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
2. Mengadakan operasi terpadu/razia pada pagi hari (rawan macet) pada beberapa titik kegiatan, berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Intensifikasi retribusi izin trayek

dan pengujian kendaraan angkutan umum dan kendaraan bermotor, serta melakukan penyuluhan di jalan dan sosialisasi kepada sopir dan pengguna jalan umum.

3. Mendata jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 serta kendaraan tradisional tidak bermotor (benhur dan gerobak), sehingga dapat ditetapkan target PAD yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan.
4. Menyusun Sistem Tataran Transportasi Lokal yang betul-betul handal secara profesional sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang rencana di sektor perhubungan secara Lokal, Regional dan Nasional.

## 8. Urusan Komunikasi Dan Informatika

Urusan wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.689.958.000,- dan direalisasikan sebesar Rp. 3.190.962.220, atau 86,48%. Realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja serta permasalahan dan solusi dapat diuraikan sebagai berikut.

### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Beberapa program dan kegiatan pada urusan wajib informatika dan Komunikasi seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.155. Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2017

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.241.612.000,00	1.221.546.897,00	98,38
1	Penyediaan jasa surat menyurat	169.500.000,00	169.499.000,00	100,0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	338.952.000,00	323.179.811,00	95,35
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	100,0
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	852.800,00	85,28
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.200.000,00	42.100.000,00	97,45
6	Penyediaan alat tulis kantor	54.175.000,00	54.175.000,00	100,0
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.394.000,00	88.339.000,00	98,82
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.572.100,00	10.572.100,00	100,0
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100.450.000,00	98.825.000,00	98,38
10	Penyediaan makanan dan minuman	21.450.000,00	21.430.000,00	99,91
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	340.918.900,00	340.849.186,00	99,98
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah.	48.000.000,00	47.725.000,00	99,43
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	191.986.000,00	188.564.000,00	98,22
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	29.964.000,00	99,88

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.536.000,00	45.227.000,00	95,14
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	114.450.000,00	113.373.000,00	99,06
III	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	23.375.000,00	23.375.000,00	100,0
1	Pengadaan pakaian Olah Raga	23.375.000,00	23.375.000,00	100,0
IV	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	34.450.000,00	34.450.000,00	100,0
1	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	34.450.000,00	34.450.000,00	100,0
V	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	149.350.000,00	149.341.100,00	99,99
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17.000.000,00	17.000.000,00	100,0
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15.500.000,00	15.500.000,00	100,0
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15.000.000,00	15.000.000,00	100,0
4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	18.300.000,00	18.300.000,00	100,0
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	61.300.000,00	61.291.100,00	99,99
6	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	22.250.000,00	22.250.000,00	100,0
VI	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	459.800.000,00	457.712.666,00	99,55
1	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	353.500.000,00	352.312.666,00	99,66
2	Pengadaan alat studio dan komunikasi	56.400.000,00	55.500.000,00	98,40
3	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.	49.900.000,00	49.900.000,00	100,0
VII	<b>Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi</b>	40.000.000,00	39.930.200,00	99,83
1	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	40.000.000,00	39.930.200,00	99,83
VIII	<b>Program kerjasama informasi dengan mas media</b>	140.100.000,00	139.953.400,00	99,90
1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	140.100.000,00	139.953.400,00	99,90
IX	<b>Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika</b>	1.225.375.000,00	752.818.957,00	61,44
1	Pengembangan/pembenahan Aplikasi Website	148.975.000,00	148.975.000,00	100,0
2	Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Media Centre.	1.076.400.000,00	603.843.957,00	56,10
X	<b>Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah</b>	49.520.000,00	49.500.000,00	99,96
1	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik	49.520.000,00	49.500.000,00	99,96
XI	<b>Program Peningkatan Tata laksana Komunikasi dan Informatika</b>	76.350.000,00	75.730.000,00	99,19
1	Pengelolaan Proses Pengamanan Informasi Milik Pemerintah Daerah	41.450.000,00	40.930.000,00	98,75
2	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	34.900.000,00	34.800.000,00	99,71
XII	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Postel</b>	58.040.000,00	58.040.000,00	100,0
1	Monitoring Menara Telekomunikasi	58.040.000,00	58.040.000,00	100,0
<b>Total Urusan Komunikasi dan Informatika</b>		<b>3.689.958.000,00</b>	<b>3.190.962.220,00</b>	<b>86,48</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Penjelasan terkait *output/outcome* dari program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa memiliki anggaran sebesar Rp. 457.712.666,- dengan realisasi anggaran sebesar 99,55%. Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- i. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 352.312.666,00,-, atau 99,66%.
- ii. Pengadaan alat studio dan komunikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.500.000,00,-, atau 98,40%.
- iii. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.900.000,00,-, atau 98,40%.

Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah terlaksananya kerja sama dengan media massa yang menyebarkan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi berupa kegiatan pelatihan SDM, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 39.930.200,- atau 99,83%. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah tersosialisasinya peraturan tentang Komunikasi dan Informatika kepada SKPD dan masyarakat.

3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media memiliki anggaran sebesar Rp. 139.953.400,- atau 99,90%. Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah tersebarnya informasi mengenai pembangunan dan pemerintahan daerah melalui website pemerintah Kota Bima.

4. Program Pengadaan Perangkat Aplikasi dan Telematika, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 752.818.957,- atau 61,44%. Program ini diwujudkan melalui beberapa kegiatan yaitu:

- i. Pengembangan/pembenahan aplikasi website dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 148.975.000,00,-, atau 100%.
- ii. Pengembangan fasilitasi dan prasarana media centre dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 603.843.957,00,-, atau 56,10%.

Adapun keluaran (*output*) dari program ini adalah tersusunnya grand design media centre di Kota Bima.

## b. Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib Komunikasi dan Informatika meliputi beberapa indikator kinerja penting sebagaimana dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.156. Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2017		
			Target	Realisasi	% capaian
1.	Persentase pemenuhan kebutuhan aplikasi				
-	Website yang aktif dan up to date	%	40	35	87,50
-	Jumlah fasilitas dan prasarana media centre.	%	20	20	100,00
2.	Persentase ASN yang menguasai aplikasi teknologi informasi				
-	Jumlah ASN yang dilatih	%	16	16	100,00
3.	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi dan informatika.				
-	Jumlah publikasi data dan informasi	%	100	87	87,00
4.	Persentase tenaga pengawas				
-	Intensitas pelaksanaan monitoring	Bulan	6	6	100,00
5.	Tersedianya data dan informasi yang memadai				
-	Jumlah CCTV yang tersebar	Titik	5	5	100,00
-	Tersedianya Alat Studio	Unit	2	2	100,00
-	Tersedianya dokumen hasil pengkajian	Dok.	1	1	100,00
6.	Tersebarluasnya informasi ke masyarakat				
-	Pokja PPID	Kgt	1	1	100,00
7.	Tercapainya E-Government dan keterbukaan informasi publik				
-	Pokja Tim Pengelola Informasi Publik	Kgt	1	1	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, 2017

## c. Permasalahan dan Solusi

### 1) Permasalahan

- Website Pemerintah Kota Bima belum terlaksana dengan baik karena terbatasnya SDM yang ada.
- SDM aparatur dalam bidang teknologi komunikasi dan informatika masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan dan pengembangan bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- Pengembangan Media Center belum dilaksanakan secara optimal.

## 2) Solusi

- Meningkatkan keterampilan SDM Pengelola *website* Pemerintah Kota Bima.
- Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dalam bidang teknologi komunikasi dan informatika melalui sosialisasi ataupun pelatihan.
- Perlu dukungan pendanaan yang memadai untuk penyelenggaraan Media Center pada tahun 2018.

## 9. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Perkembangan koperasi ditunjukkan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tahun 2016 jumlah koperasi aktif ditargetkan sebanyak 101 unit, realisasi sebanyak 105 unit atau 103,96% dibandingkan dengan tahun 2016 realisasinya sebanyak 93 unit dan terdapat peningkatan sebanyak 12 unit atau 11,42% dan apabila dibandingkan lagi dengan target jangka menengah yang memiliki target 101 unit maka realisasi untuk tahun 2017 melebihi dari target sebanyak 4 unit.

Tabel 2.157. Persentase Koperasi Aktif di Kota Bima 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	78	80	85	93	105
2.	Jumlah Koperasi (unit)	144	150	185	193	205

Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima, 2016

Untuk jumlah UMKM tahun 2017 ditargetkan sebanyak 1.559 UMKM terealisasi sebanyak 1.332 UMKM atau 85,44% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang realisasinya sebanyak 575 UMKM, sehingga terdapat peningkatan sebanyak 757 UMKM atau 131,65%. dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang memiliki target 1.609 UMKM maka realisasi untuk tahun 2017 dibawah target sebanyak 277 UMKM.

Urusan Koperasi dan UKM yang dilaksanakan Dinas Koperindag Kota Bima pada tahun 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.241.659.657,- dan tersealisasi sebesar Rp.2.197.184.159,- atau 98,69%.

### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran

Pembangunan di bidang koperasi dan UKM tahun 2017 dilaksanakan melalui 3 program yaitu 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan 4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Realisasi program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.158. Realisasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.236.904.557	1.221.747.865	98,77
-	Penyediaan Jasa Surat-menyurat	346.500.000	335.185.000	96,73
-	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	116.480.000	92.604.424	79,50
-	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	1.600.000	1.179.700	73,73
-	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.000.000	49.800.000	92,22
-	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	26.380.000	26.378.000	99,99
-	Penyediaan alat tulis kantor	39.294.000'	39.294.000	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	154.900.000	154.900.000	100,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.160.000	51.248.000	96,40
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.040.000	4.995.000	99,11
-	Penyediaan Makan dan Minuman	38.305.000	38.457.200	100,40
-	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	393.846.357	381.066.541	96,76
-	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	46.693.200	46.640.000	99,89
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	136.807.000	135.110.000	98,76
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	89.500.000	89.500.000	100,00
-	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	25.876.000	25.560.000	98,78
-	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	21.431.000	20.050.000	93,56
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	24.260.000	24.260.000	100,00
-	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	24.260.000	24.260.000	100,00
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	89.200.000	89.200.000	100,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
-	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	16.500.000	16.500.000	100,00
-	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	55.200.000	55.200.000	100,00
-	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	17.500.000	17.500.000	100,00
5	Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	155.410.000	154.596.000	99,48
-	Operasional dan Pengembangan UPT PLUT	155.410.000	154.596.000	99,48
6	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah	103.313.300	84.170.000	81,47
-	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	17.078.600	10.918.000	63,93
-	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM	86.234.700	73.252.000	84,94
7	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	292.370.500	290.150.614	99,24
-	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga	61.025.000	60.574.000	99,26
-	Penyelenggaraan promosi usaha mikro kecil menengah	191.220.000	189.548.614	99,13
-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	40.125.500	40.028.000	99,76
8	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	156.440.200	151.609.680	96,91
-	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	101.275.200	101.135.680	99,86
-	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi	55.165.000	50.474.000	91,50
9	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi dan UMKM	46.954.100	46.340.000	98,69
-	Pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM	46.954.100	46.340.000	98,69

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program kegiatan tersebut, antara lain :

**1. Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif.**

2. **Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.** Didukung oleh 2 kegiatan, terlaksananya penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan penyelenggaraan Bimbingan teknis bagi UMKM. *Keluaran (output)* dari kegiatan tersebut adalah, bertambahnya pemahaman peserta diklat kewirausahaan (50 orang selama 1 hari). Dan bertambahnya pemahaman peserta Bimbingan Teknis bagi UMKM (90 orang selama 3 hari).

*Adapun hasil (outcomes)* program tersebut dilaksanakan untuk mendukung penumbuhan UMKM baru dan pengelolaan UMKM yang inovatif dan mandiri .

3. **Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.** Dengan Output kegiatan:

- 1) Pembinaan UMKM pengelolaan jaringan pemasaran produk yang dihasilkan dan jaringan koordinasi kelembagaan antar UMKM.
- 2) Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM (2 Kali ) di Provinsi dan luar provinsi.
- 3) Terlaksananya monitoring dan pembinaan UMKM dan Koperasi.

4. **Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.** *Keluaran (Output)* dari kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi serta penanaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga koperasi bisa berkembang dan mandiri
- 2) Terselenggaranya Pendampingan, pembinaan dan monitoring koperasi dan UKM (laporan penilaian kesehatan dan pemeringkatan Koperasi) tahun 2017, updating data KUMKM, pembuatan katalog dan tersedianya dokumen profil koperasi dan UMKM.

*Adapun hasil (Outcomes)* nya meliputi:

Meningkatnya tatakelola kelembagaan *koperasi aktif*, target capaian kinerja sebesar 101 unit dan terealisasi sebanyak 105 unit atau 103,96%.

#### **b. Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM**

Tabel 2.158. Target dan Realisasi Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No.	Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
1	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	101	105	103,96
2	Jumlah Pelaku UMKM	1.559	1.332	85,44

Capaian indikator kinerja untuk jumlah pelaku UMKM hanya 85,44% atau 1.332 UMKM, Tidak tercapainya realisasi yang target ini disebabkan karena tidak terlaksanakannya berbagai diklat dan pelatihan bagi masyarakat calon wirausaha baru oleh aparat yang

membidangnya seperti diklat dan pelatihan perbengkelan, konveksi, pangan jajan, pangan kuliner, dll.

### **c. Permasalahan dan Solusi**

#### **Permasalahan**

Permasalahan yang masih dihadapi sekaligus menjadi tantangan ke depan yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme dan kemampuan teknis aparat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan terpadu terhadap ekonomi rakyat yang masih harus terus ditingkatkan. Karena secara umum kelembagan KUKM di Kota Bima terus berkembang namun belum didukung dengan pola pemberdayaan untuk meningkatkan daya kompetitif KUKM guna meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya pada usaha KUKM.
2. Fungsi dan kewajiban dari lembaga koperasi belum berjalan dengan optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada anggota/masyarakat, begitu pula sebaliknya peran serta anggota/masyarakat dalam mengembangkan koperasi masih perlu ditingkatkan.

#### **Solusi**

Untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan tersebut maka diperlukan upaya-upaya pemecahan sebagai berikut :

1. Pemerintah bersama Lembaga penggerak pertumbuhan ekonomi di sektor KUMKM perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peranan KUMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian kerakyatan yang berpihak pada usaha keci dan Usaha menengah; membuka akses pemasaran produk KUMKM sehingga seluruh KUMKM yang mempunyai potensi namun tidak memiliki jaringan pasar yang luas dapat memperoleh akses dengan usaha dagang/ industry.
2. Solusi atas permasalahan koperasi tersebut adalah memberikan informasi yang jelas dan gencar kepada masyarakat mengenai Program KUMKM yang dilakukan pemerintah sehingga masyarakat dapat membantu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi bagi koperasi serta usaha kecil dan Menengah. Dan mengoptimalkan pelatihan manajerial dan kewirausahaan dalam upaya meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan bagi pengelola KUMKM dengan.

## **10. Penanaman Modal**

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima mendukung **Misi ke-3** dan **ke-4** RPJMD 2013-2018 yaitu

Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintah yang prima, dengan sasaran *Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima* serta Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik, dengan sasaran *Meningkatnya pertumbuhan ekonomi*. Pencapaian indikator daerah pada Misi ketiga terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan kota Bima yaitu Rata-rata Lama Proses Lama Perijinan, sedangkan pada Misi Keempat yaitu Jumlah kerjasama penanaman modal dalam negeri.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima menyelenggarakan sejumlah operasionalisasi kebijakan urusan Penanaman Modal, melalui 5 program dan 10 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.350.231.000.

#### a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang penanaman modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.159. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>564.241.000</b>	<b>532.723.533</b>	<b>94,41</b>
	- Penyediaan Jasa Surat-menyurat	59.400 .000	57.225.000	96,34
	- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.200.000	30.930.475	83,15
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	4.500.000	4.294.000	95,42
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	41.508.000	41.508.000	100,00
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.915.000	7.915.000	100,00
	- Penyediaan alat tulis kantor	35.397.000	35.397.000	100,00
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	49.251.000	46.901.000	95,23
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8.575.000	8.575.000	100,00

No	Nama Program/ Kegiatan	Angaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	5.760.000	3.810.000	66,15
	- Penyediaan Makan dan Minuman	9.900.000	5.995.000	60,56
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	221.315.000	219.788.058	99,31
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	83.520.000	70.385.000	84,27
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>133.661.000</b>	<b>133.160.847</b>	<b>99,63</b>
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7.750.000	7.750.000	100,00
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	74.380.000	74.380.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	21.205.700	21.205.700	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	21.925.300	21.469.147	97,92
	- Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	2.000.000	2.000.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	6.400.000	6.356.000	99,31
<b>3.</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pengadaan Pakaian PDH	0	0	0
	- Pengadaan Pakaian olah raga	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>53.250.000</b>	<b>48.750.000</b>	<b>91,55</b>
	- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.000.000	4.500.000	50,00
	- Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	3.000.000	100,00
	- Penyusunan RENJA Tahunan, RKA-DPA/PRKA-DPPA	26.250.000	26.250.000	100,00
	- Penyusunan LAKIP dan LPPD	15.000.000	15.000.000	100,00
<b>5.</b>	<b>Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>33.300.000</b>	<b>28.050.000</b>	<b>84,23</b>
	- Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di bidang Penanaman Modal dengan instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	33.300.000	28.050.000	84,23
<b>6.</b>	<b>Program Pembuatan Aplikasi Perijinan Online</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pembuatan Aplikasi Perijinan Online	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>172.790.000</b>	<b>167.130.000</b>	<b>96,72</b>

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Pengembangan Potensi Daerah	72.695.000	72.695.000	100,00
	- Publikasi peraturan perundang-undangan	59.510.000	59.510.000	100,00
	- Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perijinan	40.585.000	34.925.000	86,05
8.	<b>Program Rencana Umum Penanaman Modal</b>	<b>112.080.000</b>	<b>111.037.592</b>	<b>99,07</b>
	- Penyusunan rencana Umum Penanaman Modal Kota Bima	112.080.000	111.037.592	99,07
9.	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan</b>	<b>280.909.000</b>	<b>255.508.500</b>	<b>90,96</b>
	- Penyediaan informasi/database perijinan	46.250.000	45.250.000	97,84
	- Monitoring dan evaluasi kegiatan pendataan perijinan	156.894.000	132.639.000	84,54
	- Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan satu Pintu	49.500.000	49.354.500	99,71
	- Pelayanan Proses penertiban dokumen perizinan usaha	28.265.000	28.265.000	100,00
	<b>Total</b>	<b>1.350.231.000</b>	<b>1.277.360.472</b>	<b>94,60</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Target dan Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2017 sebesar Rp. 1.350.230.700,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.277.360.472 atau mencapai 94,60 %. Dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

1. *Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi*, meliputi kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi Pemerintahan dan Dunia Usaha yang memiliki Alokasi anggaran sebesar Rp. 33.300.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.050.000,- atau mencapai 84, 23 % dengan output terlaksananya peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintahan dan dunia usaha
2. *program Pembuatan Aplikasi Perizinan Online*  
Output dari kegiatan ini diharapkan layanan aplikasi transportasi online bisa bersaing secara sehat dengan angkutan umum konvensional. Layanan aplikasi online tidak bisa dihindari pada era digital seperti saat ini. Untuk itu harus dicari jalan tengah agar bisa menguntungkan segala pihak.
3. *Program Penataan Peraturan Perundang-undangan meliputi kegiatan :*

- a. Pengembangan potensi daerah dengan Alokasi anggaran sebesar Rp. 72.695.000 dengan realisasi keuangan Rp. 72.695.000 atau mencapai target 100 %. Output kegiatan berupa terlaksananya sosialisasi pengembangan potensi daerah.
  - b. Publikasi peraturan perundang undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.510.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.510.000 atau mencapai 100%. Output kegiatan terlaksananya sosialisasi publikasi perundang-undangan.
  - c. Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.585.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.925.000,- atau mencapai 86,05 %. Output kegiatan, terlaksananya kegiatan penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perizinan.
4. *Program Penyusunan Rencana Umum penanaman modal* dengan pagu anggaran sebesar Rp. 112.080.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 111.037.592 atau mencapai 99,07 %. Output kegiatan ini yaitu tersusunya rencana umum Penanaman modal Kota Bima.
  5. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 280.909.000 yang dibagi menjadi 4 kegiatan meliputi:
    - a. *Penyediaan informasi/Data Base perizinan*. Alokasi anggaran sebesar Rp. 46.250.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.250.000 atau mencapai 97,84%. Output kegiatan ini yaitu tersedianya informasi dan database perizinan.
    - b. *Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pendataan perizinan*. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 156.894.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 132.639.000 atau mencapai 84,54% dari anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini yaitu monitoring dan evaluasi tentang database perizinan yang dilakukan setiap bulannya.
    - c. *Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan*, alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.354.500 atau mencapai 99,71% dari anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini yaitu penyelenggaraan Pelayanan perizinan satu pintu.
    - d. *Pelayanan proses penertiban dokumen perizinan usaha*, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.265.000,- terealisasi sebesar Rp. 28.265.000 atau mencapai 100% sesuai dengan target. Output kegiatan ini yaitu tertib dokumen perizinan usaha.

#### **b. Capaian Kinerja**

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.160. Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	Rp. 158.168.020	Rp. 793.655.000	501,78
Jumlah Investor PMDN	751 Investor	813 Investor	108.12
Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	Baik (62,51-81.25)	81.25	100.00

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bima, tahun 2017

### c. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, antara lain:

1. Alur pelayanan perizinan belum murni satu pintu (PTSP) dan masih dilaksanakan secara manual (belum online).
2. Berdasarkan data IKM pada tahun 2017 terdapat unsur pelayanan yang memiliki nilai indikator yang masih sangat rendah. Unsur pelayanan yang dimaksud adalah persyaratan dengan nilai indikator sebesar 71,83. Hal ini menggambarkan bahwa penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan masih terdapat persyaratan perizinan yang dirasakan oleh masyarakat/pemohon yang cukup memberatkan dan menghambat proses permohonan perizinan sehingga perlu dilakukan pembenahan terhadap unsur persyaratan yang dimaksud dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh DMPPTSP antara lain:

1. Segera dibentuk Satgas Percepatan Kesempatan Berusaha serta kesiapan server dan tenaga operator (admin) harus segera dipenuhi.
2. Dengan melakukan penyederhanaan persyaratan baik yang bersifat administrasi maupun teknis sehingga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon dalam memenuhi semua persyaratan permohonan dokumen perizinan termasuk penyederhanaan SOP perizinan agar semua bentuk pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi perizinan dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 11, Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 982,327,500.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 758,443,558.00 atau



sebesar 77.21 % yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusinya dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2017 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.161. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
<b>I</b>	<b>Program peningkatan peran serta kepemudaan</b>	<b>595,525,000.00</b>	<b>581,868,558.00</b>	97.71
1.	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	595,525,000.00	581,868,558.00	97.71
<b>II</b>	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga</b>	<b>346,802,500.00</b>	<b>137,615,000.00</b>	39.68
1.	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	118,270,000.00	0.00	0.00
2.	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	228,532,500.00	137,615,000.00	60.22
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>38,960,000.00</b>	97.40
	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga	40,000,000.00	38,960,000.00	97.40
<b>Total</b>		<b>982,327,500.00</b>	<b>758,443,558.00</b>	<b>77.21</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

##### 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan dengan pelaksanaan pelatihan bagi 180 orang anggota paskibraka. Adapun hasil (*outcome*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terbentuknya jiwa kepemimpinan pada generasi muda.

##### 2) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Pada program ini ada satu kegiatan yang tidak dilaksanakan karena sudah dilaksanakan oleh KONI Kota Bima.

##### 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terselenggaranya Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Kota Bima.

#### b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga dapat diukur salah satunya dengan terselenggaranya beberapa kompetisi olahraga di Kota Bima,.

## 12. Statistik

Urusan Statistik pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 1.777.845.500,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.598.210.200 atau sebesar 89,90 %. yang dilaksanakan oleh Dinas Statistik Kota Bima.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.162. Output Program/Kegiatan Urusan Statistik pada Dinas Statistik Kota Bima  
Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	% Realisasi
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>370,832,800.00</b>	<b>335,472,100.00</b>	90.5
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	7,990,000.00	5,200,000.00	65.1
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	19,800,000.00	12,186,200.00	61.5
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3,660,000.00	683,000.00	18.7
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38,400,000.00	38,400,000.00	100.0
5.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1,500,000.00	0.00	0.0
6.	Penyediaan alat tulis kantor	41,765,800.00	41,749,000.00	100.0
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28,712,000.00	28,712,000.00	100.0
8.	Penyediaan makanan dan minuman	12,600,000.00	9,900,000.00	78.6
9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	200,005,000.00	183,326,900.00	91.7
10.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	16,400,000.00	15,315,000.00	93.4
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>338,675,800.00</b>	<b>322,397,300.00</b>	95.2
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10,526,000.00	10,515,000.00	99.9
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	258,249,800.00	256,799,800.00	99.4
3.	Pengadaan mebeleur	17,700,000.00	17,700,000.00	100.0
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,000,000.00	9,750,000.00	97.5
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	42,200,000.00	27,632,500.00	65.5
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>20,800,000.00</b>	<b>20,800,000.00</b>	100.0
1.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20,800,000.00	20,800,000.00	100.0
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>140,000,000.00</b>	<b>139,250,000.00</b>	99.5
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	15,000,000.00	14,250,000.00	95.0
3.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	% Realisasi
4.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15,000,000.00	15,000,000.00	100.0
5.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	80,000,000.00	80,000,000.00	100.0
<b>V</b>	<b>Program Pengembangan Statistik Daerah</b>	<b>456,611,400.00</b>	<b>413,716,000.00</b>	90.6
1.	Penyusunan data statistik kependudukan	38,400,000.00	37,955,000.00	98.8
2.	penyusunan data statistik kesejahteraan sosial	44,595,000.00	44,485,000.00	99.8
3.	Penyusunan data statistik ekonomi	79,296,000.00	77,565,000.00	97.8
4.	Penyusunan data statistik infrastruktur	38,195,000.00	37,915,000.00	99.3
5.	Penyusunan data tabel input-output (I-O)	84,250,000.00	81,130,000.00	96.3
6.	Penyusunan Peta PBDT Berbasis SIG	142,760,000.00	106,240,000.00	74.4
7.	Workshop Statistik Sektoral	15,846,400.00	15,157,000.00	95.6
8.	Bimtek Pengembangan Data Statistik Sektoral	13,269,000.00	13,269,000.00	100.0
9.	Pelatihan Petugas Lapangan Kegiatan Statistik Sektoral	0.00	0:00	
<b>VI</b>	<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>	<b>274,990,000.00</b>	<b>198,215,000.00</b>	72.1
1.	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	29,325,000.00	29,325,000.00	100.0
2.	Penyusunan Profil Daerah	31,160,000.00	30,285,000.00	97.2
3.	Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	73,750,000.00	48,750,000.00	66.1
4.	Pembaharuan (Updating) Data Capaian Kinerja RPJMD	59,130,000.00	55,605,000.00	94.0
5.	Pembuatan Website	24,950,000.00	24,950,000.00	100.0
6.	Pembaharuan (Updating) Data Kemiskinan	46,675,000.00	0.00	0.0
7.	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	10,000,000.00	9,300,000.00	93.0
<b>TOTAL</b>		<b>1,601,910,000.00</b>	<b>1,429,850,400.00</b>	89.3

### **b. Capaian Kinerja**

Sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2017 semuanya telah direalisasikan dengan kategori **berhasil** dengan rata-rata capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis sebesar 86,94%, sedangkan realisasi penyerapan anggaran (Kinerja Keuangan) sebesar 93,82 %.

Rata-rata capaian sasaran strategis I adalah sebesar 81,25% yang terukur melalui 2 (dua) indikator kinerja. Capaian sasaran strategis II yang terukur melalui 1 (satu) indikator kinerja adalah sebesar 98,33%

Rata-rata capaian sasaran strategis I, dan II, terhadap target jangka menengah Dinas Statistik Daerah Kota Bima masing-masing sebesar 162,5%, indikator kedua sasaran I belum bisa diukur, dan 98,33% indikator kinerja Sasaran strategis II. Sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2017 terhadap target jangka menengah Dinas Statistik Daerah Kota Bima adalah sebesar 86,94%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian target terhadap indikator kinerja Dinas Statistik Daerah Kota Bima Tahun 2017 sudah terpenuhi sesuai dengan harapan.

Beberapa permasalahan dan alternatif solusinya:

1. Masih terbatasnya data statistik sektoral yang terinci dan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan;  
solusi : Intensitas koordinasi dengan setiap Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk menyediakan data Sektoral.
2. Masih rendahnya kesadaran responden akan pentingnya memberikan informasi yang akurat yang dapat menyebabkan belum optimalnya kualitas data yang dihasilkan.  
Solusi : membangun kesadaran responden melalui kegiatan- kegiatan bintek, workshop, dan diskusi, koordinasi dengan pihak –pihak Stakeholder yang ada di Kota Bima.
3. Belum dapat terpenuhinya kebutuhan data dan informasi statistik hingga ke wilayah terkecil, termasuk data mikro.  
Solusi: pelatihan tenaga teknis (Operator) data pada setiap OPD.
4. Belum optimalnya kapasitas ASN khususnya dalam pengelolaan system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang juga menjadi bagian penting dalam kinerja teknis Dinas Statistik Daerah  
Solusi: pendidikan dan pelatihan dalam kegiatan statistik sektoral Aparatur Sipil Negara (ASN)
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta belum adanya tenaga fungsional statistik.  
Solusi : Dinas Statistik Daerah harus memiliki ASN tenaga Fungsional statistik

### **13. Pemberdayaan Masyarakat**

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa juga dilaksanakan oleh Kecamatan RasanaE Timur, Kecamatan Asakota, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba

Tabel 2.163. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan wajib bukan pelayanan dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desapada Kantor Kecamatan Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
<b>A.</b>	<b>KECAMATAN RASANA E TIMUR</b>	<b>283.530.000,00</b>	<b>281.941.000,00</b>	<b>99,44</b>
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>283.530.000,00</b>	<b>281.941.000,00</b>	<b>99,44</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	250.200.000,00	248.625.000,00	99,37
2	Penyusunan Profil Kelurahan	33.330.000,00	33.316.000,00	99,96
	<b>KECAMATAN ASAKOTA</b>	<b>765.207.900,00</b>	<b>762.202.000,00</b>	<b>99,61</b>
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>350.243.400,00</b>	<b>350.243.400,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	330.300.000,00	330.300.000,00	100,00
2	Penyusunan Profil Kelurahan	19.943.400,00	19.943.400,00	100,00
<b>II</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>414.964.500,00</b>	<b>411.958.600,00</b>	<b>99,28</b>
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	59.317.300,00	59.036.000,00	99,53
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	66.897.200,00	66.897.200,00	100,00
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	68.750.000,00	66.025.400,00	96,04
	<b>KECAMATAN MPUNDA</b>	<b>402.181.500,00</b>	<b>400.181.500,00</b>	<b>99,50</b>
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>402.181.500,00</b>	<b>400.181.500,00</b>	<b>99,50</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	351.300.000,00	349.300.000,00	99,43
2	Penyusunan Profil Kelurahan	50.881.500,00	50.881.500,00	100,00
	<b>KECAMATAN RABA</b>	<b>1.273.156.500,00</b>	<b>1.273.156.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>443.666.000,00</b>	<b>443.666.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	396.900.000,00	396.900.000,00	100,00
2	Penyusunan Profil Kelurahan	46.766.000,00	46.766.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>829.490.500,00</b>	<b>829.490.500,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	127.596.500,00	127.596.500,00	100,00
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	139.702.000,00	139.702.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	430.000.000,00	430.000.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	132.192.000,00	132.192.000,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.724.075.900,00</b>	<b>2.717.481.000,00</b>	<b>99,76</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kecamatan dalam melaksanakan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat desa adalah sebesar Rp. 2.724.075.900,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.717.481.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah). Masing-masing anggaran tersebut tersebar pada Kecamatan RasanaE Timur dengan pagu sebesar Rp. 283.530.000,00 dan realisasi Rp. 281.941.000,00 atau 99,44%, Kecamatan Asakota pagu sebesar Rp. 765.207.900,00 realisasi Rp. 762.202.000,00 atau 99,61%, Kecamatan Mpunda pagu Rp. 402.181.500,00 dengan Rp. 400.181.500,00 atau 99,50% dan Kecamatan Raba dengan pagu sebesar Rp. 1.273.156.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.273.156.500,00 atau 100%.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan meliputi :

- a. **Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** dengan kegiatan :
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Output dari kegiatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi RT, RW dan LPM di tingkat kelurahan
  - Penyusunan Profil Kelurahan. . Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya profil kelurahan di tingkat kelurahan
- b. **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa**
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
  - Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
  - Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di tingkat kelurahan dan kecamatan.

- Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di tingkat kelurahan dan kecamatan.

### 13. Kebudayaan

#### a. Program dan Kegiatan

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan pada tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.110.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 228.110.000,00 atau sebesar 100%. melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.164. Realisasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>171.220.000,00</b>	<b>171.220.000,00</b>	<b>100</b>
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	137.340.000,00	137.340.000,00	100
2	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	8.880.000,00	8.880.000,00	100
3	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	25.000.000,00	25.000.000,00	100
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Kekayaan Budaya</b>	<b>26.020.000,00</b>	<b>26.020.000,00</b>	<b>100</b>
1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	12.340.000,00	12.340.000,00	100
2	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	13.680.000,00	13.680.000,00	100
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	<b>30.870.000,00</b>	<b>30.870.000,00</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan system informasi database bidang kebudayaan	30.870.000,00	30.870.000,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>228.110.000,00</b>	<b>228.110.000,00</b>	<b>100</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2016 (data sebelum audit BPK)

#### Capaian Kinerja

Pesatnya pembangunan di segala bidang kehidupan membawa pengaruh terhadap budaya dan perilaku masyarakat. Gaya hidup modern dengan meniru budaya asing yang sedang trend menjadi ikon baru dalam kehidupan masyarakat

khususnya kalangan remaja. Kebudayaan lokal yang sarat makna filosofi dan historis menjadi semakin tertinggalkan bahkan dilupakan. Menanggapi situasi tersebut maka pelestarian dan pengembangan nilai budaya daerah harus terus menerus dilakukan agar generasi muda kita tidak lupa akan budaya dan sejarah bangsa sendiri.

Dalam upaya untuk melestarikan dan pengembangan nilai budaya daerah telah pelaksanaan event-event lomba / kesenian.

Benda-benda cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya daerah senantiasa diupayakan untuk dipelihara, dirawat dan diinventarisasi serta mendokumentasikan keberadaannya. Hal ini penting untuk dilakukan agar jangan sampai generasi mendatang belajar budaya dan sejarah daerah sendiri ke luar negeri karena semua bukti sejarah dan dokumentasinya telah berpindah tangan ke pihak asing.

### ***Permasalahan dan solusi***

Beberapa permasalahan yang di hadapi dalam pelaksanaan urusan kebudayaan antar lain :

- Pemahaman nilai – nilai budaya tradisional local dan pelestariannya beserta makna yang tersirat di dalamnya masih rendah oleh generasi muda.
- Belum adanya keterlibatan semua pihak dalam upaya pelestarian nilai dan keaneka ragaman terhadap warisan budaya.
- Belum berkembangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya daerah.
- Kekayaan budaya belum terkelola dengan baik yang ditandai dengan kondisi bangunan yang rusak.

Adapun langkah – langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan budaya daerah adalah :

- Perlu adanya pemahaman yang nyata dari generasi muda untuk tetap melestarikan budaya tradisional yang merupakan warisan budaya ditengah arus deras nya budaya asing yang masuk dalam kehidupan sekarang ini.
- Perlu adanya pengenalan budaya daerah melalui pendidikan formal pada materi muatan local pengenalan budaya.
- Keterlibatan antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam upaya pelestarian nilai dan keanekaragaman terhadap nilai – nilai budaya.
- Pemberdayaan asset budaya lokal untuk memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
- Identifikasi, dokumentasi dan inventarisasi benda cagar budaya perlu dilakukan agar kelestariannya bisa terpelihara.



## 14, Perpustakaan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dengan anggaran yang disediakan Rp. 990.626.500,00 dan realisasi Rp. 971.873.153,00 (98,11%).

Tabel 2.165. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>658.813.500,00</b>	<b>645.403.253,00</b>	<b>97,96</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	83.625.000,00	83.625.000,00	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	7.532.566,00	41,85
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13.000.000,00	10.461.000,00	80,47
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	32.400.000,00	32.400.000,00	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.642.000,00	4.641.700,00	99,99
6	Penyediaan alat tulis kantor	25.243.500,00	25.243.500,00	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.182.200,00	13.182.200,00	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.275.000,00	3.275.000,00	100
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	52.460.000,00	52.110.000,00	99,33
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.300.000,00	16.300.000,00	100
11	Penyediaan makanan dan minuman	15.300.000,00	15.300.000,00	100
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	278.188.300,00	278.188.287,00	100
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	103.197.500,00	103.144.000,00	99,95
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>95.485.000,00</b>	<b>95.485.000,00</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan mebeleur	43.500.000,00	43.500.000,00	100
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13.985.000,00	13.985.000,00	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.000.000,00	24.000.000,00	100
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	14.000.000,00	14.000.000,00	100
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	21.000.000,00	21.000.000,00	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur</b>	<b>37.306.000,00</b>	<b>31.962.900,00</b>	<b>85,68</b>
1	Pendidikan dan pelatihan format	37.306.000,00	31.962.900,00	85,68

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
V	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>91.716.000,00</b>	<b>91.716.000,00</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	18.000.000,00	18.000.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	13.000.000,00	13.000.000,00	100
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19.750.000,00	19.750.000,00	100
4	<b>Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>	<b>100</b>
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	18.216.000,00	18.216.000,00	100
VI	<b>Penyelamatan dan Pelestaria Dokumen/Arsip Daerah</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan Arsip	21.000.000,00	21.000.000,00	100
VII	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan informasi</b>	<b>34.096.000,00</b>	<b>34.096.000,00</b>	<b>100</b>
1	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	34.096.000,00	34.096.000,00	100
VIII	<b>Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan</b>	<b>31.210.000,00</b>	<b>31.210.000,00</b>	<b>100</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	31.210.000,00	31.210.000,00	100
<b>JUMLAH</b>		<b>990.626.500,00</b>	<b>971.873.153,00</b>	<b>98,11</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Seperti yang tergambar pada tabel tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan adalah :

- 1) **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah** dengan kegiatan Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip dengan output tersedianya rak/lemari penyimpan arsip sebanyak 2 unit dan 1 unit komputer jaringan.
- 2) **Program peningkatan kualitas pelayanan informasi** dengan kegiatan yang dilaksanakan Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta. Dari kegiatan ini telah dilaksanakan sosialisasi/bimtek kearsipan bagi SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima sebanyak 2 (dua) kali dengan peserta masing-masing 50 orang.
- 3) **Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan** dengan kegiatan yang dilaksanakan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan arsip. Dari kegiatan ini output nya adalah Jumlah SKPD yang sudah menerapkan pengolahan arsip secara baku sejumlah 15 SKPD

Capaian Kinerja kinerja wajib bukan pelayanan dasar bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.166. Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Persentase
		Target	Realisasi	
a.	jumlah koleksi bahan pustaka	550 Judul	802 Judul	145,82%
b.	Jumlah pengunjung perpustakaan	3000 Pengunjung	4124 Pengunjung	137,47%
c.	Jumlah anggota perpustakaan pertahun	300 Anggota	346 Anggota	115,33%
d.	Jumlah perpustakaan binaan	73 Perpustakaan	73 Perpustakaan	100%
e.	Indeks kepuasan pengunjung	95 %	87 %	91,58%
f.	% kelengkapan sarana dan prasarana	100 %	90%	90,00%
g.	% kelurahan pinggiran yang masyarakatnya dapat mengakses perpustakaan	50 %	31,58 %	63,16%
h.	% perpustakaan yang dibina memiliki SDM pengelola yang tetap	100 %	35 %	35%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima TA 2017

## 15. Kearsipan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dengan anggaran yang disediakan Rp. 748.000.000,00 dan realisasi Rp. 760.916.095,00 (97,72%).

Tabel 2.167. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kearsipan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>406.496.000,00</b>	<b>401.494.000,00</b>	<b>98,77</b>
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	98.998.000,00	98.998.000,00	100
2	Pengembangan minat dan budaya baca	26.498.000,00	25.548.000,00	96,41
3	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	7.035.000,00	7.035.000,00	100
4	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	50.890.000,00	47.158.000,00	92,67

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
5	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	119.875.000,00	119.755.000,00	99,9
6	Digitalisasi e-pustaka	103.200.000,00	103.000.000,00	99,81
<b>II</b>	<b>Program perbaikan sistem administrasi kearsipan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>87,5</b>
1	Penyusunan Perda Kearsipan	40.000.000,00	35.000.000,00	87,5
<b>JUMLAH</b>		<b>446.496.000,00</b>	<b>436.494.000,00</b>	<b>97,76</b>

Seperti yang tergambar pada tabel tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan adalah :

**1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan** dengan kegiatan yang dilaksanakan Penyusunan Perda kearsipan. Dari kegiatan ini output nya adalah 1 Peraturan Daerah tentang kearsipan.

**2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan** dengan kegiatan yang dilaksanakan :

- Pemasaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar. Hasil dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya lomba menggambar/mewarnai Tingkat Kota Bima, lomba bercerita Tingkat Kota Bima dan Provinsi NTB dan Lomba Duta Baca Tingkat Kota Bima.
- Pengembangan minat dan budaya baca. Output Kegiatan ini adalah Jumlah anggota perpustakaan sebanyak 300 orang.
- Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Dari kegiatan ini telah dilaksanakan Pembinaan pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat. Out put kegiatan ini adalah Jumlah perpustakaan yang mengelola perpustakaan secara baik sesuai standar yaitu sebanyak 73 perpustakaan
- Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca. Dari kegiatan ini telah dilaksanakan sosialisai minat dan budaya baca dengan peserta sebanyak 75 orang.
- Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah. Out put kegiatan ini adalah tersedianya bahan pustaka perpustakaan daerah yaitu sebanyak 500 judul buku
- Digitalisasi e-pustaka Out put kegiatan ini adalah tersedianya perangkat jaringan untuk digitalisasi e-pustaka.

Capaian Kinerja kinerja wajib bukan pelayanan dasar bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.168. Capaian Kinerja Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2016		Persentase
		Target	Realisasi	
a.	% SKPD, ORMAS, ORPOL yang sudah mengelola arsip secara baku	10 %	17,05 %	170,50
b.	Jumlah SKPD yang mengirim kan arsip	5%	8,56%	171,20
c.	Jumlah tenaga pengelola kearsipan yang kompeten	2%	11,43%	571,50
d.	Jumlah SKPD yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai	5%	2,86%	57,20

### C. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

#### 1. Kelautan Dan Perikanan

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima menyelenggarakan sejumlah operasionalisasi kebijakan urusan Kelautan dan Perikanan, melalui 6 program dan 15 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 3.143.891.000.

##### a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan

Urusan pilihan bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.169. Program/ Kegiatan Urusan Perikanan dan Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>411.560.350</b>	<b>395.049.932</b>	<b>95,99</b>
	- Penyediaan Jasa Surat menyurat	1.440.000	105.650	7,34
	- Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	37.555.450	27.729.912	73,84
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional	17.590.000	13.284.200	75,52
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.400.000	43.750.000	98,54
	- Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000	9.000.000	100
	- Penyediaan alat tulis kantor	31.210.900	31.210.800	99,99
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18.150.000	18.150.000	100

No	Nama Program/ Kegiatan	Angaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
	- Penyediaan Makan dan Minuman	22.737.000	22.724.000	99,94
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	208.477.000	208.130.370	99,83
	- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	21.000.000	20.965.000	99,83
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur</b>	<b>222.599.850</b>	<b>221.958.121</b>	<b>99,71</b>
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	36.211.300	35.942.854	99,26
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.796.000	10.426.000	96,57
	- Pengadaan Peralayan Gedung Kantor	67.398.550	67.398.550	100,00
	- Pengadaan Mebeleur	18.894.000	18.894.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	8.000.000	8.000.000	100,00
	- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	81.300.000	81.296.717	100,00
<b>3.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin aparat</b>	<b>23.530.000</b>	<b>23.530.000</b>	<b>100,00</b>
	- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	23.530.000	23.530.000	100,00
<b>4.</b>	<b>Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>15.079.400</b>	<b>15.079.400</b>	<b>100,00</b>
	- Sosialisasi peraturan perundang-undangan	15.079.400	15.079.400	100,00
<b>5.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>141.500.000</b>	<b>141.500.000</b>	<b>100,00</b>
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	15.000.000	15.000.000	100
	- Penyusunan prognosis realisasi anggaran	15.000.000	15.000.000	100
	- Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	12.500.000	12.500.000	100
	- Penyusunan RENJA Tahunan RKA/ DPA-SKPD	50.000.000	50.000.000	100
	- Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	39.000.000	39.000.000	100
<b>6.</b>	<b>Program Pemberdayaan masyarakat pesisir</b>	<b>30.000.000</b>	<b>29.622.750</b>	<b>98,74</b>
	- Pengembangan lanjutan pendampingan PNPM MKP	30.000.000	29.622.750	98,74

No	Nama Program/ Kegiatan	Angaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
7	<b>Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan wawasan Maritim Kepada Masyarakat</b>	<b>21.121.900</b>	<b>20.496.900</b>	<b>97,04</b>
	- Koordinasi Hari Nusantara	21.121.900	20.496.900	97,04
8.	<b>Program Pengembangan budidaya perikanan</b>	<b>661.267.000</b>	<b>659.812.890</b>	<b>99,78</b>
	- Pengembangan Bibit ikan unggul	183.492.000	183.040.000	99,75
	- Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	21.150.000	21.100.000	99,76
	- Peng. Sarana pengembangan kebun rumput laut	10.350.000	10.074.000	97,33
	- Pembangunan/Rehab sarana Prasarana Fisik UPR & HSRT	34.800.000	34.800.000	100,00
	- Pengadaan Sarana Prasarana penunjang perikanan Budidaya	411.475.000	410.798.890	99,84
9.	<b>Program Pengembangan perikanan tangkap</b>	<b>1.244.665.000</b>	<b>1.241.165.300</b>	<b>99,72</b>
	- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	28.044.000	28.014.000	99,89
	- Pengembangan Lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap	20.390.000	20.260.000	99,36
	- Pengadaan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap	1.196.231.000	1.192.891.300	99,72
10.	<b>Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan</b>	<b>112.398.000</b>	<b>106.770.295</b>	<b>94,99</b>
	- Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)	47.200.000	46.732.295	99,01
	- Kontak Tani Nelayan	65.198.000	60.038.000	92,09
11.	<b>Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan</b>	<b>260.169.500</b>	<b>258.543.042</b>	<b>99,37</b>
	- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	14.950.000	14.940.000	99,93
	- Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	131.800.000	131.458.800	99,74
	- Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)	113.419.500	112.144.242	98,88
	<b>Total</b>	<b>3.143.891.000</b>	<b>3.113.528.630</b>	<b>99,03</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Target dan Realisasi anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tahun 2017 sebesar Rp. 3.143.891.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.113.528.630,- atau mencapai 99,03%. Dengan realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

**1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.**

Melalui kegiatan Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000 terealisasi sebesar Rp. 29.622.750 atau 98,74 % dari alokasi anggaran yang telah disediakan.

Output dari kegiatan ini adalah jumlah pengembangan lanjutan PNPM MKP sebanyak 20 Kelompok .

**2) Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat.** Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.121.900,- terealisasi sebesar Rp. 20.496.900,- atau mencapai 97.04% dari alokasi yang telah disediakan.

Output kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran aparaturnya dan masyarakat tentang wawasan maritim dan kelautan dengan terselenggaranya kegiatan hari nusantara .

**3) Program Pengembangan budidaya perikanan.**

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 661.267.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 659.812.890 atau mencapai 99,78% dari alokasi anggaran yang telah disediakan. Adapun program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- Pengembangan Bibit ikan unggul memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 183.492.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 183.040.000 atau mencapai 99,75 dari jumlah alokasi anggaran yang telah disediakan. Output dari kegiatan ini adalah jumlah bibit ikan unggul yang tersedia;
- Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 21.150.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.100.000 atau mencapai 99,76% dari alokasi anggaran yang tersedia. Adapun output dari kegiatan ini terbinanya 7 Kelompok tani ikan, sehingga terwujudnya peningkatan keterampilan dan pengetahuan kelompok pembudidayaan ikan;
- Pengadaan Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut metode long Line dan rakit apung memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 10.350.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.074.000 atau mencapai 97,33% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini jumlah rumput laut yang telah dikembangkan sebanyak 2 Kwintal.
- Kegiatan Pengadaan sarana prasarana penunjang perikanan budidaya memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 411.475.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 410.798.890



atau 99,84% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini tersedianya sarana dan prasarana penunjang perikanan budidaya sebanyak 17 Unit.

4) ***Program Pengembangan Perikanan Tangkap .***

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. **1.244.665.000** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **1.241.165.300** atau mencapai **99,72%** dari alokasi anggaran yang telah disediakan. Adapun program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

- Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap yang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 28.044.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.014.000 atau mencapai 99,89% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini adalah jumlah nelayan yang mendapatkan kartu asuransi nelayan sebanyak 1.266 orang;
- Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 20.390.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.260.000 atau mencapai 99,36% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini adalah jumlah lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap yang dikembangkan sebanyak 3 lembaga Koperasi;
- Pengadaan sarana prasarana pendukung perikanan tangkap memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 1.196,231.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.192.891.300 atau mencapai 99,72% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output dari kegiatan ini adalah jumlah sarana prasarana perikanan budidaya yang tersedia sebanyak 10 unit.

5) ***Program Pengembangan sistem penyuluhan perikanan***

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar RP. **112.398.000** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **106.770.295** atau mencapai **94,99%** dari alokasi anggaran yang telah disediakan. Adapun Program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- Pendataan Potensi Perikanan (Statistik) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 47.200.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.732.295 atau mencapai 99,01% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah terciptanya data statistik potensi perikanan yang akurat;
- Kontak Tani Nelayan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 65.198.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.038.000 atau mencapai 92,09% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah telah terbentuknya 1 kelompok kontak tani nelayan.

6) **Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan**

Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. **260.169.500** dengan realisasi keuangan sebesar Rp. **258.543.042** atau mencapai **99,37%** dari alokasi anggaran yang disediakan. Adapun program ini terdiri dari beberapa kegiatan antara lain :

- Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 14.950.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.940.000 atau mencapai 99,93% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah telah terbentuknya kelompok pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sebanyak 19 kelompok.
- Penyediaan Sarana Prasarana Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 131.800.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 131.458.800 atau mencapai 99,74% dari alokasi anggaran yang telah tersedia. Output kegiatan ini adalah pemeliharaan pabrik es dan pemeliharaan *cold storage*.
- Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN) memiliki alokasi anggaran sebesar Rp. 113.419.500 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.144.242 atau mencapai 98,88% dari alokasi anggaran yang tersedia. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan lomba cipta menu olahan dari ikan yang diikuti oleh 40 peserta dari masing-masing OPD

**b. Pencapaian Kinerja**

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.170. Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<b>Jumlah produksi perikanan :</b>	<b>2.947,03</b>	<b>2.484,27</b>	<b>84,30</b>
a. Produksi perikanan tangkap (ton)	1.995,34	1.774,8	88,95
b. Produksi perikanan budidaya (ton)	951,69	709,47	74,55
Jumlah produk Olahan yang dihasilkan perikanan per tahun (ton)	1.415	1.576,43	111,41
Tingkat Konsumsi Ikan per kapita per tahun (Kg/ kapita/thn)	39,57	38,83	98,13
Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan (Klpk):	18	15	83,33
a. Kelompok pemula	8	8	100,00
b. Kelompok madya	5	4	80,00
c. Kelompok utama	5	3	60,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima

### c.. *Permasalahan dan Solusi*

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Belum mampu memenuhi/melayani kebutuhan masyarakat terkendala ketersediaan anggaran.
2. Banyak sarana prasarana terdampak banjir sehingga mempengaruhi produktifitas kelautan dan perikanan.

Adapun solusi yang dapat ditempuh dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Membuat rencana berdasarkan skala prioritas
2. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelompok kelautan dan perikanan baik melalui anggaran yang bersumber dari DAU, DAK dan APBN.

## 2. **Urusan Pariwisata**

Anggaran seluruh kegiatan Dinas Pariwisata Kota Bima tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp8.519.123.483,60 dan terealisasi sebesar Rp8.119.048.629,00 atau sebesar 95,30%. Anggaran ini terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Dari target belanja operasi sebesar Rp6.341.411.433,60, Dinas Pariwisata Kota Bima merealisasikan sebesar Rp6.000.730.629,00 atau sebesar 94,63%. Adapun belanja modal, dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.177.712.050,00, direalisasikan sebesar Rp2.118.318.000,00 (97,27%).

Tabel 2.171. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>592,291,300.00</b>	<b>580,992,725.00</b>	98.1
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	14,400,000.00	14,400,000.00	100.0
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18,600,000.00	17,409,857.00	93.6
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	13,750,000.00	13,350,000.00	97.1
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	45,132,000.00	45,130,000.00	100.0
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	13,200,000.00	13,100,000.00	99.2
6.	Penyediaan alat tulis kantor	44,161,135.00	44,100,000.00	99.9
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,314,000.00	30,208,000.00	99.7
8.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28,015,165.00	27,840,000.00	99.4
9.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	87,619,000.00	79,678,000.00	90.9
10.	Penyediaan makanan dan minuman	10,000,000.00	10,000,000.00	100.0

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250,000,000.00	248,681,868.00	99.5
12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	37,100,000.00	37,095,000.00	100.0
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>714,777,100.00</b>	<b>673,756,602.00</b>	94.3
1.	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	77,080,000.00	47,080,000.00	61.1
2.	Pengadaan mebeleur	68,382,050.00	66,100,000.00	96.7
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20,000,000.00	19,940,000.00	99.7
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	33,220,000.00	33,209,302.00	100.0
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17,600,000.00	17,490,000.00	99.4
6.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	498,495,050.00	489,937,300.00	98.3
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>51,014,000.00</b>	<b>50,290,800.00</b>	98.6
1.	Pendidikan dan pelatihan formal	36,214,000.00	36,190,800.00	99.9
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	14,800,000.00	14,100,000.00	95.3
3.	Konsultasi dan Studi Banding	0.00	0.00	0.00
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>83,673,750.00</b>	<b>83,273,750.00</b>	99.5
1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12,053,250.00	12,053,250.00	100.0
2.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6,173,300.00	6,173,300.00	100.0
3.	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6,769,000.00	6,769,000.00	100.0
4.	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	43,215,200.00	43,215,200.00	100.0
5.	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	15,463,000.00	15,063,000.00	97.4
<b>V</b>	<b>Program pengembangan pemasaran pariwisata</b>	<b>1,130,395,100.00</b>	<b>1,124,072,824.00</b>	99.4
1.	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	30,810,600.00	30,810,600.00	100.0
2.	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	79,795,000.00	79,530,000.00	99.7
3.	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	15,000,000.00	14,965,000.00	99.8
4.	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	291,710,000.00	290,891,024.00	99.7
5.	MICE	215,000,000.00	215,000,000.00	100.0
6.	Partisipasi Pelestarian dan Aktualisasi Atraksi Wisata Budaya	247,116,300.00	245,965,700.00	99.5

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggran (Rp.)	Persentase Realisasi
7.	Fasilitasi dan Kerjasama Penyelenggaraan Festival Atraksi Kesenian Tradisional	250,963,200.00	246,910,500.00	98.4
<b>VI</b>	<b>Program pengembangan destinasi pariwisata</b>	<b>2,118,488,000.00</b>	<b>2,071,523,234.00</b>	97.8
1.	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1,000,000,000.00	983,353,000.00	98.3
2.	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	11,950,000.00	11,945,000.00	100.0
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	836,800,000.00	829,955,000.00	99.2
4.	Pendataan dan Perencanaan Site, Destinasi, ODTW dan Kawasan Pariwisata	10,000,000.00	9,975,000.00	99.8
5.	Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	15,600,000.00	15,160,000.00	97.2
6.	Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Destinasi dan ODTW	55,000,000.00	54,922,923.00	99.9
7.	Pengelolaan Atraksi, Destinasi dan ODTW	139,138,000.00	116,225,000.00	83.5
8.	MONEV Perencanaan dan Pembanguna Destinasi, ODTW dan Kawasan	50,000,000.00	49,987,311.00	100.0
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata</b>	<b>95,104,150.00</b>	<b>95,061,800.00</b>	100.0
1.	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	0.00	0.00	0.0
2.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	0.00	0.00	0.0
3.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	65,889,150.00	65,886,800.00	100.0
4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha dan Industri Jasa Pariwisata Lembaga dan Mitra Pariwisata	29,215,000.00	29,175,000.00	99.9
<b>VIII</b>	<b>Program Pengembangan SDM Kepariwisata</b>	<b>175,384,000.00</b>	<b>175,372,023.00</b>	100.0
1.	Pengembangan SDM Bidang Pariwisata bekerjasama dengan Lembaga Lainnya	138,384,000.00	138,381,600.00	100.0
2.	Pengembangan SDM dan BIMTEK Profesionalisme Bidang Pariwisata	37,000,000.00	36,990,423.00	100.0
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata</b>	<b>57,030,800.00</b>	<b>55,245,000.00</b>	96.9

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi
1.	Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Pariwisata, Lembaga Kepariwisata dan rekomendasi Ijin Pemandu Wisata	14,030,800.00	14,021,000.00	99.9
2.	Standarisasi dan Sertifikasi Segala Bentuk Usaha dan Industri Jasa Pariwisata	20,000,000.00	19,875,000.00	99.4
3.	Fasilitasi dan pembentukan Kelompok Masyarakat dan Mitra	23,000,000.00	21,349,000.00	92.8
TOTAL		<b>5,018,158,200.00</b>	<b>4,909,588,758.00</b>	97.8

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi serta upaya pemecahan masalah yang sudah dirumuskan tidak akan terlaksana jika tidak ditindaklanjuti dengan baik di masa yang akan datang. Tindak lanjut yang dimaksud adalah upaya konkret untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata melalui program dan kegiatan secara konsisten dan optimal.

Memperhatikan sejumlah kekurangan dalam proses pelayanan umum daerah yang masih dihadapi hingga saat ini dan dalam rangka memperkuat peran kelembagaan Dinas Pariwisata Kota Bima agar dapat menjadi organisasi pelaksana proses pelayanan umum daerah yang lebih baik di masa yang akan datang, maka perlu beberapa langkah tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk tahun berikutnya seperti sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan lebih meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar bidang dalam rangka peningkatan kinerja.
2. Mendorong dan lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pendidikan format maupun pendidikan non format kepariwisataan.
3. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana objek daya tarik wisata secara prioritas.
4. Peningkatan jumlah personil yang profesional dibidang kepariwisataan.
5. Peningkatan kemitraan dengan berbagai kelompok masyarakat yang berhubungan dengan kepariwisataan.

### 3. Urusan Pertanian

#### *a. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan*

Jumlah total anggaran yang dibiayai melalui APBD Kota Bima untuk urusan pertanian adalah Rp. 6.950.748.850,- dengan realisasi anggaran sebesar 6.116.761.341,- atau sebesar 96,39 % yang didukung oleh 12 program dan 53 kegiatan. Dari keseluruhan anggaran tersebut, terbagi atas anggaran yang dikelola oleh Dinas Pertanian Kota Bima.

## 1. Dinas Pertanian Kota Bima

Urusan pilihan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kota Bima melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.172. Penyerapan anggaran per program dan kegiatan tahun 2017

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	<b>APBD KOTA BIMA</b>	<b>13.296.327.643,56</b>	<b>12.732.010.168,00</b>	<b>95,76</b>
	BELANJA DAERAH	13.296.327.643,56	12.732.010.168,00	95,76
<b>I</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>6.345.578.793,56</b>	<b>6.116.761.341,00</b>	<b>96,39</b>
	BELANJA PEGAWAI	6.345.578.793,56	6.116.761.341,00	96,39
<b>II</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>6.950.748.850</b>	<b>6.615.248.827</b>	<b>95,17</b>
	<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>	<b>5.433.559.850</b>	<b>5.099.415.827</b>	<b>93,85</b>
	<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>	<b>1.517.189.000</b>	<b>1.515.833.000</b>	<b>99,91</b>
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	801.460.100	659.640.000	82,30
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air	79.400.000	45.766.698	57,64
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	12.950.000	7.016.600	54,18
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	64.272.000	64.272.000	100,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.200.000	28.800.000	92,31
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8.800.000	6.300.000	71,59
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	100.400.000	96.248.600	95,87
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.447.000	44.943.700	96,76
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3.426.400	3.334.550	97,32
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.200.000	12.200.000	100,00
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.440.000	3.720.000	83,78
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.987.500	14.987.500	100,00
13	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	386.637.200	295.750.352	76,49
15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	35.100.000	35.100.000	100,00
B.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	705.055.850	665.730.150	94,42
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	182.500.000	169.455.000	92,85
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	74.405.600	68.129.500	91,57
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	140.308.250	140.087.250	99,84
4	Pengadaan Mebeleur	62.450.000	54.670.000	87,54
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	50.392.000	39.818.400	79,02
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	195.000.000	193.570.000	99,27
C.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	73.515.000	72.710.000	98,90
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	73.515.000	72.710.000	98,90
D.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	45.615.000	31.538.000	69,14
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	5.928.000	29,64
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20.815.000	20.810.000	99,98
3	Pelaksanaan Penilaian AKJG	4.800.000	4.800.000	100,00

NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
E.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	117.700.000	117.425.000	99,77
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.700.000	36.425.000	99,25
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	8.000.000	8.000.000	100,00
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.000.000	8.000.000	100,00
4	Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	100,00
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	25.000.000	25.000.000	100,00
F.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	532.621.700	509.367.700	95,63
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	36.192.900	36.132.900	99,83
2	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	134.920.000	117.126.000	86,81
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	7.365.000	7.365.000	100,00
4	Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan	278.798.800	278.798.800	100,00
5	Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan	75.345.000	69.945.000	92,83
G.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/ PERKEBUNAN)	3.507.818.800	3.439.964.227	98,07
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	148.550.000	122.080.077	82,18
2	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian	34.836.300	34.095.800	97,87
3	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija	135.186.000	126.733.700	93,75
4	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan	224.131.500	211.576.000	94,40
5	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	64.378.000	51.998.000	80,77
6	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	2.900.737.000	2.893.480.650	99,75
H.	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	62.290.150	61.870.650	99,33
1	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	42.918.900	42.636.900	99,34
2	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	19.371.250	19.233.750	99,29
I.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	262.661.500	234.969.300	89,46
1	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	51.424.500	48.582.000	94,47
2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	39.515.000	39.515.000	100,00
3	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	171.722.000	146.872.300	85,53
J.	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	78.222.500	76.317.000	97,56
1	Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian	78.222.500	76.317.000	97,56
K.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	428.499.500	411.968.400	96,14
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	254.100.000	252.631.000	99,42
2	Pengawasan perdagangan ternak antar	71.825.000	64.262.900	89,47



NO.	URAIAN BELANJA PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	daerah			
3	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	102.574.500	95.074.500	92,69
L.	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	335.288.750	333.748.400	99,54
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	72.970.000	71.519.900	98,01
2	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	17.448.750	17.448.500	100,00
3	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	244.870.000	244.780.000	99,96

Beberapa keluaran (output) dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian dapat dideskripsikan sebagai berikut.

**1) Program peningkatan kesejahteraan petani.**

Output yang dihasilkan antara lain :

- a. Meningkatnya pemahaman 40 orang petani agribisnis melalui pelatihan pengolahan hasil peternakan selama 2 hari (pelatihan pengolahan brownisi abon sapi).
- b. Meningkatnya kemampuan/pemahaman pada 30 anggota lembaga petani dalam pengoperasian traktor roda 4

**2) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)**

Terlaksananya Program peningkatan ketahanan pangan terdiri atas 5 kegiatan antara lain:

- a. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian pada beberapa kegiatan; kegiatan pengawasan penyaluran kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai prosedur dan tepat sasaran, dengan jumlah penyaluran Pupuk bersubsidi adalah sebanyak 2523 ton dari rencana 2656 ton atau sekitar 94,99%; kegiatan penyusunan dokumen RDKK pupuk, kegiatan verifikasi dan validasi pupuk bersubsidi.
- b. Meningkatnya pemahaman 50 orang pelaku pengolahan hasil pertanian (1 kali pelatihan selama 2 hari).
- c. Terlaksananya pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija dengan :
  - Pengadaan benih jagung hibrida dan benih padi.
  - Pengadaan obat-obatan (insektisida dan pestisida) mendukung program intensifikasi tanaman padi,palawija.
- d. Terlaksananya Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija dengan pembinaan pelaksanaan gerakan upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai. (laporan hasil kegiatan untuk 1 tahun, dokumen Proksimantap)
- e. Pengembangan Perbenihan/Perbibitan. Tersedianya/ tersalurnya bantuan 4.200 bibit sawo; 400 pohon nangka (okulasi); 600 bibit Mangga (okulasi); 600 bibit Garoso; 400

benih padi Gogo; 1.500 bibit Alpokat; 200 pohon bibit buah naga; 200 pohon bibit Rambutan; 200 pohon bibit buah Klengkeng.

- f. Terlaksananya program pengembangan sistem informasi pasar dengan dibentuknya tim pengumpul data sehingga terhimpun data informasi akan harga pasar (informasi harga pasar per minggu/ 4 kali perbulan).
- g. Terlaksananya program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu perkebunan, produk pertanian dengan ;
  - Dibentuk Tim SID dan CP/CL kegiatan DAK
  - Pembangunan Gudang Produsen Benih (DAK) Pembangunan Gedung Produsen Benih (DAK)/ Gudang Produsen Benih
  - Rehabilitasi Pagar Kebun Bibit Hortikultura Kota Bima
  - Pembangunan 37 paket Jalan Usaha Tani (lokasi tersebar)
  - Peningkatan 10 paket Jalan Usaha Tani (lokasi tersebar)
  - Pengembangan irigasi air permukaan (4 unit embung)
  - 2 unit Dam parit
  - Terlaksananya/ tersedianya: Pengembangan Irigasi Air Tanah (DAK): Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah RasanaE Timur (7 Lokasi); Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah Asakota (7 Lokasi); Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah Raba (7 Lokasi); Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal Wilayah Mpunda (7 Lokasi)

3) ***Terlaksananya program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak terdiri*** dari 3 kegiatan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular.
  - Pelaksanaan kegiatan vaksinasi ternak (AT/SE) (lokasi di 5 Kecamatan) dan tersedianya 1 paket obat-obatan keswan dan bahan kimia. Dengan rincian pelayanan yang dilakukan sebanyak 2.152 ekor ternak oleh puskesmas; pelayanan vaksinasi ternak sebanyak 21.970 ekor; pelayanan diagnosa penyakit 1.280 ekor.
  - Terlaksananya kegiatan pemeriksaan dan pengawasan daging hewan Qurban (lokasi di 5 Kecamatan), Jumlah ternak qurban yang diawasi dan diperiksa sebanyak 1.035 ekor
  - Terlaksananya kegiatan pengiriman spesimen organ ke Mataram; monitoring pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular dengan terlaksananya kegiatan eliminasi Terhadap Penyebaran Anjing Liar sebagai bentuk antisipasi terhadap penyebaran penyakit rabies sebanyak 52 Ekor; pengawasan terhadap ternak yang di antar pulaukan yang terdiri dari 995 ekor sapi jantan dan 25 ekor kerbau jantan;

- Koordinasi, konsultasi, rapat dan pertemuan di luar daerah.
- b. Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak antar daerah dengan hasil ternak yang di antar pulaukan terdiri dari 995 ekor sapi jantan dan 25 ekor kerbau jantan. Dan koordinasi, konsultasi, rapat dan pertemuan luar daerah
- c. Terlaksananya kegiatan Pencacahan dan Pengkartuan Ternak antara lain:
  - Kegiatan identifikasi CP/CL Dana Tugas Pembantuan, Dekon dan APBD Propinsi.
  - Kegiatan pendampingan pendataan/updating data tingkat Propinsi.
  - Kegiatan sosialisasi pengkartuan ternak.
- d. Terlaksananya kegiatan pengendalian dan penertiban ternak dengan perbaikan dan pembangunan kandang penampungan.
- e. Terlaksananya pengawasan produk bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan (1 tahun), Output:
  - Mengirimkan spesimen organ ke BPPV Denpasar.
  - Pemberian insentif petugas pengawasan pemotongan ternak: Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak di Kota Bima (Sapi Jantan 1.288 ekor Sapi Betina 86 ekor, Kambing 1497 ekor)
  - Pencetakan kartu pemeriksaan daging

**4) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan didukung dengan kegiatan:**

- a. Output kegiatannya:
  - Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) dengan Jumlah layanan Inseminasi Buatan: 262 Dosis dan Jumlah Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan (Sapi Simental 40 ekor; Sapi Limousin 39 ekor; Sapi Brahman 32 ekor; Sapi Bali 142 ekor ; Sapi Angus 8 ekor; Sapi Ongole 1 ekor).
  - Pengadaan 2 jenis obat-obatan Straw dan N2-Cair: Sapi Brangus 25 dosis; Sapi Simental 25 dosis; Sapi Limousin 26 dosis; Sapi Brahman 26 dosis; Sapi Bali 154 dosis; N2-Cair 60 liter
  - Kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi kelompok tani ternak penerima bantuan.
  - Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak, Output: Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peternak tentang pengolahan pakan ternak sebanyak 25 kelompok tani ternak, dan peningkatan pengetahuan peternak tentang pembuatan kompos sebanyak 25 kelompok tani ternak. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Peternakan
  - Terlaksananya kegiatan survey investigasi design (SID) dan CP/CL kegiatan DAK dan CP/CL penerima bantuan ternak.

- Tersaluranya bantuan bibit ternak kambing jantan 12 dan 112 kambing betina di 5 kelompok tani ternak.
- 1 unit mobil operasional keliling keswan/kesmavet.
- Sarana prasarana puskesmas
- Renovasi Rumah Potong Hewan Unggas (DAK )
- Pembangunan Puskesmas Kecamatan Asakota (DAK) di Kelurahan Jatiwangi kota Bima
- Pembangunan Pagar Puskesmas Kecamatan Asakota

### c. Capaian Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian Kota Bima. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal, baik data primer maupun sekunder.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan,

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 dengan realisasi yang diperoleh pada akhir tahun anggaran, komponen yang diukur kinerjanya adalah kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kota Bima tahun 2017 tersebut berdasarkan hasil pengukurannya dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 2.173. Pencapaian kinerja kegiatan Dinas Pertanian Tahun 2017

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
		Para Pelaku Usaha Pertanian Sebanyak 20 Orang.
2	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Pelaksanaan Latihan dan Kunjungan serta Rembug Tani sbanyak 20 kali
3	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah kelompok tani yang mengikuti koordinasi koordinasi pengembangan PUAP adalah 30 klp
4	Pelaksanaan PEDDA/PENAS dan Kontak Tani Andalan	Petani yang mewakili Kota Bima dalam pelaksanaan PENAS sebanyak 5 Orang
5	Pelaksanaan Lomba Bagi Kelompok Tani Dan Petani, Klp. PUAP Serta Pekarangan	Jumlah kelompok tani yang berpartisipasi adalah sebanyak 10 Kelompok
6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian	Pelaksanaan penyaluran kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai prosedur dan tepat sasaran, dengan jumlah penyaluran Pupuk bersubsidi sebanyak 3.324,25 Kg
7	Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani Peternak Tentang Penanganan Pasca Panen Sebanyak 50 Orang
8	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Pelaksanaan Gerakan Upaya Khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai dan Penyusunan Proksimantap.
9	Pengembangan Perbinihan/ Perbibitan	Tersalurnya Bantuan Bibit Benih Padi Gogo : 1500 Kg, Bibit Tanaman Sawo : 1000 Pohon, Mangga : 700 Pohon, Alpukat : 700 Pohon, Durian : 1000 Pohon dan Klengkeng : 400 Pohon.
10	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersajinya informasi harga pasar komoditi pertanian di media cetak lokal sebanyak 48 kali
11	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani di 7 Lokasi</li> <li>• Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Embung di 5 Lokasi</li> <li>• Terlaksananya Kegiatan Perbaikan DAM Parit di 2 Lokasi</li> <li>• Terlaksananya Pengembangan Air Irigasi Tanah Dangkal di 4 (empat) Kecamatan yang tersebar di 20 Lokasi</li> <li>• Terlaksananya Penyaluran Alsintan sebanyak 80 Unit</li> </ul>
12	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Jumlah klp yang mengikuti pelatihan menerapkan teknologi pertanian tepat guna (PHT) = 2 Klp
13	Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah kelompok yang dilatih pada kegiatan Demplot Padi = 1 Klp
14	Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah petani yang ikut pelatihan rorak dan biopori sebanyak 40 Orang
15	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/perkebunan	Jumlah alsintan yang disalurkan adalah 80 Unit
16	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan	Jumlah bibit unggul yang disalurkan adalah Jambu Menté 12.000 Pohon dan Kemiri 4.000 Pohon
17	Penyusunan Program penyuluhan pertanian	Jumlah program adalah sebanyak 8 program
18	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	<p>Jumlah pelayanan kesehatan hewan oleh Puskesmas sebanyak 1531 ekor terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi : 646 ekor</li> <li>• Kerbau : 1 ekor</li> <li>• Kuda : 60 ekor</li> <li>• Kambing : 534 ekor</li> <li>• Kucing : 27 ekor</li> <li>• Ayam : 262 ekor</li> <li>• Anjing : 1 ekor</li> <li>• Rusa : - ekor</li> </ul>

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
		<p>Perincian Pelaksanaan Vaksinasi ternak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi : 9.842 ekor</li> <li>• Kerbau : 160 ekor</li> <li>• Kuda : 419 ekor</li> <li>• Kambing : 7.954 ekor</li> <li>• Domba : 13 ekor</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total : 18.388 ekor</li> </ul> <p>Diagnosa penyakit 824 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SE : - kasus</li> <li>• AT : - kasus</li> <li>• Scabies : 248 kasus</li> <li>• ND : - kasus</li> <li>• MCF : - kasus</li> <li>• Diare : - kasus</li> <li>• BEF : - kasus</li> <li>• Helmi : 90 kasus</li> <li>• Myas : 1 kasus</li> <li>• CRD : 6 kasus</li> <li>• Indig : 20 kasus</li> <li>• Maln : 365 kasus</li> <li>• DFI : - kasus</li> <li>• Dematitis : 11 kasus</li> <li>• ARTR : 15 kasus</li> <li>• Abses : 12 kasus</li> <li>• Tymp : 3 kasus</li> <li>• VUL : 1 kasus</li> <li>• Mastitis : 2 kasus</li> <li>• Pneu : 48 kasus</li> <li>• Disto : 2 kasus</li> <li>• Infla : - kasus</li> </ul> <p>Situasi umum penyakit hewan menular berdasarkan jenis penyakit adalah sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anthrax : - kasus</li> <li>• Surra : - kasus</li> <li>• Scabies : 2 kasus</li> <li>• ND : - kasus</li> <li>• AI : - kasus</li> </ul> <p>Pengawasan Hewan/ Daging Qurban :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan dan pemeriksaan fisik (<i>ante mortem</i>) dilaksanakan H-1</li> <li>2. Pengawasan dan pemeriksaan (<i>post mortem</i>) selama 3 hari, Tgl. 1 – 3 Sept. 2017</li> </ol> <p>Jumlah ternak qurban yang diawasi dan diperiksa sebanyak 975 ekor terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi : 471 ekor</li> <li>• Kerbau : 1 ekor</li> <li>• Kambing : 503 ekor</li> </ul>
19	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	<p>Pengawasan Terhadap Ternak Yang di Antar Pulaukan yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi Jantan : 2000 ekor</li> <li>• Kerbau Jantan : 25 ekor</li> </ul>
20	Pencacahan dan Pengkartuan Ternak	<p>Pelaksanaan pencacahan dan pengkartuan ternak, Sebanyak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi : 8145 ekor</li> <li>• Kerbau : 566 ekor</li> <li>• Kuda : 1029 ekor</li> <li>• Kambing : 8225 ekor</li> <li>• Domba : 169 ekor</li> </ul>
21	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	<p>Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemotongan ternak di Kota Bima :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi Jantan : 1314 ekor</li> <li>• Sapi Betina : 31 ekor</li> </ul>

No	Kegiatan	Capaian Kinerja
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerbau : - ekor</li> <li>• Kambing : 1661 ekor</li> </ul>
22	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Pengadaan straw dan N2Cair : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi Brangus : 26 dosis</li> <li>• Sapi Simental : 25 dosis</li> <li>• Sapi Limousin : 26 dosis</li> <li>• Sapi Brahman : 26 dosis</li> <li>• Sapi Bali : 103 dosis</li> <li>• N2-Cair : 50 liter</li> </ul> Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan : 340 Dosis Jumlah Kelahiran Hasil Inseminasi Buatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sapi Brangus : 24 ekor</li> <li>• Sapi Simental : 22 ekor</li> <li>• Sapi Limousin : 15 ekor</li> <li>• Sapi Brahman : 8 ekor</li> <li>• Sapi Bali : 162 ekor</li> <li>• Sapi Angus : - ekor</li> <li>• Sapi Ongole : - ekor</li> </ul>
23	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan peternak tentang pengolahan pakan ternak sebanyak 8 kelompok tani ternak, dan peningkatan pengetahuan peternak tentang pembuatan kompos sebanyak 8 kelompok tani ternak.
24	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan	Terbangunnya sarana pemotongan untuk jagal lokal sebanyak 1 unit

Tabel 2.174. Capaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :				
	- Padi (GKP)	Ton	54.025	34.615	64,07
	- Jagung (PK)	Ton	5.113	12.106	236,77
	- Kedelai (BK)	Ton	2.716	1.309	48,20
	- Kacang Tanah(BK)	Ton	440	368	83,64
	- Kacang Hijau (BK)	Ton	12	62	516,67
Meningkatnya Produksi Perkebunan	- Ubi Kayu (UB)	Ton	2.849	2.313	81,19
	Produksi Perkebunan :				
	- Tembakau	Ton	3,40	2,10	61,76
	- Jambu Mente	Ton	173,84	157,65	90,69
Meningkatnya Produksi Peternakan	- Kelapa	Ton	27,49	27,07	98,47
	Produksi Peternakan :				
	- Produksi Daging	Ton	1.823	728	39,96
	- Produksi Kulit	Ton	45	62	137,88
Meningkatnya Ketersediaan Penyuluh Yang Terampil	- Produksi Telur	Ton	258	183	70,82
	Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran (%)	%	45	67	148,89

Keterangan : Produksi Pertanian Tanaman Pangan adalah Angka Sementara Tahun 2017.

Pencapaian realisasi kinerja sesuai sasaran strategis untuk indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan melebihi dari target yang ditentukan yaitu rata-rata sebesar 152,88%, produksi perkebunan tercapai rata-rata sekitar 83,64%, produksi peternakan tercapai rata-rata sekitar 82,89 %, sedangkan untuk Persentase Penyuluh Yang Terampil Dalam Penerapan Teknologi Pertanian Sesuai Anjuran sebesar 148,89%.

#### 4, Perdagangan

##### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan sektor perdagangan di kota Bima melalui 2 program dan 6 kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.174. Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Kota Bima Tahun Anggaran 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>297.264.000</b>	<b>255.352.500</b>	<b>85,90</b>
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	31.517.000	23.013.000	73,02
	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah	119.020.000	106.129.500	89,17
	Sosialisasi peraturan dan perundang-undangan barang-barang ilegal (CHT)	34.047.000	27.905.000	81,96
	Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (CHT)	112.680.000	98.305.000	87,24
2	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>3.601.952.000</b>	<b>3.558.767.713</b>	<b>98,80</b>
	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	3.187.440.000	3.147.149.000	98,74
	peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	219.425.000	216.531.713	98,68
	Operasi pasar murah	195.087.000	195.087.000	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.899.216.000</b>	<b>3.814.120.213</b>	<b>97,82</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Realisasi anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Urusan Perdagangan tahun 2017 adalah mencapai 94,82%. Beberapa program dan kegiatan utama yang mendukung pelaksanaan urusan perdagangan, yaitu:



### 1. **Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan**

Program ini menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal (DB-HCHT) dan Pengawasan peredaran Cukai Ilegal (DB-HCHT).

**Adapun keluaran (output)** dari kegiatan tersebut adalah:

- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal, yang dilaksanakan di 5 kecamatan Kota Bima dan peserta sosialisasi pelaku usaha.
- Pelaksanaan pengawasan peredaran cukai ilegal yang dilakukan langsung pada pusat pertokoan, pasar, kios-kios, pedagang kaki lima di terminal, dan pergudangan besar serta distributor.

### 2. **Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri.**

1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk, anggaran pada kegiatan ini menggunakan dana DAK dengan output utamanya:

- Terlaksananya pengendalian dan pengamanan peresmian pasar raya amahami
- Pelaksanaan kegiatan pasar ramadhan
- Pelaksanaan kegiatan pasar lebaran
- 1 paket pembangunan tempat prasati (papan nama pasar)
- 1 paket tampias hujan/papan iklan
- Revitalisasi pasar Kumbe
- Instalasi jaringan listrik Kios pasar Kumbe
- Timbunan pasar raya Amahami

2) Kegiatan Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan, dengan output utamanya Pelaksanan monitoring harga sembako dan pengawasan pengendalian barang dan jasa (dan penyampaian informasi harga sembako pada masyarakat yang dilaksanakan di 5 kecamatan Kota Bima).

3) Kegiatan Operasi Pasar murah, dengan output utamanya Operasi pasar murah dilaksanakan 2 kali, pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri.

### **b. Capaian Kinerja**

Capaian kinerja urusan perdagangan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.175. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perdagangan Tahun Anggaran 2017

Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang	220 unit	224 unit	110,91

Tahun 2017 jumlah Jumlah UTTP Yang Ditera dan Ditera Ulang ditargetkan sebanyak 220 unit, sedangkan realisasinya sebanyak 224 unit atau 110,91%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang realisasinya sebanyak 225 unit, terdapat penurunan sebanyak 1 unit dan apabila dibandingkan lagi dengan target jangka menengah yang memiliki target 245 unit maka realisasi untuk tahun 2017 dibawah target jangka menengah. Tidak tercapainya realisasi dari target yang diinginkan ini disebabkan belum adanya aparatur teknis yang dimiliki. Dan untuk meningkatkan realisasi tersebut perlu dilakukan pelatihan/diklat teknis untuk aparatur Dinas Koperindag Kota Bima.

### c. Permasalahan dan Solusi

- 1) Perlu diupayakan alokasi anggaran tambahan untuk memperluas daya tampung bangunan pasar tradisional serta penataan lingkungan pasar yang mendukung terwujudnya pasar tradisional yang sehat dan berwawasan lingkungan.
- 2) jumlah yang ditera dan ditera ulang mewakili aspek perlindungan terhadap konsumen. Dengan meningkatnya jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang, pemerintah Kota Bima lebih mengupayakan jaminan atas tertibnya alat ukur yang digunakan di pusat perdagangan sehingga intensitas pengawasannya perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM tekhnis dengan mengikuti pelatihan/diklat tekhnis PPNS.

## 5, Perindustrian

Sektor industri memiliki peran penting dalam peningkatan nilai tambah produk-produk Kota Bima dan penyerapan tenaga kerja. Industri di Kota Bima didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM).

### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan IKM di Kota Bima dilaksanakan dalam 4 program dengan total pagu sebesar Rp. 2.353.376.143,- yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima. Secara keseluruhan realisasi anggaran tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2.211.138.462,- atau 93,96%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176. Program/ Kegiatan Urusan Industri Kota Bima  
Tahun Anggaran 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	181.510.000	125.730.000	69,27

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	181.510.000	125.730.000	69,27
2	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	203.631.000	189.284.300	92,95
	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	70.995.000	60.235.000	84,84
	Lomba Rancang Busana	132.636.000	129.049.300	97,30
3	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	<b>175.439.400</b>	<b>153.948.519</b>	<b>87,75</b>
	Pembinaan Kemampuan teknologi industri	121.974.200	100.942.839	82,76
	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	53.465.200	53.005.680	99,14
4	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>1.792.795.743</b>	<b>1.742.175.643</b>	<b>97,18</b>
	Penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat	33.140.100	14.127.000	42,63
	Promosi produk kerajinan	47.195.643	44.667.643	94,64
	Penyediaan Sarana dan prasarana pengembangan sentra industri	1.712.460.000	1.683.381.000	98,30
	<b>TOTAL</b>	<b>2.353.376.143</b>	<b>2.211.138.462</b>	<b>93,96</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

### 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program ini diwujudkan melalui kegiatan penguatan kemampuan Industri berbasis teknologi dengan output utamanya:

Pelaksanaan diklat pengelasan, peningkatan kualitas produk pangan dan diversifikasi tenun (30 orang selama 10 hari), diklat manajemen sederhana (30 orang selama 3 hari) diharapkan mampu meningkatkan diversifikasi dan jaminan pengolahan, penerapan manajemen pada IKM.

### 2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri.

Keluaran (Output) dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Pelaksanaan Lomba Rancang Busana diharapkan dapat lebih dikenalnya produk tenun Kota Bima dan menumbuhkan kembangkan kreatifitas pengrajin tenun dan olahan hasil tenun/diversifikasi tenun

- b. Monitoring rutin IKM dalam rangka pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.

### 3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

4) Kegiatan Pembinaan kemampuan teknologi industri, yang didukung dengan Output dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri pelaksanaan kegiatan temu usaha.

5) kegiatan Pengembangan dan Pelayanan teknologi industri.

Output dari kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya pendampingan langsung pada IKM antara lain pendampingan diagnosis/shindansi dan pendampingan pada industri kemasan, pendampingan IKM.

### 4. Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

Program ini diwujudkan dengan kegiatan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat dan kegiatan promosi produk industri kerajinan.

Output dari kegiatan tersebut adalah:

- a. Dokumen profil IKM dan sentra IKM, Katalog IKM
- b. Terlaksananya penyelenggaraan promosi produk UMKM (2 kali pameran dalam kota dan dalam Provinsi).

### b. Capaian Kinerja

Capaian kinerja urusan Industri pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177. Capaian kinerja Urusan Pilihan Perindustrian Tahun Anggaran 2017

Indikator	Target	Realisasi Capaian 2017	%
Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM)	157	94	59,87
Jumlah Sentra Industri yang ditangani (sentra)	74	73	98,65

Sumber Data: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bima 2017

- Indikator kinerja Tahun 2017 ini memiliki target sebanyak 157 IKM dan realisasinya sebesar 94 IKM atau 59,87%.
- Indikator kinerja Tahun 2017 ini memiliki target sentra industri yang ditangani sejumlah 74 sentra dan realisasinya sebesar 73 IKM atau 98,65%.

### c. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- 1) Perkembangan Industri khususnya IKM cukup berkembang namun perkembangan industri non formal ke industri formal masih kecil diakibatkan karena terkendala pada penerbitan legalitas (Izin);
- 2) Pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah terkendala pada:
  - a. Kualitas Sumber Daya Manusia masih cukup rendah,
  - b. Kualitas Produk IKM masih tertinggal dari daerah lain;
  - c. Pemasaran produk masih terbatas;
  - d. Jumlah aparat pembina tidak berimbang dengan jumlah IKM yang cukup besar;
  - e. Ilmu, Skill dan spesialisasi teknis aparat Masih kurang.

#### Solusi

- 1) Perlu ada kemudahan dalam perizinan khususnya IKM dengan memberikan perizinan gratis bagi IKM;
- 2) Kendala Pembinaan dan Pengembangan IKM dapat diatasi dengan :
  - a) Melaksanakan pembinaan berupa pemberian pelatihan/Diklat pengembangan ilmu dan keterampilan bagi pelaku usaha Industri;
  - b) Peningkatan kemampuan SDM harus dibarengi dengan Peningkatan wawasan usaha melalui kegiatan Magang serta peningkatan teknologi melalui bantuan peralatan/mesin;
  - c) Melaksanakan pameran produk IKM dalam Kota Bima serta mengikuti pameran produk IKM diluar daerah;
  - d) Mengajukan penambahan jumlah aparat Pembina IKM kepada pemerintah Kota Bima;
  - e) Mengirim/mengikut sertakan aparat dalam pelatihan/diklat pengembangan dan peningkatan kemampuan aparat.

## **D. Urusan Penunjang**

### **Administrasi Pemerintahan**

#### **1. Sekretariat Daerah**

##### **a. Program dan Kegiatan**

Dalam rangka melaksanakan urusan Administrasi Pemerintahan pada tahun 2017 Sekretariat Daerah Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.833.938.950,00 dengan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 46.491.225.678,00 atau 95,20% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2017

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>11.895.185.075</b>	<b>11.350.839.508</b>	<b>95,42</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	296.540.000	273.679.226	92,29
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.301.604.000	1.275.697.154	98,01
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	381.441.000	339.690.000	89,05
	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	450.000.000	294.655.353	65,48
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	88.185.800	69.900.600	79,27
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	713.272.400	692.674.983	97,17
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	491.750.000	404.630.000	82,28
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	55.400.000	42.800.000	77,26
	Penyediaan alat tulis kantor	795.613.650	782.162.150	96,85
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	838.854.500	815.713.288	96,10
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	558.000.000	557.500.700	99,91
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	565.450.000	548.362.150	96,98
	Penyediaan barang bacaan dan perundang-undangan	199.510.000	182.870.000	91,66
	Penyediaan bahan logistik kantor	421.068.000	420.966.500	99,98
	Penyediaan makanan dan minuman	1.830.084.000	1.786.958.142	97,56
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.913.172.125	1.901.826.262	95,30
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	995.239.600	960.753.000	94,54
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>13.108.327.000</b>	<b>12.390.375.941</b>	<b>94,52</b>
	Pembangunan gedung kantor	3.945.892.000	3.822.110.450	96,86
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	3.861.000.000	3.787.133.000	98,09
	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	161.200.000	159.500.000	98,95
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	140.402.500	114.038.000	81,22
	Pengadaan peralatan gedung kantor	394.765.000	379.405.000	96,11
	Pengadaan mebeleur	371.100.000	368.885.000	99,40
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1.118.077.000	1.104.627.660	98,80
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	410.160.000	219.990.023	53,64
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.544.830.500	1.347.494.558	87,23

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	145.000.000	144.516.675	99,67
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	227.050.000	223.824.000	98,58
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	168.850.000	161.464.800	95,63
	Penyediaan/ sewa gedung kantor/rumah jabatan/dinas	620.000.000	557.386.775	89,90
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>214.700.000</b>	<b>214.700.000</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	153.000.000	153.000.000	100,00
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21.200.000	21.200.000	100,00
	Pengadaan pakaian olahraga	40.500.000	40.500.000	100,00
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>545.142.000</b>	<b>464.413.595</b>	<b>85,19</b>
	Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah	80.702.000	-	-
	Koordinasi pelaksanaan kegiatan korps pegawai negeri	350.000.000	349.973.595	99,99
	Pengadaan pakaian seragam dinas	110.940.000	110.940.000	100,00
	Tanda pengenalan area khusus bandara	3.500.000	3.500.000	100,00
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>1.428.293.825</b>	<b>1.371.887.680</b>	<b>96,05</b>
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	21.000.000	21.000.000	100,00
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	28.000.000	28.000.000	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	23.750.000	23.750.000	100,00
	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	194.246.000	192.046.000	98,87
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	589.884.325	538.059.325	91,21
	Penyusunan standar harga kota bima tahun 2018	118.275.500	116.115.000	98,17
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana DAK dan TEPR	453.138.000	452.917.355	99,95
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>7.873.852.000</b>	<b>7.805.694.480</b>	<b>99,13</b>
	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	1.414.253.500	1.380.457.600	97,61
	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah/sekda/staf ahli/humas protokol	446.000.000	446.000.000	100,00
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	1.226.300.000	1.205.945.399	96,58
	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	2.130.000.000	2.129.920.981	100,00

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Optimalisasi pelayanan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah	162.000.000	161.250.000	99,54
	Stimulan pembangunan daerah	1.623.435.000	1.620.799.000	99,84
	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	871.863.500	861.321.500	68,28
<b>7</b>	<b>Program Promosi Daerah</b>	<b>374.230.000</b>	<b>373.935.000</b>	<b>99,92</b>
	Promosi daerah melalui media cetak/ TV/radio/fasilitas umum pemerintah/non pemerintah lainnya	349.230.000	348.935.000	99,92
	Pameran pembangunan/promosi/investasi	25.000.000	25.000.000	100,00
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>258.870.000</b>	<b>243.636.100</b>	<b>94,12</b>
	Pembinaan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah	173.870.000	166.072.700	95,52
	Pembinaan kelembagaan perekonomian daerah	85.000.000	77.563.400	91,25
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS</b>	<b>99.900.000</b>	<b>99.900.000</b>	<b>100,00</b>
	Penguatan kelembagaan komisi penanggulangan AIDS Daerah	50.450.000	50.450.000	100,00
	Pencegahan pemberantasan penanggulangan peredaran gelap narkoba (P4GN)	49.450.000	49.450.000	100,00
<b>10</b>	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>1.512.010.050</b>	<b>1.504.108.792</b>	<b>99,48</b>
	Penyusunan dan penerbitan produk hukum daerah	139.053.450	134.058.113	96,41
	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	539.699.398	539.274.398	99,92
	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	204.581.202	204.135.228	99,78
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	432.122.000	432.062.000	99,99
	Publikasi peraturan perundang-undangan	61.630.000	61.630.000	100,00
	Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum	134.924.000	132.949.053	98,54
<b>11</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	<b>44.900.000</b>	<b>44.900.000</b>	<b>100,00</b>
	Koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah	44.900.000	44.900.000	100,00
<b>12</b>	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>	<b>364.173.000</b>	<b>288.566.848</b>	<b>79,24</b>
	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	179.319.000	110.012.848	61,35
	Rapat koordinasi asosiasi pemerintah joga seluruh indonesia (APEKSI)	184.854.000	178.554.000	96,59



No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
13	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>1.122.355.600</b>	<b>1.090.112.481</b>	<b>97,13</b>
	Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)	308.370.000	277.529.281	90,00
	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa (POKJA ULP)	813.985.600	812.583.200	99,83
14	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik</b>	<b>2.933.730.000</b>	<b>2.739.561.750</b>	<b>93,38</b>
	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	444.530.000	444.461.750	99,98
	Penyusunan kalender tahunan pemerintah kota bima	162.700.000	120.700.000	74,19
	Koordinasi peringatan hari besar keagamaan dan nasional	320.600.000	320.100.000	99,84
	Kerjasama informasi dengan mas media (pembinaan dan pendampingan pers)	1.519.300.000	1.518.300.000	99,93
	Penyusunan buletin pemerintah kota bima	486.600.000	336.000.000	69,05
15	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>49.000.000</b>	<b>48.650.000</b>	<b>99,29</b>
	Penilaian lomba sekolah sehat(LSS)	49.000.000	48.650.000	99,29
16	<b>Program Penataan daerah otonomi baru</b>	<b>1.076.963.000</b>	<b>736.910.275</b>	<b>68,42</b>
	Fasilitasi Percepatan penyelesaian tapak batas wilayah administrasi antar daerah	273.347.000	172.188.250	62,99
	Optimalisasi kecamatan dan kelurahan	166.807.000	143.940.500	86,29
	Pembakuan nama rupa bumi	335.267.000	233.707.450	69,71
	Pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan	301.542.000	187.074.075	62,04
17	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat</b>	<b>3.527.337.900</b>	<b>3.342.862.649</b>	<b>94,77</b>
	Pembinaan peningkatan pelayanan publik	249.356.000	204.888.000	82,17
	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	73.500.000	73.500.000	100,00
	Pengantaran dan penjemputan jamaah haji	108.250.000	108.250.000	100,00
	Pendataan sarana pendidikan agama dan tempat ibadah	3.750.000	3.750.000	100,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	8.600.000	8.600.000	100,00
	Koordinasi bidang perekonomian	272.855.000	163.109.149	59,78
	Koordinasi peringatan hari besar	2.811.026.900	2.780.765.500	98,92
18	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>591.766.500</b>	<b>589.356.000</b>	<b>99,59</b>

No	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	465.996.000	463.586.000	99,48
	Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan aparatur	125.770.500	125.770.000	100,00
<b>19</b>	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>1.230.200.000</b>	<b>1.209.410.000</b>	<b>98,31</b>
	Pelaksanaan sosialisasi keagamaan STQ/MQ	113.675.000	113.575.000	99,91
	Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji	585.500.000	578.935.000	98,88
	Verifikasi dan rekomendasi bantuan sosial dan keagamaan	60.000.000	60.000.000	100,00
	Rumpun kesra	21.025.000	21.025.000	100,00
	Pembinaan majelis taklim tingkat kota bima	450.000.000	435.875.000	96,86
<b>20</b>	<b>Program Administrasi Kerjasama Pembangunan</b>	<b>583.003.000</b>	<b>581.404.579</b>	<b>99,73</b>
	Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan	413.950.000	412.446.279	99,64
	Pembinaan jasa konstruksi	169.053.000	168.958.300	99,94
	<b>Jumlah</b>	<b>48.833.938.950</b>	<b>46.491.225.678</b>	<b>95,20</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Berdasarkan tabel tersebut diatas, Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Bima menghasilkan beberapa keluaran yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 11.895.185.075,00 dengan realisasi Rp. 11.350.839.508,00 (95,42%) dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 17 (tujuh belas) kegiatan.

#### 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 13.108.327.000,00 dengan realisasi Rp. 12.390.375.941 (94,52%). Melalui program ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- Pembangunan gedung kantor, antara lain rehabilitasi kantor, pembangunan talud dan pagar beberapa kantor Kecamatan dan Kelurahan.
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional, antara lain pengadaan mobil dinas, mobil jabatan, pengadaan mobil sampah dan motor sampah tiga roda.

- Pemeliharaan rutin/berkala pada kantor, rumah jabatan dan kendaraan dinas/operasional.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 214.700.000,00 dengan realisasi Rp. 214.700.000,00 (100,00%).

Dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah dihasilkan output pengadaan pakaian dinas, pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu dan pengadaan pakaian olah raga pada beberapa bagian di Sekretariat Daerah Kota Bima.

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 545.142.000,00 dengan realisasi Rp. 464.413.595,00 (85,19%). Kegiatan utama yang berhasil dilaksanakan adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan korps pegawai negeri dan pengadaan pakaian seragam dinas.

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.428.293.825,00 dengan realisasi Rp. 1.371.887.680,00 (96,05%). Dari kegiatan ini dihasilkan beberapa output yaitu :

- Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD Kota Bima dapat disusun dan disampaikan tepat waktu;
- Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun;
- Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Sekretariat Daerah Kota Bima;
- Standar Harga Kota Bima Tahun 2018;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana DAK dan TEPR.

### **6. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 7.873.852.000,00 dengan realisasi Rp. 7.805.694.480,00 (99,13%). Beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah :

- Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat;
- Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri;
- Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah;
- Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya;

- Optimalisasi pelayanan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Stimulan Pembangunan Daerah; dan
- Terlaksananya rapat Koordinasi dengan unsur Muspida.

#### **7. Program Promosi Daerah**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 374.230.000,00 dengan realisasi Rp. 373.935.000,00 (99,92%). Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah promosi daerah melalui media cetak maupun fasilitas umum pemerintah lainnya serta kegiatan pameran pembangunan/promosi/investasi.

#### **8. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 258.870.000,00 dengan realisasi Rp. 243.636.100,00 (94,12%). Output dari pelaksanaan program ini adalah :

- Terlaksananya Pembinaan perusahaan daerah dan Badan usaha milik daerah; dan
- Terlaksananya Pembinaan kelembagaan perekonomian daerah.

#### **9. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 99.900.000,00 dengan realisasi Rp. 99.900.000,00 (100,00%). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Dengan kegiatan ini telah diadakan sosialisasi penanggulangan AIDS dan operasional Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.
- Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dengan kegiatan ini sosialisasi dalam rangka pencegahan peredaran gelap narkoba.

#### **10. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.512.010.050,00 dengan realisasi Rp. 1.504.108.792,00 (99,79%). Output dari pelaksanaan kegiatan ini, antara lain :

- Tersusunnya rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan;
- Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- Terfasilitasinya sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum; dan

**11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 44.900.000,00 dengan realisasi Rp. 44.900.000,00 (100%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah melalui rapat koordinasi yang melibatkan stakeholder terkait.

**12. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 364.173.000,00 dengan realisasi Rp. 288.566.848,00 (79,24%). Output dari pelaksanaan program ini adalah keikutsertaan pada rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) serta fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan public.

**13. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.122.355.600,00 dengan realisasi Rp. 1.090.112.481,00 (97,13%). Output dari program ini tergambar dari pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, antara lain :

- Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (Pokja ULP).

**14. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 2.933.730.000,00 dengan realisasi Rp. 2.739.000.000,00 (93,38%). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
- Penyusunan kalender tahunan pemerintah kota bima
- Koordinasi peringatan hari besar keagamaan dan nasional
- Kerjasama informasi dengan mas media (pembinaan dan pendampingan pers)
- Penyusunan buletin pemerintah kota bima

**15. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 49.000.000,00 dengan realisasi Rp. 48.650.000,00 (99,29%). Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penilaian Lomba Sekolah Sehat.

**16. Program Penataan Daerah Otonomi Baru**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.076.963.000,00 dengan realisasi Rp. 736.910.275,00

(68,42%). Output penting dari pelaksanaan program ini dirinci menurut kegiatannya, yaitu :

- Terfasilitasinya percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah;
- Terlaksananya optimalisasi kecamatan dan kelurahan;
- Pembakuan nama rupa bumi wilayah Kecamatan Rasanae Timur.
- Pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan, yaitu pemekaran kelurahan Jatiwangi menjadi Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Ule, Kelurahan Jatibaru menjadi Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Jatibaru Timur, serta Kelurahan Kumbe menjadi Kelurahan Kelurahan Kumbe dan Kelurahan Oi Mbo.

**17. Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 3.527.337.900,00 dengan realisasi Rp. 3.342.862.649,00 (94,77%). Kegiatan yang dilaksanakan dari program ini adalah Koordinasi Peringatan hari besar dan Koordinasi Bidang Ekonomi.

**18. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 591.766.500,00 dengan realisasi Rp. 589.356.000,00 (99,59%). Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Tersusunnya instrumen analisis jabatan PNS; dan
- Penguatan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur.

**19. Program Pembinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 1.230.200.000,00 dengan realisasi Rp. 1.209.410.000,00 (98,31%). Keluaran (output) dari pelaksanaan program Pembinaan dan peningkatan pelayanan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, adalah :

- Terlaksananya STQ/MQ;
- Terlaksananya pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji.
- Verifikasi dan rekomendasi bantuan sosial dan keagamaan.
- Rumpun kesra
- Pembinaan Majelis taklim tingkat Kota Bima.

**20. Program Administasi Kerjasama Pembangunan**

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan program ini pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 583.003.000,00 dengan realisasi Rp. 581.404.579,00

(99,73%). Output penting dari pelaksanaan program ini dirinci menurut kegiatannya, yaitu :

- Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan; dan
- Terlaksananya Kegiatan Bina Jasa Konstruksi.

## **b. Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bima diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja dari seluruh Bagian yang ada didukung dengan program masing-masing Bagian. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan dengan pengukuran kinerja yang membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasinya.

### **1) Meningkatnya Kepatuhan terhadap Ajaran Agama**

#### **a) Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh**

Penerimaan ZIS Kota Bima pada tahun 2017 sebesar Rp. 4.230.456.000 atau mengalami penurunan dibanding penerimaan tahun 2016 yang sebesar Rp. 4.335.858.840. Meskipun mengalami penurunan namun secara umum telah memenuhi target ZIS tahun 2017 yang telah ditetapkan yaitu Rp. 4.000.000.000. Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi meningkatnya penerimaan ZIS di Kota Bima, antara lain dukungan pemerintah yang bermitra dengan BAZNAS dan meningkatnya kesadaran maupun kepercayaan masyarakat Kota Bima terhadap BAZNAS sebagai penyalurnya. Daftar penerimaan ZIS di Kota Bima selama Tahun 2014-2017 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.179. Daftar Penerimaan ZIS di Kota Bima Tahun 2014-2017

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
2014	785.000.000
2015	1.391.336.000
2016	4.335.858.840
2017	4.230.456.000

#### **b) Perolehan Nilai MTQ tingkat Provinsi**

Pada Tahun 2017 nilai MTQ tingkat Provinsi sebesar 55 poin dengan predikat juara III tingkat Provinsi NTB. Adapun pencapaian indikator kinerja sebesar 142,86 %. Selama tahun 2014 sampai 2016 Kota Bima selalu memperoleh juara umum di tingkat Provinsi NTB namun pada tahun 2017 mengalami penurunan peringkat. Adapun faktor yang mempengaruhi jumlah poin sangat tergantung pada jumlah cabang lomba, bahwa semakin banyak cabang lomba maka semakin

banyak jumlah poin, dan sebaliknya. Untuk pelaksanaan MTQ Tahun 2017 Kafilah Kota Bima memperoleh 7 emas, 8 Perak, dan 4 Perunggu. Selanjutnya untuk perkembangan daftar perolehan nilai MTQ selama Tahun 2014-2017 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.180: Daftar Perolehan nilai MTQ Kota Bima selama Tahun 2014-2017

Tahun	Nilai	Tingkat Provinsi
2014	54 poin	Juara I (Umum)
2015	84 poin	Juara I (Umum)
2016	31 poin	Juara I (Umum)
2017	55 poin	Juara III

**c) Rasio Kenaikan penduduk haji yang mendaftar haji**

Penduduk yang mendaftar haji di Kota Bima pada Tahun 2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya, khusus Tahun 2017 rasio penduduk yang mendaftar haji 4,4 per 1000 penduduk dengan pencapaian sebesar 105,75 % dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran beragama dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima semakin meningkat pada Tahun ini. Dalam rangka membantu jamaah haji pemerintah setiap Tahunnya menanggung biaya transportasi PP dari Kota Bima ke Bandara embarkasi.

**2) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

**a) Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

SAKIP Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 kembali memperoleh hasil **Baik (B)**. Dengan perolehan **predikat B (Baik)** tersebut menunjukkan bahwa Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bima semakin baik dari Tahun ke Tahun. Pada Tahun 2016, khusus Tahun 2016 nilai SAKIP Kota Bima diperoleh sebesar 62,58 poin dengan peningkatan jumlah poin sebanyak 2,37 poin dibanding Tahun 2015. Selanjutnya perolehan nilai B tersebut dengan capaian kinerja sebesar 96,26 %. Adapun daftar rincian peningkatan nilai SAKIP selama 4 Tahun terakhir sebagaimana terlihat tabel berikut :

Tabel 2.181: Daftar Nilai SAKIP Kota Bima selama Tahun 2013-2016

Tahun	Nilai	Status
2013	45,54	C
2014	51,51	CC
2015	60,21	B
2016	62,58	B



Beberapa faktor yang mendorong peningkatan nilai SAKIP Kota Bima, antara lain pelaksanaan sinkronisasi seluruh dokumen perencanaan, evaluasi kinerja internal, peningkatan komitmen Walikota dan seluruh pejabat eselon II hingga IV sebagaimana yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap Tahunnya.

**b) Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)**

Status penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 yang diperoleh Kota Bima meningkat dari Tahun 2014 berstatus **Tinggi** menjadi **Sangat Tinggi** dengan capaian kinerja sebesar 119%. Bahwa meningkatnya status LPPD Kota Bima tersebut menunjukkan bahwa kualitas data pendukung dan pelaksanaan pelayanan oleh SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut semakin baik. Adapun rincian perkembangan perolehan nilai selama 3 Tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.182: Daftar Nilai LPPD Kota Bima selama Tahun 2013-2015

Tahun	Nilai	Status
2013	2,5671	Tinggi
2014	2,8716	Tinggi
2015	3,5822	Sangat Tinggi

Beberapa faktor yang mempengaruhi nilai LPPD pada Tahun ini antara lain komitmen pimpinan dan seluruh SKPD untuk melaporkan dan mendokumentasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan LPPD. Selain itu untuk menunjang pencapaian indikator telah dilaksanakan penyelarasan dokumen perencanaan secara nasional hingga daerah yang didukung oleh sistem penganggaran yang berbasis kinerja.

**c) Produk Hukum dibahas dan mendapat persetujuan**

Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 menargetkan rancangan Peraturan Daerah yang disahkan sebanyak 13 Perda dengan tingkat realisasi sebanyak 13 Perda. Adapun capaian kinerja indikator Tahun 2017 sebesar 100 %. Beberapa Perda yang telah berhasil mendapat persetujuan pada Tahun 2017 antara lain;

- 1) Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima;
- 2) Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana diubah dengan peraturan daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan pencatatan sipil ;
- 3) Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang retribusi jasa Umum;
- 4) Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bima;
- 5) Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air tanah;
- 6) Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan;
- 7) Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peranggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- 8) Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bima;
- 9) Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2016 tentang APBD Kota Bima Tahun 2016;
- 10) Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan kelurahan Jatibaru Timur;
- 11) Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembentukan kelurahan Ule;
- 12) Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan kelurahan Oimbo;
- 13) Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang APBD Kota Bima Tahun 2018;

Penurunan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kesibukan lembaga legislatif dan terjadinya perubahan struktur perangkat daerah dengan menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

**d) Pelayanan pengadaan barang dan jasa**

Pelaksanaan pelayanan barang dan jasa di Kota Bima sebanyak 96 Paket dengan tingkat capaian indikator kinerja sebesar 96 %. Selama pelaksanaan Tahun anggaran Tahun 2017 Pemerintah Kota Bima telah menggunakan pelayanan pengadaan barang dan jasa berbasis teknologi. Penggunaan sistem yang dikelola

oleh LPSE dapat membantu terwujudnya akuntabilitas pelayanan pengadaan barang dan jasa. Selain itu kurangnya jumlah paket dari target Tahun ini dipengaruhi oleh adanya pengurangan anggaran dan jumlah paket proyek yang seharusnya dilaksanakan.

**e) Cakupan Produk Hukum disosialisasikan**

Pemerintah Kota Bima pada Tahun 2017 menargetkan 6 kali produk hukum yang disosialisasikan dengan terealisasi sebanyak 7 Perda. Adapun capaian kinerja indikatornya Tahun 2017 sebesar 100 %.

**f) Jumlah Media Massa yang menjalin kemitraan dengan Pemerintah**

Pada Tahun 2017 bahwa Pemerintah Kota Bima melaksanakan kemitraan dengan media massa sejumlah 41 media massa. Adapun tingkat pencapaian indikator kerjanya mencapai 97,56%. Bahwa kontribusi media massa dalam rangka pelaksanaan sosialisasi berbagai program pemerintah sangat besar, oleh karenanya pelaksanaan kemitraan dengan media massa kedepan akan diusahakan lebih optimal.

**c. Permasalahan dan solusi**

Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Peranan sekretariat yang begitu besar dan luas dilaksanakan oleh masing-masing sub bagian yang bertanggung jawab kepada kepala bagian, dan kepala bagian ini akan bertanggung jawab kepada asisten, dimana asisten-asisten ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah langsung. Permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Bima, antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas dan intensitas koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugasnya.
3. Kurangnya keterlibatan sumber daya aparatur dalam pelatihan dan pendidikan sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat.
4. Kurangnya Koordinasi dan penyelenggaraan kebijakan administrasi program dan pembangunan.

## 2. Sekretariat DPRD

### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Sekretariat DPRD Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.780.450.000,00 untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 21.062.914.538,00 atau 96,71% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.183. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% realisasi
1	2	3	4	5
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>10.034.546.000,00</b>	<b>9.934.014.319,00</b>	<b>99,00</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	328.000.000,00	311.113.722,00	94,85
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65.000.000,00	58.663.047,00	90,25
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	200.320.000,00	195.891.000,00	97,79
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	138.100.000,00	133.635.000,00	96,77
5	Penyediaan alat tulis kantor	153.766.000,00	153.593.000,00	99,89
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	180.000.000,00	177.001.800,00	98,33
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	19.900.000,00	99,50
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	154.000.000,00	145.000.000,00	94,16
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	1.026.400.000,00	978.091.750,00	95,29
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	7.582.960.000,00	7.582.960.000,00	100,00
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	150.000.000,00	142.165.000,00	94,78
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.586.404.000,00</b>	<b>1.556.643.842,00</b>	<b>98,12</b>
1	Pembangunan gedung kantor	1.098.904.000,00	1.069.607.000,00	97,33
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80.000.000,00	79.810.000,00	99,76
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	297.500.000,00	297.226.842,00	99,91

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% realisasi
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>332.590.000,00</b>	<b>332.090.000,00</b>	<b>99,85</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	239.590.000,00	239.090.000,00	99,79
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>3.265.000.000,00</b>	<b>3.215.947.446,00</b>	<b>98,50</b>
1	Konsultasi dan Studi Banding	2.865.000.000,00	2.861.598.546,00	99,88
2	Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah	400.000.000,00	354.348.900,00	88,59
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>124.750.000,00</b>	<b>124.750.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	71.500.000,00	71.500.000,00	100,00
3	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	39.750.000,00	39.750.000,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</b>	<b>6.437.160.000,00</b>	<b>5.899.468.931,00</b>	<b>91,65</b>
1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	612.110.000,00	586.049.000,00	95,74
2	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	1.267.650.000,00	897.490.284,00	70,80
3	Rapat-rapat Paripurna	161.400.000,00	146.500.000,00	90,77
4	Kegiatan Reses	2.550.000.000,00	2.492.460.000,00	97,74
5	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.846.000.000,00	1.776.969.647,00	96,26
	<b>Jumlah</b>	<b>21.780.450.000,00</b>	<b>21.062.914.538,00</b>	<b>96,71</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Output penting dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Program Pelayanan Administrasi Pekantoran**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 10.034.546.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.934.014.319,00 atau 99,00%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Tersedianya jasa jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun,
- b) Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional untuk 8 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun,
- c) Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 1 tahun,
- d) Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 1 tahun,
- e) Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun,
- f) Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun
- g) Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun,
- h) Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa 3 unit kulkas, 4 unit televisi, 5 unit printer, 2 unit meja kerja ½ biro, 1 unit meja tanda tangan, 2 unit lemari arsip, 2 unit rak buku, 1 unit camera digital, 1 unit CCTV dan 1 set kabel kontrol
- i) Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun,
- j) Tersedianya makanan dan minuman untuk anggota DPRD, keamanan, makan minum rapat maupun makan minum tamu selama 1 tahun,
- k) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 1 tahun,
- l) Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah selama 1 tahun

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

## **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.586.404.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.556.643.842,00 atau 98,12%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a. Terlaksananya rehabilitasi pagar dan pengaspalan halaman kantor DPRD,
- b. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun,
- c. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 8 unit kendaraan roda 4 dan 10 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun,
- d. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor berupa AC, Sound system, meubelair selama 1 tahun,
- e. Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor berupa 10 unit computer, 10 unit laptop dan 10 unit printer selama 1 tahun.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur.

**3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 332.590.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 332.090.000,00 atau 99,85%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Tersedianya pakaian dinas (PSH, PDH, PDU dan tenun ikat) beserta perlengkapannya bagi 25 orang anggota DPRD sebanyak 100 Steel.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur dan anggota DPRD dalam hal berpakaian.

**4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.265.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.215.947.446,00 atau 98,50%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya Konsultasi dan Studi Banding keluar daerah sebanyak 3 kali
- b) Terlaksananya Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah ( ADEKSI sebanyak 1 kali dan ASDEKSI sebanyak 1 kali)

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan anggota DPRD yang profesional.

**5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 124.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 124.750.000,00 atau 100%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 dokumen,
- b) Tersusunnya dokumen Renja, RKA, DPA dan DPPA sebanyak 4 dokumen,
- c) Tersusunnya dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD sebanyak 3 dokumen.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya penatausahaan dan pencapaian kinerja program

**6) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 6.437.160.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.899.468.931,00 atau 91,65%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 48 kegiatan.
- b) Terlaksananya Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan sebanyak 20 Kali.
- c) Terlaksananya Kegiatan Reses anggota DPRD sebanyak 3 (tiga) kali.
- d) Terwujudnya Peningkatan kapasitas pimpinan dan Anggota DPRD (Bimtek) sebanyak 2 kali.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terwujudnya Produktifitas Lembaga DPRD Kota Bima yang tinggi dalam mengakomodir aspirasi masyarakat dalam memberntuk kebijakan daerah.

### 3. Kecamatan

Selain Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan juga dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan se Kota Bima dengan jumlah total pagu anggaran sebesar Rp. 8.504.088.800,00 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.8.354.186.082,00 (Delapan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Dua Sen) atau 98,24%.

#### a. Kecamatan RasanaE Barat

Pada tahun 2017 Kecamatan RasanaE Barat dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.339.015.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.337.171.000,00 (99,92%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan RasanaE Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.184. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan RasanaE Barat Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
A.	KECAMATAN RASANA E BARAT	2.339.015.100,00	2.337.171.000,00	99,92
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	653.967.000,00	652.322.300,00	99,75
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67.440.000,00	67.423.550,00	99,98
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	23.429.500,00	21.875.000,00	93,37
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	68.670.000,00	68.670.000,00	100,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	32.780.000,00	32.780.000,00	100,00



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
5	Penyediaan alat tulis kantor	94.099.250,00	94.099.250,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.398.250,00	22.397.500,00	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.225.000,00	29.225.000,00	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.980.000,00	7.975.000,00	99,94
9	Penyediaan bahan logistik kantor	22.760.000,00	22.760.000,00	100,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	56.945.000,00	56.880.300,00	99,89
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	195.000.000,00	194.996.700,00	100,00
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	33.240.000,00	33.240.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>138.046.300,00</b>	<b>137.980.800,00</b>	<b>99,95</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	54.566.300,00	54.566.000,00	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	57.680.000,00	57.614.800,00	99,89
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>30.936.000,00</b>	<b>30.936.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	9.976.000,00	9.976.000,00	100,00
2	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.451.000,00	5.451.000,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	15.509.000,00	15.509.000,00	100,00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>	<b>487.356.300,00</b>	<b>487.327.400,00</b>	<b>99,99</b>
1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	248.700.000,00	248.700.000,00	100,00
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	238.656.300,00	238.627.400,00	99,99
<b>VI</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
<b>VII</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>629.339.500,00</b>	<b>629.239.500,00</b>	<b>99,98</b>
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	136.000.500,00	136.000.500,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	122.544.000,00	122.544.000,00	100,00
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	277.745.000,00	277.745.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	73.930.000,00	73.830.000,00	99,86
5	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )	19.120.000,00	19.120.000,00	100,00
<b>VIII</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>163.100.000,00</b>	<b>163.095.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	163.100.000,00	163.095.000,00	100,00
<b>IX</b>	<b>Program peningkatan sarana/prasaranan dan penataan administrasi pemerintah kelurahan</b>	<b>34.502.000,00</b>	<b>34.502.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan profil kelurahan	34.502.000,00	34.502.000,00	100,00
<b>X</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>66.768.000,00</b>	<b>66.768.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	33.384.000,00	33.384.000,00	100,00
2	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	33.384.000,00	33.384.000,00	100,00
<b>XI</b>	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

## Pelaksanaan Program dan Kegiatan

### 1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan :

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan. Output dari kegiatan ini adalah optimalisasi tugas dan fungsi RT, RW dan LPM sebanyak 6 kelurahan di Kecamatan RasanaE Barat
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya biaya operasional motor sampah yang ada di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan RasanaE Barat sebanyak 6

### 2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan :

Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 6 kelurahan di Kecamatan RasanaE Barat

**3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** dengan kegiatan :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 6 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 6 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di 6 kelurahan dan kecamatan.
- Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di 6 kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ).Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) di Kecamatan RasanaE Barat.

**4. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan**dengan kegiatan :

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan.Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat di 6 kelurahan di kecamatan RasanaE Barat

**5. Program peningkatan sarana/prasaranan dan penataanadministrasi pemerintah kelurahan**dengan kegiatan :

Penyusunan Profil Kelurahan. . Output dari kegiatan ini adalah Tersedianya profil kelurahan di 6 kelurhandi kecamatan RasanaE Barat

**6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru**dengan kegiatan :

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan RasanaE Barat.
- Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan . Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di kecamatan RasanaE Barat

**7. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat**dengan kegiatan :

Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kgiatan kelurahan siaga di 6 kelurahan di kecamatan RasanaE Barat

## b. Kecamatan RasanaE Timur

Pada tahun 2017 Kecamatan RasanaE Timur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.904.086.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.877.774.515,00 (98,62%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan RasanaE Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.185. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan RasanaE Timur Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	<b>KECAMATAN RASANA E TIMUR</b>	<b>1.904.086.300,00</b>	<b>1.877.774.515,00</b>	<b>98,62</b>
<b>I</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>302.802.400,00</b>	<b>300.360.000,00</b>	<b>99,19</b>
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	102.352.200,00	101.197.000,00	98,87
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	109.922.000,00	109.722.000,00	99,82
3	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	77.853.200,00	77.116.000,00	99,05
4	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	12.675.000,00	12.325.000,00	97,24
<b>II</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>688.670.800,00</b>	<b>669.679.215,00</b>	<b>97,24</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.430.000,00	26.731.515,00	90,83
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.322.400,00	14.420.000,00	88,34
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.945.600,00	114.205.000,00	89,26
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	49.650.000,00	49.650.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	114.815.450,00	114.815.300,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.742.350,00	37.740.500,00	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	24.165.000,00	23.716.500,00	98,14
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.560.000,00	7.490.000,00	99,07
10	Penyediaan makanan dan minuman	36.160.000,00	36.160.000,00	100,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	174.700.000,00	174.600.400,00	99,94
12	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	62.680.000,00	62.650.000,00	99,95
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>179.738.800,00</b>	<b>175.637.000,00</b>	<b>97,72</b>

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	22.975.000,00	22.975.000,00	100,00
2	Pengadaan peralatan gedung kantor	48.250.000,00	44.250.000,00	91,71
3	Pengadaan mebeleur	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	21.625.000,00	21.533.000,00	99,57
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.388.800,00	58.383.000,00	99,99
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.500.000,00	17.496.000,00	99,98
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.250.000,00	3.250.000,00	100,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.425.000,00	3.425.000,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	5.525.000,00	5.525.000,00	100,00
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	5.400.000,00	5.400.000,00	100,00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>56.280.000,00</b>	<b>56.070.000,00</b>	<b>99,63</b>
1	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	56.280.000,00	56.070.000,00	99,63
<b>VI</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>81.620.000,00</b>	<b>81.620.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	3.620.000,00	3.620.000,00	100,00
2	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00
<b>VII</b>	<b>Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Masyarakat</b>	<b>307.065.300,00</b>	<b>307.065.300,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	307.065.300,00	307.065.300,00	100,00
<b>VIII</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>184.174.500,00</b>	<b>183.610.000,00</b>	<b>99,69</b>
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	114.174.500,00	113.610.000,00	99,51
2	Unit kegiatan bersumber daya masyarakat	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
<b>IX</b>	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	<b>86.134.500,00</b>	<b>86.133.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	80.634.500,00	80.633.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

## **Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

### **1. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dengan kegiatan :**

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 7 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 7 kelurahan dan kecamatan.
- Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di 7 kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ).Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM ) di Kecamatan RasanaE Timur.

### **2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan kegiatan :**

Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 7 kelurahan di Kecamatan RasanaE Timur

### **3. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan :**

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan RasanaE Timur.
- Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan . Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan di kecamatan RasanaE Timur

### **4. Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan dengan kegiatan :**

Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ.Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di 7 kelurahan dan kecamatan.

### **5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan kegiatan :**

- Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat di 7 kelurahan di kecamatan RasanaE Timur
- Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kelurahan siaga di 7 kelurahan di kecamatan RasanaE Timur

6. **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan** dengan kegiatan :

- Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan informasi kependudukan di 7 kelurahan di kecamatan RasanaE Timur
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya biaya operasional motor sampah yang ada di tingkat kelurahan yang ada di kecamatan RasanaE Timur sebanyak 7 kelurahan.

**c. Kecamatan Asakota**

Pada tahun 2017 Kecamatan Asakota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 685.374.200,00 dengan realisasi sebesar Rp. 630.083.100,00 (91,93%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Asakota dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.186. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Asakota Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	<b>KECAMATAN ASAKOTA</b>	<b>685.374.200,00</b>	<b>630.083.100,00</b>	<b>91,93</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>540.766.100,00</b>	<b>504.311.000,00</b>	<b>93,26</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.048.000,00	12.550.300,00	41,77
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	15.500.000,00	11.813.000,00	76,21
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	93.492.700,00	90.926.400,00	97,26
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	31.250.100,00	31.250.100,00	100,00
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	62.921.600,00	60.182.400,00	95,65
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21.470.700,00	19.672.400,00	91,62
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11.334.500,00	11.334.500,00	100,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.050.000,00	20.050.000,00	100,00
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.600.000,00	2.500.000,00	69,44

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
11	Penyediaan makanan dan minuman	28.682.500,00	22.846.000,00	79,65
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	138.916.000,00	138.845.900,00	99,95
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	68.000.000,00	66.840.000,00	98,29
14	Penyediaan Jasa Kebersihan Halaman Kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>104.229.600,00</b>	<b>85.393.600,00</b>	<b>81,93</b>
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	10.400.000,00	7.550.000,00	72,60
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.045.000,00	2.045.000,00	100,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.774.200,00	27.250.600,00	91,52
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.710.400,00	41.251.000,00	75,40
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.300.000,00	7.297.000,00	99,96
<b>III</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>18.570.500,00</b>	<b>18.570.500,00</b>	<b>100,00</b>
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	16.270.500,00	16.270.500,00	100,00
2	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>21.808.000,00</b>	<b>21.808.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	9.958.000,00	9.958.000,00	100,00
2	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat	11.850.000,00	11.600.000,00	97,89

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Untuk kecamatan Asakota, seperti yang tergambar pada table tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan adalah :

**Program Penataan Daerah Otonomi Baru** dengan kegiatan :

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan Asakota.



- Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat . Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat di kecamatan Asakota

#### d. Kecamatan Mpunda

Pada tahun 2017 Kecamatan Mpunda dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.266.607.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.205.192.916,00 (97,29%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mpunda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.187. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Mpunda Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	<b>KECAMATAN MPUNDA</b>	<b>2.266.607.100,00</b>	<b>2.205.192.916,00</b>	<b>97,29</b>
<b>I</b>	<b>Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>867.782.000,00</b>	<b>865.710.000,00</b>	<b>99,76</b>
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	139.237.000,00	139.030.000,00	99,85
2	Pelaksanaan Lomba Kelurahan	202.926.000,00	201.061.000,00	99,08
3	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
4	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	115.619.000,00	115.619.000,00	100,00
5	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>716.458.800,00</b>	<b>672.729.516,00</b>	<b>93,90</b>
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	78.855.500,00	64.072.052,00	81,25
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.850.000,00	14.774.300,00	87,68
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	153.059.000,00	144.297.000,00	94,28
4	Penyediaan alat tulis kantor	123.644.000,00	121.330.750,00	98,13
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.318.500,00	26.318.500,00	100,00
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	23.299.700,00	23.294.600,00	99,98
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14.280.000,00	13.675.000,00	95,76

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
8	Penyediaan bahan logistik kantor	12.723.100,00	12.723.100,00	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	51.980.000,00	48.269.000,00	92,86
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	186.289.000,00	179.585.214,00	96,40
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	29.160.000,00	24.390.000,00	83,64
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>320.923.000,00</b>	<b>306.143.350,00</b>	<b>95,39</b>
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	129.413.000,00	120.165.000,00	92,85
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	121.859.000,00	120.957.000,00	99,26
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	45.877.000,00	41.309.350,00	90,04
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	23.774.000,00	23.712.000,00	99,74
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>62.894.300,00</b>	<b>62.860.300,00</b>	<b>99,95</b>
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.614.000,00	3.614.000,00	100,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.460.300,00	4.460.300,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	32.886.500,00	32.852.500,00	99,90
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	21.933.500,00	21.933.500,00	100,00
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>99.850.000,00</b>	<b>99,85</b>
1	Kunjungann Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	100.000.000,00	99.850.000,00	99,85
<b>VI</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>44.270.500,00</b>	<b>44.270.500,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	22.412.000,00	22.412.000,00	100,00
2	Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan	21.858.500,00	21.858.500,00	100,00
<b>VII</b>	<b>Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>154.278.500,00</b>	<b>153.629.250,00</b>	<b>99,58</b>
1	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	154.278.500,00	153.629.250,00	99,58

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Untuk kecamatan Asakota, seperti yang tergambar pada table tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. **Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa** dengan kegiatan :

- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa. Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 10 kelurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Lomba Kelurahan Output dari kegiatan ini Terhimpunnya aspirasi masyarakat melalui musyawarah pembangunan di 106 elurahan dan kecamatan.
- Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya lomba STQ/MQ di 10 kelurahan dan kecamatan.
- Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga. . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemberdayaan PKK di 10 kelurahan dan kecamatan
- Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kecamatan Mpunda

2. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan kegiatan :

Kunjungann Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 10 kelurahan di Kecamatan Mpunda.

3. **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** dengan kegiatan :

- Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan di kecamatan Mpunda.
- Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan. Out Put dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan di kecamatan Mpunda.

4. **Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan** dengan kegiatan :

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat di 10 kelurahan di kecamatan Mpunda.

**e. Kecamatan Raba**

Pada tahun 2017 Kecamatan Raba dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.309.006.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.303.964.551,00 (99,61%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Raba dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.188. Realisasi pelaksanaan program dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Raba Tahun 2017

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
	<b>KECAMATAN RABA</b>	<b>1.309.006.100,00</b>	<b>1.303.964.551,00</b>	<b>99,61</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>825.123.100,00</b>	<b>820.081.801,00</b>	99,39
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52.340.000,00	48.757.887,00	93,16
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.175.000,00	17.846.200,00	93,07
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	118.500.000,00	118.500.000,00	100,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	45.878.000,00	45.878.000,00	100,00
5	Penyediaan alat tulis kantor	178.803.750,00	178.803.500,00	100,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	53.736.750,00	53.736.750,00	100,00
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	31.244.500,00	31.244.500,00	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8.060.000,00	8.060.000,00	100,00
9	Penyediaan makanan dan minuman	45.590.000,00	45.590.000,00	100,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	227.215.100,00	227.214.964,00	100,00
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	44.580.000,00	44.450.000,00	99,71
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>231.933.000,00</b>	<b>231.932.750,00</b>	100,00
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	89.000.000,00	89.000.000,00	100,00
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	69.250.000,00	69.250.000,00	100,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	
			Rp.	%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	52.983.000,00	52.982.750,00	100,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>42.380.000,00</b>	<b>42.380.000,00</b>	100,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	11.380.000,00	11.380.000,00	100,00
2	Pengadaan Pakaian Olah Raga	31.000.000,00	31.000.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>51.450.000,00</b>	<b>51.450.000,00</b>	100,00
1	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00
2	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
3	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	28.250.000,00	28.250.000,00	100,00
4	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00
<b>V</b>	<b>Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	100,00
1	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	110.000.000,00	110.000.000,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>48.120.000,00</b>	<b>48.120.000,00</b>	100,00
1	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat	48.120.000,00	48.120.000,00	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Untuk kecamatan Asakota, seperti yang tergambar pada table tersebut diatas bahwa selain program dan kegiatan yang bersifat rutin, program dan kegiatan yang masuk dalam Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan adalah :

1. **Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah** dengan kegiatan :

Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kunjungan kerja/inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 10 kelurahan di Kecamatan Raba.

5. **Program Penataan Daerah Otonomi Baru** dengan kegiatan :

Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat . Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Masyarakat di kecamatan Raba.

## PENGAWASAN

### a. Inspektorat

#### Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Inspektorat Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **3.474.311.250,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah ) untuk melaksanakan urusan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. **3.403.719.091,00** (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau 97,97% dari total alokasi anggaran. Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.189. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>912.428.250,00</b>	<b>910.770.999,00</b>	<b>99,82</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	51.525.000,00	51.075.000,00	99,13
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.500.000,00	17.868.428,00	96,59
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6.600.000,00	6.580.000,00	99,70
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	500.000,00	362.000,00	72,40
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	63.735.000,00	63.712.000,00	99,96
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	51.588.000,00	51.584.000,00	99,99
7	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	11.993.000,00	99,94
8	Penyediaan alat tulis kantor	44.383.500,00	44.382.000,00	100,00
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	54.000.000,00	53.994.500,00	99,99
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	45.240.000,00	45.240.000,00	100,00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.500.000,00	11.470.000,00	99,74
12	Penyediaan makanan dan minuman	48.500.000,00	48.494.500,00	99,99
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	504.356.750,00	504.015.571,00	99,93
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>42.430.000,00</b>	<b>42.329.197,00</b>	<b>99,76</b>
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	16.330.000,00	16.330.000,00	100,00

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.000.000,00	8.996.000,00	99,96
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	17.100.000,00	17.003.197,00	99,43
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>36.750.000,00</b>	<b>36.750.000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	19.600.000,00	19.600.000,00	100,00
2	Pengadaan pakaian olah raga	17.150.000,00	17.150.000,00	100,00
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>111.800.000,00</b>	<b>100.569.428,00</b>	<b>89,95</b>
1	Pendidikan dan pelatihan formal	96.000.000,00	84.792.228,00	88,33
2	Pelaksanaan Penilaian AKJG	15.800.000,00	15.777.200,00	99,86
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>136.217.500,00</b>	<b>105.385.000,00</b>	<b>77,37</b>
1	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	12.725.000,00	11.951.000,00	93,92
2	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	34.040.000,00	33.268.000,00	97,73
3	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	21.500.000,00	20.483.000,00	95,27
4	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	24.335.000,00	23.978.000,00	98,53
5	Review LAKIP Kota Bima	16.205.000,00	15.705.000,00	96,91
6	Review RKA	27.412.500,00	-	0,00
<b>VI</b>	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>	<b>37.664.251,00</b>	<b>37.518.751,00</b>	<b>99,61</b>
1	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37.664.251,00	37.518.751,00	99,61
<b>VII</b>	<b>Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH</b>	<b>1.993.416.337,00</b>	<b>1.985.546.502,00</b>	<b>99,61</b>
1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	767.550.000,00	762.380.000,00	99,33
2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	286.106.128,00	285.996.128,00	99,96
3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	281.250.000,00	280.952.000,00	99,89
4	Inverisasi temuan pengawasan	23.585.000,00	23.286.000,00	98,73
5	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	341.625.000,00	340.325.000,00	99,62
6	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	142.010.209,00	141.987.874,00	99,98
7	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	32.575.000,00	31.950.000,00	98,08

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
8	Pemantauan LHKASN	118.715.000,00	118.669.500,00	99,96
<b>VIII</b>	<b>Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan</b>	<b>133.764.912,00</b>	<b>127.226.214,00</b>	<b>95,11</b>
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	53.365.000,00	50.855.000,00	95,30
2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	56.399.912,00	56.399.912,00	100,00
3	Bimtek pengawasan operasional	24.000.000,00	19.971.302,00	83,21
<b>IX</b>	<b>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan</b>	<b>42.140.000,00</b>	<b>37.633.000,00</b>	<b>89,30</b>
1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	42.140.000,00	37.633.000,00	89,30
<b>X</b>	<b>Program mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>19.990.000,00</b>	<b>72,17</b>
1	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	27.700.000,00	19.990.000,00	72,17
<b>Jumlah</b>		<b>3.474.311.250,00</b>	<b>3.403.719.091,0</b>	<b>97,97</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Output penting dari pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tersaji pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1) Program Pelayanan Administrasi Pekantoran**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. **912.428.250,00** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **910.770.999,00** atau sebesar 99,827%

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Pemenuhan kebutuhansurat menyurat selama 12 bulan,
- b) Pemenuhan kebutuhan untuk komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan,
- c) Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan
- d) Penyediaan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan,
- e) Pelaksanaan penatausahaan keuangan selama 12bulan
- f) Pelaksanaan kebersihan kantor selama 12 bulan,
- g) Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan,
- h) Pemenuhan kebutuhanalat tulis kantor selama 12 bulan
- i) Pemenuhan kebutuhan penyusunan laporan dan dokumen selama 12 bulan



- j) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa Scanner 1 unit dan laptop 5 unit.
- k) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 12 bulan
- l) Penyediaan makanan dan minuman harian tamu selama 12 bulan,
- m) Pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi pengawasan sebanyak 15 kali setiap tahun.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran.

## **2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.430.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.329.197,00 atau sebesar 99,76%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Penyediaan peralatan kantor berupa AC sebanyak 2 unit
- b) Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 1 tahun
- c) Penyediaan pemeliharaan dinas/operasional selama 1 tahun

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

## **3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 36.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.750.000,00 atau sebesar 100%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- a) Pelaksanaan pengadaan pakaian dinas 59 paket
- b) Pelaksanaan pengadaan pakaian olah raga 59 paket

## **4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 111.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 100.569.428,00 atau sebesar 89,95%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

- c) Terlaksananya diklat fungsional auditor ahli sebanyak 21 orang,
- d) Terlaksananya penilaian AKJG bagi 3 orang tenaga fungsional,

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah peningkatan sumber daya aparatur melalui diklat jabatan fungsional.

**5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 136.217.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 105.385.000,00 atau sebesar 77,37%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Dokumen laporan keuangan akhir tahun lingkup Inspektorat Kota Bima sebanyak 1 (satu) dokumen.
- b) Dokumen perencanaan lingkup Inspektorat Kota Bima sebanyak 4 (empat) jenis dokumen, yang terdiri dari dokumen Renja SKPD, dokumen DPA SKPD, dokumen DPPA SKPD dan dokumen RKA SKPD.
- c) Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD lingkup Inspektorat Kota Bima masing-masing sebanyak 1 (satu) dokumen.
- d) Pelaksanaan evaluasi terhadap LAKIP Pemerintah Kota Bima.
- e) Pelaksanaan reviu LAKIP Pemerintah Kota Bima
- f) Pelaksanaan reviu RKA OPD Pemerintah Kota Bima

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah: Meningkatnya kualitas pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan serta peningkatan kualitas perencanaan SKPD lingkup Inspektorat Kota Bima dalam rangka terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

**6) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 37.664.251,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.518.751,00 atau sebesar 99,61%.

Pada program ini ada satu kegiatan yang dilaksanakan yaitu Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah SKPD dapat membuat Laporan Keuangan sesuai dengan SAP dan SPIP.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

**7) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 1.993.416.337,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.985.546.502,00 atau sebesar 99,61%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala terhadap obrik selama 1 tahun.

- b) Pelaksanaan Penanganan kasus pengaduan masyarakat sebanyak 45 obrik setiap 1 tahun
- c) Pelaksanaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH mrelalui TimPengawal dan Pengaman Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah TP4D Kota Bima selama 1 tahun
- d) Pelaksanaan inventarisasi temuan pengawasan 1 selama 1 tahun
- e) Pelaksanaan Pemantauan tindaklanjut LHP terhadap 80 obrik selama 12 bulan
- f) Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih konprehensif selama 1 tahun
- g) Pelaksanaan evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 80 obrik selama 1 tahun
- h) Pelaksanaan monitoring LHKASN pada OPD lingkup Pemerintah Kota Bima

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah menurunnya tingkat kerugian daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

**8) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 133.764.912,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 127.226.214,00 atau sebesar 95,11%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- 6. Pelaksanaan pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur setiap tahun.
- 7. Pelaksanaan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja setiap tahun.
- 8. Pelaksanaan bintek pengawasan operasional dalam satu tahun

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan.

**9) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan**

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 42.140.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.633.000,00 atau sebesar 89,30%.

Pada program ini dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan. Adapun Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut tersusunnya naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan sebanyak 1 dokumen

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah meningkatnya pelayanan dalam pengawasan sesuai dengan standar baku pengawasan.

### 10) Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp. 27.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.990.000,00 atau sebesar 72,17%.

Pada program ini dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat. Adapun Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut pelaksanaan pembentukan unit penanganan pengaduan masyarakat.

Hasil (outcome) dari terbentuknya unit yang menangani pengaduan masyarakat.

#### b. Perencanaan Dan Penelitian Pengembangan

Urusan perencanaan pembangunan pada tahun anggaran 2017 mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 6.946.217.800,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.920.886.693,00 atau sebesar 99,63 %.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja, serta permasalahan dan solusi terkait pelaksanaannya dapat diuraikan sebagai berikut.

##### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan wajib perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bima melalui sejumlah program dan kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.189. Program/ Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.500.816.927,00</b>	<b>1.493.801.671,00</b>	<b>99,53</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	57.330.000,00	57.280.000,00	99,91
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45.300.000,00	39.296.161,00	86,75
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.100.000,00	14.100.000,00	100
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80.730.000,00	80.730.000,00	100
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	36.450.000,00	36.450.000,00	100
7	Penyediaan alat tulis kantor	86.040.000,00	86.040.000,00	100
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	65.600.000,00	65.600.000,00	100
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.979.000,00	20.979.000,00	100
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	75.450.000,00	75.240.000,00	99,72
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	65.500.000,00	65.500.000,00	100
12	Penyediaan makanan dan minuman	108.000.000,00	108.000.000,00	100
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	795.132.927,00	794.771.510,00	99,95

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	49.005.000,00	48.615.000,00	99,20
II	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>358.356.000,00</b>	<b>358.301.000,00</b>	<b>99,98</b>
1	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	91.160.000,00	91.160.000,00	100
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	148.500.000,00	148.445.000,00	99,96
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	118.696.000,00	118.696.000,00	100
III	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
1	Pengadaan Pakaian Olah Raga	0,00	0,00	0
IV	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>334.309.500,00</b>	<b>334.309.500,00</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	75.683.000,00	75.683.000,00	100
2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	37.978.000,00	37.978.000,00	100
3	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	56.065.500,00	56.065.500,00	100
4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	100.283.000,00	100.283.000,00	100
5	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	64.300.000,00	64.300.000,00	100
V	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>138.793.300,00</b>	<b>138.718.077,00</b>	<b>99,94</b>
1	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	102.253.300,00	102.178.077,00	99,93
2	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian	36.540.000,00	36.540.000,00	100
VI	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>	<b>602.650.000,00</b>	<b>602.060.240,00</b>	<b>99,90</b>
1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	207.335.000,00	207.278.273,00	99,97
2	Koordinasi Program NUSP - Phase 2	97.665.000,00	97.387.973,00	99,72
3	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	297.650.000,00	297.393.994,00	99,91
VII	<b>Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar</b>	<b>589.800.000,00</b>	<b>586.233.495,00</b>	<b>99,39</b>
1	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	88.000.000,00	88.000.000,00	100
2	Perencanaan Pengembangan Kota Hijau	345.800.000,00	343.778.623,00	99,42
3	Penyusunan KLHS RPJMD	156.000.000,00	154.454.872,00	99,01
VIII	<b>Program perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1.971.618.572,00</b>	<b>1.967.941.409,00</b>	<b>99,81</b>
1	Penyusunan rancangan RKPD	181.586.868,00	181.586.868,00	100
2	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	464.269.705,00	464.269.705,00	100
3	Penetapan RKPD	161.453.500,00	161.453.500,00	100
4	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	210.668.000,00	210.668.000,00	100
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	154.446.000,00	153.741.336,00	99,54
6	Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	200.000.000,00	197.946.769,00	98,97
7	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	29.564.500,00	29.564.500,00	100
8	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	122.025.000,00	121.673.325,00	99,71
9	Rivew Perda RPJMD	250.000.000,00	249.744.635,00	99,90
10	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan	50.000.000,00	49.921.303,00	99,84

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Korupsi			
11	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	33.975.000,00	33.829.000,00	99,57
12	E - Planning	113.630.000,00	113.542.468,00	99,92
IX	<b>Program perencanaan pembangunan ekonomi</b>	<b>245.950.000,00</b>	<b>244.770.000,00</b>	<b>99,52</b>
1	Pengembangan Ekonomi Lokal	86.650.000,00	86.510.000,00	99,84
2	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100.000.000,00	100.000.000,00	100
3	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	59.300.000,00	58.260.000,00	98,25
XI	<b>Program perencanaan sosial dan budaya</b>	<b>754.938.500,00</b>	<b>749.812.797,00</b>	<b>99,32</b>
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	362.236.205,00	357.127.700,00	98,59
2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	77.779.271,00	77.769.271,00	99,99
3	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	130.707.198,00	130.700.000,00	99,99
4	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra	87.352.826,00	87.352.826,00	100
5	Penyusunan Profil Kelurahan	96.863.000,00	96.863.000,00	100
XII	<b>Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam</b>	<b>448.985.000,00</b>	<b>444.938.504,00</b>	<b>99,09</b>
1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah, SDA dan Ekonomi	351.150.000,00	347.113.504,00	98,85
2	Identifikasi dan Sosialisasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	49.985.000,00	49.975.000,00	99,98
3	Pemetaan Teknologi Tepat Guna	47.850.000,00	47.850.000,00	100
Jumlah Anggaran		6.946.217.800,00	6.920.886.693,00	99,63

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis urusan perencanaan pembangunan ini menghasilkan beberapa keluaran (*output*) penting, yang dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2.190. Output Program/Kegiatan Perencanaan Sektor Strategis

No	Program/Kegiatan	Output
1	2	3
1	• Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen Rancangan RKPD
2	• Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Forum musrenbang RKPD
3	• Penetapan RKPD	Perwali tentang RKPD Kota Bima
4	• Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Dokumen LKPJ Walikota Bima Tahun 2016
5	• Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen Laporan Triwulan
6	• Perencanaan Pengendalian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)	Rapat koordinasi DBH Cukai Tembakau dan Sosialisasi DBH Cukai Tembakau

No	Program/Kegiatan	Output
1	2	3
7	• Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah	Pengendalian tugas pembantuan oleh Tim
8	• Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang	Rapat koordinasi Penanaman Modal dan Litbang
9	• Sinkronisasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Review dokumen perencanaan OPD bidang koordinasi pembangunan ekonomi
10	• Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
11	• Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana, SDA, dan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana, SDA, dan Ekonomi
12	• Reviu PERDA RPJMD	Review dokumen PERDA RPJMD
13	• Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dokumen Laporan triwulan
14	• Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima	Dokumen rencana umum penelitian dan pengembangan Kota Bima
15	• E-Planning	Bimtek E - Palnning
16	• Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Laporan
17	• Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan
18	• Penyusunan Rencana Kerja/RKA/DPA/DPPA SKPD	Dokumen Laporan
19	• Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)	Dokumen program penanggulangan kemiskinan di Kota Bima
20	• Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Rapat koordinasi dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan
21	• Pengembangan Ekonomi Lokal	Rapat koordinasi
22	• Sinkronisasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Review dokumen perencanaan OPD bidang koordinasi pembangunan ekonomi
23	• Sinkronisasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Review dokumen perencanaan OPD bidang koordinasi pembangunan Sosial Budaya
24	• Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah	Dokumen
25	• Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Rapat koordinasi dan sosialisasi percepatan pembangunan sanitasi pemukiman (PPSP)
26	• Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Dokumen laporan
27	• Koordinasi Program NUSP - Phase 2	Rapat koordinasi NUSP – phase 2

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kota Bima Tahun 2017

## Keuangan

### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan tahun 2017 didukung oleh 3 program dan 37 kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 14.860.647.155,- terealisasi sebesar Rp. 14.479.137.401,- atau 97,43%. Adapun realisasi program dan kegiatan BPKAD Kota Bima Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD  
Kota Bima Tahun 2017

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.984.964.298</b>	<b>2.899.564.183</b>	<b>97,14</b>
	Penyediaan jasa surat menyurat	67.720.000	54.547.747	80,55
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48.000.000	38.610.695	80,44
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	66.700.000	47.340.399	70,98
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	469.752.000	444.028.350	94,52
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.950.000	29.843.000	96,42
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	79.000.000	78.945.000	99,93
	Penyediaan alat tulis kantor	296.800.000	296.554.000	99,92
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	161.250.000	161.248.350	100,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	11.000.000	10.994.247	99,95
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantoe	189.608.000	182.108.000	96,04
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	57.000.000	52.260.000	91,68
	Penyediaan makan dan minum	468.900.000	465.001.867	99,17
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	914.254.298	914.212.528	100,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	124.030.000	123.870.000	99,87
2	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>442.872.800</b>	<b>424.149.135</b>	<b>95,77</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	54.000.000	48.720.000	90,22
	Pengadaan peralatan gedung kantor	11.000.000	10.500.000	95,45
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	277.872.800	264.929.135	95,34
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.000.000	50.000.000	100,00
4	<b>Program peningkatan pengembangan sistem</b>	<b>1.032.650.626</b>	<b>989.074.694</b>	<b>95,78</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi	72.960.151	72.960.000	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	179.309.000	177.562.100	99,03
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	130.170.626	130.161.626	99,99
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	457.985.849	416.181.068	90,87
	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	131.850.000	131.834.900	99,99
	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	60.375.000	60.375.000	100,00



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>5</b>	<b>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan</b>	<b>6.038.986.776,15</b>	<b>5.929.425.621</b>	<b>98,19</b>
	penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1.287.842.000	1.281.950.766	99,54
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	232.464.000	232.444.000	99,99
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	945.876.500	943.334.500	99,73
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran	383.876.500	383.311.950	99,85
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang	157.779.093	157.665.143	99,93
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran	116.543.876	115.784.376	99,36
	Penyusunan Sistem Informasi pengelolaan keuangan daerah	221.360.000	209.660.000	94,71
	Bimbingan Teknis implementasi paket regulasi tentang	128.888.000	91.228.104	70,78
	Pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah	29.765.000	29.465.000	98,99
	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran	411.545.000	410.045.000	99,64
	Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah	1.168.384.700	1.151.120.000	98,52
	Penyusunan laporan DAK	96.000.000	96.000.000	100,00
	Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai	367.180.000	366.340.182	99,77
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	220.994.107	200.136.100	90,56
	Pelaksanaan Proses TPTGR Aset/Barang Milik Daerah	270.497.000	260.940.500	96,47
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan pengelolaan aset/barang milik</b>	<b>1.600.490.039</b>	<b>1.585.453.203</b>	<b>99,06</b>
	Penyusunan sistem dan prosedur aset/barang daerah	200.871.039	200.816.400	99,97
	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	279.766.000	279.185.100	99,79
	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	104.500.000	100.581.300	96,25
	penyusunan data inventarisasi daerah	335.727.000	331.609.600	98,77
	Pendataan ulang/pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan	92.843.000	92.733.000	99,88
	Penyusunan laporan tahunan aset/barang daerah	93.725.000	93.222.600	99,46
	Penyusunan analisa kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan	144.220.000	142.225.300	98,62
	Pemindah tanganan Barang Milik Daerah	240.080.000	239.928.000	99,94
	Bimbingan Teknis SIMDA BMD	108.758.000	105.151.903	96,68
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan</b>	<b>2.810.682.616</b>	<b>2.704.470.565</b>	<b>96,22</b>
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan	100.558.000	100.318.500	99,76
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan	206.585.700	201.765.606	97,67

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Sosialisasi dan pembekalan jurupungut PBB	78.849.000	78.296.500	99,30
	Penagihan PBB pada seluruh kelurahan	539.577.500	537.993.000	99,71
	Pendataan ulang/pemutahiran data PBB sektor perkotaan	281.964.250	278.155.473	98,65
	Pengelolaan dan Penagihan Pajak daerah/Retribusi daerah/sewa	325.009.000	321.835.938	99,02
	Pemeliharaan Data dan system PBB	240.500.000	236.072.600	98,16
	Sosialisasi pajak daerah dan Retribusi daerah	90.201.000	81.565.450	90,43
	Uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah	57.235.666	42.010.000	73,40
	Pendapatan Objek pajak dan retribusi daerah dan lain-lain	199.578.000	186.894.109	93,64
	penetapan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan	206.089.000	201.066.999	97,56
	Penata usahaan/rekonsiliasi pendapatan daerah	392.493.000	349.438.390	89,03
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah	92.042.500	89.058.000	96,76
	<b>TOTAL</b>	<b>14.910.656.155</b>	<b>14.532.137.401</b>	<b>97,46</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bima TA 2017 (data sebelum audit BPK)

Adapun realisasi pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut:

**1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,**

didukung oleh 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.038.986.776,15 dan terealisasi sebesar Rp. 5.929.425.621,00 atau 98,19% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:

- a) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.287.842.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.281.950.766,00 atau mencapai 99,54%. Output kegiatan ini yaitu dokumen Rancangan PERDA APBD 2017.
- b) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 232.464.000,15 terealisasi sebesar Rp. 232.444.000,00 atau mencapai 99,99%. Output kegiatan ini yaitu Peraturan walikota tentang penjabaran APBD 2017.
- c) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 945.876.500,00 terealisasi sebesar Rp. 943.334.500,00 atau mencapai 99,73%, output kegiatan ini yaitu dokumen PERDA tentang Perubahan APBD 2017.

- d) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 383.876.500,00 terealisasi sebesar Rp. 383.311.950,00 atau mencapai 99,85%, output kegiatan ini yaitu dokumen PERWALI tentang penjabaran perubahan APBD 2017.
- e) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 157.779.093,00 terealisasi sebesar Rp. 157.665.143,00 atau mencapai 99,93%, output kegiatan ini yaitu dokumen raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
- f) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.534.876,00 terealisasi sebesar Rp. 115.784.376,00 atau mencapai 99,36%, output kegiatan ini yaitu dokumen perwali tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017.
- g) Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 221.360.000,00 terealisasi sebesar Rp. 209.660.000,00 atau mencapai 94,71%, output kegiatan ini yaitu Dokumen SIKD.
- h) Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.888.000,00 terealisasi sebesar Rp. 91.228.104,00 atau mencapai 70,78%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan daerah (akuntansi) terhadap 180 peserta.
- i) Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.765.000,00 terealisasi sebesar Rp. 29.465.000,00 atau mencapai 98,99%, output kegiatan ini yaitu laporan penyertaan modal pemerintah daerah.
- j) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pedoman anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.545.000,00 terealisasi sebesar Rp. 410.045.000,00 atau mencapai 99,64%, output kegiatan ini yaitu dokumen Perwali tentang pedoman anggaran.
- k) Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.168.384.700,00 terealisasi sebesar Rp. 1.151.120.000,00 atau mencapai 98,52%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan daerah.
- l) Penyusunan laporan DAK dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 96.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 96.000.000,00 atau mencapai 100%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya pelaporan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.

- m) Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 367.180.000,00 terealisasi sebesar Rp. 366.340.182,00 atau mencapai 99,77%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya penatausahaan gaji pegawai (12 bulan dan 12 laporan).
- n) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220.994.107,00 terealisasi sebesar Rp. 200.136.100,00 atau mencapai 90,56 %, output kegiatan ini yaitu laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- o) Pelaksanaan proses TPTGR Aset/Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 270.497.000,00 terealisasi sebesar Rp. 260.940.500,00 atau mencapai 96,47%, output kegiatan ini yaitu penyelesaian kasus kerugian daerah melalui kegiatan sidang kasus kerugian daerah dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi penyelesaian kerugian daerah (APH, BPKP dan BPK).

**2) Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah**, didukung oleh 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.600.490.039,00 dan terealisasi sebesar Rp. 1.585.453.203,00 atau 99,06% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:

- a) Penyusunan sistem dan prosedur Aset/Barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.871.039,00 terealisasi sebesar Rp. 200.816.400,00 atau mencapai 99,97%, output kegiatan ini yaitu Perda Pengelolaan BMD.
- b) Peningkatan manajemen aset/barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 279.766.000,00 terealisasi sebesar Rp. 279.185.100,00 atau mencapai 99,79%, output kegiatan ini yaitu dokumen Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah.
- c) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.581.300,00 atau mencapai 96,25%, output kegiatan ini yaitu laporan pemanfaatan barang milik daerah.
- d) Penyusunan data inventarisasi aset daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.727.000,00 terealisasi sebesar Rp. 331.609.600,00 atau mencapai 98,77%, output kegiatan ini yaitu Dokumen hasil pendataan BMD hasil serah terima/hibah pusat/provinsi/pihak ketiga, laporan cek fisik pemasangan KIR dan stiker barang SKPD, laporan Inventarisasi BMD terkait perubahan struktur organisasi dan laporan penertiban penggunaan BMD.
- e) Pendataan ulang/pemutakhiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan bangunan pemerintah kota bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.843.000,00 terealisasi sebesar Rp. 92.733.000,00 atau mencapai 99,88%, output kegiatan ini yaitu 3 dokumen (laporan penertiban pemanfaatan barang milik

pemerintah daerah, laporan pemasangan plang kepemilikan tanah dan laporan hasil pendataan gedung/bangunan milik pemerintah Kota Bima).

- f) Penyusunan laporan tahunan aset/barang daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.725.000,00 terealisasi sebesar Rp. 93.222.600,00 atau mencapai 99,46%, output kegiatan ini yaitu laporan neraca asset Pemerintah Kota Bima.
- g) Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.220.000,00 terealisasi sebesar Rp. 142.225.300,00 atau mencapai 98,62%, output kegiatan ini yaitu dokumen rencana kebutuhan pengadaan dan rencana kebutuhan pemeliharaan BMD.
- h) Pemindah Tanganan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.080.000,00 terealisasi sebesar Rp. 239.928.000,00 atau mencapai 99,94%, output kegiatan ini yaitu dokumen penilaian / penaksiran harga barang milik pemerintah kota bima terhadap sisa hasil bongkaran.
- i) Bimbingan Teknis SIMDA BMD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 108.758.000,00 terealisasi sebesar Rp. 105.151.903,00 atau mencapai 96,68%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya Bimtek Simda BMD.

**3) Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, didukung oleh 13 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.810.682.616,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.701.470.565,00 atau 96,11% dari total anggaran yang tersedia. Adapun kegiatan dari program ini yaitu:

- a) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.558.000,00 terealisasi sebesar Rp. 100.318.500,00 atau mencapai 99,76%, output kegiatan ini yaitu Perwali tentang SOP pengelolaan Pajak Daerah.
- b) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.585.700,00 terealisasi sebesar Rp. 201.765.606,000 atau mencapai 97,67%, output kegiatan ini yaitu dokumen Intensifikasi dan Eksentifikasi Potensi PAD dan Dokumen Penagihan Pajak Daerah.
- c) Sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 78.849.000,00 terealisasi sebesar Rp. 78.296.500,00 atau mencapai 99,30%, output kegiatan ini yaitu dokumen PAD dan terlaksananya sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBB.
- d) Penagihan PBB pada seluruh kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 539.577.500,00 terealisasi sebesar Rp. 534.993.000,00 atau mencapai 99,15%, output kegiatan ini yaitu laporan penagihan PBB pada seluruh kelurahan.

- e) Pendataan ulang/pemutakhiran data PBB sektor perkotaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 281.964.250,00 terealisasi sebesar Rp. 278.155.473,00 atau mencapai 98,65%, output kegiatan ini yaitu dokumen hasil penilaian individu PBB serta laporan verifikasi dan pendataan PBB.
- f) Pengelolaan dan penagihan pajak daerah/retribusi daerah/sewa aset daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 325.009.000,00 terealisasi sebesar Rp. 321.835.938,00 atau mencapai 99,02%, output kegiatan ini yaitu laporan Pengelolaan dan Penagihan Pendapatan Daerah Lainnya, laporan Pelayanan Pengaduan dan Keberatan dan laporan Pemeriksaan objek /subjek PDRD.
- g) Pemeliharaan data dan sistem PBB dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 236.072.600,00 atau mencapai 98,16%, output kegiatan ini yaitu laporan hasil Perekaman Basis Data PBB dan BPHTB, laporan Penerbitan NPWPD/NPWRD bagi Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dokumen NJOP PBB di Kota Bima.
- h) Sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.201.000,00 terealisasi sebesar Rp. 81.565.450,00 atau mencapai 90,43%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya Sosialisasi Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- i) Uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 57.235.666,00 terealisasi sebesar Rp. 42.010.000,00 atau mencapai 73,40%, output kegiatan ini yaitu terlaksananya uji petik terhadap objek pajak dan retribusi daerah.
- j) Pendataan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.578.000,00 terealisasi sebesar Rp. 186.894.109,00 atau mencapai 93,64%, output kegiatan ini yaitu dokumen pendataan objek pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.
- k) Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 206.089.000,00 terealisasi sebesar Rp. 201.066.999,00 atau mencapai 97,56%, output kegiatan ini yaitu laporan Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah serta laporan Perhitungan dan Penetapan Retribusi Daerah dan Dana Transfer.
- l) Penatausahaan/rekonsiliasi pendapatan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 392.493.000,00 terealisasi sebesar Rp. 349.438.390,00 atau mencapai 89,03%, output kegiatan ini yaitu dokumen rekonsiliasi PAD.
- m) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 92.042.500,00 terealisasi sebesar Rp. 89.058.000,00 atau mencapai

96,76%, output kegiatan ini yaitu laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan dan laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan per triwulan.

## b. Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis program dan kegiatan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima tahun 2017 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.192. Capaian Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

No.	Indikator	Target	Realisasi	%
1.	Waktu Penerbitan SP2D yang tepat waktu	100%	100%	100
2.	Penyampaian LRA Bulanan Yang Tepat Waktu	100%	100%	100
3.	Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tiap Tahunnya	5.676.301.000	5.855.438.933	103,16
4.	Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah Tiap Tahunnya	1.090.000.000	704.826.980	64,66
5.	Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	800.000.000	750.087.297	93,76
6.	Persentase Peningkatan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah Tiap Tahunnya	4.424.220.000	3.752.618.132	84,82
7.	Informasi data asset yang terupdate	100%	100%	100

Sumber Data : BPKAD Kota Bima, tahun 2017

## a. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, antara lain:

- a) Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak masih rendah.
- b) Wajib pajak tidak memberikan informasi yang sebenarnya terhadap omset yang mereka miliki.
- c) Masih terdapat beberapa kelurahan pemekaran yang belum diselaraskan letak objek pajak dengan batas wilayah kelurahan pemekaran sehingga masih banyak Wajib Pajak yang harus dilakukan penyesuaian, dan keadaan ini kadang dijadikan alasan untuk tidak membayar pajak.

- d) Data mengenai peta blok masih banyak yang belum dilengkapi, sehingga terdapat kesulitan untuk mengetahui posisi objek pajak. Sebagai gambaran up date peta blok oleh KPP Pratama terakhir dilakukan pada tahun 2010.
- e) Ketetapan mengenai Zona Nilai Tanah sudah ada, tetapi peta tentang Zona tersebut belum disediakan.
- f) Data Piutang yang diserahkan pada saat pengalihan, terdapat perbedaan nilai antara hard copy dan soft copy, sehingga membingungkan dalam upaya penentuan wajib pajak penanggung utang.
- g) Masih terdapat SPPT tercetak yang bermasalah dan perlu diklarifikasi dan diselesaikan lebih awal, sehingga mempengaruhi hasil penagihan.
- h) Masih dirasakan kesulitan untuk mengukur validitas harga transaksi pada saat pelayanan terhadap pengalihan hak dalam bentuk jual beli, karena penentuan nilai perolehan adalah antara penjual dan pembeli.

Dari kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kota Bima dalam pencapaian kinerja tahun 2017, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh BPKAD antara lain:

- a) Melakukan komunikasi awal dengan BPKP Perwakilan NTB untuk persiapan penggunaan SIMDA Pendapatan pada tahun 2017.
- b) Melakukan sosialisasi secara langsung (personal) kepada wajib pajak pada saat penagihan PAD.
- c) Melakukan kegiatan pendampingan dan penyederhanaan tata kelola administrasi pada petugas pajak kelurahan.
- d) Melaksanakan konsolidasi dan penguatan kelembagaan terhadap tim penagihan pada kelurahan dengan melibatkan kasi pemerintahan pada seluruh kelurahan.
- e) Melakukan pemeliharaan data, perbaikan peta blok dan penyelesaian masalah batas wilayah sehingga seluruh objek dan subjek pajak se Kota Bima dapat menjadi target PBB.
- f) Melakukan penyesuaian Zona Nilai Tanah pada wilayah tertentu pada triwulan II tahun 2017 sehingga dapat menjadi dasar penyesuaian NJOP bumi pada wilayah tersebut.
- g) Melakukan sosialisasi secara intens pada 38 kelurahan.



## Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

#### a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bima mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.646.635.000,00 untuk melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Realisasi anggaran yang dicapai adalah sebesar Rp. 5.012.725.466,00 atau 88,77% dari total alokasi anggaran.

Adapun realisasi anggaran masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.193. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Bima Tahun 2017

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>1.083.014.700,00</b>	<b>1.036.608.552,00</b>	<b>95,72</b>
	- Penyediaan jasa surat-menyurat	86.782.500,00	86.707.500,00	99,91
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	30.000.000,00	25.930.600,00	86,44
	- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.700.000,00	15.955.700,00	80,99
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor	30.124.000,00	30.124.000,00	100,00
	- Penyediaan alat tulis kantor	70.639.200,00	59.459.200,00	84,17
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120.655.800,00	98.294.950,00	81,47
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	13.516.800,00	13.516.800,00	100,00
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.720.000,00	14.935.000,00	89,32
	- Penyediaan makanan dan minuman	85.160.000,00	84.160.000,00	98,83
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	439.266.400,00	439.184.802,00	99,98
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	111.950.000,00	109.840.000,00	98,12
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur</b>	<b>280.353.000,00</b>	<b>262.864.450,00</b>	<b>93,76</b>
	- Pengadaan peralatan gedung kantor	98.749.000,00	97.264.000,00	98,50
	- Pengadaan mebeleur	23.259.000,00	21.447.000,00	92,21
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	47.945.000,00	46.903.000,00	97,83
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	91.200.000,00	78.050.450,00	85,58

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00
	- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>251.470.000,00</b>	<b>245.250.000,00</b>	<b>97,53</b>
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	45.850.000,00	43.055.000,00	93,90
	- Pelaksanaan Sidak Pegawai Negeri Sipil	205.620.000,00	202.195.000,00	98,33
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>105.748.000,00</b>	<b>105.617.000,00</b>	<b>99,88</b>
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran	9.630.000,00	9.630.000,00	100,00
	- Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	9.602.000,00	9.602.000,00	100,00
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	14.963.000,00	14.963.000,00	100,00
	- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	42.556.000,00	42.425.000,00	99,69
	- Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	28.997.000,00	28.997.000,00	100,00
<b>V</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>1.469.676.100,00</b>	<b>1.438.938.628,00</b>	<b>97,91</b>
	- Pendidikan dan pelatihan teknis	212.145.500,00	182.707.028,00	86,12
	- Pendidikan penjenjangan struktural	1.206.389.000,00	1.205.090.000,00	99,89
	- Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	51.141.600,00	51.141.600,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	- Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	0	0	0,00
<b>VII</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>2.456.373.200,00</b>	<b>1.923.446.836,00</b>	<b>78,30</b>
	- Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	456.484.700,00	429.897.411,00	94,18
	- Seleksi penerimaan calon PNS	213.033.600,00	0	0,00
	- Penempatan PNS	178.944.700,00	157.458.400,00	87,99
	- Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	203.060.200,00	193.997.129,00	95,54
	- Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	70.735.400,00	70.235.400,00	99,29
	- Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	56.162.000,00	56.162.000,00	100,00
	- Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	34.359.600,00	26.650.400,00	77,56
	- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	157.170.100,00	152.714.900,00	97,17
	- Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	290.664.700,00	190.626.700,00	65,58
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan	327.808.200,00	225.758.200,00	68,87
	- Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	126.162.600,00	120.639.200,00	95,62

No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	- Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	94.784.000,00	85.943.300,00	90,67
	- Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural	44.279.800,00	44.279.800,00	100,00
	- Penyusunan Gaji Berkala PNS	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
	- Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	71.224.800,00	43.839.396,00	61,55
	- Pengelolaan, Pengurusan, dan Penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum	57.364.800,00	52.327.400,00	91,22
	- Pengangkatan CPNS, dan CPNS Menjadi PNS	26.734.000,00	25.517.200,00	95,45
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.646.635.000,00</b>	<b>5.012.725.466,00</b>	<b>88,77</b>

Sumber Data : BKPSDMD Kota Bima, tahun 2017

Output penting yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan di atas adalah :

### **1) Program Pendidikan Kedinasan**

Pagu Anggaran pada Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar Rp. 1.469.676.100,00 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.438.938.628,00 (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 97,91%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya diklat pelayanan prima dan diikuti oleh 40 orang Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Bima dan Pelatihan Kompetensi Bidan Tentang Midwifery Up Date yang di ikuti oleh 40 orang selama 4 hari.
- b) Terlaksananya Diklat Kepemimpinan II sebanyak 3 orang, Diklatpim III sebanyak 10 orang dan Diklatpim IV sebanyak 20 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- c) Terlaksananya ujian penyesuaian ijazah dan ujian dinas untuk PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima sebanyak 89 orang.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program tersebut adalah Peningkatan keterampilan dan profesionalisme PNS setelah mengikuti diklat teknis dan fungsional, diklat kepemimpinan serta diklat prajabatan bagi CPNS. Hal ini ditandai dengan jumlah Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis, diklatpim dan ujian dinas sebanyak 183 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.

### **2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pada tahun 2017 melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah tidak dapat

dilaksanakan karena tidak dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (0%).

### **3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur**

Pagu Anggaran pada Program Pendidikan Kedinasan adalah sebesar Rp. 2.456.373.200,00 (Dua Milyar Empat ratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.923.446.836,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) atau sebesar 78,30%.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

- a) Terlaksananya kegiatan pemetaan kompetensi pemetaan jabatan administrator (eselon III), Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Kota Bima serta tersedianya pedoman penilaian kompetensi.
- b) Seleksi penerimaan CPNSD tidak dapat dilaksanakan karena pemerintah pusat belum membuka penerimaan CPNS baru.
- c) Penempatan dan penataan personil pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural/fungsional PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima baik yang di mutasi maupun rotasi sebanyak 184 orang.
- d) Terlaksananya proses Kenaikan Pangkat PNS Lingkup Pemerintah Kota Bima sebanyak 633 orang .
- e) Terlaksananya pengelola informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID) dan terlaksananya pengarsipan data secara elektronik.
- f) Terlaksananya penyusunan instrumen analisis jabatan PNS untuk perhitungan analisis kebutuhan pegawai lingkup pemerintah Kota Bima.
- g) Menurunnya pelanggaran disiplin PNS dalam lingkup Pemerintah Kota Bima.
- h) Meningkatnya kompetensi pendidikan melalui pengiriman tugas belajar dan pemberian ijin belajar sebanyak 13 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima dari target 18 orang.
- i) Terlaksananya monitoring dan evaluasi bidang kepegawaian dan terlaksananya bintek e-kinerja bagi Subag Umum dan Kepegawaian lingkup pemerintah Kota Bima.
- j) Peningkatan pengembangan pembangunan sarana prasarana pelayanan kepegawaian melalui SAPK dan data elektronik Lingkup Pemerintah Kota Bima.
- k) Jumlah PNS yang memasuki masa purna tugas/pensiun sebanyak 130 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- l) Terlaksananya kegiatan penyusun standar kompetensi manajerial jabatan tinggi Pratama.

- m) Jumlah PNS yang memperoleh SK Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 260 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- n) Terlaksananya Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebanyak 75 LHKPN.
- o) Jumlah PNS yang mengurus administrasi Karis/Karsu, Taspen/Bapertarum sebanyak 105 orang PNS lingkup Pemerintah Kota Bima.
- p) Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS sebanyak 18 orang dilingkup pemerintah Kota Bima.

## b. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dirinci menurut sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.194. Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya ASN yang berkompeten	Persentase ASN yang Berkompeten	28,87%	28,87%	100%
Terwujudnya Pegawai ASN Kota Bima yang memiliki budaya kerja positif	Persentase kasus pelanggaran di kalangan ASN yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Persentase ASN yang kariernya terbina dengan baik	10%	8%	80%
Tersedianya informasi kepegawaian yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bima	Persentase SKPD yang terhubung dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	100%	100%	100%

Sumber : BKPSDM Kota Bima, 2017

### 1.2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran RPJMD

Evaluasi capaian indikator kinerja sasaran dimulai dengan pengukuran realisasi capaian setiap indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan target setiap tahunnya maupun terhadap target pada kondisi akhir RPJMD dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.195. Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

#### 4.1. Capaian Kinerja

Penyajian capaian kinerja Pemerintah Kota Bima, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2017, dan membandingkan dengan target akhir tahun perencanaan RPJMD.

Kategori keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.196. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2017

No.	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian
1.	Berhasil	13	92,86%
2.	Cukup Berhasil	1	7,14 %
3.	Kurang Berhasil	0	0,00 %
4.	Tidak Berhasil	0	0,00 %

Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran dikategorikan berhasil sebesar 92,86% dan yang cukup berhasil sebesar 7,14%. Rincian pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut dideskripsikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.197. Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	108,72
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	100,00
3.	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	100,00
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	107,42
5.	Meningkatnya daya saing	93,31
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	91,72
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	102,15

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	107,09
9.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	100,63
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	96,33
11.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	106,89
12.	Meningkatnya produksi pertanian	104,31
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	94,64
14.	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	72,83

Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 14 sasaran tersebut sebesar 99,00%. Persentase capaian terendah adalah Sasaran Strategis ke-14, yaitu Terpeliharanya keamanan dan ketertiban yakni sebesar 72,83%. Adapun persentase capaian tertinggi dicatatkan oleh Sasaran Strategis ke-1, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama yang mencapai angka 108,72%.

Kategori keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.198. Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No.	Kategori	Indikator Kinerja	Persentase Capaian
1.	Berhasil	26	89,66 %
2.	Cukup Berhasil	3	10,34 %
3.	Kurang Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	-	-
<b>Jumlah</b>		29	100,00 %

Capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2017 dikategorikan 89,29% berhasil tercapai, 10,34 cukup berhasil, dengan rincian capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran sebagaimana termuat pada tabel berikut.

Tabel 2.199. Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Rupiah	4.000.000.000	4.230.456.000	105,76
		Rasio Rumah Ibadah	Per 1.000 penduduk	3	3,35	111,67
2	Meningkatnya kerukunan hidup	Jumlah konflik SARA	kasus	0	0	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	beragama					
3	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	%	5,00	5,00	100,00
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,00	10,13	101,13
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	nilai	5,50	7,25	131,81
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	nilai	5,50	4,7	85,46
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	73	73,67	100,92
		Persentase penduduk miskin	%	9,30	9,27	100,32
		Pengangguran terbuka	%	7,50	8,89	84,36
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	69,15	69,35	100,29
		Angka Balita Gizi Buruk	%	0,075	0,078	96,15
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	148	188	78,72
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	90,00	93,25	103,61
		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50	91,30	98,70
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	%	90	96,92	107,69
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat distribusi	%	100,00	98,61	98,61
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	65,00	62,58	96,28
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100,00
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	%	80	100	125,00
9	Meningkatnya pelayanan publik prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,25	1,25	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	81,00	101,25
10	Meningkatnya Pertumbuhan	Pertumbuhan PDRB	%	5,70	5,78	101,40



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	Ekonomi					
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14,80	15,82	106,89
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	ton	55.000	57.371	104,31
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	75,00	76,18	101,57
		Persentase luas permukiman kumuh	%	29,56	32,06	108,45
		Persentase luas kota yang tertata	%	10,00	7,39	73,90
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	97,50	133,87	72,83

Dari hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2017 pada tabel di atas, rata-rata persentase capaian adalah sebesar 99,66%, dengan nilai persentase capaian terendah sebesar 72,88% yaitu pada capaian Indikator Kinerja Angka Kriminalitas, dan capaian persentase tertinggi adalah sebesar 131,81% yaitu pada capaian indikator kinerja Rata-rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD.

Pencapaian masing-masing indikator kinerja tersebut, didukung oleh sejumlah program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dideskripsikan sebagai berikut.

#### 1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan terhadap Ajaran Agama

Pada tahun 2017, telah ditetapkan target jumlah penerimJMD Kota Bima sebesar 4 milyar rupiah dan berhasil melampaui target, yaitu sebesar Rp. 4.230.456.000 atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,7%.

Tabel 2.200. Capaian Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2014-2017

Tahun Capaian Kinerja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
Tahun 2014	750.000.000	785.000.000	104,67%
Tahun 2015	750.000.000	1.391.336.000	185,51%
Tahun 2016	4.000.000.000	4.335.858.840	108,39%
Tahun 2017	<b>4.000.000.000</b>	<b>4.230.456.000</b>	<b>105,7%.</b>

Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2017

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penerimaan jumlah zakat, infaq dan shodaqoh tahun 2017 sedikit menurun dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya orang atau dermawan yang menyetorkan zakat mal maupun infaq disebabkan oleh kebutuhan setiap individu yang cukup tinggi untuk kebutuhan penanganan pasca banjir bandang yang terjadi diakhir tahun 2016 di Kota Bima. Namun demikian, sosialisasi kepada para dermawan khususnya dan masyarakat Kota Bima pada umumnya tentang pentingnya berzakat, infaq dan sedekah semakin intens dilaksanakan. Capaian kinerja tahun 2017 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kota Bima pada tahun 2018 sebesar 4 milyar rupiah, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja sampai tahun 2017 telah melampaui target RPJMD pada tahun 2018 dengan tingkat capaian 105,7%.

Kemudian indikator kinerja Rasio Rumah Ibadah pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 3 per 1000 jumlah penduduk, dan berhasil dicapai sebesar 3,35 per 1000 jumlah penduduk atau dengan tingkat capaian 111,67%.

Tabel 2.201. Capaian Kinerja Rasio Rumah Ibadah Tahun 2014-2017

Tahun Capaian Kinerja	Target (per 1000 penduduk)	Realisasi (per 1000 penduduk)	% Capaian
Tahun 2014	2,7	2,66	98,52
Tahun 2015	2,9	2,85	98,28
Tahun 2016	3	3	100
Tahun 2017	<b>3</b>	<b>3,35</b>	<b>111,67</b>

Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2018

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa rasio rumah ibadah pada tahun 2017 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh makin meningkatnya dukungan dari berbagai pihak terkait dengan pembangunan rumah ibadah di Kota Bima, baik dari Pemerintah Kota Bima, Hibah dari Pemerintah Daerah lain, maupun swadaya masyarakat, Lebih khusus lagi Pemerintah Kota Bima membangun Masjid terapung yang berada dikawasan strategis pantai Amahami. Capaian kinerja tahun 2017 3,35 per 1000 jumlah penduduk ini juga sudah melampaui target RPJMD Kota Bima tahun 2018 yang hanya sebesar 3 per 1000 jumlah penduduk.

## 2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama

Sasaran strategis Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama diukur melalui satu indikator kinerja utama yaitu jumlah konflik SARA yang terjadi. Seperti diketahui

bahwa konflik yang bernuansa SARA sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia beberapa tahun belakangan ini. Hal ini telah banyak mempengaruhi situasi psikologis dan sosiologis keagamaan masyarakat, sehingga dikhawatirkan antara kelompok agama akan diliputi perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Dengan demikian, merupakan sesuatu hal yang penting untuk tetap menjaga persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan.

Meskipun Kota Bima dilabelkan sebagai zona merah yang rentan terhadap konflik sara dan terorisme, namun kenyataannya bahwa pada tahun 2017 tidak ada konflik SARA yang terjadi di Kota Bima. Sehingga capaian indikator kinerja sasaran ini tercapai 100%. Capaian tahun 2017 ini mempertahankan capaian tahun 2014-2016 yang juga tidak terjadi kasus konflik bernuansa SARA di Kota Bima.

Tabel 2.202. Capaian Kinerja Jumlah Konflik SARA yang terjadi di Kota Bima

<b>Tahun Capaian Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian</b>
Tahun 2014	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2015	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2016	0 kasus	0 kasus	100,00%
<b>Tahun 2017</b>	<b>0 kasus</b>	<b>0 kasus</b>	<b>100,00%</b>

*Sumber : Badan Kesbangpol Kota Bima, 2018*

Keberhasilan Pemerintah Kota Bima untuk memelihara kerukunan umat beragama ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Bima yang senantiasa membangun, mempertahankan, memperkuat dan melestariakan kerukunan umat beragama dengan berupaya melakukan beberapa program atau agenda penting; diantaranya adalah melalui pemberdayaan forum kerukunan umat beragama.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dibentuk oleh unsur-unsur pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima. Tugasnya adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

### **3. Sasaran Strategis Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal**

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2017, terdapat 40 pranata adat yang masih lestari yang meliputi tradisi-tradisi, termasuk daur hidup, tarian dan tradisi sosial

keagamaan sedangkan tradisi yang ditinggalkan ada 2 jenis. Dengan demikian persentase nilai budaya yang ditinggalkan sebesar 5% pada tahun 2017. Capaian kinerja tahun 2017 ini lebih baik dibandingkan tahun 2016 dimana terdapat 3 tradisi budaya yang ditinggalkan yaitu Raju, cepe kanefe, dan arugele sagele. Sedangkan nilai budaya atau tradisi yang masih lestari sebanyak 39 pranata adat. Dengan demikian persentase nilai budaya yang ditinggalkan pada tahun 2016 sebesar 7,69%. Arugele sagele pada tahun 2017 dapat dihidupkan kembali berkat upaya lembaga Makembo yang menggerakkan masyarakat petani di Ncai Kapenta Kelurahan Jatibaru untuk tradisi tersebut pada waktu menanam.

Tabel 2.203. Capaian Kinerja Persentase Nilai Budaya yang ditinggalkan

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2016	5%	7,69%	65,02%
Tahun 2017	5%	5 %	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

Tabel 2.204. Daftar tradisi yang masih lestari di Kota Bima

No	Daftar Tradisi yang masih lestari	Daftar Tradisi yang hampir punah dan ditinggalkan	Keterangan
1	Cafi sari boru ro dore	Raju	
2	Compo sampari	Cepe kanefe	
3	Compo baju		
4	Tekara nee		
5	Waa coi/Terima Coi		
6	Jambuta		
7	Kiri loko		
8	Ngaji made		
9	Mbolo rasa		
10	Kapanca		
11	Kalondo wei		
12	Boho oi ndeu		
13	Hanta ua pua		
14	Lenggo		
15	Mpaa gantao		

16	Ndiri biola	
17	Ngaha karedo	
18	Ampa fare	
19	Arugele Sagele	
20	Bela leha	
21	Kolondo lopi	
22	Muna cepe rahi	
23	Soka	
24	Doa oma	
25	Doa soro olo	
26	Hadrah rebana	
27	Ntumbu Parise	
28	Doa bola	
29	Khata Karoa	
30	Mpaa sampari	
31	Tumba kambata	
32	Buja kadanda	
33	Ziki rati	
34	Mpaa peda	
35	Doa Rasu	
36	Kasaro	
37	Tumba kambata	
38	Mpaa toja	
39	Ngaji tua	
40	Ncala lanca	
40		2

*Sumber: Lembaga Adat Makembo, 2018*

#### **4. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pendidikan**

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan ini dioperasionalkan melalui sejumlah indikator kinerja, yaitu angka rata-rata lama sekolah, rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) untuk SD dan SMP.

Adapun pencapaian masing-masing indikator tersebut dideskripsikan secara lebih terperinci sebagaimana pembahasan berikut.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Menurut data BPS tahun 2017, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima hingga tahun 2017 adalah 10,13 tahun. Angka ini terus meningkat selama kurun empat tahun terakhir, dimana rata-rata lama sekolah pada tahun 2014 sebesar 9,46 tahun, pada tahun 2015 mencapai 9,58 tahun dan pada tahun 2016 mencapai 9,96.

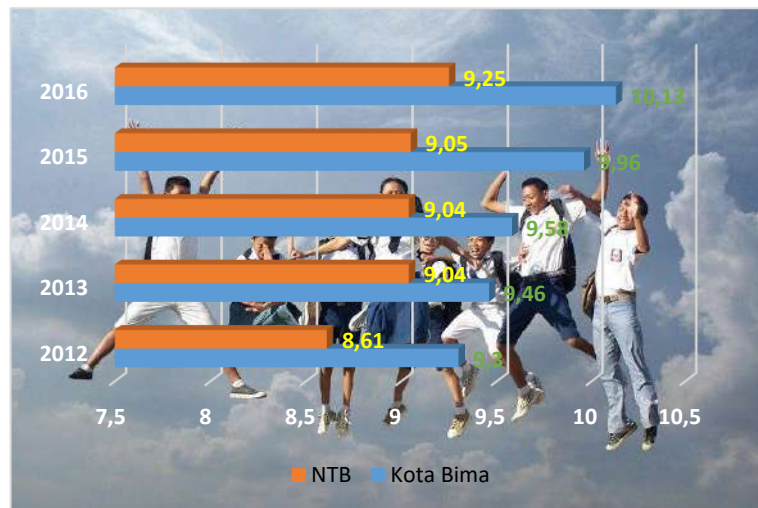
Tabel 2.205. Capaian Kinerja Rata-rata Lama Sekolah

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	9,20	9,46	102,82
Tahun 2015	9,60	9,58	99,79
Tahun 2016	9,80	9,96	101,63
Tahun 2017	10	10,13	101,3

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

Angka rata-rata lama sekolah Kota Bima yang terus meningkat pada setiap tahun didukung oleh :

- makin membaiknya sarana-sarana pendidikan
- dukungan beasiswa
- biaya operasional sekolah (BOS)
- serta makin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.



b. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima menyebutkan bahwa rata-rata nilai UN untuk SD yang diselenggarakan pada tahun 2017 telah terealisasi sebesar 7,25 dari target rata-rata nilai UN sebesar 5,50 atau dengan tingkat capaian 131,81%. Sedangkan nilai rata-rata UN untuk tingkat SMP hanya sebesar 4,7 dari target 5,50 atau dengan tingkat capaian 85,46%. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2017 sebesar 5,98 atau dengan capaian 108,87%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2017 mengalami kenaikan. Rata-rata nilai UN yang diselenggarakan pada tahun 2016 telah terealisasi sebesar 5,32 dari target rata-rata nilai UN sebesar 5,50. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2016 sebesar 96,73%.

Tabel 2.206. Capaian Kinerja Rata-Rata Nilai UN Tahun 2017

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017
SD/MI/Paket A	5,60	6,89	7,25
SMP/MTs/Paket B	5,71	3,75	4,70

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima, 2018

## 5. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing

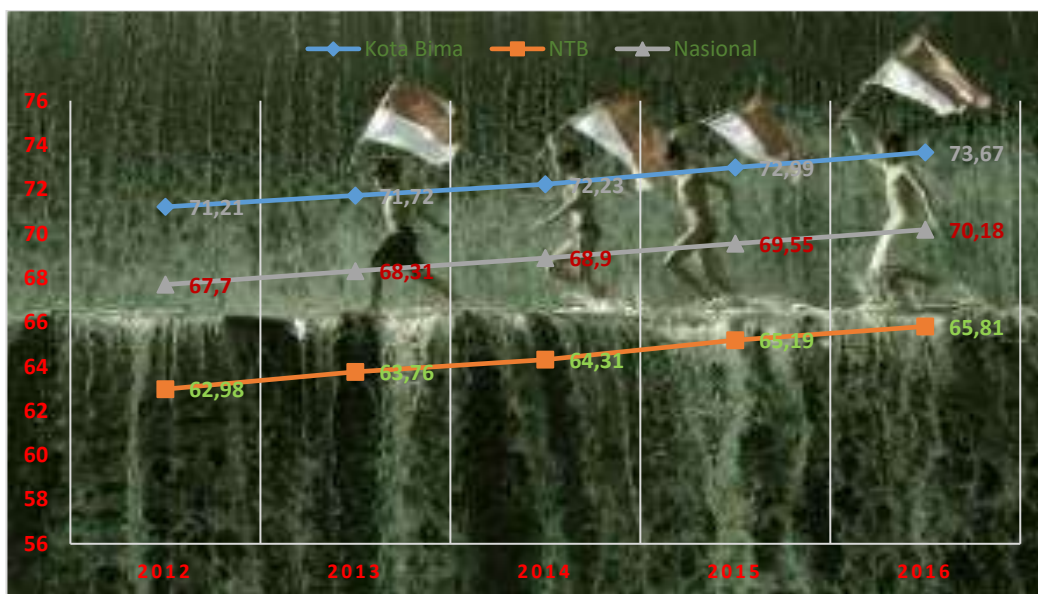
Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

### a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur yang panjang dapat diukur dari indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diukur dari indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, dan dimensi hidup layak diukur dari nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Data IPM yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2016. Berdasarkan data, capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2016 mencapai 73,67 dari target sebesar 73 atau dengan tingkat capaian sebesar 100,92%. Angka IPM ini

apabila dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



Dalam kurun waktu lima tahun terakhir IPM Kota Bima mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 71,21 pada tahun 2012 menjadi 73,67 pada tahun 2016. Kenaikan IPM Kota Bima selama 2012-2016, sejalan dengan kenaikan IPM di Provinsi NTB dari 62,98 pada tahun 2012 menjadi 65,81 pada tahun 2016.

b. Persentase Penduduk miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Bima pada tahun 2017 mengalami penurunan, dimana sesuai dengan data yang dirilis oleh BPS bahwa data persentase penduduk miskin tahun terakhir adalah sebesar 9,23% dari target yang ditetapkan sebesar 9,00% atau tercapai sebesar 97,50%. Angka kemiskinan di Kota Bima selama empat tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Tabel 2.207. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2014-2017

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	10,93	9,74	110,88
Tahun 2015	9,93	9,85	90,55
Tahun 2016	9,11	9,51	94,64
<b>Tahun 2017</b>	<b>9,00</b>	<b>9,23</b>	<b>97,50</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2017



Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bima diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut : pemenuhan hak atas pangan, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan, pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas rumah, pemenuhan hak atas tanah, pemenuhan hak atas air bersih, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan pemenuhan hak rasa aman.

c. Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran Terbuka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data pengangguran terbuka Kota Bima untuk tahun 2016. Ini berarti bahwa data capaian Angka Melek Huruf Kota Bima untuk tahun 2017 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-*release* oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018.

Capaian kinerja indikator pengangguran terbuka ini jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya mengalami sedikit perbaikan. Pada tahun 2013 angk pengangguran terbuka sebesar 9,13 persen, kemudian turun menjadi 8,69 persen pada tahun 2014. Pada tahun 2015 naik lagi menjadi 10,15 persen. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari dua per tiga penduduk kota Bima termasuk dalam angkatan kerja. Tingginya proporsi penduduk usia kerja yang bekerja yaitu di atas 90% menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Kota Bima sudah cukup baik. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima mengalami fluktuatif.

Gambaran karakteristik ketenagakerjaan Kota Bima pada kurun empat tahun terakhir dapat dilihat dari hasil olah data Sakernas sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.208. Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2012-2015

Uraian	2013	2014	2015	2016
TPAK (%)	66,39	69,32		
Tingkat Pengangguran (%)	9,13	8,69	10,15	8,89
Bekerja	90,87	91,31	89,85	91,11

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bima (BPS, 2017)

## 6. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

### a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

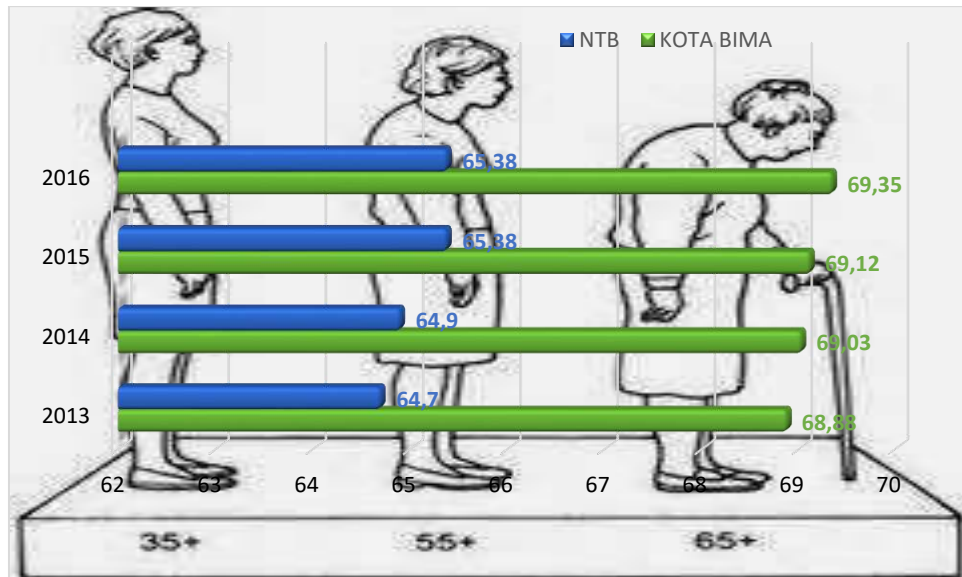
Data Angka Harapan Hidup yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan data capaian Angka Harapan Kota Bima untuk tahun 2016. Ini berarti bahwa data capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima untuk tahun 2017 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-release oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2018.

Menurut data BPS tahun 2017, Angka Harapan Hidup di Kota Bima hingga tahun 2016 adalah 69,35 tahun.

Tabel 2.209. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2014-2015

No.	Angka Harapan Hidup	Target	Realisasi	% Capaian
1.	AHH Tahun 2013	68,80 tahun	68,88 tahun	100,12
2.	AHH Tahun 2014	69,00 tahun	69,03 tahun	100,04
3.	AHH Tahun 2015	69,20 tahun	69,12 tahun	99,88
4.	<b>AHH Tahun 2016</b>	<b>69,30 tahun</b>	<b>69,35 tahun</b>	<b>100,07</b>

Sumber : BPS Kota Bima, 2016



b. Angka balita gizi buruk

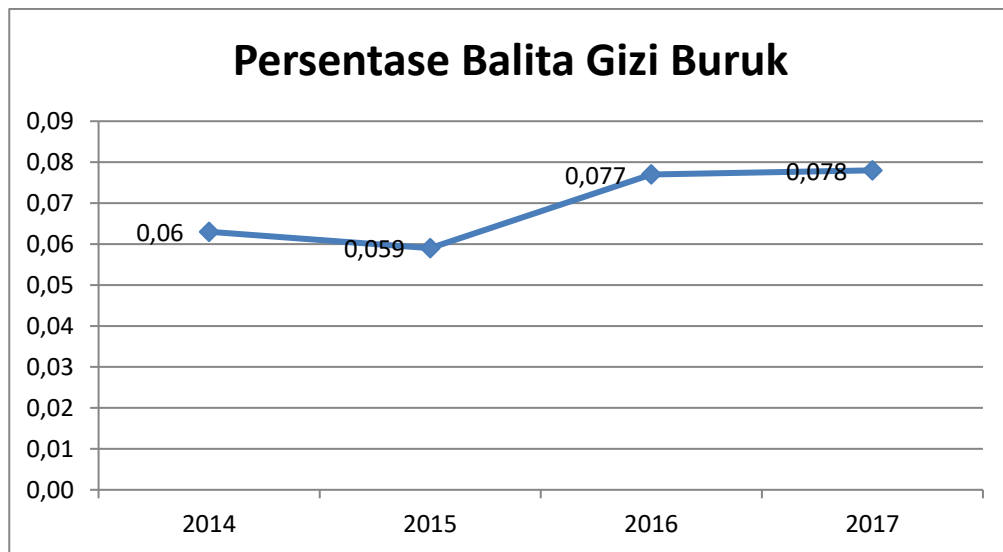
Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Data Dinas Kesehatan Kota Bima menyebutkan bahwa dari jumlah aksus balita gizi buruk di Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebanyak 13 kasus gizi buruk dari 13.601 balita. Sedangkan pada tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kasus dari 14.089 balita.

Persentase balita gizi buruk diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang terjadi pada periode tertentu dengan Jumlah balita yang ada pada periode yang sama.

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,078 dari target 0,075. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016, Persentase balita gizi buruk di Kota Bima tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,059 % dari target 0,085%, dan pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,077% dari target 0,080. hal ini menunjukan tingkat keberhasilan program dalam rangka menekan kejadian kasus gizi buruk yang ada di Kota Bima masih kurang. Demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2018 sebesar 0,070%, capaian Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 0,05% yang harus dipenuhi. Adapun Angka

kematian bayi di Kota Bima Tahun 2014 s/d 2017 dapat dilihat pada gambar berikut:



Adapun kegiatan –kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program yaitu adanya kegiatan penjangkaran kasus secara berkala, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas. Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

Penyebab masih terjadinya kasus gizi buruk di Kota Bima ada 2 hal yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi. Asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, daya beli, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi ibu. Sedangkan Infeksi dipengaruhi oleh hygiene dan sanitasi serta pelayanan kesehatan. Adapun Dilihat dari aspek penanganannya, cakupan penanganan kasus balita gizi buruk tahun 2017 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian pada tahun 2016 yaitu sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah, maka target tersebut mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima.

Tabel 2.210. Capaian Kinerja Angka Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2015-2016

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2015	0,085 %	0,059 %	144,07%
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2016	0,080 %	0,077 %	103,89%
Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2017	0,075 %	0,078 %	96,15%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018

c. Angka kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu (*Maternal Mortality Rate*) adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu serta kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Tabel 2.211. Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Angka kematian ibu melahirkan	2015	148/100.000	87/100.000	170,11
	2016	148/100.000	148/100.000	100,00
	2017	148/100.000	188/100.000	78,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2018

Seluruh kasus kematian ibu telah dilakukan *Audit Maternal Perinatal* yang diselenggarakan untuk mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan fasilitas yang memadai.

Hasil kajian audit didapatkan penyebab kematian ibu sebesar 50% karena tidak terdeteksinya komplikasi pada ibu hamil yang disebabkan oleh status sosial ibu

seperti hamil diluar nikah, istri siri dan single parent. penyebab langsung yaitu perdarahan dan eclampsia, hal ini dapat menjadi petunjuk bagi perencanaan program di tahun yang akan datang agar lebih difokuskan kepada kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan pengenalan dan kewaspadaan dini masyarakat terhadap tanda bahaya serta risiko. Selain itu juga perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan bagi calon pengantin dan pemanfaatan jampersal tanpa memandang status sosial. Serta dibutuhkan peningkatan kualitas SDM dalam hal teamwork yang solid serta response time yang cepat dalam hal pengenalan risiko, penegakan diagnosa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan tindakan dan kesalahan intervensi sehingga kematian ibu dapat dicegah dan diturunkan.

## **7. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar**

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama, yaitu :

### **a. Persentase rumah tangga berakses air bersih**

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Air bersih dengan standar air minum adalah kebutuhan dasar masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan keragaman kegiatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan air Bersih di kawasan perkotaan dan juga perdesaan.

Capaian kinerja program pengembangan pengelolaan Air Bersih yang didukung oleh APBD dan APBN pada tahun 2017 telah memfasilitasi jumlah rumah tangga berakses air bersih layak dengan tingkat pencapaian sebesar 35.790 rumah tangga dari target 36.478 rumah tangga atau sebesar 98,15% pada tahun 2017.

Pada tahun 2016 dapat memfasilitasi rumah tangga berakses air bersih layak sebanyak 33.467 atau sebesar 100,22% dari target 33.392 rumah tangga maka terjadi penurunan sebesar 6.97% dari capaian tahun lalu. Namun bila diukur capaian Renstra, maka mengalami peningkatan, pada tahun 2016 telah mencapai 87,19% dan ditahun 2017 telah mencapai 93,25% maka terjadi peningkatan

sebesar 6,05%. Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Akhir RPJMD 2018 sebesar 38.414 rumah tangga atau 100%, maka capaian kinerja rumah tangga berakses air minum layak 93,25%.

Tabel 2.212. Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Rumah Tangga)	Realisasi (Rumah Tangga)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih	87,19	36.478	35.790	98,15	93,25

b. Persentase Rumah Layak Huni yang dibangun

Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun di Kota Bima pada tahun 2017 sesuai data yang ada di Kota Bima mencapai 502 unit, dari yang ditargetkan sebesar 466 unit. Ini berarti persentase realisasi ini sebesar 92,77%.

Rumah layak huni yang dibangun ini meningkat bila dibandingkan tahun 2016, dimana pada tahun 2016 ditargetkan Rumah layak huni yang dibangun sebanyak 500 unit dengan realisasi hanya 302 unit atau hanya 60,40%. Pembangunan rumah layak huni ini antara lain dilaksanakan melalui bantuan sosial bedah rumah.

Tabel 2.213. Rumah Layak Huni yang Dibangun Tahun 2017

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
Rumah Layak Huni	502 unit	466 unit	92,77 %

Sumber : BPMPK Kota Bima

c. Rumah Tangga Bersanitasi Baik

Program pengembangan pengelolaan Sanitasi yang didukung oleh APBD baik bersumber dari dana DAK maupun DAU pada tahun 2017 jumlah rumah tangga (RT) di Kota Bima sebanyak 38.382 RT. Dari program pengembangan pengelolaan sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memfasilitasi penanganan jumlah rumah tangga bersanitasi mencapai 33.479 RT dari capaian

yang ditargetkan sebanyak 34.558 rumah tangga, sehingga tingkat pencapaian pada indikator rumah tangga bersanitasi di tahun 2017 sebesar 96,92%.

Pada tahun 2016 telah memfasilitasi rumah tangga bersanitasi sebanyak 30.794 rumah tangga atau sebesar 100,29% dari target 30.705, maka capai jumlah rumah tangga bersanitasi pada tahun 2017 menunjukkan penurunan 3,37% dari capaian tahun lalu ini disebabkan karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk memperbanyak SR (sambungan rumah).

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir Renstra dan akhir RPJMD 2018 sebesar 38,414 rumah tangga atau sebesar 100%, maka capain program/kegiatan telah mencapai 87,32% rumah tangga bersanitasi. Ini dapat disimpulkan capaian program/kegiatan yang telah dilaksanakan mengalami peningkatan dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Tabel 2.214. Target dan Realisasi Kinerja Indikator Rumah Tangga Bersanitasi

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (RT)	Realisasi (RT)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1.	Persentase rumah tangga Bersanitasi	80,23	34.558	33.479	96,92	87,32

d. Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

Konektivitas wilayah merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan adanya pemerataan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah dalam Kota Bima telah memiliki aksesibilitas yang baik dan tidak ada terdapat lagi wilayah yang terisolir. Konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi dikontribusikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan.

Pencapaian indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi yang diwujudkan melalui program pembangunan jalan dan jembatan. Telah terealisasi sebesar 101,45% atau sepanjang 265,13 Km dari yang ditargetkan sepanjang 261,22 Km. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang terealisasi 255,52 Km



dari target 254,23 Km atau 100,51%, maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,94% dari tahun lalu,

Capaian target indikator kinerja diatas dapat dilihat seperti dalam table dibawah ini:

Tabel 2.215. Realisasi Kinerja Indikator Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (km)	Realisasi (km)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
3.	Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi	95,04	261,33	265,13	101,45	98,61

Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan konektivitas wilayah, yaitu antara lain kondisi topografi wilayah terutama di sebagian wilayah Kota Bima yang memiliki kemiringan dan kelerengan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kendala dalam pembukaan jalan baru karena memerlukan anggaran dan teknologi yang besar.

Adapun beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja konektivitas wilayah adalah antara lain adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan secara lebih luas.

## 8. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

### a. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima pada tahun 2017 merupakan penilaian atas kinerja instansi pemerintah kota Bima Tahun 2016 dengan target nilai 65,00 dan terealisasi sebesar 62,58 (kategori B/Baik) atau capaian kinerja sebesar 96,28%.

Kategori B menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang dinilai baik dalam penggunaan anggaran jika dihubungkan dengan capaian kerjanya, kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kota Bima.

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,37 poin jika dibandingkan dengan capai kinerja tahun 2016.

b. Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada tahun 2017 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2016 dengan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan terealisasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja 100%.

Hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan tahun 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mempertahankan capaian kinerja di tahun 2016 yang juga berpredikat WTP. Status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD Kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ketahun.

Sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2017 atas Opini BPK RI terhadap LKPD diambil dari hasil opini BPK RI tahun anggaran 2016. Adapun gambaran Opini yang dicapai selama 5 tahun dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Kota Bima belum mampu menerapkan Prinsip akuntansi dalam laporan keuangan secara konsisten sehingga belum bisa keluar dari opini disclaimer. Pada tahun 2012 dan 2013 Pemerintah Kota Bima mulai melakukan perubahan berupa perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan opini dari disclaimer menjadi Wajar Dengan Pengecualian. Upaya perbaikan terhadap penerapan prinsip akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan oleh pemerintah daerah terutama atas pengelolaan aset daerah, sampai akhirnya pada tahun 2014,2015 dan 2016 pemerintah Kota Bima meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut :

- 1) Komitmen yang sangat tinggi kepala daerah dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB
- 3) Pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi SIMDA dan SIMBADA

Adapun upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah
- 2) Memperbaiki pengelolaan Aset Daerah
- 3) Memperbaiki sistem penganggaran dan realisasi belanja , agar tidak terjadi salah penganggaran dan salah realisasi belanja
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Persentase OPD dengan SAKIP baik

Persentase Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi OPD di Kota Bima merupakan penilaian atas kinerja OPD Tahun 2017 dengan target sebanyak 20 OPD bernilai baik (kategori B) dan mampu terealisasi sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00 %. Bahkan ada 1(satu) OPD yang memperoleh nilai A yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Energi, serta 3 (dua) OPD yang berkategori BB yaitu Bappeda, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

## 9. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Pemerintah daerah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang. Tingkat keberhasilan peningkatan pelayanan publik di Kota Bima tergambar dari pencapaian beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Rata-rata lama proses pelayanan perijinan

Bahwa rata-rata lama setiap proses pelayanan perijinan di Kota Bima ditargetkan selama 1,25 hari dengan tingkat realisasi sebesar 1,25 hari. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 100%. Adapun jenis pelayanan perijinan yang ada di Kota Bima Tahun 2017 adalah sebagaimana tertuang dalam tabel

Tabel 2.216. Capaian Kinerja Lama Proses Perijinan di Kota Bima

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi
Rata-rata lama proses perijinan	2014	2-4 hari	2,25
	2015	2-3 hari	2
	2016	1-3 hari	1,25
	<b>2017</b>	<b>1-2 hari</b>	<b>1,25</b>

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dengan penetapan target dengan hasil BAIK (62,51-81,25) dan Realisasi capaian sebesar 100%. Adapun beberapa jenis Indeks Kepuasan Masyarakat yang menjadi Indikator penilaian yang mendukung sebagai berikut :

- Unsur **Persyaratan** , dengan dilakukannya penyederhanaan persyaratan baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis dan sarana penunjang lainnya sebagai syarat dalam melaksanakan pelayanan sehingga mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat dengan Nilai 71,83
- Unsur **Prosedur** mengacu kepada SOP Pelayanan perizinan sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik dan adil dengan Nilai 74,83
- Unsur **waktu penyelesaian** dapat dilakukan pengaturan waktu pelayanan sehingga pelayanan dapat lebih efektif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, dengan Nilai 74,67
- Terhadap unsur Biaya/Tarif, dapat dilakukan penyesuaian regulasi agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan hal ini, nilai 88,00
- Unsur **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, dapat ditingkatkan dengan senantiasa menggunakan format buku mengikuti perkembangan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku sehingga produk setiap jenis pelayanan yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan Nilai 89,00
- Unsur **Kompetensi Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan menempatkan petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan pengetahuan, keahlian,

keterampilan dan pengealaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan Nilai 81,00

- Unsur **Perilaku Pelaksana**, dapat ditingkatkan dengan senantiasa memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pelayanan yang berdedikasi tinggi, berpenampilan baik, ramah, sopan dan memahami prinsip-prinsip pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dengan Nilai 81,83
- Unsur Maklumat pelayanan, dapat dilaksanakan dengan baik apabila sarana dan prasaranan penunjang kegiatan pelayanan termasuk penganggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan unit pelaksanaan pelayanan, dengan Nilai 85,83
- Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, bahwa terhadap penganan pengaduan, saran dan masukan telah ditindak lanjuti dengan baik namun masih perlu ditingkatkan lagi dengan menempatkan petugas yang memiliki kemampuan untuk menangani hal itu, dengan nilai 84,83

Faktor-faktor pendukung yang dominan sehingga kegiatan tersebut berjalan efektif adalah : tersedianya anggaran yang cukup; adanya Kemitraan dan koordinasi dengan Dinas/badan teknis terkait; tersedianya Sumber Daya Pegawai yang cukup memadai; tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

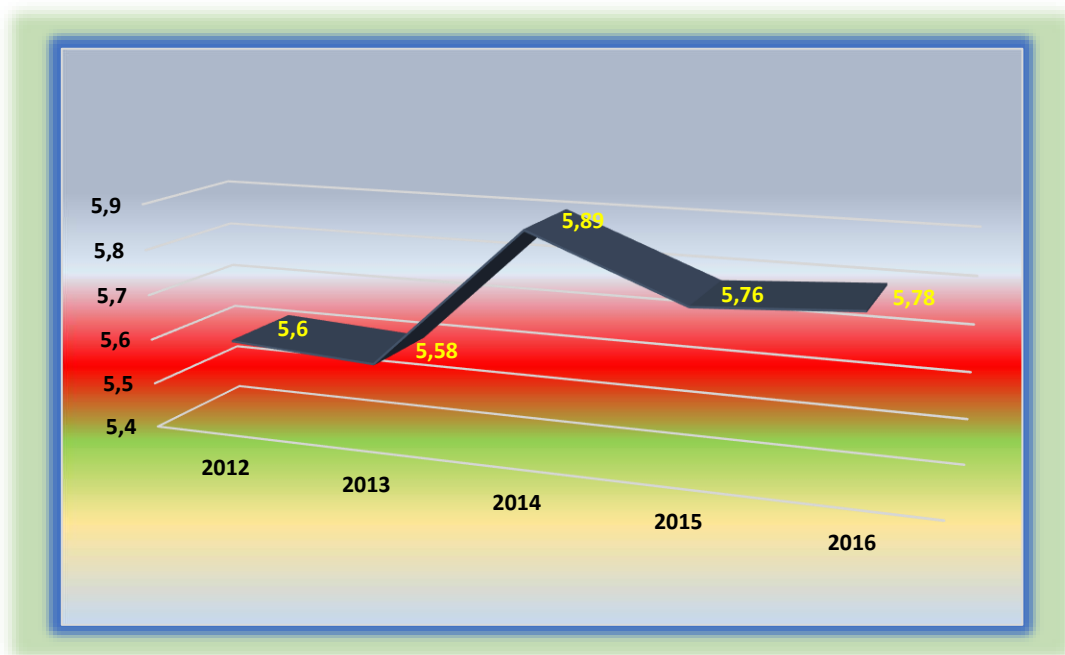
## 10. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

### Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan memperhatikan Produk Domestik Regional bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Pengukuran capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 di Kota Bima dapat ditunjukkan dari hasil data PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima Tahun 2017 yang isinya memuat kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2016.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2016 adalah sebesar **5,78 persen**. Dengan demikian capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Bima adalah sebesar 96,33 persen dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan yaitu sebesar 6,00 persen.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka Angka pertumbuhan tersebut mengalami fluktuasi. Secara rinci laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima Tahun 2012 – 2016 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.



Grafik PDRB Kota Bima Tahun 2012-2016

Lebih lanjut, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 yaitu sebesar 6,0 persen pada tahun 2018, dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian sampai saat sekarang adalah baru mencapai 88,31 persen. Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari PDRB tersebut serta pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik dan dengan pertumbuhan yang positif, maka target jangka menengah sebesar 6,00 persen tersebut sangat mungkin dicapai pada tahun 2018 sebagai akhir periode RPJMD 2013-2018.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Bima yaitu antara lain :

- a. Kondisi ekonomi dan stabilitas regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti tingkat inflasi, kenaikan harga BBM, serta stabilitas politik .
- b. Pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan gagal panen .

Adapun sejumlah faktor keberhasilan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi adalah antara lain :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berdampak pada membaiknya iklim investasi daerah.
- b. Tersedianya sumber daya alam yang baik sebagai modal dasar pembangunan daerah dimana ketersediaan lahan pertanian yang subur dan kekayaan laut memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan PDRB Kota Bima setiap tahunnya.
- c. Membaiknya kualitas infrastruktur perkotaan serta sarana dan prasarana pendukung sektor perdagangan dan jasa serta transportasi.

#### **11. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat**

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bima dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi lokal, salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah PDRB Per Kapita.

Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat diindikasikan oleh nilai PDRB per kapita pada tahun tertentu. PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat, dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB-nya. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode 2012-2016 tumbuh pada kisaran angka 6-10 persen, sementara pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 dalam periode yang sama tumbuh sebesar 3-6 persen.

Pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan ditargetkan sebesar 14,80 juta rupiah dengan realisasi sebesar 15,82 juta rupiah atau dengan tingkat capaian 106,89 persen. Pertumbuhan pendapatan perkapita dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.217. PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2012– 2015

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rp)	2.062.497,35	2.177.543,21	2.305.405,52	2.438.560,78	2.579.603,57
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp)	2.192.206,83	2.373.685,91	2.671.111,92	2.993.901,62	3.302.931,48
Jumlah Penduduk (jiwa)	149.800	153.101	156.400	159.736	163.101
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp/jiwa/Tahun)	13,77	14,22	14,74	15,27	15,82
PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp/jiwa/Tahun)	14,63	15,50	17,08	18,74	20,25

Pada tahun 2017 PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi 20,25 juta rupiah dari tahun 2016 sebesar 18,74 juta rupiah. Jika dilihat atas dasar harga konstan maka PDRB perkapita pada tahun 2017 adalah sebesar 15,82 juta atau mengalami kenaikan 0,55 juta dibandingkan dengan PDRB Perakpita tahun 2016 yang hanya sebesar 15,27 juta.

Pendapatan perkapita yang dicapai sampai saat ini sebesar 20,25 juta rupiah jika dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan 2018 yang sebesar 20 juta rupiah telah melebihi target atau dengan capaian 101,25 persen

## 12. Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan dalam konteks ini akan mencakup akumulasi dari produksi dari beberapa jenis komoditi yang meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun capaian kinerja produksi tanaman pangan Kota Bima tahun 2017 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.218. Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan :				
	- Padi (GKP)	Ton	54.025	41.169	76,20
	- Jagung (PK)	Ton	5.113	12.106	236,77



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	-. Kedelai (BK)	Ton	2.716	1.309	48,20
	-. Kacang Tanah (BK)	Ton	440	368	83,64
	-. Kacang Hijau (BK)	Ton	12	62	516,67
	-. Ubi Kayu (UB)	Ton	2.849	2.313	81,19
	-. Ubi Jalar (UB)	Ton	111	44	39,64

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan mengalami fluktuasi dimana untuk beberapa komoditi seperti padi, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2015. Sedangkan komoditi jagung dan kacang tanah mengalami peningkatan produksi. Adapun perbandingan jumlah produksi tanaman pangan pada tahun 2016 dengan beberapa tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.219. Capaian Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2013-2017

No	Komoditi Tanaman Pangan	Produksi (Ton)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Padi (GKP)	36.900	41.879	42.425	35.808	41.169
2	Jagung (PK)	2.466	3.710	8.028	9.955	12.106
3	Kedelai (BK)	1.855	2.129	2.228	1.697	1.309
4	Kacang Tanah (BK)	212	319	281	383	368
5	Kacang Hijau (BK)	6	11	11	110	62
6	Ubi Kayu (UB)	1.374	3.372	2.679	2.600	2.313
7	Ubi Jalar (UB)	76	95	79	0	44

Lebih lanjut, capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan tahun 2017 ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi pertanian tanaman pangan pada beberapa komoditi khususnya padi adalah antara lain :

- 1) terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. Data BPS menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 telah terjadi pengurangan luas lahan pertanian.
- 2) produksi pertanian tanaman pangan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen para petani di Kota Bima.

3) Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan tercapainya beberapa komponen indikator kinerja produksi pertanian adalah meliputi :

1) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menetapkan lahan pertanian berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima sehingga lahan pertanian tanaman pangan yang ada di bagian timur Kota Bima ditetapkan sebagai kawasan penyangga yang tidak boleh dialihfungsikan.

2) Adanya partisipasi dan komitmen para penyuluh dan tenaga teknis untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.

3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian.

Terkait dengan penggunaan sumber daya, maka sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada telah digunakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian indikator kinerja ini.

### **13. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik**

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama sebagaimana berikut.

#### **a. Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik**

Berdasarkan SK Walikota Bima Nomor 482 Tahun 2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan di Kota Bima, menetapkan Panjang Jalan Kota Bima 204,34 Km, di pertengahan tahun 2016 terjadi perubahan atas Penetapan Status Ruas Jalan Kota melalui Perwali nomo 381 Tahun 2016 tentang Penetapan Status dan Fungsi Jalan Kota Bima, dengan Panjang 258,11 Km. sehingga membawa dampak pada perubahan target kinerja pada RPJMD Kota Bima dan Perubahan Realisasi RPJMD Kota Bima.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2017 ditargetkan jalan dalam kondisi baik sepanjang 189,50 Km, dan terealisasi sepanjang 196,62 Km atau sebesar 103,8%. berdasarkan hasil inspeksi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dalam kondisi baik.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 panjang jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik sebesar 147,14 Km. atau sebesar 102,9% dari target 143,04 Km, maka ditahun 2017 capaian keinerja mengalami peningkatan sebesar 0,90% dari tahun lalu. Berdasarkan idikator ini juga kinerja Dinas PUPR menunjukkan kinerja tahun 2017 lebi baik dari tahun sebelumnya.

Bila diukur dengan target capaian kinerja renstra pada tahun pengukuran sebesar 76,8% dari yang ditargetkan sebesar 73,42% ini juga menunjukkan pencapaian melampaui target renstra tahun pengukuran.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Target akhir RPJMD 2018 yang semula sebesar 173,69 Km atau 85%, dengan Penetapan Status Ruas Jalan Kota Sepanjang 204,43 Km, dan melalui SK penetapan Status Ruas Jalan Kota Bima tahun 2016 tersebut menjadi 258,11 Km, atau 85%, maka pencapaian sasaran tahun pengukuran sebesar 76,18%.

Tabel 2.220. Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	24,04	29,56	32,06	108,45	100,00	52,35

b. Persentase luas permukiman kumuh

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan.

Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor

ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya pemukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.

Pada Tahun awal perencanaan permukiman kumuh tercatat seluas 108,98 Ha. Pada tahun 2017 direncanakan penanganan pengurangan wilayah kumuh mencapai 29,56 Ha atau sebesar 27,13% dan terealisasi mencapai 32,06 Ha atau 29,42%. Maka capaian kinerja tahun 2017 sebesar 108,45%

Jika dibandingkan pada tahun 2016 sudah terealisasi sebesar 26,20 Ha atau 24,04%. dari target 23,06 Ha dengan peningkatan 3,37 Ha. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 5,86 Ha atau 5,38% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2018 sebesar 108,98 Ha atau 31,71% maka pencapaian kinerja pada indicator ini sudah mencapai 29,42%. Dengan luas Kawasan Kumuh Tertangani sebesar 32,06 Ha.

Tabel 2.221. Persentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani

No.	Indikator	Capaian 2016 (%)	2017			Target Akhir Renstra	Capaian s.d. 2017 terhadap 2018 (%)
			Target (Ha)	Realisasi (Ha)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Porsentase Luas Permukiman Kumuh Tertangani	24,04	29,56	32,06	108,45	100,00	52,35

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, telah dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh serta Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Dari program-program tersebut antara lain telah dilaksanakan pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja, antara lain :

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
- Adanya kebijakan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi rumah tidak layak huni antara lain melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Adapun sejumlah hambatan/masalah yang dihadapi, anatra lain sebagai berikut :

- Pengelolaan sampah yang belum terpadu.
- Masih adanya masyarakat yang kurang sadar tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

c. Persentase luas kawasan tepian air yang tertata

Konsep kota tepian air (*waterfront city*) merupakan salah satu pendekatan yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima dalam mendorong pertumbuhan kawasan strategis Kota di sepanjang pesisir Teluk Bima khususnya mulai dari Perbatasan Kota di Kawasan Niu sampai dengan Kawasan Pelabuhan Laut Bima dengan luas keseluruhan 138,15 hektar. *Waterfrot city* (Kota Tepian) adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Sedangkan secara khusus di Kota Bima *waterfront city* Teluk Bima adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan tepi pantai yaitu mulai dari Niu – Lawata sampai Amahami. Penataan dan pembangunan kota tepian air diartikan sebagai suatu proses pembangunan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan. Kawasan *waterfront city* biasanya berupa area pelabuhan, perdagangan, pariwisata, permukiman atau industri.

Penataan kawasan Kota Tepian Air Teluk Bima pada tahun 2017 mampu terealisasi seluas sekitar 3,1 hektar, dari target sebesar 4,20 hektar kawasan tepian air teluk Bima yang diperjanjikan atau terealisasi 7,39 persen dari target 10 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penataan kawasan kota tepian air pada

tahun 2017 direalisasikan seluas 7,39% dari total kawasan rencana yang berupa penataan Lawata, taman perbatasan Niu, Masjid Terapung Amahami dan Penataan Pantai Kolo.

Tabel 2.222. Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Tepian Air yang Tertata

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
2015	2,71 %	2,53 %	93,37 %
2016	10,00 %	3,98 %	39,78 %
<b>2017</b>	<b>10,00%</b>	<b>7,39%</b>	<b>73,90 %</b>

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2018

Capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima sampai dengan tahun 2017 memang dirasakan melambat. Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan penataan dan pembangunan kawasan kota tepian air Teluk Bima yaitu antara lain :

- Belum tuntasnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail tata Ruang Kecamatan Rasanae Barat di tingkat BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) sehingga pembahasan raperda pada Badan legislasi belum bisa dilakukan. Hal ini sedikit menghambat investasi pada lahan-lahan privat dikarenakan arahan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi wilayah yang belum ditetapkan dalam bentuk perda RDTR.
- Pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat menyebabkan investasi di bidang infrastruktur perkotaan dan pembangunan kawasan juga berpengaruh.
- Dampak banjir bandang tahun 2016 sehingga alokasi anggaran lebih difokuskan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

#### 14. Sasaran Strategis Terpeliharanya keamanan dan ketertiban

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bima menargetkan penurunan jumlah kriminalitas dengan menetapkan indeks kriminalitas dibawah 100%. Data menyebutkan bahwa jumlah kriminalitas tahun 2017 sebanyak 936 kasus. Dari jumlah kasus tersebut yang sudah diselesaikan adalah sebanyak 274 kasus kemudian yang masih dalam penyelidikan 621 kemudian penyidikan 41 kasus. Dengan menggunakan formula perhitungan indeks kriminalitas maka diperoleh angka kriminalitas di Kota Bima adalah lebih dari 100 dari target 97,50 atau kurang dari 100. Jumlah kasus ini naik secara signifikan dibandingkan dengan jumlah tindak kriminalitas pada tahun 2016 yaitu sebanyak 201 kasus, dan tahun jumlah kriminalitas tahun 2015 yang tercatat sebanyak

185 kasus. Dengan menggunakan formulasi yang telah ditentukan dalam menghitung indeks kriminalitas, diketahui indeks kriminalitas tahun 2017 sebesar 108,64%. Indeks kriminalitas tahun 2016 bernilai lebih dari 100%, artinya terjadi kenaikan jumlah kasus dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.223. Capaian Kinerja Indeks Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015-2017

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Kriminalitas 2015	96,25	118,29	81,37
Angka Kriminalitas 2016	96,25	125,83	76,49
<b>Angka Kriminalitas 2017</b>	<b>97,50</b>	<b>133,87</b>	<b>72,83</b>

Dilihat dari jumlah kasus yang terjadi, terjadi kenaikan jumlah kasus kriminalitas dibanding tahun sebelumnya.

### Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Selain itu merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target pimpinan daerah yang harus dikejar dan didukung SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya, dan target ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Oleh karena itu indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD. Karakter indikator yang berbeda tersebut menjadikan sejumlah indikator memiliki tingkat validitas yang berbeda pula sesuai dengan tingkat kedekatan indikator kinerja tersebut dengan tujuannya.

Pada aspek, fokus dan urusan tertentu, indikator kinerja SKPD langsung dijadikan indikator RPJMD. Disadari bahwa penentuan indikator kinerja RPJMD dengan sejumlah target tertentu bukanlah hal yang mudah. Karena hal ini dipengaruhi capaian kegiatan atau program tertentu dengan sasaran tertentu pula, yang dilaksanakan SKPD maupun lintas SKPD. Indikator kinerja RPJMD ini dibuat sebagai acuan indikator kinerja SKPD, meski demikian penyusunannya bersifat timbal balik. Dengan kata lain meski menjadi acuan SKPD, tetapi penentuan indikator kinerja RPJMD juga memperhatikan kemampuan SKPD berdasarkan analisa SWOT.

Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang diinginkan oleh Walikota dan Wakil Walikota Bima dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan

anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yang diinginkan oleh Walikota dan Wakil Walikota itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah.

Dengan kondisi sekarang, maka evaluasi pencapaian kinerja indikator kinerja daerah menjadi sangat penting menurut aspek-aspek dan urusan yang sudah diklasifikasikan dalam RPJMD. Informasi hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah menjadi sangat penting saat ini mengingat masa berlaku RPJMD Kota Bima 2013-2018 sudah hampir berakhir sehingga dalam proses penyusunan RPJMD periode berikutnya maupun penyusunan RKPD tahun 2019 memerlukan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan tahun 2017. Berikut capaian indikator kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.



Tabel 2.224. Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2013-2018

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014		2015		2016		2017		2018		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>													
<b>Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi</b>													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	5,46%	5,50%	5,58%	5,60%	5,89%	5658%	5,76%	5,70%	5,78%	6,00%		6,20%
1.2.	PDRB Per Kapita (Juta Jiwa)	Rp. 3,51	Rp. 3,63	Rp. 2,17	Rp. 3,76	Rp. 2,29	Rp. 3,91	Rp. 2,42	Rp. 4,08		Rp. 4,25		Rp. 4,25
1.3.	% penduduk miskin	9,91%	9,74%	9,74%	9,11%	9,85%	8,53%	9,51%	7,90%	9,27%	7,00%		7,00%
1.4.	IPM	71,72	72,23	71,72	72,75	72,23	73,27	72,99	73,79	73,67	74,31		74,31
<b>Fokus Kesejahteraan Masyarakat</b>													
1.	Urusan Pendidikan												
1.1.	Angka melek huruf	92,00	93,15	96,40	94,30	96,42	95,45	96,26	96,55	99,85	97,76		97,76
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,22	10,50	10,50	11,00	10,50	11,00	10,50	11,00	10,50	11,50		11,5
1.3.	Angka Partisipasi Kasar	280,9	280,9		299,0		305,1		313,3		320,5		320,5

	(APK)												
	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini	79,32	79,32	62,72	80,92	88,85	82,51	56,01	84,09	63,04	85,68		85,68
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) anak Usia Dini	79,30	79,30	62,70	80,99	88,83	81,77	56,00	82,55	63,04	83,33		83,33
1.4.	Rasio guru per kelas rata-rata per 1000 jumlah murid dan rasio guru dengan murid												
	a. SD/MI	1:28	1:27	1:27	1:26	1:26	1:25	1:25	1:24	22 : 1	1:23		1:23
	b. SMP/MTs	1:29	1:29	1:29	1 : 28	1:28	1:27	1:26	1:26	26 : 1	1:25		1:25
2.	Urusan Kesehatan												
2.1.	Usia Harapan Hidup	63,22	64,07	69,03	64,32	69,12	65,27	69,35	66,22		67,17		67,17
2.2.	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.3.	Persentase balita gizi buruk	5,60%	5,02%	0,08%	4,87%	0,06%	4,49%	0,11%	4,12%	0,10%	4,00%		4,00%
Fokus Seni Budaya dan Olahraga													
1.	Urusan Kebudayaan												
1.1	Jumlah Atraksi Budaya	2 Kali setahun	1 kali		2 kali		3 kali		4 kali	6	5 kali		5 kali
1.2	Jumlah grup kesenian (sanggar seni) per 10.000 Penduduk	4	4	32	5	40	6	64	7	65	10		10
1.3	sanggar seni yang aktif	5	7		10		15		17	26	20		20
2.	Urusan Pemuda dan Olahraga												
2.1.	Capaian prestasi pemuda dan olah raga Tingkat Provinsi	9	12	16	12	17	12	13	12		12		12

	- Capaian Prestasi Pemuda	2	5	4	5	6	5	3	5		5		5
	- Capaian Prestasi Olah Raga	7	7	12	7	11	7	10	7		7		7
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>													
<b>Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar</b>													
1.	Urusan Pendidikan												
1.1.	Angka melek huruf	92,0	93,2	96,4	94,3	96,4	95,5	96,3	96,6	99,9	98,0		98,00
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,22 Thn	10,50	9,58	11,00	9,96	11,00	10,13	11,00	10,13	11,5		11,5
1.3.	Rata2 Nilai Ujian Nasional SD/MI/Paket A	5,91	6,51	6,51	7,01	5,60	6,51	6,89	7,00	7,51	7,51		7,15
1.4.	Rata2 Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B	5,96	6,18	6,18	6,88	5,71	7,00	3,75	7,05	4,50	7,18		7,18
	Jumlah Siswa yang berprestasi Osn Tingkat Provinsi												
	- SD/MI/Paket A	2,0	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00		3,00		3,00
	- SMP/MTs/Paket B	3,0	3,00	-	3,00	-	3,00	-	3,00		3,00		3,00
	Jumlah Siswa yang berprestasi Osn Tingkat Nasional												
	- SD/MI/Paket A	1,0	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	0,00	1,00		1,00
	- SMP/MTs/Paket B	1,0	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00	0,00	1,00		1,00
	Prosentase Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan												
	- SD/MI/Paket A	100,0	100,00	98,28	100,00	100,00	100,00	97,35	100,00	97,35	100,00		100,00
	- SMP/MTs/Paket B	100,0	100,00	99,35	100,00	100,00	100,00	98,25	100,00	98,25	100,00		100,00
	Porsentase Angka Mengulang Kelas												
	- SD/MI/Paket A	0,0	0,00	360 siswa	0,00	322 siswa	0,00	242 siswa	0,00	163 siswa	0,00		0,00
	- SMP/MTs/Paket B	0,0	0,00	15 siswa	0,00	20 siswa	0,00	3 siswa	0,00	11 siswa	0,00		0,00
	Porsentase Angka Putus Sekolah												

	- SD/MI/Paket A	0,03	0,03	51 siswa	0,02	30 siswa	0,01	47 siswa	0,01	36 siswa	0,00		0,00
	- SMP/MTs/Paket B	0,0	0,04	4 siswa	0,04	51 siswa	0,03	31 siswa	0,03	6 siswa	0,01		0,01
	Porsentase Jumlah Guru yang lulus UKG												
	- SD/MI	-	-	-	-	-	0,08	-	0,10		0,14		0,14
	- SMP/MTs	-	-	-	-	-	0,10	-	0,14		0,21		0,21
	Rasio Siswa Perkelas												
	- SD/MI	25:1	24:1	25 : 1	23:1	22 : 1	"22:1	21 : 1	21 : 1	21 : 1	20:1		20:1
	- SMP/MTs	29:1	29:1	30 : 1	28:1	21 : 1	27:1	24 : 1	26:1	26 : 1	25:1		25:1
	Persentase Sarana Pembelajaran Teknologi Informasi												
	- SD/MI	0,0	1,00	0,00	2,00	7,00	3,00	12,00	5,00	12,00	6,00		6,00
	- SMP/MTs	0,0	1,00	0,00	2,00	3,00	4,00	14,00	5,00	14,00	6,00		6,00
1.5	Rasio guru per kelas rata-rata per 1000 jumlah murid dan rasio guru dengan murid												
	- SD/MI	1:28	1:27		1:26	22 : 1	1:25	21 : 1	1:24	21 : 1	1:23		1:23
	- SMP/MTs	1:29	1:29		1:28	21 : 1	1:27	24 : 1	1:26	24 : 1	1:25		1:25
1.6	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK												
	- SD/MI	50	50	0	60	0	70	7	80	12	100		100
	- SMP/MTs	30	30	0	40	0	50	3	60	14	70		70
2.	Urusan Kesehatan												
2.1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,20%	0,17%	0,06%	0,18%	0,06%	0,17%	0,08%	0,16%	0,08%	0,15%		0,15%
2.2	Angka Kematian Bayi	9,27/1000 kh	7.02/1000 kh	19 kss	5,81/1000 kh	17 kss	3,60/1000 kh	25 kss	2,39/1000 kh	6 kss	0,59/1000 kh		0,59/1000 kh
2.3	Angka Kematian Ibu AKI)	198,7/100.000 KH	150/100.000 KH	75/100000KH	120/100.000 KH	151/100000KH	100/100.000 KH	87/100000KH	80/100.000 KH	148/100000KH	75/100.000 KH		75/100.000 KH
2.4	Persentase Kelurahan STBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
2.5	Persentase sarana Pelayanan kesehatan yang	50%	50%	60%	60%	60%	70%	60%	80%	60%	90%		90%

	memenuhi standar												
2.6.	Persentase penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI'	65%	70%	100%	75%	100%	80%	74%	85%	100%	90%	100%	90%
2.7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2%	9%	60%	8%	93%	7%	95%	6%		5%		5%
2.8.	% Posyandu Aktif	75%	75%		75%		77%		77%		77%		77%
2.9.	% Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.10.	% Cakupan Penjangkaran kesehatan siswa SD/setingkat	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.11.	% Pemeriksaan kesehatan siswa sekolah lanjutan	0%	35,00%		35,00%		35,00%		35,00%		35,00%		35,00%
2.12.	% Pembinaan Sekolah Sehat	15 sklh	15 sklh		15 sklh		15 sklh		15 sklh		15 sklh		15 sklh
2.13.	Presentase balita di timbang berat badannya (%D/S)	56,41%	61,06%		66,86%		70,74%		75,42%		80,20%		80,20%
2.14.	presentase penyediaan Mp-Asi untuk anak 6-24 bln Gakin	65,82%	65,82%		65,82%		65,82%		65,82%		65,82%		65,82%
2.15.	% Jumlah kelurahan KLB yg ditanggulangi <24 jam	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
2.16.	% Poskesdes	97,36%	97,36%		97,36%		100%		100%		100%		100%
2.17.	% Puskesmas	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5		1/5
2.18.	% Tersedianya sarana & prasarana rumah sakit	0%	20%		20%		20%		20%		20%		20%
2.19.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	109,13%	100%	100%	100%	104%	100%	111%	100%	114%	100%		100%
2.20.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,98%	85,00%	91%	85%	92%	90%	83%	90%		95%		95%

2.21.	Cakupan kunjungan ibu hamil ( K4)	92,42%	95,00%	98%	95%	97%	95%	89%	97%		97%		97%
2.22.	Cakupan peserta KB aktif	28,30%	70%	83%	70%	83%	75%	88%	80%		80%		80%
2.23.	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3)	89,52%	97,93%	93%	90%	95%	99%	99%	100%		100%		100%
2.24.	Cakupan Kunjungan Bayi	89,47%	92%	94%	90%	95%	90%	86%	90%		95%		95%
2.25.	Cakupan Kunjungan Balita	71,35%	87,47%	72%	80%	82%	80%	73%	80%		82%		82%
3.	Urusan Pekerjaan Umum												
3.1.	% panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	53,00%	61,63%	61,63%	67,15%	67,16%	75,00%	72,01%	80,00%	76,18%	85,00%		85%
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi Teknis	43,00%	47,00%	0,49	50,00%	0,51	52,00%	0,55	60,00%	0,72	65,00%		65,00%
3.3.	Persentase Jaringan Irigasi Teknis	43,00%	47,00%	48,75%	50,00%	51,20%	52,00%	54,53%	60,00%	71,74%	65,00%		65,00%
3.4.	% rumah tangga pengguna air bersih	70,00%	75,88%	76,21%	80,83%	80,87%	87,00%	87,19%	95,00%	93,25%	100,00%		100,00%
3.5.	% rumah tangga bersanitasi	71,00%	74,67%	74,92%	76,50%	76,50%	80,00%	80,23%	90,00%	87,23%	100,00%		100,00%
3.6.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,35%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,03%	0,00%		0,00%
3.7.	% luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata	1,00%	2,00%		2,71%		20,00%		45,00%		60,00%		60,00%
3.8.	% konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%		97,75%		98,50%	100,51%	99,20%	101,45%	100,00%		100,00%
3.9.	%Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,64%	79,64%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
3.10.	% Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase	27,00%	27,00%	27,86%	35,00%	36,20%	42,00%	43,99%	46,00%	57,03%	50,00%		50,00%
3.11.	% Panjang Sungai Tertangani	12,60%	12,60%	43,97%	14,45%	45,92%	16,30%	47,26%	18,15%	50,89%	20,00%		20,00%
3.12.	Luas Wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	20,00%	20,00%	-	40,00%	-	60,00%	-	100,00%	2 dokumen	100,00%		100,00%
3.13.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	22,31%	27,00%	4,31%	32,00%	4,81%	37,00%	5,20%	42,00%	5,54%	47,00%		47,00%

4.	Urusan Perumahan												
4.1.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,35%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,03%	0,00%		0,00%
4.2.	% Rumah Layak Huni	92,82%	94,00%	93,66%	95,00%	91,51%	97,00%	88,88%	99,00%	91,28%	100,00%		100,00%
4.3.	Ketepatan waktu Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	> 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit		< menit
5.	Urusan Penataan Ruang												
5.1.	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	0%	20%	0%	40%	0%	60%	0%	100%	0%	100%		100%
5.2.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,35%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,04%	0,00%		0,00%
5.3.	% Bangunan yang memiliki sertifikat IMB	22,31%	27,00%	4,31%	32,00%	4,81%	37,00%	5,20%	42,00%	5,54%	47,00%		47,00%
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan												
6.1.	% SKPD yang dokumen perencanaannya selaras RPJMD	60,00%	60,00%	-	70,00%	58,43%	80,00%	83,01%	90,00%	100,00%	100,00%		100,00%
6.2.	% Program RKPD yang selaras dengan RPJMD	60,00%	70,00%	88,66%	80,00%	88,66%	90,00%	97,15%	100,00%	88,95%	100,00%		100,00%
6.3.	% Dokumen RKPD dalam KUA PPAS	60,00%	70,00%	100,00%	80,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
6.4.	% Perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Permen PAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	35,00%	50,00%	-	65,00%	-	75,00%	80,61%	85,00%	100,00%	90,00%		90,00%
6.5.	% Dokumen Perencanaan Strategis SKPD dalam RKPD	45,00%	48,00%	-	52,00%	-	57,00%	45,00%	60,00%	60,00%	80,00%		80,00%
6.6.	Tersedianya Rencana Induk Kelitbangan sesuai dengan ketentuan penyusunan	-	-	20,00%	-	30,00%	-	40,00%	50,00%	50,00%	60,00%		60,00%
6.7.	% Penyajian Basis Data Kelitbangan	-	-	10,00%	-	15,00%	-	20,00%	30,00%	30,00%	50,00%		50,00%

6.8	% Hasil Kelitbangan yang menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	10,00%	15,00%	1,00%	20,00%	3,00%	25,00%	9,00%	30,00%	35,00%	40,00%		40,00%
7.	Urusan Perhubungan												
7.1.	% ketersediaan fasilitas dan prasarana LLAJ	0,00%	100,00%	95,00%	90,00%	85,00%	80,00%	75,00%	70,00%	55,00%	0,00%		0,00%
7.2.	Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%		97,75%		98,50%	100,51%	99,20%	101,45%	100%		100%
7.3.	Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR	85,00%	90,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
8.	Urusan Lingkungan Hidup												
8.1.	% penanganan sampah	20,50%	25,00%	90,00%	30,00%	95,07%	35,00%	65,87%	40,00%	54,10%	45,00%		45,00%
8.2.	Penurunan angka pencemaran dan perusakan lingkungan	30,00%	48,00%	50,00%	52,00%	55,00%	58,00%	65,00%	78,00%	76,00%	100,00%		100,00%
8.3.	% Sumber mata air terlindungi	60%	62%	3 lokasi	71%	4 lokasi	38%	5 lokasi	41%	5 lokasi	43%		43%
8.4.	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian SDA	0 Pokmas	0 Pokmas	4 pokmas	2 Pokmas	4 pokmas	0 Pokmas	5 pokmas	4 Pokmas	5 pokmas	6 Pokmas		6 Pokmas
8.5.	% tersedianya RTH publik minimal 20%	6,60%	8,00%	19,00%	10,00%	20,90%	21,00%	22,80%	25,00%	23,75%	30,00%		30,00%
9.	Urusan Pertanahan												
9.1.	Cakupan lahan pemerintah daerah yang bersertifikat	2,24 Ha	1,19 Ha		3,07 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha
10.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil												
10.1	Rasio penduduk yang telah memiliki e-KTP	6,13%	6,13%	58,17%	7,05%	64,86%	7,98%	6,66%	8,35%	78,31%	9,73%		9,73%



10.2	% jumlah pelayanan dibidang pendaftaran penduduk yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	6,13%	6,13%	4,09%	6,37%	5,71%	6,60%	6,09%	7,63%	7,25%	8,53%	8,53%
10.3	Rasio kepemilikan akta kelahiran	6,05%	6,05%	2,79%	6,37%	2,91%	7,80%	3,75%	8,59%	4,98%	9,71%	9,71%
10.4	Rasio pasangan yang berAkta Nikah	6,05%	6,05%	5,90%	7,05%	6,25%	7,05%	6,09%	7,25%	6,66%	8,18%	8,18%
10.5	% Penerbitan Akte Kematian	6,15%	6,15%	3,09%	7,28%	5,39%	7,28%	375,69%	8,59%	511,90%	9,28%	9,28%
11.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
11.1	% Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	31,43%	38,26%	50,37%	43%	50%	50,04%	44,91%	52,74%	37,31%	52,74%	52,74%
11.2	% partisipasi perempuan di Lembaga Swasta	44,89%	45,68%	49,63%	48%	50%	49,02%	47,48%	49,63%	57,94%	49,63%	49,63%
11.3	% partisipasi perempuan di lembaga legislatif	4,00%	12,00%	8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
11.4	% pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	58,84%	89,47%	0,02%	81,81%	0,05%	70,51%	0,09%	147,11%	100,00%	147,11%	147,11%
11.5	Terwujudnya Kota Bima Kota Layak Anak	-	1	-	2	-	3	-	5	100,00%	10	10
12.	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
12.1	Cakupan peserta KB aktif	62,00%	64,00%	44,90%	65%	76,80%	66,00%	98,01%	68,00%	98,36%	69,57%	69,57%
12.2.	Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,20%	2,54%	104,78%	3%	100,82%	2,69%	105,60%	2,74%	405,84%	2,78%	2,78%
12.3.	% keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	34,72%	35,00%	131,43%	39%	115,38%	40,00%	102,50%	45,00%	71,11%	67,50%	67,50%
13.	Urusan Sosial											
13.1	Persentase PMKS yang	16,10%	16,10%	48,13%	18,52%	74,99%	21,30%	78,69%	24,50%	84,59%	28,18%	28,18%

	ditangani												
14.	Urusan Ketenagakerjaan												
14.1	Persentase Pengangguran terbuka	-	-	9,21%	-	10%	10,15%	10,15%	10,05%	8,89%	10,00%		10,00%
14.2	Porsentase keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	60,00%	60,50%	69,32%	61%	67%	70,00%	67,02%	75,00%	73,24%	80,50%		80,50%
14.3	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	117,00%	100,00%		100,00%
15.	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah												
15.1	Jumlah UMKM	1874 UMKM	1956 UMKM	3535 UMKM	2042 UMKM	4944UMK M	2135 UMKM	6303 UMKM	2226 UMKM	7080 UMKM	2323 UMKM		2323 UMKM
15.2	Jumlah Koperasi Aktif	64	74	72	81	85	86	93	96	108	101		101
16	Urusan Penanaman Modal												
16.1	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	1-4 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-2,5 hari	1,25 hari	1-2,5 hari		1-2,5 hari
17.	Urusan Kebudayaan												
17.1	Persentase Kesenian/Seni Bima yang dilestarikan	0,35%	35,00%	-	45,00%	-	55,00%	-	65,00%	65,00%	75,00%		75,00%
17.2	Persentase Permainan Tradisional yang dilestarikan	6,67%	6,67%	-	13,33%	-	20,00%	-	26,67%	26,67%	33,33%		33,33%
17.3	Persentase Adat Tradisi dan Budaya yang dilestarikan	25,00%	25,00%	-	32,50%	-	40,00%	-	47,50%	47,00%	55,00%		55,00%
17.4	Persentase Peninggalan Sejarah yang dilestarikan	1,64%	1,64%		4,92%		8,20%		11,48%		16,39%		24,59%
17.5	Meningkatkan Destinasi Wisata Budaya	2000	2000	-	2500	-	3000	-	3500	3270	4000		5000
18.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga												

18.1.	Capaian prestasi pemuda dan olah raga	2	5		5		5		5		25		25
18.2	Jumlah Klub Olahraga	20	25		27		30		37		38		38
18.3	Jumlah gedung olahraga	1	1		2		3		3		4		4
19.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
19.1.	jumlah konflik SARA	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0
19.2	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	2%	5%	15%	10%	15%	15%	20%	30%	20%	50%		50%
19.3	% Gejala Konflik yang diatasi	10%	15%	10%	20%	10%	25%	15%	30%	30%	30%		30%
19.4	Persentase Cakupan wilayah potensi konflik	30%	25%	5%	20%	10%	18%	5%	15%	15%	10%		10%
19.5	Persentase Pembinaan terhadap LMS dan Ormas	20%	30%	5%	40%	20%	50%	15%	60%	40%	65%		65%
19.6	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	5%	8%	10%	13%	15%	17%	25%	20%	20%	20%		20%
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
20.1.	% SKPD dengan indeks SAKIP baik	45%	52,94%	62,07%	64,71%	68,97%	76,47%	75,86%	80,00%	82,76%	88,24%		88,24%
20.2.	Indeks SAKIP	C	CC	C	B	CC	B	B	BB	B	A		A
20.3.	Cakupan peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	4 MOU	10 MOU		12 MOU		12 MOU		12 MOU		12 MOU		12 MOU
20.4.	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)	350 juta	750 juta	785.000.000	1.5 M	##### ###	3 M	##### ###	4 M	4,230 M	4 M		4 M

20.5.	% APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	85,00%	88,00%	100,00%	90,00%	88,00%	95,00%	93,33%	96,00%	94,29%	97,00%		98,00%
20.6.	% publikasi program pengawasan	0%	95%		100%		100%		100%		100%		100%
20.7.	Perolehan nilai pada MTQ tingkat Provinsi	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu		5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'9 medali emas, 6 medali perak, 5 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'3 medali emas, 3 medali perak, 2 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'7 medali emas, 8 medali perak, 4 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu		5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu
20.8.	Pelaksanaan SIDAK pegawai untuk meningkatkan disiplin PNS	15 kali	25 kali		30 kali		35 kali		25 kali		25 kali		25 Kali
20.9.	Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjenjangan struktural	300 org	322		445 Org		350 org		380 org		450 org		450 org
20.10.	Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi	600 org	957 org		834 org		607 org		603 org		940 org		940 org
20.11.	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	1-4 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1 -2,5 hari		1 -2,5 hari
20.12.	Jumlah Izin yng diterbitkan		1775		1954		2149		2367	2033	2591		2591
	- Izin gangguan (Ho)	54 lembar (7)	500	600	550	535	605	437	666	472	723		723
	- Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	50	35	18	39	20	42	10	47	7 lembar	51		51
	- Bahan Bakar Minyak tanah (BBMT)	30 lembar (36,1)	75	54	83	81	92	77	102	95 lembar	112		112
	- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	190 lembar (99,1%)	100	117	110	112	121	105	132	129 lembar	143		143
	- Surat Izin Usaha Produksi (SIUP)	879 lembar (114%)	700	733	770	744	847	793	932	812 lembar	1025		1025
	- Izin Tand Daftar Perusahaan (TDP)	594 lembar (216 %)	250	450	275	503	303	560	333	672 lembar	366		366

	- Izin Tand Daftar Industri (TDI)	52 lembar (62,7%)	75	52	83	52	91	46	102	45 lembar	112		112
	- Izin Tanda Daftar Gudang (TDG)	13 lembar (23,6)	40	12	44	12	48	18	53	17 lembar	59		59
20.13	Jumlah kelurahan Tangguh Bencana	0,00%	6	6	15	15	20	20	25	26	38		38
21.	Ketahanan Pangan												
21.1	- Ketersediaan energi dan protein perkapita	93,81%	80,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	95,35%	90,00%		90,00%
21.2	- Penguatan cadangan pangan	0,00%	55,00%	0,00%	60,00%	58,33%	60,00%	62,21%	60,00%	64,12%	60,00%		60,00%
21.3	- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	66,67%	81,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%		90,00%
21.4	- Stabilitas harga dan pasokan pangan	97,07%	84,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%		90,00%
21.5	- Skor pola pangan dan harapan (PPH)	71,00%	87,00%	93,00%	90,00%	94,60%	90,00%	95,00%	90,00%	95,30%	90,00%		90,00%
21.6	- Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0,00%	65,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%		80,00%
21.7.	- Penanganan daerah rawan pangan	50,00%	55.50%	100%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%	60,00%	100,00%	60,00%		60,00%
21.8.	- Persentase daerah rawan pangan yang mendapat penanganan	90,00%	90%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%
	Ketersediaan Informasi Harga Komoditi Pertanian (minggu)	48	48	52	48	52	48	100	48	100	48		48
21.9.	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton):	42.889	47.584	51.515	52.830	55.731	58.695	50.553	65.266	50.817	72.635		
	- Padi (GKP)	36.900	40.590	41.879	44.649	42.425	49.114	35.808	54.025	34.615	59.428		59.428
	- Jagung (PK)	2.466	2.959	3.710	3.551	8.028	4.261	9.955	5.113	12.106	6.136		6.136
	- Kedelai (BK)	1.855	2.041	2.129	2.245	2.228	2.469	1.697	2.716	1.309	2.987		2.987

	- Kacang Tanah (BK)	212	254	319	305	281	366	383	440	368	528		528
	- Kacang Hijau (BK)	6	7	11	9	11	10	110	12	62	15		15
	- Ubi Kayu (UB)	1.374	1.649	3.372	1.979	2.679	2.374	2.600	2.849	2.313	3.419		3.419
	- Ubi Jalar (UB)	76	84	95	92	79	101	-	111	44	122		122
21.10.	Petani yang menerapkan teknologi pertanian sesuai anjuran	10,00%	15,00%	100,00%	20,00%	100,00%	23,50%	100,00%	30,00%	100,00%	30,00%		30,00%
21.11.	Penyuluh yang terampil dalam pendampingan dan pengawalan penerapan teknologi pertanian sesuai anjuran	24,00%	30,00%	100,00%	35,00%	100,00%	40,00%	100,00%	45,00%	100,00%	50,00%		50,00%
21.12.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	18.000 ton	18.500 ton	-	19.500 ton	-	20.000 ton	5143 ton	22.567 Ton	8017 ton	24.000 ton		24.000 ton
21.13.	- Persentase kesediaan pangan utama	5,00%	8,00%	0,00%	7,00%	0,00%	10,00%	20-40%	14,00%	20-40%	14,00%		14,00%
21.14.	- Ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	95,35%	100,00%		100,00%
21.15.	- persentase cadangan pangan	7,00%	7,00%	0,00%	8,00%	0,00%	10,00%	0,00%	12,00%	60,00%	15,00%		15,00%
21.16.	Terjaganya distribusi dan akses pangan												
	- persentase kenaikan harga pangan	12,00%	10,00%	7,56%	8,00%	1,04%	6,00%	26,62%	5,00%	3,00%	3,00%		3,00%
	- persentase penurunan pasokan pangan	20,00%	20,00%	17,00%	18,00%	15,00%	16,00%	14,00%	14,00%	11,43%	12,00%		12,00%
21.17.	Meningkanya kualitas pangan masyarakat												
	- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	70,00%	75,00%	80,19%	78,00%	81,28%	80,00%	82,30%	86,00%	87,50%	90,00%		90,00%
	- persentase kualitas pangan yang sesuai standar keamanan pangan	95,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	20,00%	100,00%	20,00%	100,00%		100,00%
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												

22.1.	Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang ditangani	30%	150 unit (8,20%)	75 unit (6,34%)	150 unit (8,20%)	463 unit (8,49%)	150 unit (8,20%)	534 unit (11,12)	275 unit (15,04%)	810 unit (8,72%)	275 unit (15,04%)		50%
22.2.	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%
22.3.	Perolehan prestasi keikutsertaan Lomba Kelurahan	0,05	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5
22.4.	Perolehan prestasi keikutsertaan Lomba Posyandu	0,05	5	5	5	5	5	5	5	5	5		5
22.5.	Jumlah Aplikasi IT dalam Tata Kelola Pemerintah	2	2	0	4	0	6	0	8	17	10		10
23.	Statistik												
23.1.	Persentase Ketersediaan data SIPD	1 paket/5 Tahun	190 Buku		140 Buku		160 Buku		140 Buku		160 Buku		790 Buku
23.2.	tersedianya data statistik daerah	0	20%	0%	25%	0%	30%	0%	40%	0%	45%		50%
23.3.	Tersedianya informasi potensi sumber daya investasi daerah	1dokumen	2 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen
25.	Komunikasi dan Informatika												
25.1.	Jumlah Aplikasi IT dalam Tata Kelola Pemerintah	2	2	0	4	0	6	0	8	17	10		10
26.	Perpustakaan												
26.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	150 orang	1000 orang	2598 orang	1700 orang	3000 orang	2500 orang	3874 orang	3000 orang	4124 orang	3500 orang		3500 orang

Fokus Layanan Urusan Pilihan													
1.	Pertanian												
1.1.	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)	41.251,0	45.400,0	47.718,0	47.660,0	52.681,0	49.019,0	47.460,0	50.991,0	48.330,0	51.610,0		51.610,0
	- Padi (GKG)	36.900 ton	40.000 ton	41.879	41.072 ton	42.425	42.200 ton	35.808	43.900 ton	34.615	44.200 ton		44.200 ton
	- Jagung	2.496 ton	3.500 ton	3.710	4.625 ton	8.028	4.787 ton	9.955	4.978 ton	12.406	5.202 ton		5.202 ton
	- Kedelai	1.855 ton	1.900 ton	2.129	1.963 ton	2.228	2.032 ton	1.697	2.113 ton	1.309	2.208 ton		2.208 ton
	-Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	60,00%	65,00%	100,00%	80,00%	100,00%	80,00%	100%	80,00%	100,00%	80,00%		80,00%
1.2.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	42.889	47.584	51.515	52.830,0	55.731,0	58.695,0	50.553,0	65.266,0	50.817,0	72.635,0		72.635,0
	- Padi (GKP)	36.900	40.590	41.879	44.649	42.425	49.114	35.808	54.025	34.615	59.428		59.428
	- Jagung (PK)	2.466	2.959	3.710	3.551	8.028	4.261	9.955	5.113	12.106	6.136		6.136
	- Kedelai (BK)	1.855	2.041	2.129	2.245	2.228	2.469	1.697	2.716	1.309	2.987		2.987
	- Kacang Tanah (BK)	212	254	319	305	281	366	383	440	368	528		528
	- Kacang Hijau (BK)	6	7	11	9	11	10	110	12	62	15		15
	- Ubi Kayu (UB)	1.374	1.649	3.372	1.979	2.679	2.374	2.600	2.849	2.313	3.419		3.419
	- Ubi Jalar (UB)	76	84	95	92	79	101	-	111	44	122		122
1.3.	Produksi perkebunan (Ton) = Jumlah produksi perkebunan pada tahun n 1) Tembakau 2) Jambu mente 3) Kelapa	1) 3,30 2) 168,78 3) 26,69	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 3,40 2) 161,13 3) 25,71	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 2,10 2) 158,41 3) 25,56	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 210 2) 155,91 3) 27,45	1) 3,40 2) 173,84 3) 27,49	1) 2,10 2) 157,65 3) 27,07	1) 3,40 2) 73,84 3) 27,49		1) 3,40 2) 73,84 3) 27,49
1.4.	Pengkartuan Ternak (ekor)	18.373	20.110	15.212	21.799	15.396	23.631	15.186	25.616	18.134	27.767		27.767



1.5.	Vaksinasi Ternak	17.500	18.445	17.814	19.441	16.818	20.491	21.970	21.597	18.388	22.764		22.764
1.6.	Penurunan Angka Kematian Pedet	18%	17%	18%	16%	17%	15%	20%	14%	19%	13%		13%
1.7.	Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular	10%	12%	87%	14%	26%	16%	42%	18%	99%	20%		20%
2.	Kahutanan												
2.1.	Penanganan hutan dan lahan ="Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi" /"Luas hutan dan lahan" "x100%"	437/14.980 ,95=(2,60%)	500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)		500/14.980,95 (3,34%)
2.2.	Jumlah pelanggaran di bidang kehutanan : 1. Kebakaran hutan 2. Perladangan liar 3. Peredaran hasil hutan	1. 24 kejadian 2. 17 kejadian 3. 15 kejadian	1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.		1. 5 kej. 2. 4 kej. 3. 3 kej.
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral												
3.1.	Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	13,20%	15,26%	100,00%	17,38%	99,85%	19,68%	0,00%	22,24%	0,00%	25,00%		25,00%
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB	5,58%	5,78%	0,39%	5,87%	0,39%	5,90%	0,37%	5,96%		5,99%		5,99%
4.	Pariwisata												
4.1.	Kunjungan wisata	7.785 Org	8.583 Org	18805	9.464 Org	19168	10.434 Org	19.503	11.505 Org		12.685 Org		12.685 Org
5.	Kelautan dan Perikanan												
5.1.	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	9 klp	9 Klp	11 klp	12 klp	14 klp	15 klp	15 klp	18 klp	22 klp	21 klp		21 klp

	- Jumlah kelompok pemula	5 klp	5 klp	5 klp	6 klp	7 klp	7 klp	7 klp	8 klp	10 klp	9 klp		9 klp
	- Jumlah kelompok madya	2 klp	2 klp	4 klp	3 klp	7 klp	4 klp	4 klp	5 klp	6 klp	6 klp		6 klp
	- Jumlah kelompok utama	2 klp	2 klp	3 klp	3 klp	0 klp	4 klp	4 klp	5 klp	6 klp	6 klp		6 klp
5.2.	Jumlah Produksi perikanan:	2370,30 Ton	2.466,92 Ton	2908,89 Ton	2622,85 (ton)	2689,30 Ton	2780,22 Ton	2526,27 Ton	2947,03 Ton	2822,61 Ton	3123,85 Ton		3123,85 Ton
	a. Perikanan tangkap	1.580,50 Ton	1.675,33 Ton	1630,50 Ton	1775,85 (ton)	1712,60 Ton	1882,40 Ton	1744,60 Ton	1995,34 Ton	1995,34 Ton	2115,06 Ton		2115,06 Ton
	b. Perikanan budidaya	789,80 Ton	791,59 Ton	1278,39 Ton	847 (ton)	976,70 Ton	897,82 ton	781,67 Ton	951,69 ton	827,27 Ton	1008,79 Ton		1008,79 Ton
5.3.	Jumlah produk olahan yang dihasilkan (ton)	16.670	16.670	1278,39 Ton	1785	976,70 Ton	18.740	781,67 Ton	19.860	827,27 Ton	20.850		20.850
5.4.	Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun	29,04 kg/kapita/ tahun	29,04 kg/kapita / tahun	39,35 kg/kapita / tahun	32,54 kg/kapita / tahun	33,90 kg/kapita / tahun	35,79 kg/kapita / tahun	31,96 kg/kapita / tahun	39,37 kg/kapi ta/ tahun	38,83 kg/kapita / tahun	43,31 kg/kapita / tahun		43,31 kg/kapita/ tahun
6.	Perdagangan												
6.1.	Penyediaan pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdangan	6	2	1	2	1	1	1	1	1	1		1
6.2.	Jumlah Pedagang Kaki Lima Dan Asongan yang ditangani	272 orang	246		370 orang		400 orang		440 orang		485 orang		485 orang
7.	Perindustrian												
7.1.	Jumlah industri Kecil Menengah (IKM)	121 IKM	129 IKM	-	142 IKM	-	149 IKM	275 IKM	157 IKM	94 IKM	164		164
7.2.	Jumlah sentara industri yang ditangani	73 sentra	73	-	73	-	74	73	74	73	74		74
8.	Ketransmigrasian												
8.1.	Transmigran swakarsa	70 Org	100 Org		120 Org		130 Org		140 Org		150 Org		150 Org

ASPEK DAYA SAING DAERAH													
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	5,82%	6,21%	5,58%	6,52%	5,89%	6,75%	5,76%	6,92%	5,78%	7,02%		7,02%
2.2.	PDRB Per Kapita	Rp. 3,51 Juta/Jiwa	Rp. 3,63 Juta/Jiwa	Rp.2,17 Juta/Jiwa	Rp. 3,76 Juta/Jiwa	Rp.2,29 Juta/Jiwa	Rp. 3,91 Juta/Jiwa	Rp.2,42 Juta/Jiwa	Rp. 4,08 Juta/Jiwa		Rp. 4,25 Juta/Jiwa		Rp. 4,25 Juta/Jiwa
2.3.	Pertumbuhan PAD	20%	20%	50,76%	20%	3,86%	20%	24,19%	20%	16,27%	20%		20%
2.	Pertanian												
1.1.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	42.889	47.584	51.515	52.830	55.731	58.695	50.553	65.266	50.817	72.635		72.635
	- Padi (GKP)	36.900	40.590	41.879	44.649	42.425	49.114	35.808	54.025	34.615	59.428		59.428
	- Jagung (PK)	2.466	2.959	3.710	3.551	8.028	4.261	9.955	5.113	12.106	6.136		6.136
	- Kedelai (BK)	1.855	2.041	2.129	2.245	2.228	2.469	1.697	2.716	1.309	2.987		2.987
	- Kacang Tanah (BK)	212	254	319	305	281	366	383	440	368	528		528
	- Kacang Hijau (BK)	6	7	11	9	11	10	110	12	62	15		15
	- Ubi Kayu (UB)	1.374	1.649	3.372	1.979	2.679	2.374	2.600	2.849	2.313	3.419		3.419
	- Ubi Jalar (UB)	76	84	95	92	79	101	0	111	44	122		122
1.2.	Produksi Peternakan :	1.176	1.362		1.580		1.832		2.126		2.468		2.468
	-. Produksi Daging	973	1.138	825	1.332	535,5	1.558	607	1.823	728	2.133		2.133
	-. Produksi Kulit	26	30	30	34	61,87	39	47	45	62	51		51

	- Produksi Telur	177	194	177	214	528,4	235	143	258	183	284		284
1.	Perikanan												
1.1	Jumlah Produksi perikanan:	2370,30 Ton	2.466,92 Ton	2908,89 Ton	2622,85 (ton)	2689,30 Ton	2780,22 ton	2526,27 Ton	2947,03 ton	2822,61 Ton	3123,85 ton		3123,85 ton
	a. Perikanan tangkap	1.580,50 Ton	1.675,33 Ton	1630,50 Ton	1775,85 (ton)	1712,60 Ton	1882,40 ton	1744,60 Ton	1995,34 ton	1995,34 Ton	2115,06 ton		2115,06 ton
	b. Perikanan budidaya	789,80 Ton	791,59 Ton	1278,39 Ton	847 (ton)	976,70 Ton	897,82 ton	781,67 Ton	951,69 ton	827,27 Ton	1008,79 ton		1008,79 ton
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur													
1.	Urusan Pekerjaan Umum												
1.1.	% panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	53,00%	61,63%	61,63%	67,15%	67,16%	75,00%	72,01%	80,00%	76,18%	85,00%		85%
1.2.	% konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%		97,75%		98,50%	100,51%	99,20%	101,45%	100%		100%
2.	Urusan Perencanaan Pembangunan												
2.1	% tersedianya informasi rencana tata ruang dalam bentuk peta analog dan peta digital	0%	20%	0%	25%	0%	30%	0%	40%	0%	45%		45%
3.	Lingkungan Hidup												
3.1.	% penanganan sampah	21%	25%	90,00%	30%	95,07%	35%	65,87%	40%	54,10%	45%		45%
Fokus Iklim Berinvestasi													
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat												

	Daerah, Kepegawaian dan Persandian												
1.2.	Pertumbuhan PAD	20%	20%	50,76%	20%	3,86%	20%	24,19%	20%	16,27%	20%		20%
1.3.	Lama proses perijinan	1-4 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-2,5 hari	1,25 hari	1 -2,5 hari		1 -2,5 hari
2.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri												
2.1.	jumlah konflik SARA	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0		0
2.2.	Rasio penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan)	80%	77%		75%	74,00%	73%		70%		57%		57%
2.3.	indeks kriminalitas	100%	100%		98%	97,36%	100%		100%		100%		100%
2.4.	Rasio penanganan pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan dan keindahan)	80%	77%		75%		73%		70%		57%		57%
Fokus Sumber Daya Manusia													
1.	Ketenagakerjaan												
1.1.	Rasio ketergantungan	50,78%	50,45%	41,71%	50,08%	46,00%	49,88%	46,96%	49,34%		49,05%		49,05%

Dari capaian indikator kinerja daerah tersebut diatas, dapat dideskripsikan permasalahan dan isu strategis sebagai berikut.

Aspek/Fokus	Deskripsi
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi	Dari sisi pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui PDRB. Dilihat dari pertumbuhan PDRB, kinerja ekonomi Kota Bima menunjukkan trend yang cukup menggembirakan, karena terjadi pertumbuhan yang positif. Namun demikian, angka pengangguran terbuka masih cukup tinggi yaitu masih pada kisaran angka 8 persen.
	Jumlah penduduk miskin di Kota Bima selama kurun waktu 2014–2018 menunjukkan trend yang terus menurun. Pada tahun 2014 penduduk miskin di Kota Bima sebesar 9,74% dan mengalami penurunan menjadi 9,27% pada tahun 2017. Hal ini menandakan program pementasan kemiskinan di Kota Bima berjalan dengan baik. Namun demikian target RPJMD Kota Bima berada pada angka dibawah angka 9 persen.
Fokus kesejahteraan masyarakat	Di sektor pendidikan, angka melek huruf di Kota Bima terus mengalami kenaikan, dari 93,15% pada tahun 2014 menjadi 99,85% pada tahun 2017. Dengan demikian upaya pemberantasan buta huruf harus diteruskan dilaksanakan.
	Dari sisi kesehatan, masih terdapat kasus balita gizi buruk dan angka kematian ibu melahirkan. Sehingga prioritas pembangunan bidang kesehatan lebih difokuskan pada penanganan dua isu strategis ini.
	Ketersediaan rumah layak huni masih belum memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan akses terhadap air bersih dan sanitasi layak belum terpenuhi 100%

### 2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan yang disajikan dalam sub bab ini hanya difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan

Tabel 2.226.

#### Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh	4.000.00 0.000	4.230.45 6.000	Pengelolaan zakat masih belum optimal	Pembangunan Agama

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
		(ZIS)				
		Rasio Rumah Ibadah	3	3,35	Meskipun rasio rumah ibadah sudah tercukupi, namun masih terdapat rumah ibadah dengan kondisi yang membutuhkan perhatian terutama dalam lingkungan kampung-kampung	Pembangunan Agama
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	0	0	Meskipun konflik SARA tidak terjadi di Kota Bima namun masih ada potensi konflik horizontal antar kampung yang diakibatkan oleh kenakalan remaja dan bahaya narkoba	Pembangunan Agama  Ketertiban dan Keamanan
3	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	5,00	5,00	Pranata budaya yang ada kalau tidak diperhatikan dan ditangani secara intensif akan semakin berkurang	Pembangunan Pendidikan
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	10,00	10,13	Meskipun rata-rata lama sekolah sudah mencapai SMA, namun masih terdapat angka buta huruf yang harus ditangani lebih lanjut.	Pembangunan Pendidikan
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	5,50	7,25	Angka rata-rata nilai UN masih perlu ditingkatkan	Pembangunan Pendidikan
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	5,50	4,7	Angka rata-rata nilai UN SMPD masih sangat rendah	Pembangunan Pendidikan
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73	73,67	Pengeluaran Perkapita masih perlu ditingkatkan	Pembangunan Pendidikan  Pembangunan Kesehatan  Pembangunan ekonomi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
		Persentase penduduk miskin	9,30	9,27	Target RPJMD untuk tahun 2018 belum tercapai	Penanggulangan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Pembangunan Perumahan dan Permukiman Pembangunan ekonomi Pembangunan Kesehatan
		Pengangguran terbuka	7,50	8,89	Angka pengangguran terbuka masih sangat tinggi (tertinggi di NTB dan diatas rata-rata nasional)	Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan ekonomi
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	69,15	69,35	PHBS belum secara merata di masyarakat	Pembangunan Kesehatan
		Angka Balita Gizi Buruk	0,075	0,078	Kasus balita gizi buruk masih tinggi (10 kasus pada tahun 2017)	Pembangunan Kesehatan
		Angka kematian ibu melahirkan	148	188	Kasus kematian ibu melahirkan masih tinggi (5 kasus pada tahun 2017)	Pembangunan Kesehatan
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	90,00	93,25	Program 100-0-100 untuk belum tercapai. Belum semua rumah tangga sudah memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi layak.	Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Perumahan dan Permukiman
		Persentase Rumah Layak Huni	92,50	91,30		Pembangunan Perumahan dan Permukiman
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	90	96,92		Pembangunan Infrastruktur
		Persentase konektivitas	100,00	98,61	Kondisi topografi wilayah menjadi	Pembangunan Infrastruktur



<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Prioritas Pembangunan</b>
		pusat kegiatan dan pusat distribusi			kendala untuk akselerasi peningkatan konektivitas antar kawasan dalam wilayah	
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	65,00	62,58	Target RPJMD belum tercapai yaitu pada predikat BB	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	SPIP masih kurang optimal	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	80	100	Belum semua OPD mampu menerapkan SAKIP sesuai standard an ketentuan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
9	Meningkatnya pelayanan publik prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	1,25	1,25	Pelayanan masih manual belum berbasis aplikasi	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,00	Belum semua unit pelayanan publik melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam peningkatan pelayanan public	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	5,70	5,78	Sektor unggulan belum tumbuh secara signifikan	Pembangunan ekonomi
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	14,80	15,82	Pengeluaran perkapita atau daya beli masyarakat masih rendah	Pembangunan ekonomi
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	55.000	57.371	Produktifitas pertanian tanaman cenderung stagnan selain jagung. Namun maraknya tanaman jagung pada dataran tinggi dan pgununan berisiko terhadap bencana banjir	Ketahanan Pangan
13	Meningkatnya	Persentase	75,00	76,18	Persentase jalan	Pembangunan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Prioritas Pembangunan
	kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	panjang jalan kota dalam kondisi baik			dalam kondisi baik 76,18% . Perlu peningkatan kualitas jalan dan jembatan secara lebih intensif	Infrastruktur
		Persentase luas permukiman kumuh	29,56	32,06	Kawasan kumuh masih cukup luas	Pembangunan Infrastruktur
		Persentase luas kota yang tertata	10,00	7,39	Kawasan strategis dan cepat tumbuh masih perlu penanganan lebih lanjut	Pembangunan Infrastruktur
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	97,50	133,87	Tindakan kriminalitas cenderung meningkat di kalangan masyarakat	Ketertiban dan Keamanan
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Mitigasi Bencana				Pengelolaan sampah baru pada angka 60 persen dari seluruh wilayah Kota Bima. Degradasi lingkungan di wilayah hulu mengakibatkan kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam	Penanggulangan bencana

**BAB III**

**RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN  
KEUANGAN DAERAH**

---

---

**3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Arah kebijakan ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dalam RKPD tahun 2018 ini memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi makro kota Bima serta pengaruh perekonomian regional, nasional maupun ekonomi global. Pada sisi yang lain proyeksi sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor yang potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien program dan kegiatan dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

**3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Bima**

**1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambahan bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta dihasilkan di wilayah domestik atau negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu waktu tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besaran PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

Nilai PDRB Kota Bima dengan harga konstan 2010 pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.2,437,609.6 milyar dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 % dan pada tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp.2,578,990.96 milyar dengan laju pertumbuhan sebesar 5,80-6,8%. Nilai proyeksi PDRB tahun 2017 sebesar Rp.2,729,861.93 milyar dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,85-6% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.2,890,377.81 milyar. Perkembangan PDRB Kota Bima mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi Kota Bima semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB kota Bima disebabkan berbagai faktor, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB kota Bima adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi baik perdagangan, Industri, jasa, pertanian, pariwisata ataupun pendidikan.

Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan.

**Tabel 3.1.**  
**Proyeksi Nilai PDRB Kota Bima Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 dan Pertumbuhan ekonomi Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016*	2017*	2018*
PDRB (Juta Rp.)	2.305.289,6	2.437.609,6	2.578.990,96	2,729,861.93	2,890,377.81
Pertumbuhan ekonomi (%)	5.87	5.74	5.80-6	5.85-6	5,88-6

*Keterangan \* adalah angka proyeksi*

*Sumber Analisa Makro Ekonomi Kota Bima tahun 2015, Bappeda Kota Bima*

Pertumbuhan positif ekonomi kota Bima tahun 2014-2018 didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah; *pertama*, terus berjalanya pembangunan di Kota Bima baik disektor publik maupun di sektor swasta; *kedua*, semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada peningkatan kinerja sektor perindustrian dan sektor pertanian; *ketiga* faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak kebijakan pemerintah baru baik di eksekutif maupun legislatif melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik.

Perkembangan perekonomian di kota Bima diharapkan mampu menarik investasi yang lebih besar baik dari luar maupun dari pemerintah sangat diperlukan oleh sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor lain yang juga membutuhkan investasi adalah sektor industri, untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri-industri kecil dan menengah. Apabila terus di pacu untuk perkembangannya maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Dan untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga yang terampil, selain faktor investasi dan tenaga kerja terampil tersebut, faktor konsumsi juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota Bima, semakin tinggi konsumsi maka pertumbuhan ekonomi baik.

## 2. Inflasi

Inflasi kota Bima pada tahun 2015 sebesar 4,07 persen lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi Provinsi NTB sebesar 3,37 persen. Dilihat perkelompok barang, inflasi tersebut terutama disebabkan cukup tingginya tekanan dari kelompok bahan makanan sebesar 2,99 persen. Peningkatan harga disebabkan oleh kenaikan harga BBM yang berpengaruh terhadap kenaikan beberapa harga bahan makanan, transportasi dan komunikasi, makanan jadi, minuman, rokok serta perumahan, dan listrik.

**Tabel 1. 2**  
**Nilai inflasi rata-rata Tahun 2012-2015 Kota Bima**

Uraian	2012	2013	2014	2015
Provinsi NTB	3,99	9,51	7,23	3,37
Kota Bima	3,61	10,42	7,37	4,07

Namun demikian angka inflasi tersebut jika dilihat dari target kinerja RPJMD kota Bima tahun 2013-2018 pada tahap ke-empat berkisar 3,11 persen tidak tercapai, tapi inflasi tersebut cukup rendah karena dibawah angka psikologis inflasi, yaitu 10 %, dan inflasi nasional.

Proyeksi inflasi kota Bima tahun 2018 yang ingin dicapai adalah sebesar 3,26 persen seperti yang tertuang dalam RPJMD kota Bima tahun 2013-2018. Faktor pertumbuhan ekonomi dan tingkat suku bunga BI merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi di kota Bima, ketika pertumbuhan ekonomi terjadi maka pendapatan masyarakat cenderung naik dan kegiatan ekonomi juga akan semakin besar. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, perdagangan, serta kegiatan disektor moneter. Ketika suku bunga BI naik maka masyarakat cenderung untuk menginvestasikan dananya pada tabungan sehingga akan mengurangi jumlah uang beredar dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi. Tetapi jika terjadi sebaliknya tingkat suku bunga terlalu rendah sehingga orang cenderung membelanjakan uang yang dimilikinya maka hal ini akan dapat mendorong terjadi inflasi. Oleh karena kebijakan moneter yang tepat oleh BI menjadi sangat penting dalam pengendalian tingkat inflasi, dan selama ini hal itu telah dijalankan dengan baik oleh BI. Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok oleh pemerintah daerah juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di kota Bima. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan harga sembilan bahan pokok di kota Bima.

### 3. ICOR

Perkembangan ICOR kota Bima selama kurun waktu 2011-2015 cenderung menurun, Pada tahun 2011 ICOR kota Bima tercatat 6,91 turun menjadi 6,62 pada tahun 2013. Angka ICOR 6,91 berarti untuk memperoleh satu unit tambahan output diperlukan 6,91 unit tambahan investasi. Meskipun terjadi penurunan angka ICOR namun jika

dibandingkan dengan ICOR nasional masih diatas rata-rata ICOR nasiona. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses produksi relatif belum efisien. Angka ICOR yang dianggap ideal/efisien berada pada kisaran 3-4.

**Tabel.3.3**  
**ICOR Kota Bima dan Nasional tahun 2011-2015**

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Bima	7,13	6,60	6,52	6,27	6,11
Nasional	4,05	4,59	4,9	4	4,2

*Sumber data BPS kota Bima 2014*

Proyeksi ICOR kota Bima untuk tahun 2017 dan 2018 berada pada 4,68 dan 4,22, Penurunan angka ICOR ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di kota Bima. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat.

**Tabel1.3.4**  
**Proyeksi ICOR tahun 2017-2018**

Uraian	2017	2018
ICOR	4,68	4,22

#### 4. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2013 tingkat pengangguran Kota Bima mencapai 6,72% dari total angkatan kerja. Tren yang semakin menaik terlihat dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima yang diharapkan terus meningkat, memberikan peluang semakin luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sementara jumlah angkatan kerja dari tahun 2013 sampai 2015 terjadi penurunan.

Pada tahun 2017 jumlah pengangguran di Kota Bima diperkirakan pada 6-5,7 persen dan angka ini masih di atas RPJMN 2015-2019 (5,2-5,5 persen) dan RPJMD kota Bima 2013-2018 (4,22 persen). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah harus memacu pengembangan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

**Tabel.3.5**  
**Angkatan kerja Kota Bima tahun 2013-2015**

Tahun	Bekerja		Pengangguran		Jumlah Angkatan Kerja
	Jumlah	%	Jumlah	%	
2013	56.245	93,27	4.059	6,72	60.405
2014	57.286	92,36	4.742	6,73	60.304
2015	56.286	93,00	4.280	7,00	60.566

#### 5. Kemiskinan

Selama kurun waktu 2011-2015, kemiskinan di Kota Bima baik dari sisi jumlah maupun persentase cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin Kota Bima tercatat sebanyak 18.264 jiwa atau 12,60 persen menurun menjadi sebanyak 14.379 jiwa atau 9,11 persen pada tahun 2015. Penurunan selama lima tahun tersebut sudah mencapai target RPJMD Kota Bima Tahun 2014-2018 dimana target pada tahun 2013 sebesar 12,35 persen dan pada tahun 2014 sebesar 11,45 persen Dan tingkat kemiskinan kota Bima masih lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi NTB tahun 2014 sebesar 17,9 .

**Tabel.3.6.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan**  
**Tahun 2011- 2015**

Kota Bima	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	18.264	18.069	17.362	15.310	14.379
Tingkat Kemiskinan Kota Bima (%)	12,60	12,35	9,91	9,74	9,85
Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	16,08	15,88	15,03	14,55	14,11

*Sumber Data: Bappeda Kota Bima 2015*

Pada umumnya Kemiskinan dipengaruhi oleh sikap dan kebiasaan hidup yang tidak produktif, rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, di samping terbatasnya lapangan kerja serta terbatasnya dukungan sistem kelembagaan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

#### **3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Proses penganggaran merupakan tahap penting setelah tahapan perencanaan. Penganggaran pada dasarnya merupakan proses penentuan jumlah alokasi sumber-

sumber ekonomi untuk setiap program dan kegiatan dalam bentuk satuan uang untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dengan demikian dalam melakukan analisis penganggaran keuangan daerah yang tepat harus memperhatikan tujuan organisasi untuk menghasilkan kebijakan yang efektif dan efisien dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Pada Tahun 2018 kebutuhan penganggaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan akan meningkat. Hal ini disebabkan karena tahun 2018 merupakan tahun penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Periode 2018-2023, disamping untuk menyelesaikan target-target indikator kinerja dalam RPJMD tahun 2013-2018. Dengan adanya kejadian bencana banjir bandang pada bulan Desember tahun 2016, juga akan ada pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana terhadap sektor infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor baik yang bersumber dari pendanaan APBD dan Hibah RR BNPB yang tercatat dalam APBD Kota Bima maupun yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan APBN.

Akan tetapi, dengan kemampuan finansial yang terbatas maka perlu dilakukan pemilihan prioritas yang ada terhadap program-program yang ada disamping mengupayakan efisiensi terhadap pengalokasian anggaran dalam APBD tahun 2018 nanti. Sehingga dengan demikian program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018 dapat memberikan kepastian dampak positif dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kualitas hidup dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

### **3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Proyeksi keuangan daerah pada sisi pendapatan akan mengalami peningkatan walaupun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Peningkatan pada Pendapatan Asli daerah diperkirakan sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan asumsi bahwa ada perbaikan dalam tata kelola PAD pemerintah Kota Bima khususnya pada Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peningkatan pada Dana Perimbangan hanya mengalami kenaikan yang kecil khususnya pada Dana Alokasi Umum sebesar hanya 6% dibandingkan dengan alokasi DAU pada tahun 2017 dengan asumsi bahwa ada kebutuhan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan tahun 2018 yang memerlukan tambahan Dana alokasi Umum. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah



yang sah secara keseluruhan mengalami penurunan terutama yang bersumber dari Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya, sementara Dana Insentif Daerah (DID) diperkirakan meningkat sebesar Rp. 2.500.000.000,- jika dibandingkan dengan tahun 2017 dengan mempertimbangkan adanya peningkatan nilai LKIP pemerintah Kota Bima serta selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan. Adapun proyeksikan pendapatan Kota Bima pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut.

**Tabel 3.7.**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Bima Tahun 2016- 2019**

No	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-1) 2016 *	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi Tahun 2018**	Proyeksi Tahun (n+1) 2019
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>35.067.874.922,00</b>	<b>32.153.699.104,04</b>	<b>33.153.699.104,04</b>	<b>36.469.069.014,45</b>
1.1.1	Pajak daerah	11.658.800.000,00	14.029.000.000,00	14.579.000.000,00	16.036.900.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	7.406.715.712,00	7.313.798.500,00	7.863.798.500,00	8.650.178.350,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.921.710.430,00	912.766.923,00	912.766.923,00	1.004.043.615,30
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	14.080.648.780,00	9.898.133.681,04	9.798.133.681,04	10.777.947.049,15
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>558.144.005.546,00</b>	<b>700.188.156.804,00</b>	<b>727.644.076.515,00</b>	<b>800.408.484.166,50</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	23.989.746.546,00	57.553.342.804,00	57.162.884.995,00	62.879.173.494,50
1.2.2	Dana Alokasi Umum	435.279.239.000,00	464.125.442.000,00	491.972.968.520,00	541.170.265.372,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	98.875.020.000,00	178.509.372.000,00	178.508.223.000,00	196.359.045.300,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>133.014.543.685,03</b>	<b>49.697.586.735,28</b>	<b>41.002.075.551,25</b>	<b>55.283.786.785,53</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	34.611.386.685,03	42.197.586.735,28	31.002.075.551,25	34.102.283.106,38
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	98.403.157.000,00	7.500.000.000,00	10.000.000.000,00	20.000.000.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1+2+3)</b>		<b>726.226.424.153,03</b>	<b>782.039.442.643,32</b>	<b>801.799.851.170,29</b>	<b>892.161.339.966,48</b>

Sumber: DPPKAD Kota Bima Tahun 2016, data diolah.

\* angkarealisasi APBD 2016 masih menggunakan pagu anggaran

\*\*Proyeksi pendapatan pada tahun 2018 belum memuat sumber pendapatan dana Rekonstruksi pasca banjir.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah akan mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

#### **A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

##### **a. Pendapatan Asli Daerah;**

Pendapatan Asli Daerah direncanakan naik sebesar Rp. 1.000.000.000,- jika dibandingkan dengan PAD pada tahun 2017, yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,-. Dengan demikian PAD direncanakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 33.153.669.104,04 jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 32.153.669.104,04.

b. Dana Perimbangan;

Dana Perimbangan diperkirakan akan meningkat sebesar Rp. 27.455.919.711,- yang bersumber dari Peningkatan Dana Alokasi Umum yang diperkirakan akan naik 6% pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan dana alokasi khusus (DAK) masih diperkirakan akan menjadi sebesar Rp. 178.508.223.000,-, sedikit mengalami penurunan sebesar Rp. 1.149.000,- jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 178.509.372.000,-. Adapun Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak diperkirakan juga akan mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar Rp. 390.457.809,- sehingga menjadi sebesar Rp. 57.162.884.995,- jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 57.553.342.804,-. Dengan demikian, secara keseluruhan dana perimbangan diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 727.644.076.515,- jika dibandingkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 700.188.156.804,-.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar Rp. 8.695.511.184,03 yang bersumber dari berkurangnya dana bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya sebesar Rp. 11.195.511.184,03. sedangkan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diperkirakan akan meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp. 10.000.000.000,- jika dibandingkan pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Dengan demikian, secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperkirakan akan mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi sebesar Rp. 41.002.075.551,25 jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 49.697.586.735,28.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioanl alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta saranapenunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi pendapatan daerah dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;

2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;
5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat;
6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
7. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

- a. Pajak Daerah terdiri dari pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, dan Retribusi Jasa Usaha
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (Penyertaan Modal Pada LKP dan Jamkrida dan Penyertaan Modal Pada Bank NTB).
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Dari Pengembalian (Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas), Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:

- a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Bagi Hasil dari Pajak

Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah kab/kota/ provinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah provinsi, bobot daerah provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah provinsi.
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

### 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- A .Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dari Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi.
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus merupakan dana insentif daerah

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah kota Bima diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi.

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2018 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

#### **a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk:

1. Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
3. Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan.

Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2018, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang undangan terkait.
2. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu dan kecepatan pelayanan.
3. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.

#### **b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Serta Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang

berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil (PBB, PPH dan CHT) adalah:

1. Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah,
2. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

## **B. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan

Belanja daerah pada Tahun 2018 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kota Bima 2013-2018. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

### **a. Belanja Tidak langsung**

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: Belanja Pegawai berupa ***penyediaan gaji dan tunjangan*** serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya belanja pegawai diperuntukan:

- i). Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- ii). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD yang disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah;

- iii). Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2018;
- iv). Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;

Pada tahun 2018, rencana alokasi belanja pegawai masih tetap seperti pada tahun 2017, yakni sebesar Rp. 364.478.059.756,17. Alokasi ini masih memperhitungkan kemungkinan adanya pemberian gaji ke-13 dan THR kepada ASN, dan belum memperhitungkan jika ada kebijakan kenaikan gaji.

**Belanja Hibah** digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugastugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Rencana alokasi belanja hibah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 35.443.200.000,-, atau secara keseluruhan mengalami peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan sebesar Rp. 16.000.000.000,- diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 yang akan dihibahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan (Panwas) Pemilihan Umum. Jika diperlukan, maka efisiensi terhadap pengalokasian dana hibah harus dilakukan secara selektif terutama bagi lembaga/organisasi yang telah menerima bantuan hibah secara berturut-turut dalam beberapa tahun terakhir dari pemerintah Daerah.

**Belanja Bantuan Sosial** digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.



Rencana alokasi belanja Sosial adalah sebesar Rp. 4.113.796.500,-, mengalami penurunan sebesar 10% jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam APBD Awal tahun 2017. Pemberian bantuan sosial akan dilakukan secara selektif kepada masyarakat yang rentan dan sangat membutuhkan serta untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018.

***Belanja Bantuan Keuangan*** digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

Seperti tahun sebelumnya, pemberian bantuan keuangan tetap sebesar Rp. 822.411.656,- yang akan diberikan kepada Partai-partai Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

***Belanja Tidak Terduga*** ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.

Belanja tidak terduga pada tahun 2018 direncanakan akan dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang diutamakan untuk persiapan penanganan keadaan darurat bencana.

#### **b. Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- a. *Belanja pegawai* merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dan besaran honorarium bagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja.

Mengingat bahwa pada tahun 2018 alokasi pendapatan yang terbatas disertai dengan adanya kebutuhan baru yang perlu diperhatikan, maka direncanakan untuk dilakukan efisiensi terhadap pengalokasian dan pemanfaatan belanja pegawai sebesar Rp. 7.064.371.080,00. Sehingga dengan demikian, jumlah alokasi belanja pegawai pada belanja langsung secara keseluruhan pada tahun 2018 akan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 28.257.484.320,- jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp. 35.321.855.400,-

b. *Belanja barang dan jasa* merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Dimana belanja barang dan jasa pengeluarannya pada:

1. *Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya* yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi yang tidak terkait dengan aset, baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
2. *Untuk penganggaran belanja barang* yang akan diserahkan kepada masyarakat agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
3. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk *belanja barang pakai habis* agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
4. *Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah*, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi dan dilakukan pembayaran dengan sistem riil cost;
5. Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
6. *Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat* yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;
7. *Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM* hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara),

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Serupa dengan belanja pegawai, maka alokasi belanja barang dan jasa pada tahun 2018 direncanakan untuk dilakukan efisiensi terhadap pengalokasian dan pemanfaatan sebesar Rp. 22.734.353.336,87. Sehingga dengan demikian, jumlah alokasi belanja barang dan jasa pada belanja langsung secara keseluruhan pada tahun 2018 akan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 128.828.002.242,28 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp. 151.562.355.579,15

- c. *Belanja modal* merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan dengan melihat:
  - a. Penganggaran untuk belanja Modal minimal sebesar 30% dari total belanja.
  - b. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
  - c. Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Serupa dengan belanja modal, maka alokasi belanja barang dan jasa pada tahun 2018 direncanakan untuk dilakukan efisiensi terhadap pengalokasian dan pemanfaatan sebesar Rp. 7.539.897.122,26. Sehingga dengan demikian, jumlah alokasi belanja barang dan jasa pada belanja langsung secara keseluruhan pada tahun 2018 akan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 244.362.813.411,74 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp. 251.902.710.534,-

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. *Transpransi dan akuntabilitas*

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil

- b. Disiplin anggaran
- c. Keadilan dan Kepatutan
- d. Ekonomis, efisiensi dan efektivitas
- e. Manfaat bagi masyarakat

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

- f. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2016 - 2019**

No	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-1) 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun (n+1) 2019
<b>2</b>	<b>Belanja Daerah</b>				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja pegawai	448.688.698.040,60	364.478.059.756,17	364.478.059.756,17	364.478.059.756,17
2.1.2	Belanja bunga	0	0	0,00	0
2.1.3	Belanja subsidi	0	0	0,00	0
2.1.4	Belanja hibah	12.748.400.000,00	19.443.200.000,00	35.443.200.000,00	21.387.520.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	5.940.885.000,00	4.570.885.000,00	4.113.796.500,00	5.027.973.500,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	0	0	0,00	0
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	822.411.656,00	822.411.656,00	822.411.656,00	822.411.656,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	5.626.303.134,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>470.200.394.696,60</b>	<b>394.940.859.546,17</b>	<b>407.857.467.912,17</b>	<b>394.715.964.912,17</b>
2.2	Belanja Langsung				
2.2.1	Belanja pegawai	38.776.318.000,00	35.321.855.400,00	28.257.484.320,00	33.555.762.630,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	126.950.944.327,00	151.562.355.579,15	128.828.002.242,28	143.984.237.800,19
2.2.3	Belanja modal	201.568.042.271,00	251.902.710.534,00	244.362.813.411,74	327.044.961.142,41
	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>367.295.304.598,00</b>	<b>438.786.921.513,15</b>	<b>401.448.299.974,02</b>	<b>504.584.961.572,60</b>
	<b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>	<b>837.495.699.294,60</b>	<b>833.727.781.059,32</b>	<b>809.305.767.886,19</b>	<b>899.300.926.484,77</b>

Sumber : Hasil Analisis

### C. Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

## 1) Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 12.505.916.715,89 atau dihitung sebesar 1,5% dari total belanja daerah pada APBD tahun 2017.

## 2) Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan jika diperkirakan surplus anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah berencana untuk meningkatkan jumlah penyertaan modal sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Alokasi anggaran penyertaan modal ini cukup besar, mengingat pada tahun 2017 tidak dialokasikan anggaran penyertaan modal pada APBD Awal tahun 2017.

Tabel 3.9.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Bima Tahun 2016 - 2019

No	URAIAN	JUMLAH			
		Realisasi Tahun (n-1) 2016	Tahun Berjalan 2017	Proyeksi Tahun 2018	Proyeksi Tahun (n+1) 2019
3	Pembiayaan Daerah				
3.1	<b>Penerimaan pembiayaan</b>				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	32.610.673.378,60	51.688.338.416,00	12.505.916.715,89	12.139.586.518,29
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>32.610.673.378,60</b>	<b>51.688.338.416,00</b>	<b>12.505.916.715,89</b>	<b>12.139.586.518,29</b>
3.2	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.350.000.000,00	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00

3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.350.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>29.260.673.378,60</b>	<b>51.688.338.416,00</b>	<b>7.505.916.715,89</b>	<b>7.139.586.518,29</b>

## BAB IV

### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

---

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima

Pembangunan Kota Bima diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat, melalui pentahapan pembangunan setiap tahun sebagai penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Kota Bima Tahun 2013 -2018. Pembangunan tahun 2018 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari perencanaan jangka menengah tahun 2013-2018 dengan visi pembangunan yaitu **“Terwujudnya Kota Bima sebagai Kota perdagangan dan Jasa Yang Beriman, Maju, Adil dan Sejahtera”**.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi yaitu sebagai berikut:

- Misi Pertama** : “Membentuk manusia yang BERIMAN melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal”.
- Misi Kedua** : “Mewujudkan manusia yang MAJU melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual”.
- Misi Ketiga** : “Mewujudkan masyarakat yang ADIL melalui pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima”.
- Misi Keempat** : “Menjadikan masyarakat SEJAHTERA berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan”.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait

aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1.**

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Bima 2013 - 2018**

<b>VISI / MISI</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Membentuk manusia yang <b>BERIMAN</b> melalui penguatan serta peningkatan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk karakter manusia yang religius sehingga dapat membendung dan membentengi dari nilai-nilai yang merusak moral dan aqidah serta tetap mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal.	Membentuk karakter manusia yang religius	Jumlah dana ZIS yang disalurkan	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) Rasio rumah ibadah
			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA
	Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang dikelola dengan baik	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan
Menciptakan manusia yang <b>MAJU</b> melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai tingkat intelektualitas yang tinggi, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani, mental-spiritual	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah
		Angka kemiskinan		Rata-rata nilai UN
		Pengangguran terbuka	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
				Persentase penduduk miskin
				Pengangguran terbuka
				Usia Harapan Hidup
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Balita Gizi Buruk	
Angka kematian ibu melahirkan				
Mewujudkan masyarakat yang <b>ADIL</b> melalui	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Persentase penduduk yang	Meningkatnya akses masyarakat	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih



pembangunan yang merata dimana masyarakat memiliki akses dan tingkat pelayanan pemerintahan yang prima		memperoleh pelayanan dasar : - air bersih; - sanitasi; - rumah layak huni	terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Layak Huni	
				Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK terhadap LKPD	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja
					Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan		
			Indeks kepuasan masyarakat		
Menjadikan masyarakat <b>SEJAHTERA</b> berbasiskan pembangunan ekonomi lokal dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan diikuti perluasan akses ekonomi dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang berdaya saing dengan dukungan stabilitas sosial politik dan keamanan	Meningkatkan pembangunan ekonomi lokal	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	
		Pendapatan perkapita	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	
			Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan	
	Meningkatkan infrastruktur perkotaan	Kemantapan jalan	Persentase kawasan kumuh	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
					Persentase luas permukiman kumuh
		Persentase luas kawasan tepian air ( <i>waterfront city</i> ) yang tertata			
	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Indeks kriminalitas	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Indeks kriminalitas	

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut diatas, akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mencapai target indikator kinerja sasaran dari masing-masing misi setiap tahunnya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja menjadi sangat penting dalam rangka menentukan prioritas program pembangunan pada perencanaan tahun berikutnya. Adapun hasil pengukuran kinerja sasaran sampai dengan tahun 2016 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**  
**Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2016 dan Target Indikator Kinerja**  
**Tahun 2017-2018**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Rupiah	4.000.000.000	4.230.456.000	105,76
		Rasio Rumah Ibadah	Per 1.000 penduduk	3	3,35	111,67
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	kasus	0	0	100,00
3	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	%	5,00	5,00	100,00
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,00	10,13	101,13
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SD	nilai	5,50	7,25	131,81
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) SMP	nilai	5,50	4,7	85,46
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	73	73,67	100,92
		Persentase penduduk miskin	%	9,00	9,51	105,67
		Pengangguran terbuka	%	7,50	8,89	84,36
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	69,15	69,35	100,29
		Angka Balita Gizi Buruk	%	0,075	0,078	96,15
		Angka kematian ibu melahirkan	Per 100.000 kelahiran hidup	148	188	78,72
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	90,00	93,25	103,61
		Persentase Rumah Layak Huni	%	92,50	91,30	98,70
		Rumah tangga pengguna bersanitasi baik	%	90	96,92	107,69
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat distribusi	%	100,00	98,61	98,61

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai	65,00	62,58	96,28
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100,00
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	%	80	100	125,00
9	Meningkatnya pelayanan publik prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,25	1,25	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	80	81,00	101,25
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	5,70	5,78	101,40
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14,80	15,82	106,89
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	ton	55.000	57.371	104,31
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	75,00	76,18	101,57
		Persentase luas permukiman kumuh	%	29,56	32,06	108,45
		Persentase luas kota yang tertata	%	10,00	7,39	73,90
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	97,50	133,87	72,83

Sumber : Data diolah dari Evaluasi RPJMD Kota Bima 2013-2018

Disamping pencapaian kinerja pembangunan sebagaimana tabel tersebut diatas, Pemerintah Kota Bima juga masih dihadapkan pada permasalahan pembangunan yang juga memerlukan perhatian seluruh stakeholder pembangunan di daerah dan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan tahun selanjutnya.

Pembangunan Kota Bima tahun 2018 akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu selain mengatasi permasalahan yang masih menjadi tantangan yang dihadapi, juga melanjutkan program prioritas yang ada dalam RPJMD Kota Bima tahun 2013-2018. RKPD Kota Bima tahun 2018 juga akan memperhatikan kebutuhan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir bandang tahun 2016, kebutuhan pengembangan kapasitas dengan terbentuknya organisasi perangkat daerah yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 serta kebutuhan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Disamping itu, RKPD

Kota Bima tahun 2018 juga akan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 dan Prioritas Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, maka tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019): **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.** Tema tersebut dalam pelaksanaannya selanjutnya dijabarkan kedalam strategi pembangunan nasional yang secara umum menggariskan hal-hal sebagai berikut :

**a. Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018**

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (tusi). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan. Dalam penyusunan RKP 2018 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- ☐ Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.
- ☐ Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).
- ☐ Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokas harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

**b. Target dan Sasaran Pembangunan Nasional tahun 2018**

Adapun target dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**TABEL 4.3**  
**SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2018**

No	Indikator Ekonomi	Skenario Target 2018
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1 (5,4 - 6,1)
2	Pengangguran (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	5,3 - 5,5
3	Angka Kemiskinan (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0 - 10,0
4	Gini Ratio (indeks) (Realisasi & Penyesuaian Target)	0,38
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
6	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	
7	Inflasi (%): average	3,5 ± 1
8	Nilai Tukar (USD/IDR): average	13.600
9	ICP (USD/Barrel)	55
10	Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	830
11	Lifting Gas (BOE/hari)	1.250

**c. Norma Pokok Pembangunan yang Diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 :**

1. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait
2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah (*entitled society*)
3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin besar
4. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem
5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan.

**d. Dimensi Pembangunan :**

- 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dengan prioritas :
  - i. Revolusi Mental

- ii. Pendidikan
  - iii. Kesehatan
  - iv. Perumahan dan Permukiman
- 2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, dengan prioritas :
- i. Kedaulatan Pangan
  - ii. Kedaulatan Energi
  - iii. Kemaritiman dan Kelautan
  - iv. Percepatan Pertumbuhan Industri dan KEK
  - v. Pembangunan Pariwisata
- 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, dengan prioritas :
- i. Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan
  - ii. Pemerataan Antar Desa dan Kawasan Pedesaan
  - iii. Daerah Perbatasan
  - iv. Daerah Tertinggal
  - v. Perkotaan
  - vi. Reformasi Agraria
  - vii. Konektifitas Nasional
- 4) Dimensi Pembangunan Politik, Hukum, Pertanahan, dan Keamanan, dengan prioritas:
- i. Konsolidasi Demokrasi dan Efektifitas Diplomasi
  - ii. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban
  - iii. Kepastian dan Penegakan Hukum
  - iv. Reformasi Birokrasi
- 5) Dimensi Pembangunan Ekonomi, dengan prioritas:
- i. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
  - ii. Peningkatan Ekspor non Migas
  - iii. Reformasi Fiskal

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional, dan isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2018, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan Kota Bima tahun 2018 difokuskan pada upaya penanganan isu strategis yaitu 1) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran; 2) Infrastruktur dan investasi; 3) Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan 4) Peningkatan kualitas lingkungan hidup pasca bencana.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kerja Pemerintah Tahun 2018 dengan sasaran dan prioritas pembangunan Kota Bima

**Tabel 4.4**  
**Keterkaitan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018**  
**dengan Tujuan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018**

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
1.	Pendidikan	1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru	Pendidikan: - Pelaksanaan pendidikan berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah - Terlindungnya kekayaan seni budaya dan kearifan lokal - Terwujudnya pendidikan yang merata dan berkualitas -	Meningkatnya mutu pendidikan	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun  Program Pendidikan Non Formal  Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	DINAS DIKBUD  DINAS DIKBUD  DINAS DIKBUD
	Kesehatan	3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)	Kesehatan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (Generasi Emas NTB 2025)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	PEMBANGUNAN KESEHATAN	Program Kesehatan Keluarga Kesehatan Reproduksi dan KB  Program Upaya Kesehatan Masyarakat  Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Program	DINAS KESEHATAN DINAS PPKB  DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN  DINAS



NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
						Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat  Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pusk esmas Pembantu dan Jaringannya	KESEHATAN  DINAS KESEHATAN
	<b>PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b>	6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi	a. Terwujudnya masyarakat yang sadar tata ruang b. Terwujudnya permukiman yang sehat dan nyaman	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan  Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	<b>PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA</b>	8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)	Wirausaha dan iklim investasi: Kesejahteraan Sosial: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	PEMBANGUNAN EKONOMI	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU
9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)		Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri		DINAS KOPERINDAG	
10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		DINAS KOPERINDAG	
11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		DINAS KOPERINDAG	
12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		DINAS KETENAGAKERJAAN	
				Program pengembangan destinasi pariwisata		DINAS PARIWISATA	
				Program Pengembangan SDM Kepariwisata		DINAS PARIWISATA	

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
						Program pengembangan pemasaran pariwisata  Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	DINAS PARIWISATA  DINAS PERTANIAN
	<b>V.KETAHANAN ENERGI</b>	13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi	Infrastruktur dan konektifitas Wilayah: - Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata				

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKP Kota Bima 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	<b>VI. KETAHANAN PANGAN</b>	15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)	Agro Industri dan Ketahanan Pangan: a. Tersedianya data dan informasi potensi SDA b. Termanfaatkannya Teknologi Tepat Guna c. Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan d. Tersedianya sarana prasarana produksi yang memadai	Meningkatnya produksi pertanian	KETAHANAN PANGAN	Program Peningkatan Ketahanan Pangan  Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan  Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya	DINAS KETAHANAN PANGAN  DINAS PERTANIAN  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	<b>VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN</b>	17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	Kesejahteraan Sosial: a. Terwujudnya rencana pembangunan sosial yang berkualitas b. Terwujudnya tenaga pelayanan sosial dasar yang memadai dan kompeten c. Tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai d. Meningkatnya usia kawin pertama perempuan e. Tersedianya layanan sosial bagi penyandang masalah	Meningkatnya daya saing	Penanggulangan Kemiskinan  Kesejahteraan Sosial	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya  Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial  Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan  Program Wajib	DINAS SOSIAL  DINAS SOSIAL  DINAS KESEHATAN  DINAS DIKBUD

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
			kesejahteraan sosial			Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
						Program Penataan Administrasi Kependudukan	DINAS DUKCAPIL
						Program Peningkatan Kesempatan Kerja	DINAS TENAGA KERJA
						Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	DINAS KOPERINDAG

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	<b>VIII. INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN</b>	20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Terwujudnya rencana pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas</li> <li>○ Terwujudnya infrastruktur dasar yang merata</li> <li>○ Meningkatkan penumpang angkutan udara dan laut</li> <li>○</li> </ul>	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Program Pembangunan fasilitas dan Prasarana Perhubungan  Program Rehabilitasi dan pemeliharaan sarpras dan fasilitas LLAJ  Program Pembangunan jalan dan Jembatan  Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	DINAS PERHUBUNGAN  DINAS PERHUBUNGAN  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
	<b>IX. PEMBANGUNAN WILAYAH</b>	22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua	a. Tersedianya data dan informasi daerah/kawasan rawan bencana b. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang evakuasi penanggulangan bencana c. Terwujudnya masyarakat yang sadar dan tanggap terhadap bencana d. Terwujudnya kawasan tangguh bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Penanggulangan bencana	Program Kesiapsiagaan  Program Penanggulangan /Pencegahan Bencana  Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	BPBD  BPBD  DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	<b>X.POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN &amp; KEAMANAN</b>	27. Penguatan Pertahanan 28. Kepastian Hukum 29. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan: a. Meningkatnya tatakelola pengaduan pelayanan publik b. Terwujudnya aparatur yang profesional c. Tersedianya sarana prasarana pelayanan publik yang memadai d. Terselamatkannya dokumen/ arsip daerah e. Meningkatnya masyarakat yang menggunakan layanan informasi	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Ketertiban dan Keamanan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal  Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	BAKESBANGPOL  BAKESBANGPOL

NO	RPJMN		PRIORITAS PROPINSI NTB	RPJMD KOTA BIMA		RKPD KOTA BIMA 2018	
	PRIORITAS RKP 2018	PROGRAM PRIORITAS		SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	OPD PELAKSANA
				SASARAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN		
			berbasis IT				
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik  Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;  Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan  Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat  Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat  Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  BKPSDM  INSPEKTORAT SERTDA (BAG. OPA)  SETDA (BAG. OPA)  SETDA (BAG. HUMAS) DINAS KOMINFO

Sumber : Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan RKP 2018



## 4.2. Strategi dan Kebijakan RKPD 2018

### 4.2.1 Strategi dan Kebijakan Pengurangan Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bima merupakan yang tertinggi di Provinsi NTB. tahun 2015 sebanyak 7.804 orang (10,15%). Kontribusi tertinggi sebesar 3.028 jiwa dari pendidikan Sekolah Menengah Atas, Universitas 1.888 jiwa dan Sekolah Menengah Pertama 1.280. Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja, sehingga diperlukan upaya penciptaan kesempatan kerja dari berbagai pihak baik oleh pemerintah, swasta dan elemen masyarakat. Strategi dan kebijakan pengurangan pengangguran di Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Strategi dan Kebijakan Pengurangan Pengangguran**

<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan akses, kualitas layanan dasar (pendidikan dan kesehatan) khusus bagi masyarakat miskin sampai daerah terpencil, daerah pinggir hutan, pesisir dan kaum difabel
	Menjalin kerjasama dengan industri/dunia usaha dalam rangka mengantisipasi permintaan pasar tenaga kerja
	Pemetaan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja
Memperluas penciptaan kesempatan kerja	Penciptaan wirausaha baru berbasis sumberdaya lokal dengan memanfaatkan hasil riset dari lembaga penelitian dan pengembangan
Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis	Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat karya
	Mendorong pengupahan yang sesuai dengan standar hidup layak sebagai payung hukum kebijakan antara lain : upah minimum harus dapat menjaga tingkat pendapatan, standar hidup dan daya beli pekerja berpenghasilan rendah

### 4.2.2 Kebijakan dan Strategi Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2012-2032, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang di Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.6**  
**Kebijakan dan Startegi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah**

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>
Peningkatan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan baru maupun pengembangan peran dan fungsi pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada	Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai sektor unggulan dan daya dukung lingkungan hidup agar memenuhi kriteria PKW (PKW) dan PKL
	Revitalisasi peran dan fungsi PKN, PKW dan PKL
	Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk pengembangan kawasan sekitarnya
Pengembangan kawasan Kota Tepian Air	Pengembangan sistem jaringan infrastuktur terpadu
	Pengembangan pusat pelayanan perdagangan dan jasa
	Percepatan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan dan perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya energi termasuk sumber energi terbarukan
	Peningkatan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih

Sumber : RTRW Kota Bima 2012-2032

#### 4.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan

Strategis dan arah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Bima disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.7**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Pengurangan Kemiskinan**

<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Peningkatan kesejahteraan sosial	Mengembangkan UMKM, IKM, dan swasta
Percepatan penumbuhan pengembangan wirausaha dan iklim investasi	
Memperluas akses program sanitasi dasar dan jaminan kesehatan	Penguatan program sanitasi total berbasis masyarakat
Pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan serta cakupan air bersih	Meningkatkan sinergi pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, dan air bersih
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengoptimalkan obyek wisata unggulan dan membuka akses pasar wisata
Pengembangan lumbung pangan, penganekaragaman konsumsi lokal, pengembangan komoditi unggulan dan pengembangan industri olehan berbasis sumberdaya lokal	Penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat

#### 4.2.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi

Strategi dan arah kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**

Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata unggulan dan membuka akses pasar wisata dunia
Percepatan pengembangan wirausaha dan iklim investasi	Meningkatkan produksi sumberdaya alam dan akses pasar
Pengembangan konektivitas antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan serta cakupan air bersih, rasio elektrifikasi	Meningkatkan sinergi pembangunan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, air bersih dan ketenagalistrikan

#### 4.2.5 Adaptasi Pilar Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu sebuah konsesus sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir tahun 2015. (SDGs) diharapkan bisa menjadi dokumen rujukan dalam segala upaya pembangunan untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, mengakhiri segala bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendorong pertanian secara berkelanjutan serta mendorong kesejahteraan untuk semua orang di dunia pada semua usia.

**Tabel 4.9**  
**Pilar dan Tujuan SDGs**

Pilar	Tujuan
Pilar Pembangunan Sosial	Goal 1. Penghapusan kemiskinan
	Goal 2. Penghapusan Kelaparan
	Goal 3. Kesehatan dan Kesejahteraan
	Goal 4. Pendidikan Berkualitas
	Goal 5. Kesenjangan Gender
	Goal 6. Air Bersih dan Sanitasi
Pilar Pembangunan Ekonomi	Goal 7. Energi bersih dan terjangkau
	Goal 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak
	Goal 9. Infrastruk Tangguh, Industri Inklusif dan Inovatif
	Goal 10. Penurunan Kesenjangan
	Goal 11. Kota Inklusif dan Berkelanjutan
Pilar Pembangunan Lingkungan	Goal 12. Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
	Goal 13. Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana
	Goal 14. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut
	Goal 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan	Goal 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh
	Goal 17. Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan

#### 4.2.6 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Bima, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.10**  
**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Berwawasan Lingkungan**

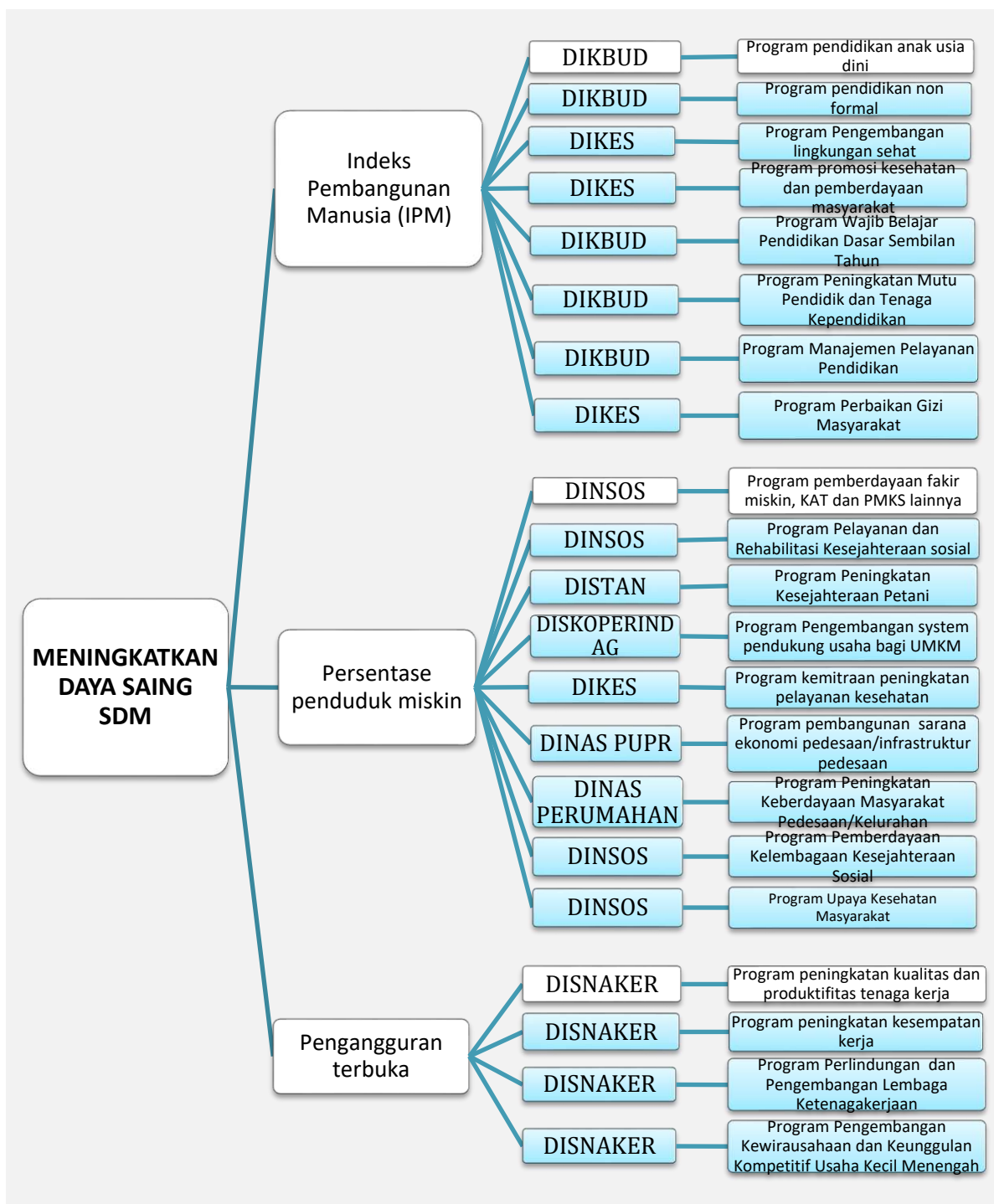
Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya rencana pembangunan lingkungan hidup yang berkualitas	Koordinasi, sosialisasi fasilitasi dan konsultasi rencana pembangunan	Sinergi kegiatan pembangunan lingkungan hidup
Terwujudnya masyarakat yang sadar lingkungan	Sosialisasi, regulasi dan fasilitasi masyarakat	Masyarakat perkotaan
Terwujudnya masyarakat yang sadar kelestarian lingkungan hidup	Sosialisasi, edukasi dan regulasi masyarakat	Masyarakat kawasan hutan, bantaran sungai, kawasan rawan bencana pesisir laut dan pulau-pulau kecil
Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)	Identifikasi dan inventarisasi data informasi Lingkungan Hidup Daerah (LHD)	Dampak penambangan liar terhadap lingkungan hidup

#### 4.3. Pendekatan RKPD Kota Bima Tahun 2018

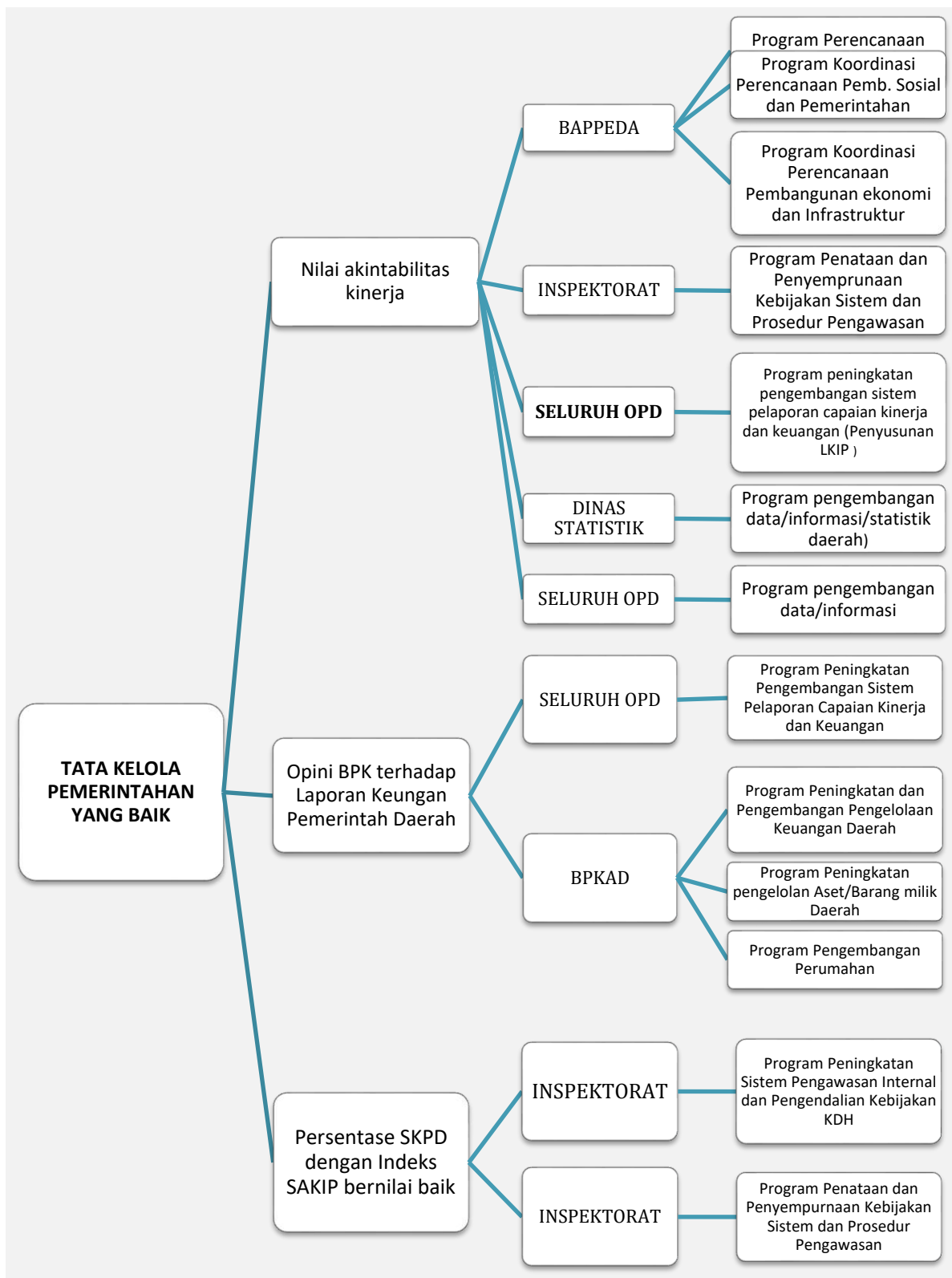
##### 4.3.1. Pendekatan Tematik-Holistik

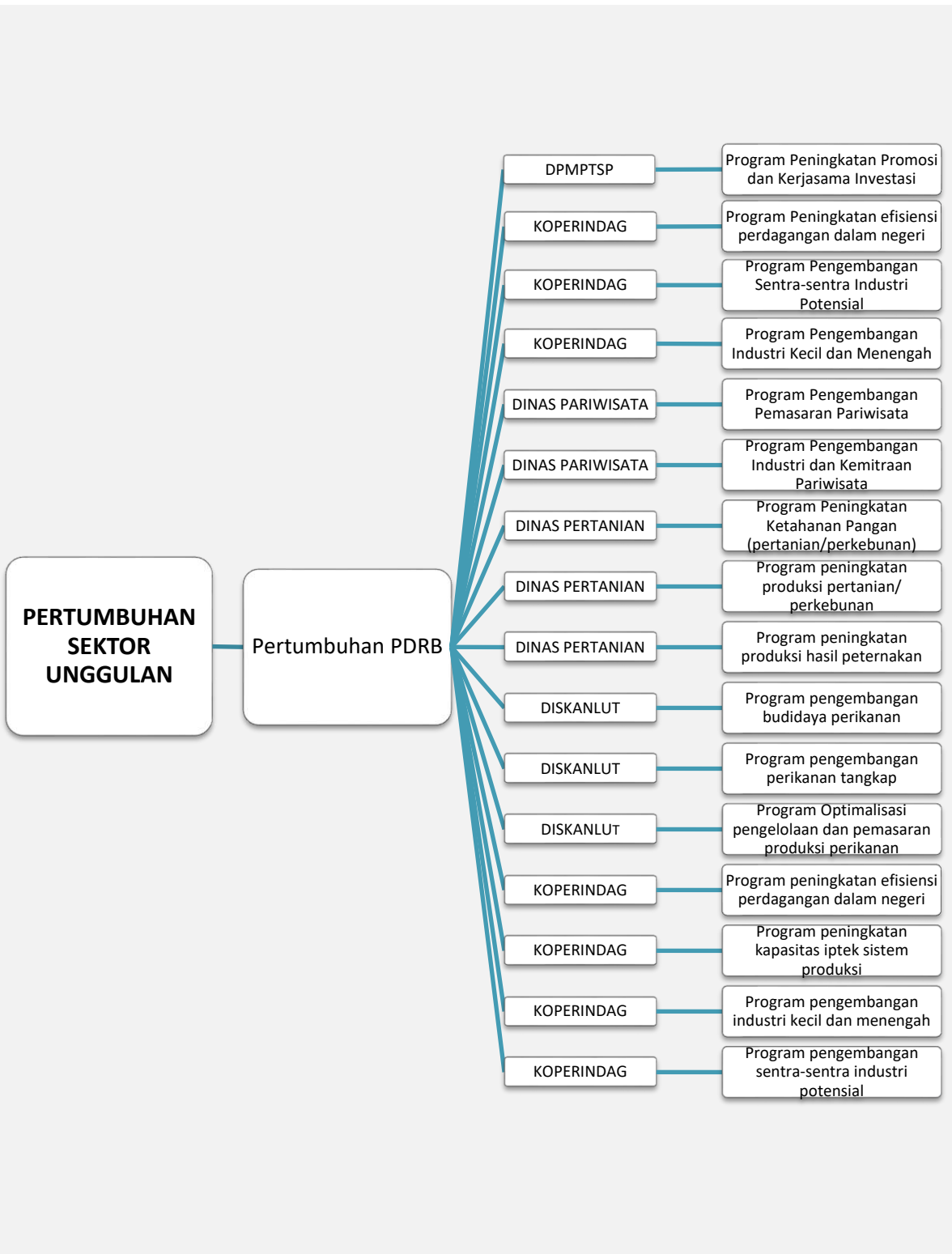
Pendekatan Perencanaan Holistik – Tematik pada dasarnya adalah pendekatan yang menekankan pada pentingnya keseluruhan dengan terdapat kaitan antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan utama. Jadi, pendekatan ini mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dan nasional, identifikasi program-program dan kegiatan sampai koordinasi antar OPD, yang bertujuan untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan dirancang koordinasi berbagai Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut ini.



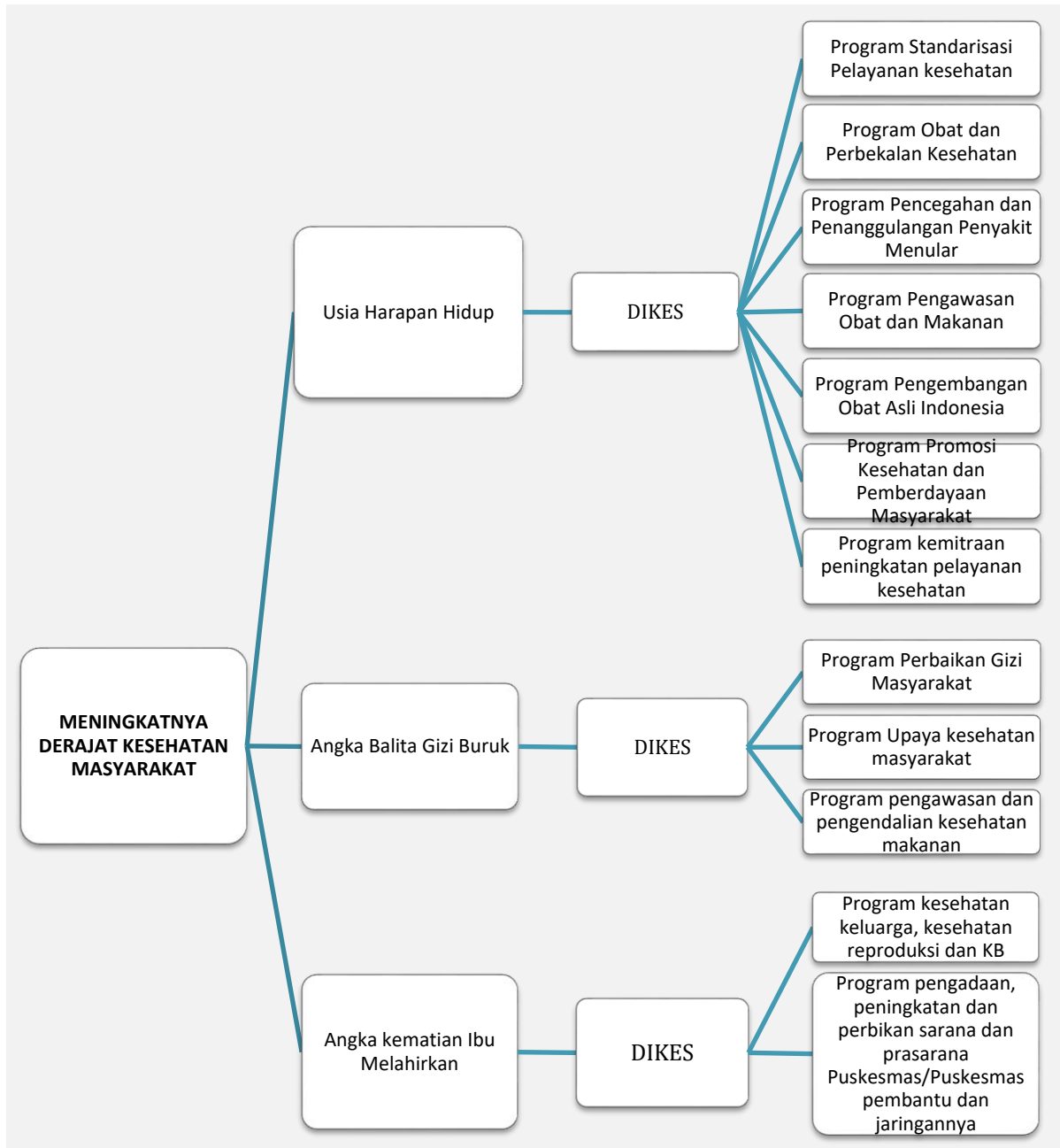
Bagan Operasionalisasi Pendekatan Tematik – Holistik dalam Mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia





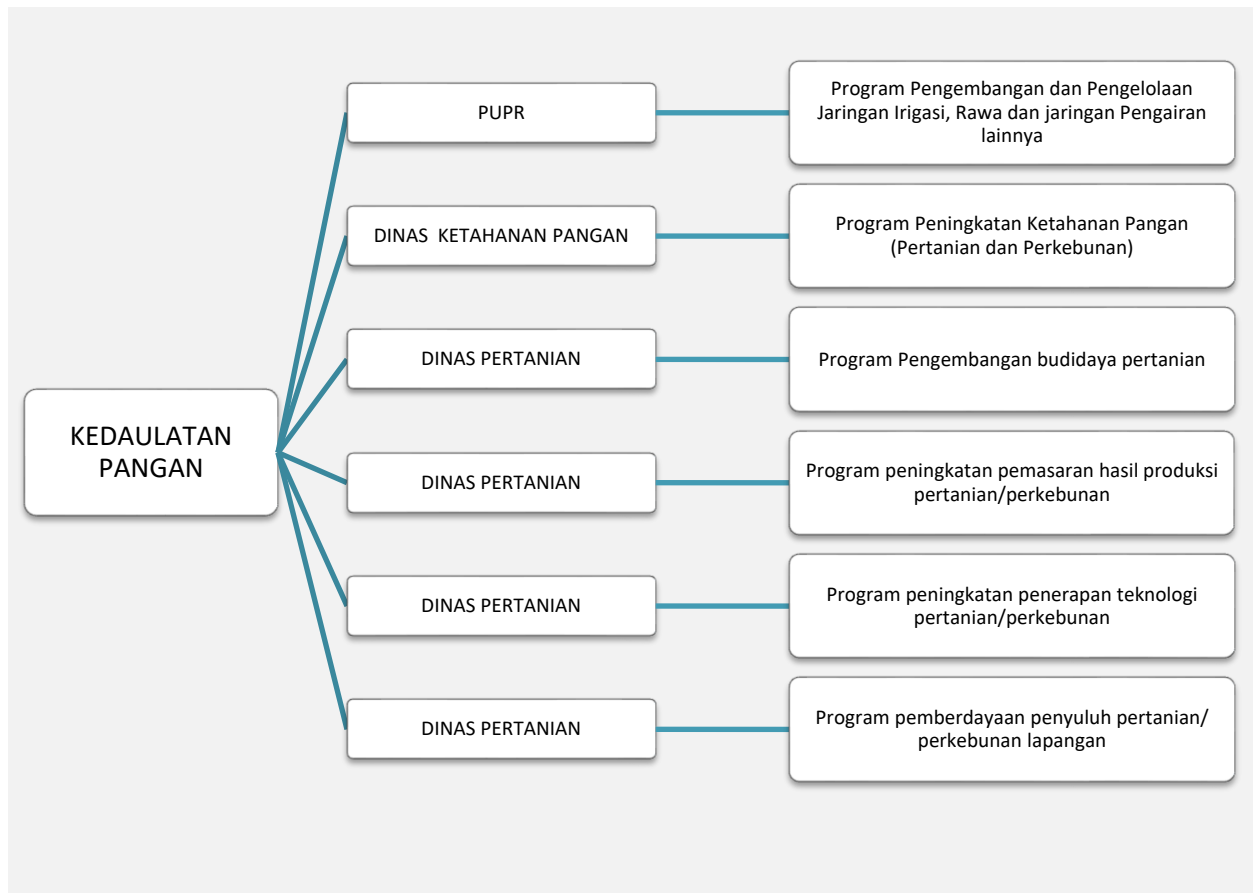
#### 4.3.2. Pendekatan Integratif:

Pendekatan integratif diartikan sebagai penyatuan berbagai aspek ke dalam satu keutuhan yang padu, atau dapat juga diartikan sebagai pendekatan yang menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi untuk mencapai sasaran spesifik secara sektoral seperti tertuang dalam gambar berikut.





## Bagan Operasionalisasi Pendekatan Integratif dalam Mewujudkan Kedaulatan Pangan



### 4.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kota Bima Tahun periode 2013 – 2018. Oleh karena itu, prioritas pembangunan akan difokuskan pada upaya-upaya untuk mencapai target dari indikator tujuan 5 tahunan Kota Bima yang sudah dituangkan dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018. Namun demikian, penentuan prioritas pembangunan tahun 2018 tersebut, juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017
2. Agenda dan sasaran RKP 2018
3. Isu-isu strategis pembangunan Propinsi NTB Tahun 2018
4. Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir

Berdasarkan uraian tersebut, adapun prioritas pembangunan Kota Bima Tahun 2018 adalah:

1. Pembangunan Agama
2. Penanggulangan bencana
3. Infrastruktur
4. Pembangunan Pendidikan;
5. Pembangunan Kesehatan;
6. Pembangunan Perumahan dan Permukiman;
7. Lingkungan Hidup
8. Kesejahteraan Sosial;
9. Penanggulangan Kemiskinan;
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Ketertiban dan Keamanan.
12. Pembangunan ekonomi;
13. Ketahanan Pangan;

Kebijakan pada RKPD Kota Bima Tahun 2018 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2018 yaitu **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”**.

Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga perlu memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 yang tercantum pada RKPD Provinsi NTB Tahun 2018 yaitu **“MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI MELALUI PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAN MEMACU INVESTASI UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN ”**. Sejalan dengan hal-hal tersebut diatas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kota Bima Tahun 2018 adalah **“PEMULIHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KEMBALI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN ”**.

Tabel berikut ini menunjukkan program pembangunan prioritas Kota Bima Tahun 2018 menurut masing-masing urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun program pembangunan lainnya merupakan program pendukung yang pelaksanaannya dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan pendanaan.

**Tabel 4.11.**  
**Program Prioritas RKPD Kota Bima Tahun 2018**

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 107.370.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-1 : <b>Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama</b>	Bagian Kesra Setda
Program bantuan hibah kepada Baznasda	Rp. 200.000.000		BPKAD
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Rp. 1.230.200.000		Bagian Kesra Setda
Program Belanja hibah dan Bantuan Sosial pada Masjid dan Mushollah	Rp.4.185.000.000		BPKAD
	Rp. 5.722.570.000		
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rp. 274.213.700	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-2 : <b>Meningkatnya kerukunan hidup beragama</b>	Kesbangpol
Program bantuan hibah kepada FKUB	Rp.400.000.000		BPKAD
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat	Rp. 471.112.000		Kesbangpol Pol PP
	Rp. 1.145.325.700		
Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 171.220.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-3 : <b>Lestarinya nilai-nilai budaya lokal</b>	Dikbud
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 26.020.000		Dikbud
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 30.870.000		Dikbud
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Seni Budaya	Rp. 5.006.408.000		Dikbud
	Rp. 5.234.518.000		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 2.165.806.250	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-4 : <b>Meningkatnya mutu pendidikan</b>	Dikbud
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rp. 27.048.337.700		Dikbud
Program Pendidikan Non Formal	Rp. 101.687.500		Dikbud
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.220.051.000		Dikbud
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 450.013.500		Dikbud
	Rp. 30.985.895.950		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 2.165.806.250	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-5 :	Dikbud
Program Wajib Belajar Pendidikan	Rp. 27.048.337.700		Dikbud

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
Dasar Sembilan Tahun		<b>Meningkatnya daya saing</b>	
Program Pendidikan Non Formal	Rp. 101.687.500		Dikbud
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 1.220.051.000		Dikbud
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rp. 450.013.500		Dikbud
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 6.448.142.843		Dikes
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 176.762.500		Dikes
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 141.397.500		Dikes
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 761.090.200		Dinsos
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 525.805.000		Dinsos
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 159.299.000		Dinsos
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 151.000.000		Disnaker
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 194.150.000		Disnaker
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 267.155.000		Disnaker
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp. 103.313.300		Koperindag
Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM	Rp. 292.370.500		Koperindag
Program Peningkatan kesejahteraan Petani	Rp. 532.621.700	Distan	
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan/Kelurahan	Rp. 487.356.300	Dinas Perumahan dan KP	
	Rp. 43.630.759.793		
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rp. 1.572.565.250	<b>Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-6 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>	Dikes
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 6.448.142.843		Dikes
Program Pengawasan Obat dan	Rp. 60.597.100		Dikes

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan			
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Rp. 23.989.500		Dikes
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 910.832.000		Dikes
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 176.762.500		Dikes
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 546.886.500		Dikes
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp. 817.807.000		Dikes
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Rp. 9.610.224.000		Dikes
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Rp. 9.889.601.198		Dikes
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Rp. 133.135.800		Dikes
Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB	Rp. 147.849.500		Dikes DPPKB
	Rp. 30.338.393.191		
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp. 141.397.500	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-7 : <b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar</b>	Dikes
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 8.729.003.000		PUPR
Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.880.410.000		Dis Perumahan dan KP
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Rp. 664.900.000		Dinsos
Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Rp. 7.882.000		Dis Perumahan dan KP
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp. 91.719.400		Dis Perumahan dan KP
Program Pengembangan Perumahan	Rp. 3.880.410.000		Dis Perumahan dan KP
Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 7.429.736.000		PUPR
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Rp. 14.975.773.000		PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 16.009.856.000		PUPR
	Rp. 55.811.086.900		

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (Penyusunan LKIP )	Rp. 1.347.870.485	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-8 : <b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Semua OPD
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Rp. 175.935.000		Dinas Statistik
Program pengembangan data/informasi	Rp. 138.793.300		Dinas Statistik
Program perencanaan pembangunan daerah	Rp. 1.971.618.573		BappedaLitbang
Program koordinasi perencanaan pembangunan social dan pemerintahan	Rp. 754.938.500		BappedaLitbang
Program koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur	Rp. 597.100.000		BappedaLitbang
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (untuk laporan keuangan)	Rp. 1.488.835.299		Semua OPD
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rp. 258.870.000		BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Rp. 1.600.490.039		BPKAD
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 2.810.682.616		BPKAD
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 42.140.000		Inspektorat
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp. 1.993.416.337		Inspektorat
	Rp. 13.180.690.149		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Rp. 280.909.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-9 : <b>Meningkatnya pelayanan publik yang prima</b>	DPMPTSP
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Rp. 2.811.026.900		Setda
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rp. 1.791.613.250		Disdukcapil
	Rp. 4.883.549.150		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 33.300.000		DPMPTSP

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 3.601.952.000		Koperindag
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Rp. 1.792.795.743		Koperindag
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp. 203.631.000		Koperindag
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Rp. 1.130.395.100		Dinas Pariwisata
Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	Rp. 95.104.150		Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp. 832.415.400		Dinas Pertanian Dinas Ketahanan Pangan
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Rp. 262.661.500		Dinas Pertanian
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Rp. 335.288.750		Dinas Pertanian
Program pengembangan budidaya perikanan	Rp. 661.267.000		Diskanlut
Program pengembangan perikanan tangkap	Rp. 1.244.665.000		Diskanlut
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 260.169.500		Diskanlut
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Rp. 3.601.952.000		Koperindag
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Rp. 181.510.000		Koperindag
Program pengembangan industri kecil dan menengah	Rp. 203.631.000		Koperindag
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp. 1.792.795.743		Koperindag
	Rp. 16.233.533.886		
		Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-11 : <b>Meningkatnya Pendapatan Masyarakat</b>	
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Rp. 175.439.400		Koperindag
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Rp. 1.792.795.743		Koperindag
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 532.621.700		Dinas Pertanian
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Rp. 30.000.000		Diskanlut
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Rp. 181.510.000		Diskanlut

Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp. 260.169.500		Diskanlut
	Rp. 2.972.536.343		
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan lainnya	Rp. 7.096.617.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-12 : <b>Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan)</b>	PUPR
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Rp. 3.507.818.800		Ketahanan Pangan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Rp. 92.650.000		Dinas Pertanian
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Rp. 62.290.150		Dinas Pertanian
Program pengembangan budidaya pertanian	Rp.		Dinas Pertanian
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Rp. 78.222.500		Dinas Pertanian
	Rp. 10.837.598.450		
Program pembangunan jalan dan jembatan	Rp. 7.429.736.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-13 : <b>Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik</b>	PUPR
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Rp. 16.009.856.000		PUPR
Program peningkatan saluran drainase/gorong-gorong	Rp. 3.551.018.000		PUPR
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Rp. 3.446.174.700		DLH
	Rp. 30.436.784.700		
Program pengembangan destinasi pariwisata	Rp. 2.118.488.000		DInas Pariwisata
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Rp. 27.465.894.800		PUPR
	Rp. 90.457.952.200		
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp. 471.112.000	Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis ke-14 : <b>Terpeliharanya keamanan dan ketertiban</b>	Kesbangpol
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Rp. 977.277.000		Kesbangpol PolPP
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rp. 347.642.000		Kesbangpol
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	Rp. 25.125.000		Pol PP



Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan	OPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
(PEKAT)			
	Rp. 1.821.156.000		
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 313.255.565.712</b>		

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**PRIORITAS DAERAH**

---

---

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, RKP RPJMN Tahun 2015-2019 serta masalah-masalah pembangunan yang mungkin akan dihadapi dalam tahun 2018 serta hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, selanjutnya dapat dijabarkan rencana program dan kegiatan prioritas RKPD Kota Bima tahun 2018 sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.1 sebagai berikut :

TABEL 5.1 REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018

KOTA BIMA

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	URUSAN WAJIB									217.061.733.703	227.914.820.388			
1 01	PENDIDIKAN									15.798.645.635	16.588.577.917			
1 01 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN									15.798.645.635	16.588.577.917			
1 01 1.01.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya kelancaran administari pelayanan tugas dan fungsi OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				1.974.299.415	2.073.014.386		DikBud Kota Bima	
1 01 1.01.01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Caraka/ Petugas Pengantar Surat)						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1 Pelayanan		139.920.000	146.916.000	lama	DikBud Kota Bima	
	- Gaji pegawai tidak tetap													
	- jasa pengantar surat													
1 01 1.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Pelayanan		80.960.000	85.008.000		DikBud Kota Bima	
	- Belanja jasa telepon (Dinas Dikbud, UPTD dan Sanggar kegiatan belajar)													
	- Belanja jasa air kebutuhan dinas dikbud													
	- Belanja listrik (Dinas dikbud, UPTD, Kantor SKB dan gedung serba guna) dan Belanja penambahan daya listrik dinas dikbud													
	- Belanja jasa internet													
	- Belanja operasional website dan pemasangan iklan													
1 01 1.01.01 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah						Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	1 Pelayanan		87.329.000	91.695.450		DikBud Kota Bima	
	- Belanja jasa kearsipan lingkup dinas dikbud													
1 01 1.01.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Pelayanan		57.200.000	60.060.000		DikBud Kota Bima	
	- Belanja Jasa Sopir Kendaraan Operasional Dinas Dikbud													
	- Belanja jasa service Mobil Dinas dan kendaraan bermotor roda dua													
	- Belanja paik mobil dan motor dinas													
1 01 1.01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	1 Pelayanan		161.601.000	169.681.050		DikBud Kota Bima	
	- Kegiatan verifikasi proposal bansos													
	- Penyediaan jasa administrasi keuangan (Pejabat penatausaha keuangan, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, pengurus barang, bendahara penerima dan pembuat daftar gaji)													
	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Dinas Dikbud, kantor SKB dan kantor pengawas pendidikan)													
1 01 1.01.01 01 08	Penyediaan ja kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	1 Pelayanan		27.907.000	29.302.350		DikBud Kota Bima	
	- Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih (Kantor dinas dikbud, UPTD, SKB dan kantor pengawas pendidikan)													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 01 1.01.01 01 10	- elanja Jasa Kebersihan Kantor Dinas Dikbud, UPTD dan SKB Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah ATK	1 Pelayanan		31.803.695	33.393.880		DikBud Kota Bima	
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR DIKBUD													
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KCD													
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR SKB													
	- PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR PENGAWAS SEKOLAH													
1 01 1.01.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan nengandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Pelayanan		128.975.000	135.423.750		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA CETAK													
	- PENGGANDAAN (KEBUTUHAN DINAS DIKBUD, UPTD, SKB & PENGAWAS PENDIDIKAN)													
1 01 1.01.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah perlengkapan kantor	1 Pelayanan		310.409.000	325.929.450		DikBud Kota Bima	
	- PENGADAAN AC AULA SKB													
	- PENGADAAN LAPTOP dan PC													
	- PENGADAAN MEJA KURSI AULA SKB													
1 01 1.01.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah kerjasama dengan media	1 Pelayanan		29.678.000	31.161.900		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA SURAT KABAR (KEBUTUHAN DINAS, UPTD & SKB)													
	- BELANJA IKLAN (KONTRAK KERJA DENGAN MEDIA DI BIDANG PENDIDIKAN)													
1 01 1.01.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah Kegiatan makan minum rapat	1 Pelayanan		12.320.000	12.936.000		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA MAKAN MINUM HARIAN LINGKUP DINAS DIKBUD													
1 01 1.01.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Pelayanan		493.696.720	518.381.556		DikBud Kota Bima	
	- PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH LINGKUP DINAS DIKBUD													
1 01 1.01.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Pelayanan		412.500.000	433.125.000		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH LINGKUP DINAS DIKBUD													
1 01 1.01.01 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>				<b>684.590.000</b>	718.819.500		DikBud Kota Bima	
1 01 1.01.01 02 03	Pembangunan gedung Kantor						Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 Unit		350.000.000	367.500.000		DikBud Kota Bima	
	- PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SKB BESERTA PERABOTNYA													
	- PEMBANGUNAN AULA SKB													
1 01 1.01.01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional						Jumlah kendaraan dinas baru	1 Unit		46.500.000	48.825.000		DikBud Kota Bima	
1 01 1.01.01 02 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor						persentase luas gedung kantor yang dire	1 Unit		42.900.000	45.045.000		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA JASA KEAMANAN KANTOR DINAS DIKBUD													
	- Pemeliharaan gedung kantor Dinas Dikbud													
1 01 1.01.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5 Unit		77.440.000	81.312.000		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA PENGADAAN SUKU CADANG													
	- BELANJA BAHAN BAKAR													
	- BELANJA BAHAN PELUMAS KENDARAAN DINAS													
1 01 1.01.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	4 Unit		30.250.000	31.762.500		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 01 1.01.01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor						jumlah bangunan kantor yang direhabilitasi	2 Unit			137.500.000	144.375.000		DikBud Kota Bima
	- BELANJA MODAL REHABILITASI SEDANG BERAT GEDUNG KANTOR DINAS DIKBUD													
	- BELANJA MODAL PEMBANGUNAN PAGAR SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)													
1 01 1.01.01 03 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya disiplin aparatur		Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	100%					49.500.000	51.975.000		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan						jumlah seragam pakaian dinas kantor	70 pegawai			49.500.000	51.975.000		DikBud Kota Bima
														DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 05 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kapasitas sumber daya aparatur	Kota Bima	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	30%					135.121.000	141.877.050		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 05 05	Pelaksanaan Penilaian AKJG						jumlah obyektif Penilaian AKJG	150 Orang			135.121.000	141.877.050		DikBud Kota Bima
	- HONORARIUM (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)													
	- ATK BIMTEK PEMBUATAN DUPAK GURU													
	- PENGGANDAAN (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)													
	- SEWA RUANG RAPAT (BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)													
	- MAKAN MINUM (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)													
	- UANG SAKU (BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)													
	- NARASUMBER (KEGIATAN AKJG, BIMTEK PEMBUATAN DUPAK, GURU, SOSIALISASI PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA)													
1 01 1.01.01 06 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai	100%					189.925.000	199.421.250		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						jumlah Dokumen yang harus disediakan	4 Dokumen			24.750.000	25.987.500		DikBud Kota Bima
	- PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI ANGGARAN													
1 01 1.01.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan Semesteran						jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	5 Dokumen			37.700.000	39.585.000		DikBud Kota Bima
	- PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017													
	- MAKAN MINUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2018													
1 01 1.01.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen			71.925.000	75.521.250		DikBud Kota Bima
	- PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUNAN 2019													
	- PENYUSUNAN RKA/DPA													
	- PENYUSUNAN RENSTRA 2018 - 2023													
	- PENYUSUNAN RKA/DPA PERUBAHAN													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
1	01	1.01.01	06	06	- MAKAN MINUM PENYUSUNAN RKA/DPA											
					Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD					Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	5 Dokumen		55.550.000	58.327.500		DikBud Kota Bima
					- PENYUSUNAN LAKIP											
					- PENYUSUNAN LPPD											
1	01	1.01.01	15		<b>PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI</b>	<b>Pembangunan Pendidikan</b>	<b>Meningkatnya partisipasi pendidikan anak usia dini</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>persentase peserta pendidikan anak usia dini</b>	<b>100%</b>			<b>2.371.186.000</b>	<b>2.489.745.300</b>		DikBud Kota Bima
1	01	1.01.01	15	03	Penambahan ruang kelas sekolah					Jumlah Paket Ruang Kelas baru	3 Unit		489.588.000	514.067.400		DikBud Kota Bima
					- BELANJA MODAL PEMBANGUNAN RUANG KELAS (Pembangunan Ruang Kelas TKN 10 Nae Kota Bima, Pembangunan Ruang Kelas TKN 30 Rabadompu Kota Bima)											
1	01	1.01.01	15	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary					Jumlah Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	1 Unit		40.000.000	42.000.000		DikBud Kota Bima
					- PEMBANGUNAN/ REHABILITASI SANITASI, JAMBAN SISWA/ GURU TK (TK Negeri 20 Lampe Kota Bima, TK Negeri 23 Dodu Kota Bima, TK Negeri 05 Kota Bima)											
1	01	1.01.01	15	42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah					Jumlah rehab Berat/Sedang Bangunan Sekolah	3 Unit		372.240.000	390.852.000		DikBud Kota Bima
					- BELANJA MODAL REHABILITASI SEDANG / BERAT GEDUNG TK NEGERI (Rehabilitasi Sedang Berat TK Negeri 21 Kumbe, Rehabilitasi Sedang Berat TK Negeri 06 Penaraga, Rehabilitasi Sedang Berat TK Negeri 14 Jatbaru)											
					- BELANJA MODAL REHABILITASI SEDANG/BERAT PAGAR TK NEGERI (Rehabilitasi Sedang Berat Pagar TK Negeri Pembina 01 Rabangodu Utara)											
1	01	1.01.01	15	58	Pengembangan pendidikan anak usia dini					Porsentase TK Negeri Penerima Dana BOP	75 TK dan Lembaga PAUD		1.320.000.000	1.386.000.000		DikBud Kota Bima
					- LOUNCHING GERAKAN WAJIB PAUD											
					- SOSIALISASI BOP PAUD/PNF											
					- TIM MANAJEMEN DANA DAK NON FISIK BOP PAUD											
					- LOMBA TATA KELOLA BOP PAUD/PNF											

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
	- BELANJA OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP) PAUD (TK Negeri Pembina 01 Raba Kota Bima, TK Negeri Pembina 02 Kolo Kota Bima, TK Negeri Pembina 03 Paruga, TK Negeri 04 Tanjung, TK Negeri 05 Rabadompu Timur, TK Negeri 06 Penaraga Kota Bima, TK Negeri 07 Pane Kota Bima, TK Negeri 08 Penatoi Kota Bima, TK Negeri 09 Rabadompu Barat Kota Bima, TK Negeri 10 Rabangodu Utara Kota Bima, TK Negeri 11 Jatibaru Kota Bima, TK Negeri 12 Penana'e Kota Bima, TK Negeri 13 Monggonao Kota Bima, TK Negeri 14 Rite Kota Bima, TK Negeri 15 Kodo Kota Bima, TK Negeri 16 Jatiwangi Kota Bima, TK Negeri 17 Na'e Kota Bima, TK Negeri 18 Manggemaci Kota Bima, TK Negeri 19 Santi Kota Bima, TK Negeri 20 Lampe Kota Bima, TK Negeri 21 Kumbe Kota Bima, TK Negeri 22 Rontu Kota Bima, TK Negeri 23 Dodu Kota Bima, TK Negeri 24 Nungga Kota Bima, TK Negeri 25 Rabangodu Utara Kota Bima, TK Negeri 26 Ielamase Kota Bima, TK Negeri 27 Dodu Kota Bima, TK Negeri 28 Kodo Kota Bima, TK Negeri 29 Kumbe Kota Bima, TK Negeri 30 Rabadompu timur Kota Bima, TK Negeri 31														
1	01	1.01.01	15	59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini			Jumlah Lomba Kreatifitas anak	76 TK dan Lembaga PAUD			108.834.000	114.275.700		DikBud Kota Bima
					- LOMBA KREATIFITAS ANAK TK/PAUD										
					- GEBYAR HARI ANAK NASIONAL (HAN)										
					- BIMTEK PENGELOLA TK/PAUD										
					- SOSIALISASI PRODUK MODEL BPPAUD & DIKMAS										
					- SOSIALISASI PENDIDIKAN KARAKTER JENJANG PAUD										
1	01	1.01.01	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini			Jumlah Pengelola PAUD yang terlatih	100 Orang			27.918.000	29.313.900		DikBud Kota Bima
1	01	1.01.01	15	66	Monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	75 TK dan Lembaga PAUD			12.606.000	13.236.300		DikBud Kota Bima
					- PENYUSUNAN LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN BIDANG PAUD DAN NONFORMAL										
1	01	1.01.01	16		<b>PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN</b>	Pembangunan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi pendidikan Sembilan Tahun	Kota Bima	Porsentase Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	100%		8.055.071.470	8.457.825.044		DikBud Kota Bima
1	01	1.01.01	16	03	Penambahan ruang kelas			Jumlah Paket RKB	3SD & 3 SMP			399.300.000	419.265.000		DikBud Kota Bima
					- PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH SD (SD NEGERI 45 PANE KOTA BIMA, SD NEGERI 2 MANGGEMACI KOTA BIMA, SD NEGERI 56 TOLOBALI KOTA BIMA, SD NEGERI 43 MELAYU KOTA BIMA, SD NEGERI 34 BONTO KOTA BIMA, SD NEGERI 49 RABANGODU SELATAN KOTA BIMA, SD NEGERI 37 KENDO KOTA BIMA, SD NEGERI 61 KARARA KOTA BIMA, SD NEGERI 42 KOLO KOTA BIMA)										
					- TIM MANAJEMEN KEGIATAN DAK TAHUN 2018										
1	01	1.01.01	16	09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir			Jumlah paket taman dan tempat parkir yang terbangun				119.526.000	125.502.300		DikBud Kota Bima
					- REHABILITASI/PEMBANGUNAN TAMAN										

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 01 1.01.01 16 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary						Jumlah Paket sarana air bersih dan sanitari	tersebar pada SD & SMP		186.578.700	195.907.635		DikBud Kota Bima	
	- REHABILITASI / PEMBANGUNAN SANITASI JAMBAN SISWA/GURU SD (SDN 19 KOTA BIMA, SDN 39 KOTA BIMA, SDN 35 KOTA BIMA)													
	- REHABILITASI / PEMBANGUNAN SANITASI JAMBAN SISWA/GURU SD													
1 01 1.01.01 16 15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa						Jumlah sekolah yang menerima buku dan alat tulis siswa			1.009.945.400	1.060.442.670		DikBud Kota Bima	
	- KOLEKSI PERPUSTAKAAN (Perpustakaan SKB)													
	- PENGADAAN BUKU SEJARAH DAN BUDAYA LOKAL													
	- PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SD (SDN 51 Kota Bima, SDN 50 Kota Bima, SDN 54 Kota Bima)													
1 01 1.01.01 16 18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa						Jumlah Sekolah yang menerima Alat Praktek dan Peraga Siswa	12 SD & 10SMP		1.765.573.920	1.853.852.616		DikBud Kota Bima	
	- PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM DAN ALAT PERAGA PENDIDIKAN (DAK 2018)													
	- PERALATAN TIK LABORATORIUM KOMPUTER (SMPN 3 KOTA BIMA, SMPN 4 KOTA BIMA, SMPN 5 KOTA BIMA, SMPN 6 KOTA BIMA, SMPN 7 KOTA BIMA, SMPN 8 KOTA BIMA)													
1 01 1.01.01 16 19	Pengadaan meubeler sekolah						Jumlah Sekolah Penerima Meubeler	7SD & 3 SMP		287.122.000	301.478.100		DikBud Kota Bima	
	- PENGADAAN MEUBELER KEBUTUHAN SD (Pengadaan Meubler Meja dan Kursi Siswa dan Guru SDN 35 Kota Bima, Pengadaan Meubler Meja dan Kursi Siswa dan Guru SDN 20 Kota Bima)													
	- PENGADAAN MEUBELER KEBUTUHAN SMP (Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi Siswa dan Guru SMPN 5 Kota Bima, Pengadaan Meubeler Meja dan Kursi Siswa dan Guru SMPN 7 Kota Bima)													
1 01 1.01.01 16 41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah						Jumlah paket Rehabilitasi	15 SD dan SMP		2.970.371.300	3.118.889.865		DikBud Kota Bima	
	- BELANJA MODAL REHABILITAS SEDANG BERAT BANGUNAN SEKOLAH SMP (SMPN 5 KOTA BIMA, SMPN 6 KOTA BIMA, SMPN 7 KOTA BIMA, SMPN 8 KOTA BIMA, SMPN 9 KOTA BIMA)													
	- REHABILITAS SEDANG BERAT BANGUNAN SEKOLAH SD (SDN 76 KOTA BIMA, SDN 3 KOTA BIMA, SDN 52 KOTA BIMA, SDN 27 KOTA BIMA, SDN 25 KOTA BIMA, SDN 67 KOTA BIMA, SDN 60 KOTA BIMA, SDN 44 KOTA BIMA, SDN 32 KOTA BIMA)													



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	- RAHABILITASI SEDANG BERAT PAGAR SD KEGIATAN 2018 (Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 54 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 29 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 18 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 63 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 1 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 25 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 55 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 10 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 68 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 17 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 16 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 12 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 20 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 24 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 58 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SDN 44 Kota Bima)													
	- RAHABILITASI SEDANG BERAT PAGAR SMP KEGIATAN 2018 (Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SMPN 8 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SMPN 6 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SMPN 9 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SMPN 15 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SMPN 1 KOTA BIMA, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SMPN 7 Kota Bima, Pembangunan dan Rehabilitasi Pagur SMPN 10 Kota Bima)													
	- REHABILITASI SEDANG BERAT BANGUNAN SEKOLAH SD (Rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah SDN 15 Kota Bima)													
1	01	1.01.01	16	63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP			Jumlah Laporan Realisasi Dana BOS Triwulan	23196 Siswa / Peserta Didik	84.889.200	89.133.660		DikBud Kota Bima	
					- TIM MANAJEMEN BOS									
					- LOMBA TATA KELOLA BOS									
					- BELANIA PEGAWAI BOS SD									
					SDN 01 KOTA BIMA									
					SDN 02 KOTA BIMA									
					SDN 03 KOTA BIMA									
					SDN 05 KOTA BIMA									
					SDN 06 KOTA BIMA									
					SDN 07 KOTA BIMA									
					SDN 08 KOTA BIMA									
					SDN 10 KOTA BIMA									
					SDN 11 KOTA BIMA									
					SDN 12 KOTA BIMA									
					SDN 13 KOTA BIMA									
					SDN 14 KOTA BIMA									
					SDN 15 KOTA BIMA									
					SDN 16 KOTA BIMA									
					SDN 17 KOTA BIMA									
					SDN 18 KOTA BIMA									
					SDN 19 KOTA BIMA									
					SDN 20 KOTA BIMA									
					SDN 21 KOTA BIMA									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	SDN 22 KOTA BIMA													
	SDN 24 KOTA BIMA													
	SDN 25 KOTA BIMA													
	SDN 26 KOTA BIMA													
	SDN 27 KOTA BIMA													
	SDN 28 KOTA BIMA													
	SDN 29 KOTA BIMA													
	SDN 30 KOTA BIMA													
	SDN 31 KOTA BIMA													
	SDN 32 KOTA BIMA													
	SDN 33 KOTA BIMA													
	SDN 34 KOTA BIMA													
	SDN 35 KOTA BIMA													
	SDN 36 KOTA BIMA													
	SDN 37 KOTA BIMA													
	SDN 39 KOTA BIMA													
	SDN 40 KOTA BIMA													
	SDN 41 KOTA BIMA													
	SDN 42 KOTA BIMA													
	SDN 43 KOTA BIMA													
	SDN 44 KOTA BIMA													
	SDN 45 KOTA BIMA													
	SDN 46 KOTA BIMA													
	SDN 47 KOTA BIMA													
	SDN 48 KOTA BIMA													
	SDN 49 KOTA BIMA													
	SDN 50 KOTA BIMA													
	SDN 51 KOTA BIMA													
	SDN 52 KOTA BIMA													
	SDN 53 KOTA BIMA													
	SDN 54 KOTA BIMA													
	SDN 55 KOTA BIMA													
	SDN 56 KOTA BIMA													
	SDN 57 KOTA BIMA													
	SDN 58 KOTA BIMA													
	SDN 59 KOTA BIMA													
	SDN 60 KOTA BIMA													
	SDN 61 KOTA BIMA													
	SDN 62 KOTA BIMA													
	SDN 63 KOTA BIMA													
	SDN 64 KOTA BIMA													
	SDN 65 KOTA BIMA													
	SDN 66 KOTA BIMA													
	SDN 67 KOTA BIMA													
	SDN 68 KOTA BIMA													
	SDN 69 KOTA BIMA													
	SDN 70 KOTA BIMA													
	SDN 71 KOTA BIMA													
	SDN 72 KOTA BIMA													
	SDN 73 KOTA BIMA													
	SDN 74 KOTA BIMA													
	SDN 76 KOTA BIMA													
	SDN 77 KOTA BIMA													
	- BELANIA PEGAWAI BOS SMP													
	SMPN 1 KOTA BIMA													
	SMPN 2 KOTA BIMA													
	SMPN 3 KOTA BIMA													
	SMPN 4 KOTA BIMA													
	SMPN 5 KOTA BIMA													
	SMPN 6 KOTA BIMA													
	SMPN 7 KOTA BIMA													
	SMPN 8 KOTA BIMA													
	SMPN 9 KOTA BIMA													
	SMPN 10 KOTA BIMA													
	SMPN 11 KOTA BIMA													
	SMPN 12 KOTA BIMA													
	SMPN 13 KOTA BIMA													
	SMPN 14 KOTA BIMA													
	SMPN 15 KOTA BIMA													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	- BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS SD													
	SDN 01 KOTA BIMA													
	SDN 02 KOTA BIMA													
	SDN 03 KOTA BIMA													
	SDN 05 KOTA BIMA													
	SDN 06 KOTA BIMA													
	SDN 07 KOTA BIMA													
	SDN 08 KOTA BIMA													
	SDN 10 KOTA BIMA													
	SDN 11 KOTA BIMA													
	SDN 12 KOTA BIMA													
	SDN 13 KOTA BIMA													
	SDN 14 KOTA BIMA													
	SDN 15 KOTA BIMA													
	SDN 16 KOTA BIMA													
	SDN 17 KOTA BIMA													
	SDN 18 KOTA BIMA													
	SDN 19 KOTA BIMA													
	SDN 20 KOTA BIMA													
	SDN 21 KOTA BIMA													
	SDN 22 KOTA BIMA													
	SDN 24 KOTA BIMA													
	SDN 25 KOTA BIMA													
	SDN 26 KOTA BIMA													
	SDN 27 KOTA BIMA													
	SDN 28 KOTA BIMA													
	SDN 29 KOTA BIMA													
	SDN 30 KOTA BIMA													
	SDN 31 KOTA BIMA													
	SDN 32 KOTA BIMA													
	SDN 33 KOTA BIMA													
	SDN 34 KOTA BIMA													
	SDN 35 KOTA BIMA													
	SDN 36 KOTA BIMA													
	SDN 37 KOTA BIMA													
	SDN 39 KOTA BIMA													
	SDN 40 KOTA BIMA													
	SDN 41 KOTA BIMA													
	SDN 42 KOTA BIMA													
	SDN 43 KOTA BIMA													
	SDN 44 KOTA BIMA													
	SDN 45 KOTA BIMA													
	SDN 46 KOTA BIMA													
	SDN 47 KOTA BIMA													
	SDN 48 KOTA BIMA													
	SDN 49 KOTA BIMA													
	SDN 50 KOTA BIMA													
	SDN 51 KOTA BIMA													
	SDN 52 KOTA BIMA													
	SDN 53 KOTA BIMA													
	SDN 54 KOTA BIMA													
	SDN 55 KOTA BIMA													
	SDN 56 KOTA BIMA													
	SDN 57 KOTA BIMA													
	SDN 58 KOTA BIMA													
	SDN 59 KOTA BIMA													
	SDN 60 KOTA BIMA													
	SDN 61 KOTA BIMA													
	SDN 62 KOTA BIMA													
	SDN 63 KOTA BIMA													
	SDN 64 KOTA BIMA													
	SDN 65 KOTA BIMA													
	SDN 66 KOTA BIMA													
	SDN 67 KOTA BIMA													
	SDN 68 KOTA BIMA													
	SDN 69 KOTA BIMA													
	SDN 70 KOTA BIMA													
	SDN 71 KOTA BIMA													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	SDN 72 KOTA BIMA													
	SDN 73 KOTA BIMA													
	SDN 74 KOTA BIMA													
	SDN 76 KOTA BIMA													
	SDN 77 KOTA BIMA													
	- BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS SMP													
	SMPN 1 KOTA BIMA													
	SMPN 2 KOTA BIMA													
	SMPN 3 KOTA BIMA													
	SMPN 4 KOTA BIMA													
	SMPN 5 KOTA BIMA													
	SMPN 6 KOTA BIMA													
	SMPN 7 KOTA BIMA													
	SMPN 8 KOTA BIMA													
	SMPN 9 KOTA BIMA													
	SMPN 10 KOTA BIMA													
	SMPN 11 KOTA BIMA													
	SMPN 12 KOTA BIMA													
	SMPN 13 KOTA BIMA													
	SMPN 14 KOTA BIMA													
	SMPN 15 KOTA BIMA													
	- BELANJA MODAL DANA BOS SD													
	SDN 01 KOTA BIMA													
	SDN 02 KOTA BIMA													
	SDN 03 KOTA BIMA													
	SDN 05 KOTA BIMA													
	SDN 06 KOTA BIMA													
	SDN 07 KOTA BIMA													
	SDN 08 KOTA BIMA													
	SDN 10 KOTA BIMA													
	SDN 11 KOTA BIMA													
	SDN 12 KOTA BIMA													
	SDN 13 KOTA BIMA													
	SDN 14 KOTA BIMA													
	SDN 15 KOTA BIMA													
	SDN 16 KOTA BIMA													
	SDN 17 KOTA BIMA													
	SDN 18 KOTA BIMA													
	SDN 19 KOTA BIMA													
	SDN 20 KOTA BIMA													
	SDN 21 KOTA BIMA													
	SDN 22 KOTA BIMA													
	SDN 24 KOTA BIMA													
	SDN 25 KOTA BIMA													
	SDN 26 KOTA BIMA													
	SDN 27 KOTA BIMA													
	SDN 28 KOTA BIMA													
	SDN 29 KOTA BIMA													
	SDN 30 KOTA BIMA													
	SDN 31 KOTA BIMA													
	SDN 32 KOTA BIMA													
	SDN 33 KOTA BIMA													
	SDN 34 KOTA BIMA													
	SDN 35 KOTA BIMA													
	SDN 36 KOTA BIMA													
	SDN 37 KOTA BIMA													
	SDN 39 KOTA BIMA													
	SDN 40 KOTA BIMA													
	SDN 41 KOTA BIMA													
	SDN 42 KOTA BIMA													
	SDN 43 KOTA BIMA													
	SDN 44 KOTA BIMA													
	SDN 45 KOTA BIMA													
	SDN 46 KOTA BIMA													
	SDN 47 KOTA BIMA													
	SDN 48 KOTA BIMA													
	SDN 49 KOTA BIMA													



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	- PELAKSANA UJIAN AKHIR SEKOLAH PROPINSI (USP) SD - PELAKSANA UJIAN AKHIR SEKOLAH (SMP) - PELAKSANA UJIAN NASIONAL (SMP)													
	- SOSIALISASI PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SD / SMP DAN DAN SOSIALISASI - PELAKSANAAN UJIAN TRY OUT SD													
	- PEMBEKALAN PROKTOR SEKOLAH UNTUK UNBK SMP/MTs - PELAKSANAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL													
1 01 1.01.01 18	<b>PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL</b>	Pembangunan Pendidikan	Meningkatnya Mutu Pendidikan		Persentase Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal yang aktif	100%				111.856.250	117.449.063		DikBud Kota Bima	
1 01 1.01.01 18 14	Pengembangan pendidikan non formal - KEGIATAN JAMBORE PTK PNFI						Jumlah Keikutsertaan PKBM	3 Kegiatan		111.856.250	117.449.063		DikBud Kota Bima DikBud Kota Bima	
	- SELEKSI LEMBAGA PAUD dan PNF BERPRESTASI - BIMTEK PENGUATAN KELEMBAGAAN NON FORMAL - SOSIALISASI UNBK KESETARAAN PAKET A, B, DAN C - KEGIATAN KURSUS DAN PELATIHAN PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)													
	- PENDATAAN ANGKA MELEK HURUF KOTA BIMA													
1 01 1.01.01 20	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Pembangunan Pendidikan	Meningkatnya tingkat dan mutu pendidikan	Kota Bima	Porsentase Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga	12 Tahun				1.815.657.100	1.906.439.955		DikBud Kota Bima	
1 01 1.01.01 20 01	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik						Jumlah Tenaga Pendidik yang tersertifikasi	165 Tenaga Pengajar		115.174.400	120.933.120		DikBud Kota Bima	
	- KEGIATAN SERTIFIKASI GURU - VERIFIKASI PENERIMA TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN (NON SERTIFIKASI)													
1 01 1.01.01 20 08	Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan - DIKLAT/PEMBINAAN KEPALA SEKOLAH						Jumlah guru yang mengikuti dilat	300 Tenaga Pengajar		1.700.482.700	1.785.506.835		DikBud Kota Bima	
	- DIKLAT/PEMBINAAN PEMBINAAN PENGAWAS PENDIDIKAN - DIKLAT/PEMBINAAN GURU MATA PELAJARAN SMP (B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, IPA, IPS, PPKn, BK, Agama, dan Mulok)													
	- DIKLAT/PEMBINAAN GURU KELAS (GURU KELAS ATAS DAN KELAS BAWAH)													
	- DIKLAT/PEMBINAAN GURU TK/PAUD - KEGIATAN SELEKSI ADMINISTRATIF CALON KEPALA SEKOLAH TAHUN 2018													
1 01 1.01.01 22	<b>PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	Pembangunan Pendidikan	meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan	Kota Bima	Porsentase Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	100%				411.439.400	432.011.370		DikBud Kota Bima	
1 01 1.01.01 22 04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan						Laporan kegiatan Sosialisasi	3 Kali		61.501.000	64.576.050		DikBud Kota Bima	
	- SOSIALISASI DAN RAPAT KOORDINASI TERKAIT KEBHAKARAN PENDIDIKAN - SOSIALISASI PROGRAM PENDIDIKAN KELUARGA													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 01 1.01.01 22 07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan - BIMTEK PENGELOLAAN DANA BOS - PENYUSUNAN DOKUMEN SPIP dan SPM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BIMA						Jumlah SOP Pelayanan	2 Kali			99.841.500	104.833.575		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 22	Monitoring, evaluasi dan pelaporan - MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN										20.000.000	21.000.000		
1 01 1.01.01 22 10	Koordinasi hari-hari besar nasional bidang pendidikan, pemuda dan olahraga - KEGIATAN HARI PENDIDIKAN - PELAKSANAAN HARI GURU NASIONAL - PELAKSANAAN LOMBA VOLLY DALAM RANGKA PERINGATAN HARI BESAR NASIONAL - KEGIATAN LIGA SISWA TINGKAT PELAJAR SMP/MTs TINGKAT KOTA BIMA						Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3 Kali			103.741.000	108.928.050		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 22 11	Pendataan Pendidikan - KEGIATAN VERVAL DAPODIK SISTIM ON LINE DIKDas - BIMTEK OPERATOR TK/PAUD DAN DIKMAS						Data base Pendidikan dan profil pendidikan kota bima	1 dokumen 210 Sekolah			73.826.500	77.517.825		DikBud Kota Bima
1 01 1.01.01 22 12	Kegiatan Unit Pelaksana Akreditasi - Sosialisasi Badan Akreditasi Jenjang PAUD /PNF dan Jenjang SD/SMP - KEGIATAN UNIT AKREDITASI JENJANG SD DAN SMP dan JENJANG PAUD DAN DIKMAS						Jumlah Unit ter Akreditasi	180 Org / Tenaga Kependidikan			52.529.400	55.155.870		DikBud Kota Bima
<b>1 02</b>	<b>RESEHATAN</b>										<b>36.345.490.168</b>	<b>38.162.764.676</b>		
<b>1 02 1.02.01</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>										<b>36.345.490.168</b>	<b>38.162.764.676</b>		
1 02 1.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya kelancaran administari pelayanan tugas dan fungsi OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1.834.412.600	1.926.133.230		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat - Biaya Pengiriman Surat Ke luar Daerah						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	24 Dokumen Surat			1.500.000	1.575.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Belanja Telepon dan internet (dinkes, PKM dan UPTD) - Belanja Air Bersih (PKM Rasanee Timur) - Pembayaran Rekening Listrik (dinkes, PKM dan UPTD)						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	6 rekening telepon dan 65 rekening listrik			445.200.000	467.460.000		DINAS KESEHATAN
1 02 1.02.01 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah - Tim inventarisasi Kondisi Aset Di Puskesmas						Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	6 dok			43.852.600	46.045.230		DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	02	1.02.01	01	06				Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	31 Unit Kendaraan Roda 4		118.140.000	124.047.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	07				Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	22 orang		171.000.000	179.550.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	08				Cakupan ruang kantor yang bersih	24 orang		366.900.000	385.245.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	09				Jumlah Jasa perbaikan peralatan kerja	8 Unit		7.475.000	7.848.750	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	10				Jumlah ATK	1 Tahun		208.800.000	219.240.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	11				Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Tahun		27.500.000	28.875.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	12				Jumlah perlengkapan kantor	1 tahun		3.300.000	3.465.000	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	13				Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 kegiatan		33.500.000	35.175.000		
1	02	1.02.01	01	15				Jumlah kerjasama dengan media	5 jenis surat kabar		7.245.000	7.607.250	DINAS KESEHATAN	
1	02	1.02.01	01	17				Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 bulan		20.000.000	21.000.000	DINAS KESEHATAN	





KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							Monitoring Kedisiplinan Aparatur pada Tingkat Puskesmas	2 kali setahun		7.500.000	7.875.000			
							Monitoring Kedisiplinan Aparatur pada Tk Pustu dan Poskesdes	2 kali setahun		6.500.000	6.825.000			
1 02	1.02.01 06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%		178.851.250	187.793.813	DINAS KESEHATAN		
1 02	1.02.01 06 01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Jumlah Dokumen yang harus disediakan	2 keg		27.937.500	29.334.375	DINAS KESEHATAN		
1 02	1.02.01 06 02		Penyusunan laporan keuangan semesteran				Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 keg		31.650.000	33.232.500	DINAS KESEHATAN		
			- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran											
			- Monitoring terkait PAD pada Tingkat Puskesmas											
			- Pembinaan Pelaporan keuangan Puskesmas											
			- Monev keuangan Smtr I di Puskesmas											
1 02	1.02.01 06 04		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	1 keg		42.320.250	44.436.263	DINAS KESEHATAN		
			- Pertemuan Konsolidasi Data Keuangan											
			- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun											
1 02	1.02.01 06 05		Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 keg		47.943.500	50.340.675	DINAS KESEHATAN		
			- Penyusunan RKA											
			- Penyusunan DPPA											
			- Penyusunan DPPA											
			- Penyusunan Renja											
			- Penyusunan Renstra											
1 02	1.02.01 06 06		Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD				Jumlah dokumen laporan yang sesuai ke	3 Keg		29.000.000	30.450.000	DINAS KESEHATAN		
			- Penyusunan LAKIP											
			- Penyusunan LPPD											
1 02	1.02.01 15		PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	Meningkatkan sarana dan prasana pelayanan kesehatan	Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	Kota Bima	Porsentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	98,80%		2.793.075.865	2.932.729.658	DINAS KESEHATAN		
1 02	1.02.01 15 01		Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan				Jumlah obat dan perbekalan kesehatan	1520,02 Jiwa		2.658.075.865	2.790.979.658	DINAS KESEHATAN		
			- Tim Perencanaan Obat Terpadu (POT)											
			- Panitia Pelaksana Perencanaan Obat Terpadu											
			- Tim Penyusun RKO											
1 02	1.02.01 15 02		Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan				Jumlah Obat yang terdistribusi	7 keg		62.000.000	65.100.000	DINAS KESEHATAN		
			- Tim Stok Ketersediaan Obat											
			- Tim Stok Ketersediaan Obat											
			- Panitia Pemusnahan Obat Rusak/ Kadaluarsa											
			- Tenaga IT IFK											
			- Ongkos Buruh dalam rangka persiapan Pemusnahan obat											

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	02	1.02.01	15	04										
1	02	1.02.01	15	05										
1	02	1.02.01	15	06										
1	02	1.02.01	16											
1	02	1.02.01	16	01										
1	02	1.02.01	16	02										
1	02	1.02.01	16	07										
1	02	1.02.01	16	09										
1	02	1.02.01	16	12										

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	- Panitia Kegiatan Penilaian FKTP Berprestasi Tk.Kota Bima													
	- Pengadaan Dokter Umum													
	- Pengadaan Dokter Spesialis													
	- Tambahan Biaya Dokter Spesialis													
	- Cetak Kartu (karcis BPJS/UJUR, karcis umum, buku register pasien untuk puskesmas dan buku, blanko rekan medik rawat inap, blanko rekam medik rawat jalan)													
1 02 1.02.01 16 13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan						jumlah puskesmas yang menerima biaya operasional kesehatan	2 kegiatan		2.678.691.550	2.812.626.128		DINAS KESEHATAN	
	- Usaha Kesehatan Institusi													
	- Promosi Kesehatan													
	- Kesehatan Lingkungan													
	- Pengendalian Penyakit													
	- Imunisasi dan surveilans													
	- Kesehatan Ibu dan Anak													
	- Program Gizi													
	- Manajemen BOK													
	- Instalasi Farmasi Kesehatan (IFK)													
	- Bantuan Operasional Kesehatan													
	- Kalim Persalinan Jampersal													
1 02 1.02.01 16 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Jumlah Kegiatan Monitoring dan pelaporan	6 Kegiatan		18.100.000	19.005.000		DINAS KESEHATAN	
	- Penyusunan Laporan Tahunan													
	- Pertemuan SP2TP													
	- Monev Program Perkesmas bagi Programmer di Puskesmas													
	- Monev Program SP2TP Puskesmas													
	- Monev Sarana Pelayanan Kesehatan Primer (Puskesmas, Pustu, Polindes/Poskesdes)													
	- Monev Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan													
	- Monev Pelaksanaan Program PIS - PK													
1 02 1.02.01 16 16	Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK)						Jumlah pos UKK yang dibina	3Keg		17.600.000	18.480.000		DINAS KESEHATAN	
	- Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Kerja dan Olahraga													
	- Monev Pelaksanaan Program Kesehatan Kerja di Puskesmas													
1 02 1.02.01 16 17	Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan Swasta						Jumlah pelayanan kesehatan swasta yang mendapat ijin	3 Kegiatan		40.000.000	42.000.000		DINAS KESEHATAN	
	- Tim Pengendali/Pemeriksaan Perijinan Kefarmasian dan Alkes													
	- Sosialisasi Peraturan Perijinan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta													
	- Pengawasan dan Pemantauan Perijinan pada Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta													
1 02 1.02.01 16 19	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan						jumlah masyarakat kota bima yang mendapatkan pelayanan kartu jujur sehat	2 kegiatan		1.500.000.000	1.575.000.000		DINAS KESEHATAN	
	- Belanja Pakai Habis Bahan Laboratorium													
	- Pengadaan Alat untuk penanganan penyakit akib rokok													
	- Pengadaan Alat Laboratorium untuk Pemeriksaan Dampak Akib Rokok													
	- Pembangunan Ruang perawatan penderita penyakit dampak akib rokok													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 02 1.02.01 16 20	Pelayanan kesehatan penduduk dipuskesmas dan jaringannya						jumlah masyarakat kota bima yang mendapatkan pelayanan kartu jujur sehat	20 Keg		2.592.192.556	2.721.802.184		DINAS KESEHATAN	
	- Pertemuan Koordinasi & Evaluasi Pelaksanaan Program Kartu Jujur Sehat													
	- Tim Jaminan Mutu													
	- Tim Pengawasan Pelayanan KIS													
	- Petugas Input Data Kartu Jujur Kesehatan (SIM Kartu Jujur)													
	- Pengelola Kartu Jujur sehat di dikes													
	- Tim Jaminan Mutu													
	- Tim Pengawas Pelaksanaan Kartu Jujur Sehat													
	- Operasional pelayanan Kartu Jujur Pembelian barang habis pakai di Puskesmas													
	- Pelayanan Rawat Jalan, Insentif Tenaga Puskesmas													
	- Biaya Klaim Pelayanan Kesehatan Kartu Jujur Sehat													
	- Pelaksanaan ambulance on call													
	- Pengembalian Retribusi Puskesmas													
	- Bahan Bakar Pelaksanaan dan ganti oli Ambulance On Call													
	- Monev Pelaksanaan kartu Jujur di Puskesmas Se- Kota Bima													
1 02 1.02.01 16 21	Pencegahan dan Penanganann Penyakit Tidak Menular						Jumlah Pencegahan dan Penanganann Penyakit Tidak Menular	15 Keg.		272.140.000	285.747.000			
	- sosialisasi IVAdan CBE tingkat kelurahan													
	- Pertemuan Sosialisasi Pandu PTM													
	- Pelatihan Pandu PTM tingkat Puskesmas													
	- Pertemuan peningkatan Kapasitas Petugas													
	- Pembelian BHP Kegiatan Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA)													
1 02 1.02.01 17	<b>PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN</b>		<b>Meningkatnya Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>prosentase angka penggunaan Fornas</b>	<b>65%</b>				<b>191.000.000</b>	<b>200.550.000</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>	
1 02 1.02.01 17 01	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan						Laporan monitoring dan evaluasi pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	7 Kegiatan		71.000.000	74.550.000		DINAS KESEHATAN	
	- Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GEMA CERMAT)													
	- Sosialisasi Sistem Informasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika													
1 02 1.02.01 17 02	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya						Poesentase sarana pengolah pangan yang diawasi	9 Kegiatan		88.000.000	92.400.000		DINAS KESEHATAN	
	- Sosialisasi Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)													
	- Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan P-IRT													
	- Pembinaan dan Pemantauan P-IRT													
1 02 1.02.01 17 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Laporan monitoring dan evaluasi	4 Kegiatan		32.000.000	33.600.000		DINAS KESEHATAN	
	- Tim Pengawasan Produk Pangan ( Makanan Minuman)													
	- Pengelola Sistim Informasi Pelaporan Narkotika/ Psikotropika (SIPNAP)													
	- Pembelian bahan pangan untuk sampling uji laboratorium													
	- Biaya Pengujian kandungan bahan kimia berbahaya pada produk pangan													
1 02 1.02.01 18	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA</b>		<b>Meningkatnya Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Poesentase pengawasan sarana obat tradisional</b>	<b>65%</b>				<b>65.000.000</b>	<b>68.250.000</b>			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 02 1.02.01 18 03	Peningkatan promosi obat bahan alam Indonesia di dalam dan di luar negeri - Pertemuan Orientasi Pemanfaatan TOGA dan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional - Tim Penilai Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Tingkat Kota Bima - Tim Penyelenggara Penilaian Pemanfaatan Taman Obat Keluarga Tingkat Kota Bima - Pembentukan Taman Obat Keluarga (TOGA) Percontohan						Jumlah obat asli Indonesia yang dikembangkan	3 Kegiatan			34.000.000	35.700.000		
1 02 1.02.01 18 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Laporan monitoring dan evaluasi	4 Kegiatan			31.000.000	32.550.000		
1 02 1.02.01 19	<b>PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>		<b>Meningkatnya Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat</b>	Kota Bima	<b>prosentasi Masyarakat Ber PHBS</b>	<b>100%</b>					<b>2.327.860.000</b>	<b>2.444.253.000</b>		
1 02 1.02.01 19 02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat						Jumlah Penyuluhan Pola Hidup Sehat	4 Kegiatan			68.020.000	71.421.000		
1 02 1.02.01 19 04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan - Lomba Penyuluhan kader Promkes - Lomba cerdas terampil kader promkes - Pertemuan Koordinasi Forum Da'i Kesehatan Tk Kota - Pembentukan forum komunikasi kader						Jumlah Tenaga penyuluh kesehatan yang dilatih	4 Kegiatan			193.000.000	202.650.000		
1 02 1.02.01 19 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Money Terpadu Program Promkes						jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	8 Kegiatan			94.000.000	98.700.000		
1 02 1.02.01 19 06	Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehat - Pembekalan Survey PHBS di tatanan Rumah Tangga - Pembekalan Survey PHBS di tatanan Tempat-Tempat umum - Rakor Capaian survey PHBS tk Kota						Jumlah rumah tangga berPHBS	8 Kegiatan			171.300.000	179.865.000		
1 02 1.02.01 19 07	Peningkatan Kesehatan Institusi - Lomba dokter kecil - Lomba Cerdas Trampil Kader Kesehatan Remaja - Sosialisasi Tanggap darurat bencana di sekolah - Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok di sekolah - Penyuluhan Narkoba dan HIV AIDS						jumlah Institusi yang di bina	21 kegiatan			560.000.000	588.000.000		
1 02 1.02.01 19 08	Unit Kegiatan Bersumberdaya Masyarakat - Lomba Penyuluhan tenaga Promkes - Pelatihan Kader Poskestren dalam rangka penguatan poskestren sebagai UKBM - Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Saka Bakti Husada - Lomba Poskestren Tk Kota						jumlah UKBM yang dibina	16 Kegiatan			800.000.000	840.000.000		
1 02 1.02.01 19 09	Komunikasi Informasi dan Edukasi - Penyuluhan kesehatan - Tim Hari Kesehatan Nasional (HKN)						jumlah Penyuluhanpada kelompok masyarakat	39 Kegiatan			376.000.000	394.800.000		
1 02 1.02.01 19 10	Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah						Jumlah penjaringan Anak sekolah	3 Kegiatan			29.335.000	30.801.750		
1 02 1.02.01 19 11	Pengembangan Sekolah Sehat						Jumlah Sekolah yang di bina	5 Kegiatan			36.205.000	38.015.250		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 02 1.02.01 20	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT				Meningkatnya Kesehatan	Meningkatnya Program Perbaikan	Kota Bima	Angka balita gizi buruk	0%				759.800.000	797.790.000			
1 02 1.02.01 20 02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin									Jumlah yang mendapatkan Tambahan makanan dn Vitamin	350 orang		324.000.000	340.200.000			
	- Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Pada Bawi dan Anak (PMBA)																
	- PMT Pemulihan Balita Gizi Buruk																
	- Distribusi Mp-ASI dari Pusat ke gudang																
	- Distribusi Mp-ASI dari gudang ke puskesmas																
	- BBM distr Mp-ASI dr DIKES ke PKM																
1 02 1.02.01 20 03	Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya									Jumlah penanggulangan KEP, Anemia, Gizi Besi, GAKY, VIT A da, Zat Gizi Mikro	7 Keg		203.200.000	213.360.000			
	- Penyelenggaraan kelas gizi Balita																
1 02 1.02.01 20 04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi									Jumlah Kegiatan Pemberdaan Masyarakat tentang KADARZI	3 Keg		94.000.000	98.700.000			
	- Rakorcam Tentang PWS Gizi/ Penimbangan Tingkat Kecamatan																
	- Pertemuan Teknis survey Pemantauan Status Gizi (PSG) balita																
	- Sosialisasi Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) Tingkat Kecamatan																
	- Pertemuan Teknis survey Pemantauan Status Gizi (PSG) balita																
1 02 1.02.01 20 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Kegiatan		138.600.000	145.530.000			
	- Pertemuan Evaluasi Program Gizi																
	- Penyusunan Lap. Tahunan Program																
	- Monitoring Pelaksanaan PMT pada Balita																
	- Supervisi Fasilitatif Program Gizi																
1 02 1.02.01 21	PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT							Meningkatnya Program	100%				397.200.000	417.060.000			
1 02 1.02.01 21 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan									jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	8 keg		42.500.000	44.625.000			
	- Pertemuan pemutakhiran data dan evaluasi program penyehatan lingkungan																
	- Orientasi E-Monev STBM Berbasis SMS dan Smart STBM																
	- Pertemuan Evaluasi Hasil Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman																
	- Pembinaan dan evaluasi kegiatan klinik sanitasi puskesmas																
	- Bimbingan teknis program penyehatan lingkungan																
	- Bimbingan teknis dan monitoring evaluasi kegiatan STBM di Puskesmas																
1 02 1.02.01 21 05	Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat Umum									Jumlah TTU yang dibina	23 Keg		42.120.000	44.226.000			
	- Pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Hasil Pengawasan Tempat-Tempat Umum (TTU)																
	- Pengawasan Hotel																
	- Pengawasan Sanitasi Kolam Renang dan Pemandian Umum																
	- Pengawasan Sanitasi Sekolah																
	- Pengawasan Sanitasi Rumah Sakit dan Klinik Swasta																
	- Pengawasan Sanitasi Sarana Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)																

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 02 1.02.01 21 06	- Pengawasan Sanitasi Pasar Pembinaan Kebersihan Lingkungan						Jumlah Pembinaan Kebersihan Lingkungan	5 Keg		156.000.000	163.800.000			
	- Pertemuan Pembentukan POKJA Pasar Sehat Kota Bima - Edukasi dan Advokasi Sanitasi Bebas Sekolah (SBS) - Advokasi Kelurahan Open Defecation (BABS) Menuju Status Kelurahan ODF (Open Defecation Free) Pilar I Program STBM													
1 02 1.02.01 21 07	Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga						Jumlah Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban Keluarga	8 Keg		62.500.000	65.625.000			
	- Deklarasi Kelurahan ODF - Pemicuan Pilar I STBM Pada Kelurahan Yang Masih BABS - Verifikasi Kelurahan ODF													
1 02 1.02.01 21 08	Pengawasan dan pengendalian penyediaan air bersih dan air minum						% penduduk yg memiliki akses thdp air minum berkualitas	44 Keg		94.080.000	98.784.000			
	- Pengawasan Sarana Air Bersih [SGL,SPT,SPT-DK, SPT-DL] - Pengawasan Sarana air Perpipaian (PDAM) - Pengawasan Mata Air - Pengawasan DAM [Depot Air Minum Isi Ulang] dan AMDK[Air Minum Dalam Kemasan] - Pemeriksaan Sampel Air Sungai - Pengawasan LRTP - Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah - Pengawasan Makanan Jajanan - Pengawasan Rumah Makan/Restaurant - Pembinaan Kelompok Pemakai Air (POKMAIR) dan Kelompok Pemakai MCK													
1 02 1.02.01 22	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>			Kota Bima	Meningkatnyan Program	100%				1.452.510.000	1.525.135.500			
1 02 1.02.01 22 01	Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk						Jumlah Fokus Penyemprotan Foing	50 Fokus		95.000.000	99.750.000			
	- Belanja Pakai Habis Bahan Laboratorium (Rapid Diagnostic Test DBD, Slide, Lancet, Abate) - Busi Swing Fog - Baterai Besar Swing Fog - Bensin Swing Fog/Fogging Fokus - Solar Swing Fog/Fogging Fokus - Bensin Mobil operasional Fogging Fokus - Pelaksanaan Fogging Fokus oleh Penyemprot - Service Mesin Swing Fog													
1 02 1.02.01 22 02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging						Jumlah Swing Fog dan Bahan Kimia	6 paket		93.115.000	97.770.750			
1 02 1.02.01 22 08	Peningkatan Imunisasi						Jumlah Capaian Imunisasi	18 Kegiatan		325.200.000	341.460.000			
	- Pertemuan Advokasi,Sosialisasi dan Koordinasi Linsek Dalam Rangka Kampanye MR (Measles Rubella) Tk.Kota Bima - Pertemuan Advokasi,Sosialisasi dan Koordinasi Dalam Rangka Kampanye MR (Measles Rubella) Tk.Puskesmas Kota Bima													



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	- Pertemuan Advokasi, Sosialisasi dan Koordinasi Dalam Rangka Kampanye MR (Measles Rubella) Tk. Kecamatan Kota Bima													
	- Pertemuan Evaluasi Dalam Rangka Kampanye MR (Measles Rubella) Tk. Kota Bima													
	- Rapat Pembentukan POKJA Dalam Rangka Kampanye MR (Measles Rubella) Tk. Kota Bima													
	- Rapat Koordinasi Dalam Rangka Persiapan Kampanye MR (Measles Rubella)													
	- Pertemuan Pembekalan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan tentang Teknis Pelaksanaan Kampanye MR (Measles Rubella)													
	- Pencanangan Dalam Rangka Kampanye MR (Measles Rubella)													
	- Supervisi Supportif Pelaksanaan Sweeping/ DOFU													
	- Supervisi Supportif Pelaksanaan BIAS													
	- Supervisi Supportif Pelaksanaan Program Imunisasi													
	- Supervisi Supportif Pelaksanaan Imunisasi Rutin di Posyandu													
	- Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan kampanye MR (Measles Rubella)													
1	02	1.02.01	22	09	Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah			Jumlah KLB yang ditangani	6 Kegiatan		100.900.000	105.945.000		
					- Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan haji									
					- Pertemuan pembentukan Tim TGC tingkat Kota Bima tahun 2018									
					- Pelatihan siap siaga & pasca bencana TGC tingkat Kota Bima									
					- Sosialisasi penyakit baru New Emerging									
					- Pertemuan Evaluasi AFP (Accut Flaccid Paralysis)									
1	02	1.02.01	22	10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan			Jumlah Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit	3 keg		41.000.000	43.050.000		
					- Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi									
					- Pertemuan Koordinasi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)									
					- Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)									
					- Vaksinasi CJH (Calon Jemaah Haji)									
					- Operasional Tim Gerak Cepat									
1	02	1.02.01	22	12	Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (DBD, Malaria)			Jumlah pemberantasan penyakit	21 Keg		262.950.000	276.097.500		
					- Pertemuan Penguatan Kemitraan Dan Komitmen Pasca Eliminasi Malaria									
					- Pertemuan Pengelola Program Demam Berdarah / DBD puskesmas									
					- Pertemuan Malaria Tk Kota									
					- Pertemuan Refreshing Kader Juru Malaria Desa (JUMALDES) TK Kota									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	- Sosialisasi PSN DBD Tk Kelurahan Kota Bima													
	- Sosialisasi Pasca Eliminasi Malaria tk. Kelurahan Kota Bima													
	- Sosialisasi 'Satu Rumah Satu Jumantik' di sekolah													
	- Pemeriksaan Slide malaria di puskesmas													
	- Pemeriksaan crosscheck malaria di dikes													
1 02 1.02.01 22 13	Pencegahan dan Pemberantasan Diare						Jumlah Kejadian Diare yang ditangani	9 Kegiatan		130.772.000	137.310.600			
	- Pertemuan Koordinasi Program Diare													
	- Sosialisasi Penyakit Filariasis (Kaki Gajah)													
	- Pertemuan Evaluasi Program Diare													
	- Pemeriksaan Sediaan Darah Filariasis													
	- Pengambilan Sediaan Darah Filariasi													
1 02 1.02.01 22 14	Pencegahan dan Pemberantasan Ispa						Jumlah Kejadian Ispa yang ditangani	4 Kegiatan		36.392.000	38.211.600			
	- Refresing Tatalaksana Pneumonia pada balita													
	- Pertemuan validasi data ISPA													
	- Pertemuan Evaluasi Program ISPA													
1 02 1.02.01 22 15	Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru						Jumlah Pencegahan dan pemberantasan TB Paru	26 Kegiatan		314.000.000	329.700.000			
	- Pertemuan Evaluasi Tahunan Program TB Paru Tk Kota Bima													
	- Pertemuan Evaluasi Tahunan TB Paru dengan Dokter Praktik Swasta/Klinik													
	- Pertemuan Hospital DOTS Lingkage (HDL)													
	- Jasa Pengujian Laboratorium (Diagnose, Folow UP AB ke 2, Follow UP AB ke 5, Follow UP Akhir Pengobatan, Pemeriksaan sputum Dahak hasilnya BTA Positif)													
	- Supervisi Program TB Ke Sarana Pelayanan Kesehatan													
	- Pelacakan TB HIV													
	- Pelacakan TB Mangkir Tingkat Kota Bima													
	- Pelacakan Kasus TB Anak													
1 02 1.02.01 22 16	Pencegahan dan Pemberantasan Kusta						Jumlah Pencegahan dan pemberantasan Kusta	6 Kegiatan		53.181.000	55.840.050			
	- Sosialisasi Penyakit Kusta dan Frambusia tingkat kelurahan													
	- Kegiatan RVS (Rapid Village Survey) Kusta													
	- Pertemuan Evaluasi Program Kusta													
1 02 1.02.01 22 17	Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS						Jumlah Pencegahan dan Penanganan HIV-AIDS			230.000.000	241.500.000			
	- Kegiatan Sero Survey Risti HIV/AIDS													
	- Kegiatan Sosialisasi HIV AIDS Tk. Kelurahan													
	- pertemuan peningkatan Kapasitas Petugas TB dan Bidang program HIV AIDS													
	- Pertemuan Peningkatan Kapasitas Konselor VCT HIV AIDS													





KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 02 1.02.01 33 .	PROGRAM KESEHATAN KELUARGA, KESEHATAN REPRODUKSI DAN KB	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB	Kota Bima	Meningkatkan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB	97%					232.225.000	243.836.250		
1 02 1.02.01 33 01	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						Jumlah pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	3Keg			137.079.000	143.932.950		
	- Pertemuan Refresing APN Tk. Kota Bima													
	- Pertemuan DRK (Diskusi Refleksi Kasus) Tk. Kota Bima													
	- Pertemuan Pemutakhiran Pemanfaatan Kohort Kesga Bagi Petugas Kesehatan													
	- Pertemuan Penguatan Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak Bagi Pengelola Program di Puskesmas/Polindes													
	- Pertemuan Penguatan dan Validasi Data Rutin Kesehatan Keluarga													
	- Pertemuan Koordinasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Kebidanan dengan Fasilitas Rujukan													
	- Pengadaan Buku Register Kohort Ibu, Bayi, KB													
	- Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Polindes													
	- Supervisi Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi ke Puskesmas													
1 02 1.02.01 33 02	Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Remaja						Jumlah pelayanan keluarga berencana	4 Keg			78.525.000	82.451.250		
	- Orientasi Petugas dalam peningkatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja													
	- Peningkatan pengetahuan Kesehatan Reproduksi pada mahasiswa di kampus perguruan tinggi													
1 02 1.02.01 33 03	Pelayanan Kesehatan Usila						Jumlah pelayanan pada usila	2 Keg			11.101.000	11.656.050		
	- Pertemuan Peningkatan Peran Kelompok Lansia Dalam Pelayanan Kesehatan Lansia													
	- Rapat Koordinasi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia													
1 02 1.02.01 33 04	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan						Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Keg			5.520.000	5.796.000		
	- Pertemuan Evaluasi Program Kesehatan Keluarga Tk. Kota Bima													
	- Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Remaja, KtA, KtP													
	- Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Usila													
	- Monev Pelayanan KIA, KB, Kespro & Usila Petugas Kota Ke Puskesmas													
1 02 1.02.01 34	KEBIJAKAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN										1.558.035.000	1.635.936.750		
1 02 1.02.01 34 05	Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan						Jumlah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6 Keg			66.975.000	70.323.750		
	- Tim Pengelolah Data SDMK													
	- Tim Pelaksana Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan TK. Kota Bima													
	- Tim Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan TK. Kota Bima													
	- Tim Pembina Calon Tenaga Kesehatan Teladan TK. Prov NTB													
	- Validasi Data SDMK ke Puskesmas, IFK, Labkesda dan Rumah Sakit Swasta													
1 02 1.02.01 34	Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit										1.491.060.000	1.565.613.000		
	- Honorarium Pengelola Keuangan													
	- ATK Pengelolaan Rumah Sakit													
	- Alat Listrik dan Elektronik													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	- Material - Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih - Pembelian barang habis pakai medis - Biaya Internet - Biaya Listrik - Cleaning Service - Satnam - Tenaga Londry - Pemeriksaan Air & Limbah RS - Pemeriksaan Laboratorium - Tenaga Dokter Spesialis - Bahan Bakar - Pelumas - Belanja cetak - Belanja fotocopy - Belanja Makan minum pasien													
1 02	4.01.03		SEKRETARIAT DAERAH							48.000.000	50.400.000			
1 02	4.01.03	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan budaya hidup sehat	Kota Bima	Peningkatan Budaya Hidup Sehat Aparatur	100%		48.000.000	50.400.000			
1 02	4.01.03	19 06	Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				jumlah rumah tangga berPHBS	48 kali		48.000.000	50.400.000			
1 02	4.01.11		KECAMATAN ASAKOTA							48.000.000	50.400.000			
1 02	4.01.11	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan budaya hidup sehat	Kota Bima	Peningkatan Budaya Hidup Sehat Aparatur	100%		48.000.000	50.400.000			
1 02	4.01.11	19 08	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat				jumlah UKBM yang dibina	4 kelurahan		48.000.000	50.400.000			
1 02	4.01.12		KECAMATAN MPUNDA							100.000.000	105.000.000			
1 02	4.01.12	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan budaya hidup sehat	Kota Bima	Peningkatan Budaya Hidup Sehat Aparatur	100%		100.000.000	105.000.000			
1 02	4.01.12	19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat				jumlah UKBM yang dibina	10 kelurahan		100.000.000	105.000.000			
1 02	4.01.13		KECAMATAN RABA							110.000.000	115.500.000			
1 02	4.01.13	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan budaya hidup sehat	Kota Bima	Peningkatan Budaya Hidup Sehat Aparatur	100%		110.000.000	115.500.000			
1 02	4.01.13	19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat				jumlah UKBM yang dibina	11 kelurahan		110.000.000	115.500.000			
1 02	4.01.13		KECAMATAN KECAMATAN RASANA E TIMUR							70.000.000	73.500.000			
1 02	4.01.13	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan budaya hidup sehat	Kota Bima	Peningkatan Budaya Hidup Sehat Aparatur	100%		70.000.000	73.500.000			
1 02	4.01.13	19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat				jumlah UKBM yang dibina	7 kelurahan		70.000.000	73.500.000			
1 02	4.01.13		KECAMATAN RASANA E TIMUR							60.000.000	63.000.000			
1 02	4.01.13	19	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan budaya hidup sehat	Kota Bima	Peningkatan Budaya Hidup Sehat Aparatur	100%		60.000.000	63.000.000			
1 02	4.01.13	19	Unit Kegiatan Bersumber Daya Masyarakat				jumlah UKBM yang dibina	6 kelurahan		60.000.000	63.000.000			
1 03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							143.495.030.100	144.440.005.080			
1 03	1.03.01		DINAS PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGI							143.495.030.100	144.440.005.080			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 03 1.03.01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Terpenuhiya pelayanan adm. Perkantoran yang memadai</b>	<b>13 Pelayanan</b>					<b>1.492.100.000</b>	<b>1.561.455.000</b>		
1 03 1.03.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran Rekening Listrik Kantor Juran Speedy						Tersedianya sarana komunikasi yang cukup	1 Pelayanan			90.000.000	94.500.000		
1 03 1.03.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa Servis Kendaraan (Roda 4 dan Roda 2) Biaya Pajak Kendaraan Bermotor						Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas	1 Pelayanan			50.000.000	52.500.000		
1 03 1.03.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan Biaya jasa administrasi keuangan						Tersedianya SDM Adm. Keuangan Perkantoran	1 Pelayanan			80.000.000	84.000.000		
1 03 1.03.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih										5.000.000			
1 03 1.03.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya						Tersedianya Alat Tulis kantor yang cukup.	1 Pelayanan			48.000.000	50.400.000		
1 03 1.03.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Biaya Belanja Cetak Belanja foto copy						Tersedianya barang Cetak dan Pengadaan yang cukup	1 Pelayanan			130.000.000	136.500.000		
1 03 1.03.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Honorarium Operasional Kegiatan Belanja Modal Alat Survey dan Alat Ukur Pengadaan GPS Belanja Modal LCD/In-Fokus Scanner CCTV Pengadaan Camera Digital Belanja Modal Laptop Printer Pengadaan Computer Server						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup	1 Pelayanan			112.900.000	118.545.000		
1 03 1.03.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan Honorarium Tim Pembina Honorarium Tim Penataan Kearsipan (ARSIPARIS)						Tersediaanya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Pelayanan			19.200.000	20.160.000		
1 03 1.03.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman Belanja Makan dan Minum Rapat Makan Minum Tamu						Terpenuhiya kebutuhan Makan-minum kantor	1 Pelayanan			27.000.000	28.350.000		
1 03 1.03.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah						Dihadirinya seluruh rapat-rapat dinas	1 Pelayanan			780.000.000	819.000.000		
1 03 1.03.01 01 19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Ranaka survei/Monev										150.000.000	157.500.000		
1 03 1.03.01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Terpeliharnya sarana/ prasarana Operasional kantor</b>	<b>12 Bin</b>					<b>539.600.000</b>	<b>566.580.000</b>		
1 03 1.03.01 02 22	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR Rehabilitasi/Pemeliharaan Garasi/Gedung Work Shop						Terawatnya seluruh sarana/prasarana kantor	1 kgt			190.000.000	199.500.000		
1 03 1.03.01 02 24	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor (Roda Empat) Penggantian Suku Cadang Kendaraan Bermotor (Roda Dua)						Terawatnya semua kendaraan dinas	3 unit			317.700.000	333.585.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Bahan Bakar Gas/Pelumas Kendaraan Bermotor (Roda 4)													
	Belanja Bahan Bakar Gas/Pelumas Kendaraan Bermotor (Roda 2)													
1 03 1.03.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									31.900.000	33.495.000			
	Jasa pemeliharaan AC													
	Biaya pemeliharaan printer													
<b>1 03 1.03.01 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>Persentase SKPD dengan indeks SAKIP Baik</b>	<b>75%</b>				<b>218.300.000</b>	229.215.000			
1 03 1.03.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Tersusunnya Lap. Capaian Kinerja.	1 Dokumen		24.650.000	25.882.500			
	Honorarium penyusun laporan capain kineria dan realisasi kinerja SKPD													
1 03 1.03.01 06 02	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran						Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran.	1 Dokumen		24.650.000	25.882.500			
	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Semester													
1 03 1.03.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									12.350.000	12.967.500			
	Honorarium Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran													
1 03 1.03.01 06 04	Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun						Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun	1 Dokumen		24.650.000	25.882.500			
	Honorarium Tim Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun													
1 03 1.03.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD						Tersusunnya Lap. Program Kegiatan tahunan	4 Dokumen		98.500.000	103.425.000			
	Honorarium Tim Penyusun RENJA Thn Anggaran 2019													
	Honorarium Tim Penyusunan RKA/P/DPA-P Thn Anggaran 2018													
	Honorarium Tim Penyusunan RKA/DPA Thn Anggaran 2019													
	Honorarium Tim Penyusun Renstra Tahun 2018-2023													
1 03 1.03.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD						Tersusunnya Lap. Lakip, LPJ dan LPPD	3 Dokumen		33.500.000	35.175.000			
	Honorarium Tim Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Thn Anggaran 2016													
<b>1 03 1.03.01 07</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN</b>									76.624.228.000	80.455.439.400			
1 03 1.03.01 07 03	Peningkatan Jalan									68.737.868.000	72.174.761.400			
	Peningkatan Jalan Rontu-Nitu													
	Peningkatan Jalan Linakar Jatibaru													
	Peningkatan Jalan Melayu-Kolo (lanjutan)													
	Peningkatan Jalan Rite - Ndano Na'e (lanjutan)													
	Peningkatan jalan so numbe kel. Kolo													
	Peningkatan jalan lampe kel. lampe													
	Peningkatan jalan so oi lubu kel. dodu													
	Peningkatan jalan so oi manta kel. dodu													
	Peningkatan jalan so oi caba link. bonto													
	Peningkatan jalan so oi karambi													
	Peningkatan jalan so temba romba kel. rontu.													
	Peningkatan Jalan Kolo - Nanga Raba (Lanjutan)													
	Peningkatan Jalan Temba Kolo													
	Pembangunan Drainase Jalan Kendo- Toloweri													
	Pembangunan Drainase Jalan Ntobo-Busu													
	Pembangunan Drainase Jalan Penggilingan													
	Pembangunan Gorong-gorong Jalan Penggilingan													



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pembangunan Gorong-Gorong Kendo													
	Pembangunan Talud Jalan Panggi-Oi Niu													
	Pembangunan Talud Jalan Rite-Ntobo													
	Peningkatan Jalan BTN PEPABRI													
	Peningkatan Jalan Kedondong													
	Peningkatan Jalan Kendo-Kabanta													
	Peningkatan Jalan Kumba - Kadole													
	Peningkatan Jalan Lela Spada													
	Peningkatan Jalan Linkar Songqela													
	Peningkatan Jalan Oi S'i - Nitu													
	Peningkatan Jalan Penanae-Kendo													
	Peningkatan Jalan Perintis													
	Peningkatan Jalan Rabanoodu - Mande													
	Peningkatan Jalan Rade Wura Jatiwanati													
	Peningkatan Jalan Rite - Matakando													
	Peningkatan Jalan Renoqe Nggapi													
	Peningkatan Jalan Rida Pulu - Oi S'i													
	Peningkatan Jalan RT. 17 Kel. Kolo													
	Peningkatan Jalan Santi-Soncolela													
	Peningkatan Jalan Seroja													
	Peningkatan Jalan Sukun													
	Peningkatan Jalan Terminal-Pasar Rava													
	Peningkatan Jalan Toloweri-Kabanta													
	Peningkatan Jalan Wenggo													
	Peningkatan Jalan Toro Tompa Ule Kel. Kolo													
	Peningkatan Jalan Panggi													
	Peningkatan Jalan So Tolo Lalu - Oi Fo'o													
	Peningkatan Jalan Rontu - Oi S'i													
	Peningkatan Jalan Nggaro Te													
1 03	1.03.01	07	04	Peningkatan jembatan						7.886.360.000	8.280.678.000			
				Penggantian Jembatan Toloweri										
<b>1 03</b>	<b>1.03.01</b>	<b>15</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>	<b>Infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	<b>87,23%</b>		<b>4.691.800.000</b>	<b>4.926.390.000</b>			
1 03	1.03.01	15	03	Pembangunan Jalan			Panjang Jalan dalam kondisi baik	25 km		2.191.800.000	2.301.390.000			
				Pembukaan jalan so o'o matarindi ni'u kel. dara										
				Pembangunan deker jalan matakando ndano nae										
				Pembangunan Jalan Nggaro Bae Kel. Rabadompu Barat										
				Pembukaan jalan doru buntu - sori wila kel. Kolo										
				Pembukaan jalan sambina'e - sonco tengge										
				Buka Jalan Kel. Sadia										
				Buka Jalan Kel. Santi										
				Pembangunan Jalan LC Jatiwangi Segmen 1										
				Pembangunan Jalan LC Jatiwangi Segmen 2										
				Pembangunan Jalan ncai Kapenta - Ndano Nae (Lanjutan)										
				Lanjutan Pembangunan Jalan Linkar pasar Amahami										
				Pembukaan jalan baru danatraha-lintas sambinae										
1 03	1.03.01	15	05	Pembangunan jembatan			Jumlah Jembatan yang ditangani	2 Unit		2.500.000.000	2.625.000.000			
				Pembangunan Jembatan Jatibaru										
<b>1 03</b>	<b>1.03.01</b>	<b>16</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	Luas Wilayah Genangan yang ditangani	<b>25 Ha</b>		<b>3.739.617.600</b>	<b>3.926.598.480</b>			
1 03	1.03.01	16	01	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong			Panjang saluran drainase yang dibangun/ditangani	15.000 m		2.850.794.600	2.993.334.330			
				Pembangunan saluran drainase lingkungan al-muhairin kel. mande										
				Talud dan cor plat drainase RT.02 kel. dodu										

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pembangunan drainase rabadompu barat kel rabadompu barat													
	Pembangunan drainase kel. rabangodu selatan													
	Pembutan Bak Penampung Air kel. ntobo													
	Pembangunan drainase lingkungan rasa lewi RT.13 kel. jatibaru													
	Pembangunan saluran drainase di kel. rabangodu utara													
	Pembangunan saluran drainase dan talud kel. kendo													
	Pembangunan drainase dan talud kel. nitu													
	Pembangunan drainase Lingkungan Sadia													
	Cor plat drainase kel. ntobo													
	Pembangunan drainase kel. penatoi													
	Pembangunan Saluran Drainase Al-Muhajiri BTN Panggi Kel. Panggi													
	Pembangunan Saluran Drainase Kel Rabadompu													
	Pembangunan Saluran Drainase RW 1 Kel Kumbe													
	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Mekarbaru Kel Jatiwangi													
	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kumbe													
	Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Tambana													
	Pembangunan Saluran Drainase Kel Lelamase													
1 03 1.03.01 16 03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong						Panjang saluran drainase yang dibangun/ditangani	15.000 m		888.823.000	933.264.150			
	Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Barat													
	Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Timur													
	Pemeliharaan (Normalisasi) Saluran Drainase Kolam Retensi													
	Pemeliharaan (Normalisasi) Saluran Drainase Lingkungan Sadia													
	Rehabilitasi Saluran Drainase RW.01 Kel. Melayu													
	Pemeliharaan Drainase Kel rabangodu Utara													
1 03 1.03.01 17	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONG</b>	<b>Infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Berkurangnya</b>	<b>Kejadian Bencana Longsor</b>				<b>4.523.025.000</b>	<b>4.749.176.250</b>			
1 03 1.03.01 17 03	Pembangunan turap/talud/bronjong						Jumlah Titik Longsor/Potensi Longsor yang ditangani	20 titik		4.523.025.000	4.749.176.250			
	Perkutan Tebing sungai Salama Kel. Na'e													
	Perkuatan Tebing sungai Santi I													
	Perkuatan tebing sungai penatoi - matakando													
	Lanjutan Bronjongnisasi So Sipi Kel. Dodu													
	Bronjongnisasi sungai RT.10 Kel. Dodu													
	Bronjongnisasi Ngaronunggu Kel. Rontu													
	Bronjongnisasi sungai kel. penaraa													
	Perkuatan tebing sungai slama - snati													
	Bronjongnisasi Kel. Dodu													
	Perkuatan Tebing Sungai Santi II													
	Perkuatan tebing sungai nggaro bae kel. rabadompu													
	Pembangunan talud kel. santi													
	Bronjongnisasi kel. penatoi													
	Pembangunan drainase sungai lingkungan rabantala													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Perkuatan Tebing Sunqai Kendo													
	Perkuatan Tebing Sungai Ntobo (Tolokolo)													
	Perkuatan Tebing Sunqai Melayu													
	Perkuatan Tebing Sunqai Ntobo													
	Perkuatan Tebing Sunqai Jatibaru 1													
	Perkuatan Tebing Sunqai Jatibaru 2													
	Perkuatan Tebing Sunqai Jatiwanai													
	Pembangunan Saluran Pembuang Kel. Nungga													
	Pembangunan Saluran Pembuang Nggaro Nungga													
	Talud Sungai so tolo jati rabadompu barat													
1	03	1.03.01	17	04	Pemeliharaan turap/talud/bronjong					725.300.000	761.565.000			
					Pemeliharaan Rutin Sungai (Ruas Tersebar)									
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Tebing Sungai Kendo									
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Tebing Sungai Nggaro Lo									
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Tebing Saluran Pembuang Rontu									
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Tebing Sungai Melayu									
1	03	1.03.01	18		<b>PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN/JEMBATAN</b>	<b>Infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	<b>87,23%</b>				
1	03	1.03.01	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan				Panjang Jalan dalam kondisi baik	10 KM	15.142.632.000	15.899.763.600		
					Talud jalan kelurahan penatol - matakando									
					Pemeliharaan Drainase Jalan Baba Mbuku									
					Pemeliharaan rutin jalan kota bima Wilayah Barat									
					Pemeliharaan Drainase Jalan Kedondong									
					Pemeliharaan Gorong-gorong Jalan Anggrek 2									
					Pemeliharaan Gorong-gorong Jalan Garuda									
					Pemeliharaan Jalan Busu-Ndano Nae									
					Pemeliharaan Jalan Diponegoro									
					Pemeliharaan Jalan Dodo - Nungga									
					Pemeliharaan Jalan Dodu perbatasan									
					Pemeliharaan Jalan Doro Toi Penatol									
					Pemeliharaan Jalan Imam Bonjol									
					Pemeliharaan Jalan Jambu									
					Pemeliharaan Jalan Jatiwanai									
					Pemeliharaan Jalan Kesatuan									
					Pemeliharaan Jalan Kolo - Nangaraba									
					Pemeliharaan Jalan Kompi - Karantina									
					Pemeliharaan Jalan LLAJ									
					Pemeliharaan Jalan Monginsidi									
					Pemeliharaan Jalan Oi Foo-Wangge									
					Pemeliharaan Jalan Panqoi									
					Pemeliharaan jalan Penakalate									
					Pemeliharaan Jalan Pendidikan									
					Pemeliharaan Jalan Pisang									
					Pemeliharaan Jalan Sudirman									
					Pemeliharaan Jalan Sukun									
					Pemeliharaan Jalan Terusan Imam Bonjol									
					Pemeliharaan rutin jalan kota bima Wilayah Timur									
					Pemeliharaan Jalan Patimura									
					Pemeliharaan Jalan Kamboja									
					Pemeliharaan Jalan Manggemaci									
					Pemeliharaan Jalan Santi - Soncolela									
					Pemeliharaan Jalan Perintis 2									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 03 1.03.01 18 04	Pemeliharaan Jalan M Nur Latief Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan (Tersebar)						Jumlah Jembatan yang ditangani	2 Unit			100.200.000	105.210.000		
1 03 1.03.01 23	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN</b>	<b>Infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	<b>87,23%</b>					<b>526.830.000</b>	<b>553.171.500</b>		
1 03 1.03.01 23 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Pemeliharaan Alat Laboratorium Sondir, CBR, Marsnal, Abrasi dan fiel CBR Pemeliharaan Alat Berat UPTD Work Shop (exavator, Fibro, Greder dan Dumtruck)						Jumlah Alat Berat yang ditangani	1 Kgt			358.650.000	376.582.500		
1 03 1.03.01 23 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan Pengujian Sampel ( Material ) Laboratorium Pengujian Sampel diLapangan Monitoring Alat ( Dump Truck dan Alat Berat )						Laporan Hasil monitoring Prasarana Kebinamargaan	1 Dokumen			168.180.000	176.589.000		
1 03 1.03.01 24	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA/JARINGAN PENGAIRAN</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>Meningkatnya produksi pertanian</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Rasio Jaringan Irigasi Teknis</b>						<b>5.208.068.000</b>	<b>5.468.471.400</b>		
1 03 1.03.01 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Rehabilitasi Dan Normalisasi DAM Fanda Pemeliharaan Rutin Jaringan irigasi (Ruas Tersebar)						Peningkatan Saluran Irigasi				1.482.868.000	1.557.011.400		
1 03 1.03.01 24 18	Pembangunan Jaringan Irigasi Peningkatan Saluran Irigasi Risa Peningkatan Saluran Irigasi Oi Fo'o Peningkatan Saluran Irigasi Dam Jati Peningkatan Saluran Irigasi Saluran Rabangodu Selatan Peningkatan Saluran Irigasi Oi Lubu Peningkatan Saluran Irigasi Nunqaa II Peningkatan saluran kel. matakando pembangunan saluran irigasi rite kel. rite Lanjutan pembangunan saluran irigasi dam ra'lu Pembangunan saluran irigasi dam tolokodo Peningkatan Saluran Irigasi Lela Peningkatan Saluran Irigasi Naqeru Peningkatan Saluran Irigasi Mbanga Bulu Peningkatan Saluran Irigasi Nae						Bertambahnya jumlah Jaringan Irigasi				3.725.200.000	3.911.460.000		
1 03 1.03.01 27	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar</b>	<b>Kota Bima</b>							<b>7.329.084.000</b>	<b>7.695.538.200</b>		
1 03 1.03.01 27 01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah Pemasangan Jaringan Pipa Ndano Nae Pemeliharaan Sarana Air Bersih Kota Bima Penyediaan sarana Air Bersih Kota Bima Pemasangan Pipa distribusi NSD Rehabilitasi SPAM Kabanta Pembangunan SPAM Lingk. Busu Kel. Ntobo Pemasangan Pompa Dorong SPAM So kadole				Persentase rumah tangga berakses air bersih	100,00%	Terbangunnya Jar. Air bersih bagi masy. Berpenghasilan rendah	1000 SR			4.529.844.000	4.756.336.200		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pemasangan Pipa Distribusi Penaraga Deban Pasar													
	Pemasangan Pipa Distribusi Penaraga Deban Kantor Camat													
	Pemasangan Pipa Distribusi Gatot Subroto Sadia													
	Pemasangan Pipa Distribusi Gajah Mada Samping Toko Boly (KANAN)													
	Pemasangan Pipa Distribusi Gajah Mada Samping Toko Boly (KIRI)													
	Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Sultan Salahudin													
	Pemasangan Pipa Distribusi Lingkar Doro Mbolo Kel Kumbe													
	Optimalisasi SPAM Ntobo													
	Pembangunan SPAM Kel. Dodu													
	Pembangunan SPAM Kel. Dara													
	Pembangunan SPAM Kel. Nunqaa													
	Pembangunan SPAM Kel. Kodo													
	Pembangunan SPAM Kel. Pangoi													
	Pembangunan SPAM Kel. Oi Fo'o													
	Pembangunan SPAM Kel. Rite													
	Pembangunan SPAM Kel. Rontu													
	Perluasan Jaringan Pipa Lingk. Niu Kel. Dara													
	Pembangunan Pipa Distribusi dan SR Kel. Tanjung													
	Pembangunan Pipa Distribusi dan SR Lingk. Sarata Kel. Paruga													
	Pembangunan Jaringan Pipa Distribusi Kel. Rabadombu Timur													
	Pembangunan Pipa Distribusi dan SR Kel. Penaraga													
	Pembangunan SPAM Kel. Melavu													
1	03	1.03.01	27	02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Persentase rumah tangga berakses air limbah lavak	100,00%	Terbangunnya Prasarana dan sarana air limbah komunalbagi masy. Bernegosiasian rendah	800 SR	2.751.250.000	2.888.812.500			
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Sarae 1									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Sarae 2									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Pangoi									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Pane									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Mongaonao									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Rabangodu Selatan									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Penaraga 1									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Penaraga 2									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Penaraga 3									
					Pembangunan Septic Tank Individu Kel. Lampe									
					Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Rontu									
					Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Dara									
					Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Paruga									
					Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Tanjung									
					Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Melavu									
					Pembangunan IPAL Komunal Kel. Nungga									
					Pembangunan MCK+ Pongpes Imam Syafi'i									
					Pembangunan MCK+ Pongpes Al- Husaini									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pembangunan MCK+ Ponges Darul Furkan													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Rabadompu Barat													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Matakando													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Nae													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Sambinae													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Kumbe													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Manggemaci													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Kolo													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Jatibaru													
	Pembangunan Septic Tank Komunal Kel. Jatiwangi													
	IPAL Pasar Amahami													
	Penyusunan Database Sanitasi Kota Bima													
1 03 1.03.01 27 04	Facilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah				Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah yang berfungsi dengan baik	25 unit	Jumlah KSM Pengelola Air limbah yang dibina	8 KSM		47.990.000	50.389.500			
	Pendampingan Sanimas													
<b>1 03 1.03.01 29</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH</b>	<b>Infrastruktur dan konektivitas wilayah</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>						<b>7.125.000.000</b>	<b>7.481.250.000</b>			
1 03 1.03.01 29 02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur				<b>Persentase luas kota tepian yang tertata</b>	10,00%	Luas Lahan Tepian Air Yang ditata	2 Ha		7.000.000.000	7.350.000.000			
	Talud pemukiman kel. dodu													
	Rabat Gang dan Talud RT.06, RT.07 Kel. Rabangodu Selatan													
	Perkuatan tebing permukiman di kel. kendo													
	Penataan lapangan lelamase													
	Pemasangan talud di kel. penaraga													
	Penataan lapangan kel. dodu													
	Penataan lingkungan ntobo													
	Penataan Lingkungan bedi kel. manggemaci													
	Talud lingkungan songgela kel. jatiwangi													
	Talud di kelurahan oi fo'o													
	Talud lingkungan kel. nungga													
	Talud lingkungan wenggo kel. penanee													
	Talud lingkungan nggaro nannga kel. kendo													
	Talud lingkungan bonto kel. kolo													
	Talud di Lingkungan spaga kel. jatiwangi													
	Talud lingkungan kel. lampe													
	Talud Lingkungan Kel. Rontu (Lanjutan)													
	Pemasangan talud jalan lingkungan menuju lapangan bola kel. nitu													
	Penataan Amahami													
	Penataan Lapangan Kendo													
	Pembangunan Pos Jaga Taman Ni'u													
	Penataan Kawasan Ni'u (lanjutan)													
	Pembangunan Talud ( RT.04, 005 dan 009) Kel. Santi													
	Penataan Lingkungan RW 2 Kelurahan Lampe													
	penataan lawata (lanjutan)													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	03	1.03.01	29	05	Penataan Lingkungan Lewijambu									
					Pendampingan Program NUSP-Phase 2	Persentase luas permukiman kumuh	5,00%	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	20 Ha			75.000.000	78.750.000	
					DED Skala Kawasan Kota Bima									
					UKL UPL Kawasan NSD									
					Pengawasan NUSP Skala Kawasan Kota Bima									
					Pengawasan Pembangunan NSD Kota Bima									
					Pematangan Lahan NSD									
1	03	1.03.01	29	06	Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Persentase luas permukiman kumuh	5,00%	Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	20 Ha			50.000.000	52.500.000	
					DED Skala Kawasan KOTAKU 2018									
<b>1</b>	<b>03</b>	<b>1.03.01</b>	<b>30</b>		<b>PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase luas permukiman kumuh</b>	<b>5,00%</b>		<b>10.306.425.000</b>	<b>10.821.746.250</b>	
1	03	1.03.01	30	01	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan				Laporan hasil verifikasi Dokumen Perencanaan BG	1 Laporan	87.300.000	91.665.000		
					Pembangunan Jalan Lingkungan wilayah barat (Paket I)									
					Pembangunan Jalan Lingkungan wilayah timur (Paket II)									
					Peningkatan Jalan RT.29 RW.06 Lingkungan Tambana Kel. Jatiwangi									
					Pembukaan Jalan Baru Lanjutan (Jalan Kuburan) Lingkungan Tolotonga									
					Rabat Gang Kelurahan Rite									
					Pembangunan Jembatan Penghubung RT 13 dan RT 16 Jatibaru									
					Pembangunan Jembatan Penghubung RT 26 dan RT 27 Lingkungan Sonogela									
					Peningkatan Jalan Kelurahan Matakando									
					Talud Jalan Lingkungan Kel. Kolo									
					Pembangunan Jembatan Gantung Busu Nitoba									
					Rabat gang salama menuju jatiwangi									
					Pembukaan jalan lingkungan kel. rabadompou barat									
					Pembukaan jalan di lingkungan bonto (belakang kampung bonto) kel. kolo									
					Lanjutan rabat gang RT.09 RW.04 kel. jatiwangi									
					Timbunan jalan di lingkungan RT.28 depan rumah sakit									
					Pengaspalan jalan lingkungan bonto									
					Rabat gang RT.11 RW.07 kel. kolo									
					Rabat gang lingkungan bonto kel. kolo									
					Pembukaan jalan lingkungan tolotonga - nggaro te kel. jatiwangi									
					Pembuatan dan rehab saluran drainase/rabat gang waki RT.02 Kel. Mangemaci									
					Rabat gang lingkungan jenamawa ni'u kel. dara									
					Pembangunan jembtan lingkungan ni'u kel. dara									
					Rabat gang kel. santi									
					Rabat gang kel. taniung									
					Peningkatan jalan lingkungan kel. dodu									
					Pembukaan jalan sadia RT.01 RW.01 kel. sadia									
					Pembukaan jalan lingkungan so lanco gaja lanjutan									
					Rabat gang lingkungan tolotando kel. matakando									
					Rabat gang lingkungan tambana kel. jatiwangi									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pembukaan jalan lingkungan kel. mangnemaci													
	Lanjutan penataan gang RT.09 kel. rontu													
	Pengaspalan jalan lingkungan RT.16 RW.07 Kel. Rabadompu Timur													
	Rabad Gang Kelurahan Pangqi													
	Peningkatan jalan lingkungan rasa nggaro kel. rabangodu selatan													
	Peningkatan jalan lingkungan Kel. rabadompu barat													
	Peningkatan jalan lingkungan di kel. Kolo													
	Peningkatan Jalan RT 17 RW 01 Kel Kolo													
	Pembukaan jalan lingkungan rontu kel. Rontu													
	Pembukaan jalan so ndano rangga - so bata kel. matakando													
	Pembukaan jalan baru di Kel. sambinae													
	Pembukaan jalan baru di kel. kendo													
	Lanjuta pembukaan jalan so oi lubu kel. dodu													
	Pembukaan jalan baru di kel. dodu													
	Lanjutan pembukaan jalan busu - ndano nae													
	Pembukaan jalan so mada oi u'a ni'u kel. dara													
	Pembukaan jalan so kedo kel. iatiwangi													
	Pembukaan jalan so sori baru - so dana nae kel. lelamase													
	Pembukaan jalan so doro monggo - so doro ibu kel. lelamase													
	Pembukaan jalan so rida rombo - so amanusi kel. lelamase													
	Pembukaan jalan so batawawi kel. matakando													
	pembukaan jalan so ndano dungga kel. matakando													
	Pembukaan jalan so jambu tebe kel. matakando													
	Pembukaan jalan so talaka kel. rontu													
	Pembukaan jalan rontu - cekdam oi si'i													
	Pembukaan jalan lingkungan Kel. jati baru													
	Pembukaan jalan lingkungan Kel. Jatiwangi													
	Rabat Gang RT.1 s.d RT.09 Lingkungan Kel. Kolo													
	Pembukaan Gang Tembus Penatoi RT.08 RW.02													
	Peningkatan Jalan RT 16 RW 01 Kel Kolo													
	Pengaspalan Jalan Al- Muhajirin BTN Pangqi Kel. Pangqi													
	Pembangunan Jalan Kelurahan Sambinae													
1 03	1.03.01	30	02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan			Panjang Jalan Lingkungan yang ditangani	65 km		10.219.125.000	10.730.081.250			
1 08	1.08.01	28		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PENERANGAN JALAN UMUM</b>	<b>Infrastruktur dan Konektifitas Wilayah</b>	<b>Terciptanya Kota Bima yang indah dan terang</b>	<b>Terwujudnya penataan penerangan jalan taman dan hutan</b>	1 keg		<b>4.490.997.000</b>	<b>4.715.546.850</b>	Program Sedang Berjalan	<b>DKPP</b>	
1 08	1.08.01	28	01	Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum		<b>Kota Bima</b>			Tercapainya rencana SJPJ yang berkesinambungan dan peningkatan kualitas penerangan jalan, taman dan hutan kota	4.490.997.000	4.715.546.850			
				Pengadaan Lampu Jalan Gatot Soebroto										
				Pengadaan Lampu Jalan Kota Bima Tersebar										
				Lampu Dekorasi HUT Kota										



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Lampu Dekorasi HUT RI Pengadaan dan Pemasangan Tiang lampu Tinggi (highmast) dg lampu HPIT 1000 watt													
	Lampu Jalan Kel. Melayu													
<b>1 05</b>	<b>1.05.01</b>	<b>15</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Luas Wilayah Yang Memiliki Rencana Rinci Tata Ruang</b>	<b>100%</b>				<b>947.406.500</b>	<b>994.776.825</b>	
1 05	1.05.01	15	02	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL Raperda RDTR			Jumlah Ranperda RDTRK Kec. yang diperdakan	2 Dokumen			391.690.000	411.274.500		
1 05	1.05.01	15	07	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan			Perwali Tentang RTBL Kawasan Strategis Cepat Tumbuh	1 Dokumen			394.593.900	414.323.595		
1 05	1.05.01	15	12	Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang			Jumlah Aparatur Pemerintah yang Memiliki kualifikasi Keahlian Tata Ruang	40 Orang			86.036.000	90.337.800		
1 05	1.05.01	15	13	Survey dan pemetaan			Laporan Hasil Survey dan Pemetaan	1 Dokumen			75.086.600	78.840.930		
<b>1 05</b>	<b>1.05.01</b>	<b>16</b>	<b>PROGRAM PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Prosentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTR</b>	<b>100%</b>				<b>333.017.000</b>	<b>349.667.850</b>	
1 05	1.05.01	16	07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang			Jumlah Kelurahan yang dilakukan sosialisasi	5 Kelurahan			301.278.000	316.341.900		
1 05	1.05.01	16	09	Belanja Modal Papan Larangan Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang			Laporan Hasil Monev	1 Dokumen			31.739.000	33.325.950		
<b>1 05</b>	<b>1.05.01</b>	<b>17</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Prosentase Area Terbangun yang tertata</b>	<b>93,03%</b>				<b>156.700.000</b>	<b>164.535.000</b>	
1 05	1.05.01	17	11	Penerbitan Sertifikasi IMB Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)			Jumlah IMB yang diterbitkan	200 IMB			58.100.000	61.005.000		
				Penyusunan Data Base SIMB Kecamatan Rasanae Barat										
				Penyusunan Data Base SIMB Kecamatan Mounda										
1 05	1.05.01	17	12	Penerbitan Sertifikat SLF (Sertifikat Layak Fungsi)			Jumlah SLF yang diterbitkan	200 SLF			49.300.000	51.765.000		
1 05	1.05.01	17	13	Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas TABG	1 dokumen			49.300.000	51.765.000		
<b>1 04</b>	<b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										<b>10.426.804.100</b>	<b>11.339.021.715</b>		
<b>1 04</b>	<b>1.04.01</b>		<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>								<b>10.426.804.100</b>	<b>11.339.021.715</b>		
<b>1 4</b>	<b>1.05.01</b>	<b>01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor yang memadai</b>	<b>13 Pelayanan</b>			<b>678.668.000</b>	<b>712.601.400</b>		
1 04	1.04.01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tersedianya jasa surat menyurat yg cukup	1 Pelayanan			39.000.000	40.950.000		
1 04	1.04.01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik			Tersedianya sarana komunikasi sumber daya air dan listrik yg cukup	1 Pelayanan			50.580.000	53.109.000		
1 04	1.04.01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional			Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan dinas	1 Pelayanan			35.000.000	36.750.000		
1 04	1.04.01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Tersedianya SDM Administrasi keuangan perkantoran	1 Pelayanan			92.400.000	97.020.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 04 1.04.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Tersedianya Jasa kebersihan kantor	1 Pelayanan		39.000.000	40.950.000			
1 04 1.04.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Tersedianya alat tulis kantor yg cukup	1 Pelayanan		46.618.500	48.949.425			
1 04 1.04.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Tersedianya barang Cetak dan Penggandaan yg cukup	1 Pelayanan		34.550.000	36.277.500			
1 04 1.04.01 01 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor						Tersedianya peralatan kantor yang cukup	1 Pelayanan		48.519.500	50.945.475			
1 04 1.04.01 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman						Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman kantor yang cukup	1 Pelayanan		18.000.000	18.900.000			
1 04 1.04.01 01 18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah						Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Pelayanan		255.000.000	267.750.000			
1 04 1.04.01 01 19	Rapat Koordinsi dan Konsultasi dalam Daerah						Tersedianya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Pelayanan		20.000.000	21.000.000			
1 04 1.04.01 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>Terpeliharanya sarana dana prasarana operasional Kantor</b>	<b>2 Unit</b>				<b>78.600.000</b>	<b>82.530.000</b>			
1 04 1.04.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Terawatnya seluruh kendaraan dinas/operasional	10 unit		71.600.000	75.180.000			
1 04 1.04.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Terawatnya seluruh perlengkapan gedung kantor			7.000.000	7.350.000			
1 04 1.04.01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>Terciptanya kedisiplinan aparatur</b>	<b>52 Org</b>				<b>18.630.000</b>	<b>19.561.500</b>			
1 04 1.04.01 03 02	Pengadaan pakaian Dinas beserta Perlengkapannya						Terpenuhinya keseragaman pakaian Dinas aparatur	35 org		18.630.000	19.561.500			
1 04 1.04.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>Persentase SKPD dengan indeks SAKIP Baik</b>	<b>75%</b>				<b>124.102.000</b>	<b>130.307.100</b>			
1 04 1.04.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Dok		22.685.000	23.819.250			
1 04 1.04.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Tersusunnya Lap. Keuangan semesteran	1 Dok		23.112.000	24.267.600			
1 04 1.04.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Tersusunnya Lap. Keuangan Akhir tahun	1 Dok		20.572.000	21.600.600			
1 04 1.04.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Tersusunnya Laporan Program Kegiatan tahunan	4 Dok		34.272.000	35.985.600			
1 04 1.04.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Tersusunnya Lap. Laki, LPJ dan LPPD	1 Dok		23.461.000	24.634.050			
1 04 1.04.01 15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>		<b>Persentase luas permukiman kumuh</b>	<b>5,00%</b>				<b>9.190.672.000</b>	<b>9.650.205.600</b>			
1 04 1.04.01 15 09	Pendampingan Bantuan Rumah Swadaya						Jumlah RTLH yang ditangani	100 Unit		256.690.000	269.524.500			
1 04 1.04.01 15 11	Pendataan perumahan									50.000.000	52.500.000			
1 04 1.04.01 15 12	Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK)						Jumlah RTLH yang ditangani	300 Unit		8.533.982.000	8.960.681.100			
1 04 1.04.01 15 13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rusunawa									350.000.000	367.500.000			
1 04 1.04.01 16	<b>PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN</b>	<b>Pembangunan Perumahan dan Permukiman</b>	<b>Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik</b>		<b>Persentase luas permukiman kumuh</b>	<b>5,00%</b>				<b>50.000.000</b>	<b>52.500.000</b>			
1 04 1.04.01 16 03	Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Rumah Sederhana Sehat									50.000.000	52.500.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1 04	1.04.01	17	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Persentase luas permukiman kumuh	5,00%				100.000.000	495.877.410		
1 04	1.04.01	17	10	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan (Pokja)								100.000.000	105.000.000		
1 04	1.04.01	21	Program Perencanaan Permukiman Kumuh									186.132.100	195.438.705		
1 04	1.04.01	21	01	Rencana teknis kawasan permukiman kumuh								186.132.100	195.438.705		
1 05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										8.778.228.700	9.217.140.135			
1 05	1.05.01		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									5.800.000.000	6.090.000.000	0	
1 05	1.05.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				2.634.352.000	2.634.352.000		
1 05	1.05.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat			Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	150 lembar				7.200.000	7.560.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 Bulan				7.200.000	7.560.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	15 unit				58.500.000	61.425.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	4 orang				42.992.000	45.141.600	Lama	
1 05	1.05.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Cakupan ruang kantor yang bersih	100%				12.000.000	12.600.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan				24.500.000	25.725.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	60.000 Lbr				25.000.000	26.250.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah kerjasama dengan media	6 media				16.000.000	16.800.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor			Jumlah bahan logistik kantor	12 Bulan				12.000.000	12.600.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 Bulan				1.750.000.000	1.837.500.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan				180.000.000	189.000.000	Lama	
1 05	1.05.01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah			Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan				498.960.000	523.908.000	Lama	
1 05	1.05.01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana	100%				578.850.000	607.792.500		
1 05	1.05.01	02	03	Pembangunan gedung kantor			Jumlah gedung kantor yang dibangun baru (barak pengamanan)	1 unit				150.000.000	157.500.000	Lama	
1 05	1.05.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Jumlah pengadaan perlengkapan gedung	1 paket				116.000.000	121.800.000	Lama	
1 05	1.05.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah pengadaan peralatan gedung	1 paket				100.000.000	105.000.000	Lama	
1 05	1.05.01	02	10	Pengadaan mebeleur			Jumlah Pengadaan mebeleur	1 paket				35.000.000	36.750.000	Lama	
1 05	1.05.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	15 unit				170.850.000	179.392.500	Lama	
1 05	1.05.01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Persentase Pemeliharaan peralatan kantor yang berfungsi baik	100%				7.000.000	7.350.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN			PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
							Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 05 1.05.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik	Kota Bima	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	100%				175.000.000	183.750.000			
1 05 1.05.01 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan								Jumlah pakaian kerja lapangan	1 Paket		175.000.000	183.750.000	Baru		
1 05 1.05.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik	Kota Bima	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan	30%				59.351.000	62.318.550,00			
1 05 1.05.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal								Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	5 org		32.000.000	33.600.000	Lama		
1 05 1.05.01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan								Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	1 kali		27.351.000	28.718.550,00	Lama		
1 05 1.05.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%				87.500.000	91.875.000			
1 05 1.05.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD								Jumlah Dokumen yang harus disediakan	2 Dok		7.500.000	7.875.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran								Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 dok		20.000.000	21.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun								Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dok		10.000.000	10.500.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah								Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 dok		30.000.000	31.500.000	Lama		
1 05 1.05.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD								Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 dok		20.000.000	21.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN			Ketertiban dan kamanan	Terpeliharanya keamanan dan	Kota Bima	Angka kriminalitas yang tertangani	100%				1.002.670.000	1.052.803.500			
1 05 1.05.01 15 05	Pengendalian keamanan lingkungan								Jumlah Penanganan Pelanggaran Ketertiban	0 Kasus		966.670.000	1.015.003.500	Lama		
1 05 1.05.01 15 06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan								Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 kali		12.000.000	12.600.000	Lama		
1 05 1.05.01 15 07	Penindakan dan Pemberkas Pelanggar Peraturan Daerah								Jumlah Berkas Penindakan dan Pemberkas Pelanggar Perda	6 berkas		12.000.000	12.600.000	Baru		
1 05 1.05.01 15 08	Rapat Teknis PPNSD								Jumlah Rekomendasi Penindakan pelanggaran	3 kali		12.000.000	12.600.000	Baru		
1 05 1.05.01 16	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL			Ketertiban dan kamanan	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Kota Bima	Angka kriminalitas yang tertangani	100%				368.158.000	386.565.900			
1 05 1.05.01 16 03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan								Jumlah Kegiatan Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	10 Kali		192.545.000	202.172.250,00	Lama		
1 05 1.05.01 16 06	Gelar pasukan dalam rangka pemeliharaan krantibum dan hari-hari besar								jumlah kegiatan Gelar Pasukan dalam Rangka Pemeliharaan Tramtibum dan Hari-hari Besar	6 Kali		155.613.000	163.393.650,00	Lama		
1 05 1.05.01 16 07	Peningkatan Kerjasama dengan aparat penegak hukum dan keamanan dalam teknik pencegahan pelanggaran Perda/Perkada dan kejahatan konvensional								Jumlah MOU Kegiatan dengan aparat penegak hukum dan keamanan dalam teknik pencegahan pelanggaran Perda/Perkada dan kejahatan konvensional	2 Mou		20.000.000	21.000.000	Baru		
1 05 1.05.01 20	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)			Ketertiban dan kamanan	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Kota Bima	Persentase Anggota Satuan Linmas yang kompeten					69.539.000	73.015.950,00			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 05 1.05.01 20 01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba									Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	1 Kali		30.000.000	31.500.000	Baru		
1 05 1.05.01 20 02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi									Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	2 Kali		20.000.000	21.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 20 09	Pemetaan Kawasan Rawan Penyakit Sosial									Dokumen Pemetaan Kawasan Rawan Penyakit Sosial	1 dok		19.539.000	20.515.950,00	BARU		
1 05 1.05.01 22	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA</b>					Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran		Persentase Anggota Pemadam Kebakaran yang Kompeten	100%				50.000.000	52.500.000			
1 05 1.05.01 22 01	Pelatihan anggota linmas dalam penanggulangan bencana									Jumlah anggota satuan linmas dalam penanggulangan bencana	50 orang		50.000.000	52.500.000	Lama		
1 05 1.05.01 52	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN</b>					Meningkatnya pelayanan publik di bidang penanggulangan bencana kebakaran		Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota	100%				774.580.000	813.309.000			
1 05 1.05.01 52 01	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran									Jumlah Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1 Tahun		654.580.000	687.309.000	Lama		
1 05 1.05.01 52 02	Bimtek peningkatan disiplin PMK									Jumlah SDM yang dilatih	1 Kali		100.000.000	105.000.000	Lama		
1 05 1.05.01 52 03	Pemetaan Wilayah Rawan Bahaya Kebakaran									Dokumen Pemetaan Kawasan Rawan Penyakit Sosial	1 dok		20.000.000	21.000.000	Baru		
1 05 1.05.02	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>												2.288.176.700	2.402.585.535	#REF!		
1 05 1.05.02 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				548.000.000	575.400.000			
1 05 1.05.02 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat									Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	150 lembar		22.000.000	23.100.000	Lama		
										Materei yang tersedia selama 1 tahun	1000 lembar						
										Jasa pengiriman/paket	20 paket						
1 05 1.05.02 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan		23.000.000	24.150.000	Lama		
1 05 1.05.02 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	10 unit		28.000.000	29.400.000	Lama		
										STNK Roda 4 yang diperpanjang	1 unit						
										STNK Roda 2 yang diperpanjang	9 unit						
										Jasa servis Kendaraan 2	9 unit						
1 05 1.05.02 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan									Persentase terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	100%		45.000.000	47.250.000	Lama		
1 05 1.05.02 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor									Cakupan ruang kantor yang bersih	100%		10.000.000	10.500.000	Lama		
1 05 1.05.02 01 10	Penyediaan alat tulis kantor									Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	34 Jenis		25.000.000	26.250.000	Lama		
1 05 1.05.02 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	30.017 lembar		25.000.000	26.250.000	Lama		
1 05 1.05.02 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									Persentase terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	100%		5.000.000	5.250.000	Lama		
1 05 1.05.02 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	13 buah		90.000.000	94.500.000	Lama		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 05 1.05.02 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah kerjasama dengan media	5 media			25.000.000	26.250.000	Lama	
1 05 1.05.02 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah Kegiatan makan minum rapat	100 orang			15.000.000	15.750.000	Lama	
							Makanan dan minuman harian pegawai	30 orang						
							Makanan dan minuman tamu	30 orang						
1 05 1.05.02 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	30 kali			215.000.000	225.750.000	Lama	
1 05 1.05.02 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 kali			20.000.000	21.000.000	Lama	
<b>1 05 1.05.02 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana</b>	<b>100%</b>					<b>55.000.000</b>	<b>57.750.000</b>		
1 05 1.05.02 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional\						Jumlah kendaraan dinas baru	1 unit			-	#REF!		
1 05 1.05.02 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Persentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang memadai	100%			35.000.000	36.750.000	Lama	
1 05 1.05.02 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor						Persentase terpeliharanya peralatan kantor yang memadai	100%			20.000.000	21.000.000	Lama	
<b>1 05 1.05.02 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin</b>	<b>0%</b>					<b>30.900.000</b>	<b>32.445.000</b>		
1 05 1.05.02 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						Jumlah Pakaian Dinas	31 Stel			17.000.000	17.850.000	Lama	
1 05 1.05.02 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	31 Stel			13.900.000	14.595.000	Lama	
<b>1 05 1.05.02 06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>					<b>132.570.000</b>	<b>139.198.500</b>		
1 05 1.05.02 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen			24.570.000	25.798.500	Lama	
1 05 1.05.02 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen			28.000.000	29.400.000	Lama	
1 05 1.05.02 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen			20.000.000	21.000.000	Lama	
1 05 1.05.02 06 05	Penyusunan Renstra, Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen			40.000.000	42.000.000	Lama	
1 05 1.05.02 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	2 Dokumen			20.000.000	21.000.000	Lama	
<b>1 05 1.05.02 17</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN</b>	<b>Ketertiban dan kemandirian</b>	<b>Meningkatnya kerukunan hidup beragama</b>	Kota Bima	<b>presentase masyarakat dan aparatur yang memperoleh</b>	<b>70%</b>					<b>254.480.000</b>	<b>267.204.000</b>		
1 05 1.05.02 17 01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama						Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	2 dokumen			53.000.000	55.650.000	Lama	
1 05 1.05.02 17 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa						Jumlah Siswa SLTA/MAN/SMK dan Tenaga Pendidik /Guru yang telah Mengikuti TOT untuk empat Konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara	100 orang			150.000.000	157.500.000	Lama	
1 05 1.05.02 17 05	Koordinasi Forum Forum antar Etnis						Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Forum antar Etnis	2 dokumen			51.480.000	54.054.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 05 1.05.02 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Kota Bima	Persentase forum msyarakat yang dibina	50%			474.050.000	497.752.500				
1 05 1.05.02 19 02	Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis							Jumlah Laporan Kegiatan KOMINDA	8 dokumen			225.000.000	236.250.000	Lama			
1 05 1.05.02 19 06	Penguatan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)							Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM )	6 dokumen			68.000.000	71.400.000	Lama			
1 05 1.05.02 19 07	Koordinasi tim terpadu penganan konflik sosial							Jumlah laporan Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	3 dokumen			91.050.000	95.602.500	Lama			
1 05 1.05.02 19 08	Operasional Penggalangan/jejaring							Jumlah Operasional penggalangan/ jejaring	8 kali			40.000.000	42.000.000	Baru			
1 05 1.05.02 19 09	Temu Bina pencegahan konflik di kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa							Jumlah pemuda pelajar dan mahasiswa yang mengikuti Temu Bina pencegahan konflik	100 orang			50.000.000	52.500.000	BARU			
1 05 1.05.02 21	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT				Ketertiban dan keamanan	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Kota Bima	Persentase partisipasi masyarakat dalam pileg dan pilkada	100,00%			793.176.700	832.835.535				
1 05 1.05.02 21 01	Penyuluhan kepada masyarakat (LSM)							Jumlah orang yang mengikuti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat	150 orang			100.000.000	105.000.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 02	Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik							Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	12 partai			110.000.000	115.500.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan							Dokumen laporan money keberadaan Ormas /LSM	4 keg			15.000.000	15.750.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 06	Pendataan dan Verifikasi partai Politik yang mendapat bantuan dana Pemerintah Daerah							Jumlah Parpol yang mendapat bantuan dana Pemerintah Daerah	12 parpol			30.000.000	31.500.000	Lama			
1 05 1.05.02 21 07	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum							Bintek/sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum	4 kali			150.000.000	157.500.000	Baru			
05 1.05.02 21	Pemantauan PILKADA (Desk PILKADA)											124.746.200	130.983.510				
	<b>Sekretariat Daerah</b>																
	<b>Bagian AP:</b>																
	Pembentukan Tim Desk PILKADA																
	Belanja Alat tulis Kantor																
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Balibo/Bendera																
	Belanja Pengandaan/Fotocopy																
	Belanja Cetakfoto/Dokumentasi																
	Belanja Makan dan Minum Rapat																
	Belanja Pakaian Seragam Desk PILKADA																
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring Pelaksanaan PILKADA, Evaluasi Pelaksanaan PILKADA)																
05 1.05.02 21	Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah											263.430.500	276.602.025				
	<b>Sekretariat Daerah</b>																
	<b>Bagian AP:</b>																
	Belanja Alat Tulis Kantor																
	Belanja Pengandaan																
	Belanja Penilidan																
	Belanja Makan dan Minum Rapat																
	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WRDH (Walikota terpilih, Wakil Walikota terpilih, Pejabat Walikota)																
	Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota RI dan Luar Propinsi NTB serta Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota Propinsi																
1 05 4.01.11	KECAMATAN ASAKOTA											140.750.000	147.787.500				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 05 4.01.11 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Ketertiban dan kemananan	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Kota Bima	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan						#REF!			
1 05 4.01.11 19 05	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan									Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	6 kel	140.750.000	147.787.500				
1 05 4.01.13	KECAMATAN RABA											172.023.500	180.624.675,00				
1 05 4.01.13 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Ketertiban dan kemananan	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Kota Bima	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan				172.023.500	180.624.675,00				
1 05 4.01.13 19 05	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan									Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	11 kel	172.023.500	180.624.675,00				
4 01 4.01.09	KECAMATAN RASANA E BARAT											90.000.000	94.500.000,00				
4 01 4.01.09 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Ketertiban dan kemananan	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Kota Bima	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan				90.000.000	94.500.000				
4 01 4.01.09 19 05	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan									Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	6 kel	90.000.000	94.500.000				
4 01 4.01.10	KECAMATAN RASANA E TIMUR											133.000.000	139.650.000				
4 01 4.01.10 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Ketertiban dan kemananan	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Kota Bima	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan				133.000.000	139.650.000				
4 01 4.01.10 19 05	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan									Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	8 kel	133.000.000	139.650.000				
4 01 4.01.12	KECAMATAN MPUNDA											154.278.500	161.992.425,00				
4 01 4.01.12 19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN				Ketertiban dan kemananan	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Kota Bima	Rasio Pos Siskamling per jumlah kelurahan				154.278.500	161.992.425,00				
4 01 4.01.12 19 05	Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan									Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan	10 kel	154.278.500	161.992.425,00				
1 06	SOSIAL											2.217.535.000	2.328.411.750				
1 06 1.06.01	DINAS SOSIAL											2.217.535.000	2.328.411.750				
1 06 1.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik	Kota Bima	terwujudnya administrasi perkantoran	100%			544.960.000	572.208.000				
1 06 1.06.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat									Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	3560 surat	27.000.000	28.350.000			Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 rekening	35.000.000	36.750.000			Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	10 unit	30.000.000	31.500.000			Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan									Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	11 orang	62.700.000	65.835.000			Dinas Sosial Kota Bima	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 06 1.06.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	1 gedung			10.000.000	10.500.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah ATK	50 jenis			35.000.000	36.750.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	60000 lembar			15.000.000	15.750.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah perlengkapan kantor	200 buah			5.000.000	5.250.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	3 unit			27.000.000	28.350.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 14	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	3 unit			5.000.000		Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah Kegiatan makan minum rapat	8 media			5.760.000	6.048.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 orang			17.500.000	18.375.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali			200.000.000	210.000.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	36 kali			70.000.000	73.500.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>78.000.000</b>	<b>81.900.000</b>		
1 06 1.06.01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional						Jumlah gedung kantor yang dibangun ba	1 unit			18.000.000	18.900.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Jumlah kendaraan dinas baru	30 kendaraan			10.000.000	10.500.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 02 10	Pengadaan mebeleur						Jumlah mebeleur yang diadakan	5 unit			15.000.000	15.750.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 unit			15.000.000	15.750.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	10 unit			20.000.000	21.000.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>										<b>25.000.000</b>			
1 06 01 03 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya						Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	40 Stel			25.000.000		Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 01 04 06	Pengadaan Pakaian Olahrraga						Jumlah Pengadaan Pakaian Olahrraga	40 Stel						
1 06 1.06.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyajian</b>	<b>100%</b>					<b>113.870.000</b>	<b>119.563.500</b>		
1 06 1.06.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Laporan			16.120.000	16.926.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Laporan			15.000.000	15.750.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan			15.000.000	15.750.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan			20.000.000	21.000.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Laporan			28.750.000	30.187.500	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ke	3 Laporan			19.000.000	19.950.000	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 15	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL</b>	<b>Kesejahteraan sosial</b>	<b>Meningkatnya daya saing</b>		<b>Persentase PMKS yang Terlatih</b>	<b>100%</b>					<b>664.788.000</b>	<b>698.027.400</b>		
1 06 1.06.01 15 01	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial						Jumlah PSM/TKSK yang diberdayakan	10 orang			28.944.000	30.391.200	Dinas Sosial Kota Bima	
1 06 1.06.01 15 02	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin						Jumlah Keluarga Miskin yang terlatih	20 orang			173.799.000	182.488.950	Dinas Sosial Kota Bima	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					Tolok Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 06 1.06.01 15 07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Laporan Monev	20 kelompok		10.000.000	10.500.000	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 15 08	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)						Jumlah PMKS seluruhnya	1 kegiatan		40.722.000	42.758.100	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 15 09	Penyuluhan sosial						Jumlah Penyuluhan Sosial yang terlaksana	1 kegiatan		19.885.000	20.879.250	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 15 10	Sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT)						Basis data Fakir miskin	1 kegiatan		350.000.000	367.500.000	Dinas Sosial Kota Bima		
	Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan KuBE Jasa						Jumlah program BPNT sesuai aturan berlaku	60 orang		41.438.000	43.509.900	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 16	<b>PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	Kesejahteraan sosial	Meningkatnya daya saing	Kota Bima	persentase penduduk miskin	8,24%				555.121.000	582.877.050			
1 06 1.06.01 16 04	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal						Jumlah anak terlantar yang terlatih	21 orang		21.990.000	23.089.500	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 16 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS						Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, sarana kesejahteraan sosial	0		-	-	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 16 10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa						Jumlah obyek yang tertangani masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	100 orang		168.934.000	177.380.700	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 16 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Laporan Monev	20 kelompok		10.000.000	10.500.000	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 16 12	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)						Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan	2005 orang		263.000.000	276.150.000	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 16 13	Pendampingan kegiatan keserasian sosial						Jumlah masyarakat rawan konflik sosial yang tertangani	3 kelompok		24.881.000	26.125.050	Dinas Sosial Kota Bima		
	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah						Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah yang dilayani	15 orang		37.200.000		Dinas Sosial Kota Bima		
	Perlindungan terhadap Korban tindak kekerasan pekerja migran (KTKPM)						Jumlah Perlindungan terhadap Korban tindak kekerasan pekerja migran (KTKPM)	14 orang		29.116.000	30.571.800	Dinas Sosial Kota Bima		
	<b>PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANAK MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK (LKSA)</b>						<b>Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar (AT), Yatim Piatu, Fakir Miskin</b>			20.000.000	21.000.000			
	PENINGKATAN KUALITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANAK MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK (LKSA)						Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar (AT), Yatim Piatu, Fakir Miskin	20 LKSA (900 Orang Anak)		15.000.000		Dinas Sosial Kota Bima		
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan						Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anak terlantar (AT), Yatim Piatu, Fakir Miskin	20 LKSA (900 Orang Anak)		5.000.000		Dinas Sosial Kota Bima		
	<b>PROGRAM PENGALANGAN DANA BANSOS</b>									27.716.000				
	Pengumpulan dan pengelolaan dana Bansos						Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan PMKS	2 kegiatan		27.716.000		Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 18	<b>PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA</b>	Kesejahteraan sosial	Meningkatnya daya saing	Kota Bima	Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani	100%				37.165.000	39.023.250			
1 06 01 18 04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma						Jumlah para penyandang cacat dan eks trauma yg tertangani	10 orang		27.165.000	28.523.250	Dinas Sosial Kota Bima		
06	Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma						Jumlah pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	10 orang			-	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 01 18 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Laporan monev	1 dokumen		10.000.000	10.500.000	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 20	<b>PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)</b>	Kesejahteraan sosial	Meningkatnya daya saing	Kota Bima	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	100%				36.000.000	37.800.000			
1 06 1.06.01 20 04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial						Jumlah Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	30 orang		36.000.000	37.800.000	Dinas Sosial Kota Bima		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 06 1.06.01 21	Kegiatan pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial						Jumlah pendidikan dan pelatihan berusaha bagi eks penyandang	30 orang				Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 21	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL</b>	<b>Kesejahteraan sosial</b>	<b>Meningkatnya daya saing</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial</b>	<b>100 %</b>								
1 06 1.06.01 21 03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat						Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	38 orang		21.779.000	22.967.950	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 21 05	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial						Jumlah elemen Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	10 unit		59.111.000	62.066.550	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 21 06	Pendampingan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)						Jumlah penduduk miskin yang menerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni	0		-	-	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 21 07	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)						Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	5 unit		34.025.000	35.726.250	Dinas Sosial Kota Bima		
1 06 1.06.01 21 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Laporan monev	1 dokumen		-	-	Dinas Sosial Kota Bima		
2	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>									<b>58.953.941.528</b>	<b>61.901.638.604</b>			
2 01	<b>TENAGA KERJA</b>									<b>1.803.400.000</b>	<b>1.893.570.000</b>			
2 01 2.01.01	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>									<b>1.803.400.000</b>	<b>1.893.570.000</b>			
2 01 2.01.01 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase Capaian kelolah Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>				<b>786.400.000</b>	<b>825.720.000</b>			
2 01 2.01.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	12 Bulan		21.400.000	22.470.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik'	12 Bulan		25.000.000	26.250.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 03	Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan		-	-	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	12 Bulan		25.000.000	26.250.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan		70.000.000	73.500.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	12 Bulan		31.000.000	32.550.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah ATK	12 Bulan		54.000.000	56.700.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	12 Bulan		40.000.000	42.000.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan		0	-	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah perlengkapan kantor	12 Bulan		270.000.000	283.500.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah kerjasama dengan media	12 Bulan		20.000.000	21.000.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 Bulan		30.000.000	31.500.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan		200.000.000	210.000.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
2 01 2.01.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan		-	-	Dinas Tenaga kerja Kota Bima		
										-	-			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 01 2.01.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	100%					180.000.000	189.000.000		
2 01 2.01.01 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional						Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang di adakan	2 Unit			37.000.000	38.850.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah gedung dinas yang terpelihara	1 Unit			32.000.000	33.600.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 Unit			25.000.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Jumlah perlengkapan kantor yang di pelihara	6 Unit			6.000.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor						persentase luas gedung kantor yang dire	1 Unit			80.000.000	84.000.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
1 01 1.01.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatnya disiplin aparatur		Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	100%								
1 01 1.01.01 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan						Jumlah seragam pakaian dinas kantor	35 pegawai			-	-	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%					175.000.000	183.750.000		
2 01 2.01.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Laporan			36.000.000	37.800.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Laporan			18.000.000	18.900.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	1 Laporan			18.000.000	18.900.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan			18.000.000	18.900.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Laporan			45.000.000	47.250.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPI dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Laporan			40.000.000	42.000.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kesejahteraan sosial	Meningkatnya daya saing	Kota Bima	Pencari kerja yang ditempatkan	7,00%					237.000.000	248.850.000		
2 01 2.01.01 15 01	Penyusunan data base tenaga kerja daerah						Jumlah dokumen data base tenaga kerja daerah	1 Dokumen			25.000.000	26.250.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 15 03	Penyusunan Prda Ketewnakerjaan						Jumlah dokumen Prda Ketenagakerjaan	1 Dokumen			50.000.000	52.500.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 15 05	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja						Jumlah Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja	1 Paket			-		Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 15 06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja						Jumlah dan jenis pelatihan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja oleh Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	80 orang			162.000.000	170.100.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan	Kota Bima	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	2500 orang					176.000.000	184.800.000		
2 01 2.01.01 16 01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja						Informasi bursa tenaga kerja	600 Org			20.000.000	21.000.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 16 02	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja						Jumlah sosialisasi penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	100 Org			35.000.000	36.750.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 16 08	<i>Padat Karya Produktif</i>						Jumlah tenaga kerja yang terlatih	88 Tenag Kerja			100.000.000	105.000.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
2 01 2.01.01 16 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Jumlah PPTKIS yang dimonitoring	3 Kali			21.000.000	22.050.000	Dinas Tenaga kerja Kota Bima	
											-	-		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 01 2.01.01 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dengan kemampuan kreatifitas dan inovasi yang berdaya saing	Kota Bima	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	200 orang					249.000.000	261.450.000		
2 01 2.01.01 17 02	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial						Jumlah perselisihan hubungan industrial yang dimediasi	60 Perusahaan			32.000.000	33.600.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima
2 01 2.01.01 17 03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan						Jumlah penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang	15 Kasus			33.000.000	34.650.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima
2 01 2.01.01 17 04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan						Laporan kegiatan sosialisasi	1 Laporan			47.000.000	49.350.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima
2 01 2.01.01 17 05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja						Jumlah pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	231 Perusahaan			67.000.000	70.350.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima
2 01 2.01.01 17 06	penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja						Jumlah standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja	1 Dokumen			35.000.000	36.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima
2 01 2.01.01 17 07	Peringatan Hari Hari Besar di Bidang Ketenaga Kerjaan						Jumlah Peringatan Hari Hari Besar di Bidang Ketenaga Kerjaan	1 Keg			35.000.000	36.750.000		Dinas Tenaga kerja Kota Bima
2 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										1.900.000.000	1.807.211.175		
2 02 2.02.1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						Rp	1.900.000.000			1.900.000.000	1.807.211.175		
2 02 2.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase tersedianya Pelayanan	100%					685.228.000	719.489.400	Lama	
2 02 2.02.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat keluar	12 bulan			30.780.000	32.319.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 bulan			24.500.000	25.725.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 bulan			35.000.000	36.750.000	Lama	
2 02 2.02.01 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan						Jumlah pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	12 bulan			40.000.000	42.000.000	Lama	
2 02 2.02.01 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor						Jumlah terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman	12 bulan			50.000.000	52.500.000	Lama	
2 02 2.02.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan			40.000.000	42.000.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan						Jumlah cetakan dan penggandaan	12 bulan			35.000.000	36.750.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	12 bulan			20.000.000	21.000.000	Lama	
2 02 2.02.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Adanya peralatan dan perlengkapan kantor televisi	2 unit			59.198.000	62.157.900	Lama	
2 02 2.02.01 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturn Perundang Undangan						Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	12 bulan			15.000.000	15.750.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bulan			35.000.000	36.750.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 bulan			250.750.000	263.287.500	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 bulan			50.000.000	52.500.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					230.000.000	241.500.000	Lama	
2 02 2.02.01 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor						Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit			100.000.000	105.000.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 02 2.02.01 02 10	Pengadaan mebeleur						Jumlah mebeleur	22 unit			50.000.000	52.500.000	Lama	Kota Bima
02 2.02.01 02 22	Pemeliharaan berkala gedung kantor						Adanya kegiatan pengecatan dan perbaikan	1 paket			10.000.000	10.500.000	Lama	
2 02 2.02.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah terpeliharanya kendaraan dinas/operasional yang memadai	12 bulan			40.000.000	42.000.000	Lama	Kota Bima
02 2.02.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor						Tersedianya peralatan kantor yang memadai	2 paket			10.000.000	10.500.000	Lama	
2 02 2.02.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	12 bulan			20.000.000	21.000.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Porsentase Capaian Peningkatan Disiplin aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>12.935.000</b>	<b>24.606.750</b>	<b>Lama</b>	
2 02 2.02.01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					31 Orang	Tersedianya pengadaan pakaian adat daerah	31 Orang			12.935.000	13.581.750	Baru	Kota Bima
02 2.02.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olahraga						Adanya pengadaan pakaian olahraga	31 Orang			10.500.000	11.025.000	Baru	
2 02 2.02.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase tersedianya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>					<b>158.400.000</b>	<b>126.000.000</b>	<b>Lama</b>	
2 02 2.02.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang tersusun	3 dokumen			10.000.000	10.500.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	2 dokumen			20.000.000	21.000.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	1 dokumen			10.000.000	10.500.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	5 dokumen			50.000.000	52.500.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen LPJ dan LPPD SKPD (Revisi RENJA dan RENSTRA) yang tersusun	3 dokumen			30.000.000	31.500.000	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 06 07	Penyusunan laporan keuangan per triwulan						Terlaksananya penyusunan laporan keuangan per triwulan				19.200.000	20.160.000		
2 02 2.02.01 06 08	Penyusunan Laporan gaji, berkala, impasing dan KP4						Terlaksananya penyusunan Laporan gaji, berkala, impasing dan KP4				19.200.000	20.160.000		
2 02 2.02.01 15	<b>PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN</b>		<b>Meningkatnya derajat kesehatan</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di</b>	<b>100%</b>					<b>115.000.000</b>	<b>120.750.000</b>	<b>Lama</b>	
2 02 2.02.01 15 03	Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak						Jumlah sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	1 kegiatan 40 orang			20.000.000	21.000.000	Lama	
2 02 2.02.01 15 05	Penyusunan dan penertiban produk hukum daerah dibidang perlindungan perempuan dan anak						Jumlah produk hukum daerah dibidang perlindungan perempuan dan anak	1 perda			95.000.000	99.750.000	Baru	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 02 2.02.01 16	PROGRAM Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Meningkatnya derajat kesehatan	Kota Bima	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu laksanakan KTPA dan PPT/PKT di RS	100%					385.437.000	288.215.025	Lama	
2 02 2.02.01 16 01	Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan						Jumlah kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan	1 keg 40 orang			50.000.000	52.500.000		Kota Bima
2 02 2.02.01 16 02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)						Jumlah Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	1 keg 50 orang			47.650.500	50.033.025	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 16 06	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak						Jumlah kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	1 keg 40 orang			35.000.000	36.750.000	Lama	
2 02 2.02.01 16 07	Evaluasi pelaksanaan PUG						Jumlah kegiatan Evaluasi pelaksanaan PUG	4 kali			26.195.000	27.504.750	Lama	Kota Bima
2 02 2.02.01 16 08	Pengembangan sistem informasi gender dan anak						Jumlah kegiatan Pengembangan sistem informasi gender dan anak	1 keg			25.645.000	26.927.250	Lama	
2 02 2.02.01 16 10	Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)						Jumlah dokumen Pengembangan Kota sebagai Kota Layak Anak (KLA)	5 Kegiatan			90.000.000	94.500.000	Lama	
02 2.02.01 16 11	Pengembangan sistem informasi Pendataan Kelompok Anak di Luar Sekolah						Adanya data dan informasi Kelompok anak di luar sekolah	1 keg			25.375.000	26.643.750	Baru	
02 2.02.01 16 12	Penguatan kelompok Forum Anak dan Remaja						Meningkatnya Penguatan Kelompok Anak dan Remaja	1 keg			21.811.000	22.901.550	Baru	
02 2.02.01 16 13	Pemetaan Anak Bermasalah dan Potensi Partisipasi Anak						Adanya Profil Perlindungan Anak Kota Bima	1 dokumen			63.760.500	66.948.525	Baru	
2 02 2.02.01 17	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya derajat kesehatan	Kota Bima	Rasio KDRT	0,55%					203.000.000	213.150.000	Lama	
2 02 2.02.01 17 01	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah						Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dan anak di daerah	1 keg			30.000.000	31.500.000	Lama	
2 02 2.02.01 17 02	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT						Jumlah Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	1 keg 25 orang			25.000.000	26.250.000	Lama	
2 02 2.02.01 17 03	penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan						Jumlah dokumen sistem perlindungan bagi perempuan	1 dok			25.000.000	26.250.000	Lama	
2 02 2.02.01 17 06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT						Jumlah peserta Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	25 orang			38.000.000	39.900.000	Lama	
2 02 2.02.01 17 08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan						Jumlah kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	1 keg			25.000.000	26.250.000	Lama	
2 02 2.02.01 17 10	Pembinaan dan lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI)						Jumlah kegiatan Pembinaan dan lomba Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RSSI)	1 keg			60.000.000	63.000.000	Lama	
2 02 2.02.01 18	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kota Bima	Cakupan Pembinaan Terhadap Organisasi Perempuan	80%					70.000.000	73.500.000	Lama	
2 02 2.02.01 18 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan						Jumlah Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	2 keg			70.000.000	73.500.000	Lama	Kota Bima

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 02 2.02.01 19	PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS, TERMASUK HIV/AIDS		Terwujudnya kegiatan penyuluhan Narkoba, HIV/AIDS seluruh SD/SMP/SMA/SMK se Kota Bima	Kota Bima	Tersuluhnya SD/SMP/SMA/SMK terhadap bahaya Narkoba, PMS termasuk AIDS						40.000.000	42.000.000	Baru	
	01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDS						Meningkatnya kesadaran siswa SD/SMP/SMA/SMK untuk memahami HIV/AIDS/Penyakit Menular Seksual (PMS)				40.000.000	42.000.000	Baru	
2 03	PANGAN										2.150.000.000	2.370.258.000		
2 03 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN										2.150.000.000	2.370.258.000		
2 03 2.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					591.560.000	684.768.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Penyediaan jasa surat menyurat (5 orang x 12 bulan) materai yang Rp.6.000	12 bln 1.100 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	78.900.000	78.900.000	Kegiatan sedang berjalan	
							materai yang Rp.3.000	1.000 lembar						
							paket pengiriman surat, laporan dan data	12 bln						
2 03 2.03.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Penyediaan jasa komunikasi	12 bln	Dukungan terhadap kelancaran	100%	38400000	38400000	Kegiatan sedang berjalan	
							Penyediaan kebutuhan Air	12 bln						
							Penyediaan Kebutuhan listrik	12 bln						
2 03 2.03.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						STNK Roda 4 yang dibayar	1 unit	Dukungan terhadap	100%	16.500.000	16.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
							jasa service kendaraan dinas	1 unit						
2 03 2.03.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						jumlah pembayaran pengelola administrasi keuangan	4 orang selama 12 bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100%	44.388.000	44.388.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Penyediaan alat tulis kantor yang tersedia	86 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	40.000.000	40.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Penyediaan cetak notebook, blanko SPPD, lebar disposisi, kuitansi, SSP dan amplop	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	65.000.000	65.000.000	Kegiatan sedang berjalan	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							Penyediaan pengadaan keperluan kantor	10.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%				
2	03	2.03.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bahan bacaan/surat kabar yang tersedia	5 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi;	100%	62.580.000	62.580.000	Kegiatan sedang berjalan	
							Peraturan perundang-undangan yang tersedia	2 jenis	administrasi;					
2	03	2.03.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman		Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	440 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan	100%	34.000.000	34.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
							Penyediaan makanan dan minuman rapat	150 kali rapat						
							Penyediaan makanan dan minuman tamu	180 orang						
2	03	2.03.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Penyediaan makanan dan minuman rapat	10 kali rapat	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan	100%	186.792.000	275.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
							Penyediaan makanan dan minuman tamu	180 orang						
2	03	2.03.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	86 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi; keuangan dan operasional perkantoran	100%	25.000.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	03	2.03.01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	120.990.000	120.990.000	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN	
2	03	2.03.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor		Pengadaan peralatan gedung kantor	2 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung	100%	30.990.000	30.990.000	Kegiatan sedang berjalan	
							Penyediaan alat pendingin/Air Conditioner (AC)	1 unit						
							Penyediaan Printer	4 unit						
							Penyediaan bahan dan peralatan kebersihan	10 jenis						
2	03	2.03.01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		kendaraan roda 4	1 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	30.000.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	03	2.03.01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	30.000.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 03 2.03.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4 jenis	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	30.000.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 03 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100%					25.000.000	25.000.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2 03 2.03.01 03 03	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						penyediaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	50 Org	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	50 Org	25.000.000	25.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 05 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima dan luar daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	30%					12.950.000	15.000.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH
2 03 2.03.01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan						Sosialisasi peraturan perundang-undangan	30 Orang, (2 kali)	Meningkatnya Pengetahuan aparatur	100%	12.950.000	15.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 06 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%					149.500.000	149.500.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
2 03 2.03.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Dokumen/ laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 jenis	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran tepat waktu	100%	24.000.000	24.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						dokumen/laporan keuangan semesteran	2 dok			15.750.000	15.750.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok			15.750.000	15.750.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						penyediaan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran (Renra, Renja 2019, PK, RKA TA.2019, DPA TA.2019, DPPA TA.2018)	6 jenis			40.000.000	40.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Penyediaan dokumen evaluasi SKPD (LAKIP 2017 dan LPPD 2017)	2 Dokumen			54.000.000	54.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 16 16	Program peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketahanan Pangan	Meningkatnya produksi pertanian	Kota Bima	Persentase Ketersediaan	60%	Terlaksananya penyediaan pangan utama, energi dan protein bagi masyarakat				1.167.350.000	1.275.000.000		BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN
					- Skor pola pangan dan harapan (PPH)	90%								
					-Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	65%								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 03 2.03.01 16 01	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)										Jumlah KK miskin/ rawan/rentan pangan yang ditangani	150 KK	Tersedianya bahan makanan untuk penanganan gizi kurang dan gizi buruk daerah rawan pangan dengan penyediaan pangan utama, energi dan protein bagi masyarakat	100%	100.000.000	80.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
												Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	2 kali					
												Monev penanganan Daerah Rawan Pangan/ PDRP	32 kelurahan					
2 03 2.03.01 16 02	Penyusunan data base potensi produk pangan										Data jumlah produk pangan	1 dokumen	Data jumlah produk pangan	1 dokumen	26.175.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 16 03	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan										Dokumen analisa pola konsumen dan suplai makanan	1 dokumen	data tentang skor PPH	1 dokumen	25.410.400	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 16 05	Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah										Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah	1 dokumen	Data neraca bahan makan (NBM)	1 dokumen	26.750.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 16 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan										Jumlah kelompok yang memanfaatkan pekarangan	5 KRPL (Kegiatan Rumah Pangan Lestari)	Lomba Pengembangan Penganekekaragaman Kondumsi Pangan/P2KP dalam rangka pemanfaatan pekarangan	100%	75.195.000	80.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
												pembinaan dan						
2 03 2.03.01 16 11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok										Jumlah komoditi pangan	9 komoditi	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan untuk Enumerator	9 komoditi	37.600.000	45.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
												Enumerator						
												Enumerator						
												Enumerator						
												alir distributor						
2 03 2.03.01 16 13	Pengembangan cadangan pangan daerah										Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah	35 ton	Tersedianya cadangan pangan daerah	100%	413.839.600	460.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							pembangunan 1 unit gudang cadangan pangan	1 unit	Tersedianya gudang cadangan pangan					
2	03	2.03.01	16	14			Pengembangan desa mandiri pangan							
							Jumlah kelurahan yang terpenuhi pangan	5 kelurahan	Tersedianya bahan/benih tanaman untuk kelurahan Mapan	100%	64.540.000	70.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
									Terlaksananya rapat evaluasi Demapan					
2	03	2.03.01	16	16			Pengembangan diversifikasi tanaman							
							Jumlah kelompok yang dapat dikembangkan di masyarakat	1 kelompok	pengembangan lumbung pangan desa dengan penyediaan bahan/benih tanaman	100%	47.690.000	60.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	03	2.03.01	16	18			Pengembangan lumbung pangan desa							
							Jumlah lumbung pangan yang tersedia	1 lumbung	Terlaksananya pendampingan program	100%	24.300.000	50.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	03	2.03.01	16	19			Pengembangan model distribusi pangan yang efisien							
							Jumlah pangan yang dapat dijangkau oleh masyarakat	3 LDPM dan PUPM	pelatihan dan pendampingan GAPOKTAN	100%	40.950.000	40.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2	03	2.03.01	16	22			Peningkatan mutu dan keamanan pangan							
							Jumlah pangan yang memiliki mutu dan keamanan untuk dikonsumsi	9 komoditi	Pemantauan, Pembinaan serta pengawasan mutu hasil pertanian	100%	51.275.000	55.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
									Sosialisasi keamanan mutu guna Meningkatkan Pengetahuan Tentang Keamanan Pangan dan Pangan Segar Bebas dari Bahan Berbahaya	2 kali				
									Uji mutu lab	14 jenis				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 03 2.03.01 16 30	Penyuluhan sumber pangan alternatif						Pemanfaatan makanan alternatif	5 KRPL	sosialisasi sumber pangan alternatif diharapkan dapat Menambah pengetahuan masyarakat tentang wawasan dan teknologi pengolahan makanan	1 kali	23.675.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 16 32	Lomba cipta menu beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)						Jumlah kelurahan peserta lomba meningkat	38 Kelurahan	Terlaksananya pelaksanaan lomba cipta menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) Tingkat Kota Bima dan Provinsi	2 kali	165.000.000	165.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 16 33	Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)						Jumlah kelurahan yang teridentifikasi rawan/rentan pangan dan gizi	8 kelurahan	data SKPKG	1 laporan	44.950.000	50.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 03 2.03.01 19	<b>Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan</b>	<b>Ketahanan Pangan</b>	<b>Meningkatnya Produktifitas Ekonomi Lokal</b>		<b>Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan</b>	<b>80%</b>					<b>82.650.000</b>	<b>100.000.000</b>		<b>BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PERTANIAN</b>
2 03 2.03.01 19 07	Promosi atas hasil produksi pertanian/pertanian unggulan daerah			NTB dan Nasional			Jumlah produk pangan yang dapat dipromosikan	9 komoditi	promosi hasil pertanian HPS tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	2 kali	82.650.000	100.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
<b>2 04</b>	<b>PERTANAHAN</b>										<b>10.425.000.000</b>	<b>10.946.250.000</b>		
<b>2 04 1.04.01</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>										<b>10.425.000.000</b>	<b>10.946.250.000</b>		
2 04 1.04.01 16	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah</b>	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Kota Bima	Cakupan lahan pemerintahan daerah yang bersertifikat	75%					<b>10.200.000.000</b>	10.710.000.000		
2 04 1.04.01 16 03	Pembebasan/Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah						Jumlah lahan yang dibebaskan oleh Pemerintah Daerah	6 obyek			10.200.000.000	10.710.000.000	sedang berjalan	
2 04 1.04.01 17	<b>Program Penyelesaian Konflik Konflik Pertanahan</b>	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Kota Bima	Konflik pertanahan yang diselesaikan	6 Kasus					<b>100.000.000</b>	105.000.000		
2 04 1.04.01 17 01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan						Jumlah kasus pertanahan yang di tangani	12 Kasus			100.000.000	105.000.000	sedang berjalan	
2 04 1.04.01 18	<b>Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan</b>	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Kota Bima	Sistem informasi pertanahan yang handal	75%					<b>125.000.000</b>	131.250.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 04 1.04.01 18 01	Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal						Tersedianya informasi pertanahan	6 bln			125.000.000	131.250.000	sedang berjalan	
<b>2 05</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>									<b>8.230.695.000</b>	<b>8.642.229.750</b>		<b>38 KELURAHAN</b>	
2 05 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP									8.230.695.000	8.336.679.750			
2 05 2.05.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran yang	12 Bulan				910.000.000	924.000.000	Program Sedang Berjalan	DLH	
2 05 2.05.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat			Kota Bima			Tersedianya jasa surat menyurat dengan baik	1 Pelayanan		30.000.000	31.500.000		DLH	
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Honorarium pegawai tidak tetap													
2 05 2.05.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Kota Bima			Tersedianya sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	1 Pelayanan		50.000.000	52.500.000		DLH	
	Tagihan Rekening Telepon													
	Tagihan Rekening Listrik													
2 05 2.05.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Kota Bima			Tersedianya kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	1 Pelayanan		40.000.000	42.000.000		DLH	
	Honorarium pegawai tidak tetap													
	Jasa Service/spare part Kendaraan Dinas operasional													
	Rehab Berat/Rekondisi Mobil Laboratorium													
	Pembayaran Pajak/STNK Kendaraan Dinas operasional (roda 4, roda 3, roda 2, exavator dan mini lodger)													
2 05 2.05.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Kota Bima			Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	1 Pelayanan		45.000.000	47.250.000		DLH	
	Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang Daerah													
2 05 2.05.01 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor			Kota Bima			Terciptanya tempat kerja yang bersih dan nyaman	1 Pelayanan		23.000.000	24.150.000		DLH	
	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih													
2 05 2.05.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor			Kota Bima			Tersedianya alat tulis kantor yang mencukupi	1 Pelayanan		40.000.000	42.000.000		DLH	
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Materai													
2 05 2.05.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Kota Bima			Terpenuhinya jasa cetakan dan penggandaan	1 Pelayanan		20.000.000	21.000.000		DLH	
	Belanja Penggandaan/Foto Copy													
2 05 2.05.01 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor			Kota Bima			Terwujudnya penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	1 Pelayanan		20.000.000	21.000.000		DLH	
	Belanja Alat Listrik (bola lampu, baterai, cok, cok roll, fitting, kabel dll)													
2 05 2.05.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kota Bima			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	1 Pelayanan		18.000.000	18.900.000		DLH	
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Baliho													
	Pengadaan Personal Komputer - Laptop dan Printer													
2 05 2.05.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kota Bima			Tersedianya media informasi dan bahan bacaan aparatur.	1 Pelayanan		19.000.000	19.950.000		DLH	
	Belanja Surat Kabar/Majalah													
	Belanja Jasa Publikasi/Iklan													
2 05 2.05.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman			Kota Bima			Tersedianya makan-minum yang cukup untuk kegiatan dinas	1 Pelayanan		25.000.000	26.250.000		DLH	
	Makanan dan Minuman Rapat													
	Makanan dan Minuman Tamu													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 05 2.05.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kota Bima			Terwujudnya peningkatan konsultasi dan koordinasi luar daerah.	1 Pelayanan			500.000.000	525.000.000		DLH
	Koordinasi di Luar Daerah													
2 05 2.05.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah			Kota Bima			Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	1 Pelayanan			80.000.000	84.000.000		DLH
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Penagihan dan Pemungutan PAD)													
2 05 2.05.01 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	3 Kegiatan					<b>70.000.000</b>	<b>73.500.000</b>	Program Sedang Berjalan	<b>DLH</b>
2 05 2.05.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Bima			Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 keg			15.000.000	15.750.000		DLH
	Pemeliharaan Gedung Kantor													
2 05 2.05.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 Keg			45.000.000	47.250.000		
	Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional Roda 4													
	Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas operasional Roda 2													
	Belanja BBM dan Pelumas kendaraan dinas operasional Roda 4													
	Belanja BBM dan Pelumas kendaraan dinas operasional Roda 2													
2 05 2.05.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kota Bima			Tersedianya kelengkapan& terpeliharanya kendaran operasional	1 keg			10.000.000	10.500.000		DLH
	Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor (perawatan printer, laptop, komputer/pc dan AC)													
2 05 2.05.01 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>terselenggaranya kekompakan dan disiplin pegawai</b>	1 Keg					<b>311.000.000</b>	<b>52.500.000</b>	Program Sedang Berjalan	<b>DLH</b>
2 05 2.05.01 05 02	Pendidikan dan pelatihan formal			Kota Bima			Tersedianya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan perlengkapannya	1 keg			50.000.000	52.500.000		DLH
2 05 2.05.01 05 05	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan										261.000.000	274.050.000		
	Kontribusi/Kepesertaan Bimtek Penyusunan KLHS													
	Uang Saku dan Transportasi Peserta Bimtek													
2 05 2.05.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>		<b>Terselenggaranya kenyamanan dalam bekerja</b>	6 Keg					<b>170.000.000</b>	<b>178.500.000</b>	Program Sedang Berjalan	<b>DLH</b>
2 05 2.05.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Bima			Terciptanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 keg			20.000.000	21.000.000		DLH
2 05 2.05.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Kota Bima			Terciptanya laporan keuangan semesteran	1 keg			20.000.000	21.000.000		DLH
	Penyusunan Laporan Keuangan Semester													
2 05 2.05.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Kota Bima			Terciptanya laporan prognosis realisasi anggaran	1 Keg			20.000.000	21.000.000		DLH
2 05 2.05.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kota Bima			Terciptanya laporan keuangan akhir tahun	1 keg			20.000.000	21.000.000		DLH
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 05 2.05.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyusunan RENJA SKPD Tahun 2019 Penyusunan RKAP dan DPPA SKPD Tahun 2018 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun 2019			Kota Bima			Terciptanya peyusunan RKA/DPA SKPD	1 keg		50.000.000	52.500.000		DLH	
2 05 2.05.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Penyusunan Lakip, LPJ, dan LPPD			Kota Bima			Terciptanya peyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	1 keg		40.000.000	42.000.000		DLH	
2 05 2.05.01 15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan		Persentase penanganan sampah	40%				2.893.600.000	3.038.280.000	Program Sedang Berjalan	DLH	
2 05 2.05.01 15 02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ATK Kebutuhan UPTD TPA Oi Mbo Tagihan Rekening Listrik UPTD TPA Oi Mbo Honorarium pegawai tidak tetap UPTD TPA Oi Mbo Peningkatan Kapasitas pegawai UPTD TPA Oi Mbo Belanja Operasional Penimbunan Tanah / Pengolahan sampah Sanitary Landfill Belanja BBM Solar Alat Berat di UPTD TPA Oi Mbo Belanja Pelumas Alat Berat di UPTD TPA Oi Mbo Belanja Jasa Service Alat Berat di UPTD TPA Oi Mbo Belanja Penggantian Suku Cadang Alat Berat di UPTD TPA Oi Mbo Belanja Pemeliharaan Alat di TPST						Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	1 Keg		50.000.000	52.500.000		DLH	
2 05 2.05.01 15 04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bidang Kebersihan Honorarium Tim Koordinasi Kelurahan Honorarium Tim Siaga Sampah Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Honorarium pegawai tidak tetap Jasa Service (mobil pickup, kendaraan roda 4, roda 6, roda 3, mesin pemotong rumput dan gergaji mesin) Penggantian Suku Cadang (mobil pickup, dump truk, ambroll dan compactor) Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas (kendaraan roda 4, roda 6, roda 3, alat pemotong rumput, gergaji mesin, kegiatan gotong royong masyarakat, kendaraan pengawas penyapu jalan dan koordinator, pelumas persneling kendaraan serta pelumaas hidrolik kendaraan) Pengawasan Operasional Persampahan bidang PSLB3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Prateksi Lingkungan						jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	29 Unit		2.783.600.000	2.922.780.000		DLH	
2 05 2.05.01 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Persampahan Honorarium Panitia Lomba Daur Ulang Sampah Honorarium Pelatihan Pengelolaan Persampahan			Kota Bima			jumlah kelompok pengelola sampah mandiri (bank sampah)	2 Unit		60.000.000	63.000.000		DLH	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Service/Sparepart/Suku Cadang Roda 3 : 44 Unit													
	BBM Roda 3 : 44 Unit													
2 05 2.05.01 16	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	Meningkatnya pelaksanaan izin lingkungan		<b>Penurunan angka pencemaran dan perusakan lingkungan</b>	Nilai 65				<b>589.000.000</b>	618.450.000		<b>DLH</b>	
2 05 2.05.01 16 01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura						Pencapaian skor adipura	Nilai 65		68.000.000	71.400.000		<b>DLH</b>	
	Tim Koordinasi Persiapan Penilaian Adipura Tahun 2018													
	Tim Teknis Persiapan Penilaian Adipura Tahun 2018													
	Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Daftar Isian Sistem Manajemen Program Adipura Kota Bima 2017-2018													
2 05 2.05.01 16 04	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup						Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan izin Lingkungan Hidup	40%		85.000.000	89.250.000		<b>DLH</b>	
	Tim Teknis Evaluasi Pengendalian Lingkungan Hidup													
	Tim Terpadu Pengaduan Masyarakat Akibat Pencemaran dan Perusakan Lingkungan													
	Tim Pendampingan Proper													
	Monitoring dan Evaluasi													
	Sosialisasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan													
2 05 2.05.01 16 06	Pengelolaan B3 dan limbah B3						Perusahaan penghasil limbah B3 yang melakukan pengelolaan limbah sesuai aturan	28%		50.000.000	52.500.000		<b>DLH</b>	
	Tim Monitoring Pemantauan dan Pengawasan Penyimpanan Sementara Limbah B3													
2 05 2.05.01 16 10	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih									50.000.000	52.500.000		<b>DLH</b>	
	Honorarium Tim sosialisasi													
	Sosialisasi penataan sepadan sungai untuk mendukung kota bima sebagai kota tepian air													
	Pemeliharaan daerah aliran sungai (DAS) kota bima													
	Pemeliharaan daerah bibir pantai di Kota Bima													
2 05 2.05.01 16 12	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup									286.000.000	300.300.000		<b>DLH</b>	
	Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Validasi KLHS													
	Sosialisasi Dokumen RPPLH													
	Penyusunan Dokumen Pengelolaan dan Perlindungan LH (RPPLHD)													
2 05 2.05.01 16 13	Koordinasi penyusunan AMDAL									50.000.000	52.500.000		<b>DLH</b>	
	Tim Survey Kesanggupan Pengelolaan dan Kesanggupan Lingkungan Hidup (SPPL)													
	Tim Teknis Penilai Dokumen Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL)													
	Sosialisasi Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan													
2 05 2.05.01 17	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>	Meningkatnya pengelolaan SDA	<b>Kota Bima</b>	<b>Prosentase sumber mata air terlindungi</b>	95%				<b>83.000.000</b>	87.150.000		<b>DLH</b>	
2 05 2.05.01 17 01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air						Sumber mata air terlindungi	38%		34.000.000	35.700.000		<b>DLH</b>	
	Penanaman pohon penguat di sekitar sumber mata air													
	Penanaman pohon Peneduh													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 05 2.05.01 17 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Tim Pendamping Peserta Lomba Permata Tingkat Propinsi NTB Tahun 2018 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Pelestarian Mata Air						Jumlah kelompok masyarakat yang di Bina	43 Pokmas			49.000.000	51.450.000		DLH
2 05 2.05.01 18	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBERDAYA ALAM</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya pengelolaan SDA	Kota Bima	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian SDA	4 Pokmas					100.000.000	105.000.000		DLH
2 05 2.05.01 18 01	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, eustaria dan teluk Penanaman dan Pemeliharaan Mangrove di sepanjang pantai Belanja Bahan/Bibit terumbu karang						Luasan mangrove dan terumbu karang yang ditangani	5 Ha			100.000.000	105.000.000		DLH
2 05 2.05.01 19	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Lingkungan Hidup	Meningkatnya informasi SDA dan LH	Kota Bima	Peningkatan data kualitas SDA dan LH	1 Dok					273.695.000	287.379.750		DLH
2 05 2.05.01 19	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata 2018 Tim Penilai Sekolah Adiwiyata 2018 Bahan Baku untuk Pembangunan Grens House Sekolah Adiwiyata Bahan/Bibit Tanaman Pelengkap Green House Sekolah Adiwiyata Bahan Praktikum/Pelatihan/Sosialisasi di sekolah Pembinaan Sekolah Adiwiyata										169.695.000	178.179.750		
2 05 2.05.01 19 02	Pengembangan data dan informasi lingkungan Honorarium Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu DLH Kota Bima Tahun 2018 Honorarium Tim Pembina/Pengendali Penyusunan Dok. Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah (IKPLHD) Kota Bima Tahun 2018 Honorarium Tim Penyusun Dok. Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah (IKPLHD) Kota Bima Tahun 2018 Honorarium Tim Pembina/Pengendali Penyusunan Dok. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kota Bima Tahun 2018 Honorarium Tim Penyusun Dok. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kota Bima Tahun 2018						Jumlah data dan informasi lingkungan	1 Dok			104.000.000	109.200.000		DLH
2 05 2.05.01 25	<b>PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN</b>	Lingkungan Hidup	Tertatanya areal pemakaman	Kota Bima	Persentase tersedianya RTH publik minimal 20 %	14%					1.050.400.000	1.102.920.000	Program Sedang Berjalan	DLH
2 05 2.05.01 25 06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Penataan Areal Pemakaman Sabali Kel. Kumbe Penataan Areal Pemakaman kodo Penataan Areal Pemakaman Tolobali Kel. SaraE Penataan Areal Pemakaman Bedi Kel. Manggemaci Penataan Areal Pemakaman Kel. Rabadompu Barat (Lanjutan) Pemagaran Kuburan Kel. Penato'i						Jumlah areal pemakaman tertangani	8 Lokasi			868.400.000	911.820.000		DLH

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Pemagaran Kuburan Jatiwangi (Belakang SDN 3 Kobi)													
	Pemagaran Kuburan Suntu Kel. Dara													
	Penataan Kuburan di Kel. Penaraga													
	Pemagaran Kuburan Lelamase													
	Pemagaran Kuburan Suhada Rabangodu Selatan (Lanjutan)													
	Pemagaran Kuburan Kel. Rite													
	Pemagaran Kuburan Toloweri													
	Pemagaran Kuburan Na'E													
	Pemagaran Kuburan SANTI													
	Penataan/ Penimbunan Kuburan Baru Penate'													
	Pemagaran Kuburan Tolotonga (KLK, Kompl Pelita, BTN)													
	Pemagaran Kuburan Rabadompu Timur													
2 05	2.05.01	25	07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman			Jumlah areal pemakaman tertangani	5 Lokasi		182.000.000	191.100.000		DLH	
				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih										
2 05	2.05.01	27		Pemeliharaan Makam Se-Kota Bima PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTAMANAN	Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pemanfaatan RTH	Kota Bima	Persentase tersedianya RTH publik minimal 20 %	1 keg	1.380.000.000	1.449.000.000	Program Sedang Berjalan	DLH	
2 05	2.05.01	27	01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pertamanan			Jumlah taman yang tertangani	25 Lokasi		1.200.000.000	1.260.000.000		DLH	
				Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan										
				Tim Siaga Pertamanan										
				Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Bidang pertamanan										
				Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak										
				Jasa Service (mobil tangki air, pickup, roda 3, pemotong rumput dorong, pemotong rumput gendong dan pompa air)										
				Penggantian suku cadang (mobil tangki air, pickup, roda 3, pemotong rumput dorong, pemotong rumput gendong dan pompa air)										
				BBM/gas dan pelumas (mobil tangki air, pickup, roda 3, pemotong rumput dorong, pemotong rumput gendong dan pompa air)										
				Monitoring dan Pengawasan										
				Pemeliharaan Taman Wilayah Timur										
				Pemeliharaan Taman Wilayah Tengah										
				Pemeliharaan Taman Wilayah Barat										
2 05	2.05.01	27	03	Pembangunan sarana dan prasarana pertamanan			Jumlah taman yang tertangani	25 Lokasi		180.000.000	189.000.000		DLH	
				Pengadaan Alat Pendukung Pertamanan (mesin potong rumput dorong, gendong dan mesin pompa air)										
				Pembangunan WC Umum Lapangan Serasuba										
				Revitalisasi Taman Malake										
				Pembangunan Taman Rabadompu Barat RW. 01										
2 05	2.05.01			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA UPTD PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di TPA	Kota Bima	Persentase penanganan sampah	40%	400.000.000	420.000.000	Program Sedang Berjalan	DLH	
2 05	2.05.01			Peningkatan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana UPTD Persampahan			Persentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	25 Lokasi		400.000.000	420.000.000		DLH	
2 05	1.20.XX			38 KANTOR KELURAHAN						760.000.000	798.000.000		38 KELURAHAN	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1 08 1.20.XX 15	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Kota Bima	Persentase penanganan sampah	64,19%					760.000.000	798.000.000	sedang berjalan	38 KELURAHAN
1 08 1.20.XX 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan						Penyediaan sarana prasarana gotong royong kebersihan dan operasional motor sampah kelurahan	12 Bulan			760.000.000	798.000.000	sedang berjalan	38 KELURAHAN
1 08 1.20.XX	SEKRETARIAT DAERAH										45.000.000	47.250.000		BAG. EKONOMI
1 08 1.20.XX 15	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Kota Bima	Koordinasi Pengelolaan dan Konservasi SDA	100%					45.000.000	47.250.000	sedang berjalan	BAG. EKONOMI
1 08 1.20.XX 15 11	Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA						koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA	10 kali			45.000.000	47.250.000	sedang berjalan	BAG. EKONOMI
2 06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL										3.155.352.150	3.082.169.758		
2 06 2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										3.155.352.150	3.082.169.758		DINAS KEPENDUDUKAN
2 06 2.06.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					737.030.000	773.881.500		
2 06 2.06.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	150 lembar			3.600.000	3.780.000	Lama	
							Materei yang tersedia selama 1 tahun	850 lembar						
							Jasa pengiriman/paket	20 paket						
2 06 2.06.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan			96.000.000	100.800.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	5 unit			18.400.000	19.320.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	4 Org 12 Bln			48.000.000	50.400.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	33 Jenis			65.000.000	68.250.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	3 Jenis 58.000 Lbr 70 Dok			8.000.000	8.400.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah perlengkapan kantor	71 Unit			196.030.000	205.831.500	Lama	
2 06 2.06.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah kerjasama dengan media	6 media			12.000.000	12.600.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor						Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor	15 jenis			10.000.000	10.500.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah Kegiatan makan minum rapat	12 Bulan			30.000.000	31.500.000	Baru	
2 06 2.06.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan			200.000.000	210.000.000	Lama	
2 06 2.06.01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan			50.000.000	52.500.000	Lama	
2 06 2.06.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%					170.949.150	179.496.608		
2 06 2.06.01 02 05	Pengadaan Kendaraan dinas operasional						Jumlah kendaraan dinas baru	4 unit			60.000.000,00	63.000.000	Baru	
2 06 2.06.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	1 paket			60.949.150	63.996.608	Baru	
2 06 2.06.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5 unit			35.000.000	36.750.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 06 2.06.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	5 jenis		15.000.000	15.750.000	Lama		
2 06 2.06.01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>					100%				35.000.000	36.750.000			
2 06 2.06.01 03 02	Pengadaan pakaian Dinas dan perlengkapannya						Jumlah pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	75 stel		35.000.000	36.750.000	Baru		
2 06 2.06.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase tersedianya Sistem Pelaporan Kinerja	100%				100.000.000	105.000.000			
2 06 2.06.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama		
2 06 2.06.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen		20.000.000	21.000.000	Lama		
2 06 2.06.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama		
2 06 2.06.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Jenis Dokumen		40.000.000	42.000.000	Lama		
2 06 2.06.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Jenis Dokumen		20.000.000	21.000.000	Lama		
2 06 2.06.01 15	<b>PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Tersedianya data kependudukan yang akurat	Kota Bima	Jumlah Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga dan KTP	100%				2.112.373.000	1.987.041.650			
2 06 2.06.01 15 02	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK						Jumlah Pembinaan tenaga operator pengelola SIAK	20 orang		52.000.000	54.600.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 07	Peningkatan capaian pelayanan publik dalam bidang kependudukan						Jumlah capaian pelayanan publik dalam bidang kependudukan	12 bulan		-	-			
2 06 2.06.01 15 09	Penyusunan kebijakan kependudukan						Jumlah Penyusunan kebijakan kependudukan	1 paket		64.000.000	67.200.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 13	monitiring, evaluasi dan pelaporan						Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4 kali		30.000.000	31.500.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 16	Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil						Jumlah Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil	2 kali		50.000.000	52.500.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 17	Profil kependudukan						Jumlah dokumen Profil kependudukan	30 eksemplar		32.000.000	33.600.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 18	Pemuktahiran data kependudukan						Jumlah Pemuktahiran data kependudukan	10.000 lembar		63.000.000	75.000.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 20	Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat						Jumlah Penyediaan informasi yang dapat di akses masyarakat	1 tahun		36.000.000	50.000.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 21	Pemuktahiran data pencatatan sipil non SIAK						Jumlah Pemuktahiran data pencatatan sipil non SIAK	5.500 lembar		45.000.000	47.250.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 23	Pelayanan penerbitan kartu keluarga						Jumlah Pelayanan penerbitan kartu keluarga	12.000 kutipan		410.000.000	430.500.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 24	Pelayanan penerbitan akta kelahiran						Jumlah Pelayanan penerbitan akta kelahiran	8.000 lembar		110.000.000	115.500.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 25	Pelayanan penerbitan mutasi/pindah						Jumlah Pelayanan penerbitan mutasi/pindah	200 lembar		28.000.000	29.400.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 27	Pelayanan penerbitan akta perkawinan dan perceraian						Dokumen akte perkawinan dan perceraian yang diterbitkan	140 lembar		65.000.000	68.250.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 30	Pelayanan penerbitan KTP-el						Dokumen KTP-el yang diterbitkan	6.000 keping		100.000.000	105.000.000	Lama		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 06 2.06.01 15 31	Kerjasama dan inovasi pelayanan						Terlaksananya Kerjasama dan inovasi pelayanan	4 bln		60.000.000	63.000.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 32	Pelayanan pengaduan						Tersedianya kotak pelayanan pengaduan masyarakat	1 tahun		35.000.000	36.750.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 33	Peningkatan penerbitan akta kematian dan pengangkatan anak						Dokumen akte kematian dan pengangkatan anak yang diterbitkan	650 lembar		63.000.000	66.150.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 36	Pelayanan Dokumen Kependudukan						Pelayanan Keliling pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	6 bln		301.000.000	316.050.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 37	Penerbitan Dokumen Kependudukan						Tersedianya blangko KTP, KK, Akte	15.000 lembar		303.373.000	318.541.650	Lama		
2 06 2.06.01 15 38	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan						Terpeliharanya peralatan dan mesin SIAK	1 tahun		25.000.000	26.250.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 39	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi						Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi	1 tahun		90.000.000	94.500.000	Lama		
2 06 2.06.01 15 40	Penerbitan kartu identitas anak						Jumlah Penerbitan kartu identitas anak			150.000.000	157.500.000	Lama		
2 07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA									6.221.508.500	703.500.000			
2 07 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH									670.000.000	703.500.000			
2 07 4.01.03 17	PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik				Partisipasi masyarakat dalam pembangunan			670.000.000	703.500.000			
2 07 4.01.03 17 05	Pelaksanaan lomba kelurahan						Jumlah Pelaksanaan lomba kelurahan	3 kegiatan		500.000.000	525.000.000	Lama		
	<b>Bagian AP:</b>													
	Honorarium Tim Pelaksana Lomba Kelurahan													
	Honorarium Tim Penilai Lomba Kelurahan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Balho													
	Belanja Bahan Material Habis Pakai													
	Belanja Jasa Kesenian													
	Belanja Cetak Dokumen													
	Belanja Penggandaan/Fotocopy													
	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi													
	Belanja Sewa Meja Kursi													
	Belanja Sewa Pakai Adat/Tradisional													
	Belanja Sewa Sound System													
	Belanja Sewa Tanaman Hias													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu													
	Belanja Pakaian Seragam Lomba Kelurahan													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring Persiapan Lomba Kelurahan, Evaluasi Pelaksanaan Lomba Kelurahan)													
	Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota RI dan Luar Propinsi NTB dan Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota Propinsi NTB dan Sekitarnya													
2 07 4.01.03 17 11	Belanja Pemberian Hadiah Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)						Jumlah Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)	5 lokasi		170.000.000	178.500.000	Lama		
	<b>Bagian AP:</b>													
	Honorarium/Pengendali/Pelaksana Kegiatan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Balho													
	Belanja Habis Pakai													
	Belanja Cetak Undangan/Buku Saku													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Pengandaan/Fotocopy													
	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi													
	Belanja Sewa Meja Kursi													
	Belanja Sewa Tenda													
	Bekanja Sewa Tanaman Hias													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Makanan dan Minuman Tamu													
	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													
	Honorarium Tenaga Ahli (pemimpin upacara, pembawa acara, pembaca do'a)													
2 07 4.01.10	<b>KECAMATAN RASANA E TIMUR</b>									1.019.000.000	1.069.950.000			
2 07 4.01.10 15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Cakupan pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM, RT,RW)	100%				279.000.000	292.950.000			
2 07 4.01.10 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan						Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 8 kel		279.000.000	292.950.000	Lama		
4 01 4.01.10 17	<b>PROGRAM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%				700.000.000	735.000.000			
4 01 4.01.10 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa						Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 8 kel		118.000.000	123.900.000	Lama		
4 01 4.01.10 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan						Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 8 kel		125.000.000	131.250.000	Lama		
4 01 4.01.10 17 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ / MQ	Tk kecamatan dan 8 kel		355.000.000	372.750.000	Lama		
4 01 4.01.10 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga						Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Tk kecamatan dan 8 kel		89.000.000	93.450.000	Lama		
4 01 4.01.10 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)						Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tk kecamatan		13.000.000	13.650.000	Lama		
2 07 4.01.10 20	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>									40.000.000	42.000.000			
2 07 4.01.10 20 01	Penyusunan Profil Kelurahan						Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	8 dok/kel		40.000.000	42.000.000	Lama		
2 07 4.01.11	<b>KECAMATAN ASAKOTA</b>									1.067.500.000	1.120.875.000			
2 07 4.01.11 15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Cakupan pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM, RT,RW)	100%				427.500.000	448.875.000			
2 07 4.01.11 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan						Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 4 kel		427.500.000	448.875.000	Lama		
2 07 4.01.11 17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		Partisipasi masyarakat dalam pembangunan	100%				610.000.000	640.500.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 07 4.01.11 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa						Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	kec asakota dan 6 kelurahan			90.000.000	94.500.000	Lama	
2 07 4.01.11 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan						Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	kec asakota dan 6 kelurahan			99.000.000	103.950.000	Lama	
2 07 4.01.11 17 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	kec asakota dan 6 kelurahan			292.000.000	306.600.000	Lama	
2 07 4.01.11 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga						Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	kec asakota dan 6 kelurahan			104.000.000	109.200.000	Lama	
2 07 4.01.11 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)						Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	kec asakota			25.000.000	26.250.000	Lama	
2 07 4.01.10 20	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>										<b>30.000.000</b>	<b>31.500.000</b>		
2 07 4.01.11 20 01	Penyusunan Profil Kelurahan						Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	6 dok/kec			30.000.000	31.500.000	Lama	
2 07 4.01.12	<b>KECAMATAN MPUNDA</b>										<b>1.267.332.000</b>	<b>1.330.698.600</b>		
2 07 4.01.12 15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		<b>Cakupan pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan</b>	<b>100%</b>					<b>351.300.000</b>	368.865.000		
2 07 4.01.12 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan						Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 10 kec			351.300.000	368.865.000	Lama	
4 01 4.01.12 17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		<b>Partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>					<b>866.032.000</b>	909.333.600		
4 01 4.01.12 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa						Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 10 kec			139.237.000,00	146.198.850	Lama	
4 01 4.01.12 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan						Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 10 kec			202.926.000,00	213.072.300	Lama	
4 01 4.01.12 17 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	Tk kecamatan dan 10 kec			400.000.000,00	420.000.000	Lama	
4 01 4.01.12 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga						Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	Tk kecamatan dan 10 kec			113.869.000,00	119.562.450	Lama	
4 01 4.01.12 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)						Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Tk. Kec			10.000.000,00	10.500.000	Lama	
2 07 4.01.10 20	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>										<b>50.000.000</b>	<b>52.500.000</b>		
2 07 4.01.12 15 05	Penyusunan Profil Kelurahan						Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	10 dok/kec			50.000.000	52.500.000	Lama	
2 07 4.01.13	<b>KECAMATAN RABA</b>										<b>1.282.976.500</b>	<b>1.347.125.325</b>		
2 07 4.01.13 15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		<b>Cakupan pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM, RT,RW)</b>	<b>100%</b>					<b>396.900.000</b>	416.745.000		



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 07 4.01.13 15 01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan						Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	RT,RW,LPM di 11 kel			396.900.000	416.745.000	Lama	
2 07 4.01.13 17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		<b>Partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>					<b>839.076.500</b>	881.030.325		
2 07 4.01.13 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa						Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	kec raba dan 11 kelurahan			127.596.500	133.976.325	Lama	
2 07 4.01.13 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan						Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	kec raba dan 11 kelurahan			139.702.000	146.687.100	Lama	
2 07 4.01.13 17 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	kec raba dan 11 kelurahan			430.000.000	451.500.000	Lama	
2 07 4.01.13 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga						Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	kec raba dan 11 kelurahan			132.192.000	138.801.600	Lama	
2 07 4.01.13 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)						Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	kec. Raba			9.586.000	10.065.300	Lama	
2 07 4.01.10 20	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA/PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>										<b>47.000.000</b>	<b>49.350.000</b>		
2 07 4.01.13 15 05	Penyusunan Profil Kelurahan						Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	11 dok/kel			47.000.000	49.350.000	Lama	
4 01 4.01.09	<b>KECAMATAN RASANA E BARAT</b>										<b>914.700.000</b>	<b>960.435.000</b>		
4 01 4.01.09 15	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		<b>Cakupan pembinaan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM, RT,RW)</b>	<b>100%</b>					248.700.000	261.135.000		
4 01 4.01.09 15 01	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan						Jumlah kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	RT,RW,LPM di 6 kel			248.700.000	261.135.000	Lama	
4 01 4.01.09 17	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		<b>Partisipasi masyarakat dalam pembangunan</b>	<b>100%</b>					<b>636.000.000</b>	<b>667.800.000</b>		
4 01 4.01.09 17 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa						Jumlah Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Tk kecamatan dan 6 kel			137.000.000	143.850.000	Lama	
4 01 4.01.09 17 05	Pelaksanaan Lomba Kelurahan						Jumlah Pelaksanaan Lomba Kelurahan	Tk kecamatan dan 6 kel			125.000.000	131.250.000	Lama	
4 01 4.01.09 17 06	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ						Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	Tk kecamatan dan 6 kel			280.000.000	294.000.000	Lama	
4 01 4.01.09 17 08	Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga						Jumlah Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga	PKK kec dan PKK 6 kel			74.000.000	77.700.000	Lama	
4 01 4.01.09 17 11	Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )						Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )	TK kecamatan			20.000.000	21.000.000	Lama	
4 01 4.01.09 20	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA/ PRASARANA DAN PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAH KELURAHAN</b>										<b>30.000.000</b>	<b>31.500.000</b>		
4 01 4.01.09 20 01	Penyusunan profil kelurahan						Jumlah dokumen Profil Kelurahan yang tersusun	6 dok			30.000.000	31.500.000	Lama	
2 08	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>										<b>3.271.195.000</b>	<b>3.434.754.750</b>		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 08 2.08.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.271.195.000				3.271.195.000	3.434.754.750		
2 08 2.08.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal	100%					553.000.000	580.650.000		
2 08 2.08.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat keluar	12 bulan			25.000.000	26.250.000		
2 08 2.08.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 bulan			62.000.000	65.100.000		
2 08 2.08.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik (Roda Empa : 6 dan Roda Dua : 52 unit)	58 unit			100.000.000	105.000.000		
2 08 2.08.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	12 bulan			45.000.000	47.250.000		
2 08 2.08.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Jumlah penyediaan jasa kebersihan tempat kerja yang bersih dan nyaman	12 bulan			14.000.000	14.700.000		
2 08 2.08.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bulan			40.000.000	42.000.000		
2 08 2.08.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah cetakan dan penggandaan	12 bulan			27.000.000	28.350.000		
2 08 2.08.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	12 bulan			35.000.000	36.750.000		
2 08 2.08.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	12 bulan			20.000.000	21.000.000		
2 08 2.08.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	12 bulan			5.000.000	5.250.000		
2 08 2.08.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bulan			20.000.000	21.000.000		
2 08 2.08.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 bulan			130.000.000	136.500.000		
2 08 2.08.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 bulan			30.000.000	31.500.000		
2 08 2.08.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%					566.697.000	595.031.850		
2 08 2.08.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	4 unit			354.250.000	371.962.500		
2 08 2.08.01 02 10	Pengadaan mebeleur						Jumlah Pengadaan mebeleur	22 unit			3.600.000	3.780.000		
2 08 2.08.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 tahun			12.349.000	12.966.450		
2 08 2.08.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai.	1 tahun			148.548.000	155.975.400		
2 08 2.08.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	1 tahun			23.500.000	24.675.000		
2 08 2.08.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 tahun			24.450.000	25.672.500		
2 08 2.08.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik	Kota Bima	Porsentase Capaian Peningkatan Disiplin aparatur	100%					34.250.000	35.962.500		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 08 2.08.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									Jumlah Pakaian Dinas	5 kecamatan		34.250.000	35.962.500			
2 08 2.08.01 05 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik	Kota Bima	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Yang Berdisiplin Tinggi	100%				35.000.000	36.750.000			
2 08 2.08.01 05 05	Pelaksanaan penilaian AKJG									Jumlah penilaian AKJG	12 bulan		35.000.000	36.750.000			
2 08 2.08.01 06 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase tersedianya Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100%				120.000.000	126.000.000			
2 08 2.08.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD	11 Kelompok		10.000.000	10.500.000			
2 08 2.08.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun	2 dok		20.000.000	21.000.000			
2 08 2.08.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokemen		10.000.000	10.500.000			
2 08 2.08.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah									Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	5 Dokumen		50.000.000	52.500.000			
2 08 2.08.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD									jumlah dokumen LPJ dan LPPD SKPD (Revisi RENJA dan RENSTRA) yang tersusun	3 Dokumen		30.000.000	31.500.000			
2 08 2.08.01 15 15	PROGRAM KELUARGA BERENCANA							Persentase kehamilan yang tidak di inginkan dari PUS (15-49 tahun)	100%				322.183.000	338.292.150			
2 08 2.08.01 15 01	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin									jumlah akseptor kb yang dilayani	7 Kegiatan		91.970.000	96.568.500			
2 08 2.08.01 15 02	Pelayanan KIE									jumlah PPKS dan MKJP,PROMKES,Klplk KB pria dan Motivator KB	5 Kegiatan		120.213.000	126.223.650			
2 08 2.08.01 15 05	Pembinaan Keluarga Berencana									jumlah pengurus POSDAYA tk.camatan yang terbentuk	13 Kegiatan		65.000.000	68.250.000			
2 08 2.08.01 15 07	Rapat Kerja Daerah Program Keluarga Berencana									meningkatnya kemitraan dalam penggarapan program KB	1 Kegiatan		45.000.000	47.250.000			
2 08 2.08.01 16 16	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA							Persentase angka kelahiran pada remaja (ASFR 15-19 tahun)					130.000.000	136.500.000			
2 08 2.08.01 16 01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)									jumlah klplk generasi berencana di sekolah	1 Kegiatan		35.000.000	36.750.000			
2 08 2.08.01 16 02	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat									Jumlah kegiatan dukungan dan partisipasi masyarakat	1 Kegiatan		95.000.000	99.750.000			
2 08 2.08.01 17 17	PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI							Cakupan Penyediaan Alat kontrasepsi dan obat untuk memenuhi permintaan masyarakat 30%					1.059.750.000	1.112.737.500			
2 08 2.08.01 17 01	Pelayanan konseling KB									menurunya angka unmeet neet pada 5 Kecamatan	4 Kegiatan		550.000.000	577.500.000			
2 08 2.08.01 17 03	Pengadaan alat kontrasepsi									jumlah sarana dan prasarana klinik pelayanan KB	25 unit, 3 paket		509.750.000	535.237.500			
2 08 2.08.01 18 18	PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI							Persentase pengetahuan keluarga tentang isu					215.315.000	226.080.750			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 08 2.08.01 18 01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB						jumlah masyarakat peduli KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	50 Orang			90.179.000	94.687.950		
2 08 2.08.01 18 02	Orientasi Kader Pendataan Keluarga						Jumlah kader (PPKBD dan sub PPKBD) terlatih	3 Kegiatan			43.858.000	46.050.900		
2 08 2.08.01 18 03	Operasional Kader pendataan keluarga						dokumen pendataan	220 Orang			45.960.000	48.258.000		
2 08 2.08.01 18 04	Monitoring kegiatan pendataan keluarga						Jumlah 'Laporan monitoring	3 Kegiatan			15.060.000	15.813.000		
2 08 2.08.01 18 05	Koordinasi Pengelolaan Program						laporan pelaksanaan koordinasi	3 Kegiatan			20.258.000	21.270.900		
2 08 2.08.01 20	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING</b>				Median usia kawin pertama wanita	30 Kelompok					80.000.000	84.000.000		
2 08 2.08.01 20 01	Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR						jumlah forum pusat informasi konseling remaja dan forum pelayanan KKR bagi klk sebaya	15 Kelompok			45.000.000	47.250.000		
2 08 2.08.01 20 02	Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya						jumlah kelompok PIK-RR dan PIK Mahasiswa	15 Kelompok			35.000.000	36.750.000		
2 08 2.08.01 21	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS</b>				Cakupan remaja yang mendapatkan penyuluhan narkoba,PMS,HIV/AIDS	2 Kegiatan					50.000.000	52.500.000		
2 08 2.08.01 21 01	Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah						jumlah 'penyuluhan bahaya narkoba,PMS, HIV/AIDS di sekolah	2 Kegiatan			50.000.000	52.500.000		
2 08 2.08.01 22	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN</b>				Persentase BKB yang mendapatkan	30 Kelompok					60.000.000	63.000.000		
2 08 2.08.01 22 01	Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh						jumlah kelompok yang mengikuti pemilihan	30 kelompok			60.000.000	63.000.000		
2 08 2.08.01 23	<b>PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA</b>				Cakupan tenaga pendamping bina	5 Kegiatan					45.000.000	47.250.000		
2 08 2.08.01 23 01	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan						jumlah kader kelompok kegiatan, BKB,UPPKS,BKR dan BKL	5 Kegiatan			45.000.000	47.250.000		
2 09	<b>PERHUBUNGAN</b>										4.415.834.000	4.419.905.700		
2 09 2.09.01	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>										4.415.834.000	4.419.905.700		
2 09 2.09.01 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Terpenuhinya pelayanan adm. Perkantoran yang memadai	13 Pelayanan					640.910.000	672.955.500		
2 09 2.09.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Tersedianya pelayanan dalam hal surat menyurat	1 Pelayanan			45.000.000	47.250.000		
2 09 2.09.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Tersedianya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik	1 Pelayanan			68.160.000	71.568.000		
2 09 2.09.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan perizinan kendaraan dinas	1 Pelayanan			26.950.000	28.297.500		
2 09 2.09.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Tersedianya pelayanan dalam hal administrasi keuangan	1 Pelayanan			37.800.000	39.690.000		
2 09 2.09.01 01 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Tersedianya pelayanan dalam hal kebersihan kantor	1 Pelayanan			22.500.000	23.625.000		
2 09 2.09.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Tersedianya peralatan alat tulis kantor	1 Pelayanan			45.000.000	47.250.000		
2 09 2.09.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengandaan						Tersedianya jasa percetakan dan pengandaan dokumen	1 Pelayanan			45.000.000	47.250.000		
2 09 2.09.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor										3.000.000	3.150.000		
2 09 2.09.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan			7.500.000	7.875.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 09 2.09.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Tersedianya biaya makan dan minum tamu	1 Pelayanan		15.000.000	15.750.000			
2 09 2.09.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Tersedianya biaya rapat dan koordinasi luar daerah	1 Pelayanan		300.000.000	315.000.000			
2 09 2.09.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam daerah	1 Pelayanan		25.000.000	26.250.000			
2 09 2.09.01 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Prosentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	100%				245.000.000	257.250.000			
2 09 2.09.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Prosentase Kondisi Gedung Kantor dalam Kondisi baik	100%		125.000.000	131.250.000			
2 09 2.09.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Prosentase Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	100%		120.000.000	126.000.000			
1 07 1.07.01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Terciptanya kedisiplinan aparatur	1 paket				0				
1 07 1.07.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olahraga						Meningkatnya wibawa aparatur perhubungan	1 paket		0				
1 07 1.07.01 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Terpenuhinya ketersediaan SDM aparat teknis yang memadai	. 5 org				0				
1 07 1.07.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal						Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional	3 org		0				
2 09 2.09.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP Baik	75%				108.350.000	113.767.500			
2 09 2.09.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Tersusunnya informasi dan dokumentasi (PPID) dan aset	8 bulan		14.750.000	15.487.500			
2 09 2.09.01 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran						Sebagai pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester	2 Dokumen		15.750.000	16.537.500			
2 09 2.09.01 06 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun						Tersedianya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam setahun	1 Dokumen		15.750.000	16.537.500			
2 09 2.09.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA, DPA, DPPA SKPD						Tersedianya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya	4 Dokumen		35.750.000	37.537.500			
2 09 2.09.01 06 06	Penyusunan Lakip, LPI dan LPPD						Tersedianya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun	3 Dokumen		26.350.000	27.667.500			
2 09 2.09.01 15	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN</b>	Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	KotaBima	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Terminal	70%				165.300.000	173.565.000			
2 09 2.09.01 15 02	Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan						Tersedianya Perwali SOP bidang perhubungan	3 Perwali		60.000.000	63.000.000			
2 09 2.09.01 15 03	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan						Rapat Rutin dalam rangka pembangunan fasilitas perhubungan	4 Kali		45.300.000	47.565.000			
2 09 2.09.01 15 04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan						Terlaksananya sosialisasi Peraturan bidang perhubungan	5 Kali		60.000.000	63.000.000			
2 09 2.09.01 15 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kegiatan	4 Kali		25.500.000	26.775.000			
2 09 2.09.01 16	<b>PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ</b>	Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	KotaBima	Prosentase Kondisi Terminal dalam keadaan Baik	70%				815.400.000	856.170.000			
2 09 2.09.01 16 04	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan						Jumlah Terminal dalam Kondisi baik	3 Terminal		815.400.000	856.170.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 09 2.09.01 17	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGGUTAN	Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Angkutan	80%					971.800.000	1.020.390.000		
2 09 2.09.01 17 01	Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang						Jumlah sopir/juru mudi yang disiplin	25 Orang			50.000.000	52.500.000		
2 09 2.09.01 17 02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan						Tersedianya alat visual sosialisasi disiplin lalu lintas (videotron)	2 unit			300.000.000	315.000.000		
2 09 2.09.01 17 04	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang						Jumlah Kendaraan yang diuji	25 Unit			17.750.000	18.637.500		
2 09 2.09.01 17 05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya						Jumlah Razia Angkutan Umum	4 Kali			250.000.000	262.500.000		
2 09 2.09.01 17 11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan										20.050.000	21.052.500		
2 09 2.09.01 17 12	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan						Prosentase Peningkatan Pelayanan jasa Angkutan	85%			27.000.000	28.350.000		
2 09 2.09.01 17 21	Survei Sarana dan Prasarana Angkutan Laut						Laporan Hasil Survei	1 Dokumen			57.000.000	59.850.000		
2 09 2.09.01 17 25	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Parkir						Jumlah Titik Parkir yang dikelola secara Optimal	10 titik/kawasan			250.000.000	262.500.000		
2 09 2.09.01 19	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Prosentase Penurunan Angka Kecelakaan lalu Lintas	50%					1.080.574.000	1.134.602.700		
2 09 2.09.01 19 01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas						tersedianya rambu lalu lintas pada area rawan laka lintas	250Unit			250.000.000	262.500.000		
2 09 2.09.01 19 02	Pengadaan marka jalan						tersedianya marka jalan pada jalan kota	10 km			350.000.000	367.500.000		
2 09 2.09.01 19 03	Pengadaan pagar pengaman jalan						tersedianya pagar pengaman jalan pada area rawan laka lintas	900 meter			450.000.000	472.500.000		
2 09 2.09.01 19 04	Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas						Jumlah Operasi Penertiban	4 kali			350.000.000	367.500.000		
2 09 2.09.01 19 05	Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas						Jumlah Operasi Penertiban	4 kali			25.125.000	26.381.250		
2 09 2.09.01 19 08	Revitalisasi Traffic Light						Jumlah Titik Traffic Light dalam Kondisi Baik	4 Titik			705.449.000	740.721.450		
2 09 2.09.01 20	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN	Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Terciptanya kondisi kendaraan yang laik jalan	2 kegiatan					104.650.000	109.882.500		
2 09 2.09.01 20 03	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor						Jumlah Kendaraan Angkutan dalam kondisi Laik jalan	100 Unit			104.650.000	109.882.500		
2 09 2.09.01 21	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN JASA TERMINAL	Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Terciptanya kondisi Terminal yang layak	1 Kegiatan					206.400.000	216.720.000		
2 09 2.09.01 21 01	Pengaturan dan Penarikan Retribusi Terminal										206.400.000	216.720.000		
2 09 2.09.01 26	PROGRAM PERHUBUNGAN LAUT	Infrastruktur dan konektivitas wilayah	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik		Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut	20%					77.450.000	81.322.500		
2 09 2.09.01 26 01	Peningkatan dan Pengembangan Angkutan Laut						Jumlah Lokasi Pelabuhan Rakyat yang dikelola dengan baik	1 Lokasi			77.450.000	81.322.500		
2 10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										5.050.000.000	5.189.100.000		
2 10 2.10.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										5.050.000.000	5.189.100.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
2 10 2.10.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Terpenuhiya pelayanan adm. Perkantoran yang memadai	13 Pelayanan			906.530.000	951.856.500				
2 10 2.10.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat							Tersedianya pelayanan dalam hal surat menyurat	1 Pelayanan			50.000.000	52.500.000				
2 10 2.10.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							Tersedianya pelayanan dalam hal komunikasi, air dan listrik	1 Pelayanan			250.000.000	262.500.000				
2 10 2.10.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan dinas	1 Pelayanan			15.000.000	15.750.000				
2 10 2.10.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan							Tersedianya pelayanan dalam hal administrasi keuangan	1 Pelayanan			49.800.000	52.290.000				
2 10 2.10.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor							Tersedianya peralatan alat tulis kantor	1 Pelayanan			30.000.000	31.500.000				
2 10 2.10.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan							Tersedianya jasa percetakan dan pengadaan dokumen	1 Pelayanan			83.730.000	87.916.500				
2 10 2.10.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman							Tersedianya biaya makan dan minum tamu	1 Pelayanan			18.000.000	18.900.000				
2 10 2.10.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah							Tersedianya biaya rapat dan koordinasi luar daerah	1 Pelayanan			400.000.000	420.000.000				
2 10 2.10.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah							Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam daerah	1 Pelayanan			10.000.000	10.500.000				
2 10 2.10.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Prosentase Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	100%			169.536.000	64.612.800				
2 10 2.10.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor							Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	100%			35.000.000	36.750.000				
2 10 2.10.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor							Tersedianya perlatan gedung kantor yang memadai	100%			73.000.000	76.650.000				
2 10 2.10.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional							Prosentase Kondisi Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik	100%			61.536.000	64.612.800				
1 07 1.07.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Terciptanya kedisiplinan aparatur	1 paket			0					
1 07 1.07.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olahraga							Meningkatnya wibawa aparatur perhubungan	1 paket			0					
1 07 1.07.01 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Terpenuhiya ketersediaan SDM aparat teknis yang memadai	.5 org			0					
1 07 1.07.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal							Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional	3 org			0					
2 10 2.10.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP Baik	75%			106.934.000	112.280.700				
2 10 2.10.01 06 02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran							Sebagai pengontrol dan bahan evaluasi penggunaan anggaran setiap semester	2 Dokumen			20.000.000	21.000.000				
2 10 2.10.01 06 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun							Tersedianya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dalam setahun	1 Dokumen			20.000.000	21.000.000				
2 10 2.10.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA, DPA, DPPA SKPD							Tersedianya rancangan kegiatan SKPD untuk tahun yang berikutnya	4 Dokumen			44.500.000	46.725.000				
2 10 2.10.01 06 06	Penyusunan Lakip, LJP dan LPPD							Tersedianya laporan pertanggung jawaban baik dari segi kegiatan maupun anggaran dalam setahun	3 Dokumen			22.434.000	23.555.700				
2 10 2.10.01 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Prosentase Pemanfaatan IT dan tata kelola Pemerintahan	60%			25.000.000	26.250.000				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 10 2.10.01 15 03	Pengadaan alat studio dan komunikasi						Jumlah SDM yang Memiliki Kompetensi IT	5 Orang			25.000.000	26.250.000		Dishubkominfo
2 10 2.10.01 15	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi										43.200.000	45.360.000		
2 10 2.10.01 17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Prosentase Pemanfaatan IT dan tata kelola Pemerintahan	60%					112.000.000	117.600.000		
2 10 2.10.01 17 01	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi										112.000.000	117.600.000		
2 10 2.10.01 18	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Prosentase Masyarakat yang mengetahui Informasi Pembangunan dan Pemerintahan	80%					393.500.000	413.175.000		
2 10 2.10.01 18 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah						Tersedianya Pelayanan PPID	12 kali			393.500.000	413.175.000		Dishubkominfo
2 10 2.10.01 20	PROGRAM PENGADAAN PERANGKAT APLIKASI DAN TELEMATIKA										3.000.000.000	3.150.000.000		
2 10 2.10.01 20 01	Pengembangan/Pembenahan Aplikasi Website						tersedianya aplikasi berbasis website untuk seluruh SKPD				500.000.000	525.000.000		
2 10 2.10.01 20 02	Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Media Centre						tersedianya command center daerah	1 unit			2.500.000.000	2.625.000.000		
2 10 2.10.01 28	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAERAH										51.600.000	54.180.000		
2 10 2.10.01 28 05	Penguatan Kelembagaan Pengelola Informasi Publik										51.600.000	54.180.000		
2 10 2.10.01 29	PROGRAM PENINGKATAN TATA LAKSANA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										34.900.000	36.645.000		
2 10 2.10.01 29 03	Pengolahan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah										34.900.000	36.645.000		
2 10 2.10.01 30	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA POSTEL										250.000.000	262.500.000		
2 10 2.10.01 30 01	Monitoring Menara Telekomunikasi										250.000.000	262.500.000		
2 11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										2.973.890.000	2.981.776.700		
2 11 2.11.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										2.765.000.000	2.762.442.200		
2 11 2.11.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					1.060.919.000	1.002.679.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Terselenggaranya jasa surat menyurat kantor Perindag	3 orang (12 bulan)	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	356.690.000	327.900.000	Kegiatan sedang berjalan	
							tenaga kebersihan UPT tenun	1 orang						
							kemanan UPT tenun	1 orang						
							tenaga administrasi non PNS UPT PLUT	1 orang						
							tenaga kebersihan UPT PLU	1 orang						
							tenaga administrasi non PNS UPT PLUT	2 orang						
							tenaga kemanan UPT PLUT	1 orang						
							pegawai honor pasar se-kota bima	26 org						
							materai yang Rp.6.000	400 lembar						



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							materai yang Rp.3.000	400 lembar						
							paket pengiriman surat, laporan dan data	180 bidang/kl/						
							Terselenggaranya jasa surat menyurat	3 orang (12 bulan)						
2	11	2.11.01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik internet (kantor+plut+ tenun+upt pasar)	4 jenis (jasa air, jasa listrik, jasa internet, dan jasa publikasi)	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	128.128.000	116.480.000	Kegiatan sedang berjalan
2	11	2.11.01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5 unit kendaraan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.760.000	1.600.000	Kegiatan sedang berjalan
2	11	2.11.01	01	07			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi bendahara pengeluaran	1 orang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	41.580.000	37.800.000	Kegiatan sedang berjalan
							bendahara pembantu pengeluaran	1 orang						
							bendahara penerimaan	1 orang						
							bendahara barang	1 orang						
							bendahara daftar gaji	1 orang						
2	11	2.11.01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	3 orang (12 bulan)	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	29.018.000	26.380.000	Kegiatan sedang berjalan
2	11	2.11.01	01	10			Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	43.223.400	39.294.000	Kegiatan sedang berjalan
2	11	2.11.01	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	200.000 lembar	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	49.940.000	45.400.000	Kegiatan sedang berjalan
							lilid dokumen dan laporan	30 /bulan						
2	11	2.11.01	01	13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor:	1 paket	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	46.552.000	42.320.000	Kegiatan sedang berjalan
							alat kantor lainnya	2 jenis						
							Personal Komputer PC	4 unit						
							printer	3 unit						
2	11	2.11.01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 jenis	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	7.920.000	7.200.000	Kegiatan sedang berjalan
2	11	2.11.01	01	17			Penyediaan makanan dan minuman	Makan minum Tamu	11 kali (11bulan)	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%	22.135.500	38.305.000	Kegiatan sedang berjalan
							Makan Minum Rapat	11 kali (11bulan)						
							Makan Minum Harian umum	11 kali (11bulan)						

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 11 2.11.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar	55 Perjalanan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	283.972.100	260.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah						Laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	75 Perjalanan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.000.000	60.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%					75.081.000	94.081.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dalam 5 tahun	12 bulan	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan	100%	13.000.000	23.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jasa service, BBM, dan suku cadang	1 unit roda 4 dan 2 unit roda 2			20.650.000	20.650.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun	12 bulan			30.000.000	39.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Terpeliharanya peralatan gedung kantor	7 Jenis Peralatan			11.431.000	11.431.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	100%					18.500.000	24.260.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 03 06	Pengadaan pakaian olahraga						pakaian olahraga	35 stel	tersedianya pakaian olahraga	35 stel	18.500.000	24.260.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima dan luar daerah	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	30%					18.500.000	24.260.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal						Pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	Meningkatny	3 Orang	18.500.000	24.260.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%					77.000.000	77.000.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2 11 2.11.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Laporan Keuangan keuangan semesteran	2 Laporan laporan	Tersedianya dokumen laporan	2 dokumen	16.500.000	16.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	8.500.000	8.500.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 11 2.11.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						laporan keuangan	1 dokumen	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen	12.500.000	12.500.000		
2 11 2.11.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Dokumen Rencana kerja tahunan, RKA/ DPA, RKA-P/DPA-P	3 Dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	3 Dokumen	22.000.000	22.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	Tersedianya dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen	17.500.000	17.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 17	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	<b>Pembangunan ekonomi</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Kota Bima, Mataram &amp; Jakarta</b>	<b>Jumlah UMKM yang ditangani</b>	<b>17,97</b>					<b>1.120.000.000</b>	<b>1.022.961.300</b>	<b>DIKOPERINDAG</b>	
2 11 2.11.01 17 07	Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga						Meningkatnya Jaringan Kerjasama antar Lembaga (fasilitasi sertifikat tanah dengan BPN Kota Bima, Fasilitas KUR dengan KUKM, fasilitas CSR dengan BUMN, fasilitas wirausaha dan koperasi pemula dengan Kemen.Kop.)	5 lembaga	Meningkatnya Jaringan Kerjasama antar Lembaga dan mudahnya akses modal kepada UMKM	100%	80.000.000	100.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 17 08	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga dan UKM						Pembinaan industri rumah tangga dan UKM dan bantuan modal/peralatan (Rombong 30 unit, peralatan UMKM sandang 30)	754 UMKM	Bertambahnya pelaku Aneka Usaha	100%	400.000.000	440.000.000	DIKOPERINDAG	
2 11 2.11.01 17 09	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah						Terselenggaranya pembinaan bagi UMKM dengan pelaksanaan promosi (Mataram & Jakarta)	754 UMKM	Sarana promosi melalui Gelar Produk Koperasi dan UKM	100%	130.000.000	189.370.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 17 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (UMKM)						Jumlah UMKM yang memiliki laporan keuangan sesuai standar	85%	Meningkatnya jumlah UMKM yang memenuhi standar pengelolaan keuangan yang baik	100%	30.000.000	50.175.500	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 17 12	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan						Pelatihan Kewirausahaan dan pemberian bantuan peralatan WUB dan UMKM	150 UMKM	pelatihan pada 150 UMKM dan paket bantuan peralatan	100%	250.000.000	52.495.800	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 15 13	Operasionalisasi dan pengembangan UPT PLUT						Operasionalisasi dan pengembangan UPT PLUT	500 KUMKM	kemudahan UMKM dalam berusaha	100%	230.000.000	190.920.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 2.11.01 18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>Pembangunan ekonomi</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah Koperasi Aktif</b>	<b>96</b>					<b>395.000.000</b>	<b>517.200.900</b>	<b>DIKOPERINDAG</b>	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 11 2.11.01 18 04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian						Sosialisasi, Lomba cerdas cermat tingkat provinsi, Menghadiri HUT Koperasi	3 kegiatan	Peningkatan pemahaman prinsip-prinsip atas pemahaman perkoperasian, Lomba cerdas cermat tingkat provinsi, Menghadiri HUT Koperasi	100%	65.000.000	76.491.400	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG
2 11 2.11.01 18 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi						pembentukan, pembubaran, pembinaan dan pengawasan pemeringkatan kesehatan koperasi	175 Koperasi	Terlaksananya pembentukan, pembubaran, pembinaan dan pengawasan pemeringkatan kesehatan koperasi	100%	70.000.000	75.000.000		DIKOPERINDAG
2 11 2.11.01 18 10	Pendampingan bagi kelembagaan koperasi						Pendampingan RAT koperasi	105 Koperasi	Pembinaan Usaha Koperasi Aktif	105 Koperasi	30.000.000	29.765.000	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG
2 11 2.11.01 18 11	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah						Terlaksananya fasilitasi perijinan UMK, PIRT/Perijinan industri RT, akta notaris koperasi	10 Koperasi dan 150 UMKM	Terlaksananya fasilitasi perijinan UMK, PIRT/Perijinan industri RT, akta notaris koperasi	100%	50.000.000	50.000.000		DIKOPERINDAG
2 11 2.11.01 18 12	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi UMKM						Terseleenggaranya pelatihan Pengelolaan Koperasi/KUD syariah	30 Koperasi	peningkatan pengetahuan manajemen pengelolaan Koperasi syariah	100%	30.000.000	86.944.500	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG
2 11 2.11.01 18 13	Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi						Bertambahnya Koperasi aktif	101 Koperasi	peningkatan pengetahuan manajemen pengelolaan Koperasi	100%	50.000.000	99.000.000		DIKOPERINDAG
2 11 2.11.01 18 04	Promosi produk kerajinan KUMKM						Terlaksananya keikutsertaan IKM Dalam Pameran NTB dan Jakarta Expo dan SEMESCO	2 Pameran (luar daerah)	Meningkatkan kemampuan dan pengalaman dari masing-masing IKM industri	2 Pameran	100.000.000	100.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DIKOPERINDAG
2 11 01.3.04	SEKRETARIAT DAERAH										208.890.000	219.334.500		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 11 01.3.04 17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima	UMKM yang mendapat bantuan modal	9,79%					208.890.000	219.334.500		Bag. Ekonomi SEKRETARIAT DAERAH
2 11 01.3.04 17 05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						Dokumen laporan hasil pemantauan	12 Dokumen	Dokumen laporan hasil pemantauan	12 Dokumen	50.000.000	52.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 11 0 17	Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah										158.890.000	166.834.500		
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Honorarium Tim MONEV KUR													
	Honorarium Tim Penyelesaian Dana Bergulir													
	Honorarium Tenaga Ahli													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Penggandaan													
	Belanja Makan dan Minum Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													
2 12	<b>PENANAMAN MODAL</b>										<b>2.400.000.000</b>	<b>2.584.714.800</b>		
2 12 2.12.01	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>										<b>2.400.000.000</b>	<b>2.584.714.800</b>		
2 12 2.12.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan jasa Perkantoran	100%					528.323.000	525.870.100		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2 12 2.12.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat masuk dan keluar dalam satu tahun	275 surat masuk dan keluar	Persentase surat masuk dan keluar dalam satu tahun	100%	47.820.000	59.400.000	Kegiatan sedang berjalan	
							Materai 6.000	900 Lbr/Tahun	Materai 6.000	900 Lbr/Tahun				
							Materai 3.000	500 Lbr/bln	Materai 3.000	500 Lbr/bln				
							Tanaga Operator Komputer (S1)	4 Org/bln	Tanaga Operator Komputer (S1)	4 Org/bln				
							Tenaga Administrasi (SMA)	1 Org/bln	Tenaga Administrasi (SMA)	1 Org/bln				
2 12 2.12.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jasa Pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	21.600.000	21.600.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)						Jumlah pemanfaatan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	4 Jasa Pelayanan	Persentase pemenuhan pelayanan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)	100%	14.450.000	15.895.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 12 2.12.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah dokumen penatausahaan keuangan	79 Dokumen	Persentase pemenuhan dokumen pelayanan administrasi keuangan	100%	41.592.000	31.908.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Jumlah bahan dan alat kebersihan kantor	100 Bahan/Alat	Persentase pemenuhan pelayanan kebersihan kantor	100%	12.062.000	13.268.200	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah alat Tulis Kantor	3500 Pak/buah/dus	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	40.247.000	44.271.700	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	76238 buah/lembar/blok/eks	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	73.010.000	32.951.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah Barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100 Buah/Rol/meter	Persentase pemenuhan pelayanan penerangan bangunan kantor	100%	5.950.000	6.545.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	5 Eks	Persentase pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	100%	2.800.000	4.360.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah tamu dan pegawai yang dilayani	134 orang	Persentase tamu dan pegawai yang dilayani	100%	18.792.000	20.671.200	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah pejabat dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah	19 Orang	Persentase pejabat dan pegawai yang mengikuti rapat koordinasi luar daerah	100%	200.000.000	220.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dalam daerah	10 kali	Persentase pelaksanaan rapat koordinasi dalam daerah	100%	50.000.000	55.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Porsentase Capaian Peningkatan sarana dan prasarana</b>	<b>100%</b>					<b>490.377.000</b>	<b>539.414.700</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN</b>	
2 12 2.12.01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional						Jumlah Kendaraan Dinas	3 unit	Persentase Kendaraan Dinas	3 unit	60.000.000	66.000.000		
2 12 2.12.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Jumlah perlengkapan kantor	3 Unit	Persentase pemenuhan perlengkapan Kantor komputer/PC, laptop, printer	100%	30.000.000	33.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 12 2.12.01 02 10	Pengadaan Meubelair						Jumlah perlengkapan kantor	15 Buah	Persentase pemehuan perlengkapan Kantor	100%	30.000.000	33.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah ruangan gedung yang terpelihara	12 Rungan gedung	Persentase ruangan gedung yang terpelihara	100%	9.500.000	10.450.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	2 kendaraan	Persentase kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	100%	27.584.000	30.342.400	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor						Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	6 unit	Persentase perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100%	3.000.000	3.300.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	Persentase peralatan gedung kantor yang terpelihara	30 Unit	5.293.000	5.822.300	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 02 42	Rehab sedang/berat gedung kantor						rehab pagar kantor yang terdampak banjir (kerusakan 90%)	2 kegiatan	pagar kantor yang terdampak banjir	2 kegiatan	125.000.000	137.500.000		
						rehab sedang gedung kantor yang terdampak banjir dan Penataan taman garasai kantor							200.000.000	220.000.000
2 12 2.12.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Capaian Peningkatan Disiplin aparatur	100%					36.000.000	39.600.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
2 12 2.12.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian khusus hari-hari tertentu	35 Stel	Persentase pemehuan pelayanan komunikasi,	100%	12.250.000	13.475.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olahraga						Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian Pakaian Olah Raga	35 Stel	Persentase pemehuan pelayanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	8.750.000	9.625.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 03 07	Penilaian disiplin dan kinerja pegawai						Jumlah pegawai yang dinilai tingkat kedisiplinannya	35 pegawai	Persentase Pegawai yang	0%	15.000.000	16.500.000		
2 12 2.12.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	100%					85.000.000	93.500.000		DPMPPTSP
2 12 2.12.01 05 03	Bimbingan teknis iml peraturan perundang undangan						Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	35 orang	persentase Pegawai yang mengikuti diklat Teknis PTSP	100	85.000.000	93.500.000	DPMPPTSP	
2 12 2.12.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	100%					70.300.000	77.330.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 12 2.12.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen yang laporan keuangan semesteran tersusun tepat waktu	2 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disampaikan tepat waktu	Tepat waktu	9.000.000	9.900.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun sesuai dengan SAP	1 dokumen	Jumlah temuan atas pertanggung jawaban atas laporan keuangan akhir tahun	100%	11.200.000	12.320.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA-DPA/PRKA-DPPA						Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	4 Dokumen	Jumlah program, kegiatan dan anggaran tepat penempatan antara	program 9, Kegiatan, 38	39.400.000	43.340.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 06 06	Penyusunan LAKIP dan LPPD						Jumlah dokumen Akuntabilitas kinerja dan pertanggung jawabab penyelenggaraan pemerintah daerah	2 Lap.	Nilai LKIP oleh Inspektorat Kota Bima	B	10.700.000	11.770.000	Kegiatan sedang berjalan	
2 12 2.12.01 15	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Pembangunan ekonomi</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN</b>	<b>#####</b>					<b>220.000.000</b>	<b>242.000.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
					<b>Jumlah kerjasama Penanaman Modal Dalam Negeri (Perusahaan)</b>	<b>7 Perusahaan</b>								
					<b>Jumlah kerjasama UMKM dengan pengusaha dalam negeri (daerah)</b>	<b>1 ( Mou)</b>								
					<b>Jumlah kerjasama DPMTSP dengan Instansi terkait</b>	<b>2 Instansi</b>								
2 12 2.12.01 15 06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha						Jumlah kerjasama Penanaman Modal Dalam Negeri (Perusahaan)	7 perusahaan	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama penanaman modal	100%	70.000.000	77.000.000		
							Jumlah kerjasama UMKM dengan pengusaha dalam negeri (daerah)	1 ( Mou)						
							Jumlah dokumen kerjasama DPMTSP dengan Instansi terkait	2 Instansi						
2 12 2.12.01 15 08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal						Jumlah pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal Dalam Negeri	758 perusahaan	terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan Penanaman Modal Dalam Negeri	100%	50.000.000	55.000.000		
2 12 2.12.01 15 12	Pengembangan sistem promosi dan kerjasama penanaman modal						Jumlah pelaksanaan pameran investasi	1 kali luar kota	Terlaksananya publikasi dan promosi daerah	100%	100.000.000	110.000.000		
							Jumlah dokumen potensi investasi unggulan yang terpublikasi	4 Dokumen						



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN									
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
2	12	2.12.01	16		Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Terwujudnya pelayanan investasi satu pintu secara terpadu (one stop services).	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1 % pertahun	Kota Bima	Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN	158 M					70.000.000	77.000.000		DPMPTSP
2	12	2.12.01	16	06	Penyusunan cetak biru pengembangan penanaman modal				Jumlah dokumen cetak biru pengembangan penanaman modal	10 buku	ketersediaan informasi pelayanan perijinan dan penanaman modal	4 jenis potensi usaha unggulan		40.000.000	44.000.000			
2	12	2.12.01	16	11	Penyusunan Kebijakan perijinan dan penanaman modal				Jumlah dokumen kebijakan /peraturan penanaman modal dan perijinan	2 dokumen	Jumlah dokumen kebijakan /peraturan penanaman modal dan perijinan yang disahkan	2 dokumen		30.000.000	33.000.000			
2	12	2.12.01	51		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Kota Bima	Rata-rata Lama Proses Pelayanan	1,25 Hari				900.000.000	990.000.000		DINAS PENANAMAN	
									Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	95%								
									Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik dan non elektronik	95%								
2	12	2.12.01	51	02	Penyediaan Informasi/ Date Base Perizinan				jumlah data base perijinan yang duplikasikan	1 dokumen	Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik dan non elektronik	95%		30.000.000	33.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
2	12	2.12.01	51	03	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pendataan Perizinan				Jumlah usaha perijinan yang dilakukan monitoring Evaluasi perijinannya	441 usaha perijinan	Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu	95%		64.426.600	70.869.260	Kegiatan sedang berjalan	174.869.900	
									jumlah survey dan peninjauan lapangan kelayakan usaha dan non usaha	40 kali		95%		110.443.300	121.487.630			
2	12	2.12.01	51	04	Penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu				Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan usaha	1,25 Hari	Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan	1,25 Hari		82.630.100	90.893.110	Kegiatan sedang berjalan		
2	12	2.12.01	51	.06	Penyusunan pedoman peningkatan sistem dan prosedur pelayanan perijinan				Jumlah pedoman dan Prosedur Pelayanan Perizinan yang disahkan	8 Pedoman/ SOP/SP	Persentase Ijin yang diterbitkan	0,95		80.000.000	88.000.000			
2	12	2.12.01	51	07	Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat				Jumlah pengaduan yang tertangani	15 pengaduan	Porsentase pengaduan yang terselesaikan	0,95		75.000.000	82.500.000			
2	12	2.12.01	51	08	Penyusunan indek kepuasan masyarakat				Jumlah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	2 kali	Rata-rata Lama Proses Pelayanan Perizinan	1,25 hari		55.000.000	60.500.000			
									Jumlah dokumen hasil survey kepuasan masyarakat	1 Dokumen								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 12 2.12.01 51 09	Sosialisasi pelayanan perijinan terpadu satu pintu						Jumlah peserta sosialisasi	500 pelaku usaha dan pemerintah (5 kecamatan)	persentase keikutsertaan pelaku usaha dalam rapat sosialisasi	95%	114.000.000	125.400.000		
							Jumlah bahan informasi non elektronik pelayanan perijinan dan penanaman modal	2000 Buah Brosur,papan penunjuk arah PTSP 2 buah,	Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik dan non elektorik	95%	89.000.000	97.900.000		
							Jumlah media dan Chanel aspirasi dimedia sosial (elektronik)	12 media,2 aplikasi	Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik dan non elektorik	95%				
2 12 2.12.01 51 10	Penyusunan Profil Perusahaan						Jumlah dokumen Profil DPMPTSP	1 Dokumen	Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik dan non elektorik	95%	60.000.000	66.000.000		
							Jumlah Profil perusahaan yang termuat dalam WEB	1 Dokumen	Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik dan non elektorik	95%				
2 12 2.12.01 51 11	Penyusunan Laporan Realisasi perijinan						Jumlah dokumen laporan realisasi perijinan	1 Dokumen	Persentase ketersediaan informasi PTSP secara elektronik dan non elektorik	95%	47.500.000	52.250.000		
2 12 2.12.01 51 12	Pendataan potensi Objek perijinan						Jumlah lokasi pendataan potensi objek perijinan	5 kecamatan	Persentase potensi objek perijinan	1	92.000.000	101.200.000		
<b>2 13</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>										<b>1.046.480.000</b>	<b>1.098.804.000</b>		
2 13 3.02.01	DINAS PARIWISATA										1.046.480.000	1.098.804.000		
2 13 3.02.01 16	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN	Pembangunan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pemuda	Kota Bima	Persentase jumlah pemuda terampil	50 Orang					636.480.000	668.304.000		DISPAR
2 13 3.02.01 16 02	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan						Jumlah pemuda yang telah mengikuti diklat dasar kepemimpinan	50 Orang			600.000.000,00	630.000.000		DISPAR
2 13 3.02.01 16	Pembinaan Organisasi Kepemudaan										36.480.000,00	38.304.000		
	<b>Sekretariat Daerah</b>													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan													
	Belanja Spanduk Kegiatan													
	Sewa Tempat													
	Belanja Sewa Meja Kursi													
	Belanja Sewa Sound System													
	Makan Minum Kegiatan													
	Uang Pengganti Transport													
	Narasumber Kegiatan													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 13 3.02.01 20	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLARHAGA			Kota Bima	Jumlah Klub yang dibina					370.000.000	388.500.000		DISPAR	
2 13 3.02.01 20 03	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat						jumlah atlit yang dibina			120.000.000	126.000.000		DISPAR	
2 13 3.02.01 20 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga						jumlah cabor yang menjalankan kompetisi secara teratur			250.000.000	262.500.000		DISPAR	
2 13 3.02.01 21	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLARHAGA			Kota Bima	Jumlah gedung olahraga					40.000.000	42.000.000		DISPAR	
2 13 3.02.01 21 03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga						jumlah gedung olahraga			40.000.000	42.000.000		DISPAR	
2 13 3.02.01 21 08	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga						jumlah gedung olahraga			0	0	Baru	DISPAR	
2 13 3.02.01 21 22	Pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga						jumlah gedung olahraga			0	0	Baru	DISPAR	
2 14	STATISTIK									1.934.700.000	2.031.435.000			
2 14 2.14.01	DINAS STATISTIK DAERAH									1.934.700.000	2.031.435.000			
2 14 1.14.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	12 Bulan				450.000.000	472.500.000	Program Sedang Berjalan	STATISTIK	
2 14 2.14.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	1 Pelayanan		30.000.000	31.500.000			
2 14 2.14.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	1 Pelayanan		20.000.000	21.000.000			
2 14 2.14.01 01 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	1 Pelayanan		15.000.000	15.750.000			
2 14 2.14.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	1 Pelayanan		24.000.000	25.200.000			
2 14 2.14.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Cakupan ruang kantor yang bersih	1 Pelayanan		15.000.000	15.750.000			
2 14 2.14.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah ATK	1 Pelayanan		36.000.000	37.800.000			
2 14 2.14.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 Pelayanan		20.000.000	21.000.000			
2 14 2.14.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor							1 Pelayanan		20.000.000	21.000.000			
2 14 2.14.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah Kegiatan makan minum rapat	1 Pelayanan		10.000.000	10.500.000			
2 14 2.14.01 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Pelayanan		200.000.000	210.000.000			
2 14 2.14.01 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam Daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Pelayanan		60.000.000	63.000.000			
2 14 0 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	5 Keg				190.000.000	199.500.000	Program Sedang Berjalan	STATISTIK	
2 14 2.14.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	1 Keg		20.000.000	21.000.000			
2 14 0 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 Keg		80.000.000	84.000.000			
2 14 0 02 10	Pengadaan mebeleur						jumlah mebeleur yang tersedia	1 Keg		30.000.000	31.500.000			
2 14 0 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	1 Keg		20.000.000	21.000.000			
2 14 0 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 Keg		40.000.000	42.000.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
2 14 00.00 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	100%						25.000.000	26.250.000	Program Sedang Berjalan	STATISTIK		
2 14 2.14.01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu							Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%			25.000.000	26.250.000				
2 14 2.14.01 04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Meningkatnya kualitas kapasitas sumber daya aparatur							70.000.000	73.500.000				
2 14 00.00 04 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal							Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	20%			70.000.000	73.500.000				
2 14 0 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%						165.000.000	173.250.000				
2 14 2.14.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD							Terlaksananya penyusunan laporan triwulan sesuai ketentuan	1 Dok			10.000.000	10.500.000				
2 14 2.14.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran							Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dok			20.000.000	21.000.000				
2 14 2.14.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran							Jumlah dokumen pelaporan Prognosis realisasi anggaran	1 Dok			20.000.000	21.000.000				
2 14 2.14.01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun							Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dok			20.000.000	21.000.000				
2 14 2.14.01 06 05	Penyusunan Rencana kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	3 Dok			55.000.000	57.750.000				
2 14 2.14.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD							Jumlah dokumen LAKIP, LPJ, LPPD	3 Dok			40.000.000	42.000.000				
2 14 2.14.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH		Meningkatnya kapasitas SDM OPD dalam mengembangkan statistik sektoral	Kota Bima	Jumlah pengembangan kapasitas SDM	2 Kegiatan/ 70 Orang						815.000.000	855.750.000				
2 14 2.14.01 15 10	Penyusunan data statistik kependudukan							Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral kependudukan	1 Dokumen / 20 Eks			64.200.000	67.410.000				
2 14 2.14.01 15 11	penyusunan data statistik kesejahteraan sosial							Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral kesejahteraan sosial	1 Dokumen / 20 Eks			64.300.000	67.515.000				
2 14 2.14.01 15 12	Penyusunan data statistik ekonomi							Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral ekonomi	1 Dokumen/ 20 Eks			64.300.000	67.515.000				
2 14 2.14.01 15 13	Penyusunan data statistik infrastruktur							Jumlah laporan kegiatan hasil pengelolaan data statistik sektoral infrastruktur	1 Dokumen / 20 Eks			65.000.000	68.250.000				
2 14 2.14.01 15 15	Penyusunan Peta PBDT Berbasis SIG							Jumlah Peta PBDT yang berbasis SIG	1 Dokumen			79.250.000	83.212.500				
2 14 2.14.01 15 17	Workshop Statistik Sektoral							Jumlah peserta yang mengikuti workshop	50 Orang			31.000.000	32.550.000				
2 14 2.14.01 15 18	Bimtek Pengembangan Data Statistik Sektoral							Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	50 Orang			42.500.000	44.625.000				
2 14 2.14.01 15 19	Pelatihan Petugas Lapangan Kegiatan Statistik Sektoral							Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan petugas lapangan	20 Orang			33.900.000	35.595.000				
2 14 2.14.01 15 20	Penyusunan indeks GINI							jumlah dokumen indeks gini	1 Dok			65.500.000	59.325.000				
2 14 2.14.01 15 21	Pelayanan diseminasi data dan informasi statistik							jumlah pelayanan diseminasi data dan informasi statistik	30 Pelayanan			65.000.000	68.250.000				
2 14 2.14.01 15 22	Penyusunan analisis indikator makro daerah							Jumlah dokumen data dan informasi analisis indikator makro daerah	1 Dok			50.000.000	52.500.000				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 14 2.14.01 15 23	Analisis IPM Kota Bima									60.000.000	63.000.000			
2 14 2.14.01 15 24	Koordinasi pengumpulan data-data statistik Daerah						Jumlah Kegiatan Koordinasi	8 Kali		60.000.000	63.000.000			
2 14 2.14.01 15 25	Neraca bahan Makanan						Dokumen neraca bahan makanan	1 Dok		79.050.000	83.002.500			
2 14 2.14.01 16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>		<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah pengelolaan data statistik sektoral</b>	<b>2 Kegiatan/ 70 Orang</b>				<b>289.700.000,00</b>	<b>304.185.000</b>		STATISTIK	
2 14 2.14.01 16 01	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan						Jumlah laporan data dan informasi bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah	1 Dokumen / 20 Eks		289.700.000,00	304.185.000	Kegiatan sedang berjalan		
2 14 2.14.01 16 02	Penyusunan Profil Daerah						Jumlah Laporan Profil Daerah	1 Dokumen /		0,00	0	Kegiatan sedang		
2 14 2.14.01 16 03	Koordinasi Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah						Jumlah Laporan Basis data dan informasi SIPD	1 Dokumen / 20 Eks		0,00	0	Kegiatan sedang berjalan		
2 14 2.14.01 16 04	Pembaharuan (Updating) Data Capaian Kinerja RPJMD						Jumlah buku updating data capaian kinerja RPJMD	1 Dokumen / 20 Eks		0,00	0	Kegiatan sedang berjalan		
2 14 2.14.01 16 05	Operasional Website/Updating data dan informasi						Jumlah data dan informasi yang ter update	1 Kegiatan		0,00	0	Kegiatan sedang berjalan		
2 14 2.14.01 16 06	Pembaharuan (Updating) Data Kemiskinan						Jumlah data kemiskinan yang terupdate	1 Dokumen/ 15 Eks		0,00	0	Kegiatan sedang berjalan		
2 14 2.14.01 16 07	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi						Jumlah laporan pelayanan informasi publik	1 Dokumen		0,00	0	Kegiatan sedang berjalan		
2 14 2.14.01 16 08	Penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)						Jumlah laporan LP2D	20 Dokumen		0	0			
2 14 2.14.01 16 09	Penyusunan ICOR						Jumlah dokumen ICOR	1 Dokumen		0	0			
2 14 2.14.01 16 10	Penyusunan Peta Wilayah						Jumlah peta yang disusun	1 Dokumen		0	0			
<b>2 16</b>	<b>KEBUDAYAAN</b>									<b>1.775.886.878</b>	<b>1.864.681.222</b>			
<b>2 16 1.01.01</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>									<b>1.775.886.878</b>	<b>1.864.681.222</b>			
<b>2 16 1.01.01 15</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>									<b>627.631.000</b>	<b>659.012.550</b>			
2 16 1,01.01 15 01	Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah						Jumlah adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan	2 Kegiatan		169.405.000	177.875.250			
	- LOMBA HADARAH DAN QASIDAH KLASIK ANTAR KELURAHAN													
	- CERDAS CERMAT BUDAYA SD DAN SMP													
	- FESTIVAL DRUM BAND PELAJAR SD DAN SMP													
	- LOMBA KARNAVAL BUDAYA (SEPEDA HIAS SD DAN SMP)													
	- LOMBA BUSANA ADAT DAERAH LAKI - LAKI DA PEREMPUAN													
	- LAUNCHING KAMPUNG BUDAYA													
	- FESTIVAL KERAJINAN LOKAL													
	- LOMBA SEKOLAH SEHAT SD TINGKAT KOTA BIMA													
	- LOMBA SEKOLAH SEHAT SMP TINGKAT KOTA BIMA													
2 16 1,01.01 15 03	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal						Jumlah dokumen kebijakan budaya daerah	1 Dokumen		9.768.000	10.256.400			
	- PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG BUDAYA LOKAL													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 16 1,01.01 15 05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya daerah dan antar daerah						Jumlah Dukungan Nilai Budaya	2 Keli			4.930.000	5.176.500		
2 16 1,01.01 15	festival Pelajar						Jumlah Festival Pelajar	10 kegiatan			443.528.000	465.704.400		
2 16 1,01.01 16	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</b>										<b>349.386.500</b>	366.855.825		
1 17 1.17.01	Tutorial Lagu Kebangsaan Indonesia raya						Terseleenggarannya tutorial lagu kebangsaan indonesia raya	1 Kegiatan			-	-		
1 17 1.17.01 16 4	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah						Jumlah sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai cara pengelolaan kekayaan budaya daerah.	1 kegiatan			78.150.000	82.057.500		
1 17 1.17.01	Pemeliharaan Situs Peninggalan Cagar Budaya						Jumlah Situs Peninggalan Cagar Budaya yang dipelihara	1 Kegiatan			65.000.000	68.250.000		
1 17 1.17.01	Penyusunan Buku						Penyusunan Buku	1 Kegiatan			67.052.500	70.405.125		
1 17 1.17.01 16 10	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya						Terseleenggarannya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan kekayaan budaya	2 kali			1.479.000	1.552.950		
1 17 1.17.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya										75.705.000	79.490.250		
	- RAKOR PENGEMBANGAN BUDAYA TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN													
	- SOSIALISASI PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA LOKAL DAERAH													
	- BIMBINGAN TEKNIS AKSARA MBOJO													
1 17 1.17.01	Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air										62.000.000	65.100.000		
	- JURU RAWAT/PELIHARA PENINGGALAN SEJARAH													
	- REHABILITASI/REVITALISASI BARANG-BARANG PENINGGALAN SEJARAH													
	2.16.16		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA</b>	Masyarakat dalam melestarikan budaya	Meningkatnya kerjasama dalam nengembangan budaya	Porsentase Program Pengelolaan Keragaman Budaya	100%				273.744.378	287.431.597		
1 17 1.17.01 17 3	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan						Terkumpulnya bahan dan informasi mengenai budaya dan tradisi yang pernah berkembang di Bima	1 kali dalam setahun			62.610.000	65.740.500	baru	
1 17 1.17.01	Dialog Budaya						Jumlah Dialog Budaya	1 kali dalam setahun			25.295.000	26.559.750	baru	
1 17 1.17.01	Pembinaan sanggar seni dan pengelaran festival tingkat propinsi dan nasional						Jumlah Pembinaan sanggar seni dan pengelaran festival tingkat propinsi dan nasional	1 kali dalam setahun			82.445.000	86.567.250	baru	
1 17 1.17.01	Pegelaran budaya daerah pada even dalam daerah dan luar daerah						Jumlah Pegelaran budaya daerah pada even dalam daerah dan luar daerah	1 kali dalam setahun			32.445.000	34.067.250		
1 17 1.17.01	Bimtek peguyuban						Jumlah Bimtek peguyuban	1 kali dalam setahun			21.770.000	22.858.500		
1 17 1.17.01	Bimterk sanggar seni sekolah dan Masyarakat						Jumlah Bimterk sanggar seni sekolah dan Masyarakat	1 kali dalam setahun			35.466.250	37.239.563		
1 17 1.17.01 17 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya						Terseleenggarannya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	1 kali dalam setahun			13.713.128	14.398.784		
1 17 01.17.01	Kegiatan pengembangan keragaman budaya daerah													
	- DIALOG BUDAYA													
	- BIMTEK SANGGAR SENI SEKOLAH DAN MASYARAKAT													
1 17 01.17.01	Penyelenggaraan festival budaya daerah													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	01	1.01.01	23		- PAGELARAN BUDAYA DAERAH (PENTAS SENI DAERAH) - LOMBA FLS2N SD (SELEKSI TKT. KOTA BIMA) - LOMBA FLS2N SMP (SELEKSI TKT. KOTA BIMA)									
					Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya	Terwujudnya Kebudayaan berbasis Masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai	Meningkatnya dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan					410.000.000	430.500.000	baru
1	01	1.01.01	23	01	Pengembangan Taman Budaya					Pembangunan Taman Budaya		250.000.000	262.500.000	
1	17	1.17.01			- KELANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG SENI DAN BUDAYA									
					Bantuan sanggar seni (Pembelian Alat Kesenian)					Jumlah Bantuan sanggar seni (Pembelian Alat Kesenian)	1 Kegiatan	160.000.000	168.000.000	
1	17	1.17.01	17		PROGRAM FASILITASI PENYELENGGARAAN FESILITAS BUDAYA							115.125.000	120.881.250	
1	17	1.17.01			Pesona Lombok Sumbawa					Jumlah lomba pesona kebudayaan	1 kali dalam setahun	110.195.000	115.704.750	
1	17	1.17.01			Pekan Seni Bali					jumlah pekan seni bali	1 kali dalam setahun	-	-	
1	17	1.17.01			Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya					Terseleenggaranya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	1 kegiatan	4.930.000	5.176.500	
2	17				PERPUSTAKAAN							2.200.000.000	2.310.000.000	
2	17	2.17.01			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							2.200.000.000	2.310.000.000	
2	17	2.17.01	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi	100%		532.000.000	558.600.000	
2	17	2.17.01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	60 surat	70.000.000,00	73.500.000	Lama
										Materai yang tersedia selama 1 tahun	500 lembar			
										Jasa pengiriman/paket	20 paket			
2	17	2.17.01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber day Air dan Listrik					Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bln	20.000.000,00	21.000.000	Lama
2	17	2.17.01	01	03	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional					jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional	4 Unit roda Dua, 1 Unit Roda 3 dan 2 Unit Roda Empat,	20.000.000,00	21.000.000	Lama
2	17	2.17.01	01	04	Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan					Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	4 Org 12 Bln	18.900.000,00	19.845.000	Lama
2	17	2.17.01	01	05	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor					Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	10.000.000,00	10.500.000	Lama
2	17	2.17.01	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor					jumlah alat tulis kantor yang tersedia	40 Jenis	25.000.000,00	26.250.000	Lama
2	17	2.17.01	01	07	Penyediaan barang Cetak dan pengadaan					jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	7 Jenis; 1.000 Lbr 48 Dok	10.698.000,00	11.232.900	Lama
2	17	2.17.01	01	08	Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor					jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	7 Jenis	5.000.000,00	5.250.000	Lama

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
2 17 2.17.01 01 09	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor						Jumlah perlengkapan kantor	6 Jenis			54.000.000,00	56.700.000	Lama	
2 17 2.17.01 01 10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-Undangan						Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	5 media			12.000.000,00	12.600.000	Lama	
2 17 2.17.01 01 11	Penyediaan Makanan dan Minuman						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bulan			25.000.000,00	26.250.000	Lama	
2 17 2.17.01 01 12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan			200.000.000,00	210.000.000	Lama	
2 17 2.17.01 01 13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan			61.402.000,00	64.472.100	Lama	
2 17 2.17.01 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>665.000.000</b>	<b>698.250.000</b>		
2 17 2.17.01 02 01	Pembangunan Gedung Kantor						Jumlah pembangunan depo arsip	1 unit			550.000.000	577.500.000	Lama	
2 17 2.17.01 02 02	Pengadaan Meubel Kantor						Jumlah Pengadaan Meubel Kantor	5 Unit			20.000.000	21.000.000	Lama	
2 17 2.17.01 02 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional						jumlah sepeda motor	2 unit			50.000.000	52.500.000	Lama	
2 17 2.17.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor						Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	2 Kali			10.000.000	10.500.000	Lama	
2 17 2.17.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6 unit			25.000.000	26.250.000	Lama	
2 17 2.17.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor						Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Kantor	4 Kali			10.000.000	10.500.000	Lama	
2 17 2.17.01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin</b>	<b>0%</b>					<b>20.000.000</b>	<b>21.000.000</b>		
2 17 2.17.01 03 01	Pengadaan pakaian kerja lapangan						Jumlah Pakaian Olahraga	40 Stel			20.000.000	21.000.000	Lama	
1 24 1.24.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional</b>	<b>30%</b>					<b>125.000.000</b>	<b>52.500.000</b>		
1 24 1.24.01 06 02	Pendidikan dan pelatihan formal						Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis	5 org			50.000.000	52.500.000	Lama	
1 24 1.24.01 06 04	Konsultasi dan Studi Banding										75.000.000		Lama	
2 17 2.17.01 07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>					<b>110.000.000</b>	<b>115.500.000</b>		
2 17 2.17.01 07 01	Penyusunan Laporan Keuangan semester						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen			10.000.000	10.500.000	Lama	
2 17 2.17.01 07 02	Penyusunan Laporan prognosis realisasi anggaran						Jumlah Laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen			10.000.000	10.500.000	Lama	
2 17 2.17.01 07 03	Penyusun pelaporan keuangan Akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen			20.000.000	21.000.000	Lama	
2 17 2.17.01 07 04	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen			40.000.000	42.000.000	Lama	
2 17 2.17.01 07 05	Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen			30.000.000	31.500.000	Lama	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
2 18 2.17.01 16	PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN/ ARSIP DAERAH				Pembangunan Pendidikan	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Jumlah dokumen/arsip daerah yang tersimpan/terekam	100 dok			48.000.000	50.400.000				
2 18 2.17.01 16 01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip									Jumlah Rak penyimpanan arsip	2 buah	10.000.000	10.500.000	Baru			
2 18 2.17.01 16 04	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data									Dokumen arsip elektronik (e-arsip)	1 jaringan	20.000.000	21.000.000	Baru			
2 18 2.17.01 16 05	Pengolahan arsip hasil akuisisi									jumlah arsip dari SKPD yang ditarik untuk diolah	1000 lembar	18.000.000	18.900.000	Baru			
2 17 2.17.01 17	PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN PRASARANA KEARSIPAN				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dibina	12 SKPD			5.000.000	5.250.000				
2 17 2.17.01 17 01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip									Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	1 tahun	5.000.000	5.250.000	Lama			
2 17 2.17.01 18	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI KEARSIPAN							Persentase SKPD, ORMAS, ORPOL yang				165.000.000	173.250.000				
2 17 2.17.01 18 03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta									Jumlah Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta, Pendampingan arsip	1 kali	45.000.000	47.250.000	Lama			
2 17 2.17.01 18 04	Bintek Kearsipan pada instansi pemerintah/swasta									jumlah tenaga pengurus arsip di SKPD yang kompeten	30 orang	45.000.000	47.250.000	Baru			
2 17 2.17.01 18 05	Pelaksanaan Audit pengawasan									% Penerapan arsip secara baku	30%	35.000.000	36.750.000	Baru			
2 17 2.17.01 18 06	Penyusunan Produk Hukum Perpustakaan dan Kearsipan									Perda Perpustakaan dan Kearsipan	1 perda	40.000.000	42.000.000	Baru			
2 17 2.17.01 19	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Jumlah SKPD yang dibina	12 SKPD			530.000.000	430.500.000				
2 17 2.17.01 19 01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar									- Lomba Duta Baca	1 kegiatan	100.000.000	105.000.000	Lama			
										- Lomba Duta Cerita	1 kegiatan						
										- Lomba Menggambar	1 kegiatan						
										- Lomba Mendongeng	1 kegiatan						
2 17 2.17.01 19 02	Pengembangan minat dan budaya baca									Jumlah pengunjung	3000 orang	30.000.000	31.500.000	Lama			
2 17 2.17.01 19 03	Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat									Jumlah Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat	12 bulan	50.000.000	52.500.000	Lama			
2 17 2.17.01 19 08	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca									Jumlah Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	2 kali	-	-				
2 17 2.17.01 19 09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah									Jumlah bahan pustaka perpustakaan daerah	3000	200.000.000	210.000.000	Lama			
2 17 2.17.01 19 10	Monitoring dan Evaluasi									pengelolaan arsip secara baku	30	20.000.000	21.000.000	Lama			
2 17 2.17.01 19 11	Digitalisasi e-pustaka									Jumlah kegiatan Digitalisasi e-pustaka	1 keg	-	-				
2 17 2.17.01 19 12	Pengolahan Bahan Perpustakaan									jumlah buku yang diolah	550 judul	10.000.000	10.500.000	Baru			
2 17 2.17.01 19 13	Survey kepuasan pengunjung									% kepuasan pengunjung	100%	10.000.000		Baru			
2 17 2.17.01 19 14	Pameran Buku									jumlah pengunjung	3000	20.000.000		Baru			
2 17 2.17.01 19 15	Bintek Pengembangan SDM Perpustakaan									sdm pengelola yang kompeten	50 ong	50.000.000		Baru			
2 17 2.17.01 19 16	Pelatihan Story Telling									tenaga terampil mendongeng	40 orang	40.000.000		Baru			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3	URUSAN PILIHAN										19.201.857.116	20.204.059.967		
3 01	KELAUTAN DAN PERIKANAN										3.646.941.800	3.373.700.000		
3 01 3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN										3.646.941.800	3.373.700.000		
3 01 3.01.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	%Terlayannya kebutuhan administrasi	100%					525.525.800	389.900.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
3 01 3.01.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat							Terseleenggaranya jasa surat menyurat:	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%	2.500.000	1.500.000	Kegiatan sedang berjalan
								Belanja Pengiriman Surat Dinas ke Provinsi	48 Eks/Bulan					
								Pengiriman Surat Dinas ke Pusat	48 Eks/Bulan					
3 01 3.01.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik							Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi speedy, sumberdaya air dan listrik	3 jenis pelayanan/12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional	100%	67.000.000	55.000.000	Kegiatan sedang berjalan
								Surat Kabar/Majalah	14 jenis/ 12 bulan + Iklan					
3 01 3.01.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional							Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Pelayanan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan	100%	39.000.000	17.000.000	Kegiatan sedang berjalan
								Jasa Service kendaraan roda 4	16 unit					
								Jasa Service kendaraan roda 2	23					
								Pajak Kendaraan Bermotor roda 4	4 unit					
								Pajak Kendaraan Bermotor roda 2	23 unit					
3 01 3.01.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan							Terseleenggaranya jasa administrasi keuangan	6 jenis jasa	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	44.400.000	44.400.000	Kegiatan sedang berjalan
3 01 3.01.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor							Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	50 jenis ATK,	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan	100%	35.963.100	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan
								Materai @ Rp. 6.000	350 Lmbr					
								Materai @ Rp. 3.000	350 Lmbr					
3 01 3.01.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan							Terlaksananya cetakan, penggandaan dan penjilidan	3 jenis pelayanan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	20.000.000	17.000.000	Kegiatan sedang berjalan
								foto copy dokumen administrasi umum	15.000n lbr					
								foto copy dokumen administrasi	10.000 lbr					
								foto copy dokumen administrasi kepegawaian	5.000 lbr					
								Penjilidan	300 jilid					
3 01 3.01.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman							Terlaksananya penyediaan makan dan minum	1 Pelayanan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.000.000	25.000.000	Kegiatan sedang berjalan
								makan dan minum harian pegawai/Kegiatan	1,034 Org/Hr/Bln					
								makan dan minum rapat	385 Org/Bln					
								makan dan minum tamu	330 Org/Bln					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
									(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
3 01 3.01.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Pusat dan Provinsi	40 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	256.662.700	175.000.000	Kegiatan sedang berjalan					
3 01 3.01.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Terseleenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah	60 laporan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	30.000.000	25.000.000	Kegiatan sedang berjalan					
3 01 3.01.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100%					244.000.000	171.200.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN				
3 01 3.01.01 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional						Terlaksananya pengadaan Kendaraan dinas/operasionalr	1 unit roda2	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.500.000	0	Kegiatan sedang berjalan					
3 01 3.01.01 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Thn	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	17.000.000	15.000.000	Kegiatan sedang berjalan					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 01 3.01.01 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	AC 1 PK 4 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 5 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57.500.000	70.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 10	Pengadaan mebeleur						Terlaksananya Pengadaan mebeleur	28 Unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	67.000.000	20.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Thn	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	20.000.000	10.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1 Thn	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas	100%	65.000.000	56.200.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Kota Bima	Meningkatnya disiplin aparatur	100%					30.000.000	25.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 03 05	Pengadaan pakaian dinas harian (PDH)						Tersedianya pakaian dinas harian (PDH)	50 Stel	Dukungan terhadap peningkatan disiplin aparatur		30.000.000	25.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Meningkatnya kapasitas sumberdaya	100%					17.000.000	20.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan						Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan	1 Keg	Terlaksananya sosialisasi peraturan Perundang-undangan	1 Keg	17.000.000	20.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 01 3.01.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Meningkatnya kualitas dan kuantitas laporan capaian kinerja dan keuangan	Dokumen					170.000.000	141.500.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Indeks SAKIP (nilai)	51,51								
					Opini BPK terhadap LKPD	WTP								
					Persentase SKPD dengan indeks SAKIP Baik	64,71								
3 01 3.01.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD						Terlaksananya penyusunan laporan keuangan sementara	1 Dok	Tersedianya dokumen perencanaan	1 Dok	15.000.000	10.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Terlaksananya penyusunan laporan keuangan sementara	1 Dok	Tersedianya dokumen laporan	1 Dok	20.000.000	15.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						Terlaksananya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	Tersedianya dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	1 Dok	15.000.000	15.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Terlaksananya penyusunan Dokumen Laporan Tahunan	1 Dok	Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	15.000.000	12.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Terlaksananya penyusunan dokumen Rancangan Renstra 2019-2021 Renja/DPA dan DPPA	5 Dok	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	4 Dok	75.000.000	50.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Terlaksananya penyusunan Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	2 Dok	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	2 Dok	30.000.000	39.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang mengalami peningkatan kelas	18 klp					0	46.100.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					a. Kelompok utama	8 klp								
					b. Kelompok madya	5 klp								
					c. Kelompok utama	5 klp								
3 01 3.01.01 15 03	Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKP						Jumlah kelompok yang dibina dan didampingi (PUMM Budidaya)	18 klp	Terlaksananya Pendampingan pada kegiatan yang bersumber dari Dana APBN	1 Kegiatan	0	46.100.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat	Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan	Kota Bima	Jumlah Produksi Perikanan tangkap	1995,34 ton					30.000.000	25.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 19 02	Koordinasi Hari Nusantara						Cakupan Koordinasi Hari Nusantara	1 Kegiatan	Terlaksananya Koordinasi Hari	1 Kegiatan	30.000.000	25.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)
3 01 3.01.01 20	Program pengembangan budidaya perikanan				Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan	Kota Bima	Jumlah Produksi perikanan budi daya	951,69 ton			835.525.000	830.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3 01 3.01.01 20 01	Pengembangan bibit ikan unggul							Jumlah Bibit Ikan Unggul yang tersedia		3 paket	Tersedianya Bibit Ikan Unggul, (nila, lele, induk ikan koi dan pakan)	100%	250.000.000	250.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
3 01 3.01.01 20 02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan							Jumlah Kelompok Tani Pembudidaya Ikan yang didampingi		5 kelompok	Terlaksananya Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (penyuluhan teknis ke kelompok tani budidaya)	100%	30.000.000	20.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
3 01 3.01.01 20 06	Peng. Sarana Pengembangan Kebun Rumput Laut							Jumlah Rumput Laut yang dikembangkan		1 paket	Terlaksananya Pengembangan Kebun Rumput Laut (Bibit Rumput Laut) di so Ati kel. Kolo	100%	50.000.000	60.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
3 01 3.01.01 20 07	Pembangunan/Rehab Sarana dan Prasarana Fisik UPR & HSRT							Cakupan biaya operasional UPR & HSRT		48 orang/bln	Tersedianya operasional UPR & HSRT (Rehab. Kolam Budidaya ikan dan sumur bor)	100%	100.000.000	0	Kegiatan sedang berjalan		
3 01 3.01.01 20 09	Peng. Sarana Prasarana Penunjang Perikanan Budidaya (DAK)							Jumlah Sarana Prasarana penunjang perikanan budidaya yang tersedia		1 paket	Tersedianya Sarana Prasarana Penunjang Perikanan Budidaya (paket budidaya nila dan paket budidaya lele kolam terpal)	1 Pkt	405.525.000	500.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
3 01 3.01.01 21	Program pengembangan perikanan tangkap				Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan	Kota Bima	Jumlah produksi perikanan tangkap	1995,34 ton			1.264.891.000	1.560.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3 01 3.01.01 21 01	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap							Jumlah nelayan yang mendapatkan kartu asuransi nelayan		50 Orang	Terlaksananya Sosialisasi Asuransi	50 Orang	30.000.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
3 01 3.01.01 21 05	Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap							Jumlah lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap yang bina		5 koperasi/KUB	Terlaksananya Pengembangan lembaga usaha perdagangan hasil	100%	30.000.000	30.000.000	Kegiatan sedang berjalan		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 01 3.01.01 21 08	Peng. Sarana Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap (DAK)						Jumlah Sarana Prasarana penunjang perikanan tangkap yang tersedia	Pembangunan Kapal < 3 GT; Pengadaan Alat Selam	Tersedianya Sarana Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap	100%	1.204.891.000	1.500.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 22	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan	Kota Bima	Jumlah kelompok yang mengalami peningkatan kelas	18 klp					50.000.000	0		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					- Jumlah kelompok pemula	8 klp								
					- Jumlah kelompok madya	5 klp								
					- Jumlah kelompok utama	5 klp								
3 01 3.01.01 22 02	Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)						Terseleenggaranya Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)	1 Kegiatan	Data potensi perikanan	1 dokumen	50.000.000	0	Kegiatan sedang berjalan	
3 01 3.01.01 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatkan produksi Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan		Jumlah produk olahan serta tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun						480.000.000	165.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3 01 3.01.01 23 01	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan						Jumlah kelompok poklaksar yang didampingi	66 klpk	Terlaksananya Pembinaan Kelompok Pengolahan Ikan	100%	30.000.000	0	Kegiatan sedang berjalan	
							Promosi hasil perikanan tingkat kota Bima (Hut Kota Bima)	1 kali	Terlaksananya a promosi hasil perikanan		25.000.000			
3 01 3.01.01 23 06	Penyediaan sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hsl Perikanan						Cakupan biaya operasional sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hasil Perikanan	1 Pkt dan 66 kelompok	Tersedianya operasional sarana prasarana pemasaran, pengolahan hasil Perikanan dan bantuan peralatan pengolahan hasil perikanan (Paket pengolahan Abon Ikan, Paket Pengolahan Krupuk Ikan, Paket pengolahan rumput laut, paket pengolahan bandeng presto,	100%	225.000.000	45.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 01 3.01.01 23 07	Penyelenggaraan Kegiatan Forum Konsumsi Ikan (FORIKAN)									Jumlah peserta lomba masak serba ikan, dan jumlah peserta demo masak serba ikan	3 Kegiatan	100%	200.000.000	120.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
3 02	PARIWISATA											3.268.000.000	3.431.400.000				
3 02 3.02.01	DINAS PARIWISATA											3.268.000.000	3.431.400.000				
3 02 3.02.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	9 Pelayanan			1.150.000.000	1.165.500.000	Program Sedang Berjalan	DKPP		
3 02 3.02.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat											40.000.000	42.000.000				
3 02 3.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Kota Bima	Terciptanya kelancaran komunikasi dan terpenuhinya kebutuhan air dan listrik	1 Pelayanan			30.000.000	31.500.000				
3 02 3.02.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Kota Bima	Tersedianya sarana prasarana kendaraan dinas yang baik	1 Pelayanan			20.000.000	21.000.000				
3 02 3.02.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Kota Bima	Tersedianya jasa administrasi kantor	1 Pelayanan			40.000.000	42.000.000				
3 02 3.02.01 01 08	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor							Terciptanya kondisi kantor yang bersih	1 Pelayanan			20.000.000	21.000.000				
3 02 3.02.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Kota Bima	Tersedianya alat tulis kantor	1 Pelayanan			84.000.000	88.200.000				
3 02 3.02.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Kota Bima	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan			30.000.000	31.500.000				
3 02 3.02.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Pelayanan			25.000.000	26.250.000				
3 02 3.02.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Pelayanan			61.000.000	64.050.000				
3 02 3.02.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Kota Bima	Tersedianya makan-minum yang cukup untuk kegiatan dinas	1 Pelayanan			20.000.000	21.000.000				
3 02 3.02.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Pelayanan			700.000.000	735.000.000				
3 02 3.02.01 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah						Kota Bima	Terpenuhinya kebutuhan Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	1 Pelayanan			80.000.000	84.000.000				
3 02 3.02.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana	4 unit			102.000.000	107.100.000	Program Sedang Berjalan			
3 02 3.02.01 02 10	Pengadaan Meubeler							Terpenuhinya kebutuhan meubeler kantor	1 Kegiatan			120.000.000	126.000.000				



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 02 3.02.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Kota Bima			Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1 keg		20.000.000	21.000.000			
3 02 3.02.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	1 keg		57.000.000	59.850.000			
3 02 3.02.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Kota Bima			Tersedianya kelengkapan& terpeliharanya kendaran operasional	1 keg		25.000.000	26.250.000			
3 02 3.02.01 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik				Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin			43.000.000	45.150.000			
3 02 3.02.01 04 01	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						Persentase pegawai yang memakai seragam dinas lengkap	100%		25.000.000	26.250.000			
3 02 3.02.01 04 02	Pengadaan Pakaian olah raga						Persentase pegawai yang memakai seragam olahraga	100%		18.000.000	18.900.000			
3 02 3.02.01 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik				terselenggaranya kekompatan dan disiplin pegawai	2 keg		70.000.000	73.500.000	Program Sedang Berjalan		
3 02 3.02.01 05 01	Pendidikan dan peltihan formal						Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan formal	12%		40.000.000	42.000.000			
3 02 3.02.01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			Kota Bima			Tersedianya kebutuhan pegawai akan pakaian dinas dan perlengkapannya	1 keg		30.000.000	31.500.000			
3 02 3.02.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik				Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	10 Keg		135.000.000	141.750.000	Program Sedang Berjalan		
3 02 3.02.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kota Bima			Terciptanya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 keg		25.000.000	26.250.000			
3 02 3.02.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Kota Bima			Terciptanya laporan keuangan semesteran	1 keg		10.000.000	10.500.000			
3 02 3.02.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran						Terciptanya laporan prognosis relisasi anggaran	1 Kegiatan		15.000.000	15.750.000			
3 02 3.02.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kota Bima			Terciptanya laporan keuangan akhir tahun	1 keg		10.000.000	10.500.000			
3 02 3.02.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah			Kota Bima			Terciptanya peyusunan RKA/DPA SKPD	3 keg		30.000.000	31.500.000			
3 02 3.02.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD			Kota Bima			Terciptanya peyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD	3 keg		45.000.000	47.250.000			
3 02 3.02.01 15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA</b>	Kesejahteraan Sosial	Berkembangnya jumlah kunjungan wisata				Persentase pertumbuhan wirausaha pariwisata			998.000.000	1.047.900.000	Program Sedang Berjalan		
3 02 3.02.01 15 01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata			Provinsi, Nasional dan Internasional			Untuk Mengetahui pasar promosi dan pemasaran objek	3 kali kegiatan (pasar lokal, nusantara dan internasional )		0	0			
3 02 3.02.01 15 02	Peningkatan pemanfaatan teknologi Informasi dalam pemasaran pariwisata			Kota Bima			Jumlah kerjasama teknologi informasi wisatawan	2 kali kegiatan dalam 1 tahun		40.500.000	42.525.000			
3 02 3.02.01 15 03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata			Kota Bima, Regional NTB dan			Jumlah kerjasama promosi wisatawan			70.000.000	73.500.000			
3 02 3.02.01 15 04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata			Kota Bima			Jumlah pelaksanaan koordinasi antara sektor	pada 4 Dinas/Badan /Kantor dalam 1 tahun		17.500.000	18.375.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 02 3.02.01 15 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri			Nasional (Apeksi, PKB, Semipro, Sail Komodo) dan Internasional 1 (ITB - Berlin)			Jumlah media promosi	5 kali dalam setahun (Nasional dan internasional)			240.000.000	252.000.000		
3 02 3.02.01 15 06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata			Kota Bima, Regional NTB dan Nasional			Jumlah laporan monev	1 Dokumen			-	0		
3 02 3.02.01 15 10	MICE			Kota Bima			Jumlah laporan kegiatan	1 Dokumen			220.000.000	231.000.000		
3 02 3.02.01 15 11	Partisipasi pelestarian dan aktualisasi atraksi wisata budaya						Jumlah atraksi wisata budaya				210.000.000	220.500.000		
3 02 3.02.01 15 12	Facilitasi dan kerjasama penyelenggaraan festival atraksi kesenian tradisional			Kota Bima			Jumlah festival atraksi kesenian tradisional				200.000.000	210.000.000		
3 02 3.02.01 16	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah</b>	<b>Terbangunnya Fasilitas Pariwisata</b>		<b>Persentase pengembangan destinasi ODTW</b>						<b>2.025.000.000</b>	<b>2.076.250.000</b>	<b>gram Sedang Berj</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima</b>
3 02 3.02.01 16 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata			Obyek Wisata Kota Bima (Kawasan wisata Kolo, Pantai Lawata dan Pacuan Kuda)			Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang ditata	3 Lokasi			1.000.000.000	1.000.000.000		
3 02 3.02.01 16 04	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha			Lembaga/Dunia Usaha Kota Bima			terjalinya kerjasama dengan lembaga / dunia usaha	6 usaha jasa pariwisata			15.000.000	15.750.000		
3 02 3.02.01 16 05	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata			Destinasi Wisata Kota Bima			Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan pengembangan destinasi pariwisata	1 kali dalam setahun (pada Masing-masing Lokasi)			15.000.000	15.750.000		
3 02 3.02.01 16 07	Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi			Kota Bima			Tersosialisasinya kegiatan pengawasan standarisasi pada kegiatan usaha jasa pariwisata	2 kali dalam setahun			25.000.000	26.250.000		
3 02 3.02.01 16 08	Pembangunan Sarana dan prasarana pariwisata						Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun baru	1 Lokasi			800.000.000	840.000.000		
3 02 3.02.01 16 09	Pendataan dan perencanaan site, Destinasi, ODTW dan kawasan pariwisata			Kota Bima			adanya dokumen serta data akurat tentang informasi objek wisata daerah/lokal	1 Program dalam 1 Tahun			10.000.000	10.500.000		
3 02 3.02.01 11	Koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pengelolaan destinasi dan ODTW						Jumlah koordinasi disektor pariwisata, pengelolaan destinasi dan ODTW	6 Kali			40.000.000	42.000.000		
3 02 3.02.01 12	Pengelolaan atraksi, destinasi dan ODTW						Jumlah kunjungan wisatawan				70.000.000	73.500.000		
3 02 3.02.01 13	Monev Perencanaan dan pembangunan destinasi, ODTW dan Kawasan						Laporan monev pembangunan destinasi ODTW	1 Dok			50.000.000	52.500.000		
3 02 3.02.01 17	<b>PROGRAM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN KEMITRAAN PARIWISATA</b>	<b>Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</b>		<b>Jumlah lembaga pelaku industri pariwisata</b>						<b>245.000.000</b>	<b>257.250.000</b>	<b>gram Sedang Berj</b>	<b>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima</b>
3 02 3.02.01 17 01	Pengembangan dan penguatan informasi dan database			Kota Bima		1 pelayanan	Adanya dokumen serta data akurat tentang kemitraan pariwisata	5 Kegiatan			20.000.000	21.000.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)					(10)	(11)
3 02 3.02.01 17 03	Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya						Regional dan Nasional	1 Pelayanan	Terwujudnya kemampuan SDM BUDPAR dalam mengelola BUDPAR dengan baik dan benar	4 orang Staf setiap tahunnya (dua orang) pada setiap kegiatan		40.000.000	42.000.000				
3 02 3.02.01 17 04	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya						Kota Bima	1 Pelayanan	Tersedianya sarana prasarana pendukung pada obyek wisata	1 kali dalam 1 tahun		30.000.000	31.500.000				
3 02 3.02.01 17 05	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata						Kota Bima	1 Pelayanan	Terbentuknya mitra dan juga adanya pendukung penyelenggaraan kepariwisataan	7 sektor kemitraan		20.000.000	21.000.000				
3 02 3.02.01 17 06	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan						Dinas/Badan/ Kantor Lingkup Pemerintah Kota Bima	1 pelayanan	Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan peningkatan kemitraan secara terpadu	1 kali dalam setahun (pada Masing-masing usaha jasa pariwisata)		20.000.000	21.000.000				
3 02 3.02.01 17 07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata						Kota Bima Regional dan Nasional	1 pelayanan	Tersedianya SDM Bidang Pariwisata yang profesional	4 orang Staf setiap tahunnya		20.000.000	21.000.000				
3 02 3.02.01 17 08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata						Kota Bima	1 Pelayanan	Terbentuknya kelompok-kelompok sadar wisata pada masyarakat	3 kegiatan dalam 1 tahun (Pesta Rakyat ) dalam HUT Kota Bima		30.000.000	31.500.000				
3 02 3.02.01 17 09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Kota Bima	1 pelayanan	Terkontrolnya pelaksanaan program / kegiatan secara terpadu	1 kali dalam setahun (pada Masing-masing sektor kemitraan)		15.000.000	15.750.000				
3 02 3.02.01 17 10	Pembinaan terhadap Mitra						Kota Bima	1 Pelayanan	meningkatnya pemahaman Mitra terhadap kegiatan pariwisata sehingga mendukung pelaksanaan kegiatan kepariwisataan	2 angkatan dalam 1 tahun (masing2 usaha jasa) dan pembinaan untuk peningkatan ekonomi kreatif kepariwisataan		30.000.000	31.500.000				
3 02 3.02.01 17 11	Sosialisasi Peraturan dan undang-undang Usaha Pariwisata						Kota Bima	1 Pelayanan	Terwujudnya masyarakat yang memahami peraturan usaha jasa pariwisata	2 kali 1 tahun pada 2 kelompok usaha jasa pariwisata		20.000.000	21.000.000				
<b>3 03</b>	<b>PERTANIAN</b>											<b>7.064.454.107</b>	<b>6.696.419.967</b>				
3 03 3.03.01	DINAS PERTANIAN											7.064.454.107	6.696.419.967				
3 03 3.03.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%			774.280.000	974.236.790		DINAS PERTANIAN		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 03 3.03.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Terlaksananya pelayanan surat menyurat	60 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	1.380.000	1.794.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Tersedianya pelayanan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 Jenis Jasa Pelayanan/ bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	93.840.000	121.992.000	Kegiatan sedang berjalan	
									Rekening Telepon & Faximile	12 bulan				
									Rekening Air Puskesmas RasanaE Timur	12 bulan				
									Rekening Listrik Kantor Dinas Pertanian	12 bulan				
									Rekening Listrik Puskesmas RasanaE Timur	12 bulan				
									Rekening Listrik Puskesmas RasanaE Barat	12 bulan				
									Rekening Listrik Puskesmas Asakota	12 bulan				
									Rekening Listrik Kantor BPP Kec. Rasanae Timur	12 bulan				
									Rekening Listrik Kantor BPP Kec. Asakota	12 bulan				
									Rekening Listrik Kantor BPP Kec. Raba	12 bulan				
									Rekening Listrik Kantor BPP Kec. Mpunda	12 bulan				
									Belanja Internet Kantor Dinas Pertanian	12 bulan				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
										Belanja Internet Kantor BPP Kec. Rasanae Timur	12 bulan					
										Belanja Internet Kantor BPP Kec. Asakota	12 bulan					
										Belanja Internet Kantor BPP Kec. Raba	12 bulan					
										Belanja Internet Kantor BPP Kec. Mpunda	12 bulan					
3	03	3.03.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional					Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	27 STNK	Pajak Kendaraan Bermotor	27 STNK	13.000.000	19.360.250	Kegiatan sedang berjalan
										Jasa service kendaraan roda 4	1 unit					
3	03	3.03.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan					Terlaksananya administrasi keuangan	7 orang/bulan	Pejabat Penatausahaan Keuangan	1 orang/bulan	74.000.000	96.086.640	Kegiatan sedang berjalan
										Bendahara Pengeluaran	1 orang/bulan					
										Pembantu Bendahara Pengeluaran	1 orang/bulan					
										Bendahara Penerimaan	1 orang/bulan					
										Pemegang umum Barang	1 orang/bulan					
										Pengurus Barang	1 orang/bulan					
										Pembuat Daftar Gaji	1 orang/bulan					
3	03	3.03.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor					Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor/ Perawatan Halaman Kantor	5 orang/ 12 bulan	Jasa Angkut Sampah	1 orang/bulan	27.600.000	35.880.000	Kegiatan sedang berjalan
										Jasa Tenaga Kebersihan kantor Dinas Pertanian	1 orang/bulan					
										Jasa Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam Pasar Hewan	1 orang/bulan					
										Jasa Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam Rumah potong Hewan (RPH)	1 orang/bulan					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3	03	3.03.01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	2 jenis jasa	Jasa Tenaga Kebersihan dan Jaga Malam puskesmas Rasanae Timur 1 orang/bulan Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 2 unit Perbaikan Komputer PC 8 unit Perbaikan Laptop/Note book 8 unit	10.100.000	13.156.000	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Tersedianya Alat-alat tulis kantor	1 tahun	ATK Dinas Pertanian Kota Bima 1 unit dan 12 bulan ATK BPP (4 BPP/Kecamatan) 4 unit dan 12 bulan ATK Puskesmas (3 Puskesmas/Kecamatan) 3 unit dan 12 bulan ATK Rumah Potong Hewan/ RPH 1 unit dan 12 bulan	95.000.000	135.148.000	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	Belanja Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera/ Balihho 1 tahun Jasa Publikasi/iklan 25 kali Cetak Amplop Berkop Uk.23 1/2 x 10 1/2 cm isi 100 lembar 25 kotak Cetak Blangko kwitansi bahan kertas NCR Warna - warni Uk. 1/2 folio 50 buku Cetak Blangko SPPD Bahan Kertas HVS Warna-Warni Uk. folio isi 50 set 20 blok Penggandaan /foto copy 85.000 lembar Penjilidan Laporan 180 buku/bulan	50.000.000	67.195.765	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 03 3.03.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor	1 tahun	Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1 tahun	39.000.000	5.122.468	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 tahun	Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1 tahun	7.000.000	9.252.854	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6 Media	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan	100%	3.360.000	4.368.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Tersedianya bahan makanan dan minuman	11 Bulan	Makanan dan Minuman Rapat bulanan	30 orang/bulan	19.000.000	22.406.313	Kegiatan sedang berjalan	
									makanan dan Minuman Tamu	25 orang/bulan				
3 03 3.03.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	1 Tahun	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	300.000.000	390.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Terlaksananya koordinasi dalam daerah	1 Tahun	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Puskesmas	3 Poskeswan/ Tahun	41.000.000	52.474.500	Kegiatan sedang berjalan	
									Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Pasar Hewan	1 Tahun				
									Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di RPH	1 Tahun				
									Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kantor BBP Kec. Rasanae Timur	1 Tahun				
									Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kantor BBP Kec. Asakota	1 Tahun				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
										onitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kantor BBP Kec. Raba	1 Tahun				
										Monitoring dan Evaluasi Kegiatan di Kantor BBP Kec. Mpunda	1 Tahun				
3	03	3.03.01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Porsentase Capaian Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%			487.095.000	189.086.040		DINAS PERTANIAN
3	03	3.03.01	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Terlaksananya sistim pelayanan yang cepat dan lancar kepada masyarakat	5 unit kendaraan roda 2	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	5 unit kendaraan roda 2	149.095.000	0	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor			Terciptanya kondisi lokasi kerja yang nyaman	2 paket	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	25.000.000	32.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Terpenuhinya Peralatan Penunjang Pelaksanaan Pekerjaan Administrasi Kantor	10 unit	Computer/P/C	2 unit	53.000.000	70.850.000	Kegiatan sedang berjalan	
										Computer Notebook (Laptop)	5 unit				
										Printer	5 unit				
3	03	3.03.01	02	10	Pengadaan mebeleur			Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan administrasi kantor	2 unit Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	8.000.000	10.400.000	Kegiatan sedang berjalan	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 03 3.03.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Lancarnya kendaraan operasional pelaksanaan kegiatan lapangan dinas/kantor	4 unit	Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	57.000.000	75.336.040	Kegiatan sedang berjalan	
									Sopir Kantor	1 orang/ 1 tahun				
									suku Cadang Roda 4 Kepala Dinas	1 unit dan 1 tahun				
									suku Cadang Roda 4 Operasional (PickUp)	1 unit dan 1 tahun				
									suku Cadang Roda 4 Operasional (Keswan Kesmavet)	1 unit dan 1 tahun				
3 03 3.03.01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor						Penyediaan Ruang Kerja Untuk Pelayanan Publik Yang Baik dan Nyaman	1 Unit	Rehabilitasi Ruangan Kerja Kantor Dinas Pertanian Kota Bima (kantor induk)	100%	195.000.000	0	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Meningkatnya disiplin pakaian dinas aparatur	90%					79.625.000	30.000.000		DINAS PERTANIAN
3 03 3.03.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						Terpenuhinya kebutuhan kebutuhan pakaian dinas harian kantor	1 Paket	Dukungan terhadap peningkatan disiplin aparatur	100%	79.625.000	30.000.000		
3 03 3.03.01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase PNS yang mengikuti diklat	100%					52.000.000	66.976.000		DINAS PERTANIAN
3 03 3.03.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal						Pelatihan Peningkatan Keterampilan Tekhnis Aparatur	5 orang dalam 1 tahun	Dukunga terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Kontribusi/ Kepesertaan)	100%	30.000.000	59.800.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan						Sosialisasi Peraturan Daerah	1 kali 75 Orang	Sosialisasi Peraturan Daerah	1 kali	16.000.000			
3 03 3.03.01 05 05	Pelaksanaan Penilaian AKJG						Penilaian angka kredit jabatan fungsional	1 Keg.	Dukunga terhadap Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	6.000.000	7.176.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
3 03 3.03.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan				Reformasi Birokrasi dan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Kota Bima	Jumlah Dokumen yang harus	100%				107.000.000	138.547.250		DINAS PERTANIAN	
3 03 3.03.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									Tertibnya sistim admistrasi, data dan pelaporan	2 Keg dan 2 dokumen	Tindak Lanjut Temuan BPK Lingkup Dinas Pertanian Kota Bima	1 laporan	16.000.000	23.247.250	Kegiatan sedang berjalan	
												Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pertanian Kota Bima	1 kegiatan				
3 03 3.03.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									Tersedianya laporan keuangan semester	1 Dok.	Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran	100%	8.000.000	10.400.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok.	Tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	100%	8.000.000	10.400.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah									Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	5 Dok.	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran (RKA SKPD Tahun 2018, DPA SKPD Tahun 2018, DPPA 2017, Renstra 2019-2023, RENJA SKPD Tahun 2019,	100%	50.000.000	62.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD									Tersusunnya LAKIP dan LPPD Tahun Anggaran 2018	2 Dok.	Tersedianya dokumen perencanaan dan pengendalian (Dokumen LKIP Tahun 2017, Dokumen LPPD Tahun 2017)	100%	25.000.000	32.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani				Pembangunan ekonomi	Meningkatnya produksi pertanian	Kota Bima	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	29%				473.000.000	474.642.125		DINAS PERTANIAN	
3 03 3.03.01 15 01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis									Jumlah petani yang terlatih	20 orang	Meningkatnya ketrampilan petani dan pelaku agribisnis	20 orang	25.000.000	35.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 03 3.03.01 15 02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis						Jumlah LAKU dan Rembug Tani	4 kegiatan	terlaksananya kegiatan Pertemuan Latihan dan kunjungan (LAKU) Kegiatan rembug Tani	5 kali	125.000.000	203.349.900	Kegiatan sedang berjalan	
									Benih Padi	120 kg/ha				
									Pupuk Urea	800 kg/ha				
									Pupuk NPK	800 kg/ha				
									Pupuk	2,000 kg/ha				
									Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 tahun				
3 03 3.03.01 15 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani						Jumlah kelompok tani yang berpartisipasi	15 Kelompok	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani, ternak dan perkebunan	15 Kelompok	8.000.000	11.010.675	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 15 06	Pelaksanaan PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan						Jumlah kelompok tani yang berpartisipasi	4 Kelompok	Terlaksananya PEDANA PENAS dan Kontak Tani Andalan	4 Kelompok	250.000.000	112.640.775	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 15 07	Pelaksanaan Lomba Kelompok Tani, Petani, Kelompok PUAP dan Pekarangan						Jumlah kelompok tani yang berpartisipasi	32 Kelompok	Meningkatnya kualitas kelembagaan kelompok tani, ternak dan perkebunan	32 Kelompok	65.000.000	112.640.775	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan kelompok	Meningkatnya produksi pertanian	Kota Bima	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan (ton)	65.266					2.637.290.157	2.025.514.379		DINAS PERTANIAN
					Ketersediaan Informasi Harga Komoditi Pertanian (minggu)	48								
3 03 3.03.01 16 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian						Jumlah Pupuk Bersubsidi Yang Tersalurkan (Ton)	2.967	Terlaksananya pengawasan penyebaran pupuk bersubsidi di Kota Bima	2 kegiatan	100.000.000	150.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
									Terlaksananya kegiatan Penyusunan RDKK					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 03 3.03.01 16 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian						Jumlah petani yang terlatih	50 Orang	Terlaksananya Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian bagi kelompok tani di Kota Bima	50 orang	31.000.000	52.080.269	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 16 15	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija						Luas Lahan Pertanian Yang Ditangani	2275 Ha	Tersedianya dokumen Proksimantana Terlaksananya kegiatan Gerakan Upaya khusus (UPSUS) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai: 1. Obat-obatan Mendukung Program Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija: - Insektisida 300 liter - Fungisida 200 liter - Nematocida 500 kg - Agen Hayati 50 kg - PGPR (bibit) 80 liter 2. Pendampingan Gerakan Tanam Padi Sistem Jajar Legowo 3. Pendampingan Kegiatan 4. Pembinaan dan Monitoring Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 5. Pembinaan dan Monitoring Kekeringan	100%	100.000.000	150.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
3 03 3.03.01 16 20	Pengembangan perbenihan/perbibitan						Jumlah benih/bibit yang tersalurkan	2800 Pohon dan 16100 Kg	Terlaksananya penyediaan benih dan bibit Benih Jagung Hibrida	2800 Pohon dan 16100 Kg 4,500 kg/ha	100.000.000	60.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
										Benih Bawang Merah	5,600 kg/ha				
										Benih Padi Gogo	6,000 kg/ha				
										Bibit Mangga (Okulasi)	500 pohon				
										Bibit Cabai	500 pohon				
										Bibit Tomat	500 pohon				
										Bibit Alukat	400 pohon				
										Bibit Sawo	500 pohon				
										Bibit	400 pohon				
3	03	3.03.01	16	21	Pengembangan sistem informasi pasar			Informasi harga pasar komoditi pertanian di media cetak lokal	48 Minggu	Terlaksananya publikasi hasil produk pertanian, perkebunan dan peternakan	48 Minggu	60.000.000	96.245.110	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	16	29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (DAU & DAK)			Jumlah sarana Pemyediaan Air Irigasi Yang Terbangun	5 Unit	Terlaksananya peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu	5 Unit	2.246.290.157	1.517.189.000	Kegiatan sedang berjalan	
								Jumlah Alsintan Yang Tersalurkan	10 buah		10 buah				
								Jumlah Jalan Usaha Tani Yang Terbangun	5 Unit		5 Unit				
3	03	3.03.01	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	Jumlah produksi pertanian	Kota Bima	Porsentasi Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Sesuai Porsentase Kelompok Tani Yang	25%		45.000.000	50.000.000		DINAS PERTANIAN
										-Pemula ke Lanjut	3%				
										-Lanjut ke Madya	1%				
										-Madya ke Utama	1%				
3	03	3.03.01	18	04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna					Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi pertanian tepat guna (PHT)	15 Kelompok	45.000.000	50.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
										Terlaksananya a Sekolah Lapang Pengendalian	15 Klp				
3	03	3.03.01	19		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Ketahanan Pangan	Meningkatnya produksi pertanian	Kota Bima	Produksi perkebunan (Ton):			119.955.875	62.000.000		DINAS PERTANIAN
										1) Tembakau	3,4				
										2) jambu mete	173,84				
										3) Kelapa	27,49				
										Produktifitas Lahan Tembakau (Ton/Ha)	1,1 Ton/ Ha				
										Produktifitas Lahan Jambu Mete (Ton/Ha)	0,13 Ton/ Ha				
										Produktifitas Lahan Kapala (Ton/Ha)	0,16 Ton/ Ha				
3	03	3.03.01	19	02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan					Jumlah alsintan yang disalurkan	80 buah	11.000.000	12.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
										Terlaksananya pemanfaatan alsintan bagi	80 buah				
3	03	3.03.01	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan					Jumlah bibit/benih unggul bersertifikasi yang tersalurkan	6000 Pohon	108.955.875	50.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
										Tersedianya bibit/benih unggul yang tersertifikas:	6000 Pohon				
										Bibit Kelapa	1.500 pohon				
										Bibit Kemiri	3.000 pohon				
										Bibit jambu	1.500 pohon				
										Insentif Penanaman Kelapa	1.500 pohon				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN							
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
										Insentif Penanaman Kemiri	3,000 pohon					
										nsentif Penanaman Jambu Mente	1,500 pohon					
										Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1 kegiatan					
3	03	3.03.01	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan kelompok	Meningkatnya produksi pertanian	Kota Bima	Porsentase Kelompok Yang Terampil	25%			667.200.000	866.315.875		DINAS PERTANIAN
3	03	3.03.01	20	01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan					Jumlah penyuluh	22 orang	Peningkatan kinerja penyuluh pertanian- fasilitasi honor THL- TBPP SLTA	16 orang	597.200.000	776.360.000	Kegiatan sedang berjalan
												Peningkatan kapasitas kelembagaan petani- penumbuhan kelembagaan	10 unit			
												Peningkatan kinerja penyuluh pertanian- fasilitasi BOP penyuluh PNS wilayah	29 orang			
												Peningkatan kinerja penyuluh pertanian- penumbuhke mbangan penyuluh swadaya	2 orang			
												Peningkatan kinerja penyuluh pertanian- Fasilitasi honor THL- TBPP S1/D4	4 orang			
												Peningkatan kinerja penyuluh pertanian- Fasilitasi honor THL- TBPP D3	2 orang			
3	03	3.03.01	20	04	Penyusunan programa penyuluhan pertanian					Jumlah programa	8 program	Meningkatny a kualitas program penyuluhan di Kota Bima	100%	70.000.000	89.955.875	Kegiatan sedang berjalan

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
3	03	3.03.01	21		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Ketahanan Pangan	Meningkatnya Produksi Peternakan (Ton)	Kota Bima	Pengkartuan Ternak (ekor)	23.631				502.795.575	635.894.253		DINAS PERTANIAN
									Vaksinasi Ternak	20.491							
									Penurunan Angka Kematian Pedet	15%							
									Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular (kasus)	16%							
3	03	3.03.01	21	02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak				Jumlah hewan ternak dilayani kesehatannya	2500 ekor	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi	5 kali	300.000.000	386.379.500	Kegiatan sedang berjalan		
											Vaksinasi (AT/SE)	1 tahun					
											Pengkartuan Ternak (kartu ternak besar & ternak kecil, kartu jual beli ternak, kartu pelayanan kesehatan hewan)	1 tahun					
											Pelaksanaan Penanggulan Penyakit Helminthiasis dan	pengiriman speimen BBV ke Denpasar dan Spesimen Organ					
											Terlaksananya Identifikasi CP/CL Dan Tugas Pembantuan, Dekon dan APBD Propinsi	1 kegiatan					
											Pembuatan Pamflet	50 buah					
3	03	3.03.01	21	04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah				Jumlah ternak diantarpulaukan	1500 ekor	Meningkatnya pengawasan perdagangan ternak dan pengiriman ternak betina produktif (Pemeriksa Ternak Yang Diantar Pulaukan)	1 Tim	90.000.000	107.378.375	Kegiatan sedang berjalan		
3	03	3.03.01	21	09	Pengawasan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan				Jumlah hewan ternak yang dipotong di RPH dan TPH	4500 ekor	Terkontrolnya Kesehatan Produk Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan	5 Kecamatan	112.795.575	142.136.378	Kegiatan sedang berjalan		
											Pembinaan dan Pengawasan						
3	03	3.03.01	22		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Ketahanan Pangan	Meningkatnya Produksi Peternakan	Kota Bima	2. Populasi Ternak Besar :				1.119.212.500	1.183.207.256		DINAS PERTANIAN	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
					(6)	(7)	(8)	(9)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
			(Ton)		- Sapi (Ekor)	15294									
					- Kerbau(Ekor)	480									
					- Kuda (Ekor)	1005									
					3. Populasi Ternak Kecil:										
					- Kambing (Ekor)	20515									
					- Domba (Ekor)	173									
					4. Populasi Ternak Unggas:										
					- Ayam Buras (Ekor)	87783									
					- Ayam Potong (Ekor)	600435									
					- Itik Manila(Ekor)	24383									
					- Itik Manila (Ekor)	21001									
					5. Jumlah Pelayanan Inseminasi Buatan/IB	450									
3	03	3.03.01	22	02	Pembibitan dan perawatan ternak			Jumlah ternak yang dilayani kegiatan inseminasi buatan	450 Ekor	Berkembangnya upaya-upaya pembibitan dan perawatan ternak sesuai teknik budidaya	1 Keg.	372.212.500	370.544.375	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	22	03	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat			Terlaksananya pendistribusian bantuan bibit ternak kepada peternak	1 Keg.	Terlaksananya pendistribusian bantuan	1 Keg.	100.000.000	67.827.000		
3	03	3.03.01	22	07	Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak			Jumlah kelompok yang terlatih tentang pengolahan pakan ternak	13 Kelompok	Terlaksananya penyuluhan dan atau pelatihan	50 orang	22.000.000	26.085.881	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	22	10	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan			Jumlah kelompok yang terlatih tentang pembuatan kompos	13 Kelompok	Terlaksananya penyuluhan dan atau pelatihan	1 Unit	625.000.000	718.750.000	Kegiatan sedang berjalan	
3	03	3.03.01	22	10	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan			Jumlah sarana dan prasarana yang terbangun/ terrehabilitasi	1 Unit	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang peningkatan produksi produk peternakan	1 Unit	625.000.000	718.750.000	Kegiatan sedang berjalan	
3	06	PERDAGANGAN										3.092.461.209	3.977.540.000		
3	06	2.11.01			DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							3.092.461.209	3.977.540.000		
3	06	2.11.01	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima	Jumlah pasar yang dikembangkan	1 unit (kios & los)		330.000.000	315.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN	
3	06	2.11.01	15	01	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa				Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang ditangani	485 Pelaku usaha	Jumlah pedagang kakilima dan asongan yang ditangani	485 Pelaku usaha	40.000.000	40.000.000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3	06	2.11.01	15	02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen				Jumlah penyelesaian permasalahan	100%	Data penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	1 laporan	30.000.000	40.000.000	Kegiatan sedang berjalan DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 06 2.11.01 15 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrotlogian daerah									Jumlah UTPP yang ditera dan ditera ulang	245 Unit	Jumlah UTPP yang ditera dan ditera ulang	245 Unit	60.000.000	85.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 06 2.11.01 15 05	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal (GHT)									Tersebarinya informasi mengenai peraturan dan perundang-undangan barang-barang ilegal	500 Pelaku usaha	Masyarakat menjadi lebih paham mengenai peraturan dan perundang-	500 Pelaku usaha	80.000.000	35.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 06 2.11.01 15 06	Pengawasan Peredaran Cukai Ilegal (GHT)									Terlaksananya pengawasan yang baik terhadap peredaran barang dan jasa	100 Pedagang	Data rokok yang memakai pita cukai ilegal dan data rokok yang kadaluarsa	100 Pedagang	120.000.000	115.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 06 2.11.01 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri				Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima	Jumlah pasar yang dikembangkan	1 unit (kios & los)					2.762.461.209	3.662.540.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
3 06 2.11.01 18 03	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)									Jumlah kios dan los yang beroperasi	1 unit	Terlaksananya pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	100%	2.230.961.209	3.142.540.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 06 2.11.01 18 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan									Tersedianya informasi harga barang dan jasa	12 bulan	Data harga barang dan jasa (3 kegiatan; Monitoring harga	100%	269.000.000	270.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 06 2.11.01 18 08	Operasi Pasar Murah									Terlaksananya subsidi sembako	750 Bungkus/kecamatan	Terlaksananya subsidi sembako dan masyarakat mendapat harga di bawah harga pasar yang tinggi	750 Bungkus/kecamatan	262.500.000	250.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07	PERINDUSTRIAN													2.130.000.000	2.725.000.000		
3 07 2.11.01	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN													2.130.000.000	2.725.000.000		
3 07 2.11.01 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah				Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima	Jumlah pelaku IKM yang menggunakan bahan baku lokal	157 IKM					450.000.000	540.000.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07 2.11.01 16 07	Lomba Rancang Busana									Terciptanya Kreativitas Dari Hasil Kerajinan Daerah	1 Kegiatan	Lebih beragam dikenalnya pakaitan yang berasal dari tenunan Bima	100%	130.000.000	130.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
3 07 2.11.01 16 08	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi						Terciptanya Industri Berbasis teknologi (bantuan kepada IKM)	100 IKM	Meningkatnya pengetahuan IKM dengan pengenalan industri berbasis teknologi	100 IKM	200.000.000	200.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07 2.11.01 16 09	Pembinaan kemampuan teknologi industri						Terlaksananya bimtek pangan (produk snack)	30 IKM/ 5 hari	Terciptanya Pemahaman IKM Dalam penggunaan Teknologi Pada Proses Produksi	30 IKM/ 5 hari	90.000.000	150.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07 2.11.01 16 02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri						pendampingan dalam Menunjang Keahlian Kegiatan produksi	30 IKM	Meningkatnya pengetahuan IKM dalam pengelolaan usaha industri (tindak lanjut dari kegiatan bimtek	30 IKM	30.000.000	60.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07 2.11.01 19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima dan Luar	Jumlah sentra industri yang	74 Sentra Industri					1.680.000.000	2.185.000.000		DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN
3 07 2.11.01 19 02	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat						pembuatan profil katalog IKM	74 Sentra Industri	informasi yang dapat diakses masyarakat	100%	30.000.000	35.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07 2.11.01 19 04	Promosi produk kerajinan						Terlaksananya keikutsertaan IKM Dalam Pameran (BBGRM, Pameran pembangunan Kota bima, MTQ tingkat Provinsi)	3 Pameran (dalam provinsi)	Meningkatkan kemampuan dan pengalaman dari masing-masing IKM industri	3 Pameran (dalam provinsi)	150.000.000	150.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3 07 2.11.01 19 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Sentra Industri (DAK)						Terlaksananya pembangunan Rumah Kemasan	1 unit	Gedung Rumah Kemasan	1 unit	1.500.000.000	2.000.000.000	Kegiatan sedang berjalan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG										166.490.549.400	174.815.076.870		
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN										136.479.164.350	143.303.122.568		
4 01 4.01.03	SEKRETARIAT DAERAH										68.541.926.350	71.969.022.668		
4 01 4.01.03 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi	100%					9.899.754.075	10.394.741.779		
4 01 4.01.03 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	12 bulan			303.550.000	318.727.500	Lama	
	Bagian Umum:													
	Jasa Pengiriman Surat - Surat													
	Honorarium Pegawai Tidak Tetap lingkup SETDA													
	Bagian Humas dan Protokol:													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	PERLENGKAPAN SURAT MENYURAT CETAK KERTAS SURAT KOP GARUDA EMAS DAN MAP KHUSUS SAMBUTAN PENGGANDAAN SURAT MENYURAT													
	<b>Bagian Kesra:</b> Honorarium Petugas Pengelola Arsip Bagian Kesra													
	<b>Bagian APP dan LPB:</b> Belanja Alat Tulis kantor Belanja Tagihan Telepon/Internet Belanja Langganan Surat Kabar/Majalah/Buletin/Koran Honorarium Pegawai tenaga kontrak Belanja Cetak Belanja Penggandaan/Foto copy Belanja Penjilidan Dokumen/Proposal Belanja Makanan dan Minuman Harian pegawai													
4	01	4.01.03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	4 Jenis Rekening		1.578.300.000	1.657.215.000	Lama	
					<b>Bagian Umum:</b> Belanja telepon 11 nmr Belanja Air 12 titik Listrik Kantor 10 titik Belanja Internet IndieHome									
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> BELANJA SPEEDY / INDIHOME <b>Bagian Organisasi:</b> Belanja Faximile, Internet, TV Satelit, Telpn									
					<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b> Belanja Jasa Internet									
					<b>Bagian Kesra:</b> Honorarium Pengelola Admin Web Bagian Kesra Belanja Speedy/Indihome Kartu Halo									
					<b>Bagian Hukum:</b> Biaya Langganan Speedy <b>Bagian AP:</b> Belanja Telepon Belanja Internet Langganan Media Cetak Iklan Media Elektronik									
4	01	4.01.03	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan		285.773.000	300.061.650	Lama	
					<b>Bagian Umum:</b> Honorarium Pengurus Barang dan Pemegang Barang Honorarium PPK, PPTK Honorarium Tim Pelayanan Publik Lingkup Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Tahun 2018									
					<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b> Belanja Jasa Perawatan AC Belanja Jasa Perawatan Komputer dan Laptop Belanja Jasa Printer/Faksimili/Televisi									
					<b>Bagian APP dan LPB:</b> Belanja Alat Tulis kantor Belanja Pelatan Kebersihan dan bahan pembersih Belanja Spanduk/umbul umbul dan Bendera Belanja Publikasi/Iklan									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Penggandaan/Foto Copy Dokumen													
4	01 4.01.03 01 04						Jumlah jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	12 bulan		350.000.000	367.500.000	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Walikota dan Keluarga													
	Belanja Pemeliharaan Kesehatan Wakil Walikota dan Keluarga													
4	01 4.01.03 01 06						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 Unit		76.702.400	80.537.520	Lama		
	<b>Bagian Organisasi:</b>													
	Belanja Jasa Servise Kendaraan Dinas													
	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor													
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Belanja Jasa Service roda 4 dan roda 2													
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 4 dan roda 3													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas													
	Belanja Jasa Non Pegawai (supir)													
	Servis Kendaraan Dinas Bag. Kesra													
	Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas													
4	01 4.01.03 01 07						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	16 Orang		598.966.400	628.914.720	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Honorarium Bendahara UUDP/TTP													
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan													
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>													
	HONORARIUM TIM PENGELOLA KEUANGAN													
	Belanja ATK													
	<b>Bagian Organisasi:</b>													
	Honorarium Bendahara Pengeluaran													
	Honorarium Bendahara Barang													
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran													
	Pejabat Penatausahaan Keuangan / Verifikator													
	Belanja Alat Tulis Kantor Pendukung Kegiatan													
	Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya													
	Belanja Honorarium Tenaga Kontrak													
	Belanja Penggandaan Pendukung Kegiatan													
	Belanja Penjilidan Pendukung Kegiatan													
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Honorarium Pengelola Keuangan													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Tim Pengelola Keuangan													
	Belanja Materai													
	Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak													
	<b>Bagian Hukum:</b>													
	Honorarium Pengelola Keuangan													
	Belanja ATK													
	Belanja Materai													
	Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak													
	Penggandaan/Foto Copy													
	<b>Bagian APP dan LPB:</b>													
	Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)													
	Honorarium PPTK													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Honorarium Bendahara/Pengurus Barang													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Perangko, Materai dan benda Pos Lainnya													
	Belanja Penggandaan laporan dan SPI													
	Belanja makanan dan minuman harian pegawai													
	<b>Bagian AP:</b>													
	Honararium Tim Pengelola Keuangan Daerah dan Pengurus Barang													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Honorarium Pegawai Tenaga Kontrak													
	Belanja Penggandaan													
4	01	4.01.03	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Cakupan ruang kantor yang bersih	100%		482150000	506.257.500	Lama	
					<b>Bagian Umum:</b>									
					Tenaga Cleaning Service Lingkup Kantor Sekretariat dan Rumah Jabatan Kepala Daerah									
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									
					BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH									
					BELANJA JASA PEGAWAI TENAGA KONTRAK									
					<b>Bagian Organisasi:</b>									
					Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor									
					<b>Bagian Perencanaan dan Usaha Daerah:</b>									
					Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih									
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih									
					<b>Bagian Hukum:</b>									
					Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih									
4	01	4.01.03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	5 Jenis		39.800.000	41.790.000	Lama	
					<b>Bagian Organisasi:</b>									
					Perawatan AC									
					Perawatan Komputer									
					Perawatan Non Komputer									
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Servis AC									
					Servis peralatan komputer kesra									
					Belanja Jasa Perbaikan Lemari Arsip									
					Belanja Jasa Perbaikan Meja									
4	01	4.01.03	01	10	Penyediaan alat tulis kantor			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	121 Jenis		504.128.250	529.334.663	Lama	
					<b>Bagian Umum:</b>									
					Belanja Alat Tulis Kantor									
					Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya									
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									
					BELANJA ATK									
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Belanja Alat Tulis Kantor									
					<b>Bagian AP:</b>									
					Belanja Alat Tulis Kantor									
					Belanja Materai									
4	01	4.01.03	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	25 Jenis		620.621.600	651.652.680	Lama	
					<b>Bagian Umum:</b>									
					Belanja Cetak									
					Belanja Penggandaan/Foto Copy									
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	MATERAI DAN BENDA POS LAINNYA													
	CETAK BLANGKO FAKTUR DAN BLANGKO KWITANSI													
	FOTO COPY ARSIP KANTOR													
	BELANJA PENILIHAN													
	CETAK FOTO DAN DOKUMENTASI													
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Belanja Cetak													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Belanja Cetak (Blngko kuitansi, map cetak logo setda berwarna, map kop unit kerja, buku kas umum daerah, map album arsip, map cetak logo walikota berwarna, map cetak logo wakil walikota berwarna)													
	Fotocopy													
	Jilid Laporan Kegiatan													
	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi													
	<b>Bagian AP:</b>													
	Belanja Pengandaan/Fotocopy													
4	01 4.01.03 01 12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	5 Jenis		276.000.000	289.800.000	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Lampu Pijar, Kabel Listrik, Battery, dll. Lingkup Sekretariat dan Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota													
4	01 4.01.03 01 13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Jumlah perlengkapan kantor	15 paket		500.000.000	525.000.000	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Meja Kerja													
	Kursi Kerja													
	Lemari Arsip/Filling Cabinet													
	Pengadaan Gorden Aula													
	Pengadaan Gorden Dekor HUT													
	Pengadaan Panggung Acara													
	Pengadaan AC													
	Pengadaan kipas angin													
	Pengadaan komputer/PC													
	Pengadaan printer													
	Pengadaan portable amplifier													
	Pengadaan sound system outdoor													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa													
	Honorarium Tim Penerima Barang/Pemeriksa Barang dan Jasa													
	Belanja Dokumen/Administrasi Tender													
	Pengadaan Dispenser													
	PC All In One													
	Pengadaan Printer													
	Lemari Arsip (Filling Kabinet)													
	Pengadaan Kamera													
4	01 4.01.03 01 15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	12 bulan		85.940.000	90.237.000	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Belanja Surat Kabar/Majalah Ruang Kantor 4 Harian Cetak													
	Belanja Iklan 4 Iklan x 1 hari													
	<b>Bagian Organisasi:</b>													
	Biaya Langganan Koran/Iklan Surat Kabar/Majalah													
	Belanja Kerasama dengan Media													
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Belanja Surat Kabar/Tabloid/Iklan													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Surat Kabar Harian													
	Publikasi / Iklan Surat Kabar													



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%					35.171.653.100	36.930.235.755		
4 01 4.01.03 02 03	Pembangunan gedung kantor						Jumlah gedung kantor yang dibangun baru	28 paket			27.000.000.000	28.350.000.000	Lama	
	<b>Bagian AP:</b>													
	Pembentukan Tim Pengendali Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor													
	Honorarium Operator MONEV Pembangunan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Dokumen Perencanaan Pembngnan/Rehab Kantor/Pagar Kantor Lurah dan Camat													
	Dokumen Pembangunan Pembngnan/Rehab Kantor/Pagar Kantor Lurah dan Camat													
	Dokumen Pengawasan Pembngnan/Rehab Kantor/Pagar Kantor Lurah dan Camat													
	Belanja Materai													
	Belanja Pengandaan/Fotocopy													
	Belanja Penjilidan													
	Sewa Gedung Kantor Lurah Paruga													
	Sewa Gedung Kantor Lainnya													
	Koordinasi/Konsultasi di Kota Bima dan Sekitarnya													
	Jasa Penilai Tanah dan Bangunan (APPRAISAL)													
	Rehab Kantor Kelurahan Sadia													
	Pembangunan Kantor Kelurahan Rite (Tambah Ruangan dan Garasi)													
	Rehab Kantor BPKAD (Bidang Pendataan dan Penagihan)													
	Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Lelamase													
	Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Dodu													
	Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Rontu													
	Pembangunan Pagar Kantor Kelurahan Panggi													
	Pembangunan Pagar Kantor Kecamatan Mpunda													
	Rehab Kantor Kelurahan Pane													
	Pemasangan Paving Kantor Kecamatan Asakota													
	Pembangunan Pagar Kantor Badan Ketahanan Pangan													
	Honorarium Pengawas Teknik (PTP)													
	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen													
	Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa													
	Honorarium Pejabat Pengadaan													
	Jasa Perencanaan Pembangunan/ Rehab Kantor/ Pagar Kantor Lurah dan Camat													
	Jasa Pengawasan Pembangunan/Rehab Kantor/Pagar Kantor Lurah dan Camat													
4 01 4.01.03 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas baru	42 unit			4.350.000.000	4.567.500.000	Lama	
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Station Wagon													
	Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang													
	Sepeda Motor Dinas													
	Motor Sampah Tiga Roda													
4 01 4.01.03 02 06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas						Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	10 unit/paket			125.000.000	131.250.000	Lama	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10 unit/paket			147.620.000	155.001.000	Lama	
	<b>Bagian APP dan LPBI:</b> Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Honorarium Pejabat Pengadaan Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Belanja Alat Tulis Kantor Pengadaan Meja 1/2 Biro Pengadaan kursi Kerja Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan Gordyn Pengadaan Blower Pengadaan AC 1 PK Pengadaan Komputer (laptop, scanner, komputer PC, printer fotocopy dan printer) Pengadaan laringan telepon/Internet Renovasi / Partisi Ruangan ULP													
	<b>Bagian AP:</b> Pengadaan Brankas Pengadaan Printer Pengadaan Kipas Angin Pengadaan Laptop													
4 01 4.01.03 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	10 unit/paket			171.890.000	180.484.500	Lama	
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> PENGADAAN PENDINGIN RUANGAN PENGADAAN KOMPUTER PC PENGADAAN VIDEO WALL DAN PERLENGKAPANNYA <b>Bagian Organisasi:</b> Belanja Modal Pengadaan Televisi LED Belanja Modal Pengadaan Printer A3													
4 01 4.01.03 02 10	Pengadaan mebeleur						Jumlah Pengadaan mebeleur	391 unit/paket			499.500.000	524.475.000	Lama	
4 01 4.01.03 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	6 unit			665.000.000	698.250.000	Lama	
	<b>Bagian Umum:</b> Ongkos Jasa Tukang Pemeliharaan Rutin dan Berkala Kantor Sekretariat Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Paruga Na'e Pemeliharaan Rutin Lingkungan Taman Sekretariat Pemeliharaan Taman Gedung Paruga Na'e Pemeliharaan Gudang Kantor Sekretariat Pemeliharaan Ruang VIP Bandara Pengecatan Kantor Walikota Bima Pengecatan Rutin Pagar Kantor Walikota Bima Pemeliharaan Baliho Pemeliharaan Bangunan ATM Bersama Pemeliharaan Garasi Kantor Pemeliharaan Pagar Paruga Na'e Pemeliharaan Rumah Jaga Pol.PP Pemeliharaan Tower/Tandon Air Lingkungan Kantor Sekretariat													
4 01 4.01.03 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan						Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	12 bulan			204.900.000	215.145.000	Lama	
	<b>Bagian Umum:</b> Belanja Jasa Service (mobil jabatan walikota dan wakil walikota)													



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor (kulkas, sound system dan accessories, televisi, kunci laci dan jendela kantor, kaca meja, blower AC, receiver parabola, alat drumband, mesin pompa air dan mesin kompresor)													
	<b>Bagian Hukum:</b> Jasa Perawatan AC													
	Belanja Jasa Perawatan Komputer/Laptop dan Printer													
	<b>Bagian APP dan LPBI:</b>													
	Pemeliharaan AC													
	Pemeliharaan Komputer PC													
	Laptop													
	Pemeliharaan Printer													
	Pemeliharaan Scanner													
4	01	4.01.03	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Jumlah Pemeliharaan Perengkapan kantor yang berfungsi baik	25 unit		115.450.000	121.222.500	Lama		
					<b>Bagian Umum:</b> Perbaikan mesin tik Setda									
					Pemeliharaan laptop SETDA									
					Pemeliharaan Personal komputer SETDA									
					Pemeliharaan Printer Setda									
					Pemeliharaan Mesin Absensi Elektronik									
					Pemeliharaan CCTV (Close Circuit Television)									
					Pemeliharaan Overhead Projektor (OHP)									
					Pemeliharaan Mesin Faksimili									
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> PEMELIHARAAN KAMERA FOTO / KAMERA VIDEO / PRINTER / KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA / AC / KELISTRIKAN									
					<b>Bagian AP:</b> Jasa Perawatan AC									
					Jasa Perawatan Personal Computer (PC)									
					Jasa Perawatan Laptop									
					Perawatan Mesin FAX									
					Perawatan Projektor									
					Perawatan Printer									
4	01	4.01.03	02	45	Penyediaan/ sewa gedung kantor/ rumah jabatan/ dinas		jumlah penyediaan sewagedung kantor/ rumah jabatan/ dinas	1 Tahun		575.000.000	603.750.000	Lama		
					<b>Bagian Umum:</b> Sewa Rumah Jabatan Walikota									
					Sewa Rumah Jabatan Wakil Walikota									
					Sewa Rumah Dinas Sekretaris Daerah									
					Sewa Tempat Ruangan VIP KDH Bandara									
					Biaya Pengamanan Ruang VIP KDH Bandara									
4	01	4.01.03	03		<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah	Kota Bima	Persentase pegawai yang memperoleh	0%	178.000.000	186.900.000		
4	01	4.01.03	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				Jumlah Pakaian Dinas		126.000.000	132.300.000	Lama	
					<b>Bagian Umum:</b> Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Walikota dan Wakil Walikota									
					Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Walikota dan Wakil Walikota									
					Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Walikota dan Wakil Walikota									
					Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) Walikota dan Wakil Walikota									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Walikota dan Wakil Walikota													
	Belanja Pakaian Dinas Bercorak Adat Daerah Walikota dan Wakil Walikota													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa													
	Honorarium Tim Penerima Barang/Pemeriksa Barang dan Jasa													
	Pakaian Dinas Bercorak Adat Daerah													
	Seragam Dinas Olah Raga													
	<b>Bagian APP dan LPBJ:</b>													
	Pakaian Dinas Tenun Ikat Bima (baju)													
	Pakaian Putih Hitam (baju dan Celana)													
4	01	4.01.03	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	32 stel		36.200.000	38.010.000	Lama	
					<b>Bagian Organisasi:</b>									
					Belanja Kain Tenun									
					<b>Bagian Hukum:</b>									
					Belanja Seragam Tenun Ikat									
4	01	4.01.03	03	06	Pengadaan pakaian olahraga			Jumlah pakaian olahraga	32 stel		15.800.000	16.590.000	Lama	
					<b>Bagian Organisasi:</b>									
					Belanja Pakaian Olahraga									
4	01	4.01.03	05	05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik	Kota Bima	Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional	30%	522.000.000	548.100.000		
4	01	4.01.03	05	05	Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah				Jumlah Seminar, simposium, lokakarya dan pertemuan ilmiah	12 Kali	50.000.000	52.500.000	Lama	
4	01	4.01.03	05	08	Koordinasi pelaksanaan kegiatan korps pegawai negeri				Jumlah Koordinasi pelaksanaan kegiatan korps pegawai negeri	12 bulan	250.000.000	262.500.000	Lama	
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									
					BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH									
4	01	4.01.03	05	09	Pengadaan pakaian seragam dinas				Jumlah Pengadaan pakaian seragam dinas	32 stel	117.000.000	122.850.000	Lama	
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									
					HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA DAN PEJABAT PENGADAAN - PAKAIAN SERAGAM									
					PAKAIAN SERAGAM HUMAS DAN PROTOKOL									
					BELANJA PAKAIAN JAS HUT KOTA BIMA									
4	01	4.01.03	05	10	Tanda pengenal area khusus bandara				Jumlah Tanda pengenal area khusus bandara	10 unit	5.000.000	5.250.000	Lama	
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									
					BELANJA ID CARD VIP BANDARA									
4	01	4.01.03	05	11	Diklat Teknis dan Ujian SKA Pengadaan Barang/Jasa				Jumlah aparatur yang mengikuti ujian SKA pengadaan barang/jasa	100 orang	100.000.000	105.000.000	Baru	
4	01	4.01.03	06	06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai	100%	1.031.080.325	1.082.634.341		
4	01	4.01.03	06	02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran				Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dokumen	21.000.000	22.050.000	Lama	
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									
					HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER									
4	01	4.01.03	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	1 Dokumen	28.000.000	29.400.000	Lama	
					<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>									
					HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRIWULAN									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	1 Dokumen		23.750.000	24.937.500	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> HONORARIUM TIM PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN													
	<b>Bagian Kesra:</b> Honorarium Penyusun Laporan Keuangan Bag. Kesra Belanja fotocopy Laporan Penjihtidan Laporan													
4 01 4.01.03 06 05	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen		197.746.000	207.633.300	Lama		
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b> Honorarium Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Honorarium Penyusunan LPPD Honorarium Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Honorarium Tim Inventaris Barang Honorarium Pegawai Kontrak Pengadaan Brankas													
	<b>Bagian APP dan LPB:</b> Honorarium Tim Penyusunan RKA, DPA dan DPPA SKPD Honorarium Pembantu Kegiatan Penyusunan Renja, RKA dan DPA Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Penggandaan RKA, DPA dan DPPA Belanja Penjihtidan RKA, DPA dan DPPA Belanja Sewa Ruangan Rapat Pertemuan Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
4 01 4.01.03 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen		460.584.325	483.613.541	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> HONORARIUM TIM PENYUSUN LAKIP HONORARIUM TIM PENYUSUN LPPD													
	<b>Bagian Organisasi:</b> Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Penilaian LAKIP Internal Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba SINOVIK Panitia Pelaksana Kegiatan Lomba Pelayanan Prima Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusun Naskah/Dokumen LKIP Kota Bima Tahun 2016 Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusun Naskah/Dokumen LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima Tahun 2016 Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusun Naskah/Dokumen Indikator Kinerja Utama Honorarium Admin Aplikasi e-Monev Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Dokumen LKIP Kota Bima Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Dokumen LKIP Sekretariat daerah Kota Bima Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Dokumen LKIP Sekretariat daerah Kota Bima													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama													
	Belanja Cetak Cover dan Jilid Sampul Ukuran Folio (LKIP Kota Bima, LKIP Setda Kota Bima, IKU Kota Bima)													
	Belanja Penggandaan Dokumen LKIP Kota Bima													
	Belanja Penggandaan Dokumen LKIP Sekretariat Daerah Kota Bima													
	Penggandaan Dokumen IKU Kota Bima													
	Belanja Makan Minum Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Konsultasi, Koordinasi dan Evaluasi													
	Belanja Pemberian Hadian Kegiatan Lomba Penilaian LAKIP Internal													
	Belanja Pemberian Hadian Kegiatan Lomba SINOVIK													
	Belanja Pemberian Hadian Kegiatan Lomba Pelayanan Prima													
	<b>Bagian AP:</b>													
	Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)													
	Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Penggandaan/Fotocopy													
	Belanja Penjilidan													
	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan													
	Makan dan Minum Rapat													
	Asistensi Data LPPD													
	Pengumpulan Data LPPD													
	Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota RI dan Luar Propinsi NTB serta Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota Propinsi													
	Uang Saku BIMTEK LPPD													
	Belanja Narasumber/Tenaga Ahli													
4	01	4.01.03	06	07	Penyusunan Standar satuan harga Kota Bima Tahun 2019			Dokumen standar harga kota bima tahun 2018	1 dok		100.000.000	105.000.000	Lama	
					<b>Bagian APP dan LPBJ:</b>									
					Honorarium/Upah Tim Penyusunan Standar Harga Kota Bima Tahun 2019									
					Honorarium Pembantu Kegiatan Penyusunan Standar Harga Tahun 2019									
					Alat Tulis Kantor									
					Belanja Cetak Buku Standar harga									
					Penggandaan Dokumen Standar Harga									
					Belanja Sewa Ruangan Rapat pertemuan									
					Belanja Makanan dan Minuman (harian pegawai dan rapat)									
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah									
					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah									
4	01	4.01.03	06	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan DAK dan TEPRA			Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana DAK dan TEPRA	11 kali		200.000.000	210.000.000	Lama	
					<b>Bagian APP dan LPBJ:</b>									
					Honorarium Tim Monev DAK									
					Honorarium Tim TEPRA									
					Honorarium Admin e-Monev Pembangunan									
					Honorarium Pembantu Kegiatan Monev DAK dan TEPRA									
					Belanja Ala Tulis Kantor									
					Belanja Penggandaan Dokumen dan Proposal dan Laporan									
					Belanja Sewa Ruangan Rapat									
					Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai dan rapat									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah													
4	01	4.01.03	07		Kota Bima	Persentase produk hukum daerah yang	80%					1.444.447.000	1.516.669.350	
4	01	4.01.03	07	01		Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan		Jumlah Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-	11 Kali			450.615.000	473.145.750	Lama
						<b>Bagian Hukum:</b>								
						Honorarium Tim Asistensi Raperda, Perwali, Keputusan Walikota dan Perjanjian Kerja Sama								
						Honorarium Tim Koordinasi Pembentukan Naskah Perjanjian Kerja Sama								
						Honorarium Tim Koordinasi Pembentukan Perda								
						Honorarium Tim Koordinasi Penyusunan Perwali								
						Belanja ATK								
						Belanja Pengandaan/Foto Copy (draft raperda, draft perwali, dokumen lainnya)								
						Belanja Makanan dan Minuman Rapat								
4	01	4.01.03	07	02		Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan		Jumlah Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	14 Kali			94.178.500	98.887.425	Lama
						<b>Bagian Hukum:</b>								
						Honorarium Tim Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Produk Hukum								
						Belanja ATK								
						Pengandaan/Foto Copy dan Dokumen Kantor Lainnya								
						Monitoring, Koordinasi dan Evaluasi Konsultasi/Evaluasi/Koordinasi/Rapat Luar Daerah								
4	01	4.01.03	07	03		Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Kali			426.983.500	448.332.675	Lama
						<b>Bagian Hukum:</b>								
						Honorarium Tim Pembina Hukum Daerah								
						Honorarium Panitia Pelaksana Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan								
						Honorarium Panitia Pelaksana Penyuluhan								
						Honorarium Tim Pelaksana Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima								
						Belanja ATK Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan								
						Spanduk Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan								
						Spanduk Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan								
						Umbul-umbul								
						Spanduk Ulah Kota Bima								
						Spanduk 17 Agustus								
						Spanduk Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima								
						Pengandaan Materi Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan								
						Pengandaan Materi Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan								
						Pengandaan Materi Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima								
						Cetak Foto Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan dan Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan serta Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima								
						Sewa Gedung Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan								
						Sewa gedung Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan								

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Sewa gedung, Kursi, Taman dan Sound Sistem serta OHP Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima													
	Belanja Makanan dan Minuman													
	Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Uang Saku/Transport Peserta Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan													
	Uang Saku/Transport Peserta Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan													
	Uang Saku/Transport Peserta Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima													
	Narasumber Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan													
	Moderator Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan													
	Pembawa Acara (MC) Sosialisasi Perda Tingkat Kelurahan													
	Narasumber Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan													
	Moderator Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan													
	Pembawa Acara (MC) Penyuluhan Hukum Tingkat Kecamatan													
	Narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima													
	Moderator Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima													
	Notulen Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima													
	MC Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima													
	Pembaca Doa Penyuluhan Hukum Terpadu Tingkat Kota Bima													
4	01	4.01.03	07	04	Publikasi peraturan perundang-undangan			Jumlah Publikasi peraturan perundang-undangan	20 Kali		62.990.000	66.139.500	Lama	
					<b>Bagian Hukum:</b>									
					Honorarium Tim Penyusun Lembaran Daerah dan Berita Daerah									
					Pengadaan Printer									
					Pengadaan Wireles									
4	01	4.01.03	07	05	Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum			Jumlah Penyelesaian sengketa dan bantuan hukum	12 Bulan		221.280.000	232.344.000	Lama	
					<b>Bagian Hukum:</b>									
					Honorarium Panitia Penanganan Perkara									
					Honorarium Tim Penanganan Perkara									
					Tim Koordinasi Ranham Kota Bima									
					Honorarium Sekretariat Ranham Kota Bima									
					Honorarium Tim Penyusun Dokumen Ranham Kota Bima									
					Belanja ATK									
					Belanja Jasa Penanganan Perkara									
					Penggunaan/Foto Copy Materi Perkara dan Dokumen Kantor Lainnya									
					Makan dan Minum Pengukuhan Ranham serta rapat lainnya									
					Perjalanan Dinas Luar Daerah									
					Honorarium Tim Konsultan Hukum									
4	01	4.01.03	07	06	Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (IDI) hukum daerah			Jumlah sitem JDI	1 paket		75.000.000	78.750.000	Baru	
4	01	4.01.03	26	17	Penyusunan peraturan walikota dan draft rancangan peraturan daerah			Jumlah Penyusunan peraturan walikota dan draft rancangan peraturan daerah	32 PERKADA		113.400.000	119.070.000	Lama	
					<b>Bagian Organisasi:</b>									



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Honorarium Tim Penyusun Kegiatan Penyusunan Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Honorarium Tim Penyusun Kegiatan Penyusunan Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima													
	Honorarium Tim Penyusun Peraturan Walikota tentang Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima													
	Honorarium Tim Penyusun Kegiatan Penyusunan Perwali Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyusunan Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyusunan Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima													
	Alat Tulis Kantor (ATK) Dokumen Peraturan Walikota tentang Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima													
	Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Penyusunan Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Cetak Sampul dan Penjilidan Dokumen Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Cetak Sampul dan Jilid Dokumen Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima													
	Cetak Sampul dan Jilid Dokumen Peraturan Walikota tentang Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima													
	Cetak Sampul dan Jilid Dokumen Kegiatan Penyusunan Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Pengandaan / Fotocopy Dokumen Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Fotocopy / Pengandaan Dokumen Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bima													
	Fotocopy / Pengandaan Dokumen Peraturan Walikota tentang Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Fotocopy / Penggandaan Dokumen Perwali Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja UPT Lingkup Pemerintah Kota Bima													
4 01 4.01.03 07	Makan Minum Rapat <b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			Kota Bima	BUMD yang aktif	1				318.870.000	334.813.500			
4 01 4.01.03 07 01	Pembinaan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah						Jumlah Pembinaan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah	11 Kali		158.870.000	166.813.500	Lama		
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Honorarium Tim Pembina dan Pengawasan Umum pada BUMD													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Penggandaan													
	Belanja Penjilidan													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													
4 01 4.01.03 06 02	Penyusunan Standar satuan harga Kota Bima Tahun 2018						Dokumen standar harga kota bima tahun 2018	1 dok		100.000.000	105.000.000	Lama		
4 01 4.01.03 07 03	Pembinaan kelembagaan perekonomian daerah						Jumlah Pembinaan kelembagaan perekonomian daerah	11 Kali		60.000.000	63.000.000	Lama		
4 01 4.01.03 07	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>			Kota Bima	Persentase kelurahan yang sudah memahami standar teknis pengelolaan administrasi	90%				7.328.903.700	7.695.348.885			
4 01 4.01.03 07 01	Dialog/Audensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan						Jumlah Dialog/Audensi dengan Tokoh- tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan	11 Kali		950.467.500	997.990.875	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dialog/Audensi													
	Uang Lembur PNS Persiapan Perlengkapan Audiensi Kepala Daerah													
	Uang Lembur Non PNS Persiapan Perlengkapan Audiensi Kepala Daerah													
	Belanja bahan baku bangunan													
	Belanja Sewa Meja Kursi													
	Belanja Sewa Tenda													
	Belanja Sewa Sound System													
	Belanja Sewa Taman Bunga													
	Makan Minum Tim Pelaksana Kegiatan Audiensi Kepala Daerah													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
4 01 4.01.03 07 02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri						Jumlah Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 kegiatan		1.107.400.000	1.162.770.000	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Belanja Sewa Kendaraan Tamu Luar Daerah													
	Belanja Makan Minum Tamu Luar Daerah													
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>													
	BELANJA CENDRAMATA / SOUVENIR / HADIAH / KARANGAN BUNGA													
	BELANJA PLAKAT													
	ELANJA SEWA KAMAR HOTEL / PENGINAPAN TAMU PEMERINTAH													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 07 03	Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA						Jumlah Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA	24 kali			1.046.236.200	1.098.548.010	Lama	
	<b>Bagian AP:</b> Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Spanduk Pengeandaan/Fotocopy Cetak Foto/Dokumentasi Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Makan dan Minum Rapat Honorarium Narasumber													
4 01 4.01.03 07 05	Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekda / Staf Ahli / Humas Protokol						Jumlah Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah / Sekda / Staf Ahli / Humas Protokol	12 bulan			500.000.000	525.000.000	Lama	
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBUATAN ADMINISTRASI, TENTATIVE DAN PELIPUT KEGIATAN KEPALA DAERAH MONITORING / INSPEKSI / KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH													
4 01 4.01.03 07 06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya						Jumlah Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	12 bulan			1.580.000.000	1.659.000.000	Lama	
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI													
4 01 4.01.03 07 07	Optimalisasi Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						Jumlah Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 bulan			344.800.000	362.040.000	Lama	
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> HONORARIUM TIM PENYUSUN NASKAH PIDATO KEPALA DAERAH HONORARIUM TIM PEYUSUN RELEASE BERITA KEGIATAN KEPALA DAERAH HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA DAN PEJABAT PENGADAAN - BUKU DEKADE KEPEMIMPINAN WALIKOTA BIMA HONORARIUM TIM PENYUSUN BUKU DEKADE KEPEMIMPINAN WALIKOTA BIMA HONORARIUM AJUDAN BELANJA CETAK BUKU BIOGRAFI KEPEMIMPINAN LAUNCHING BUKU 1 DEKADE KEPEMIMPINAN WALIKOTA													
4 01 4.01.03 07 08	Stimulan pembangunan daerah						Jumlah Stimulan pembangunan daerah	5 kecamatan			1.800.000.000		Lama	
	<b>Bagian APP dan LPBI:</b> Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Stimulan Pembangunan Honorarium Pembantu Kegiatan Stimulan Pembangunan Belanja Alat tulis kantor Belanja Materai dan Benda Pos Lainnya Belanja Cetak Belanja Pengandaan Belanja Cetak Foto/dokumentasi Kegiatan Belanja Sewa Ruang Rapat Belanja Makanan dan Minuman harian pegawai Belanja makanan dan Minuman rapat Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Belanja Bahan/Material untuk diserahkan kepada Masyarakat													
4 01 4.01.03 07	PROGRAM PROMOSI DAERAH			Kota Bima	Jumlah advetorial dalam media masa						575.000.000	603.750.000		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 07 01	Promosi daerah melalui media cetak/TV/Radio/fasilitas umum pemerintah/ Non Pemerintah lainnya						Jumlah Promosi daerah melalui media cetak/TV/Radio/fasilitas umum pemerintah/ Non Pemerintah lainnya	11 Kali		500.000.000	525.000.000	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> PROMOSI PROGRAM PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN DAERAH MELALUI MEDIA CETAK / TV/ RADIO / FASILITAS UMUM LAINNYA													
4 01 4.01.03 07 02	Pameran pembangunan / promosi/ investasi						Jumlah Pameran pembangunan / promosi/ investasi	1 Tahun		75.000.000	78.750.000	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> BELANJA PAMERAN PEMBANGUNAN DAN PROMOSI PROGRAM PEMERINTAH													
4 01 4.01.03 08	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR</b>									64.450.000	67.672.500			
4 01 4.01.03 08 01	Koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah						Jumlah Koordinasi pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan mewabah	11 Kali		64.450.000	67.672.500	Lama		
	<b>Sekretariat Daerah</b> <b>Bagian Kesra:</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Alat Tulis Kegiatan Sosialisasi Belanja Spanduk Makan Minum Kegiatan Rapat Koordinasi Luar Daerah Pengganti Transport Narasumber Kegiatan Koordinasi/Sosialisasi													
4 01 4.01.03 08	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH</b>					Jumlah Nota Kesepakatan/Kerjasama Pemerintah Kota dengan pihak lain				380.631.000	399.662.550			
4 01 4.01.03 08 01	Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik						Jumlah Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	12 Kali		180.631.000	189.662.550	Lama		
	<b>Bagian AP:</b> Pembentukan Tim Pelaksana Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusun Naskah Belanja Alat Tulis Kantor Penggandaan/Fotocopy Belanja Penulisan Cetak Foto/Dokumentasi Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Makan dan Minum Rapat Belanja Pakaian Seragam Kegiatan (Pakaian Seragam APEKSI) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring dan Evaluasi Kerjasama) Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota RI dan di Luar Propinsi NTB dan Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota Propinsi NTB dan Sekitarnya Belanja Kontribusi APEKSI													
4 01 4.01.03 08 02	Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)						Jumlah Rapat Koordinasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	1 Kali		200.000.000	210.000.000	Lama		
4 01 4.01.03 09	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase belanja publik yang dilelang melalui LPSE	46 Paket Pengadaan				1.057.400.000	304.500.000			
4 01 4.01.03 09 01	Pelaksanaan pengadaan barang/jasa (POKJA ULP)						Jumlah Pelaksanaan pengadaan barang/jasa (POKJA ULP)	100 paket		767.400.000		Lama		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	<b>Bagian APP dan LPB:</b> Honorarium Pengelola ULP Honorarium Tim Penilai Angka Kredit JPPPB Belanja Alat tulis kantor Belanja Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman harian Pegawai Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja perjalanan dinas luar Daerah Layanan pengadaan secara elektronik							Jumlah Layanan pengadaan secara elektronik	1 paket		290.000.000	304.500.000	Lama	
	<b>Bagian Umum:</b> Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Internet "Astinet" LPSE Belanja Penggandaan/Foto Copy Makan Minum Harian Pegawai Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pengadaan Aplikasi Sewa Aset Pemerintah Online Software Backup Data Server LPSE													
4 01 4.01.03 09 03	<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	<b>Persentase SKPD yang telah memiliki website</b>	<b>3 Kali</b>					<b>2.119.100.000</b>	<b>2.225.055.000</b>		
4 01 4.01.03 09 01	Penyusunan Sitem Informasi Terhadap Layanan Publik						Jumlah Penyusunan Sitem Informasi Terhadap Layanan Publik	12 Bulan		295.000.000	309.750.000	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> BELANJA SPANDUK / UMBUL-UMBUL / BENDERA / BALIHO / XBANNER BELANJA SEWA RUANG PEMASANGAN BALIHO DAN SPANDUK / SPACE IKLAN													
4 01 4.01.03 09 02	Penyusunan Kalender Tahunan Pemerintah Kota Bima						Penyusunan Kalender Tahunan Pemerintah Kota Bima	1 paket		163.500.000	171.675.000	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PEJABAT PENGADAAN - KALENDER TAHUNAN PEMERINTAH KOTA BIMA BELANJA KALENDER TAHUNAN PEMERINTAH KOTA BIMA (KALENDER MEJA DAN GANTUNG)													
4 01 4.01.03 09 04	Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Pembinaan dan Pendampingan Pers)						Kerjasama Informasi Dengan Mas Media (Pembinaan dan Pendampingan)	1 Tahun		1.174.000.000	1.232.700.000	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b> BELANJA PEMBINAAN SURAT KABAR / MAJALAH / MEDIA ONLINE BULANAN (LOMBOK POST, JAWA POS, RADAR TAMBORA, NEW VISIONER, BIMEKS, GARDIA ASAKOTA, TEMPO, METRO NTB, MEDIA NUSANTARA, KEDAULATAN INSANI, SUARA NTB, NUANSA POST, REPORTASE, AMPERA, LENTERA NUSANTARA, RINTAM POST, HARIAN TIMUR, LONDA POST, FAJAR TIMUR, SUARA RAKYAT, INDO TIMUR, LENSA POST, KAHABA, DINAMIKA, AKTUALITA, BONGGAR, KONTRAS, BAROMETER, PATRON, FAJAR NEWS, BERITA ANDA, KINDO, REALITA, SAMADA POST, MPK, KPK, BAL EVENT, BIMA NTIKA SUARA BIMA)													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	KERJASAMA INFORMASI PENYEBARLUASAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PERS (MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK) - HIMBAUAN WALIKOTA, IKLAN LAYANAN MASYARAKAT, PENYIARAN BERITA PEMBANGUNAN, BIAYA SOSIALISASI HASIL PEMBANGUNAN, BIAYA PUBLIKASI EDISI KHUSUS, JUMPA PERS, BELANJA SOSIALISASI / PEMBINAAN PERS (RADIO / TV / SURAT KABAR / MAJALAH)													
4 01	4.01.03	09	05	Penyusunan Buletin Pemerintah Kota Bima			Penyusunan Buletin Pemerintah Kota Bima	1 Kali		486.600.000	510.930.000	Lama		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>													
	HONORARIUM TIM PEMBUATAN BULETIN PEMERINTAH KOTA BIMA													
	BELANJA CETAK BULETIN PEMERINTAH KOTA BIMA													
4 01	4.01.03	09		<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase produk hukum daerah yang dipublikasikan		1.278.785.000	1.342.724.250			
4 01	4.01.03	09	01	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah			Jumlah Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	10 segmen		173.347.000	182.014.350	Lama		
	<b>Bagian AP:</b>													
	Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas													
	Honorarium Tim Penyusun Tapal Batas													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Pengandaan/Fotocopy													
	Belanja Penjilidan													
	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi													
	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Rapat													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Survey dan Koordinasi Pelaksanaan Tapal Batas													
	Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota RI dan di Luar Propinsi NTB dan Koordinasi/Konsultasi Ibu Kota Propinsi NTB dan Sekitarnya													
	Pengadaan PAL BATAS													
4 01	4.01.03	09	02	Optimalisasi Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah kegiatan Optimalisasi Kecamatan dan Kelurahan	3 Kali		143.307.000	150.472.350	Lama		
4 01	4.01.03	09	03	Pembakuan Nama Rupa Bumi			Jumlah Pembakuan Nama Rupa Bumi	10 segmen		275.267.000	289.030.350	Lama		
4 01	4.01.03	09	05	Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan			Jumlah Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	3 kelurahan		337.542.000	354.419.100	Lama		
4 01	4.01.03	09		Pelaksanaan Administrasi Wilayah Kecamatan dan Kelurahan						183.336.000	192.502.800			
	<b>Bagian AP:</b>													
	Pembentukan Tim Pelaksana PERWALI Kelurahan													
	Honorarium Tim Penyusun PERWALI Kelurahan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Pengandaan/Fotocopy													
	Belanja Penjilidan													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Evaluasi dan Pengumpulan Data)													
4 01	4.01.03	09		Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat						165.986.000	174.285.300			
	<b>Bagian AP:</b>													
	Pembentukan Tim Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat													
	Tim Penyusun Laporan Kepuasan Masyarakat													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Pengandaan/Fotocopy													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Penjilidan													
4 01 4.01.03 09	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Survey)													
4 01 4.01.03 09 01	<b>PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>				Dokumen standar kompetensi jabatan					99.000.000	103.950.000			
4 01 4.01.03 09 01	Penilaian lomba sekolah sehat (LSS)						Jumlah Pelaksanaan lomba sekolah sehat (LSS)	1 keg		49.000.000	51.450.000	Lama		
4 01 4.01.03 09 01	Sosialisasi Narkoba kepada pelajar						Jumlah Sosialisasi Narkoba kepada pelajar	2 kali		50.000.000	52.500.000	Baru		
4 01 4.01.03 11	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Jenis pelayanan yang memiliki IKM minimal baik.					347.003.000	364.353.150			
4 01 4.01.03 11 01	Koordinasi Peringatan hari besar (Keagamaan dan Nasional)						Jumlah Koordinasi Peringatan hari besar (Keagamaan dan Nasional)	2 kegiatan		73.500.000	77.175.000	Lama		
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Alat Tulis Kantor (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Bahan untuk Cendramata/Souvenir (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Balio (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Bahan Contoh (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Honorarium Drum Band													
	Belanja Cetak (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Penggandaan (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Cetak Foto/Dokumentasi (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Sewa Tempat Kegiatan HUT Kota Bima													
	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Sewa Meja Kursi (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Sewa Tenda (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Sewa Sound System (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja sewa tanaman hias (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Belanja Pakaian Seragam Kegiatan (HUT Kota Bima dan pakaian drumband serta atribut)													
	Uang saku/Transport Peserta (HUT Kota Bima, HUT RI dan Transport Warakawuri serta Veteran RI)													
	Hadiah lomba (HUT Kota Bima dan HUT RI)													
	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber HUT Kota Bima													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	<b>Bagian Humas dan Protokol:</b>													
	HONORARIUM TIM PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL													
	BELANJA PUBLIKASI / IKLAN PERINGATAN HARI BESAR KEAGAMAAN DAN NASIONAL													
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan													
	Sewa Ruang Rapat													
	Belanja Sewa Meja Kursi Rapat Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi													
	Belanja Sewa Sound System Rapat Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi													
	Makan Minum Kegiatan Rapat Persiapan													
	Transportasi Peserta Rapat Rapat Persiapan Pelaksanaan dan Evaluasi													
4	01	4.01.03	11	02	Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Haji		Jumlah Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Haji	2 Kali		75.000.000	78.750.000	Lama		
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan									
					Belanja Baliho dan Spanduk Penjemputan dan Pengantaran									
					Makan Minum Panitia Kegiatan Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Haji									
					Koordinasi Pengantaran dan Penjemputan Jemaah Haji Kota Bima ke Mataram									
4	01	4.01.03	11	03	Pendataan Sarana Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah		Jumlah Dokumen hasil Pendataan Sarana Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah	1 dok		23.750.000	24.937.500	Lama		
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Penyusunan Data Pendataan Agama dan Tempat Ibadah									
					SPPD Dalam Daerah Dalam Rangka Pendataan Sarana/Tempat Ibadah									
4	01	4.01.03	11	04	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	2 Kali		28.600.000	30.030.000	Lama		
4	01	4.01.03	11		Koordinasi Bidang Perekonomian					146.153.000	153.460.650			
					<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>									
					Honorarium Pelaksana Kegiatan									
					Sosialisasi Percepatan Akses Keuangan Daerah									
					Honorarium Tim Penyusun Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah									
					Belanja Alat Tulis Kantor									
					Belanja Materai									
					Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Baliho									
					Belanja Pengandaan									
					Belanja Makanan dan Minuman Rapat									
					Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah									
					Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah									
4	01	4.01.03	12		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN KEAGAMAAN DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN</b>	Pembangunan Agama	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Kota Bima	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	1.481.159.750	1.555.217.738			
4	01	4.01.03	12	01	Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ				Jumlah Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ	113.675.000	119.358.750	Lama		
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan									
					Spanduk/Baliho Kegiatan									
					Makan Minum Kegiatan									
					Koordinator/Monitoring Pelaksanaan STQ/MTQ Tk. Kelurahan/Kecamatan/Kota									
					SPPD Koordinasi STQ/MTQ									
					Narasumber Pelaksanaan Kegiatan									
4	01	4.01.03	12	02	Pembinaan Petugas Keagamaan dan Guru Ngaji				Jumlah Pembinaan Petugas Keagamaan dan Guru Ngaji	588.790.000	618.229.500	Lama		
					<b>Bagian Kesra:</b>									



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pembinaan Petugas Keagamaan dan Guru Ngaji													
	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan IMTAQ ASN, Do'a dan Zikir Masyarakat Kota Bima													
	Honorarium Tim pengadaan Barang dan Jasa													
	Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa Bag. Kesra													
	Belanja Penggandaan													
	Sewa Tempat Pembinaan													
	Sewa Meja Kursi (Kegiatan Dzikir dan Doa bersama, pembinaan guru ngaji, pembinaan petugas penyelenggara jenazah, pembinaan imam bilal marbot, pembinaan organisasi keagamaan, pembinaan lembaga islam)													
	Sewa Tenda Kegiatan Dzikir dan Doa Bersama													
	Sewa sound system (Kegiatan Dzikir dan Doa bersama, pembinaan guru ngaji, pembinaan petugas penyelenggara jenazah, pembinaan imam bilal marbot, pembinaan organisasi keagamaan, pembinaan lembaga islam)													
	Sewa tanaman Hias kegiatan Dzikir dan Doa Bersama													
	makanan minuman (Kegiatan Dzikir dan Doa bersama, pembinaan guru ngaji, pembinaan petugas penyelenggara jenazah, pembinaan imam bilal marbot, pembinaan organisasi keagamaan, pembinaan lembaga islam)													
	uang saku peserta (Kegiatan pembinaan petugas penyelenggara jenazah, pembinaan imam bilal marbot, pembinaan organisasi keagamaan, pembinaan lembaga islam)													
	Belanja Bantuan untuk masyarakat (Iqra, Al-Our'an, buku keagamaan)													
	Narasumber Kegiatan Pembinaan Guru Ngaji, Pembinaan ormas islam, pembinaan lembaga keagamaan, lmtaq jumat, penceramah kegiatan safari ramadhan dan pembinaan keagamaan, honorarium pengisi acara kegiatan dzikir dan do'a, narasumber kegiatan pembinaan penyelenggaraan jenazah, pembinaan imam bilal marbot													
4	01	4.01.03	12	03	Verifikasi dan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Keagamaan			Jumlah Verifikasi dan Rekomendasi Bantuan Sosial dan Keagamaan	12 bulan		60.000.000	63.000.000	Lama	
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Rekomendasi Bantuan Sosial, Keagamaan dan Masyarakat									
					Belanja Fotocopy Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial, Keagamaan dan Masyarakat									
					Jilid Dokumen									
					SPPD Dalam Daerah Dalam Rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial dan Keagamaan									
4	01	4.01.03	12	04	Koordinasi dan sinergitas Program kegiatan SKPD Rumpun Kesra			Jumlah Koordinasi Rumpun Kesra	1 kegiatan		29.819.750	31.310.738	Lama	
					<b>Bagian Kesra:</b>									
					Honorarium Kegiatan Rumpun Kesra									
					Honorarium Tim Pengumpul Data Kegiatan Rumpun Kesra									
					Foto Copy Laporan Rumpun Kesra									

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Belanja Penjilidan Laporan Rumpun Kesra													
	Sewa Aula kegiatan rakor rumpun kesra makan minum kegiatan rakor rumpun kesra													
	Pengganti transport rapat koordinasi rumpun kesra honorarium narasumber rakor rumpun kesra													
4 01 4.01.03 12 05	Pembinaan Majelis Taklim Tingkat Kota Bima						Jumlah Pembinaan Majelis Taklim Tingkat Kota Bima	1 kegiatan		300.000.000	315.000.000	Lama		
4 01 4.01.03 12 06	Imtaq dan dzikir bersama						Imtaq dan dzikir bersama	12 bln		50.000.000	52.500.000	Lama		
4 01 4.01.03 12	Pengelolaan Masjid Terapung Kota Bima									235.000.000	246.750.000			
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Koordinator Pengelolaan Masjid Terapung Kota Bima (Imam, Bilal, Marbot, Cleaning Service dan Security)													
	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih													
4 01 4.01.03 12	Pembinaan Remaja Mesjid									103.875.000	109.068.750			
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Pelaksana Kegiatan Pembinaan													
	Belanja Paket ATK Kegiatan Pembinaan													
	Spanduk Kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Foto Copy Materi Pembinaan Remaja Masjid Tingkat Kecamatan													
	Jilid Materi Kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Sewa Tempat Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Sewa kursi kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Sewa Tenda Kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Sewa Sound System kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Belanja Sewa Taman Hias kegiatan pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Pengganti transport Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
	Narasumber Kegiatan Pembinaan Remaja Mesjid Tingkat Kecamatan													
4 01 4.01.03 15	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>						<b>85.000.000</b>	<b>89.250.000</b>			
4 01 4.01.03 15 01	Koordinasi/Konsultasi pengendalian inflasi daerah						koordinasi pengendalian inflasi daerah	12 bulan		85.000.000	89.250.000	Lama		
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Honorarium Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID)													
	Honorarium Tim Penyusun Laporan Inflasi Kota Bima													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Pengandaan													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													
4 01 4.01.03 16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT</b>	<b>Pembangunan ekonomi</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi</b>	<b>Kota Bima</b>						<b>60.000.000</b>	<b>63.000.000</b>			
4 01 4.01.03 16 01	Koordinasi dan pengawas pendistribusian BBM dan Gas Elpiji						jumlah pengawasan pendistribusian BBM dan gas elpiji	230 tabung		60.000.000	63.000.000	Lama		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Balho													
	Belanja Penggandaan													
	Belanja Penjilidan													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													
4 01 4.01.03 17	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PRODUKSI DAERAH</b>	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima						135.000.000	141.750.000			
4 01 4.01.03 17 01	Pengembangan ekonomi lokal						Dokumen pengembangan ekonomi lokal	1 dok		55.000.000	57.750.000	Lama		
4 01 4.01.03 17 02	Monitoring tentang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan kelautan						Dokumen movev data tentang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dan kelautan	1 dok		80.000.000	84.000.000	Lama		
	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera/Balho													
	Belanja Penggandaan													
	Belanja Penjilidan													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													
4 01 4.01.03 18	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima						140.000.000	147.000.000			
4 01 4.01.03 18 01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional						dokumen produk hokum/kebijakan dan pelaksanaan operasional daerah pemerintah Kota Bima	1 dok		85.000.000	89.250.000	Lama		
4 01 4.01.03 18 02	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan						Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	1 keg		55.000.000	57.750.000	Lama		
4 01 4.01.03 19	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEMPENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH</b>	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima						140.000.000	147.000.000			
4 01 4.01.03 19 01	Koordinasi penggunaan dana pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi						dokumen monitoring penggunaan dana pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi	1 dok		85.000.000	89.250.000	Lama		
4 01 4.01.03 19 02	Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal						Dokumen Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	1 keg		55.000.000	57.750.000	Lama		
4 01 4.01.03 20	<b>PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDISIF</b>	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima						50.000.000	52.500.000			
4 01 4.01.03 20 01	Fasilitasi pengembangan usaha kecil						pengembangan usaha kecil masyarakat	1 keg		50.000.000	52.500.000	Lama		
4 01 4.01.03 21	<b>PROGRAM PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI</b>	Pembangunan ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kota Bima						75.000.000	78.750.000			
4 01 4.01.03 21 01	Pengembangan potensi unggulan daerah						Pengembangan potensi unggulan daerah	1 keg		75.000.000	78.750.000	Baru		
4 01 4.01.03 22	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANG NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/IDS</b>	Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kota Bima						145.000.000	152.250.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 22 01	Penguatan kelembagaan komisi penanggulangan AIDS daerah						kelembagaan KPA Kota Bima	1 lembaga		85.000.000	89.250.000	Lama		
4 01 4.01.03 22 02	Pencegahan Pemberantasan penanggulangan peredaran gelap norkoba (P4GN)						Terkoordinasi rapat (P4GN) dan pembentukan BNN	1 keg		60.000.000	63.000.000	Lama		
4 01 4.01.03 28	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT</b>					Persentase Jenis pelayanan yang masuk zona hijau pelayanan publik..				3.253.526.900	105.000.000			
4 01 4.01.03 28 01	Fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan publik						Jumlah Fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan publik	1 Kali		100.000.000	105.000.000	Lama		
	<b>Bagian Organisasi:</b>													
	Honorarium Tim Teknis Peningkatan Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kota Bima tahun 2017													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Honorarium Tim Penyusun Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Kota Bima													
	Honorarium Tim Penyusun Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2018													
	Belanja Narasumber Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Belanja Moderator, MC, Pembaca Doa Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan													
	ATK Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Belanja Spanduk Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Belanja Cetak Dokumen Survey Indeks Kepuasan Masyarakat													
	Belanja Cetak Sampul dan Jilid Dokumen Perwali Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup pemerintah Kota Bima													
	Belanja Pengandaan Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat													
	Belanja Sewa Aula / Ruang Rapat Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Makan Minum Rapat Kegiatan													
	Makan Minum Peserta dan Panitia Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah													
	Uang Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 28 02	Penyusunan tata naskah dinas						Jumlah dokumen tata naskah dinas	1 dok		50.000.000	52.500.000	Baru		
4 01 4.01.03 28 03	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)						Jumlah dokumen SOP	1 dok		35.000.000	36.750.000	Baru		
4 01 4.01.03 28 04	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi						Jumlah dokumen Road Map Reformasi Birokrasi	1 dok		50.000.000	52.500.000	Baru		
4 01 4.01.03 28 05	Penyusunan standar pelayanan publik						Jumlah dokumen standar pelayanan publik	1 dok		35.000.000	36.750.000	Baru		
4 01 4.01.03 28 06	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat						Jumlah Fasilitasi pembinaan peningkatan pelayanan publik	1 dok		50.000.000	52.500.000	Baru		
4 01 4.01.03 28 07	Koordinasi bidang perekonomian						Jumlah dokumen hasil survey kepuasan asyarakat	1 dok		100.000.000	105.000.000	Lama		
4 01 4.01.03 28 08	Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)						Jumlah Koordinasi peringatan hari besar (keagamaan dan nasional)	6 kali		2.833.526.900	2.975.203.245	Lama		
4 01 4.01.03 29	<b>PROGRAM ADMINISTRASI KERJASAMA PEMBANGUNAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Jumlah MOU kerjasama yang ditandatangani</b>	<b>12 MOU</b>				<b>586.183.100</b>	<b>615.492.255</b>			
4 01 4.01.03 29 01	Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan						Jumlah Koordinasi pembinaan administrasi pembangunan	12 Bulan		422.130.100	443.236.605	Lama		
	<b>Bagian APP dan LPBJ:</b>													
	Honorarium Tim Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan													
	Honorarium Pembantu Kegiatan Koordinasi Pembangunan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Penggandaan Laporan dan Surat-surat													
	Belanja Sewa Ruangan Rapat Pertemuan													
	Belanja Makanan dan Minuman rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah													
4 01 4.01.03 29 02	Pembinaan jasa konstruksi						Jumlah Pembinaan jasa konstruksi	12 Bulan		164.053.000	172.255.650	Lama		
	<b>Bagian APP dan LPBJ:</b>													
	Honorarium Tim Pembina Jasa Konstruksi													
	Honorarium Pembantu Kegiatan Koordinasi Pembangunan													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Penggandaan													
	Sewa Ruangan Rapat													
	Belanja Makanan dan Minuman rapat													
	Belanja perjalanan dinas Luar Daerah													
4 01 4.01.03 47	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Dokumen standar kompetensi jabatan</b>					<b>394.979.400</b>	<b>414.728.370</b>			
4 01 4.01.03 47 01	Pelaksanaan analisis jabatan PNS						Jumlah dokumen instrumen analisis jabatan PNS	1 dok		45.989.700	48.289.185	Lama		
4 01 4.01.03 47 02	Pelaksanaan analisis beban kerja PNS						Jumlah dokumen instrumen analisis beban kerja PNS	1 dok		50.000.000	52.500.000	Baru		
4 01 4.01.03 47 03	Penyusunan Standar Kompetensi jabatan						Jumlah dokumen standar kompetensi jabatan	1 dok		75.000.000	78.750.000	Baru		
4 01 4.01.03 47 04	Penyusunan Evaluasi Jabatan						Jumlah dokumen hasil evaluasi jabatan	1 dok		60.000.000	63.000.000	Baru		
4 01 4.01.03 47 19	Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan aparatur						Jumlah Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan aparatur	1 keg		118.000.000	123.900.000	Lama		
	<b>Bagian Organisasi:</b>													
	Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Dokumen Penelitian :													
	Tim Fasilitasi Penyusunan Kajian Akademis UPTD													
	Honorarium Petugas Pengarsip Dokumen													
	Belanja Alat Tulis Kantor Rutin													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	ATK Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah													
	Belanja Cetak Map													
	Belanja Cetak Sampul dan Jilid Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Bima													
	Belanja Cetak dan Jilid Dokumen Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah													
	Belanja Cetak Balih dan Spanduk													
	Penggandaan Dokumen Rutin													
	Belanja Penggandaan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Bima													
	Belanja Penggandaan Dokumen Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah													
	Makan minum Rapat Kegiatan Penyusunan Evaluasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Belanja Makan Minum Rapat Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah													
	Belanja Makan Minum Tamu													
5 02 4.01.04 47	Pembinaan Kepegawaian									45.989.700	48.289.185			
	<b>Bagian Umum:</b>													
	Honorarium Pegawai/Petugas Pendataan DUK, Impassing, Berkala dan Absensi													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Penggandaan Dokumen Data DUK, Impassing, Berkala dan Absensi													
	Penjilidan Dokumen Data DUK, Impassing, Berkala dan Absensi													
5 02 4.01.04 47	Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS													
	<b>Bagian Organisasi:</b>													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Evaluasi Jabatan													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kota Bima													
	Tim Penyusun Dokumen Evaluasi Jabatan Lingkup Pemerintah Kota Bima Tahun 2018													
	Tim Penyusun Dokumen Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja													
	Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan dan Evaluasi jabatan													
	Belanja Alat Tulis Kantor Peserta Kegiatan Sosialisasi													
	Belanja Alat Tulis Kantor Dokumen Penyempurnaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja													
	Belanja Spanduk Kegiatan Sosialisasi													
	Belanja Cetak dan Jilid Cover Dokumen Analisis Jabatan dan Evaluasi Jabatan													
	Fotocopy / Penggandaan Dokumen Evaluasi jabatan Lingkup Pemerintah Kota Bima													
	Fotocopy Dokumen Penyempurnaan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja													
	Penggandaan Dokumen Peserta Bimtek													
	Belanja Sewa Aula													
	Belanja Makan Minum Peserta Bimtek Evaluasi Jabatan													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Konsultasi, Koordinasi dan Evaluasi Uang Saku Peserta Bimtek													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.03 48	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima						180.000.000	582.579.018.000			
4 01 4.01.03 48 01	Pemetaan Kelembagaan Daerah						Adanya klasifikasi beban kerja Perangkat Daerah	1 keg		40.000.000	308.509.288.500	Baru		
4 01 4.01.03 48 02	Penyusunan profil Kelembagaan						Profil Perangkat Daerah, Kelurahan dan UPTD	2 dok		45.000.000	164.270.211.000	Baru		
4 01 4.01.03 48 03	Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah						Adanya hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah	1 keg		60.000.000	82.135.105.500	Baru		
4 01 4.01.03 48 04	Evaluasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah						Adanya hasil evaluasi kelembagaan UPTD	1 keg		35.000.000	27.664.413.000	Baru		
4 01 4.01.03	<b>Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV AIDS</b>									<b>193.009.700</b>	<b>26.373.154.500</b>			
4 01 4.01.03	Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah									91.009.700	8.066.404.500			
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Kegiatan Monitoring/Koordinasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Bima													
	Honorarium Sekretariat KPA													
	ATK Sekretariat KPA													
	Belanja Spanduk													
	Sewa Ruang Rapat													
	Makan Minum Kegiatan													
	Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Penyuluhan KPA													
	rapat koordinasi ke luar daerah													
	Pengganti Uang Transport													
	Honorarium Tenaga Ahli/Konselor diklat dan pelatihan Tenaga													
	Honorarium rapat koordinasi													
4 01 4.01.03	Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)									102.000.000	1.656.133.500			
	<b>Bagian Kesra:</b>													
	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan spanduk Sosialisasi													
	sewa ruang rapat													
	makan minum kegiatan													
	transport kegiatan rapat koordinasi													
	honorarium tenaga ahli kegiatan rapat koordinasi/sosialisasi Narkoba													
4 01 4.01.04	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>									<b>17.500.000.000</b>	<b>18.375.000.000</b>	<b>0</b>		
4 01 4.01.04 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas OPD</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>				<b>7.269.790.000</b>	<b>7.633.279.500</b>			
4 01 4.01.04 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	48 rek telepon/inter net, 24 meteran		347.500.000	364.875.000	Lama		
4 01 4.01.04 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi	Roda 4 : 8 unit, Roda 2 :		65.000.000	68.250.000	Lama		
4 01 4.01.04 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	5 orang jasa keuangan, 9 orang		178.520.000	187.446.000	Lama		
4 01 4.01.04 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	100%		128.100.000	134.505.000	Lama		
4 01 4.01.04 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	1 paket		100.270.000	105.283.500	Lama		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.04 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	1 paket			138.500.000	145.425.000	Lama	
4 01 4.01.04 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang	1paket			10.000.000	10.500.000	Lama	
4 01 4.01.04 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	1 paket			119.500.000	125.475.000	Lama	
4 01 4.01.04 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	30eks koran lokal, 20 eks koran			36.000.000	37.800.000	Lama	
4 01 4.01.04 01 17	Penyediaan makanan dan minuman									Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 Bulan			996.400.000	1.046.220.000	Lama	
4 01 4.01.04 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah									Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	1 tahun			5.000.000.000	5.250.000.000	Lama	
4 01 4.01.04 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah									Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	1 tahun			150.000.000	157.500.000	Lama	
4 01 4.01.04 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>1.177.270.000</b>	<b>1.236.133.500</b>		
4 01 4.01.04 02 03	Pembangunan gedung kantor									Jumlah gedung kantor yang dibangun baru	1 unit			250.000.000	262.500.000	Lama	
4 01 4.01.04 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor													494.770.000	519.508.500	Lama	
4 01 4.01.04 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan			65.000.000	68.250.000	Lama	
4 01 4.01.04 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional									Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Roda 4 : 8 unit, Roda 2 :			267.500.000	280.875.000	Lama	
4 01 4.01.04 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor									Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan kantor yang berfungsi baik	25 Unit			65.000.000	68.250.000	Lama	
4 01 4.01.04 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	20 Unit			35.000.000	36.750.000	Lama	
4 01 4.01.04 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin</b>	<b>0%</b>					<b>276.040.000</b>	<b>289.842.000</b>		
4 01 4.01.04 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya									Jumlah Pakaian Dinas	63 stel			201.040.000	211.092.000	Lama	
4 01 4.01.04 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	63 stel			75.000.000	78.750.000	Lama	
4 01 4.01.04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>				<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional</b>	<b>30%</b>					<b>3.070.000.000</b>	<b>3.223.500.000</b>		
4 01 4.01.04 05 04	Konsultasi dan studi banding									Jumlah Konsultasi dan studi banding	4 kali			2.600.000.000	2.730.000.000	Lama	
4 01 4.01.04 05 06	Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah									Jumlah Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah	10 Kali			470.000.000	493.500.000	Lama	
4 01 4.01.04 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>					<b>75.000.000</b>	<b>78.750.000</b>		
4 01 4.01.04 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	1 Dokumen			15.000.000	15.750.000	Lama	
4 01 4.01.04 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah									Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen			40.000.000	42.000.000	Lama	



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
									(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
4 01 4.01.04 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD									Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen		20.000.000	21.000.000	Lama			
4 01 4.01.04 07	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>					Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	<b>Produk hukum yang dibahas dan mendapatkan persetujuan</b>	<b>20 Raperda</b>			<b>5.631.900.000</b>	<b>5.913.495.000</b>				
4 01 4.01.04 07 01	Pembahasan rancangan peraturan daerah									Jumlah Pembahasan rancangan peraturan daerah	12 Kali	641.800.000	673.890.000	Lama				
4 01 4.01.04 07 02	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan									Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	4 Kali	1.290.100.000	1.354.605.000	Lama				
4 01 4.01.04 07 03	Rapat-rapat paripurna									Jumlah Rapat-rapat paripurna	2 Kali	650.000.000	682.500.000	Lama				
4 01 4.01.04 07 04	Kegiatan Reses									Jumlah Kegiatan Reses	3 Kali	1.700.000.000	1.785.000.000	Lama				
4 01 4.01.04 07 05	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD									Jumlah kunjungan pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	4 kali	1.350.000.000	1.417.500.000					
4 01 4.01.09	<b>KECAMATAN RASANAE BARAT</b>											<b>1.028.643.700</b>	<b>#REF!</b>					
4 01 4.01.09 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%			<b>657.643.700</b>	<b>690.525.885</b>				
4 01 4.01.09 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan untuk 6 kelurahan dan kantor	65.000.000	68.250.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	7 unit	23.429.500	24.600.975	Lama				
4 01 4.01.09 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan									Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan	58.000.000	60.900.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor									Cakupan ruang kantor yang bersih	100%	33.000.000	34.650.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 10	Penyediaan alat tulis kantor									Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	32 jenis,12 Bulan	100.000.000	105.000.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									Jumlah cetakan dan penggandaan	12 Bulan	25.000.000	26.250.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	10 jenis	29.225.000	30.686.250	Lama				
4 01 4.01.09 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	3 media, 12 bulan	15.000.000	15.750.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor									Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 bulan	23.000.000	24.150.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 17	Penyediaan makanan dan minuman									Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	4 jenis,12 Bulan	55.000.000	57.750.000	Lama				
4 01 4.01.09 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan	195.989.200	205.788.660	Lama				
4 01 4.01.09 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah									Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan	35.000.000	36.750.000	Lama				
4 01 4.01.09 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>					Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%			<b>126.000.000</b>	<b>132.300.000</b>				
4 01 4.01.09 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor									Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	12 Bulan	55.000.000	57.750.000	Lama				
4 01 4.01.09 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 Bulan	45.000.000	47.250.000	Lama				
4 01 4.01.09 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor									Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	12 Bulan	26.000.000	27.300.000	Lama				
4 01 4.01.09 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>					Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik	Kota Bima	Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin	0%			<b>15.000.000</b>	<b>15.750.000</b>				

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.09 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	25 stel		15.000.000	15.750.000	Lama		
4 01 4.01.09 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>			<b>70.000.000</b>	73.500.000				
4 01 4.01.09 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama		
4 01 4.01.09 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD tersedia	1 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama		
4 01 4.01.09 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah									Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen		50.000.000	52.500.000	Lama		
4 01 4.01.09 16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASA KEPALA DAERAH</b>											<b>120.000.000</b>	<b>126.000.000</b>				
4 01 4.01.09 16 05	Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah									Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi mendadak Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah	6 kali/6 kel		120.000.000	126.000.000	Lama		
4 01 4.01.09 27	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>											<b>40.000.000</b>	42.000.000				
4 01 4.01.09 27 09	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan									Jumlah Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	di kec dan 6 kel		20.000.000	21.000.000	Lama		
4 01 4.01.09 27 11	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan									Jumlah Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	di kec dan 6 kel		20.000.000	21.000.000	Lama		
4 01 4.01.10	<b>KECAMATAN RASANA E TIMUR</b>											<b>1.237.365.500</b>	<b>1.299.233.775</b>				
4 01 4.01.10 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas OPD</b>	Kota Bima	<b>Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>100%</b>			<b>687.380.000</b>	<b>721.749.000</b>				
4 01 4.01.10 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	kantor Kec.,7 kel, 12 bulan		30.000.000,00	31.500.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	9 unit		35.000.000,00	36.750.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan									Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	11 orang		100.000.000,00	105.000.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor									Cakupan ruang kantor yang bersih	100%		50.000.000,00	52.500.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 10	Penyediaan alat tulis kantor									Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	30 jenis		115.000.000,00	120.750.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									Jumla Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		38.000.000,00	39.900.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	8 jenis, 7 kel		25.000.000,00	26.250.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor									Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	1 Paket		10.000.000,00	10.500.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan									Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	7 media		10.000.000,00	10.500.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 17	Penyediaan makanan dan minuman									Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 Bulan		37.000.000,00	38.850.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan		174.700.000,00	183.435.000	Lama		
4 01 4.01.10 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah									Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan		62.680.000,00	65.814.000	Lama		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.10 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%					237.985.500	249.884.775		
4 01 4.01.10 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor	3 paket			29.846.700,00	31.339.035	Lama	
4 01 4.01.10 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket			48.250.000,00	50.662.500	Lama	
4 01 4.01.10 02 10	Pengadaan mebeleur						Jumlah Pengadaan mebeleur	1 paket			30.000.000,00	31.500.000	Lama	
4 01 4.01.10 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 tahun			54.000.000,00	56.700.000	Lama	
4 01 4.01.10 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 tahun			58.388.800,00	61.308.240	Lama	
4 01 4.01.10 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 tahun			17.500.000,00	18.375.000	Lama	
4 01 4.01.10 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%					90.000.000	94.500.000		
4 01 4.01.10 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	2 Dokumen			5.000.000	5.250.000	Lama	
4 01 4.01.10 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen			5.000.000	5.250.000	Lama	
4 01 4.01.10 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen			50.000.000	52.500.000	Lama	
4 01 4.01.10 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	2 Dokumen			30.000.000	31.500.000	Lama	
4 01 4.01.10 16	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH										135.000.000	141.750.000		
4 01 4.01.10 16 05	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah						Jumlah Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	7 kel			135.000.000	141.750.000	Lama	
4 01 4.01.10 27	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU										87.000.000	91.350.000		
4 01 4.01.10 27 09	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan						Jumlah dokumen kependudukan dan pertanahan yang falid	1 dok			9.000.000	9.450.000	Lama	
4 01 4.01.10 27 11	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan						Jumlah Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1 tahun			78.000.000	81.900.000	Lama	
4 01 4.01.11	KECAMATAN ASAKOTA										949.246.000	996.708.300		
4 01 4.01.11 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%					697.316.400	732.182.220		
4 01 4.01.11 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			30.048.000,00	31.550.400	Lama	
4 01 4.01.11 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	2 unit			40.000.000,00	42.000.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	3 orang			80.292.700,00	84.307.335	Lama	
4 01 4.01.11 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	100%			50.000.000,00	52.500.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang tersedia	12 Bulan			40.000.000,00	42.000.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	31 jenis			55.000.000,00	57.750.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	24.000 lbr.100 eks			21.470.700,00	22.544.235	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.11 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	5 unit			45.000.000,00	47.250.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kerja yang memadai.	6 jenis			60.000.000,00	63.000.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	6 media			25.000.000,00	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 Bulan			35.000.000,00	36.750.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan			156.805.000,00	164.645.250	Lama	
4 01 4.01.11 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan			50.000.000,00	52.500.000	Lama	
4 01 4.01.11 01 20	Penyediaan Jasa Kebersihan Halaman Kantor						Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Halaman Kantor	12 Bulan			8.700.000,00	9.135.000	Lama	
<b>4 01 4.01.11 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>146.929.600</b>	<b>154.276.080</b>		
4 01 4.01.11 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket			10.400.000,00	10.920.000	Lama	
4 01 4.01.11 02 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas						Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 tahun			2.045.000,00	2.147.250	Lama	
4 01 4.01.11 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 tahun			29.774.200,00	31.262.910	Lama	
4 01 4.01.11 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	7 jenis			54.710.400,00	57.445.920	Lama	
4 01 4.01.11 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 tahun			50.000.000,00	52.500.000	Lama	
<b>4 01 4.01.11 06</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>					<b>80.000.000</b>	<b>84.000.000</b>		
4 01 4.01.11 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen			50.000.000	52.500.000	Lama	
4 01 4.01.11 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen			30.000.000	31.500.000	Lama	
<b>4 01 4.01.11 07</b>	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</b>										<b>25.000.000</b>	<b>26.250.000</b>		
4 01 4.01.11 07 01	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan						Jumlah dokumen Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan	1 dok			10.000.000	10.500.000	Lama	
4 01 4.01.11 07 02	Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan						Jumlah Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1 tahun			15.000.000	15.750.000	Lama	
<b>4 01 4.01.12</b>	<b>KECAMATAN MPUNDA</b>										<b>1.209.143.500</b>	<b>1.269.600.675</b>		
<b>4 01 4.01.12 01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas OPD</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan Administrasi</b>	<b>100%</b>					<b>674.944.947</b>	<b>708.692.194</b>		
4 01 4.01.12 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan			87.048.000,00	91.400.400	Lama	
4 01 4.01.12 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 Bulan			16.850.000,00	17.692.500	Lama	
4 01 4.01.12 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan			138.694.000,00	145.628.700	Lama	
4 01 4.01.12 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	12 Bulan			100.000.000,00	105.000.000	Lama	
4 01 4.01.12 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	12 Bulan			24.222.000,00	25.433.100	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.12 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	1 Paket		25.000.000,00	26.250.000	Lama		
4 01 4.01.12 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	1 Paket		15.000.000,00	15.750.000	Lama		
4 01 4.01.12 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor						Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	12 Bulan		12.223.100,00	12.834.255	Lama		
4 01 4.01.12 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 Bulan		48.780.000,00	51.219.000	Lama		
4 01 4.01.12 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 Bulan		177.967.847,00	186.866.239	Lama		
4 01 4.01.12 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 Bulan		29.160.000,00	30.618.000	Lama		
4 01 4.01.12 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%				289.928.053	304.424.456			
4 01 4.01.12 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket		122.013.000	128.113.650	Lama		
4 01 4.01.12 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 Tahun		93.749.053	98.436.506	Lama		
4 01 4.01.12 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 Tahun		50.392.000	52.911.600	Lama		
4 01 4.01.12 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 Tahun		23.774.000	24.962.700	Lama		
4 01 4.01.12 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	100%				100.000.000	105.000.000			
4 01 4.01.12 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama		
4 01 4.01.12 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen		10.000.000	10.500.000	Lama		
4 01 4.01.12 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen		50.000.000	52.500.000	Lama		
4 01 4.01.12 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen		30.000.000	31.500.000	Lama		
4 01 4.01.12 07	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</b>									44.270.500	46.484.025			
4 01 4.01.12 07 01	Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan						Pendataan dan pemutahiran data kjumlah dokumen ependudukan dan pertanahan	1 dok		22.412.000	23.532.600	Lama		
4 01 4.01.12 07 02	Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan						Jumlah Pendataan / Penyusunan Potensi Kecamatan serta Inventarisasi Proyek Masuk Kelurahan	1 dok		21.858.500	22.951.425	Lama		
4 01 4.01.12 16	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>									100.000.000	105.000.000			
4 01 4.01.12 16 01	Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah						Jumlah Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 tahun		100.000.000	105.000.000	Lama		
4 01 4.01.13	<b>KECAMATAN RABA</b>									1.306.947.000	1.372.294.350			
4 01 4.01.13 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas OPD	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%				786.947.000	826.294.350			
4 01 4.01.13 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 bulan		60.000.000,00	63.000.000	Lama		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.13 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	12 Bulan			25.000.000,00	26.250.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan			100.000.000,00	105.000.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	12 Bulan			45.000.000,00	47.250.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan			150.000.000,00	157.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	12 Bulan			65.000.000,00	68.250.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	1 Paket			30.000.000,00	31.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	12 Bulan			30.000.000,00	31.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 Bulan			40.000.000,00	42.000.000	Lama	
4 01 4.01.13 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 Bulan			201.947.000,00	212.044.350	Lama	
4 01 4.01.13 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah	12 Bulan			40.000.000,00	42.000.000	Lama	
4 01 4.01.13 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>240.000.000</b>	<b>252.000.000</b>		
4 01 4.01.13 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket			100.000.000	105.000.000	Lama	
4 01 4.01.13 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 Tahun			65.000.000	68.250.000	Lama	
4 01 4.01.13 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	1 Tahun			55.000.000	57.750.000	Lama	
4 01 4.01.13 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	1 Tahun			20.000.000	21.000.000	Lama	
4 01 4.01.13 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>					<b>Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin</b>	<b>0%</b>				<b>30.000.000</b>	<b>31.500.000</b>		
4 01 4.01.13 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	25 stel			20.000.000	21.000.000	Lama	
4 01 4.01.13 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga						Pengadaan Pakaian Olah Raga	25 stel			10.000.000	10.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	Kota Bima	<b>Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>					<b>100.000.000</b>	<b>105.000.000</b>		
4 01 4.01.13 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	2 Dokumen			10.000.000	10.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah aporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dokumen			10.000.000	10.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	5 Dokumen			50.000.000	52.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen			30.000.000	31.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 07	<b>PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH</b>										<b>110.000.000</b>	<b>115.500.000</b>		
4 01 4.01.13 07 05	Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah						Jumlah Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	1 tahun			110.000.000	115.500.000	Lama	
4 01 4.01.13 08	<b>PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU</b>										<b>40.000.000</b>	<b>42.000.000</b>		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN			
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target		
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)				
4 01 4.01.13 08 05	Koordinasi pembinaan wilayah dan organisasi sosial kemasyarakatan									Jumlah Koordinasi pembinaan wilayah dan organisasi sosial kemasyarakatan	1 tahun		40.000.000	42.000.000	Lama				
4 01 4.01.14	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>											44.705.892.300	6.450.246.915						
4 01 4.01.14 01	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	%Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran	100%				799.100.900	839.055.945					
4 01 4.01.14 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat									Terlaksananya administrasi surat menyurat	12 Bulan		85.000.000	89.250.000					
	Belanja Materai																		
	Belanja Surat Kabar/Majalah																		
	Belanja paket/pengiriman																		
	Honorarium Tenaga Operator Komputer																		
	Honor Security																		
	Honor pengadministrasi umum																		
	Jasa Iklan dan Publikasi																		
4 01 4.01.14 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik									Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan		44.400.000	46.620.000					
	Belanja Telpn																		
	Belanja Listrik (kantor, sumur bor, repiter/radio dan sumur bor lingkungan paruga)																		
4 01 4.01.14 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional									Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, stnk dan bpkb)	3 Kendaraan roda 4 & 3 Kendaraan roda 2		15.000.000	15.750.000					
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor (mobil dinas kalak, pickup, mobil komando, mobil dapur umum, mobil serba guna, mobil tangki dan sepeda motor 3 unit)																		
4 01 4.01.14 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan									Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan		83.000.000	87.150.000					
	Honor pengelola keuangan																		
4 01 4.01.14 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor									Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan		15.382.000	16.151.100					
	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih																		
	Jasa Cleaning service																		
4 01 4.01.14 01 10	Penyediaan alat tulis kantor									Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan		47.049.900	49.402.395					
	Belanja alat tulis kantor																		
4 01 4.01.14 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan									Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan		26.240.000	27.552.000					
	Belanja cetak (kuitansi, nota faktur, kertas berkop, map berlogo, blangko SPPD dll)																		
	Belanja penggandaan																		
4 01 4.01.14 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor									Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan	6 Jenis komponen		8.029.000	8.430.450					
	Belanja alat listrik																		
4 01 4.01.14 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga									Tersedianya peralatan makan dan minum (pecah belah)	1 Pelayanan		8.000.000	8.400.000					
	Belanja peralatan dapur																		
4 01 4.01.14 01 17	Penyediaan makanan dan minuman									Tersedianya penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan		27.000.000	28.350.000					
	Makan minum rapat																		
	Makan minum tamu																		
4 01 4.01.14 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah									Terlaksananya kegiatan rapat - rapat koordinasi di tingkat propinsi dan pusat	12 Bulan		400.000.000	420.000.000					
	Belanja perjalanan dinas luar daerah																		
4 01 4.01.14 01 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah												40.000.000	42.000.000					
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah																		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.14 02	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	% Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	70%					794.450.000	834.172.500		
4 01 4.01.14 02 03	Pembangunan gedung kantor						Tersedianya gedung kantor yang memadai	3 Paket			500.000.000	525.000.000		
	Perkerasan halaman kantor													
4 01 4.01.14 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Terpenuhiya perlengkapan gedung kantor	4 Jenis			21.150.000	22.207.500		
	Pengadaan kamera digital dan kamera CCTV													
4 01 4.01.14 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Terpenuhiya peralatan gedung kantor	3 Jenis			41.650.000	43.732.500		
	Pengadaan peralatan kantor (laptop, scanner, printer dll)													
4 01 4.01.14 02 10	Pengadaan mebeleur						Terpenuhiya kebutuhan mebeleur	3 Jenis			21.650.000	22.732.500		
	Pengadaan Lemari arsip													
	Pengadaan kursi (eselon II, eselon III, staf)													
4 01 4.01.14 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor							1 tahun			10.000.000	10.500.000		
	Pemeliharaan bangunan													
4 01 4.01.14 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Tersedianya kendaraan operasional yang memadai	12 Bulan			175.000.000	183.750.000		
	Pemeliharaan kendaraan (pickup, mobil dapur umum, rescue, mobil serbaguna, mobil sedan dan motor)													
	Bahan bakar minyak (mobil kalak, mobil komando, pickup dan motor) dan pelumas/oli													
4 01 4.01.14 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor						Tersedianya peralatan kantor yang memadai	12 Bulan			25.000.000	26.250.000		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin (laptop, AC, Komputer/PC, HT, printer dll)													
4 01 4.01.14 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	% Meningkatnya disiplin aparatur	90%					64.650.000	67.882.500		
4 01 4.01.14 03 03	Pengadaan pakaian kerja lapangan						Tersedianya pakaian kerja lapangan	30 Set			34.650.000	36.382.500		
4 01 4.01.14 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu						Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	30 Set			30.000.000	31.500.000		
	Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)													
4 01 4.01.14 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP Baik	75%					100.500.000	105.525.000		
4 01 4.01.14 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran						Tersedianya Dokumen laporan keuangan	1 Dokumen			8.000.000	8.400.000		
	Tim Pengumpul Data dan Penyusunan laporan keuangan semesteran													
4 01 4.01.14 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Tersedianya Laporan keuangan akhir tahun (Neraca, CALK, LRA)	3 Dokumen			12.000.000	12.600.000		
	Tim Pengumpul Data dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun													
4 01 4.01.14 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Tersedianya Dokumen Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD	5 Dokumen			55.000.000	57.750.000		
	Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Renja, RKA dan DPA)													
4 01 4.01.14 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Tersedianya Dokumen LAKIP, LPJ dan LPPD	3 Dokumen			25.500.000	26.775.000		
	Tim Pengumpul Data dan Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD)													
4 01 4.01.14 07	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana		SOP Penanggulangan Bencana	70%					70.000.000	73.500.000		



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.14 07 07	Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah				Tersedianya Produk hukum daerah Peraturan walikota tentang Rencana Kontigensi		Tersedianya Produk hukum daerah	2 Perwali			70.000.000	73.500.000		
	<b>Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah:</b>													
	Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian BUMD													
	Honorarium Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Corporate Social Responsibility (CSR)													
	Tim Penyusun Naskah Akademik													
	Belanja Alat Tulis Kantor													
	Belanja Pengandaan													
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat													
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah													
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah													
4 01 4.01.14 08	<b>Program Penyuluhan dan Penanggulangan Bencana</b>	<b>Penanggulangan Bencana</b>	<b>Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana</b>		<b>Prosentase Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>70%</b>					<b>1.061.391.400</b>	<b>1.114.460.970</b>		
4 01 4.01.14 08 01	Diklat dan penyuluhan kepada SKPD terkait				Terlatihnya SKPD terkait tentang Penyusunan Dokumen DALA	50 orang dari SKPD	Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana	50 SKPD			133.614.200	140.294.910		
	Honor panitia pelaksana													
	BBM untuk Lapangan													
	Penginapan untuk Narasumber pusat													
	Sewa Kendaraan untuk Praktek Lapangan													
	Pengadaan Handycam													
4 01 4.01.14 08 02	Diklat dan Penyuluhan Kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflet)				Terlatihnya 360 anggota masyarakat pendidikan (Kepala Sekolah SD,SMP, SMA)	150 Orang	Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana kepada masyarakat	360 Orang			131.724.000	138.310.200		
	Honor Panitia pelaksana													
	Honor Narasumber													
	Alat peraga simulasi													
	Makan minum diklat dan Simulasi													
4 01 4.01.14 08 03	Diklat dan penyuluhan kepada Tim Penanggulangan bencana(TRC, Tagana, Tim Sar, dll)				Terlatihnya 70 Tim Penanggulangan Bencana (TRC, Tagana, Tim SAR, Pemadam Kebakaran) untuk manajemen Kedaruratan Bencana	70 Orang	Peningkatan pemahaman tentang paradigma penanggulangan bencana kepada Tim PB	70 Orang			146.053.200	153.355.860		
4 01 4.01.14 08 04	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Penanggulangan bencana				Terkapasitasnya Forum PB, Relawan PBK, Pemerintah dan Swasta	4 Kelompok	Peningkatan peran PB bagi Pemerintah, Swasta dan masyarakat	4 Kelompok			650.000.000	682.500.000		
	Honor panitia pelaksana kegiatan													
	honor Tim Koordinasi SKPD													
	Honor Tim Koordinasi Perubahan iklim													
	Honor Tim Teknis penyusun dokumen													
	Transport Peserta kegiatan forum PRB													
	Honor Narasumber kegiatan FPRB													
	Honor Narasumber Nasional Keg TSBK													
	ATK (BPPD, TSBK, Forum PRB)													
	Makan minum (rapat persiapan, koordinasi, tim perubahan iklim, tim teknis, rapat TSBK, pertemuan forum, penghijaun HKM, sosialisasi/workshop)													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
	Perjalanan dinas dalam daerah (forum, koordinasi simulasi RS aman bencana kerjasama dengan MDMC, Pengorganisasian/koordinasi dgn TSBK untuk Penghijauan/HKM)													
	Perjalanan dinas luar daerah (BPBD dan forum)													
4 01	4.01.14 09		Program Penanggulangan Bencana/Pencegahan Bencana	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana	Prosentase Pengurangan Resiko Bencana	30%					300.000.000	315.000.000	
4 01	4.01.14 09 14		Mitigasi Bencana			Tersedianya sarana sumur resapan	30 titik	Berkurangnya genangan air hujan	30 titik			300.000.000	315.000.000	
	Belanja bahan bangunan sumur resapan													
	Belanja bahan bangunan penampung air hujan (PAH)													
4 01	4.01.14 10		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana			(%) Korban bencana skala kab/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%					55.000.000	57.750.000	
4 01	4.01.14 10 01		Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana			Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penanggulangan bencana	10 bh HT dan 4 Rak barang	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam upaya penanggulangan bencana	10 bh HT dan 4 Rak barang			55.000.000	57.750.000	
	Belanja sepatu boot													
	Rak penvimpanan barang													
4 01	4.01.14 11		Program Pengkajian Secara Cepat Dan Tepat	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana	Cakupan informasi bencana yang dapat disediakan	100%					85.000.000	89.250.000	
4 01	4.01.14 11 01		Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban			Tersedianya Laporan dampak bencana	1 Dokumen	Terpenuhinya informasi cakupan lokasi dan jumlah korban bencana	1 Dokumen			40.000.000	42.000.000	
	Honor Panitia pelaksana													
	Makan minum rapat TIM Kaji Cepat													
	Makan Minum Rapat TRC													
	Biaya perjalanan dinas dalam daerah													
4 01	4.01.14 11 02		Analisa Kerusakan sarana dan prasarana			Tersedianya Dokumen DALA	1Dok	Terpenuhinya Informasi dad data tentang kerusakan sarana prasara sebagai bahan koordinasi lintas sektor	1 Dok			45.000.000	47.250.000	
	Honor panitia pelaksana kegiatan													
	Honor tim Penyusun dan pengumpul data													
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah													
	Pengadaan Lap top													
4 01	4.01.14 12		Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana	Cakupan kebutuhan sandang pangan yang disediakan saat bencana	100%					150.000.000	157.500.000	
4 01	4.01.14 12 01		Pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi			Tersedianya air bersih dan sanitasi		Terukupinya kebutuhan air bersih dan sanitasi saat terjadi bencana kekeringan				100.000.000	105.000.000	
	Honor Panitia pelaksana kegiatan													
	Belanja bahan bakar operasional (solar dan premium mobil tangki)													
	Biaya perjalan dinas dalam daerah													
4 01	4.01.14 12 02		Pemenuhan sandang dan pangan			Tersedianya sandang pangan bagi korban bencana	3 Jenis	Terukupinya kebutuhan sandang pangan bagi korban bencana	3 Jenis			50.000.000	52.500.000	
	Makanan siap saji													
	Belanja paket sembako													

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01	4.01.14	13	Program Rehabilitasi	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana		Prosentase terlaksananya rehabilitasi pasca bencana	80%				433.000.000	454.650.000	
4 01	4.01.14	13	01	Monitoring dan evaluasi			Tersedianya dokumen monev	1 dok	TersedianyaDokumen Monev	1 dok		83.000.000	87.150.000	
				Monev pasca bencana										
				Pendampingan dana RR BNPB										
4 01	4.01.14	13	02	Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum					Pendampingan (AP) dana RR BNPB			350.000.000	367.500.000	
4 01	4.01.14	14	Program Rekonstruksi	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana		Prosentase jumlah sarana prasarana yang diperbaiki akibat bencana	80%				39.012.800.000	472.500.000	
4 01	4.01.14	14	01	Koordinasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			Prosentasi Jumlah Paket RR hasil DALA yang bisa dikoordinasikan dan masuk dalam RKA SKPD terkait dan Stakeholder lainnya	50%	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pasca bencana	50%		100.000.000	105.000.000	
4 01	4.01.14	14	02	Pembangunan Kembali Sarana dan Parasarana Umum					Pendampingan (AP) dana RR BNPB			350.000.000	367.500.000	
				observasi Lapangan Kegiatan dana luncuran sisa Hibah RR 2016										
				Koordinasi dan Konsultasi ke BNPB, Kementerian untuk hibah RR 2016 lanjutan										
				Jasa Pengawasan Dam Kapao (Lanjutan)										
				Rekonstruksi Dam Kapao Kel Lampe Lanjutan										
4 01	4.01.14	14	Pembangunan Rumah Masyarakat									38.562.800.000	40.490.940.000	
				Pengadaan Jalan Lingkungan Perumahan										
				Drainase Perumahan										
				IPAL Komunal										
				Jaringan air minum										
				PIU Perumahan										
4 01	4.01.14	15	Program Kesiapsiagaan	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana		Prosentase Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	70%				1.200.000.000	1.260.000.000	
4 01	4.01.14	15	01	Gladi tentang mekanisme tanggap darurat			Terlaksananya gladi tentang mekanisme tanggap darurat	50 Personil 2 kali	Terlatihnya personil PB sesuai Protap yang disusun	50 Personil 2 kali		100.000.000	105.000.000	
				Peringatan hari kesiapsiagaan										
				Belanja Alat Peraga Simulasi										
4 01	4.01.14	15	02	Pembentukan Kelurahan Tangguh			Tersedianya dokumen	13 Kelurahan	Terbentuknya kelurahan tangguh	13 Kelurahan		1.100.000.000	1.155.000.000	
				Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan										
				Honorarium Panitia Kegiatan Pelatihan Relawan										
				Honorarium Tim Pengumpul Data dan Penyusunan Naskah Dokumen Penelitian										
				Tim Fasilitator Kelurahan Tangguh di Kelurahan										
				ATK Fasilitasi Kelurahan										
				ATK Fasilitasi relawan										
				Alat peraga simulasi										
				Baju Kaos untuk Panitia dan Fasilitator Pelatihan										
4 01	4.01.14	16	Program Peringatan Dini	Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Ketangguhan Kota Terhadap Bencana		Jumlah Potensi Bencana yang diantisipasi	1 Dok				580.000.000	609.000.000	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.01.14 16 01	Mengamati gejala bencana				Tersedianya System peringatan dini yang terkoneksi	1 Paket	Tersedianya System peringatan dini yang terkoneksi	1 Paket			300.000.000	315.000.000		
	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan													
	Belanja pembuatan papan kontrol ketinggian muka air sungai													
	Belanja Meteran Ukur													
	Pemasangan Alat Peringatan Dini banjir													
4 01 4.01.14 16 02	Menyebarkan luaskan Informasi potensi bencana				Tersebarluasnya Informasi potensi bencana melalui media penyiaran	12 Paket Radio, 3 hari Media cetak, 300 Pamflet, 50 Lembar Kalender, 5 Buah Baliho, 500 Buku Saku, 150 l stiker, 10 unit papan rambu di daerah rawan	Tersebarluasnya informasi potensi bencana di Kota Bima	38 Kelurahan			180.000.000	189.000.000		
	Honor Panitia Pelaksana													
	Honorarium Operator Komunikasi													
	Belanja penyebaran informasi (radio sport, pamflet, kalender bencana, baliho, stiker, buku saku, papan rambu, jalur evakuasi/poster, pengumuman koran dll)													
	Perjalanan dinas dalam daerah penyebaran informasi													
4 01 4.01.14 16	Program peningkatan pengelolaan pergudangan dan logistik										50.000.000	52.500.000		
4 01 4.01.14 16 04	Manajemen Logistik dan pergudangan						Terpeliharanya dan tersedianya barang logistik dan pergudangan				50.000.000	52.500.000		
	Honor panitia Pelaksana kegiatan													
	Honor Tim Teknis perangkat Pusedal Ops dan PPIID													
	Jasa Perawatan alat kantor non komputer (water treatment, tenda besar, tenda keluarga, mesin genset, perahu karet, RIG, repiter, SSB dll)													
	Penggantian suku cadang kendaraan dinas/operasional (mobil tangki diatas 5 tahun, di bawah 5 tahun dan mobil dapur umum)													
	Belanja BBM (mobil tangki dan mobil dapur umum) dan pelumasa/oli													
<b>4 02</b>	<b>PENGAWASAN</b>										<b>3.400.000.000</b>	<b>3.570.000.000</b>		
<b>4 02</b>	<b>INSPEKTORAT</b>										<b>3.400.000.000</b>	<b>3.570.000.000</b>		
<b>4 01</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas OPD</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase Capaian Pelayanan Administrasi</b>	<b>100%</b>					<b>599.270.000</b>	<b>629.233.500</b>		
4 01 4.02.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat keluar	150 lembar			55.340.000,00	58.107.000	Lama	
							Materei yang tersedia selama 1 tahun	1100 lembar						
							Jasa pengiriman/paket	20 paket						
4 01 4.02.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bulan			19.000.000,00	19.950.000	Lama	
4 01 4.02.01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 Bulan			4.400.000,00	4.620.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 01 4.02.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik	12 Bulan			6.500.000,00	6.825.000	Lama	
4 01 4.02.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	12 Bulan			56.285.000,00	59.099.250	Lama	
4 01 4.02.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	100%			45.702.000,00	47.987.100	Lama	
4 01 4.02.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Jumlah perbaikan peralatan kerja yang tersedia	12 unit			7.000.000,00	7.350.000	Lama	
4 01 4.02.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	18 jenis			37.613.000,00	39.493.650	Lama	
4 01 4.02.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah cetakan dan penggandaan	125.000 lbr			25.750.000,00	27.037.500	Lama	
4 01 4.02.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur	6 media			12.000.000,00	12.600.000	Lama	
4 01 4.02.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	650 orang			38.750.000,00	40.687.500	Lama	
4 01 4.02.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah	12 Bulan			290.930.000,00	305.476.500	Lama	
4 01 4.02.01 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>					<b>50.330.000</b>	<b>52.846.500</b>		
4 01 4.02.01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor						Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	1 paket			16.330.000	17.146.500	Lama	
4 01 4.02.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	12 bln			6.000.000	6.300.000	Lama	
4 01 4.02.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12 Bulan			28.000.000	29.400.000	Lama	
4 01 4.02.01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin</b>	<b>0%</b>					<b>51.000.000</b>	<b>53.550.000</b>		
4 01 4.02.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya						Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	60 stel			30.000.000	31.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga						Jumlah Pakaian Olah Raga	60 stel			21.000.000	22.050.000	Lama	
4 01 4.02.01 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik</b>	<b>Meningkatkan Tata kelola Pemerintah yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Persentase pegawai yang telah mengikuti diklat struktural dan fungsional</b>	<b>30%</b>					<b>170.000.000</b>	<b>178.500.000</b>		
4 01 4.02.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal						Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan formal	10 orang			90.000.000	94.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 05 05	Pelaksanaan Penilaian AKJG						Jumlah penilaian AKJG	4 kegiatan			20.000.000	21.000.000	Lama	
4 01 4.02.01 05 06	Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah						Jumlah Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah	1 kali			60.000.000	63.000.000	Lama	
4 01 4.02.01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>persentase nilai SAKIP SKPD yang telah bernilai lebih dari B</b>	<b>90%</b>					<b>234.725.000</b>	<b>246.461.250</b>		
4 01 4.02.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	2 Dokumen			14.725.000,00	15.461.250	Lama	
4 01 4.02.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen			40.000.000,00	42.000.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	3 Dokumen			30.000.000,00	31.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 07	Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah						Jumlah dokumen Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	1 Dokumen			50.000.000,00	52.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 08	Review LAKIP Kota Bima						Jumlah dokumen Reviu LAKIP Kota Bima	1 Dokumen			50.000.000,00	52.500.000	Lama	
4 01 4.02.01 06 09	Review RKA						Jumlah dokumen Reviu RKA	1 Dokumen			50.000.000,00	52.500.000	Lama	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
								(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
4 01 4.02.01 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Opini BPK terhadap LKPD	WTP					90.000.000	94.500.000					
4 01 4.02.01 18 07	Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah							Jumlah dokumen Reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		90.000.000	94.500.000	Lama				
4 01 4.02.01 20	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	persentase SKPD yang telah menerapkan aspek lingkungan pengendalian dari unsur SPIP	80%					1.967.675.000	2.066.058.750					
4 01 4.02.01 20 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala							Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	70 SKPD		771.750.000,00	810.337.500	Lama				
4 01 4.02.01 20 02	Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah							Jumlah Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah	40 Kasus		270.100.000,00	283.605.000	Lama				
4 01 4.02.01 20 03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH							Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	2 kali		304.550.000,00	319.777.500	Lama				
4 01 4.02.01 20 05	inventarisasi hasil temuan pengawasan							Jumlah inventarisasi hasil temuan pengawasan	4 kegiatan		22.760.000,00	23.898.000	Lama				
4 01 4.02.01 20 06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan							Jumlah dokumen Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	12 Laporan		331.000.000,00	347.550.000	Lama				
4 01 4.02.01 20 07	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif							Jumlah Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	12 bulan		86.900.000,00	91.245.000	Lama				
4 01 4.02.01 20 08	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan							Jumlah dokumen Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	5 dokumen		27.015.000,00	28.365.750	Lama				
4 01 4.02.01 20 10	Pemantauan LHKASN							persentase ASN dan pejabat negara yang telah menyampaikan LHK	100%		153.600.000,00	161.280.000	Lama				
4 01 4.02.01 21	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	% Jumlah Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yg dapat meningkatkan kapabilitasnya sebagai APIP	98%					187.000.000	196.350.000					
4 01 4.02.01 21 01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan							jumlah pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	2 kali		65.000.000	68.250.000	Lama				
4 01 4.02.01 21 02	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja							jumlah APIP yang mengikuti pelatihan teknis pengawasan	10 Orang		64.000.000	67.200.000	Lama				
4 01 4.02.01 21 03	Bimtek pengawasan Operasional							jumlah APIP yang mengikuti bimtek pengawasan	11 orang		58.000.000	60.900.000	Lama				
4 01 4.02.01 22	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Opini BPK terhadap LKPD	WTP					25.000.000	26.250.000					
4 01 4.02.01 22 01	Penyusunan kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan							Jumlah dokumen Penyusunan kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan	2 Dokumen		25.000.000	26.250.000	Lama				
4 01 4.02.01 24	PROGRAM MENGINTENSIFKAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Penyampaian informasi publik	100%					25.000.000	26.250.000					
4 01 4.02.01 24 01	Pembentukan Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat							Pembentukan Unit khusus penanganan pengaduan masyarakat	1 kegiatan		25.000.000	26.250.000	Lama				
4 03	PERENCANAAN										6.816.100.050	7.156.905.053					
4 03 4.03.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										6.816.100.050	7.156.905.053					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 03 4.03.01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Reformasi Birokrasi dan	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah	Kota Bima	Meningkatnya kelancaran	100%					1.080.983.000	1.135.032.150		
4 03 4.03.01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	3560 surat			27.000.000	28.350.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	2 rekening			35.000.000	36.750.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Jumlah Kendaraan Dinas yang layak	10 unit			30.000.000	31.500.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan	11 orang			62.700.000	65.835.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Cakupan ruang kantor yang bersih	1 gedung			1.200.000	1.260.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Jumlah ATK	50 jenis			11.150.000	11.707.500	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	6 unit			58.500.000	61.425.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan	60000 lembar			52.100.000	54.705.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3 unit			10.744.000	11.281.200	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang Terpelihara	3 unit			94.100.000	98.805.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Jumlah Kegiatan makan minum rapat	8 media			65.500.000	68.775.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	40 orang			56.700.000	59.535.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60 kali			526.289.000	552.603.450	Kota Bima	
4 03 4.03.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	36 kali			50.000.000	52.500.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik	Kota Bima	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100%					276.828.500	290.669.925		
4 03 4.03.01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional						Tersedianya kendaraan operasional OPD	6 unit			60.000.000	63.000.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun			69.332.500	72.799.125	Kota Bima	
4 03 4.03.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor						Terpeliharanya Kendaraan operasional	1 Thn			73.500.000	77.175.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional						Berfungsinya dengan baik perlengkapan gedung kantor	24 Unit			73.996.000	77.695.800	Kota Bima	
4 03 4.03.01 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik	Kota Bima	Meningkatnya disiplin aparatur	100%					30.000.000	31.500.000		
4 03 4.03.01 03 06	Pengadaan Pakaian Olah Raga						Pengadaan Pakaian Olah Raga	50 stel			30.000.000	31.500.000	Kota Bima	
4 03 4.03.01 06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Tata kelolah Pemerintah yang baik	Kota Bima	Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	100%					281.332.000	295.398.600		
4 03 4.03.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD						Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Dokumen			75.683.000	79.467.150	Kota Bima	
4 03 4.03.01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semester						Jumlah dokumen pelaporan keuangan Semester	1 Dokumen			37.978.000	39.876.900	Kota Bima	
4 03 4.03.01 06 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun						Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			37.978.000	39.876.900	Kota Bima	
4 03 4.03.01 06 05	Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPD						Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja	4 Dokumen			65.393.000	68.662.650	Kota Bima	
4 03 4.03.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen laporan yang sesuai ke	3 Dokumen			64.300.000	67.515.000	Kota Bima	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 03 4.03.01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Indeks SAKIP/Nilai LKIP		Meningkatnya ketersediaan data base kelitbangan	30%				131.836.300	138.428.115			
4 03 4.03.01 15 08	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2D)						Jumlah Dokumen LP2D	1 Dok		102.253.300	107.365.965		Kota Bima	
4 03 4.03.01 15 10	Pelayanan Pendataan Ijin Penelitian						Jumlah Pengumpulan Data dan Penyusunan	30 Dokumen		29.583.000	31.062.150			
4 03 4.03.01 16	PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN				Terlaksananya kerjasama	50%				500.315.000	525.330.750			
4 03 4.03.01 16 13	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah						Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 laporan		105.000.000	110.250.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 16 16	Koordinasi Program NUSP - Phase 2						Laporan pelaksanaan koordinasi	1 laporan		97.665.000	102.548.250			
4 03 4.03.01 16 18	Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah						dokumen peninjauan kembali (PK) RTRW	1 Dokumen		297.650.000	312.532.500			
4 03 4.03.01 19	PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA				Terwujudnya perencanaan sektor-	100%				208.000.000	218.400.000			
4 03 4.03.01 19 12	Koordinasi dan Advokasi Percepatan Pembanguna Sanitasi Pemukiman (PPSP)						Jumlah rencana PPSP	1 Dokumen		88.000.000	92.400.000			
4 03 4.03.01 19 21	Perencanaan Pembangunan Kota Hijau						Jumlah koordinasi Perencanaan Kota Hijau	1Laporan		120.000.000	126.000.000			
4 03 4.03.01 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan									140.000.000	147.000.000			
4 03 4.03.01 20 01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana						Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaan	15 orang		60.000.000	63.000.000			
4 03 4.03.01 20 02	Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah						Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	3 kegiatan		-	-			
4 03 4.03.01 20 03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah						Jumlah peserta Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan	30 orang		80.000.000	84.000.000			
4 03 4.03.01 21	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				Meningkatnya keselarasan sasaran	100%				2.464.614.750	2.587.845.488			
4 03 4.03.01 21 05	Penyusunan rancangan RPJMD						Jumlah rancangan RPJMD yang memenuhi kaidah penyusunan	1 Dokumen		150.000.000	157.500.000		Baru	
4 03 4.03.01 21 06	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD						Jumlah Musrenbang RPJMAD	1 Dokumen		150.000.000	157.500.000		Baru	
4 03 4.03.01 21 07	Penetapan RPJMD						Jumlah RPJMAD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen		150.000.000	157.500.000		Baru	
4 03 4.03.01 21 08	Penyusunan rancangan RKPD						Jumlah rancangan RKPD yang memenuhi kaidah penyusunan	1 Dokumen		115.000.000	120.750.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD						Jumlah Musrenbang RKPD	1 Dokumen		375.000.000	393.750.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 10	Penetapan RKPD						Jumlah RKPD yang sesuai ketentuan	1 Dokumen		163.000.000	171.150.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 12	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)						Jumlah LKPJ Walikota	2 Dokumen		454.000.000	476.700.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan						TjumlahLaporan movev perencanaan pembangunan	5 Laporan		258.108.750	271.014.188		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 16	Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai						Jumlah koordinasi kegiatan DBH CT	4 Laporan		200.000.000	210.000.000		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 17	Pengendalian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Daerah						Jumlah Pengendalian tugas pembantua	2 laporan		33.550.000	35.227.500		Kota Bima	
4 03 4.03.01 21 21	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan Litbang						Jumlah dokumen Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal dan	1 Dokumen		83.526.000	87.702.300			
4 03 4.03.01 21 30	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan Kota Bima						Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Umum Penelitian dan Pengembangan	1 Dokumen		26.430.000	27.751.500			



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 03 4.03.01 21 33	E - Planning						aplikasi e-planning	1 kegiatan			100.000.000	105.000.000		
4 03 4.03.01 21 34	Updating E-Monev						Pengelolaan aplikasi e-monev	1 kegiatan			56.000.000	58.800.000		
4 03 4.03.01 21	Pengendalian Implementasi SAKIP						Dokumen cascading perencanaan kinerja SKPD	1 kegiatan			150.000.000	157.500.000		
4 03 4.03.01 22	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>					Terselenggaranya perencanaan					<b>245.950.000</b>	<b>258.247.500</b>		
4 03 4.03.01 22 13	Pembangunan Ekonomi Lokal						Pembangunan Ekonomi Lokal	1 Dokumen			86.650.000	90.982.500		Kota Bima
4 03 4.03.01 22 16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi						Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1 kegiatan			100.000.000	105.000.000		Kota Bima
4 03 4.03.01 22 17	Road Map Pengendalian Inflasi Daerah						Road Map Pengendalian Inflasi Daerah	1 dokumen			59.300.000	62.265.000		
4 03 4.03.01 23	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>					Terselenggaranya perencanaan sosial budaya					<b>935.665.500</b>	<b>982.448.775</b>		
4 03 4.03.01 23 01	Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan						Jumlah Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan	1 dokumen			75.250.000	79.012.500		
4 03 4.03.01 23 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya						Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	56 SKPD			309.164.500	324.622.725		
4 03 4.03.01 23 08	Penyusunan Profile Kesehatan						Jumlah Dokumen Profile Kesehatan	1 dokumen			96.913.000	101.758.650		
4 03 4.03.01 23 13	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan						Jumlah pengendalian kegiatan PKH	3 kali			85.759.000	90.046.950		
4 03 4.03.01 23 16	Sinkronisasi dan Review Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya						Jumlah renja SKPD yang selaras dengan RRPD dan Renstra SKPD	1 dokumen			92.239.000	96.850.950		
4 03 4.03.01 23 17	Koordinasi dan Advokasi Rumpun Kesra						Jumlah koordinasi pembangunan kesra	4 kegiatan			97.263.000	102.126.150		
4 03 4.03.01 23 18	Penyusunan Profil Kelurahan						Jumlah data profil kelurahan	1 dokumen			96.913.000	101.758.650		
4 03 4.03.01 23 28	Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						Jumlah dokumen Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan	4 dokumen			82.164.000	86.272.200		
4 03 4.03.01 24	<b>PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>					Terwujudnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan sektor prasarana wilayah dan SDA					<b>311.150.000</b>	<b>326.707.500</b>		
4 03 4.03.01 24 17	Koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah, SDA dan Ekonomi						Tersedianya renja SKPD yang selaras dengan RRPD dan Renstra SKPD	1 Dokumen			311.150.000	326.707.500		Kota Bima
4 03 4.03.01 28	<b>PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>					Terlaksananya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil					<b>209.425.000</b>	<b>219.896.250</b>		
4 03 4.03.01 28 06	Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)						terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)	2 kegiatan			49.985.000	52.484.250		Kota Bima
4 03 4.03.01 28 09	Penyusunan Data Base Kelitbangan						tersedianya detail kawasan wasata bahari terumbu karang kota bima	2 kegiatan			159.440.000	167.412.000		Kota Bima
4 04	<b>KEUANGAN</b>										<b>14.200.000.000</b>	<b>14.021.402.155</b>		
4 04 2.11.01	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>										<b>14.200.000.000</b>	<b>14.021.402.155</b>		
4 04 2.11.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	1					2.824.459.200	2.746.982.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
									(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
4 04 2.11.01 0 01	Penyediaan jasa surat menyurat						Tersedianya jasa surat menyurat	9000 materi dan 12 paket kiriman barang	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	72.720.000	75.000.000	Kegiatan sedang berjalan					
4 04 2.11.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik						Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	pembayaran telpon, air, dan listrik 12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	48.000.000	48.000.000	Kegiatan sedang berjalan					
4 04 2.11.01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional						Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	115 Service dan 53 STNK	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	66.700.000	66.700.000	Kegiatan sedang berjalan					
4 04 2.11.01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan						Tersedianya jasa administrasi keuangan sesuai kebutuhan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	469.752.000	469.752.000	Kegiatan sedang berjalan					
4 04 2.11.01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor						Tersedianya jasa kebersihan kantor	12 jenis alat dan bahan pembersih	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	15.950.000	15.950.000	Kegiatan sedang berjalan					
4 04 2.11.01 01 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja						Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	62 kali service	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	79.000.000	79.000.000	Kegiatan sedang berjalan					
4 04 2.11.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor						Tersedianya alat tulis kantor	1880 jmlh atk	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	200.750.000	200.750.000	Kegiatan sedang berjalan					
4 04 2.11.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	280000 lbr copy dan 700 eks jilid	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	259.750.000	259.750.000	Kegiatan sedang berjalan					

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 04 2.11.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						Tersedianya komponen instalasi listrik.penerangan bangunan kantor	284 jumlah alat listrik	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	6.000.000	6.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	24 peralatan kantor	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	219.080.000	219.080.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan						Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	57.000.000	57.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman						Tersedianya makanan dan minuman	90 kali	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	468.900.000	500.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah						Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	87 laporan perjalanan dinas	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	760.857.200	650.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah						Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	254 laporan perjalanan dinas	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	100.000.000	100.000.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%					312.872.800	312.872.800	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 02 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor						Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor	102 spanduk/umbul2, 1 AC, 2 Kamera	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	24.000.000	24.000.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN					PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
									HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
									(6)	(7)	(8)	(9)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)						
4 04 2.11.01 01 09	Pengadaan peralatan gedung kantor									Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	2 Papan Visual Elektronik, 4 Lemari Arsip Kaca	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	11.000.000	11.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 01 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional									Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53 kendaraan dinas	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	277.872.800	277.872.800	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 03	Program peningkatan disiplin aparatur					Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	100%				50.000.000	50.000.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4 04 2.11.01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu									Tersedianya pakaian tenun ikat	150 buah	Dukungan terhadap kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%	50.000.000	50.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	WTP				1.012.668.000	1.012.668.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
4 04 2.11.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD									Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen realisasi renja per triwulan dan 4 monev	Terlaksananya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	100%	71.975.000	71.975.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 06 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran									Tersusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis	2 dok laporan keuangan semesteran	laporan keuangan semesteran	100%	182.333.000	182.333.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran									Tersusunan laporan prognosis realisasi anggaran	1 dok laporan prognosis skpd, 1 dok laporan prognosis pemkot bima	laporan prognosis realisasi anggaran	100%	145.409.000	145.409.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 06 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun									Laporan Keuangan tepat Waktu	2 dok	Laporan Keuangan tepat Waktu	2 dok	445.926.000	445.926.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah									Tersusunnya Renja/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah	4 dokumen	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian dan penganggaran	100%	106.650.000	106.650.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD									Tersusunnya dokumen LAKIP dan LPPD	2 dokumen	dokumen LAKIP dan LPPD	100%	60.375.000	60.375.000	Kegiatan sedang berjalan		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN						
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
4 04 2.11.01 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Bima	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	WTP					5.784.300.000	5.702.334.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
					Persentase SP2D yang terbit tepat waktu	100%									
					Persentase Penyampaian LRA bulanan yang tepat waktu										
					Persentase Peningkatan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tiap Tahunnya	20%									
					Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Lain-lain yang sah tiap tahunnya	20%									
4 04 2.11.01 17 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 dokumen/ 1 raperda	Penetapan Raperda	100%	1.355.000.000	1.255.594.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 dokumen/ 1 raperda			233.000.000	232.464.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 perwali			1.014.705.000	945.876.500	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 raperda			384.000.000	383.876.500	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 perwali			170.000.000	163.438.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 raperda			120.000.000	117.738.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 12	Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 perwali			130.000.000	128.460.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 kali bintek	Meningkatnya	100%	95.000.000	95.959.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 20	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Pedoman Anggaran						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	1 dokumen	Penetapan Raperda	100%	212.545.000	212.545.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 21	Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerah						Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	12 bulan	Terwujudnya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan	100%	1.257.650.000	1.257.650.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 25	Pelaksanaan pelayanan SP2D						Persentase SPP dan SPM yang diteliti sesuai sisur	12 bulan	Persentase SPP dan SPM	12 bulan	96.000.000	96.000.000	Kegiatan sedang berjalan		
4 04 2.11.01 17 28	Pelaksanaan penata usaha gaji pegawai						Persentase SPP dan SPM yang diteliti sesuai sisur	12 laporan penatausahaa	Terlaksananya	12 laporan penatausahaa	300.000.000	247.180.000	Kegiatan sedang berjalan		

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
							Persentase SPP dan SPM yang Dikembalikan	n gaji pegawai	a penatausahaan gaji pegawai	n gaji pegawai				
4	04	2.11.01	17	30			Persentase LRA Bulanan SKPD Yang Berhasil di Rekon							
							Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	4 Laporan	Persentase SKPD yang melakukan Rekon Laporan Keuangan SKPD tepat Waktu	4 Laporan	81.400.000	81.306.000	Kegiatan sedang berjalan	
4	04	2.11.01	17	43			Pelaksanaan Proses TPTGR Aset/Barang Milik Daerah							
							Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	6 Sidang, 36 Kasus, 36 Dokumen	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	6 Sidang, 36 Kasus, 36 Dokumen	335.000.000	334.247.000	Kegiatan sedang berjalan	
4	04	2.11.01	17	44			Penyusunan Laporan DAK							
							Persentase objek Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Yang berhasil di Lakukan Rekon	4 laporan	Persentase objek Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Yang berhasil di Lakukan Rekon	4 laporan		75.000.000		
4	04	2.11.01	17	45			Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah							
							Persentase Lain-Lain PAD Yang Sah Yang berhasil di Lakukan Rekon	1 Dokumen	Persentase Lain-Lain PAD Yang Sah Yang berhasil di Lakukan Rekon	1 Dokumen		75.000.000		
4	04	2.11.01	48				<b>Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah</b>				<b>1.439.700.000</b>	<b>1.420.182.739</b>		
							<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>							
							<b>Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Aset SKPD</b>							
							<b>Kota Bima</b>							
							<b>Opini BPK atas audit laporan keuangan daerah</b>	<b>WTP</b>						
							<b>Persentase SKPD yang menyelesaikan Rekon Aset tervalidasi</b>	<b>100%</b>						<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
4	04	2.11.01	48	01			Penyusunan Sistem dan Prosedur Aset/Barang Daerah							
							Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Meningkatnya Akuntabilitas Perencanaan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	200.000.000	182.213.739	Kegiatan sedang berjalan	
4	04	2.11.01	48	02			Peningkatan manajemen aset/barang daerah							
							Meningkatnya Penatausahaan Aset SKPD	3 Dokumen	Meningkatnya Penatausahaan Aset SKPD	3 Dokumen	295.000.000	294.694.000	Kegiatan sedang berjalan	
4	04	2.11.01	48	03			Revaluasi/appraisal aset/barang daerah							
							Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	90 Lokasi dan 1 Laporan	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	90 Lokasi dan 1 Laporan	104.500.000	104.500.000	Kegiatan sedang berjalan	
4	04	2.11.01	48	04			Penyusunan Data Inventarisasi Aset Daerah							
							Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Rekon Aset SKPD	19 Dokumen	Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Rekon Aset SKPD	100%	235.000.000	234.227.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN				PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
								HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
								Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 04 2.11.01 48 05	Pendataan Ulang/ Pemutahiran Kepemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Pemerintah Kota Bima									Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan BMD	25 Lokasi	Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan BMD	25 Lokasi	93.000.000	92.843.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 48 06	Penyusunan Laporan Tahunan Aset/Barang Daerah									Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	1 dokumen	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian BMD	100%	94.000.000	93.725.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 48 08	Penyusunan Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima									Jumlah dokumen Analisa Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima	1 dokumen	tersedianya data kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan BMD Kota Bima	1 dokumen	92.500.000	92.350.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 48 09	Pemindah Tangan Barang Milik Daerah									Dokumen Pemindah Tangan Barang Milik Daerah	1 dokumen/ Laporan	tersedianya Dokumen Pemindah Tangan Barang Milik Daerah	1 dokumen/ Laporan	248.200.000	248.200.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 48 10	Bimbingan Teknis SIMDA BMD Online									Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan BMD	1 kali bimtek	Meningkatnya pengetahuan aparatur	100%	77.500.000	77.430.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik</b>	kota Bima	<b>Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Tiap Tahunnya</b>	<b>20%</b>					<b>2.776.000.000</b>	<b>2.776.362.616</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
4 04 2.11.01 49 01	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan redistribusi daerah							<b>Persentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Tiap Tahunnya</b>	<b>20%</b>								
4 04 2.11.01 49 02	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah									Persentase Data Pajak daerah Yang Di Rekam	9 Dokumen	Persentase Data Pajak daerah Yang Di Rekam	9 Dokumen	100.000.000	101.187.250	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 03	Sosialisasi dan Pembekalan Juru Pungut PBB									Persentase Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Terselesaikan	10 Dokumen	Persentase Pemeriksaan Pajak Daerah Yang Terselesaikan	10 Dokumen	190.000.000	188.185.700	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 04	Penagihan PBB pada Seluruh Kelurahan									Persentase Pengaduan dan Keberatan Yang Terselesaikan	38 kali	Meningkatnya pengetahuan juru pungut PBB	100%	79.000.000	78.849.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 05	Pendataan Ulang/ Pemutahiran Data PBB Sektor Perkotaan									Persentase Piutang Pajak daerah Yang Tertagih	57000 Wajib Pajak	Persentase Piutang Pajak daerah Yang Tertagih	57000 Wajib Pajak	546.000.000	545.937.500	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 05	Pendataan Ulang/ Pemutahiran Data PBB Sektor Perkotaan									Persentase Data Objek Pajak daerah Yang berhasil di Data	201 Objek pajak	Persentase Data Objek Pajak daerah Yang berhasil di Data	201 Objek pajak	300.000.000	305.630.000	Kegiatan sedang berjalan	

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 04 2.11.01 49 06	Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Sewa Aset Daerah						Persentase Piutang Retribusi daerah Yang Tertagih	2.186 Wajib Pajak	Persentase Piutang Retribusi daerah Yang Tertagih	2.186 Wajib Pajak	200.000.000	190.779.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 09	Pemeliharaan Data dan System PBB						Persentase Data Pajak daerah Yang Di Rekam	9 Dokumen	Persentase Data Pajak daerah Yang Di Rekam	9 Dokumen	310.000.000	300.565.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 11	Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						Persentase Pemeriksaan Retribusi Daerah Yang terselesaikan	3 Perwali	Bertambahnya pemahaman SKPD tentang pajak daerah dan retribusi daerah	3 Perwali	100.000.000	118.201.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 12	Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah						Terlaksananya kegiatan Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah	1 laporan kegiatan	Terlaksananya kegiatan Uji Petik Terhadap Objek Pajak dan Retribusi Daerah	1 laporan kegiatan	58.000.000	57.235.666	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 13	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah						Terlaksananya Objek Pajak dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	5 klasifikasi blok	Terlaksananya Objek Pajak dan Retribusi Daerah Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah	5 klasifikasi blok	113.000.000	112.003.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 14	Penetapan Objek Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Lain-lain yang Sah						Persentase Data Objek Pajak Daerah Yang di Lakukan Penilaian	230 wajib pajak	Persentase Data Objek Pajak Daerah Yang di Lakukan Penilaian	230 wajib pajak	200.000.000	199.654.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 15	Penatausahaan/Rekonsiliasi Pendapatan Daerah						Persentase SKPD Yang Berhasil Melakukan Rekon	1 Laporan	Persentase SKPD Yang Berhasil Melakukan	1 Laporan	492.000.000	491.093.000	Kegiatan sedang berjalan	
4 04 2.11.01 49 16	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah						Persentase Pengaduan dan Keberatan Yang Terselesaikan	4 Laporan	Persentase Pengaduan dan Keberatan Yang Terselesaikan	4 Laporan	88.000.000	87.042.500	Kegiatan sedang berjalan	
4 05	<b>KEPEGAWAIAN</b>										<b>5.595.285.000</b>	<b>5.875.049.250</b>		
4 05 4.05.07	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>							<b>5.595.285.000</b>			<b>5.595.285.000</b>	<b>5.875.049.250</b>		
4 05 4.05.07 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	<b>Persentase tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Optimal</b>	<b>100%</b>					<b>960.954.600</b>	<b>1.009.002.330</b>		



KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA				PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT						HASIL KEGIATAN	
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target					Tolak Ukur	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 05	4.05.07	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah surat keluar	12 bln		100.000.000	105.000.000			
4 05	4.05.07	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Jumlah sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik yang memadai.	12 bln		60.000.000	63.000.000			
4 05	4.05.07	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			Jumlah kendaraan dinas dengan dokumen yang lengkap dengan kondisi baik.	12 bln		20.000.000	21.000.000			
4 05	4.05.07	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan SKPD yang memadai	12 bln		57.000.000	59.850.000			
4 05	4.05.07	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln		35.000.000	36.750.000			
4 05	4.05.07	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	12 bln		63.000.000	66.150.000			
4 05	4.05.07	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			Jumlah cetakan dan penggandaan	12 bln		91.000.000	95.550.000			
4 05	4.05.07	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			Jumlah penyediaan penerangan lingkungan/bangunan kantor yang memadai dan representatif	12 bln		20.954.600	22.002.330			
4 05	4.05.07	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Jumlah media informasi dan bahan bacaan aparatur.	12 bln		30.000.000	31.500.000			
4 05	4.05.07	01	17	Penyediaan makanan dan minuman			Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat	12 bln		80.000.000	84.000.000			
4 05	4.05.07	01	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah.	12 bln		320.000.000	336.000.000			
4 05	4.05.07	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah			Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah.	12 bln		84.000.000	88.200.000			
4 05	4.05.07	02		<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	<b>Persentase Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>70%</b>		<b>313.480.400</b>	<b>329.154.420</b>		
4 05	4.05.07	02	05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional			Jumlah pengadaan Kendaraan	3 unit		45.000.000	47.250.000			
4 05	4.05.07	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor			Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor	10 Unit		93.390.200	98.059.710			
4 05	4.05.07	02	10	Pengadaan mebeleur			Jumlah Pengadaan mebeleur	10 Unit		23.390.200	24.559.710			
4 05	4.05.07	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang representatif dan memadai	1 Gedung		30.500.000	32.025.000			
4 05	4.05.07	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai	12 Bulan		91.200.000	95.760.000			
4 05	4.05.07	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor			Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor	5 Unit		10.000.000	10.500.000			
4 05	4.05.07	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			Jumlah pemeliharaan peralatan kantor yang memadai	10 Unit		20.000.000	21.000.000			
4 05	4.05.07	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	<b>Porsentase Capaian Peningkatan Disiplin aparatur</b>	<b>90%</b>		<b>195.850.000</b>	<b>205.642.500</b>		
4 05	4.05.07	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	47 Steel		45.850.000	48.142.500			
4 05	4.05.07	03	07	Sidak PNS dan Honorer Daerah			Jumlah Sidak PNS dan Honorer Daerah	4 Kali		150.000.000	157.500.000			
4 05	4.05.07	06		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Kota Bima	<b>Persentase tersedianya Sistem Pelaporan Kinerja</b>	<b>70</b>		<b>140.000.000</b>	<b>147.000.000</b>		
4 05	4.05.07	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Jumlah laporan akuntabilitas dan kinerja SKPD yang tersusun	1 Dok		10.000.000	10.500.000			
4 05	4.05.07	06	02	Penyusunan laporan keuangan semesteran			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersusun	2 Dok		20.000.000	21.000.000			
4 05	4.05.07	06	03	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran			Jumlah laporan prognosis SKPD yang tersusun	1 Dok		10.000.000	10.500.000			
4 05	4.05.07	06	04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersusun	1 Dok		20.000.000	21.000.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 05 4.05.07 06 05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah						Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	5 Dok		50.000.000	52.500.000			
4 05 4.05.07 06 06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD						Jumlah dokumen LPJ dan LPPD SKPD (Revisi RENJA dan RENSTRA) yang tersusun	3 Dok		30.000.000	31.500.000			
<b>1 05 1.20.07 45</b>	<b>Program Pendidikan Kedinasan</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Pegawai yang telah mengikuti diklat teknis dan penjelesaian struktural</b>	<b>120 PNS</b>				<b>1.955.000.000</b>	<b>2.052.750.000</b>			
4 05 4.05.07 45 01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis						Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Teknis	347 Org		400.000.000	420.000.000			
4 05 4.05.07 45 02	Pendidikan Penjenjangan Struktural						Jumlah peserta Pendidikan Penjenjangan Struktural	75 Orang		1.490.000.000	1.564.500.000			
4 05 4.05.07 45 06	Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme						Jumlah peserta Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme	80 Orang		65.000.000	68.250.000			
<b>4 20 4.05.07 47</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>									<b>110.000.000</b>	<b>105.355.000</b>			
4 20 4.05.07 01 06	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah						Jumlah peserta Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS			110.000.000	105.355.000			
<b>4 05 4.05.07 47</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	<b>Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik</b>	<b>Kota Bima</b>	<b>Penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi</b>					<b>1.920.000.000</b>	<b>2.016.000.000</b>			
4 05 4.05.07 47 01	Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS						Jumlah dokumen Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS	1 dok		360.000.000	378.000.000			
4 05 4.05.07 47 02	Seleksi penerimaan calon PNS						Jumlah peserta Seleksi penerimaan calon PNS	1000 org		200.000.000	210.000.000			
4 05 4.05.07 47 03	Penempatan PNS						Jumlah Penempatan PNS	675 Org		100.000.000	105.000.000			
4 05 4.05.07 47 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS						Jumlah Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	100%		180.000.000	189.000.000			
4 05 4.05.07 47 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah						Jumlah dokumen Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	1 dok		50.000.000	52.500.000			
4 05 4.05.07 47 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS						Jumlah peserta Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	1 dok		57.000.000	59.850.000			
4 05 4.05.07 47 07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar						Jumlah peserta Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	40 org		20.000.000	21.000.000			
4 05 4.05.07 47 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi						Jumlah Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	3 Org		30.000.000	31.500.000			
4 05 4.05.07 47 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS						Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Kasus		157.000.000	164.850.000			
4 05 4.05.07 47 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas						Jumlah Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	30 Org		315.000.000	330.750.000			
4 05 4.05.07 47 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan						Jumlah dokumen Monitoring, evaluasi dan pelaporan	2 Dokumen		13.000.000	13.650.000			
4 05 4.05.07 47 18	Pelaksanaan Analisis Beban Kerja PNS						Jumlah dokumen Analisis Beban Kerja PNS	1 dok		-	0			
4 05 4.05.07 47 20	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line						Jumlah peserta Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line	250 Org		120.000.000	126.000.000			
4 05 4.05.07 47 21	Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun						Jumlah Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun	185 Org		95.000.000	99.750.000			
4 05 4.05.07 47 22	Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural						Jumlah dokumen Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat Struktural	1 Dok		60.000.000	63.000.000			
4 05 4.05.07 47 23	Penyusunan Gaji Berkala PNS						Jumlah Penyusunan Gaji Berkala PNS	281 Org		48.000.000	50.400.000			
4 05 4.05.07 47 24	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)						Jumlah Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	105 Org		65.000.000	68.250.000			

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	PRIORITAS DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	LOKASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAAN MAJU	JENIS PROG & KEG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/OUTPUT		HASIL KEGIATAN					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
4 05 4.05.07 47 25	Pengelolaan, pengurusan, dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum						Jumlah Pengelolaan, pengurusan, dan penerbitan Karis/Karsu/Karpeg/Taspen/Tapperum	325 Org			50.000.000	52.500.000		
4 05 4.05.07 47 25	Pelaksanaan Ujian Kompetensi Pejabat Struktural						Jumlah pejabat struktural yang mengikuti ujian kompetensi	100 orang			200.000.000	210.000.000		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2018 merupakan panduan dan pedoman yang memberikan gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2018. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen perencanaan baik berdasarkan jangka waktu waktu maupun berdasarkan hirarki dan jenjang pemerintahan. Dalam artian bahwa RKPD merupakan simpul keterpaduan antara RPJMD Kota dan Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renja SKPD dan hasil musrenbang kelurahan dan kecamatan sebagai produk perencanaan tahunan sektoral dan kewilayahan serta mengintegrasikan prioritas dan isu strategis nasional yang tertuang dalam RKP serta isu-isu strategis propinsi NTB. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2018 dimulai dengan dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal tahun 2017 mulai kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Proses Musrenbang tersebut sebagai bagian proses demokratisasi mekanisme perencanaan daerah memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan mengajukan usulan, saran maupun rekomendasi pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian maka dokumen RKPD tahun 2018 secara substansi adalah dokumen yang memaduserasikan antara kebutuhan aktual masyarakat dengan program/kegiatan SKPD sebagai implementasi visi dan misi Pemerintah Kota Bima.

Melalui proses seperti itu diharapkan substansi RKPD Kota Bima tahun 2018 ini nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi global beserta dampak –dampak yang ditimbulkannya maupun perkembangan internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah, terutama akibat dinamika politik dan strategi pembangunan di tingkat Nasional dan Daerah.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini disusun agar dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen-dokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bisa terwujud sinergi di antara dokumen-dokumen yang ada. Dokumen RKPD Tahun 2018 ini akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bima. Segala masukan, evaluasi maupun rekomendasi dari semua pihak masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima di masa-masa mendatang.

